PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KOTA MEDAN

TAHUN 2023

WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021;

b. bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan di tingkat pusat telah memberikan pengaruh terhadap dokumen RPJMD Kota Medan, serta berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam bentuk Dokumen Perubahan RPJMD yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA (7-164/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP. 19700622 200701 2 031

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen 9
1.3.1. RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan 10
1.3.2. RPJMD Kota Medan dengan Renstra Perangkat Daerah 11
1.3.3. RPJMD Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 11
1.3.4. RPJMD Kota Medan dengan KLHS RPJMD 12
1.4. Maksud dan Tujuan 12
1.4.1. Maksud 12
1.4.2. Tujuan 13
1.5. Sistematika Penulisan 13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 16
2.1. Aspek Geografis dan Demografis 16
2.1.1. Geografi 16
2.1.2. Kondisi Demografis 50
2.1.3. Potensi Sumber Daya 58
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 59
2.2.1. Pertumbuhan PDRB 59
2.2.2. Struktur Ekonomi 64
2.2.3. PDRB Per Kapita 65
2.2.4. Laju Inflasi 66
2.2.5. Ekspor dan Impor 68
2.2.6. Indeks Gini 70
2.2.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan 71
2.2.8. Penduduk Miskin 73
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia 74
2.2.10. Angka Melek Huruf 76
2.2.11. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah 76
2.2.12. Angka Partisipasi Kasar 77
2.2.13. Angka Partisipasi Murni 78
2.2.14. Angka Harapan Hidup 79
2.2.15. Penanganan Balita Gizi Buruk dan Stunting 81
2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 81
2.2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 82
2.2.18. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 83
2.2.19. Rasio Penduduk Yang Bekerja 85
2.2.20. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 86
2.2.21. Tingkat Kemandirian Daerah 87
2.2.22. Opini BPK 88
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 88
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 88
2.3.2. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita 89
2.3.3. Angka Kriminalitas 90
2.3.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 91
2.3.5. Fokus Iklim Berinvestasi 94
2.3.6. Fokus Sumber Daya Manusia 99

2.4. Aspek Pelayanan Umum 102
2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 102
2.4.1.1. Urusan Pendidikan 102
2.4.1.2. Urusan Kesehatan 107
2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 114
2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 115
2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 117
2.4.1.6. Urusan Sosial 122
2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 124
2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja 124
2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Perlindungan Anak 126
2.4.2.3. Urusan Ketahanan Pangan 128
2.4.2.4. Urusan Pertanahan 129
2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup 129
2.4.2.6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. 138
2.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 139
2.4.2.8. Urusan Perhubungan 140
2.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika 141
2.4.2.10. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 142
2.4.2.11. Urusan Penanaman Modal 143
2.4.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 144
2.4.2.13. Urusan Statistik 146
2.4.2.14. Urusan Persandian 146
2.4.2.15. Urusan Kebudayaan 147
2.4.2.16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan 148
2.4.3. Urusan Pilihan 150
2.4.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata 150
2.4.3.2. Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan 151
2.4.3.3. Urusan Perdagangan 152
2.4.3.4. Urusan Perindustrian 153
2.4.4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 154
2.4.4.1. Sekretariat Daerah 154
2.4.4.2. Pengawasan 155
2.4.4.3. Perencanaan 156
2.4.4.4. Keuangan 157
2.4.4.5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 158
2.4.4.6. Penelitian dan Pengembangan 158
2.4.4.7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 159
2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 160
2.6. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 170
2.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 182
2.8. Arahan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 184
2.8.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Jangka Panjang 184
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 222
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 222
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 223
3.1.2. Pendapatan Daerah 223
3.1.3. Belanja Daerah 240
3.1.4. Pembiayaan Daerah 247
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 259

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 260
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 260
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 262
3.3. Kerangka Pendanaan 262
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah 265
3.3.2. Pendapatan Transfer 268
3.3.3. Kebijakan Pendapatan Daerah 269
3.3.4. Proyeksi Belanja Daerah 271
3.3.5. Kebijakan Belanja Daerah 273
3.3.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah 273
3.3.7. Kebijakan Pembiayaan Daerah 275

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 277
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota 277
4.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib 280
4.1.1.1. Urusan Pendidikan 280
4.1.1.2. Urusan Kesehatan 281
4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 282
4.1.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 283
4.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ... 283
4.1.1.6. Urusan Sosial 284
4.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 285
4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja 285
4.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 286
4.1.2.3. Urusan Pangan 286
4.1.2.4. Urusan Pertanahan 287
4.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup 288
4.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 288
4.1.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 289
4.1.2.8. Urusan Perhubungan 290
4.1.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika 290
4.1.2.10. Urusan Persandian 291
4.1.2.11. Urusan Koperasi dan UKM 291
4.1.2.12. Urusan Penanaman Modal 291
4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga 292
4.1.2.14. Urusan Statistik 292
4.1.2.15. Urusan Kebudayaan 293
4.1.2.16. Urusan Perpustakaan 293
4.1.2.17. Urusan Kearsipan 294
4.1.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Pilihan 294
4.1.3.1. Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan .. 294
4.1.3.2. Urusan Perdagangan 295
4.1.3.3. Urusan Pariwisata 295
4.1.3.4. Urusan Perindustrian 295
4.1.4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Penunjang 296
4.1.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan 296
4.1.4.2. Urusan Perencanaan 296
4.1.4.3. Urusan Keuangan 296
4.1.4.4. Urusan Kepengawasan 297
4.1.4.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan 297

4.1.4.6. Urusan Kepegawaian 297
4.2. Isu Strategis 297
4.2.1. Isu Strategis Pertumbuhan Berkelanjutan 298
4.2.2. Isu Strategis Perekonomian Global 300
4.2.3. Isu Strategis ASEAN 302
4.2.4. Isu Strategis Perkembangan Teknologi 303
4.2.5. Isu Nasional Pemerintahan 304
4.2.5.1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3) 304
4.2.5.2. RPJMN 2020-2024 305
4.2.5.3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 306
4.2.5.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 306
4.2.5.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 307
4.2.5.6. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara 307
4.2.5.7. Isu Strategis Kota Medan 317

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 325
5.1. Visi 325
5.2. Misi 326
5.3. Tujuan dan Sasaran 330
5.4. Cascading Kinerja 349

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 357
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 357
6.2. Tema Pembangunan 383
6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan 400
6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan 403
6.4.1. Kawasan Strategis Kota 403
6.4.2. Kawasan Peruntukan Industri 405
6.4.3. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa 407
6.4.4. Kawasan Transportasi 408
6.4.5. Kawasan Perkantoran 409
6.4.6. Kawasan Permukiman 410
6.5. Penyelarasan RPJMD dengan RTRW Kota Medan 413
6.6. Kegiatan Strategis 440
6.7. Program Pembangunan Daerah 448

BAB VII KERANGKA PENDANAAN 488
7.1. Kerangka Pendanaan Daerah 488
7.2. Program Perangkat Daerah 489
7.3. Kerangka Pendanaan Lainnya 492

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ... 589
8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan 589

BAB IX PENUTUP 647

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	10
Gambar 2.1.	Wilayah Administrasi Kota Medan	19
Gambar 2.2.	Peta Topografi Kota Medan	20
Gambar 2.3.	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan Tahun 2022	23
Gambar 2.4.	Peta Geologi Kota Medan	26
Gambar 2.5.	Distribusi Hidrogeologi Litologi Aquifer di Kota Medan	28
Gambar 2.6.	Distribusi Hidrogeologi Produktivitas Aquifer di Kota Medan	29
Gambar 2.7.	Peta Hidrogeologi Kota Medan	30
Gambar 2.8.	Peta DAS Kota Medan	33
Gambar 2.9.	Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan	34
Gambar 2.10.	Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Medan	35
Gambar 2.11.	Peta Risiko Banjir Kota Medan	38
Gambar 2.12.	Peta Risiko Banjir Bandang di Kota Medan	40
Gambar 2.13.	Grafik Kejadian Angin Puting Beliung Kota Medan	42
Gambar 2.14.	Peta Risiko Cuaca Ekstrim di Kota Medan	43
Gambar 2.15.	Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Medan	45
Gambar 2.16.	Peta Risiko Likuifaksi di Kota Medan	47
Gambar 2.17.	Peta Risiko Tsunami di Kota Medan	49
Gambar 2.18.	Peta Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Medan	53
Gambar 2.19.	Penduduk Berdasdarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	57
Gambar 2.20.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Medan	63
Gambar 2.21.	Perbandingan Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022	67
Gambar 2.22.	Rasio Gini Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022	71
Gambar 2.23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	72
Gambar 2.24.	Kondisi Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2018-2022	73
Gambar 2.25.	Perbandingan Persentase Kemiskinan oleh Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional	74
Gambar 2.26.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan Tahun 2018-2022	75
Gambar 2.27.	Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	78
Gambar 2.28.	Angka Partisipasi Murni di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	79
Gambar 2.29.	Angka Harapan Hidup Kota Medan Tahun 2018- 2022	80
Gambar 2.30.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022	82
Gambar 2.31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Medan Tahun 2018-2022	83
Gambar 2.32.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan Tahun 2018-2022	85
Gambar 2.33.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Medan Tahun 2018-2022	87
Gambar 2.34.	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kota Medan Tahun 2018-2022	89
Gambar 2.35.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kota Medan Tahun 2018-2022	100
Gambar 2.36.	*Dependency Ratio* Kota Medan Tahun 2018-2022	101
Gambar 2.37.	Emisi Kota Medan Tahun 2018-2021	138
Gambar 3.1.	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2018-2022	225
Gambar 3.2.	Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022	227
Gambar 3.3.	Realisasi Pendapatan Transfer Kota Medan 2018 – 2022	236
Gambar 3.4.	Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan 2018-2022	237

Gambar 3.5. Distribusi Komposisi Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2018-2022 238
Gambar 3.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Kota Medan yang Sah Periode 2018-2022 239
Gambar 3.7. Pergerakan Target dan Realisasi Belanja Kota Medan Tahun 2018-2022 241
Gambar 3.8. Struktur Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022242
Gambar 3.9. Tren Pergerakan Realisasi Belanja Operasi dan Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 244
Gambar 3.10. Struktur Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 245
Gambar 3.11. Pergerakan Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Medan tahun 2018-2022 248
Gambar 3.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Medan 2018-2022 . 249
Gambar 3.13. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Medan 2018-2022 250
Gambar 3.14. Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan 2018-2022 252
Gambar 3.15. Proporsi Kewajiban dan Ekuitas dalam Pembiayaan Aset Kota Medan Tahun 2018 - 2022 258
Gambar 4.1. Tujuan Sustainable Development Growths 299
Gambar 4.2. Agenda Pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 306
Gambar 4.3. Cascading Misi 1 – Medan Berkah 350
Gambar 4.4. Cascading Misi 2 – Medan Maju 351
Gambar 4.5. Cascading Misi 3 – Medan Bersih 352
Gambar 4.6. Misi 4 – Medan Membangun 353
Gambar 4.7. Misi 5 – Medan Kondusif 354
Gambar 4.8. Misi 6 – Medan Inovatif 355
Gambar 4.9. Misi 7 – Medan Beridentitaasdasd 356
Gambar 6.1. Tema Pembangunan Kota Medan 383
Gambar 6.2. Peta Kawasan Peruntukan Industri 406
Gambar 6.3. Peta Kawasan Perdagangan dan Jasa 408
Gambar 6.4. Peta Kawasan Transportasi 409
Gambar 6.5. Peta Kawasan Perkantoran 410
Gambar 6.6. Peta Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum 412
Gambar 6.7. Peta Program Perwujudan Pusat Pelayanan 416
Gambar 6.8. Peta Program Perwujudan Sistem Transportasi 418
Gambar 6.9. Peta Program Perwujudan Jaringan Energi 419
Gambar 6.10. Peta Program Perwujudan Sistem SPAM dan Persampahan 420
Gambar 6.11. Peta Program Perwujudan Sistem Drainase 422
Gambar 6.12. Peta Program Perwujudan Kawasan Lindung 424
Gambar 6.13. Peta Program Perwujudan Kawasan Industri 427
Gambar 6.14. Peta Program Perwujudan Kawasan Permukiman dan SPU 428
Gambar 6.15. Peta Program Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa 430

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Keluarahan, dan Lingkungan	17
Tabel 2.2.	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan	19
Tabel 2.3.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan	21
Tabel 2.4.	Persentase Kota Medan dalam DAS	31
Tabel 2.5.	Kejadian Banjir Kota Medan	36
Tabel 2.6.	Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2018-2022	50
Tabel 2.7.	Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2022	51
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2022	55
Tabel 2.9.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	60
Tabel 2.10.	PDRB Seri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	61
Tabel 2.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2018-2022 (Persen)	62
Tabel 2.12.	Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2018 – 2022 (Persen)	65
Tabel 2.13.	PDRB Per Kapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018 - 2022	66
Tabel 2.14.	Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2018-2022 (Persen)	66
Tabel 2.15.	Nilai Ekspor dan Impor Melalui Wilayah Kota Medan Tahun 2018 – 2022	68
Tabel 2.16.	Angka Melek Huruf Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (persen)	76
Tabel 2.17.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2018-2022	77
Tabel 2.18.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	81
Tabel 2.19.	Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Tahun 2018 – 2022	84
Tabel 2.20.	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Medan Tahun 2018 – 2022	86
Tabel 2.21.	Skor Pola Pangan Harapan di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	86
Tabel 2.22.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Medan Tahun 2018 - 2022	88
Tabel 2.23.	Jumlah Jenis Tindakan Pidana Tahun 2018 - 2020	90
Tabel 2.24.	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2018 - 2020	90
Tabel 2.25.	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap Kota Medan Tahun 2018 - 2022	91
Tabel 2.26.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	92
Tabel 2.27.	Persentase Rumah Layak Huni di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	93
Tabel 2.28.	Kawasan Kumuh di Kota Medan Tahun 2018 - 2022	93
Tabel 2.29.	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMA Kota Medan Tahun 2018-2022	97
Tabel 2.30.	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN Kota Medan Tahun 2018-2022	98
Tabel 2.31.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	103
Tabel 2.32.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	104
Tabel 2.33.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	106
Tabel 2.34.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	107

Tabel 2.35.	Jumlah Kasus Penyakit Di Kota Medan Tahun 2019-2022	108
Tabel 2.36.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	109
Tabel 2.37.	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Medan pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022	112
Tabel 2.38.	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan	114
Tabel 2.39.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	115
Tabel 2.40.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	116
Tabel 2.41.	Jumlah Pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan Tahun 2018-2022	117
Tabel 2.42.	Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan	119
Tabel 2.43.	Jumlah Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan Tahun 2018-2022	121
Tabel 2.44.	Status dan Sebaran Peredaran Narkoba di Kota Medan	121
Tabel 2.45.	Jumlah Unjuk Rasa yang Terjadi di Kota Medan	122
Tabel 2.46.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	123
Tabel 2.47.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	125
Tabel 2.48.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	126
Tabel 2.49.	Data Kasus Kekerasan Tahun 2017 – 2022	127
Tabel 2.50.	Hasil Evaluasi Kota Layak Anak Kota Medan Tahun 2018 – 2022	128
Tabel 2.51.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022	129
Tabel 2.52.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022	129
Tabel 2.53.	Timbulan Sampah Kota Medan Tahun 2018-2022	136
Tabel 2.54.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	138
Tabel 2.55.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	140
Tabel 2.56.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022	142
Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	142
Tabel 2.57.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	144
Tabel 2.58.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2018 - 2022	144
Tabel 2.59.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Satistik Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	146
Tabel 2.60.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	148
Tabel 2.61.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	149
Tabel 2.62.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022	150
Tabel 2.63.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022	152

Tabel 2.64. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 153
Tabel 2.65. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 153
Tabel 2.66. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 154
Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2018-2022 155
Tabel 2.68. Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan 155
Tabel 2.69. Level Maturitas SPIP dan APIP Kota Medan 156
Tabel 2.70. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2018-2022 157
Tabel 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2018 – 2022 157
Tabel 2.72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 158
Tabel 2.73. Cakupan Penelitian Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan Tahun 2018-2022 159
Tabel 2.74. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2018-2022 160
Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 162
Tabel 2.76. Pencapaian program SDGs Januari-Desember Tahun 2022 172
Tabel 2.77. Target dan Realisasi Capaian SPM Kota Medan Tahun 2020 182
Tabel 2.78. Capaian Indikator dalam RPJMD Sampai Periode RPJMD-3 (2016-2021) 192
Tabel 2.79. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2018-2022 194
Tabel 2.80. Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2022 200
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan 224
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daera (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2022 (Rp milyar) 228
Tabel 3.3. Kontribusi Komponen PAD Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Persen) 230
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 231
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 232
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 233
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 234
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp Milyar) 235
Tabel 3.9. Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis Belanja Modal Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 246
Tabel 3.10. Surplus (Defisit) Riil Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar) 251
Tabel 3.11. Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rupiah) 254
Tabel 3.12. Rasio Keuangan Daerah Kota Medan 2018 - 2022 258
Tabel 3.13. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 – 2026 (Rp. Milyar) 267
Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2022 – 2026 (Rp) 272
Tabel 3.15. Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Medan Tahun 2022 – 2026 (Rp) 274

Tabel 5.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 328
Tabel 5.2. Keselarasan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 329
Tabel 5.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026 331
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan 359
Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan Per Tahun 386
Tabel 6.3. Indikasi Program Utama (IPU) RTRW Kota Medan Tahap I (2022-2027) 431
Tabel 6.4. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Medan 450
Tabel 7.1. Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 (Milyar Rupiah) 489
Tabel 7.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara 491
Tabel 8.1. Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kota Medan Tahun 2021-2026 590
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Medan Tahun 2021-2026 591
Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kota Medan Tahun 2021 – 2026 594
Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat *Outcome* Kota Medan Tahun 2021 – 2026 617

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan perencanaan pembangunan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Di samping itu, keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk di antaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional. Selain itu, penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Medan setelah memenuhi syarat untuk dilakukan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan perubahan RPJMD sesuai dengan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat

diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Di samping itu, alasan lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah setelah RPJMD Kota Medan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021. Adapun kebijakan nasional yang dimaksud adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, di antaranya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
2. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 67 tentang pengarusutamaan Gander dalam

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gander di Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Medan nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gander dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
8. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis;
9. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat adanya perubahan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian;
16. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
17. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
18. Hasil evaluasi midterm RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang memperlihatkan hasil-hasil capaian kinerja yang belum optimal dari beberapa indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Selain penerbitan beberapa kebijakan, hal yang mendasari perubahan RPJMD melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan munculnya Covid-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi Kota Medan terutama sektor/lapangan usaha yang terimbas kuat akibat pandemi Covid-19 seperti perdagangan, transportasi, dan akomodasi sehingga mempengaruhi pencapaian target Indikator Kinerja Daerah.

Adapun substansi dari Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, diharapkan akan terwujud sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan Kota dengan Provinsi dan Pusat, serta diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

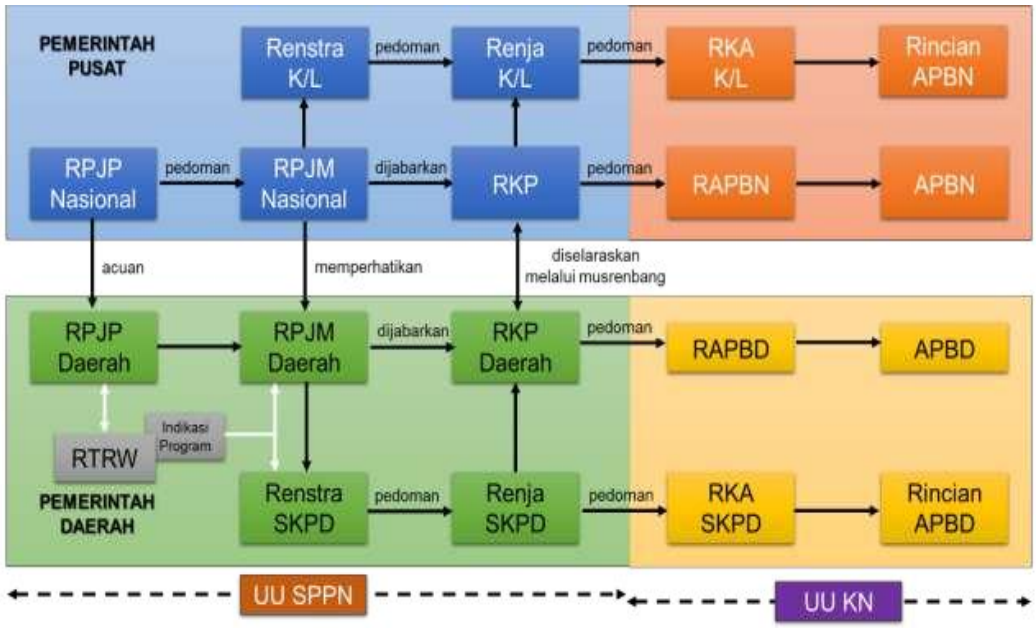
tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
34. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024- 2026);
35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; dan
39. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah

harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Medan 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kota Medan 2006-2025 sekaligus memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2025 berpedoman pada RTRW Kota Medan 2022-2042, RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037, RTRW Nasional 2008-2028.

1.3.1. RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan

tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Kepala Daerah. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.2. RPJMD Kota Medan dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

1.3.3. RPJMD Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Medan yang memuat prioritas

program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Medan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Medan, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

1.3.4. RPJMD Kota Medan dengan KLHS RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi muatan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini merupakan salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD. Dokumen ini disusun selaras dengan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah dan melibatkan seluruh stakeholder mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi oleh seluruh pelaku pembangunan

secara holistik, tematik, integratif, dan spasial.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan :

1. RPJMD sebagai implementasi janji politis walikota yang telah disampaikan kepada mayarakat Kota Medan pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak Tahun 2020.
2. RPJMD Kota Medan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun sesuai visi dan misi Kepala Daerah dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
3. RPJMD kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan, Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota Medan harus konsisten dan sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
4. RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan Pemerintah kota Medan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan, selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
5. RPJMD Kota Medan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja kepala Daerah selama periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kota Medan meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat capaian kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan keuangan daerah

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pembangunan di Kota Medan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Medan dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB X PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemberian otonomi yang nyata dan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kondisi daerah.

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Geografi

1. Wilayah Administrasi

   Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas 28,199.47 hektar (281,99 km²) atau 0,39% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan (BPS, 2023). Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Batas-batas wilayah administratif Kota Medan adalah sebagai berikut:

   - Sebelah Utara : Selat Malaka
   - Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
   - Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
   - Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang

   Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30’ - 3°43’ Lintang Utara dan 98°35’- 98°44’ Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan

strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

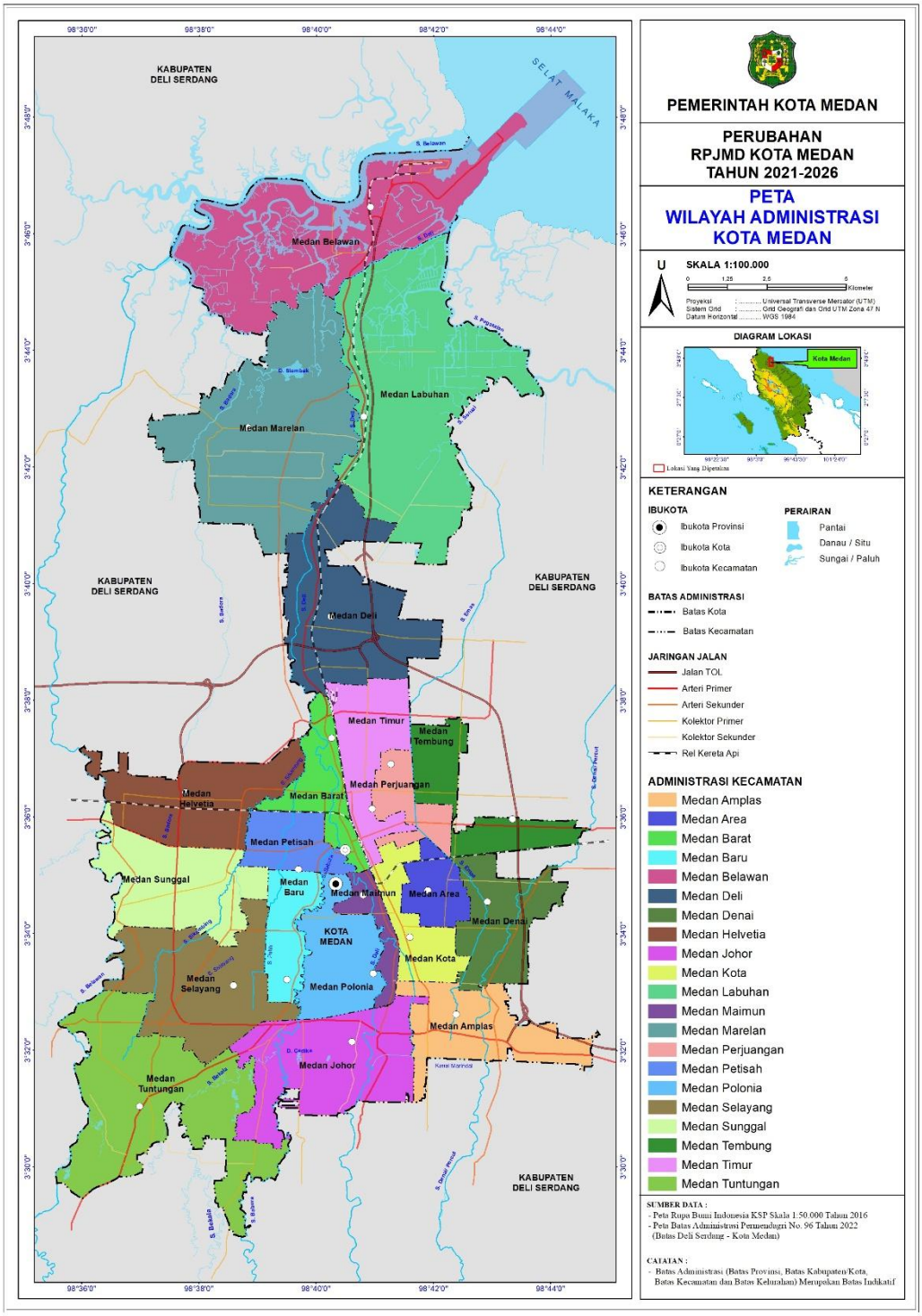
Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Keluarahan, dan Lingkungan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase	Kelurahan	Lingkungan
1	Medan Tuntungan	2,515.90	8.92	9	75
2	Medan Johor	1,672.81	5.93	6	81
3	Medan Amplas	1,065.05	3.78	7	77
4	Medan Denai	936.53	3.32	6	82
5	Medan Area	424.09	1.50	12	172
6	Medan Kota	574.70	2.04	12	146
7	Medan Maimun	302.08	1.07	6	66
8	Medan Polonia	877.18	3.11	5	46
9	Medan Baru	542.89	1.93	6	64
10	Medan Selayang	1,644.75	5.83	6	63
11	Medan Sunggal	1,326.38	4.70	6	88
12	Medan Helvetia	1,305.49	4.63	7	88
13	Medan Petisah	528.02	1.87	7	69
14	Medan Barat	633.50	2.25	6	98
15	Medan Timur	889.41	3.15	11	128
16	Medan Perjuangan	453.66	1.61	9	128
17	Medan Tembung	785.21	2.78	7	95
18	Medan Deli	1,883.11	6.68	6	105
19	Medan Labuhan	3,508.71	12.44	6	99
20	Medan Marelan	3,003.01	10.65	5	88
21	Medan Belawan	3,326.99	11.80	6	143
Jumlah		**28,199.47**	**100.00**	**151**	**2.001**

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042

Dari Tabel tersebut dapat terlihat bahwasanya untuk kecamatan – kecamatan yang berada di bagian utara wilayah Kota Medan seperti Kecamatan Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Deli merupakan wilayah kecamatan terluas. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi pengembangan wilayah Kota Medan pada masa yang akan datang

untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang merata secara berimbang. Hal ini mengingat pada wilayah-wilayah tersebut masih punya alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang memadai.



Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2022-2042

Gambar 2.1.
Wilayah Administrasi Kota Medan

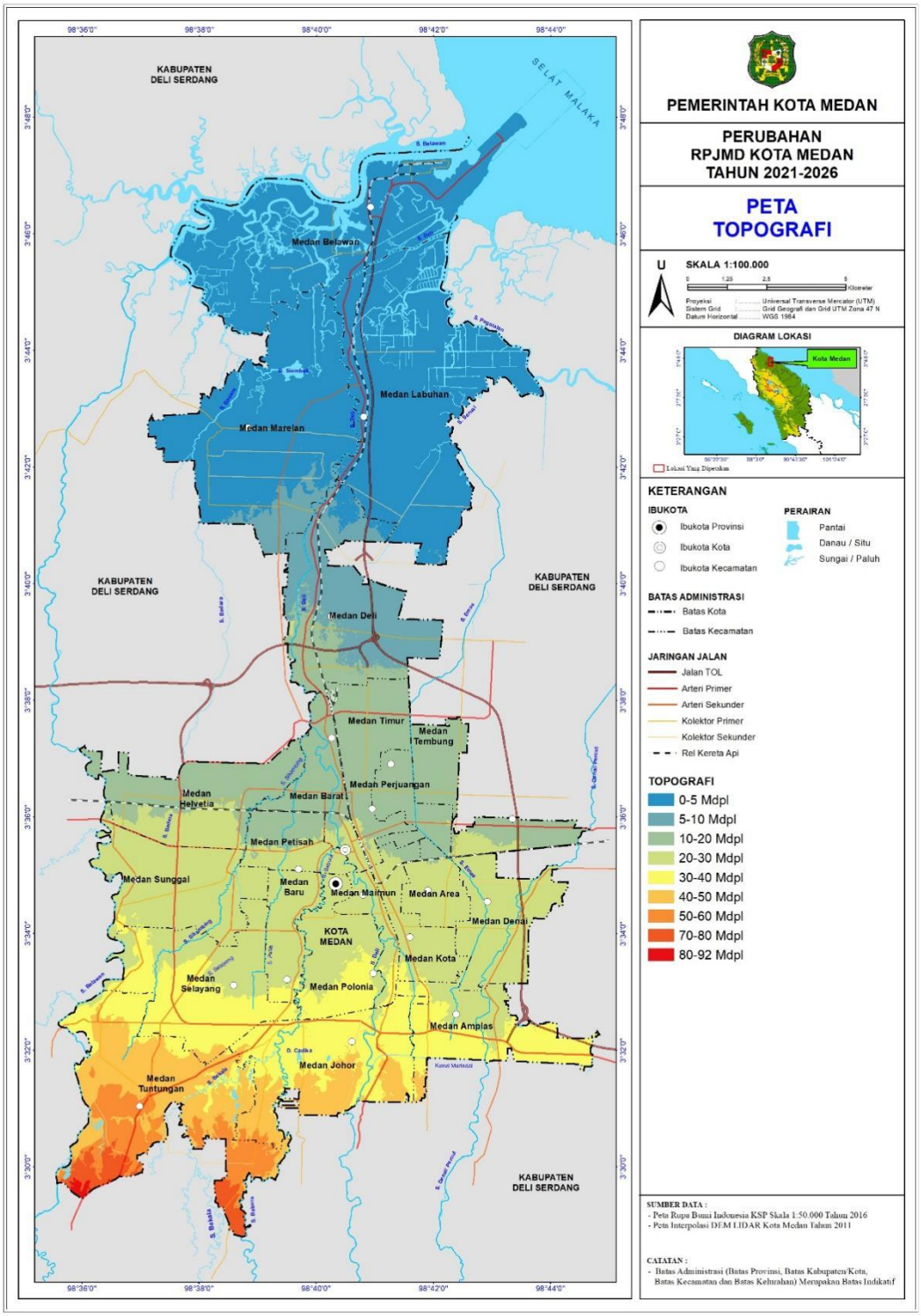
2. Kondisi Topografi dan Guna Lahan

Kondisi topografi Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah atau landai dengan ketinggian 0 - 92 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah antara 0 - 2 %. Fisiografi Kota Medan menunjukkan bentuk permukaan lahan datar yang membentang dari Utara ke Selatan, berdasarkan fisiografi wilayah Kota Medan tersebut mempunyai topografi datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan karena mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.Wilayah Kota Medan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Johor dengan elevasi 70-92 mdpl. Sedangkan wilayah yang paling rendah berada pada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan yang merupakan daerah yang dekat dengan Selat Malaka sebagai muara dari dua sungai besar, yaitu Sei Deli dan Sei Belawan. Wilayah dengan topografi datar dengan tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi memiliki potensi pengembangan wilayah yang sangat tinggi, namun sebagai faktor pembatas lingkungan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan

No	Elevasi	Luas (Ha)	%	Kondisi dan Potensi Lingkungan
1	0-5 Mdpl	9.606,67	34,07	Elevasi < 500 mdpl mengindikasikan wilayah tersebut memiliki potensi kemampuan lahan untuk dikembangkan yang tinggi dengan faktor penghambat hidrologis permukaan pada kerentanan terhadap wilayah rawan banjir.
2	5-10 Mdpl	1.659,73	5,89	
3	10-20 Mdpl	4.265,69	15,13	
4	20-30 Mdpl	6.435,72	22,82	
5	30-40 Mdpl	3.479,69	12,34	
6	40-50 Mdpl	1.798,48	6,38	
7	50-60 Mdpl	667,82	2,37	
8	70-80 Mdpl	260,78	0,92	
9	80-92 Mdpl	24,89	0,09	
	Total (Ha)	**28.199,47**	**100,00**	

Sumber: Analisis Interpolasi Spasial DEMNAS, 2017



Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Medan

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai

oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Pola penggunaan lahan di Kota Medan pada umumnya sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pemukiman. Selain penggunaan pemukiman, pola penggunaan lahan lainnya yang tinggi adalah pola penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tersebar di seluruh wilayah Kota Medan, pola penggunaan lahan Kota Medan meliputi kawasan terbangun sebesar 60,5% sedangkan kawasan non terbangun sebesar 39,5% dengan luas kawasan non terbangun terbesar berada pada wilayah utara Kota Medan.

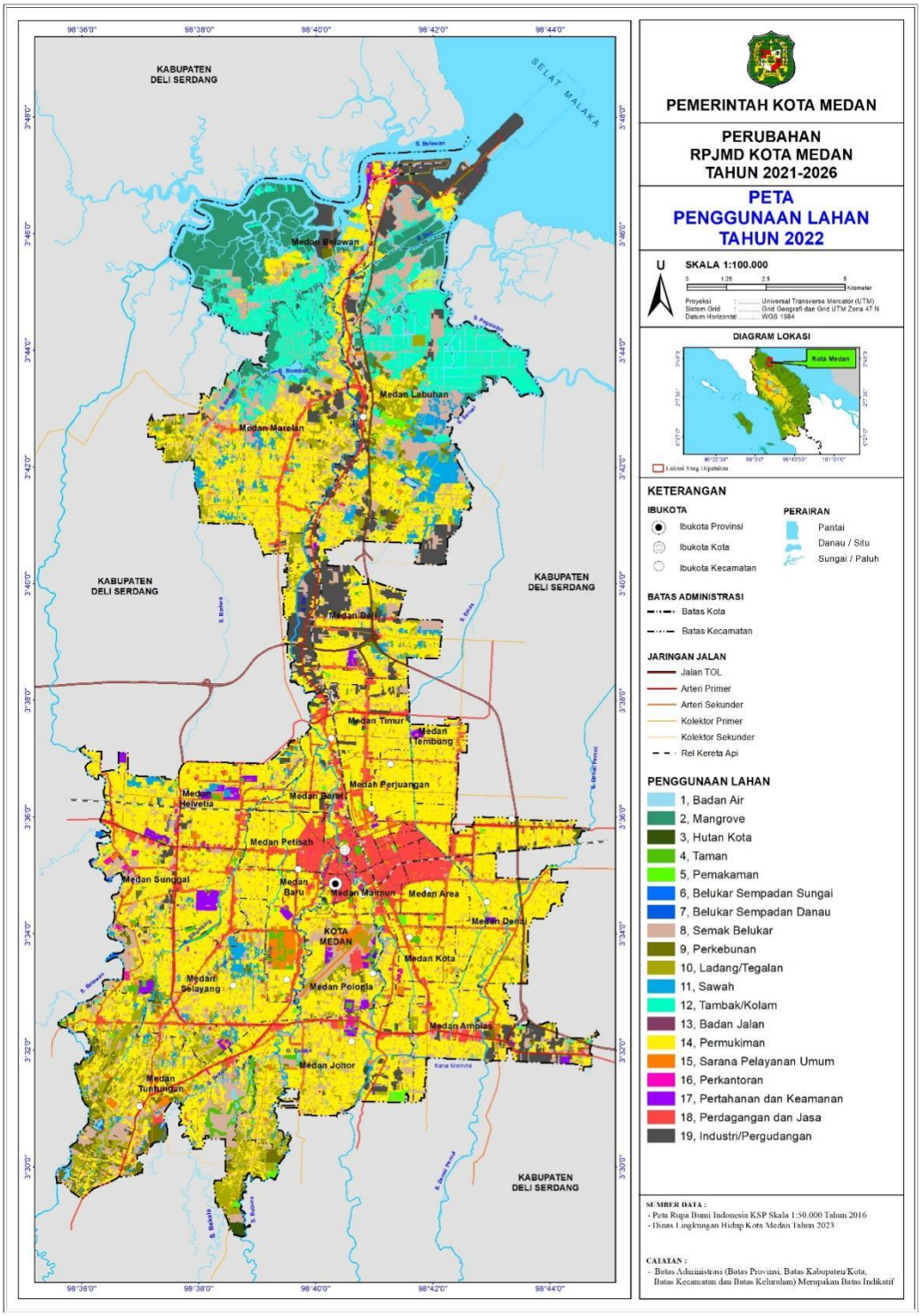
Perubahan kondisi penggunaan lahan di Kota Medan sangat dinamis, perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Kawasan Non Terbangun		**11.146,81**	**39,5**
1	Badan Air	1.309,36	4,6
2	Sawah	620,07	2,2
3	Semak Belukar	3.842,09	13,6
4	Taman	458,20	1,6
5	Tambak/Kolam	1.544,37	5,5

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
6	Belukar Sempadan Danau	22,75	0,1
7	Belukar Sempadan Sungai	352,44	1,2
8	Hutan Kota	24,71	0,1
9	Ladang/Tegalan	1.462,84	5,2
10	Mangrove	1.349,53	4,8
11	Pemakaman	160,44	0,6
Kawasan Terbangun		**17.052,67**	**60,5**
1	Badan Jalan	547,77	1,9
2	Industri/Pergudangan	1.506,62	5,3
3	Perdagangan dan Jasa	1.830,23	6,5
4	Perkantoran	131,89	0,5
5	Perkebunan	420,58	1,5
6	Permukiman	11.599,01	41,1
7	Pertahanan dan Keamanan	227,75	0,8
8	Sarana Pelayanan Umum	788,81	2,8
Jumlah		**28.199,47**	**100,0**

Sumber: RTRW Kota Medan 2022-2042



Gambar 2.3.
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan Tahun 2022

3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial; 2) grup

Marin; 3) grup Volkan; dan 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini:

a. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir di sekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran di sekitar aliran sungai besar di dekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

b. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda).

Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (*unripe*) dan setengah matang (*halfripe*). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah sulfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (Rhizopra, sp), Api-api (Avicennia, sp), Lenggede (Bruguruera parviflora). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir

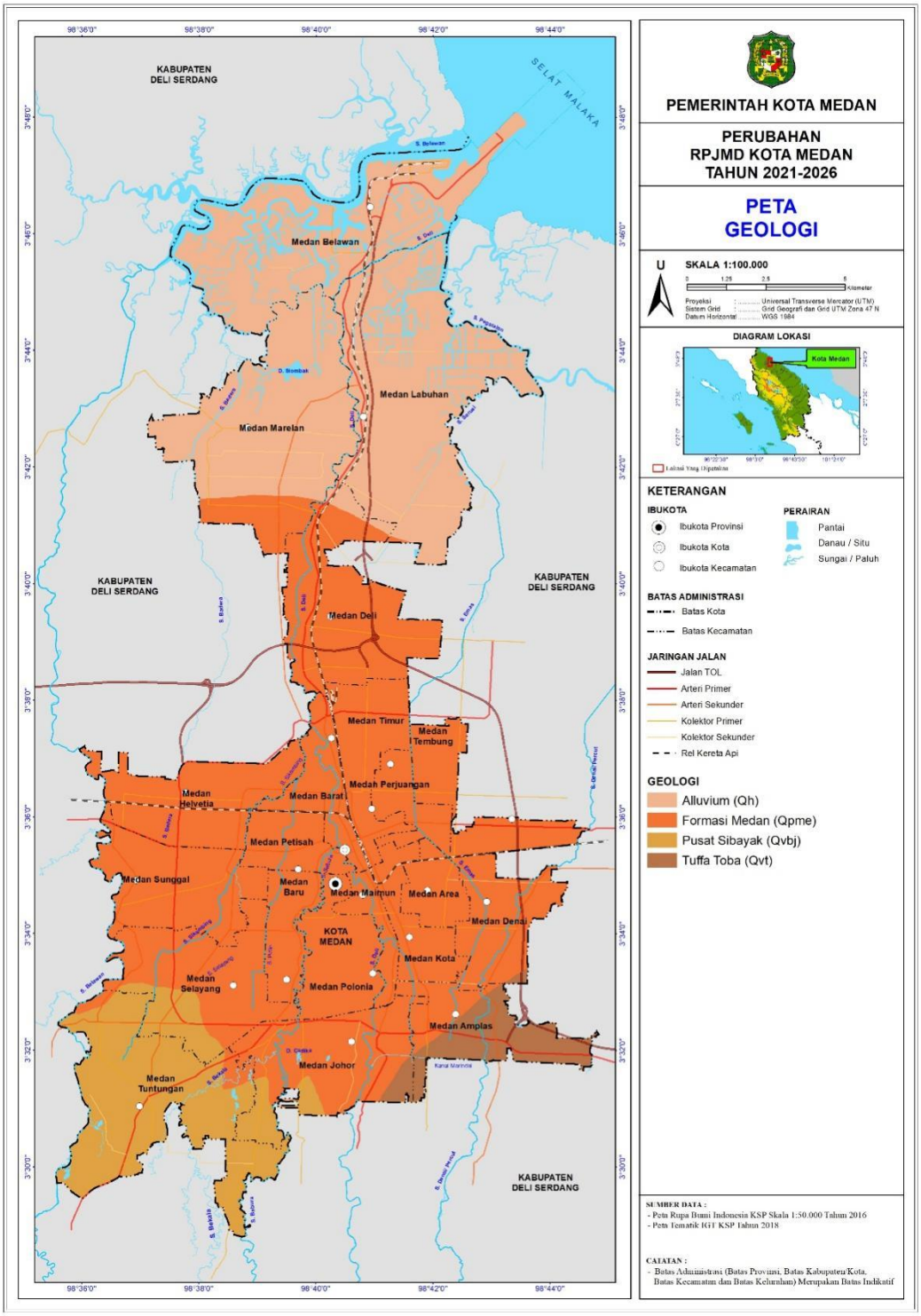
pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai.

c. Grup Volkan

Grup Volkan ini umumnya berasal dari volkan muda berumur kuarter dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tufa masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu volkan Sibayak dan Sinabung makin tebal ke arah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Volkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang ke arah Kabanjahe.

d. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu volkan hasil erupsi volkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan volkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuarter. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.



Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Medan

e. Air Tanah

Pemanfaatan air tanah saat ini semakin meningkat dengan pesat terutama wilayah perkotaan termasuk di Kota Medan. Sebagian warga Kota

Medan masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Air tanah di Kota Medan umumnya diperoleh melalui sumur bor dengan kedalaman bervariasi, tergantung pada kedalaman air tanah yang tersedia di daerah tersebut. Pengambilan air tanah di Kota Medan terutama digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Selain itu, air tanah juga digunakan untuk keperluan industri, dan kegiatan perdagangan dan jasa.

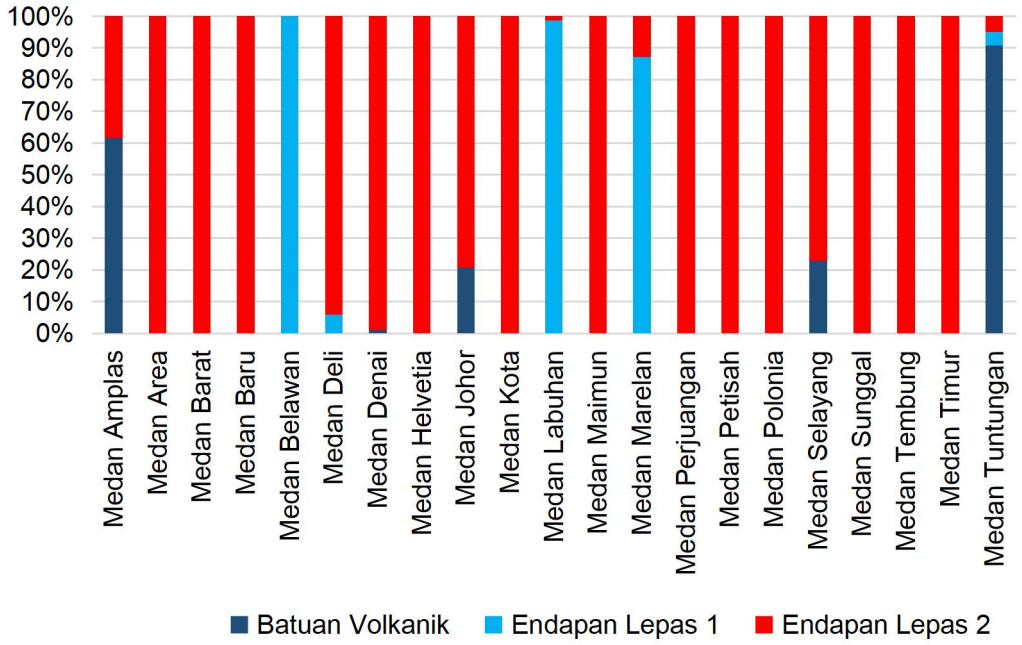
Kondisi hidrogeologi Kota Medan, umumnya terbentuk dengan komposisi batuan aluvium lepas pada hidrogeologi pada endapan lepas 2. Batuan dan dan kelulusannya dibagi menjadi:

1) Lapisan tak terlipat dan miring lemah, terutama kerikil pasir dan lempung, umumnya kelulusannya sedang sampai tinggi, struktur geohidrologi lapisan ini terdiri dari:
    a) Endapan volkanik muda, terutama terdiri dari lava andesit, sampai basal, bahan pirolastika dan breksi aliran, umumnya berkelulusan sedang sampai tinggi, terutama pada aliran lava vesikuler.
    b) Aliran lava andesit sampai dasit, umumnya kelulusan rendah sampai sedang.
    c) Endapan volkanik tua terdiri dari lava andesit dan bahan piroklasika, umumnya kelulusannya rendah.
    d) Batu pasir berlapis berselang seling dengan batu lumpur, batu pasir berirama, batu pasir berselang seling dengan serpih dan setempat konglomerat. Umumnya kelulusannya rendah sampai sedang, kelulusan tinggi terdapat pada batu pasir kurang padu dari formasi julu rayeu dan seureula.
2) Lapisan terlipat, terutama batu pasir kelulusan beragam tergantung banyaknya rekahan, batu lumpur dan serpih, umumnya kelulusannya sangat rendah, struktur geohidrologi lapisan ini terdiri dari:
    a) Batu gamping colit dan terumbu dengan kelulusan beragam, kelulusan tinggi terutama pada daerah sesar.
    b) Dolomit, kelulusan beragan setempat, sedang pada daerah sesar.

c) Batu gamping, setempat rijang, kelulusan beragam tergantung pada banyaknya celahan.

d) Batuan beku terobosan bersifat asam sampai menengah, terutama granit, mikrodiorit, dan granodiorite. Umumnya kelulusannya sangat rendah, rendah sampai sedang, pada daerah lapukan dan rekahan.

e) Batuan ubahan terdiri bermacam batu tanduk, sekis genes, serta pualam. Umumnya kelulusannya sangar rendah, sedang hingga tinggi pada pualam dengan celahan mencolok.



Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATDGTL), Tahun 2016 - IGT KSP, 2018

Gambar 2.5.
Distribusi Hidrogeologi Litologi Aquifer di Kota Medan

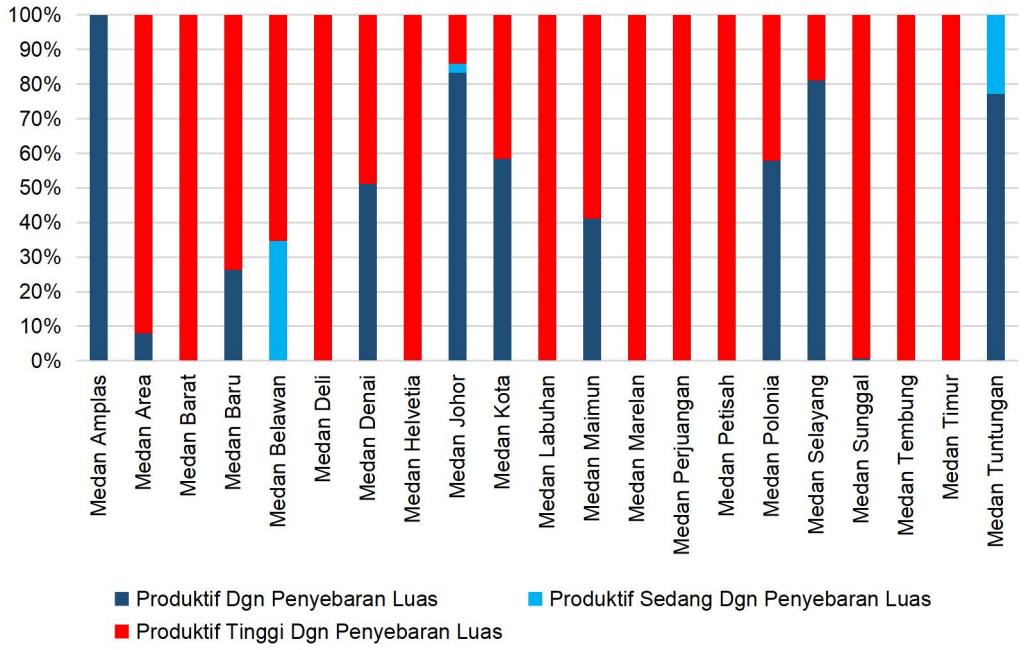
Keterdapatan air tanah dan produktivitasnya dapat dibedakan menjadi akifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan akuifer dengan aliran melalui rekahan dan ruang antar butir, seperti yang terlihat pada gambar dibawah, keterdapatan air tanah dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas dengan

kelulusan sedang sampai tinggi, muka air tanah tinggi diatas atau dekat dengan muka tanah, pada daerah ini debit sumur umumnya lebih dari 10 lt/dtk.

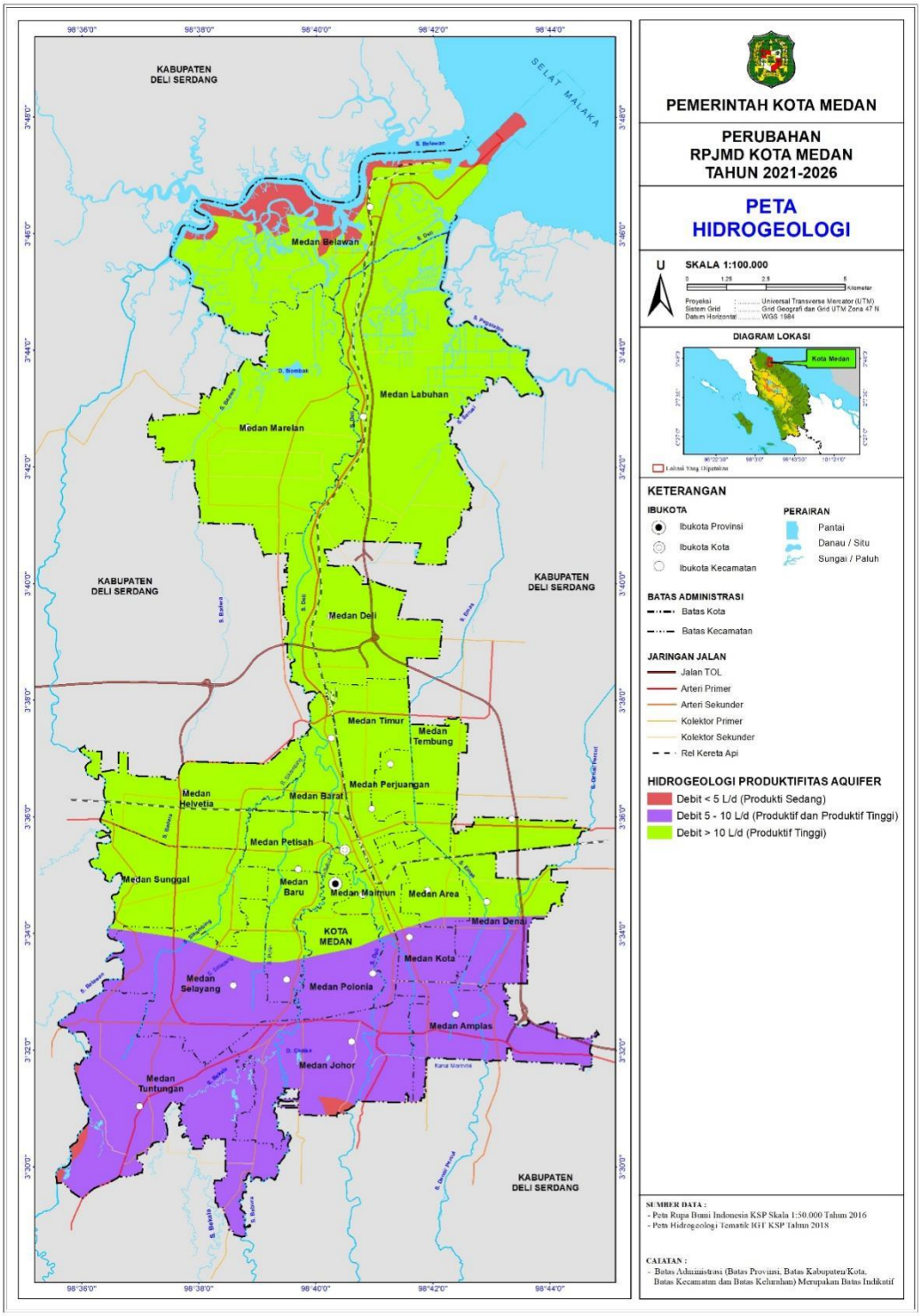
2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas dengan kelulusan sedang pada muka air tanah tinggi atau dekat dengan muka air tanah, debit sumur umumnya 5 -10 lt/dtk.

3) Akuifer produktivitas sedang dengan penyebaran luas dengan kelulusan sedang muka air tanah di atas debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dtk.



Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATDGTL), Tahun 2016 - IGT KSP, 2018

Gambar 2.6.
Distribusi Hidrogeologi Produktivitas Aquifer di Kota Medan



Gambar 2.7.
Peta Hidrogeologi Kota Medan

4. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Sungai-sungai yang membentang di Kota Medan memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan

sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan. Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya.

Wilayah Kota Medan dilalui oleh 4 (empat) sungai besar, yaitu: Sungai Batang Kuis, Sei Belawan, Sei Deli dan Sei Percut. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan – Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 31,14% dan DAS Percut sebesar 20,48%.

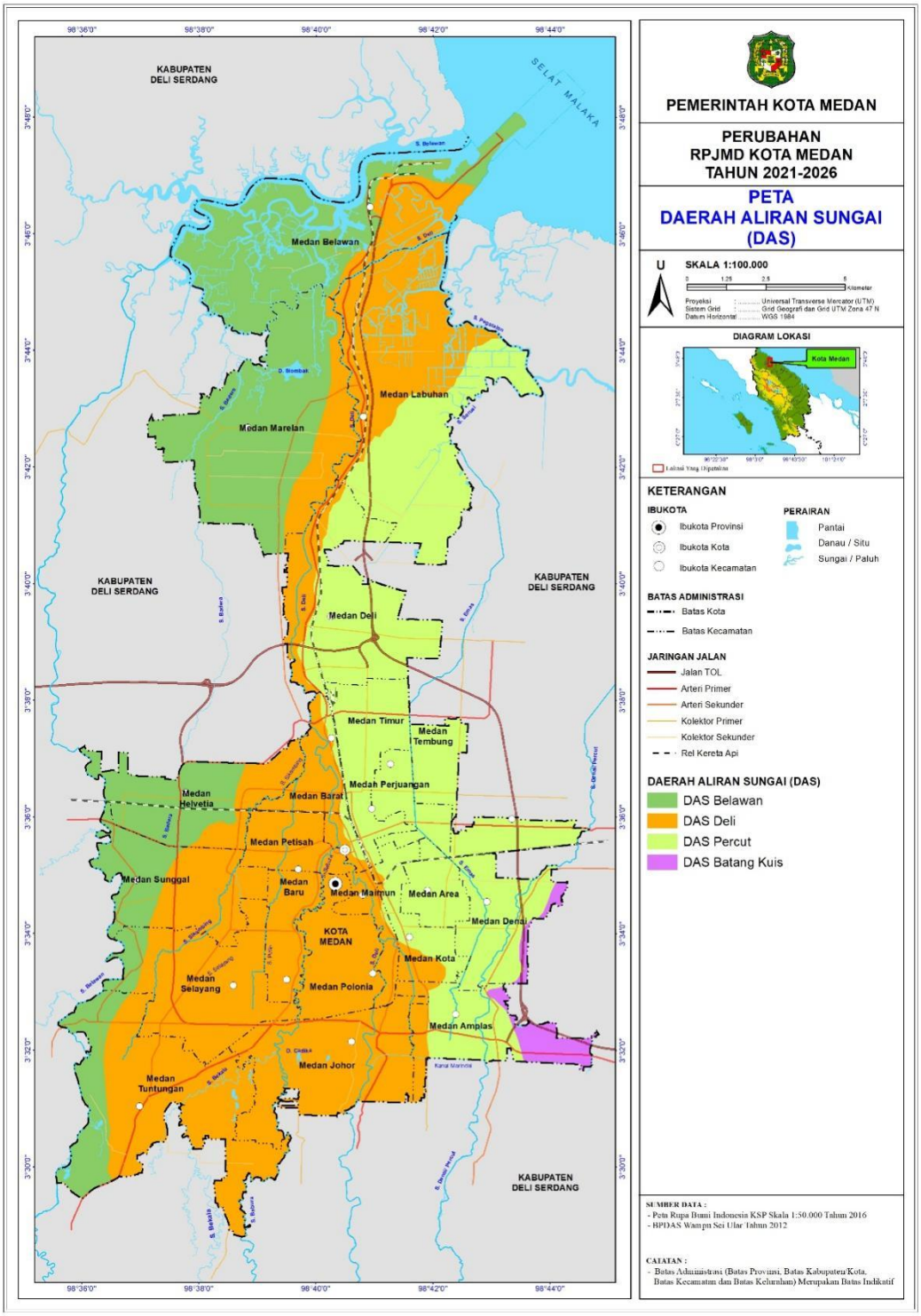
Tabel 2.4.Persentase Kota Medan dalam DAS

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
1.	DAS Deli	37.803,35	11.772,70	31,14%
2.	DAS Belawan	74.763,45	8.434,06	11,28%
3.	DAS Percut	37.280,07	7.634,77	20,48%
4	DAS Batang Kuis	14.196,87	357,94	2,52%
Total		**164.043,75**	**28.199,47**	**17,19%**

Sumber: BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun BMKG Wilayah I Medan suhu minimumnya yaitu 17,9°C dan suhu maksimum yaitu 37°C pada tahun 2022. Pada tahun 2022 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 83%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 3,1 m/sec. Rata-rata hari hujan di Kota Medan pada tahun 2022 per bulan adalah 19 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun BMKG Wilayah I Medan per bulannya 291,23 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial

berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/ genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini perlu dilakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan.



Gambar 2.8.
Peta DAS Kota Medan

5. Kawasan Rawan Bencana

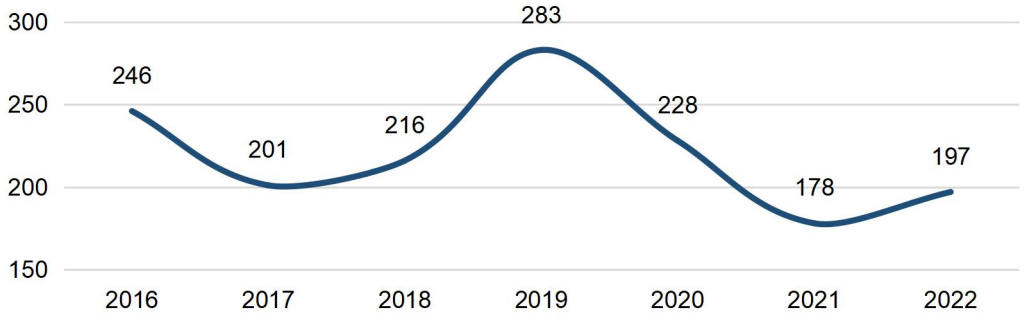
Secara geologis Kota Medan memiliki potensi kerawanan yang sangat rendah terhadap bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa kawasan rawan

bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

a. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada 2020, kecamatan yang rawan kebakaran adalah Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Helvetia, Medan Baru dan Medan Tembung. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran di antaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, dan lain-lain. Menurut catatan, kerugian akibat kebakaran terbesar pada tahun 2020 mencapai Rp 101,556 milyar.

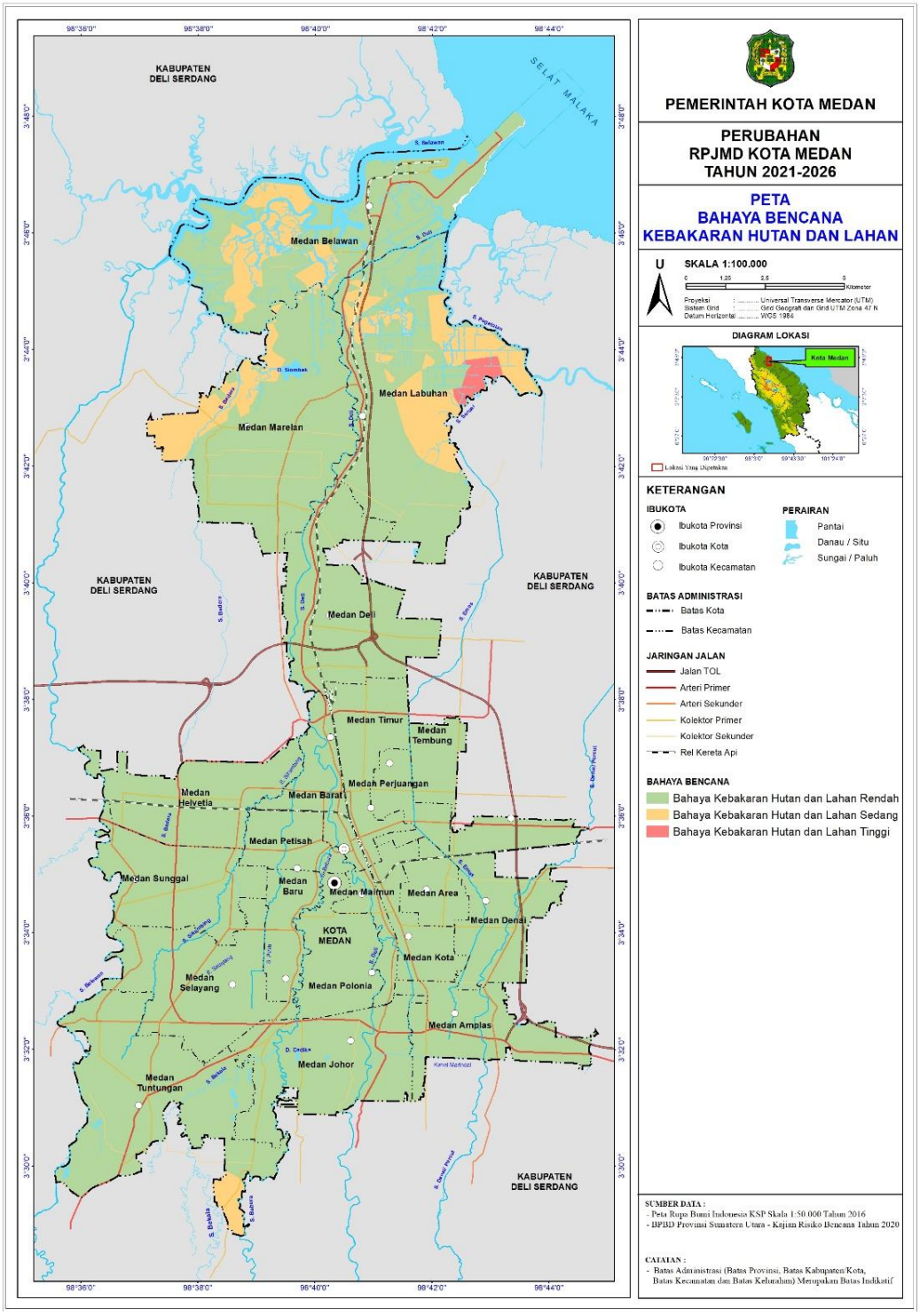
Sedangkan berdasarkan data jumlah kejadian jumlah kebakaran sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022.



Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2017-2023

Gambar 2.9.
Grafik Kejadian Kebakaran Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Medan ternyata dari kawasan terdampak tidak ada nilai total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Medan. Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kecamatan di Kota Medan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 16,09 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Sedang. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 11,40 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.10.
Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Medan

b. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan,

Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

Tabel 2.5.
Kejadian Banjir Kota Medan

No	Nama Sungai	Waktu Kejadian Banjir	Catatan
1	Sungai Belawan dan Sungai Deli/Babura	14 Januari 2002	Beberapa rumah dibantaran sungai hanyut, dan penduduk diungsikan. Bandara Udara Polonia tidak beroperasi selama 12 jam.
2	Sungai Belawan, Sungai Deli/Babura	6 Januari 2011	Atap rumah di bantaran Sungai Babura terendam
3	Sungai Deli/Babura	28 Oktober 2013	Ribuan rumah terendam, perkuliahan di kampus USU terganggu.
4	Sungai Deli/Babura	25 November 2015	Lima Kecamatan tergenang, ratusan warga mengungsi
5	Sungai Deli/Babura	16 September 2018 dan 18-19 Oktober 2018.	Banjir sungai disertai banjir permukiman, banjir dimana-mana.
6	Sungai Belawan	25 Desember 2020	Banjir sungai disertai banjir permukiman di daerah perbatasan Deli Serdang dan Medan Tuntungan

Sumber : Dinas PU

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (*flood plain*). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistim aliran gravitasi.

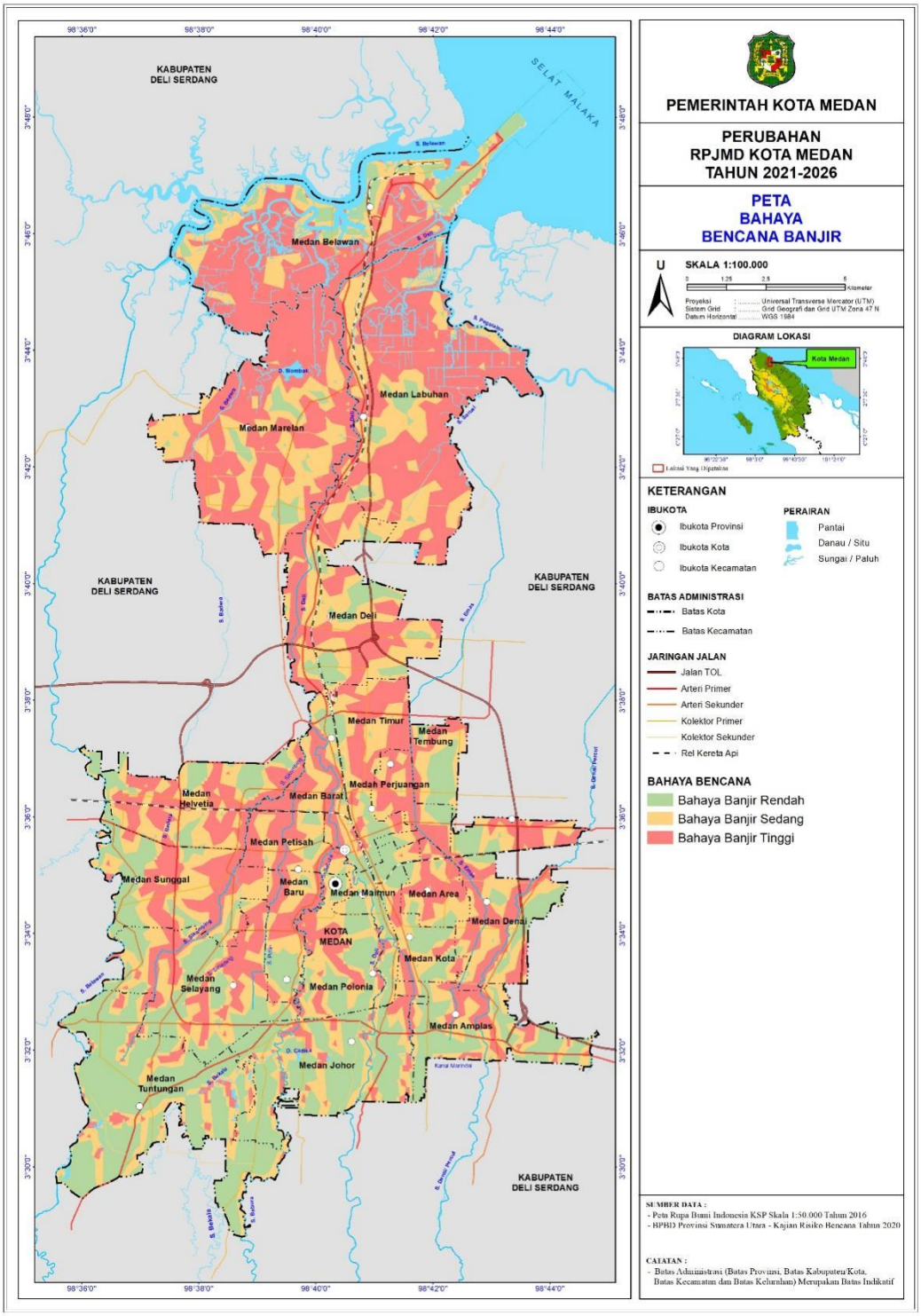
Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, pada tahun 2022 Kota Medan memiliki 2.575 titik genangan. Sedangkan jumlah titik genangan yang telah di tangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.958 Titik genangan sehingga

menyisakan 617 titik genangan lagi yang perlu ditangani.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi

adalah seluas 203,29 Ha

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir per kecamatan di Kota Medan, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Helvetia dengan luas 1,72 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kecamatan Medan Johor dengan luas 50,55 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Tuntungan dengan luas 80,51 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



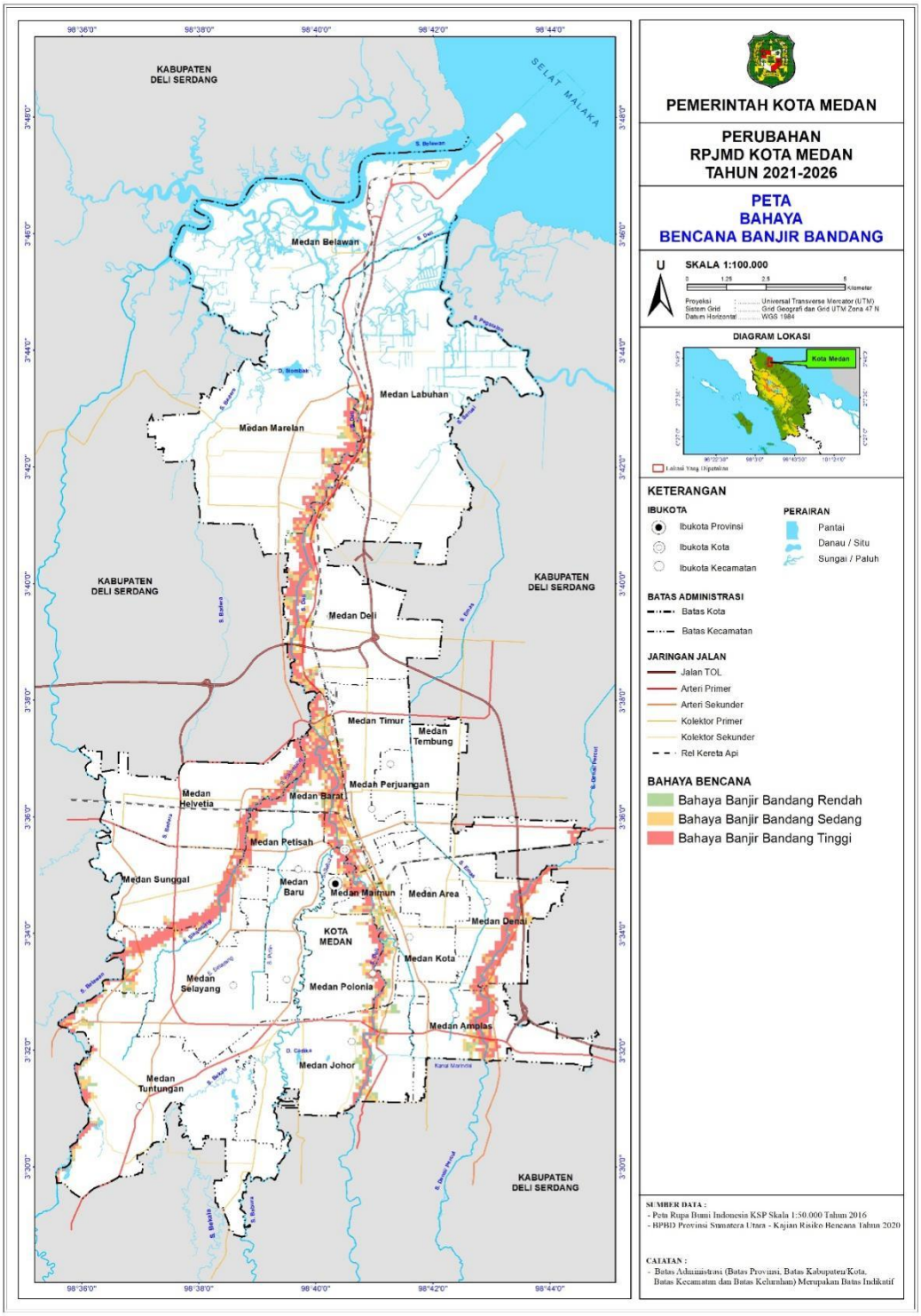
Gambar 2.11.
Peta Risiko Banjir Kota Medan

c. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi

cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Medan pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah, sedang, dan tinggi. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kota Medan adalah 376,87 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 69,47 Ha, kelas sedang seluas 181,63 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 125,77 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 13,89 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 24,35 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 15,16 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2.12.
Peta Risiko Banjir Bandang di Kota Medan

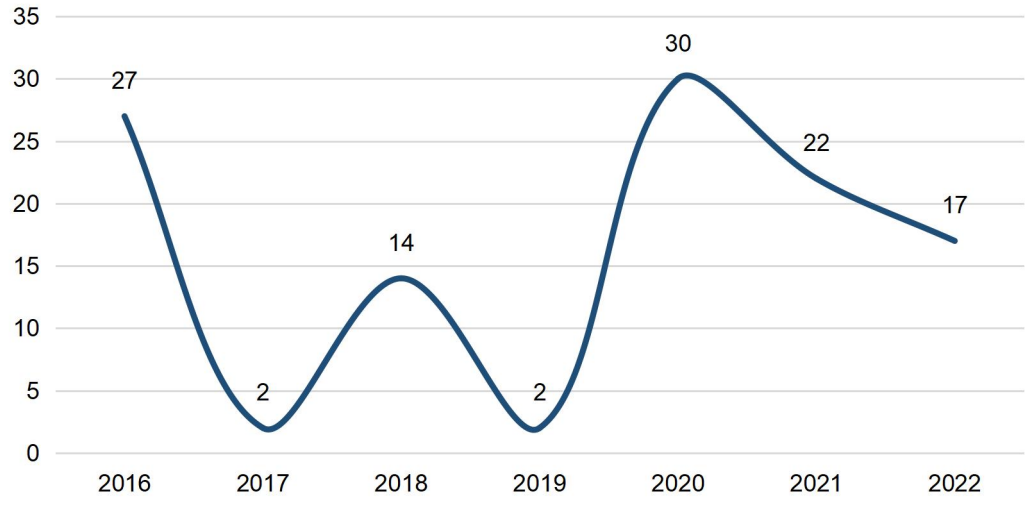
d. Rawan kejadian Angin Puting Beliung dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang berupa angin kencang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung

sering kali terjadi dalam badai petir atau badai yang kuat. Biasanya, angin puting beliung menyebabkan kerusakan yang cukup besar, termasuk kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan infrastruktur.

Angin puting beliung terbentuk ketika angin di daerah tertentu mengalami perubahan arah dan kecepatan secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara di area tersebut. Ketika angin berputar-putar dengan kecepatan tinggi, ia membentuk kolom udara yang berputar vertikal. Pada bagian bawah kolom ini, udara menjadi sangat tidak stabil dan menyebabkan angin kencang yang berputar.

Pada tahun 2022 jumlah kejadian angin puting beliung di Kota Medan sebesar 17 kejadian, angka ini menurun sebanyak 5 kejadian. Angka kejadian puting beliung tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kejadian. Sebagai upaya mitigasi serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana angin puting beliung pemerintah dapat melakukan : Membangun sistem pemantauan cuaca yang efektif dan menerima peringatan dini tentang adanya potensi angin puting beliung sangat penting, menghindari membangun rumah di daerah rawan angin puting beliung atau mempertimbangkan konstruksi berkekuatan tinggi di daerah dengan risiko tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

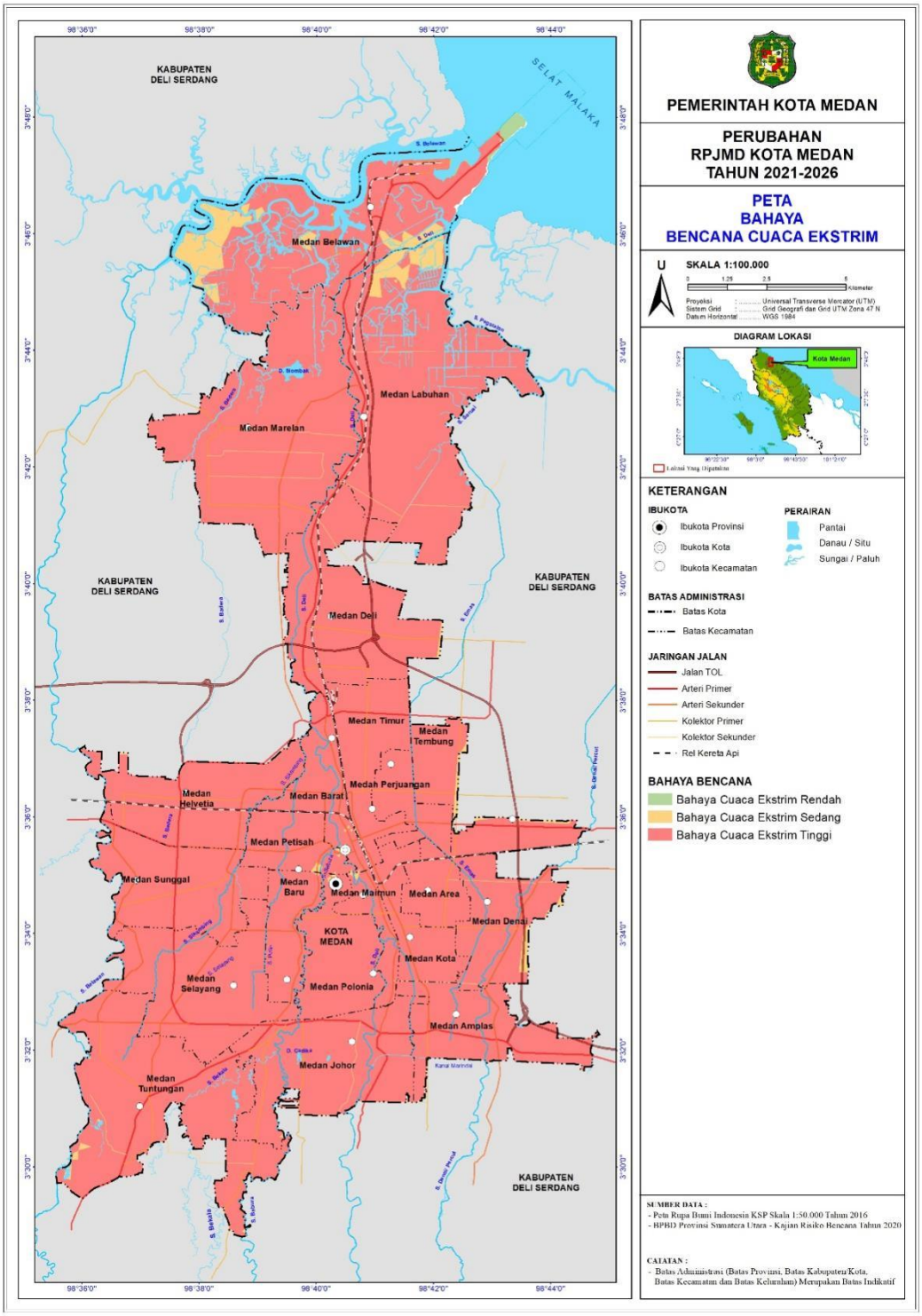


Sumber: Kota Medan Dalam Angka 2017-2023

Gambar 2.13.
Grafik Kejadian Angin Puting Beliung Kota Medan

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan, total luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan secara keseluruhan adalah seluas 28.312,31 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, yang terdampak cuaca ekstrim hasil analisanya hanya berada pada kelas sedang seluas 21.125,05 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 7.187,25 Ha.

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 1.795,37 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 2.094,79 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



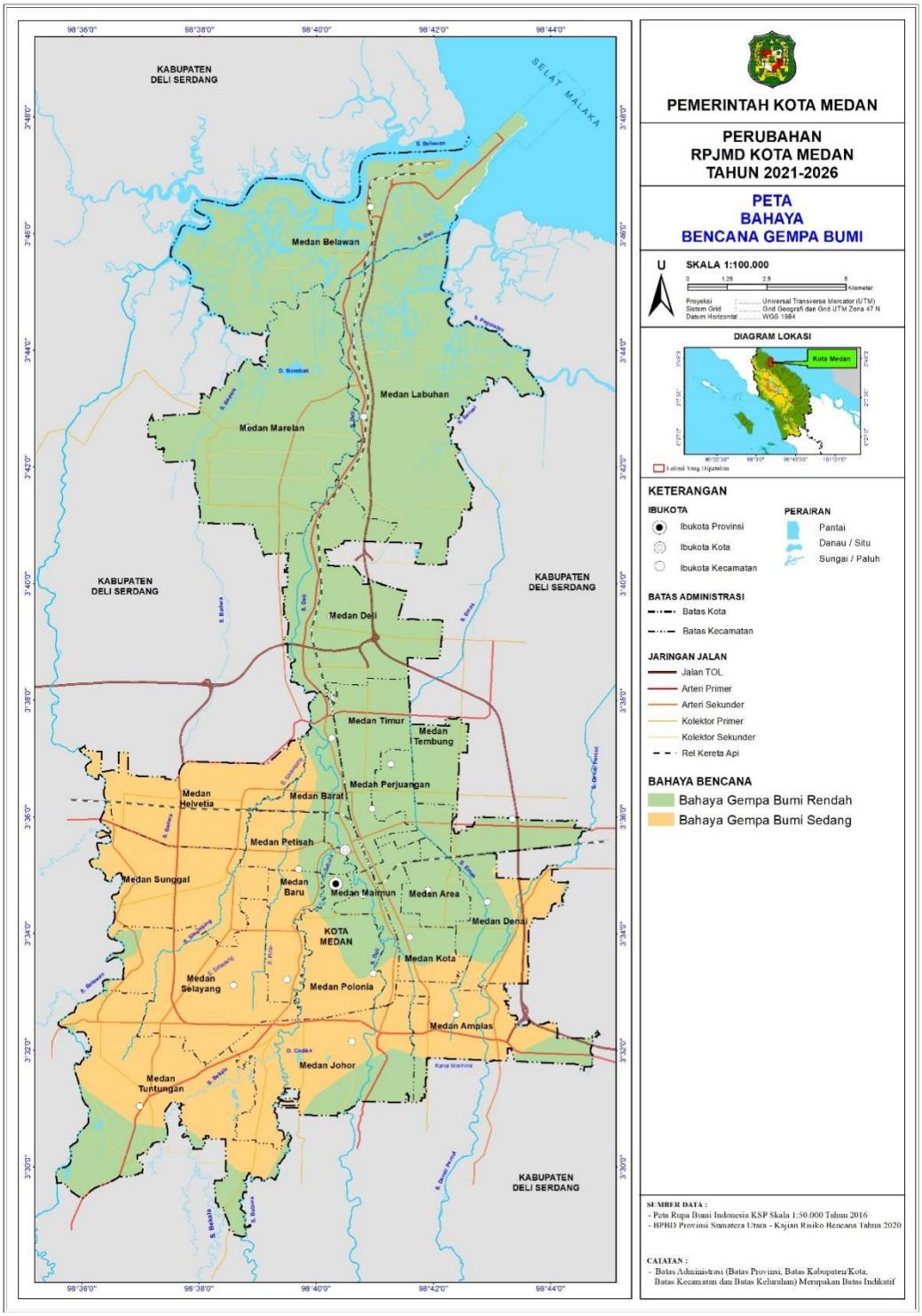
Gambar 2.14.
Peta Risiko Cuaca Ekstrim di Kota Medan

e. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif,

aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya gempa bumi di Kota Medan, potensi luas bahaya gempa bumi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 23.312,31 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya gempa bumi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 21.027,09 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 7.285,21 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya gempa bumi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya gempa bumi adalah Kecamatan Medan Belawan dengan luas 3.057,34 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 1.143,06 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.15.
Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Medan

f. Bahaya Likuifaksi

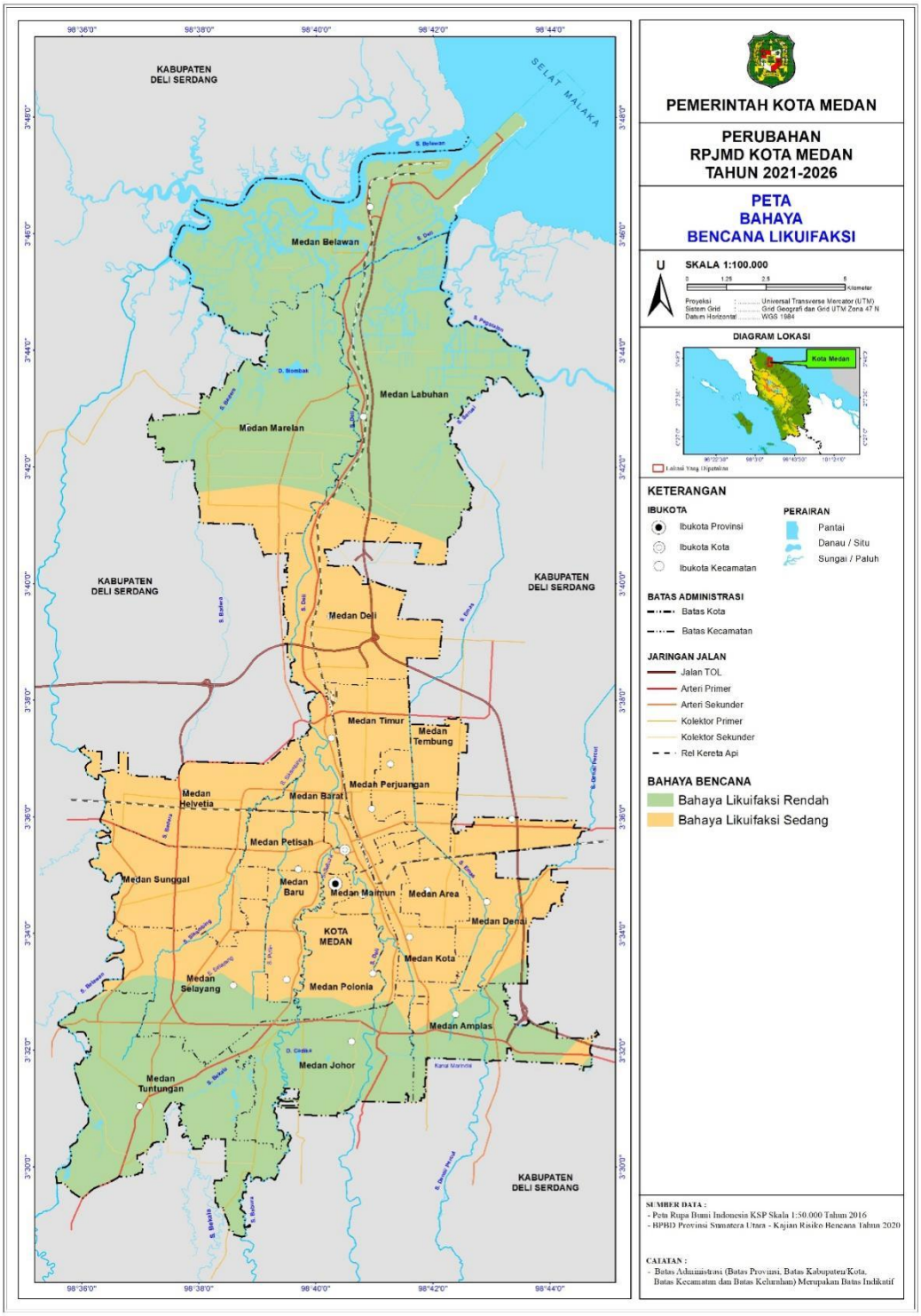
Likuifikasi adalah fenomena geoteknik yang terjadi ketika material tanah jenuh dengan air kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba akibat

guncangan gempa bumi atau tekanan yang diberikan pada tanah. Hal ini terutama terjadi pada material seperti pasir jenuh, lumpur, atau endapan yang memiliki struktur pori-pori yang longgar dan terisi air.

Ketika guncangan gempa bumi terjadi, tanah yang jenuh air dapat mengalami peningkatan tekanan pori akibat getaran. Tekanan pori ini menyebabkan gaya gesekan antar partikel tanah berkurang, sehingga tanah kehilangan kekuatan dan perilakunya berubah menjadi cairan yang mengalir. Efek ini disebut sebagai likuifikasi.

Dalam keadaan likuifikasi, tanah yang semula padat dan stabil berubah menjadi cairan yang tidak mampu menahan beban atau tekanan. Likuifikasi dapat menyebabkan tanah dan struktur di atasnya, seperti bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, menjadi tidak stabil atau terjerembab. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan bahkan kecelakaan.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya likuifaksi di Kota Medan, Total luas bahaya likuifaksi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 17.345,55 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuifaksi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 7185,63 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 10.159,92 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya likuifaksi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya likuifaksi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.017,98 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 1.556,11 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



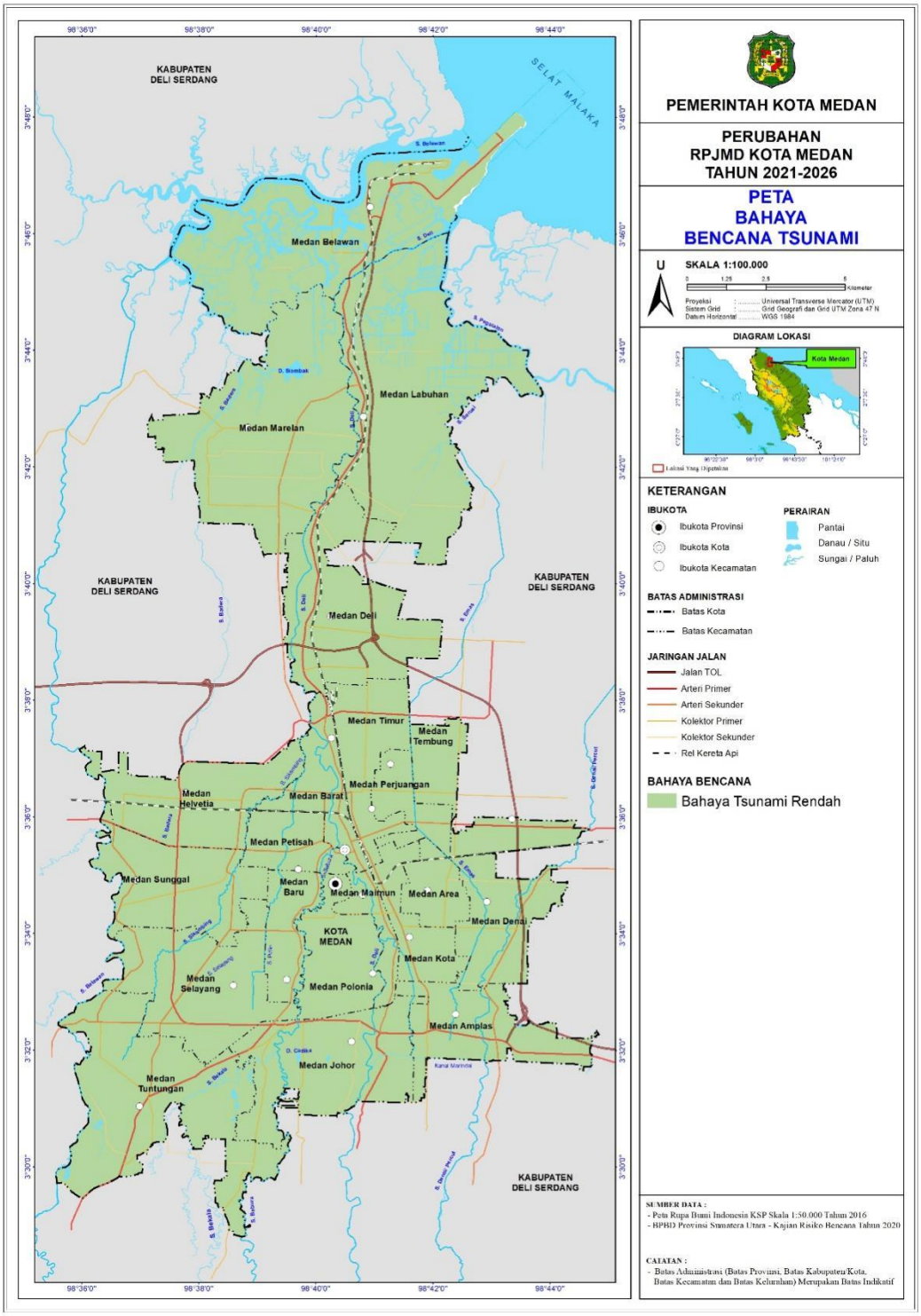
Gambar 2.16.
Peta Risiko Likuifaksi di Kota Medan

g. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu

ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Kota Medan yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya tsunami di Kota Medan, Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kota Medan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Kota Medan secara keseluruhan adalah 8,98 Ha dan berada pada kelas Rendah yang tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan di Kota Medan. Jika dilihat dari luas bahaya tsunami tertinggi pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Belawan seluas 8,71 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.17.
Peta Risiko Tsunami di Kota Medan

h. Rawan kejadian luar biasa bidang kesehatan (pada penyakit menular)

Daerah rawan kejadian luar biasa penyakit menular di kota Medan berdasarkan atas kejadian seperti kasus penyakit menular Covid-19

sampai dengan 22 Agustus 2021, Kota Medan masih merupakan zona merah dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 40.065 orang dengan rincian 29.160 orang sembuh, meninggal 793 orang dan selebihnya sedang dalam perawatan. Jumlah pasien positif covid mengalami peningkatan di Kota Medan, disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan belum optimalnya upaya tracing atau penemuan kasus Covid-19 dimana seharusnya target adalah 1 : 15. Satu orang terkonfirmasi positif Covid-19 maka 15 orang terdekat yang kontak langsung harus di *tracing*.

2.1.2. Kondisi Demografis

Penduduk, tempat, dan pemerintahan merupakan elemen-elemen utama yang saling terkait dalam membentuk sebuah wilayah. Dari ketiganya, kependudukan memainkan peran yang paling penting dalam membentuk gambaran suatu wilayah, karena penduduk merupakan objek utama dari sebuah wilayah yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu. Dalam membangun kependudukan, penting untuk mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup agar mobilitas dan penyebaran penduduk dapat dicapai secara optimal. Mobilitas dan penyebaran penduduk yang optimal tergantung pada keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas lingkungan untuk menampung mereka. Jika penyebaran penduduk tidak didukung oleh kapasitas lingkungan yang mencukupi atau oleh pembangunan yang sesuai, maka akan timbul masalah sosial yang kompleks, baik bagi penduduk maupun bagi lingkungan.

Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan dideskripsikan berdasarkan jumlah penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Medan Tahun 2018-2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
2018	2.264.145	0,74	265,10	8.540,72
2019	2.279.894	0,70	265,10	8.600,13
2020	2.437.272	6,90	265,10	9.193,78
2021	2.460.858	0,97	265,10	9.282,75
2022	2.494.512	1,37	281,99	8.846,10

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari 2.264.145 jiwa pada tahun 2018 menjadi 2.494.512 jiwa pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan pada tahun 2020 sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar 6,9 persen, namun tahun berikutnya laju pertumbuhan penduduk semakin melambat hingga pada tahun 2022 mencapai 1,37 persen. Luas wilayah Kota Medan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 265,1 km^2 hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 luas wilayah Kota Medan tercatat menjadi sebesar 281,99 km^2. Perubahan perhitungan ini terjadi karena koreksi tata ruang. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan disebabkan oleh peningkatan fertilitas atau pertumbuhan penduduk alami, yang mengakibatkan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) juga meningkat. Meskipun begitu, dengan jumlah penduduk yang masih cukup besar yaitu sekitar 2.494.512 jiwa pada tahun 2022.

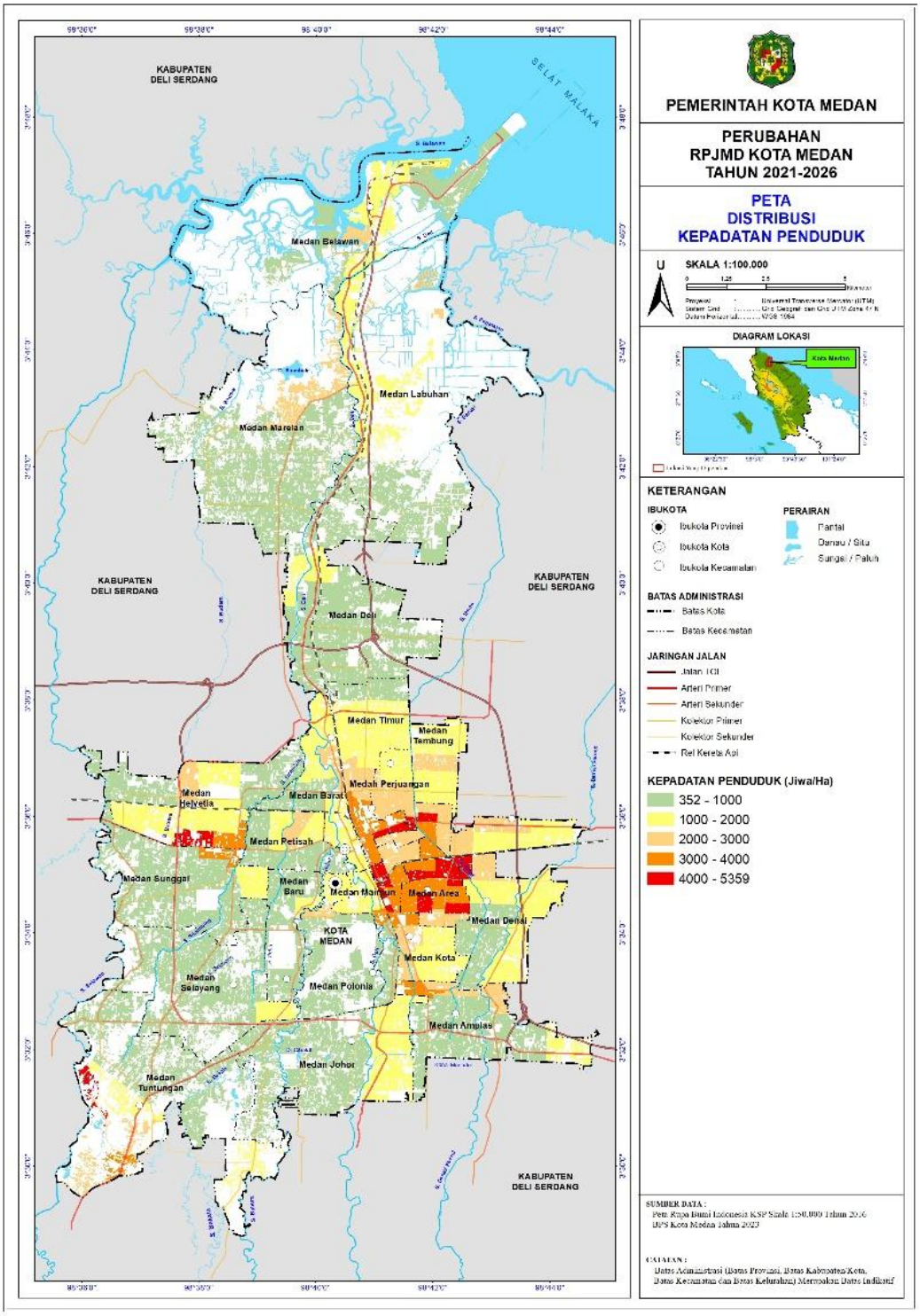
Tingkat kepadatan penduduk Kota Medan terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan secara administrasi wilayah bertambah. Tingkat kepadatan tertinggi pada tahun 2022 berada di Kecamatan Medan Area sebesar 28.482 jiwa/km^2, diikuti oleh Kecamatan Medan Perjuangan sebesar 23.020 jiwa/km^2 dan Kecamatan Medan Tembung sebesar 18.748 jiwa/km^2.

Tabel 2.7.
Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Medan Tuntungan	2.515,90	49.864	50.336	39,83
2	Medan Johor	1.672,81	78.382	78.575	93,83
3	Medan Amplas	1.065,05	65.941	66.517	124,37

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
			Laki-Laki	Perempuan	
4	Medan Denai	936,53	87.783	86.961	186,59
5	Medan Area	424,09	59.873	60.915	284,82
6	Medan Kota	574,70	42.195	44.543	150,93
7	Medan Maimun	302,08	25.021	26.045	169,05
8	Medan Polonia	877,18	30.484	30.572	69,60
9	Medan Baru	542,89	17.553	19.128	67,57
10	Medan Selayang	1.644,75	51.167	52.392	62,96
11	Medan Sunggal	1.326,38	65.303	66.438	99,32
12	Medan Helvetia	1.305,49	83.301	84.986	128,91
13	Medan Petisah	528,02	35.517	38.048	139,32
14	Medan Barat	633,50	45.406	46.615	145,26
15	Medan Timur	889,41	57.878	60.130	132,68
16	Medan Perjuangan	453,66	51.933	53.447	232,29
17	Medan Tembung	785,21	73.790	74.556	188,93
18	Medan Deli	1.883,11	97.746	95.187	102,45
19	Medan Labuhan	3.508,71	69.563	68.300	39,29
20	Medan Marelan	3.003,01	96.757	94.183	63,58
21	Medan Belawan	3.326,99	56.856	54.325	33,42
Total		**28.199,47**	**1.242.313**	**1.252.199**	**2.554,99**
			2.494.512		

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Gambar 2.18.
Peta Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Medan

Gambaran tingkat kepadatan penduduk tersebut di atas sebetulnya masih lebih rendah jika dibandingkan apabila dilihat dari luas lahan terbangun di wilayah Kota Medan. Berdasarkan hasil Studi Analisis Penyebaran Penduduk

Berdasarkan Struktur dan Pola Ruang Wilayah pada tahun 2012, bahwasanya beberapa kelurahan di Kota Medan memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi yaitu sebesar 279 jiwa/km^2 di Kecamatan Medan Area yang tersebar di Kelurahan Tegal Sari I, Tegal Sari II, Tegal Sari III, Suka Ramai I, Kota Matsum I, Kota Matsum II, dan Kota Matsum IV. Kemudian disusul oleh Kecamatan Medan Belawan, yang tersebar di Kelurahan Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan I, Belawan II, dan Bagan Deli. Di Kecamatan Medan Johor, perkampungan kepadatan sangat tinggi tersebar di Kelurahan Kwala Bekala, Sukamaju, dan Titi Kuning. Di Medan Amplas perkampungan kepadatan tinggi tersebar di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Medan Amplas dan Timbang Deli. Di Kecamatan Medan Denai tersebar di Kelurahan Binjai, Tegal Sari Mandala I, Tegal Sari Mandala II, dan Tegal Sari Mandala I. Di Kecamatan Medan Kota tersebar di Kelurahan Mesjid dan Kota Matsum III. Di Kecamatan Medan Maimun tersebar di Kelurahan Sukaraja, Jati, Hamdan, dan Aur. Di Kecamatan Medan Polonia hanya di Kelurahan Madras Hulu. Di Kecamatan Medan Baru tersebar di Kelurahan Titi Rantai, Padang Bulan, Merdeka, Darat, dan Petisah Hulu. Di Kecamatan Medan Selayang tersebar di Kelurahan Beringin, PB Selayang I, dan PB Selayang II. Di Kecamatan Medan Sunggal tersebar di Kelurahan Sunggal, Simpang Tanjung, dan Lalang. Di Kecamatan Medan Helvetia tersebar di Kelurahan Cinta Damai, Dwikora, dan Helvetia Timur. Di Kecamatan Medan Petisan tersebar di Kelurahan Petisah Tengah, Sei Putih Timur I, dan Sei Putih Timur II. Di Kecamatan Medan Barat tersebar di Kelurahan Karang Berombak dan Pulo Brayan Kota. Di Kecamatan Medan Timur tersebar di Kelurahan Gaharu dan Pulo Brayan Darat II. Di Kecamatan Medan Deli hanya di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Di Kecamatan Medan Labuhan hanya di Kelurahan Sei Mati.

Selanjutnya tingkat kepadatan tinggi sebesar 208 Jiwa/Ha tersebar pada hampir semua kecamatan di Kota Medan. Hanya beberapa kelurahan yang tidak ada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, misalnya Kelurahan Lau Cih dan Simalingkar B (Kecamatan Medan Tuntungan), Kelurahan Tegal Sari I, Tegal Sari III, dan Kota Matsum I (Kecamatan Medan Area), Kelurahan Jati (Kecamatan Medan Maimun), dan Kelurahan Angrung (Kecamatan Medan Polonia). Untuk sebaran kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sebesar

71 Jiwa/Ha relatif merata pada kecamatan di Kota Medan. Ada beberapa kecamatan di Kota Medan yang sebaran tipe perkampungan ini sangat sedikit (Kecamatan Denai, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, dll) bahkan tidak ada (Kecamatan Medan Area). Umumnya kecamatan tersebut adalah kecamatan yang berada pada inti kota Medan. Terakhir untuk kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah sebesar 57 Jiwa/Ha sebagian besar terkonsentrasi di daerah (kecamatan) pinggiran Kota Medan. Hanya di Kecamatan Belawan yang tidak ada kelurahan dengan perkampungan kepadatan rendah.

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi umur penduduk Kota Medan Tahun 2022 dapat diuraikan pada Tabel dan Gambar berikut ini

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2022

Umur	Komposisi Penduduk	Persen
0 - 4	202.591	8,12
5 - 9	195.350	7,83
10 – 14	188.141	7,54
15 – 19	190.263	7,63
20 – 24	198.529	7,96
25 – 29	208.708	8,37
30 – 34	207.132	8,30
35 – 39	201.891	8,09
40 – 44	189.277	7,59
45 – 49	175.008	7,02
50 – 54	151.565	6,08

Umur	Komposisi Penduduk	Persen
55 – 59	123.492	4,95
60 – 64	97.039	3,89
65 – 69	73.242	2,94
70 – 74	48.124	1,93
>75	44.160	1,77
Jumlah	**2.494.512**	**100,00**

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Berdasarkan Tabel di atas apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Medan tahun 2022 paling banyak berumur 25-29 tahun yaitu 208.708 jiwa atau sebanyak 8,37 persen, kemudian dengan kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 207.132 jiwa atau sebanyak 8,30 persen, kemudian kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 202.591 jiwa atau sebanyak 8,12 persen. Kelompok usia penduduk dengan jumlah paling sedikit berada pada rentang usia lebih dari 75 tahun sebanyak 44.160 jiwa atau 1,77 persen populasi Kota Medan, diikuti oleh penduduk berusia 70-74 sebanyak 48.124 jiwa atau 1,93 persen, dan penduduk pada kelompok usia 65-69 tahun sebanyak 73.242 jiwa atau 2,94 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2022 menunjukkan adanya kecenderungan pola Angkatan kerja yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia dewasa yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia dewasa yang potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

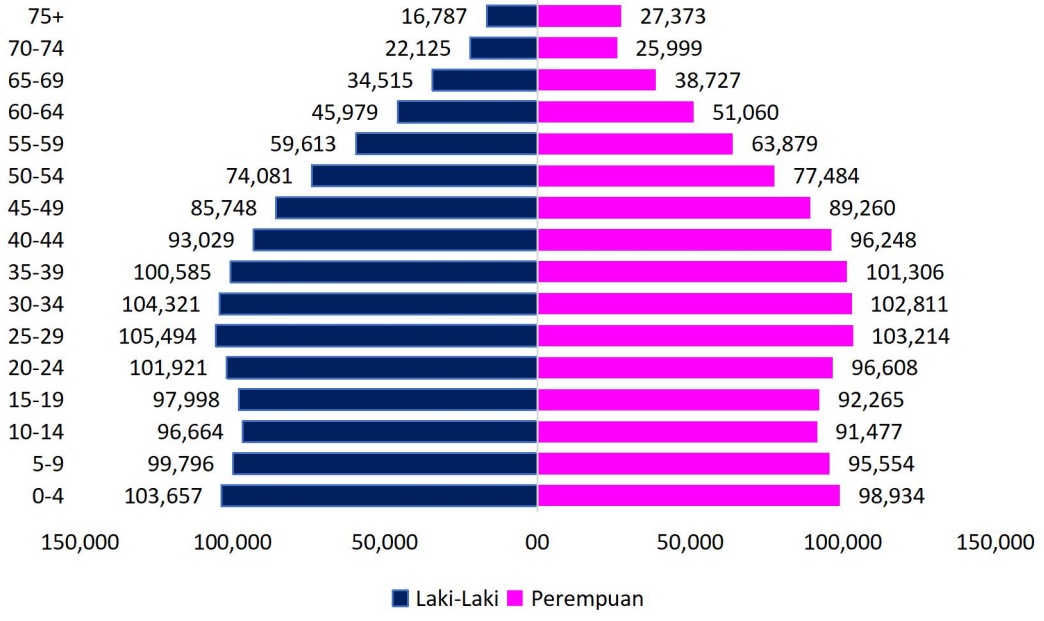
Penduduk berusia kurang dari 25 tahun cukup besar, yaitu sebanyak 39,08 persen populasi atau sebanyak 974.874 jiwa. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dalam 5 tahun mendatang kelompok ini akan bergabung menjadi tenaga kerja baru yang membutuhkan kualitas dan keterampilan SDM yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, dan lingkungan pergaulan yang baik, baik di rumah maupun di masyarakat, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan

memperoleh peluang kerja yang tersedia ketika mereka memasuki pasar kerja..

Di sisi yang lain, Pemerintah Kota Medan harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 8,12% penduduk Kota Medan merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Medan dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Penduduk yang masuk ke dalam kelompok usia tersebut adalah orang yang lahir pada tahun 1990-an yang mulai mencapai usia tersebut, ditambah dengan orang-orang yang bermigrasi ke Kota Medan. Kelompok lansia, yaitu orang yang berusia 60 tahun ke atas, masih memiliki proporsi yang kecil sebesar 10,53 persen. Akan tetapi, proporsi ini diperkirakan akan terus meningkat di masa depan karena pergeseran usia penduduk dan peningkatan usia harapan hidup. Pertambahan jumlah penduduk lansia harus dipersiapkan sejak sekarang karena kelompok ini akan terus bertambah besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam hal ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia, dan kebutuhan sosial dasar lainnya.

Proporsi penduduk menurut kelompok umur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 2.19.
Penduduk Berdasdarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk Kota Medan didominasi oleh perempuan sebanyak 1.252.199 orang atau sebesar 50,20 persen populasi Kota Medan, sementara laki-laki sebanyak 1.242.313 atau sebesar 49,80 persen populasi Kota Medan. Meskipun demikian, proporsi populasi Kota Medan berdasarkan gender relatif seta. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada rentang usia 0-34 tahun penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sementara pada rentang usia 35 tahun ke atas didominasi oleh penduduk perempuan.

2.1.3. Potensi Sumber Daya

1. Perwujudan Kawasan Budidaya

   Program pengembangan kawasan budidaya terdiri dari pengembangan kawasan perumahan; kawasan komersial (perdagangan, jasa, pemerintahan dan bangunan umum); kawasan perindustrian; kawasan khusus (pelabuhan, militer, Pertamina, PLN), fasilitas sosial dan umum, pertanian.

2. Kawasan Strategis Kota Medan

   Pembangunan kawasan strategis memiliki manfaat sebagai pendorong utama pertumbuhan kota, seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pusat kota, pengembangan pusat pemerintahan dan pembangunan kawasan wisata. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kawasan Strategis terdiri dari kawasan strategis bidang ekonomi, masih ada bidang sosial budaya dan lingkungan. Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan mengutamakan dua fokus wilayah, yakni:

   a. KSK Pusat Kegiatan Primer dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional ditetapkan pada 7 kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, dan Medan Kota
   b. KSK Kawasan Utara dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi ditetapkan pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Dalam Kota Medan, pertumbuhan ekonomi dapat diamati dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, diukur melalui dua jenis pendekatan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Distribusi PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dengan sektor-sektor yang memiliki peran besar menjadi basis utama perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang tinggi mengindikasikan sumber daya ekonomi yang besar. Untuk memahami kinerja perekonomian Kota Medan dapat dilihat melalui PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku..

PDRB ADHB Kota Medan mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022 dari Rp 241 Triliun pada tahun 2018 menjadi 280 Triliun pada tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB ADHB terbesar di Kota Medan sebesar Rp 73,5 Triliun pada tahun 2022 dan merupakan penyumbang terbesar selama 5 tahun berturut-turut, kemudian diikuti oleh Sektor Konstruksi dengan PDRB sebesar Rp 53 Triliun, Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 39,7 Triliun, dan Sektor Real Estate sebesar Rp 25,3 Triliun.

PDRB ADHK Kota Medan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun dari Rp 148 triliun pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 165 triliun pada tahun 2020. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang PDRB ADHK terbesar di Kota Medan sebesar Rp 43,6 triliun, diikuti oleh Sektor Konstruksi menyumbang PDRB sebesar Rp 31,8 triliun, Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 21,4 triliun, dan Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 13,2 triliun.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.9.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.714,27	2.692,10	2.695,30	2.502,90	2.675,75
Pertambangan dan Penggalian	0,10	2,40	2,40	2,50	2,68
Industri Pengolahan	32.497,42	34.414,50	34.186,40	36.233,50	39.700,11
Pengadaan Listrik dan Gas	211,14	221,60	233,50	249,50	265,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	435,60	457,90	489,60	507,70	528,47
Konstruksi	42.986,70	46.722,90	45.610,70	49.099,90	53.504,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55.538,09	61.710,10	62.278,30	66.287,20	73.541,91
Transportasi dan Pergudangan	14.012,11	15.395,30	14.136,30	14.121,00	16.446,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.730,28	7.351,20	6.619,80	6.544,30	7.454,45
Informasi dan Komunikasi	11.403,89	12.442,80	13.604,90	14.537,50	16.343,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	14.266,85	14.668,10	14.547,50	15.529,50	16.856,17
Real Estate	19.850,14	21.460,00	23.032,90	23.713,70	25.330,01
Jasa Perusahaan	5.758,77	6.463,40	6.721,60	6.986,80	8.107,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.051,87	4.380,50	4.672,10	4.761,20	4.735,90
Jasa Pendidikan	5.688,75	6.150,10	6.262,50	6.468,60	6.753,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.741,26	4.119,50	4.221,90	4.254,00	4.598,93
Jasa Lainnya	2.593,72	2.830,00	2.882,50	2.921,60	3.314,46
PDRB	**222.483,24**	**241.482,30**	**242.198,20**	**254.721,30**	**280.159,02**

Sumber: BPS Kota Medan 2023

Tabel 2.10.
PDRB Seri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.545,15	1.485,90	1.473,30	1.368,50	1.382,73
Pertambangan dan Penggalian	0,08	1,90	1,80	1,90	1,93
Industri Pengolahan	20.853,30	21.728,20	20.967,30	21.013,70	21.473,77
Pengadaan Listrik dan Gas	162,69	169,60	179,60	185,50	191,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	262,62	275,70	293,80	304,60	314,43
Konstruksi	29.049,29	31.263,20	29.630,90	31.041,00	31.867,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	38.498,26	40.849,50	40.106,90	41.676,30	43.670,04
Transportasi dan Pergudangan	9.131,75	9.693,30	8.476,90	8.250,80	9.213,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.782,24	4.081,70	3.662,10	3.609,70	4.000,89
Informasi dan Komunikasi	9.762,88	10.633,70	11.594,00	12.385,50	13.530,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.147,86	9.337,90	9.429,20	9.770,40	10.024,15
Real Estate	11.567,80	12.168,20	12.710,10	12.728,90	13.269,61
Jasa Perusahaan	3.516,24	3.722,60	3.640,20	3.630,60	4.025,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.457,69	2.622,80	2.696,40	2.748,30	2.726,73
Jasa Pendidikan	4.360,22	4.619,60	4.689,80	4.830,90	5.003,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.308,29	2.416,30	2.413,40	2.415,70	2.552,29
Jasa Lainnya	1.598,98	1.710,40	1.704,30	1.726,90	1.870,69
PDRB	**148.007,14**	**156.780,60**	**153.669,80**	**157.689,20**	**165.120,00**

Sumber : BPS Kota Medan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif baik ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB. Pada tahun 2018 Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, listrik dan gas, real estate dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan dan jasa keuangan. Pada tahun berikutnya seluruh sektor mengalami laju pertumbuhan positif hingga pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 hal ini menandakan Program Pemulihan Ekonomi yang dijalankan di Kota Medan terlaksana dengan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berdasarkan sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

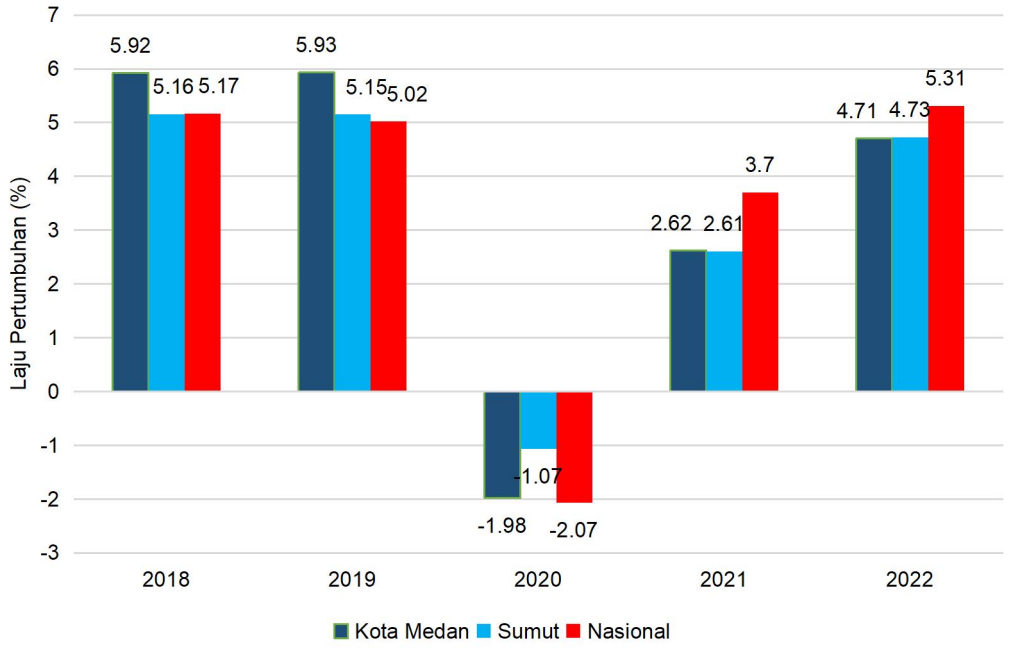
Tabel 2.11.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,23	-3,84	-0,85	-7,11	1,04
Pertambangan dan Penggalian	2,14	-0,66	-1,40	3,32	1,43
Industri Pengolahan	5,03	4,20	-3,50	0,22	2,19
Pengadaan Listrik dan Gas	4,78	4,23	5,91	3,30	3,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,98	4,99	6,54	3,68	3,23
Konstruksi	5,45	7,62	-5,22	4,76	2,66
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,97	6,11	-1,82	3,91	4,78
Transportasi dan Pergudangan	6,62	6,15	-12,55	-2,67	11,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,56	7,92	-10,28	-1,43	10,84
Informasi dan Komunikasi	8,71	8,92	9,03	6,83	9,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	2,08	0,98	3,62	2,60
Real Estate	7,35	5,19	4,45	0,15	4,25
Jasa Perusahaan	7,53	5,87	-2,21	-0,26	10,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	6,72	2,80	1,93	-0,78

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Pendidikan	6,22	5,95	1,52	3,01	3,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,52	4,68	-0,12	0,10	5,65
Jasa Lainnya	7,28	6,97	-0,36	1,32	8,33
PDRB	**5,92**	**5,93**	**-1,98**	**2,62**	**4,71**

Sumber: BPS Kota Medan

Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kota Medan relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2018-2019 ertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami perlambatan dari 5,92 persen dan 5,93 persen. Pada tahun 2020 kondisi ini diperburuk oleh Pandemi Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami kontraksi menjadi -1,98 persen. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dengan capaian sebesar 2,62 persen dan tahun 2022 juga meningkat mencapai sebesar 4,71 persen. Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan , Sumatera Utara dan Nasional tahun 2018-2022 divisualisasikan pada gambar berikut:



Gambar 2.20.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Medan

Selama periode 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang relatif tinggi, seperti yang telah disajikan sebelumnya, memiliki dampak positif pada sektor riil, yang ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa serta

peningkatan lapangan kerja yang lebih luas. Namun, situasi ini berkontradiksi dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian secara keseluruhan, menyebabkan peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19, diperlukan upaya yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Medan dengan merumuskan strategi bersama.

Tentunya, ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk terus berupaya semaksimal mungkin dalam membangun ekonomi Kota Medan ke arah yang lebih baik di masa depan. Tidak bisa dimungkiri bahwa pencapaian kinerja ekonomi sebagaimana telah dijelaskan di atas sangat tergantung pada peran aktif Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait dalam menjalankan pemerintahan daerah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang efektif dalam mengelola ekonomi daerah. Tantangannya adalah bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi yang dinamis, namun belum mampu menciptakan kesempatan kerja baru yang lebih besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, perlu dicatat bahwa kesempatan kerja baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja lokal, karena secara nyata banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah, terutama di sektor konstruksi dan perhotelan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung masuknya tenaga kerja lokal ke dalam pasar kerja.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB Kota Medan menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Medan. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB karena sektor ini cenderung menumbuhkan lapangan kerja secara masif di samping produktivitasnya yang juga cenderung tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB pada masa datang. Struktur PDRB Kota Medan menurut lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2018 – 2022 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,22	1,11	1,11	0,98	0,96
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	14,61	14,25	14,12	14,22	14,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19
F	Konstruksi	19,32	19,35	18,83	19,28	19,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,96	25,55	25,71	26,02	26,25
H	Transportasi dan Pergudangan	6,30	6,38	5,84	5,54	5,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,03	3,04	2,73	2,57	2,66
J	Informasi dan Komunikasi	5,13	5,15	5,62	5,71	5,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,41	6,07	6,01	6,10	6,02
L	Real Estate	8,92	8,89	9,51	9,31	9,04
MN	Jasa Perusahaan	2,59	2,68	2,78	2,74	2,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,81	1,93	1,87	1,69
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,55	2,59	2,54	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,68	1,71	1,74	1,67	1,64
RSTU	Jasa lainnya	1,17	1,17	1,19	1,15	1,18
Distribusi PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Medan

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. PDRB Kota Medan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
PDRB Per Kapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2018 - 2022

Tahun	PDRB Per Kapita (Jutaan Rupiah)		Perubahan (Persen)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2018	98,26	65,37	8,77	5,13
2019	105,92	68,77	7,79	5,20
2020	99,80	63,32	-5,78	-7,92
2021	103,51	64,08	3,72	1,20
2022	112,31	66,19	8,50	3,30

Sumber: BPS Kota Medan.

PDRB per kapita atau pendapatan per individu adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 112,31 juta rupiah, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 66,19 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen. Peningkatan PDRB per kapita ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlu diperhatikan distribusi pendapatan agar lebih merata dan adil.

2.2.4. Laju Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Adapun inflasi Kota Medan selama periode tahun 2018 - 2022 dapat diuraikan pada Tabel berikut:

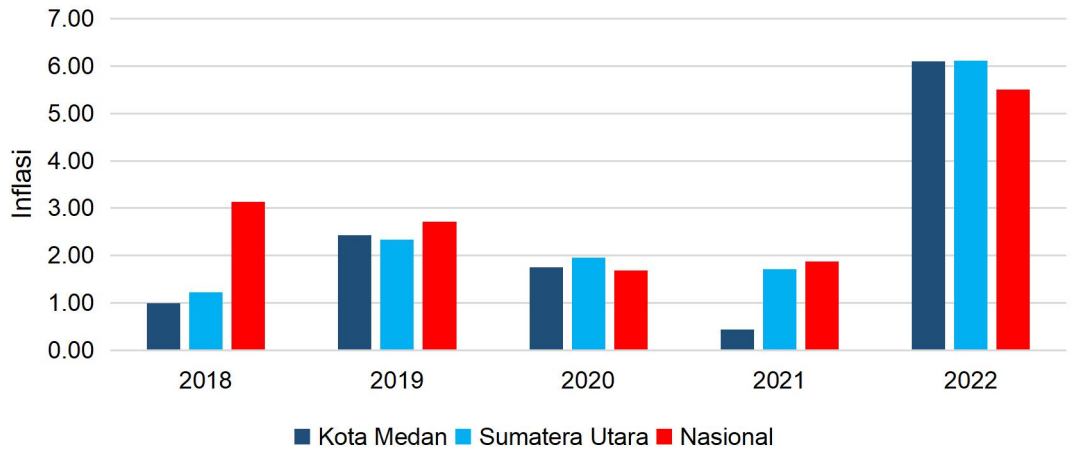
Tabel 2.14.
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kelompok Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022

No	Kelompok Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bahan Makanan	-4,64	3,79	1,89	1,70	2,95
2	Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau	3,65	2,55	3,49	1,82	4,5
3	Perumahan, air, listrik, Gas, dan Bahan bakar	2,64	1,47	0,01	0,95	1,19
4	Sandang	1,20	5,47	1,64	3,63	5,38
5	Kesehatan	3,20	2,62	2,26	0,94	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	1,28	1,43	0,08	0,5	0,55
7	Transportasi dan Komunikasi	3,69	1,29	-1,45	2,56	1,90
Inflasi Kota Medan		**1,00**	**2,43**	**1,76**	**1,70**	**6,10**

Sumber: BPS Kota Medan

Inflasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli. Selama tahun 2022 Tiga besar kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok sandang sebesar 5,38 persen, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,5 persen. Sedangkan yang mengalami inflasi rendah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,55 persen. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi salah satu faktor kenaikan inflasi karena pengaruhnya terhadap biaya produksi dan distribusi barang. Kenaikan BBM memicu efek domino di mana perusahaan akan meningkatkan harga produk untuk mengimbangi kenaikan biaya sehingga akan berdampak pada kenaikan biaya hidup masyarakat. Perbandingan inflasi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.21.
Perbandingan Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, inflasi di Kota Medan relatif lebih rendah. Keibjakan terkait perekonomian yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan dapat mempertahankan kestabilan inflasi.

2.2.5. Ekspor dan Impor

Aktivitas dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sangat diperlukan terutama untuk negara-negara yang memiliki bentuk perekonomian terbuka. Adanya perbedaan berupa keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif merupakan faktor yang selanjutnya dapat mendorong terjadinya pertukaran di antara dua Negara/Kota. Kegiatan pertukaran berupa impor yang dilakukan oleh suatu negara ditujukan untuk memenuhi permintaan suatu negara terhadap komoditas yang dihasilkan dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional berupa impor dikatakan tidak dapat pula dihindarkan karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang berdampak pada biaya produksi dan harga. Perkembangan ekonomi Kota Medan tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor yang memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Untuk nilai ekspor Kota Medan dicatat berdasarkan nilai *Free On Board* (FOB), yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di Pelabuhan Belawan tahun 2018 – 2022 yang siap diekspor ke negara tujuan. Begitupun nilai impor yang dicatat berdasarkan nilai *Cost Insurance & Freight* (CIF) yang merupakan nilai barang di atas kapal berdasarkan pelabuhan bongkar Belawan dan di Pangkalan Udara Soewondo (Medan Polonia). Ekspor melalui wilayah Kota Medan menurut kelompok barang ekonomi adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan lainnya. Nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15.
Nilai Ekspor dan Impor Melalui Wilayah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ekspor (Nilai FOB 000 USD)	Impor (Nilai CIF 000USD)	Surplus Perdagangan (000 USD)
2018	8.064.301,00	5.209.300,00	2.855.001,00
2019	7.943.979,00	4.256.826,00	3.687.153,00
2020	6.921.077,00	3.787.045,00	3.134.032,00
2021	10.168.159,00	4.812.205,00	5.355.954,00
2022	10.891.800,00	4.612.300,00	6.279.500,00

Sumber: BPS & Kemendag.

Berdasarkan data tabel di atas nilai ekspor melalui wilayah Kota Medan yang dicatat nilai *Free On Board* (fob) mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Penurunan ekspor melalui wilayah Kota Medan disebabkan kondisi ekonomi global/regional yang relatif belum kondusif, yakni dampak Covid-19 yang membatasi pergerakan barang dan jasa lintas negara. Di samping itu, kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan akan dapat pulih sebagai dampak secara perlahan peningkatan peringkat kredit (*credit rating*), serta pengumuman dari WHO terkait berakhirnya pandemi Covid-19 akan membuka batasan antar negara. Surplus perdagangan yang terus meningkat memberikan dampak positif bagi perekonomian Medan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa.

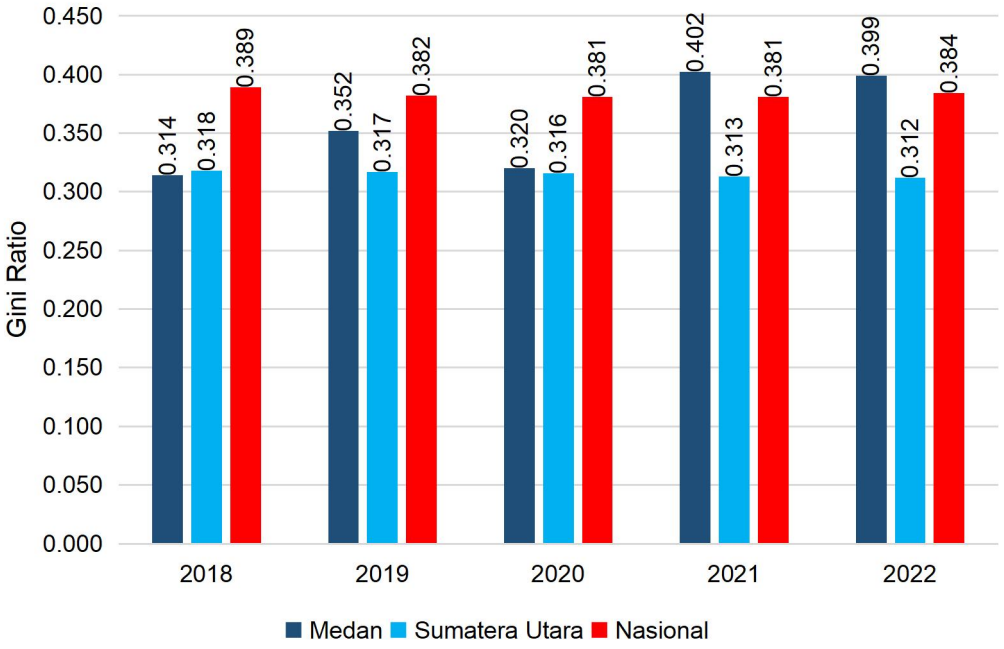
Dilihat dari kecenderungan tersebut, terlihat bahwa Kota Medan masih memegang posisi yang penting dalam perdagangan dalam dan luar negeri, terutama dengan daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Peningkatan impor terutama dipicu oleh pertumbuhan investasi mesin dan peralatan impor, serta alat angkut impor. Sementara itu, trend peningkatan konsumsi di dalam negeri mendorong permintaan untuk mesin-mesin baru agar kapasitas produksi dapat dipertahankan di masa depan. Perdagangan internasional atau antar negara terjadi karena adanya perbedaan spesialisasi dalam menghasilkan komoditas baik berupa barang maupun jasa. Negara-negara memiliki keahlian khusus dalam memproduksi barang atau jasa tertentu, sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah. Perbedaan spesialisasi ini kemudian memicu permintaan dan penawaran dalam perdagangan internasional. Melihat nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan, terlihat jelas bahwa nilai ekspornya lebih besar dari nilai impornya. Hal ini membantu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Selanjutnya, dengan adanya penandatanganan kesepakatan Perdagangan Bebas juga memberikan peluang pasar dan tekanan pada tingkat daya saing industri local serta menjadi tantangan bagi seluruh pelaku usaha (sektor swasta) untuk dapat mendapatkan peluang yang seluas-luasnya dengan terjadinya revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, dari sisi pemerintah daerah perlu terus

memformulasikan kebijakan dan program yang terpadu untuk lebih menggairahkan ekspor-impor terutama dari sisi debirokratisasi dan deregulasi.

2.2.6. Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah - masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kota Medan Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

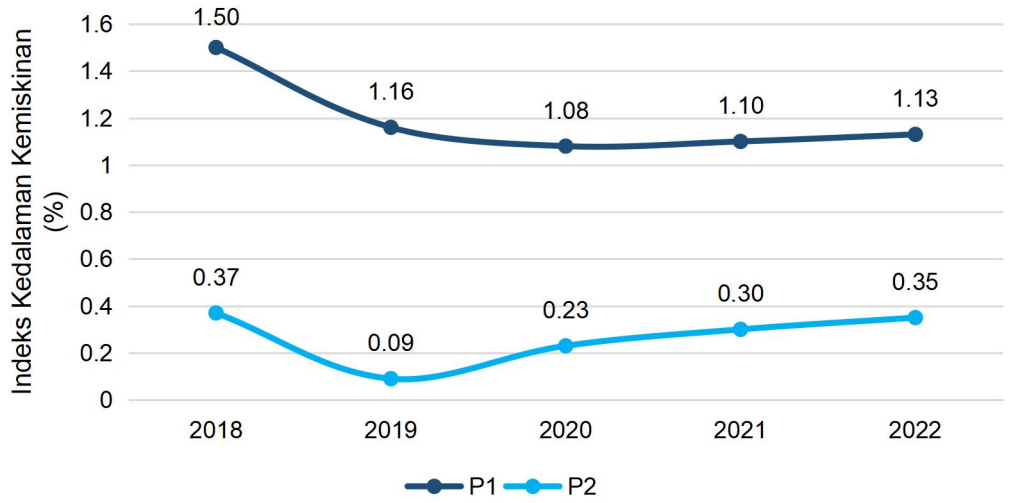
Gambar 2.22.
Rasio Gini Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022

Dari Gambar di atas tampak bahwa Rasio Gini Kota Medan berfluktuasi sejak tahun 2018 – 2022, yakni sebesar 0,314 dan pada tahun 2018, sebesar 0,352 dan pada tahun 2019 menjadi 0,314 pada tahun 2020 dan menjadi 0,402 pada tahun 2021 dan 0,399 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, ketimpangan di Kota Medan relatif berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2018 hingga tahun 2020, namun pada tahun selanjutnya rasio gini Kota Medan berada di atas Provinsi dan Nasional. Peningkatan rasio gini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kota Medan pada tahun 2018-2022 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan belum merata dalam manfaatnya bagi penduduk. Peningkatan pendapatan yang diterima oleh golongan atas jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh golongan bawah.

2.2.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kemiskinan P1 dan P2 adalah ukuran yang digunakan untuk

mengukur tingkat kemiskinan suatu populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 (*Poverty Gap Index*-P1) mengacu pada persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan relatif atau absolut yang ditetapkan. P1 mencakup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat keparahan tertentu. Indeks P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan P2 (*Proverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang lebih luas, yang mencakup lebih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan dibandingkan dengan indeks P1. Indeks P2 mencakup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat keparahan yang lebih rendah daripada indeks P1. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Medan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

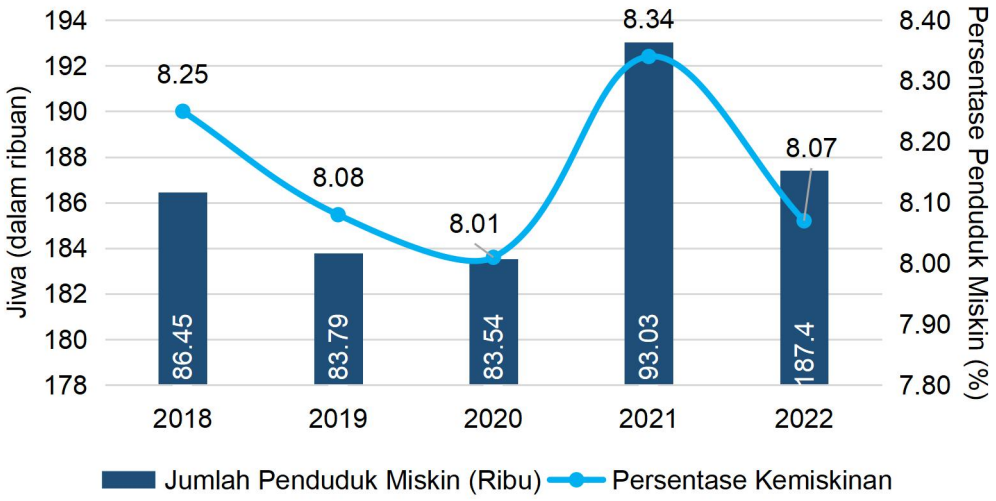
Gambar 2.23.
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dari Gambar di atas tampak bahwa besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2022 reatif menurun, yakni pada tahun 2018 besarnya 1,50 persen dan kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 1,08 persen, pada tahun 2022 meningkat sebesar 1,13 persen.

Sedangkan indeks kedalamam kemiskinan P2 Kota Medan Tahun 2018 sampai dengan 2022 juga berfluktuasi dan cenderung meningkat, yakni pada tahun 2019 besarnya 0,09 persen dan kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,35 persen. Untuk itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini.

2.2.8. Penduduk Miskin

Seperti yang telah diketahui, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan yang memiliki sifat kompleks dan multidimensional. Fenomena kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Secara umum, kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, ketidakberdayaan, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan kota baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Adapun jumlah penduduk miskin Kota Medan tahun 2018-2022 diuraikan pada Gambar berikut:



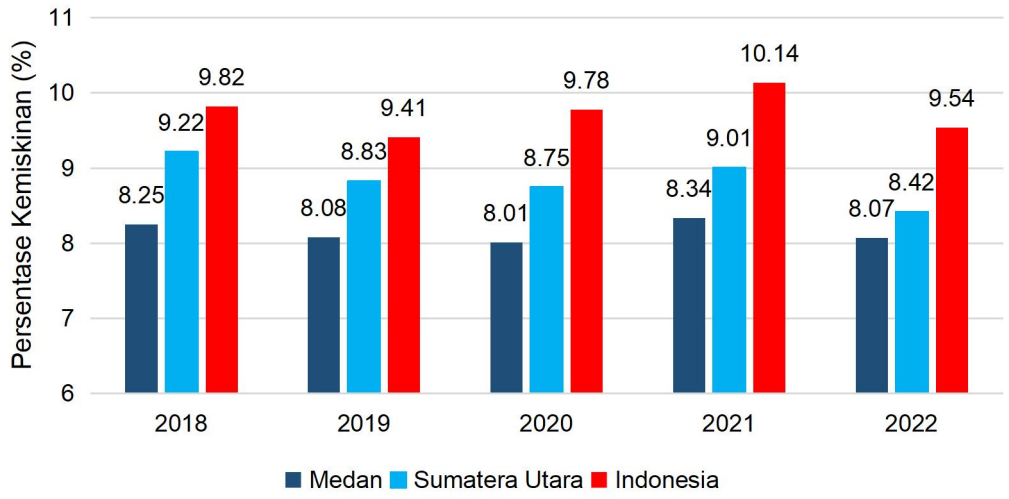
Sumber : BPS Kota Medan

Gambar 2.24.
Kondisi Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2018-2022

Gambar tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan di Kota Medan selama tahun 2018-2022. Jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2018 sebanyak 186,45 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 8,25% menurun

hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 183,54 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 8,01%, namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat pesat menjadi sebanyak 193,03 ribu jiwa dengan perentase kemiskinan sebesar 8,34%. Peningkatan ini terjadi sebagai dampak dari isu global Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK. Namun, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin menurun menjadi sebesar 187,4 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 8,07%.

Jika dibandingkan dengan kemiskinan provinsi dan nasional, Kota Medan lebih baik karena selalu berada di bawah Sumatera Utara dan Provinsi. Hal tersebut menunjukkan Perbandingan persentase kemiskinan antara Kota Medan dengan provinsi dan nasional selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

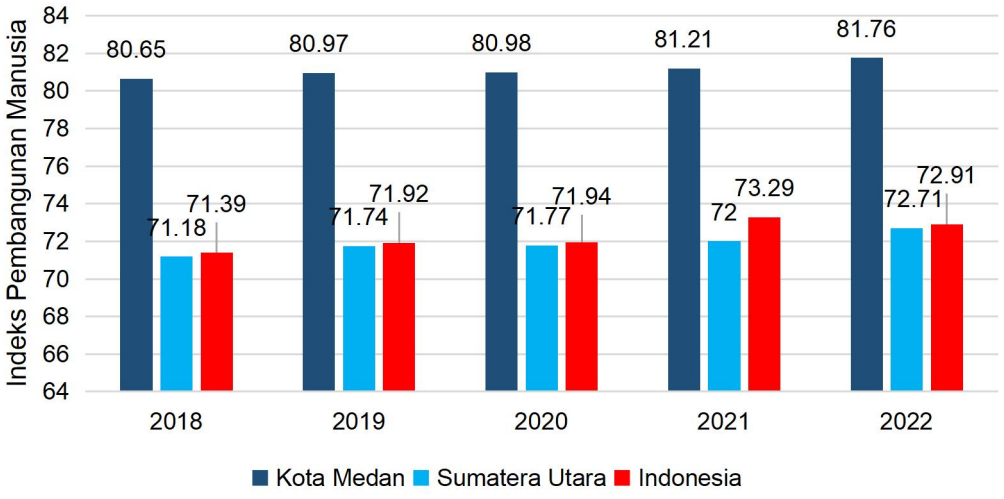
Gambar 2.25.
Perbandingan Persentase Kemiskinan oleh Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah sebuah gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam IPM, yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Angka IPM memberikan petunjuk mengenai peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di daerah tersebut. Pemerintah Kota Medan berupaya meningkatkan kualitas sumber

daya manusia di wilayahnya melalui berbagai cara, termasuk peningkatan aspek fisik seperti kesehatan, aspek intelektualitas seperti pendidikan, aspek kesejahteraan ekonomi, seperti daya beli, dan aspek moralitas seperti iman dan ketaqwaan. Dengan demikian, IPM dapat dijelaskan melalui berbagai indikator, seperti tingkat melek huruf, durasi sekolah, dan konsumsi per kapita Namun saat ini indikator penyusun IPM diubah. Pertama, Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka melek huruf diganti dengan Angka Harapan Sekolah. Kedua, PDB per kapita juga tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah sehingga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB). PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Medan.

Gambar 2.26.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan selama tahun 2018–2022 mengalami peningkatan 1,38 persen dari tahun 2018 atau 0,24 persen per

tahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain itu, peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi dalam kemampuan masyarakat untuk membeli dan memperoleh pendapatan. Hal ini berdampak pada peningkatan dalam kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk yang tecermin dalam peningkatan usia harapan hidup, rata-rata durasi sekolah, dan konsumsi per kapita yang lebih tinggi oleh masyarakat di Kota Medan.

2.2.10. Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf di kota Medan cenderung semakin membaik yang ditandai dengan semakin sedikitnya warga masyarakat yang buta huruf. Angka ini tidak akan menjadi lebih besar sebab *drop out*, terutama drop out pada kelas 1 (satu) dan 2 (dua) potensial menjadi buta huruf. Meskipun adanya angka *drop out* di masa datang, mereka tidak bisa dikatakan sebagai warga yang buta huruf, karena sesungguhnya sebelum memasuki dunia sekolah telah mendapatkan keterampilan membaca dan menulis. Pemberantasan buta huruf sesungguhnya memiliki substansi agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini hanya bisa terjadi apabila substansi buta huruf aksara sudah dapat ditingkatkan menjadi keberaksaraan fungsional. Dengan keberaksaraan fungsional semua warga akan dapat memfungsikan kegiatan membaca dan menulis untuk memenuhi informasi dan pengetahuan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tabel 2.16.
Angka Melek Huruf Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (persen)

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka melek huruf (usia > 15 tahun)	48,01	73,41	76,74	99.97	99,98	99,98

Sumber : BPS Kota Medan

2.2.11. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua.

Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Kondisi ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Medan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA atau putus sekolah dikelas 2 SMA. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.17.
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2018-2022

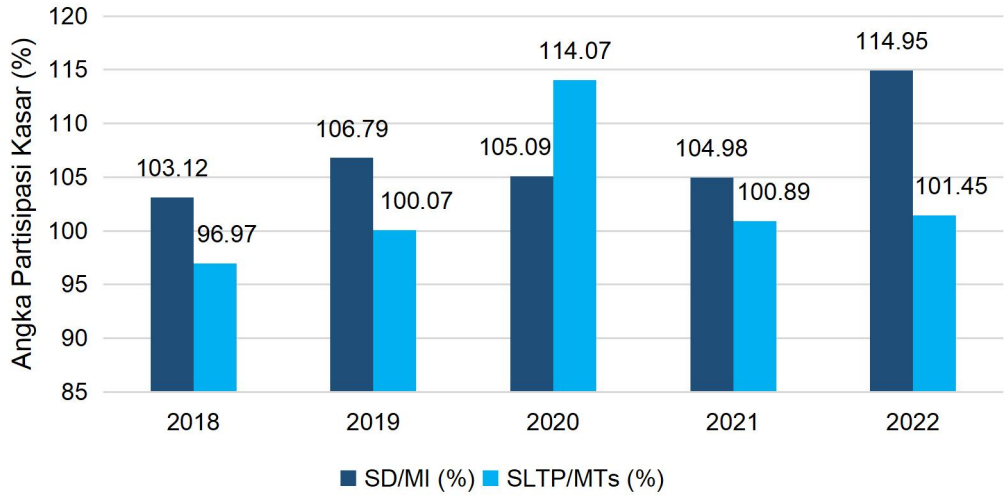
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,72	14,73	14,74	14,75	14,77
2	Rata-Rata Lama Sekolah	11,37	11,38	11,39	11,48	11,50

Sumber: BPS Kota Medan

2.2.12. Angka Partisipasi Kasar

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para pendidik profesional dengan program yang dituangkan kedalam kurikulum untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila berkualitas dan dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan latihan. Selanjutnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kota di bidang pendidikan dapat diketahui

berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Medan

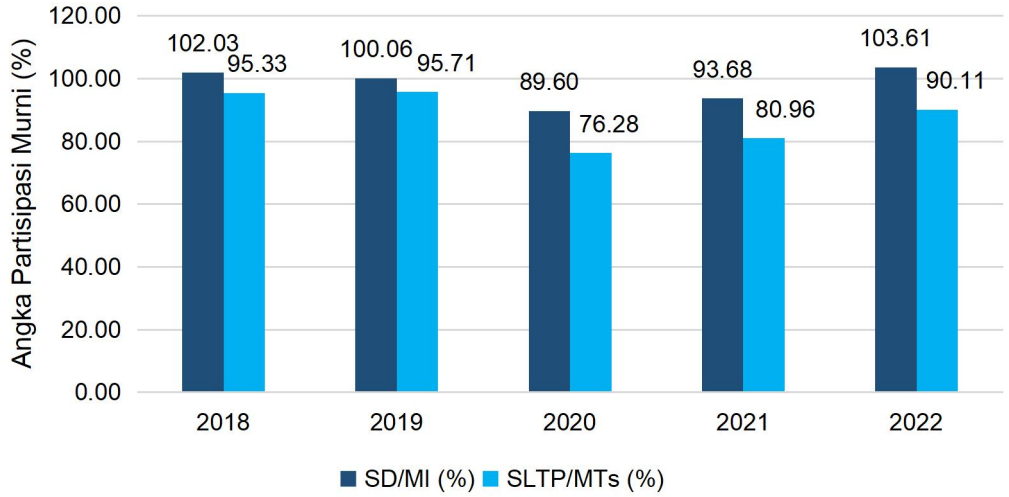
Gambar 2.27.
Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan tabel di atas APK untuk jenjang pendidikan SD cenderung mengalami peningkatan dari 103,12 pada tahun 2018 menjadi 114,95 pada tahun 2022, sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SMP berfluktuasi dari 96,97 pada tahun 2018 menjadi 114,07 pada tahun 2020, namun tahun berikutnya menurun menjadi 101,45 pada tahun 2022.

2.2.13. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.28.
Angka Partisipasi Murni di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

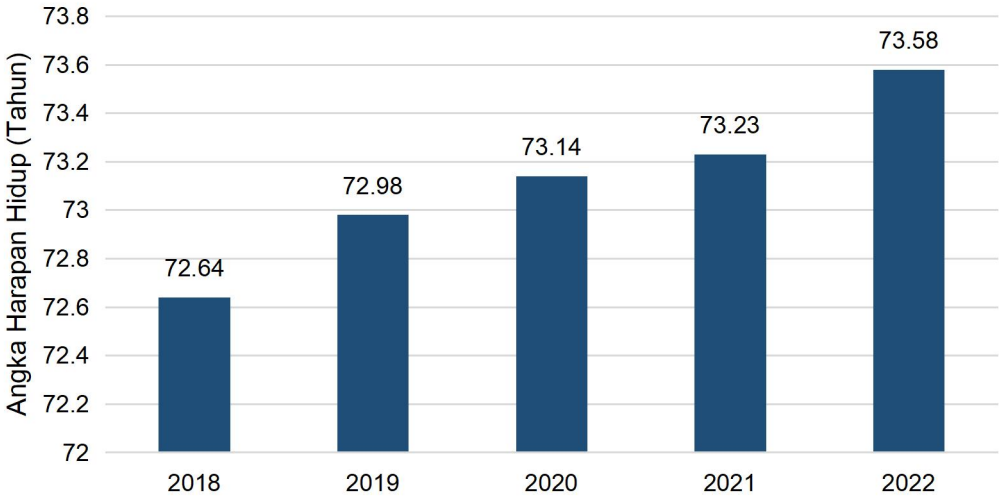
Berdasarkan Gambar tersebut, APM Kota Medan pada jenjang pendidikan SD berfluktuasi dari 102,03% pada tahun 2018 menurun menjadi 89,60% pada tahun 2020, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat hingga tahun 2022 menjadi 103,61%. Sementara itu, APM Kota Medan pada jenjang pendidikan SMP juga mengalami hal serupa, dari 95,33% pada tahun 2018 menurun menjadi 76,28% pada tahun 2020, namun pada tahun berikutnya meningkat hingga menjadi 90,11% pada tahun 2022.

2.2.14. Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang terkait dengan kemampuan penduduk. Tingkat kesehatan dapat dilihat dari lamanya harapan hidup yang dapat dicapai. Semakin tinggi lamanya harapan hidup, semakin tinggi juga tingkat kesehatannya. Harapan hidup mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat, menggambarkan baik "lama hidup" maupun "hidup dalam kondisi sehat". Oleh karena itu, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

tingkat kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas hidup agar mencapai masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera secara fisik dan mental, dan berperadaban dalam menghadapi persaingan regional dan global. Tujuan khusus pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat, serta meningkatkan sistem pemantauan, pengawasan, dan informasi kesehatan.

Angka Harapan Hidup mengindikasikan probabilitas bahwa seorang bayi yang baru lahir akan mencapai usia tertentu. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari lamanya harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup di Kota Medan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya, menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Medan. Pada tahun 2022, Angka Harapan Hidup mencapai 73,58 tahun, yang berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat hidup hingga usia tersebut. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Medan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat, perbaikan kondisi lingkungan yang lebih baik, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Medan. Data Angka Harapan Hidup di Kota Medan dari tahun 2018 hingga 2022 disajikan dalam Gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.29.
Angka Harapan Hidup Kota Medan Tahun 2018- 2022

2.2.15. Penanganan Balita Gizi Buruk dan Stunting

Pembangunan kesehatan suatu negara dimulai dengan menciptakan generasi yang sehat dan produktif, oleh karena itu penanganan dan perawatan anak balita dengan gizi buruk menjadi prioritas yang penting. Di Kota Medan, kasus-kasus gizi buruk telah ditangani dengan semakin baik. Namun, upaya pencegahan agar kasus gizi buruk tidak terjadi perlu ditingkatkan melalui program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di layanan kesehatan masyarakat. Analisis data menunjukkan bahwa cakupan perawatan gizi buruk di Kota Medan mencapai hasil yang optimal dalam beberapa tahun terakhir (2018-2022), yaitu mencapai angka 100% atau seluruh anak balita dengan gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, langkah pencegahan perlu diambil agar kasus gizi buruk tidak terjadi lagi dalam lima tahun mendatang.

Selain permasalahan di atas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Stunting (kerdil) Dimana kondisi balita memiliki Panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, Kesehatan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Prevalensi balita stunting menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2020 sebesar 1,80% menjadi 0,31% oada tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari Upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Namun demikian, Pemerintah Kota Medan berkomitmen meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan sensitive guna mengurangi jumlah balita stunting di Kota Medan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan disajikan pada tabel di bawah ini.

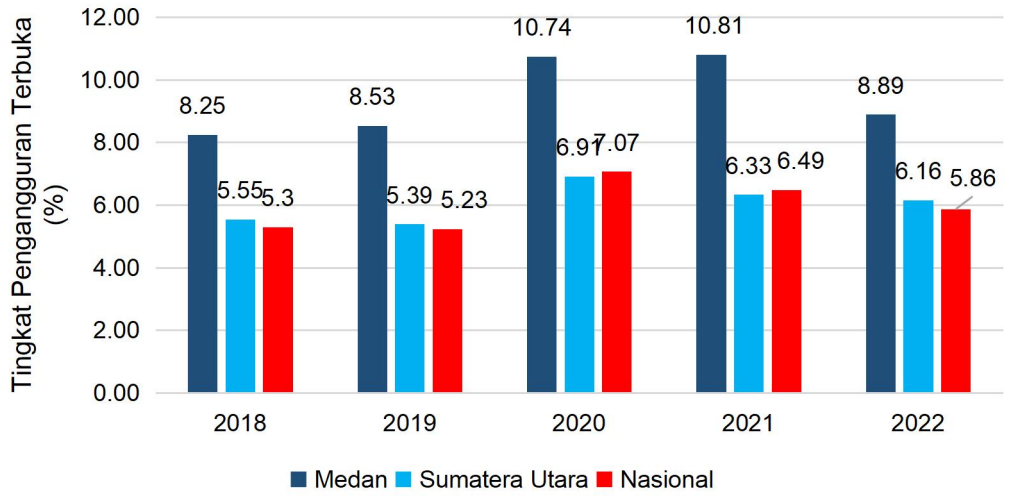
Tabel 2.18.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Balita Stunting	N/A	N/A	491	368	364
Jumlah Balita yang Diukur	N/A	N/A	27.268	94.753	119.225
prevalensi	N/A	N/A	1,80%	0,38%	0,31%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan (EPPGBM),2022

2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

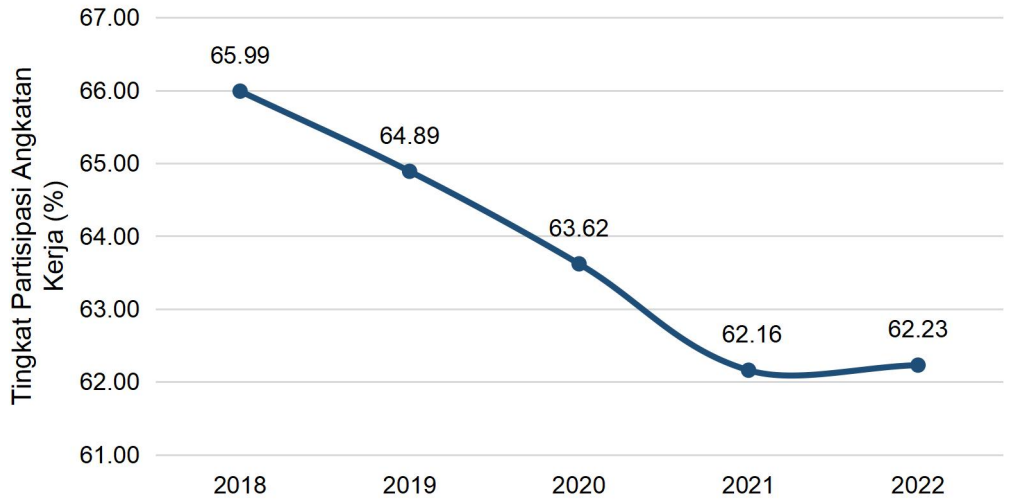
Gambar 2.30.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan relatif meningkat dari 8,25 tahun 2018 menjadi 10,91 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8,89 persen. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, TPT Kota Medan selalu lebih tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Medan, hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi di Kota Medan. Selain itu, angkatan kerja di Kota Medan secara umum masih belum memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Medan dalam menekan angka pengangguran yang cukup mengkhawatirkan.

2.2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengacu pada persentase individu yang berusia produktif (biasanya antara 15-64 tahun) yang aktif dalam angkatan kerja, baik dalam pekerjaan formal maupun informal. TPAK digunakan

sebagai indikator untuk mengukur tingkat keterlibatan dan kontribusi angkatan kerja terhadap perekonomian suatu negara. TPAK dapat memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan sumber daya manusia dan tingkat ketergantungan pada tenaga kerja di suatu populasi. Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.31.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Medan Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Medan mengalami penurunan selama 5 tahun. Pada tahun 2018, TPAK Kota Medan sebesar 65,99% mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 62,23%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya keterlibatan angkatan kerja usia produktif dalam perekonomian.

2.2.18. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pemerataan pembangunan tidak hanya semata diukur dari indeks kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, namun juga diukur dari kondisi sosial yang diukur dengan kesetaraan gender. Ketidakadilan gender adalah ketidakadilan yang terjadi karena sistem dan struktur sosial yang membuat baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban. Keadilan gender dapat terwujud apabila terdapat kondisi di mana peran dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki seimbang, serasi, setara, dan harmonis. Pengukuran kesetaraan gender tersebut menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Perkembangan indeks tersebut disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.19.
Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Tahun 2018 – 2022

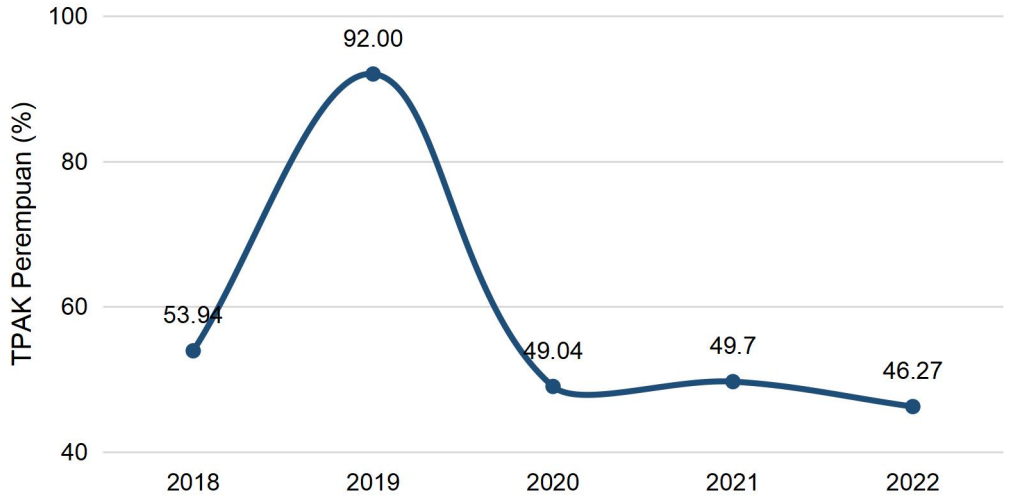
Tahun	IPM	IPM (Laki-Laki)	IPM (Perempuan)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2018	80,65	84,78	79,68	93,98	63,36
2019	80,97	85,09	80,00	94,02	63,93
2020	80,98	85,12	80,01	94,00	63,89
2021	81,21	85,47	80,47	93,76	63,91
2022	81,76	85,98	80,69	93,85	64,31

Sumber : BPS Kota Medan

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian gender laki-laki dan perempuan cukup adil. Hal ini disebabkan karena Indeks Pemberdayaan Gander (IDG) mangukur partisipasi aktif Perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknik. Ditambah lagi, pengarusutamaan Gander juga tidak boleh melanggar hak asasi perempuan yang memang berkeinginan untuk lebih fokus di keluarga/ rumah tangga, daripada karir.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keterlibatan perempuan dalam perekonomian, maka dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. TPAK Perempuan di Kota Medan relatif

menurun sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut TPAK perempuan sebesar 92% menurun hingga tahun 2022 menjadi 46,27%. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.32.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang tidak terlibat dalam perekonomian di Kota Medan. Hal ini dapat disebabkan oleh standar kualifikasi pendidikan perempuan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar yang berada di Kota Medan dan semakin berkurangnya minat perempuan untuk menjadi tenaga kerja.

2.2.19. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kota Medan yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi Untuk mewujudkan program pembangunan kota yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk

kota yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah penduduk Kota Medan yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2018–2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20.
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	**1.130.034**	**1,104,418**	**1,134,643**	**1,120,160**	**1,132,474**
Bekerja	1.020.281	1,010,253	1,012,820	999,095	1,031,769
Pengangguran	91.753	94,165	121,823	121,065	100,705
Bukan Angkatan Kerja	**414.873**	**701,879**	**648,888**	**681,806**	**687,273**
Sekolah	182.827	197,160	179,124	180,056	201,426
Mengurus Rumah Tangga	326.831	326,792	377,065	379,492	393,615
Lainnya	63.561	73,509	92,699	122,258	92,232
Jumlah	**1.685.253**	**180,6297**	**1,783,531**	**1,801,966**	**1,819,747**

Sumber: BPS Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas jumlah angkatan kerja periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi yakni pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.130.034 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan 414.873 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) dan pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.132.474 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan jumlah yang bekerja sebanyak 1.031.769 jiwa dan pengangguran mencapai 100.705 jiwa. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak perusahaan yang menghadapi tantangan berat dalam menjalankan roda bisnis dan memilih opsi merumahkan sebagian karyawan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

2.2.20. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh ketersediaan pangan utama yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.21.
Skor Pola Pangan Harapan di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

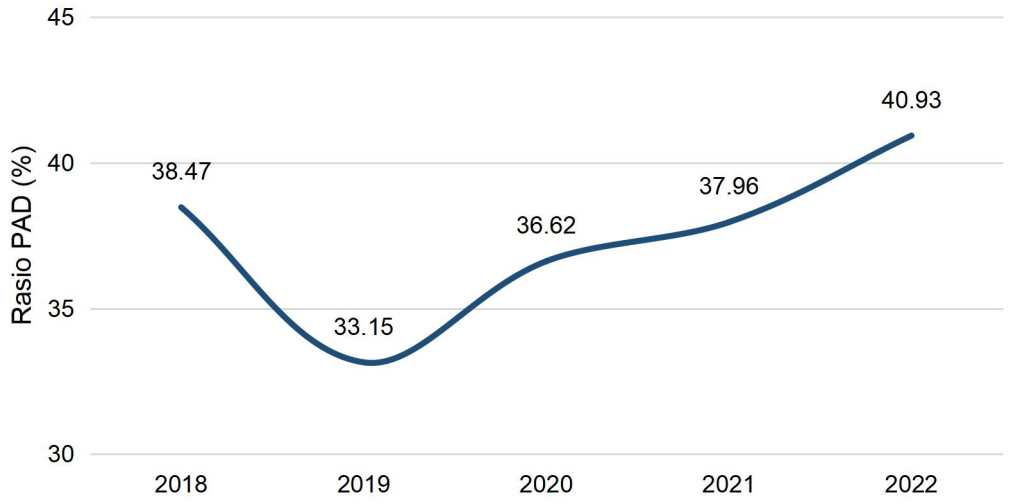
Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Skor Pola Pangan Harapan	Poin		92,0	92,29	89,80	92,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Dari tabel di atas menunjukkan ketersediaan pangan utama Kota Medan cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 92,00 poin sampai dengan tahun 2022 mencapai sebesar 92,90 poin.

2.2.21. Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah dapat dicerminkan dari rasio PAD terhadap Pendapatan merupakan perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi pendapatan. Tingkat Kemandirian Daerah selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber: LPPD

Gambar 2.33.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Medan relatif menurun. Pada tahun 2018, persentase PAD terhadap pendapatan Kota Medan sebesar 38,47% cenderung meningkat hingga tahun 2022 mencapai sebesar 40,93%. Hal ini menunjukka bahwa semakin berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatannya sendiri. Meningkatnya PAD menandakan bahwa semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik, membiayai proyek pembangunan, atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.22. Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian atas laporan keuangan daerah dalam hal ini laporan keuangan Pemko Medan yang dilakukan secara periodik setiap tahun. Hasil penilaian BPK atas laporan keuangan Pemko Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Medan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD

Tabel di atas menunjukkan bahwa Opini BPK Terhadap laporan keuangan Pemko Medan periode 2018 dan 2019 masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 menjadi lebih baik dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

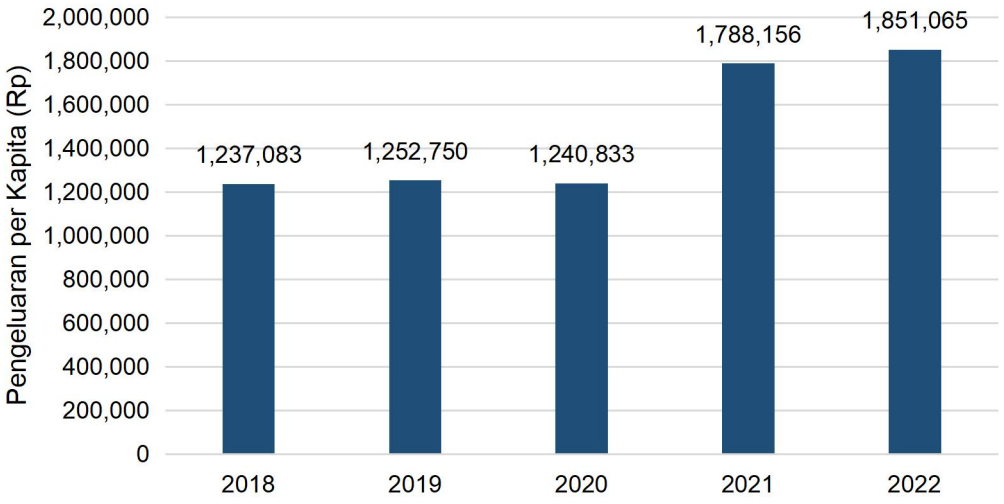
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan.

Selain PDRB indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah inflasi. Tingkat inflasi di Kota Medan selama

periode tahun 2018-2022 cenderung menunjukkan angka yang berfluktuasi , menurut komoditi yang mempengaruhi inflasi cenderung didominasi oleh sandang, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olah raga serta transportasi dan komunikasi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat. Berdasarkan atas data tersebut di atas, maka Kota Medan merupakan salah satu pasar potensial yang besar, didukung oleh jumlah penduduk yang besar pada masa yang akan datang.

2.3.2. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat, pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok, sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 yakni, jumlah pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok barang makanan. Adapun besarnya pengeluaran per kapita per bulan di Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.34.
Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kota Medan Tahun 2018-2022

2.3.3. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Kasus kriminal yang sangat menonjol adalah curas, curat, curanmor, anirat, judi, peras/ancam, narkoba, penggelapan dan penipuan.

Walaupun jumlah angka kriminalitas cenderung dapat terus ditekan dari tahun 2018 ke tahun 2020, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang signifikan sebanyak 7.613 kasus dan hal ini harus dicermati sebagai dampak pandemi yang memberi tekanan terhadap perekonomian sehingga berdampak pada keamanan dan ketertiban umum untuk itu perlu meningkatkan citra kota yang aman dan nyaman, perlu kebijakan yang lebih terpadu untuk dapat terus menekan angka kriminalitas yang terjadi, khususnya terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan. Adapun kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2018 - 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Jumlah Jenis Tindakan Pidana Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Kejadian	Jenis Tindak Pidana		
		2018	2019	2020
1	Curas	305	294	272
2	Curat	1.171	985	1.018
3	Curanmor	1.242	1.261	1.079
4	Anirat	906	836	901
5	Judi	235	58	132
6	Peras/Ancam	114	102	91
7	Narkoba	1.852	2.117	2.350
8	Penggelapan	1.125	1.086	1.166
9	Penipuan	817	852	1.206
Jumlah Kasus Menonjol		**1868**	**1.671**	**1845**
Jumlah Kasus		**9.635**	**9.262**	**10.060**

Sumber : LPPD Kota Medan

Tabel 2.24.
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Kejadian	Penyelesaian Tindak Pidana		
		2018	2019	2020

No	Jenis Kejadian	Penyelesaian Tindak Pidana 2018	2019	2020
1	Curas	206	213	195
2	Curat	819	723	687
3	Curanmor	303	361	306
4	Anirat	668	646	680
5	Judi	227	62	138
6	Peras/Ancam	112	101	54
7	Narkoba	1.679	1.827	2.403
8	Penggelapan	672	742	741
9	Penipuan	408	422	507
Jumlah Kasus Menonjol		**1.847**	**1.752**	**1.839**
Jumlah Kasus		**6.941**	**6.849**	**7.613**

Sumber : LPPD Kota Medan

2.3.4. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Selama tahun 2018 - 2022 fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci antara lain:

1. Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik.

   Selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi jalan di Kota Medan mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2022 ada kurang lebih 90% jalan kota dalam kondisi mantap. Tindakan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19, menyebabkan berkurangnya anggaran pemeliharaan infrastruktur Kota, khususnya jalan. Kota Medan memiliki 70,72 Km panjang jalan nasional, 37,55 km panjang jalan provinsi dan 3729,50 km panjang jalan kota. Adapun Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik Kota Medan Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan kota dalam Kondisi Mantap	Persen	88,60	89,79	89,85	89,78	89,45
Panjang jalan provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	88,66	96,54	96,27	90,15	93,34

Sumber: BPS Kota Medan

Selain sebagai urat nadi perekonomian daerah, jalan juga sekaligus mempengaruhi persepsi terhadap sebuah kota. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang lebih relevan untuk mewujudkan kondisi jalan seluruhnya dalam kondisi baik/mantap, guna meningkatkan citra Kota Medan sebagai kawasan investasi yang menarik, misalnya dengan lebih mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengelolaan urusan kebinamargaan.

2. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Medan mengalami mengalami penurunan. Pada tahun 2018, rumah tangga bersanitasi layak sebanyak 89% cenderung menurun hingga tahun 2022 menjadi 82,30%, sedangkan rumah tangga bersanitasi aman cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 3,70% mengalami peningkatan ingga tahun 2020 menjadi 4,85. Dengan demikian, Kota Medan tentunya masih membutuhkan program-program pembangunan sanitasi yang lebih progresif untuk mendukung pencapaian target nasional. Untuk pelayanan air limbah di Kota Medan terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat (*Off Site*) yaitu melalui jaringan perpipaan dan SPAL setempat (*on site*). Secara umum untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik di Kota Medan sudah mencapai 98,60%.

Tabel 2.26.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persen	89,00	89,86	90,72	82,02	82,30
Rumah Tangga Bersanitasi Aman	Persen	3,70	3,89	4,85	-	-

Sumber : RPIJM dan Roadmap

3. Rumah Layak Huni

Selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah rumah layak huni di Kota Medan berfluktuasi, Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah, pada tahun 2016 terdapat 97,29 persen rumah layak huni di Kota Medan dan meningkat cukup tajam pada tahun 2017 hingga menjadi 99,79 persen rumah layak huni, namun tahun 2018 dan 2019 cenderung mengalami penurunan masing-masing menjadi 83,13 persen pada tahun 2018 dan menjadi 93,75 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir

disebabkan antara lain meningkatnya jumlah penduduk akibat arus urbanisasi yang mengakibatkan tumbuhnya wilayah kumuh di Kota Medan.

Tabel 2.27.
Persentase Rumah Layak Huni di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Layak Huni	Persen	83,13	93,75	93,75	85,78	89,42

Sumber: Dinas PKP2R

Berdasarkan tabel di atas, diketahui Kota Medan membutuhkan program-program terpadu untuk mengurangi rumah tidak layak huni, guna menghapus kawasan-kawasan kumuh Kota Medan dan program ini telah dicanangkan secara nasional.

4. Persentase Kawasan Kumuh

Persentase kawasan kumuh lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Walikota, terdapat 2.19 persen kawasan kumuh dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 0.24 persen. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan persentase kawasan kumuh di Kota Medan, disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sehingga perlunya renovasi maupun pembangunan rumah baru.

Tabel 2.28.
Kawasan Kumuh di Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kawasan Kumuh	0,27	0	819,80	506,60	306,00

Sumber: Dinas PKP2R

Berdasdarkan tabel di atas, Kawasan Kumuh pada tahun 2019 kawasan kumuh tuntas menjadi 0 hektar dari 0,27 ha di tahun 2018. Namun dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 maka terdapat indikator-indikator penentuan kawasan kumuh dan terdapat penambahan (updating) kawasan kumuh di tahun 2020 seluas 819,80 ha. Pada tahun 2022 kawasan kumuh Kota Medan menurun menjadi 306,00 ha. Berdasarkan atas data tabel di atas, perlu kebijakan yang lebih terpadu, dalam meningkatkan tata bangunan, sebab juga akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lingkungan hidup lainnya.

2.3.5. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Perizinan

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun tingkat regional dan, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak ganda (*multiplier effect*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertambahan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkan akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah Kota Medan telah memiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Dinas tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan melalui satu atap. Di antara izin yang proses administrasinya telah diserahkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berasal dari Dinas Kesehatan, Bina Marga, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perhubungan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pelayanan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pada tahun 2019 jenis dan jumlah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah 137 jenis izin, 91 perizinan dan 46 non perizinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, peningkatan kinerja terus diupayakan guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk meminimalisir kesulitan dalam pelayanan administrasi serta memberikan sarana ruangan yang lebih baik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa perizinan maka telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya: melakukan pergantian meja loket menjadi lebih baru dan lebih rapi,menambah meja loket khusus untuk layanan perbantuan OSS (*Online Single Submission*), menambah wallpaper di ruangan lobby dan ruang rapat, mendekorasi ulang tata ruang lobby dan menambahkah assesoris seperti bunga dan gambar, mengganti gorden (tirai) dengan warna dan desain yang baru sehingga memberikan nuansa yang lebih segar dan nyaman. Kamar kecil (toilet) juga dilakukan pembenahan lantai dan dinding sehingga lebih bersih dan nyaman. Selain itu peningkatan di bidang Teknologi Infomasi dimana pengurusan izin sudah dilakukan secara on-line, dan masyarakat dapat menggunakan layanan *SMS Gateway* dan Website DPMPTSP untuk melihat perkembangan mengenai izin yang diajukan. DPMPTSP Kota Medan juga menyediakan 2 (dua) unit perangkat *touch screen* di ruang tunggu sebagai sarana bagi pemohon untuk dapat mengakses informasi tentang berkas yang dimohonkan sudah sampai tahap mana prosesnya, dan juga dapat mengakses informasi tentang DPMPTSP Kota Medan. Petugas informasi juga sudah ditambah menjadi 4 (empat) personil, yang sebelumnya hanya 2 (dua) orang, dan telah ditambah 4 (empat) orang untuk petugas layanan perbantuan OSS sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

2. Investasi

   Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun pananaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya dukung daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya

terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.Kemampuan daerah untuk menentukan faktor faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan karena memiliki sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko usaha. Dalam kasus daerah berkembang ketiga bagian ini sering didengungkan, akan tetapi dalam kenyataannya sering tidak sesuai. Sejumlah faktor lain yang juga berpengaruh pada iklim berinvestasi adalah kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.

Dalam hal ini Kota Medan didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, seperti: pelabuhan Belawan dan Bandara Kuala Namu Deli Serdang yang sangat dekat dengan Kota Medan. Selain hal tersebut, pemerintah kota juga telah melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan nilai investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Program-program tersebut diantaranya: program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi, maupun program peningkatan pelayanan. Perkiraan total investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA) di Kota Medan selama tahun 2018– 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.29.
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMA Kota Medan Tahun 2018-2022

Sektor		2018		2019		2020		2021		2022	
		Proyek	Investasi (US$ Ribu)	Proyek	Investasi (US$ Ribu)	Proyek	Investasi (US$ Ribu)	Proyek	Investasi (US$ Ribu)	Proyek	Investasi (US$ Ribu)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (Sektor)	**1**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
Sektor Sekunder	Industri Makanan	23	9.039,80	25	14.799,50	63	8.392,80	28	939,60	29	1.232,2
	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Industri Kayu	3	0,00	5	98,20	7	811,20	4	0,00	4	
	Industri Kertas dan Percetakan	3	0,00	3	0,00	6	0,00	3	463,00	2	32,4
	Industri Kimia dan Farmasi	9	35.552,30	14	20.218,50	31	15.806,30	12	0,00	9	1.821,0
	Industri Karet dan Plastik	5	0,00	5	0,00	12	0,00	4	149,40	4	-
	Industri Mineral Non Logam	2	0,00	3	0,00	1	0,00	2	798,50	2	9,0
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3	439,60	5	1.204,40	9	0,00	4	0,00	3	-
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	387,00	2	986,90	2	700,00	4	0,00	2	348,4
	Industri Lainnya	-	-	3	2.200,00	-	-	3	1.145,60	1	-
	Total (Sektor)	**50**	**45.418,70**	**65**	**39.507,50**	**131**	**25.710,30**	**64**	**3.496,10**	**56**	**3.443,0**
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	5	290,40	13	206,80	9	3.482,30	5	213,80	2	4,1
	Konstruksi	5	526,10	18	924,20	11	3.461,60	19	657,40	4	68,1
	Perdagangan dan Reparasi	35	2.034,80	65	734,10	88	255,20	71	817,20	62	3.082,7
	Hotel dan Restoran	15	358,10	54	2.196,70	147	979,30	56	2.093,90	76	13.445,8
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5	15.928,20	12	10.936,50	13	642,30	14	42.273,40	15	5.358,2
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9	3.516,30	18	2.518,50	31	4.503,50	15	1.722,90	12	13.444,5
	Jasa Lainnya	28	6.322,60	84	90.131,90	121	1.224,00	43	5.921,60	42	2.289,6
	Total (Sektor)	**102**	**28.976,50**	**264**	**107.648,70**	**420**	**14.548,20**	**223**	**53.700,20**	**213**	**37.693,0**
Total		**153**	**74.395,20**	**329**	**147.156,20**	**551**	**40.258,50**	**287**	**57.196,30**	**269**	**41.136,00**

Tabel 2.30.
Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN Kota Medan Tahun 2018-2022

Sektor		2018		2019		2020		2021		2022	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	-	10	162.393,4	15	256,5	16	90,5	31	393,20
	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	4	0,0	8	63,20
	Perikanan	-	-	1	6.972,8	5	0,0	8	0,2	22	2.049,60
	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	3	0,0	6	17.701,80
	Total (Sektor)	-	-	**11**	**169.366,2**	**20**	**256,5**	**31**	**90,7**	**67**	**20.207,80**
Sektor Sekunder	Industri Makanan	15	443.128,1	29	513.790,5	82	72.497,0	42	59.971,2	61	195.075,80
	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-	24	1.849,2	3	302,30
	Industri Kayu	1	0,0	1	0,0	5	1.571,9	4	0,0	3	0,00
	Industri Kertas dan Percetakan	7	123.105,5	4	30.626,0	18	8.239,1	12	57.566,9	14	17.490,60
	Industri Kimia Dan Farmasi	4	30.002,0	23	54.728,1	38	26.278,5	15	310.227,9	38	44.116,60
	Industri Karet dan Plastik	8	318.655,5	22	73.982,4	25	3.182,8	25	131.009,7	25	64.712,40
	Industri Mineral Non Logam	3	11.152,2	3	0,0	3	0,0	7	20,0	10	3.709,50
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	6	6.303,9	7	1.368,8	17	3.875,9	19	47.818,5	26	171.137,30
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	-	5	0,0	2	0,0	12	11.336,50
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,0	3	0,0	9	0,0	3	0,0	3	1.176,80
	Industri Lainnya	-	-	-	-	2	0,0	9	0,0	17	894,00
	Total (Sektor)	**45**	**932.347,2**	**92**	**674.495,8**	**204**	**115.645,2**	**162**	**608.463,4**	**212**	**509.951,80**
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	3	32.250,0	9	292.511,8	23	45.653,3	29	503.674,7	27	27.803,80
	Konstruksi	2	336.187,2	54	329.235,9	334	210.516,1	269	66.882,2	635	62.241,00
	Perdagangan dan Reparasi	10	2.984,7	240	274.898,1	734	224.933,0	856	428.358,4	960	195.166,10
	Hotel dan Restoran	7	3.300,0	56	381.316,5	87	22.583,6	99	44.500,0	162	84.967,30
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	7	499.956,7	52	2.843.142,0	102	1.290.788,6	119	601.522,8	128	145.432,10
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	0,0	21	2.060.122,4	28	2.089.863,8	38	1.543.798,7	42	1.563.396,60
	Jasa Lainnya	8	30.294,3	64	80.914,1	185	127.398,5	233	1.323.724,4	246	931.206,50
	Total (Sektor)	**39**	**904.972,9**	**496**	**6.262.140,8**	**1.493**	**4.011.736,9**	**1.643**	**4.512.461,2**	**2.200**	**3.010.213,40**
Total		**84**	**1.837.320,1**	**599**	**7.106.002,8**	**1.717**	**4.127.638,6**	**1.836**	**5.121.015,3**	**2.479**	**3.540.373,00**

2.3.6. Fokus Sumber Daya Manusia

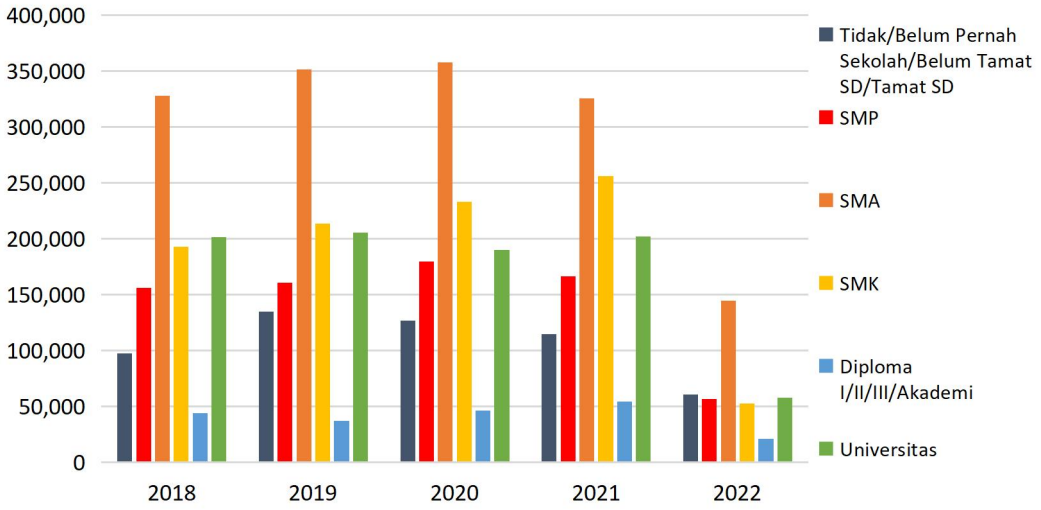
Pembangunan sumber daya manusia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

1. Kualitas Tenaga Kerja

   Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu wilayah dikarenakan dengan adanya pendidikan, penduduk yang mengenyam pendidikan akan lebih berkontribusi pada pembangunan karena daya pikir, wawasan dan pengetahuan yang luas. Kualitas tingkat pendidikan juga dirasa sangat penting karena kualitas tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena tingkat Pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Di samping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan cenderung meningkat.

   Gambar di atas nampak jumlah penduduk di lihat dari aspek kualitas pendidikan, penduduk Kota Medan periode tahun 2018 – 2022 relatif baik. Hal ini ditunjukkan dari angkatan kerja yang didominasi oleh jenjang pendidikan SMA, SMK, dan Universitas, hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun yang merupakan program di sektor pendidikan relatif cukup berhasil. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan telah meningkat, tidak hanya karena kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan wajib.

   Adapun tingkat pendidikan penduduk Kota Medan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Medan

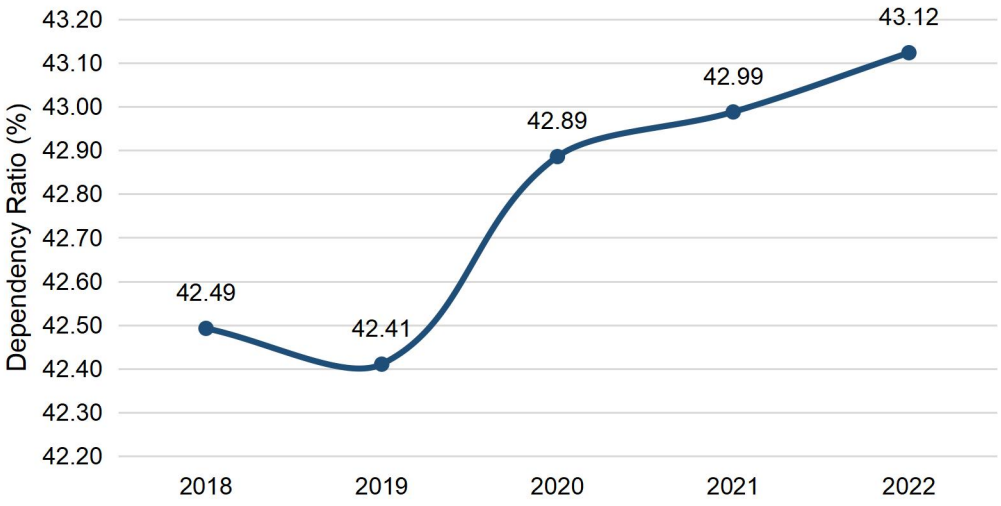
Gambar 2.35.
Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kota Medan Tahun 2018-2022

Proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia melalui pendidikan sangat penting untuk menjaga daya saing dan pembangunan berkelanjutan di Kota Medan dalam jangka panjang. Saat ini, pendidikan memegang peran sentral dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Kota Medan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi pusat pendidikan regional di wilayah barat di luar pulau Jawa, mengingat perkembangan pendidikan saat ini di berbagai tingkat.

5. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang

secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kota Medan tahun 2018-2022 disajikan pada Gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.36.
***Dependency Ratio* Kota Medan Tahun 2018-2022**

Rasio Ketergantungan Kota Medan cenderun meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 . Pada tahun 2018 rasio ketergantungan sebesar 42,49 persen meningkat menjadi 43,12 persen pada tahun 2022. Rasio ketergantungan sebesar 43,12 persen artinya setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan penelitian dan pengembangan.

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.1.1. Urusan Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang pendidikan di antaranya pendidikan usia dini, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, guru yang memenuhi kualifikasi S-

1/D-IV, angka Kelulusan (AL) SD/MI, angka kelulusan (AL) SMP/MTs, tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini, persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi, Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase SD dan SMP Terakreditasi, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja pendidikan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.31.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	29,04	25,67	24,51	26,32	29,30
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	77,31	77,52	79,97	71,31	70,80
Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Persen	57,40	64,10	51,95	52,10	64,10
Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikasi	Persen	35,00	22,90	22,92	23,80	27,50
Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Persen	32,40	23,00	24,90	41,45	41,67

Sumber: Dinas Pendidikan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini untuk Kota Medan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Medan pada tahun 2018 sebesar 29,04% mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 24,51%, namun tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 29,30%. Tingkat partisipasi warga negara pada usia 5-6 tahun menurun dari 77,52 persen padad tahun 2019 menjadi 70,80 persen pada tahun 2022. Sementara itu, pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi D-IV/S1 cenderung meningkat dari 57,40% pada tahun 2018 menjadi 64,10% pada tahun 2022. Di sisi lain, Pendidik PAUD yang memiliki sertifikasi semakin menurun dari 35% pada tahun 2018 menjadi 27,50% pada tahun 2022. Persentase Satuan Pendidikan PAUD mengalami peningkatan dari 32,40 persen pada tahun 2018 menjadi 41,67 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.32.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
APK SD/MI/Paket A	Persen	103,12	106,79	105,09	104,98	114,95
APM SD/MI/Paket A	Persen	102,03	100,06	89,60	93,68	103,61
APS SD/MI	Persen	0,26	0,24	0,13	0,25	0,21
Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	106,85	117,48	103,28	100,00	100,00
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	89,60	100,00	100,00
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	84,97	85,15	89,60	98,88	81,98

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
pendidikan dasar						
Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Persen	89,45	93,19	94,48	95,33	96,51
Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang tersertifikasi	Persen	46,80	43,30	66,70	67,26	76,49

Sumber: Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu untuk Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan.

Untuk capaian angka APK SD/MI/Paket A cenderung meningkat dari 103,12 pada tahun 2018 menjadi sebesar 114,95 pada tahun 2022, demikian juga dengan APM SD/MI/Paket A cenderung meningkat dari 102,03 pada tahun 2018 menjadi sebesar 103,61 pada tahun 2022. Sementara itu, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 0,26 persen pada tahun 2018 menjadi 0,21 persen pada tahun 2022. Angka menlanjutkan sekolah dari jenjang

SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 juga sangat baik, yaitu mencapai 100 persen. Tingkat partisipasi untuk usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar mengalami penurunan dari 84,97 persen menjadi 81,98 persen. Dari sisi tenaga pendidik terjadi peningkatan jumlah tenaga pendidik SD/MI/Paket A yang memiliki kualifikasi D-IV/S-1 dari 89,45% pada tahun 2018 menjadi sebesar 96,51% pada tahun 2022 dan untuk tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi semakin meningkat dari 46,80 persen pendidik pada tahun 2018 menjadi 76,49 persen pendidik pada tahun 2022.

Tabel 2.33.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
APK SMP/MTs/Paket B	Persen	96,97	100,07	114,07	100,89	101,45
APM SMP/MTs/Paket B	Persen	78,24	80	79,88	80,96	90,11
APS SMP/MTs	Persen	0,68	0,35	0,09	0,13	0,21
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,09	100	100	100	99,98
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100.23	78.84	82.50	100,95	100,78
Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	95,58	94,84	96,59	97,28	97,72
Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki sertifikasi	Persen	53,30	50,20	53,35	53,50	66,33

Sumber: Dinas Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan menengah Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung meningkat 96,97 persen pada tahun 2018 meningkat hingga tahun 2022 mencapai sebesar 101,45 persen. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dari 78,24 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 90,11 persen pada tahun 2022.

Untuk capaian Angka Putus Sekolah tingkat menengah cenderung menurun dari 0,68 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,21 persen pada

tahun 2022. Angka kelulusan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 99,09 persen mnejadi 100 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 99,98 persen. Tingkat partisipasi usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah cenderung mengalami peningkatan dari 100,23 persen pada tahun 2018 menjadi 100,78 persen pada tahun 2022. Dari sisi tenaga pendidik terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi D-IV/S1. Pada tahun 2018 persentase guru yang memiliki kualifikasi D-IV/S1 sebesar 95,58 persen meningkat menjadi 97,72 persen pada tahun 2022. Sebaliknya, pendidik yang memiliki sertifikasi semakin meningkat dari 53,30 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 66,33 persen pada tahun 2022

Tabel 2.34.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	Persen	93,05	93,63	95,78	96,49	97,14
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	73,41	76,74	99,79	99,74	99,87
Persentase SD Terakreditasi	Persen	96,70	97,80	97,28	96,94	96,89
Persentase SMP Terakreditasi	Persen	98,20	98,20	96,40	96,77	96,73
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	71,24	79,66	83,71	84,51	94,87

Sumber: Dinas Pendidikan

2.4.1.2. Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dapat diukur melalui indeks kesehatan yang terdiri dari 6 komponen yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan, kesehatan balita, kesehatan reproduksi dan kesehatan lingkungan.

Dalam penanganan terhadap penyakit menular dan tidak menular dapat dilihat pada table berikut. Meskipun penderita telah ditangani namun masih tingginya temuan kasus dari tahun ke tahun terutama penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Tuberkulosis. Hal ini menunjukkan masih diperlukanya perbaikan di bidang pencegahan dan penangggulangan penyakit menular dan tidak manular.

Tabel 2.35.
Jumlah Kasus Penyakit Di Kota Medan Tahun 2019-2022

Penyakit	2019	2020	2021	2022
Malaria	0	0	0	391
TB Paru	7.469	12.105	2.430	2.697
Pneumonia	3	280	272	81
Kusta	35	34	16	16
Tetanus	0	0	0	
Campak	1	0	0	
Diare	9.407	8.047	21.575	40.126
DBD	1.068	1.068	441	652
HIV	1.506	681	322	1.200
AIDS	0	274	274	85
Total	**19.489**	**22.489**	**25.330**	**45.248**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus penyakit di Kota Medan selama tahun 2019-2022 dari 19.489 kasus pada tahun 2018 menjadi 45.248 kasus pada tahun 2022. Lonjakan jumlah kasus penyakit ini disebabkan oleh Diare dengan total kasus pada tahun 2022 sebanyak 40.126. Penyakit diare umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit yang mengganggu fungsi normal usus. Infeksi ini bisa terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, kontak langsung dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi, atau melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi.

Selain itu, kesehatan lingkungan juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran terhadap sanitasi lingkungan akan berdampak pada peningkatan kasus penyakit diantaranya diare, DBD, TBC, Pneumonia, dan lainnya. Adapun capaian ODF (*Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan) di Kota Medan tahun 2022 hanya terdapat 6 keluarahan yang dinyatakan ODF dari 151 keluarahan atau sebesar 3,9%. Capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	79,08	52,94	43,20	46,70	51,00
3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	88,24	92,80	92,30	92,70	94,60
4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	90,50	98,43	90,50	94,00	50,50
6	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	90,70
7	Rasio rujukan peserta PBI	Persen	21,79	17,87	17,16	19,25	46,83
8	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	93,10	93,00	93,10	82,10	100,00
9	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	Per 100.000 Penduduk	2,70	11,60	12,30	31,20	17,80
10	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	91,40	80,39	87,17	89,60	91,30
11	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Persalinan	Persen	92,60	92,80	92,33	92,70	94,60
12	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	94,50	94,50	94,51	94,10	99,40
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	81,50	62,62	47,51	80,10	84,00
14	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	14,42	0,00	39,80	47,50
15	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	67,51	89,43	2,80	2,60	72,14

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
16	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	59,94	67,06	37,85	80,40	73,00
17	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	27,50	31,47	31,55	40,00	42,27
18	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	34,10	100,00	59,75	7,40	40,68
19	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	91,08	100,00	67,11	94,00	85,00
20	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	2,87	2,87	38,38	38,38	45,00
21	Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	90,70
22	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	13,00	16,00	32,00	53,70	26,00
23	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	0,59	0,46	0,46	0,00	1,90
24	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	87,00	87,00	82,60	76,13	96,10
25	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,59	72,93	73,10	73,22	73,57
26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas untuk indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan sangat baik dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen, sementara itu indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani mengalami penurunan dari 79,08% pada tahun 2018 menurun menjadi 51,00 persen pada tahun 2022, sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari 88,24 persen pada tahun 2018 menjadi 94,60 persen pada tahun 2022. Untuk indikator Cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sejak

tahun 2018 hingga tahun 2022 tetap mencapai 100 persen.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung menurun dari 90,50 persen pada tahun 2018 menjadi 50,50 persen pada tahun 2022. Begitu pula dengan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2018 menjadi 90,70 persen pada tahun 2022. Untuk indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (Maskin) stagnan dari tahun 2018 hingga 2020 pada angka 60,72 persen. Untuk indikator cakupan kunjungan bayi meningkat dari 93,1 persen pada tahun 2018 menjadi 100 persen pada tahun 2022.

Untuk indikator lainnya capaian pada tahun 2018 adalah Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota sebesar 2,70 per 100.000 penduduk cenderung meningkat hingga tahun 2021 mencapai 31,20 per 100.000 penduduk, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 17,80 per 100.000 penduduk. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 91,40 persen mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 80,39 persen, namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 91,30 persen. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sebesar 92,60 persen pada tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 94,60 persen. Selanjutnya, Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 94,50 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 99,40 persen, Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 81,50 persen mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 47,51 persen, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat hingga tahun 2022 mencapai 84,00 persen. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 100 persen pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2022 mencapai 47,50 persen, Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 67,51 persen pada tahun 2018 meningkat pada tahun 2022 mencapai sebesar 72,14 persen, Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 59,94 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,00 persen pada tahun 2022,

Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 27,50 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 menjadi 42,27 persen, Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 34,10 persen meningkat pada tahun 2019 mencapai sebesar 100,00 persen, namun mengalami penurunan hingga tahun 2021 mencapai 7,40 persen. Namun, pada tahun 2022 kembali meningkat mencapai 40,68 persen, Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 91,08 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai sebesar 100,00 persen, namun cenderung menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 85,00 persen, Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar sebesar 2,87 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 45,00 persen pada tahun 2022. Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD pada tahun 2018 sebesar 100 persen menurun menjadi 90,70 persen pada tahun 2022. Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 13 per 100.000 Kelahiran Hidup cenderung meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 26 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Bayi meningkat dari 0,59 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018 menjadi 1,90 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2022. Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2018 sebesar 87,00 persen cenderung meningkat hingga tahun 2022 mencapai 96,10 persen. Usia Harapan Hidup konsisten mengalami peningkatan dari 72,59 tahun pada tahun 2018 mencapai 73,57 tahun pada tahun 2022. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar 100,00 persen.

Dari berbagai informasi di atas terlihat bahwa penanganan terhadap kesehatan inti masyarakat sudah semakin baik. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di Kota Medan juga sudah memadai. Perkembangan jumlah sarana kesehatan Kota Medan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.37.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Medan pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022

Tahun	Sarana Kesehatan

	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Pustu
2018	77	39	1.390	281	41
2019	77	39	1.390	281	41
2020	75	39	1.345	281	41
2021	76	41	1.350	284	41
2022	76	41	1.352	284	41

Sumber: BPS Kota Medan

Saat ini di Kota Medan terdapat 39 unit Puskesmas dan 41 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) serta 1390 unit Posyandu. Meski jumlah tersebut terbilang memadai tetapi jika dilihat dari kuantitas sebaran saran kesehatan tersebut dapat dikatagorikan belum merata. Sebaran Puskesmas misalnya, untuk di Kecamatan Medan Denai terdapat 4 unit Puskesmas. Kemudian di Kecamatan lainnya seperti Medan Area, Medan Kota, Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Labuhan memiliki masing-masing 3 unit Puskesmas. Sedangkan di kecamatan lainnya hanya diisi oleh 1 atau 2 puskesmas. Untuk fasilitas kesehatan Posyandu, yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Medan Area dengan jumlah 112 unit dan Posyandu yang paling sedikit berada di wilayah Medan Baru dengan jumlah 15 unit.

Selain masih terdapatnya sebaran yang belum merata, jumlah sarana kesehatan juga belum menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana yang signifikan bahkan cenderung tidak terjadi pertumbuhan atau penambahan sarana kesehatan di Kota Medan sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022. Beberapa sarana kesehatan justru mengalami penurunan seperti Rumah Sakit yang pada tahun 2018 berjumlah 77 unit menjadi 76 unit pada tahun 2022 dan Klinik atau Balai Kesehatan Masyarakat yang pada tahun 2018 berjumlah 281 unit menjadi 284 unit pada tahun 2022. Kondisi ini tentu harus mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Kota Medan ke depan agar fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di tiap kecamatan dapat tersebar secara merata sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan dengan agenda pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas, dan Puskesmas-Puskesmas yang ada juga dapat dikembangkan menjadi Puskesmas dengan layanan Rawat Inap. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan memberikan menyediakan akses yang lebih merata.

Selain kecukupan kuantitas SDM kesehatan, kualitas SDM kesehatan juga

mutlak diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan. Hal ini dapat diukur melalui IKM Puskesmas dan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. Perkembangan indeks kepuasan masyarakat Kota Medan dari tahun 2018 ke tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.38.
Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas dan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IKM Puskesmas	N/A	N/A	N/A	81	80
IKM RSUD Dr. Pirngadi (*Point*)	80	85	90	90	80,16

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di bidang jalan jembatan merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Medan, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya adalah panjang jalan Kota dalam kondisi mantap tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dari 86,60 persen pada tahun 2018 menjadi 89,45 persen pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan Kota dalam kondisi Mantap	Persen	86,60	88,79	89,85	89,78	89,45
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.	Jiwa/km	690,39	695,20	742,57	750,38	760,64
Jumlah Titik Banjir	Satuan	295	234	2.341	1.910	617

Sumber: Dinas SDABMBK Kota Medan

Berdasarkan kondisi penataan ruang di Kota Medan yang ada saat ini, selain pencapaian terhadap RTH Kota Medan, indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan wilayah Kota Medan. Berdasarkan indikator pertumbuhan wilayah terlihat adanya ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan kawasan utara Kota Medan. Hal ini tergambarkan dari ketimpangan fasilitas pelayanan antara pusat kota dan kawasan utara Kota Medan yang berimplikasi juga terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pada wilayah tersebut.

Dengan memperhatikan *masterplan drainase* Kota Medan , jumlah titik genangan banjir di Kota Medan tercatat sejumlah 2.575 titik genangan banjir sebagai *baseline* pada Tahun 2019. Perubahan *masterplan* ini mengakibatkan baseline mengalami perubahan, dari sebelumnya 1.078 titik genangan banjir sebelum 2019 dan 2.575 titik genangan banjir setelah tahun 2019. Pemerintah Kota Medan telah berupaya mengangani genangan banjir dari *baseline* 2.575 pada 2019 sebagai baseline dan turun menjadi 617 titik genangan banjir yang belum tertangani.

2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkankebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Arah pengembangan PKP di Kota Medan saat ini sangat ditentukan oleh kebutuhan hunian masyarakat baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan investasi. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Medan merupakan kota penting dalam melaksanakan perannya pada konteks regional

yakni Pusat Pemerintahan Provinsi, Perdagangan-Jasa, Keuangan, Budaya dan peran lokal sebagai pusat pemerintahan skala Kota. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Pada Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Selayang, ketersediaan lahan pengembangan PKP sudah semakin terbatas. Sedangkan kecamatan lainnya masih tersedia cukup luas antara 500-1000 Ha. Dengan kondisi tersebut, diharapkan pengembangan PKP di Kecamatan yang terbatas lahannya mulai diarahkan kepada pengembangan hunian vertikal. Pendekatan pengembangan hunian vertikal berbasis (*Transit Oriented Development*) TOD dapat dilakukan pada Pusat Pelayanan Kota serta Optimasi Pemanfaatan Ruang, yakni dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman. Optimalisasi pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan arahan RTRW Kota Medan dan RDTR Kota Medan yang meliputi:

1. Merevitalisasi penggunaan lahan dan bangunan;
2. Intensifikasi pemanfaatan ruang vertikal pada kawasan kepadatan tinggi;
3. Mengembangkan lahan-lahan perumahan yang efisien dan layak huni melalui pembangunan rumah susun dan peremajaan kota. Tabel berikut menjelaskan capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	83,82	85,41	87	72,58	72,58
Luas pemukiman kumuh	Hektar	0,27	0	819,80	506,60	306,00

Sumber: Roadmap Air Minum 2022 (Bappeda)

Rumah Tangga pengguna air bersih untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 83,82 persen menurun hingga tahun 2022 mencapai 72,58 persen. Kawasan Kumuh pada tahun 2019 kawasan kumuh tuntas menjadi 0 hektar dari 200,219 ha di tahun 2015. Namun dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 maka terdapat indikator-indikator penentuan kawasan kumuh dan terdapat penambahan (*updating*) kawasan kumuh di tahun 2020 seluas 819,80 ha yang membawa dampak terhadap berkurangnya keberadaan kawasan layak huni di Kota Medan menjadi 25.690,2 Ha atau 96,9% dari luas wilayah Kota Medan. Luas permukiman kumuh cenderung menurun dari 819,80 hektar pada tahun 2020 menjadi 306 hektar pada tahun 2022.

2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan di antaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Untuk meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pelaksaaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan yang realisasinya relatif rendah perlu lebih diefektifkan. Di samping itu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang belum direalisasikan perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibagi menjadi 3 sub urusan yaitu, 1) ketentraman dan ketertiban umum, 2) Bencana dan 3) Kebakaran. Adapun capaian jumlah indikator pada kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pemerintah kota medan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Jumlah Pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan Tahun 2018-2022

Jenis Pelanggaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pedagang Kaki Lima	Pedagang	2.100	2.122	1.138	2.166	1.926
Gelandangan pengemis	Orang	175	-	68	463	1.051
Pekerja Seks Komersial	Orang	11	-	-	-	-
Umbul-umbul/baliho/spanduk	Unit	2.154	2.697	2.654	1.400	4.444
Bangunan reklame	Unit	453	970	173	30	485
Bangunan	Unit	49	201	419	448	526
Penertiban / Pembongkaran Bangunan di Wilayah Kota Medan (bangunan siskamling dan Pos OKP)	Unit	-	-	-	-	91
Kawasan Tanpa Rokok	Tersangka	-	18	-	-	8
Tempat Usaha	Tempat	-	26	-	52	-
Protokol Kesehatan (razia masker)/ Perwal Kota Medan No. 27 Tahun 2020	Orang Pelanggar	-	-	13.822	16.961	6.528
Protokol kesehatan di tempat keramaian, restauran, café, rumah minum/makan, swalayan dan pasar/ Perwal Kota Medan No. 27 Tahun 2020	Titik Lokasi	-	-	590	14.747	5.465
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat di Kantor Walikota Medan	Aksi Unjuk Rasa	-	-	-	62	93
Yustisi pelanggaran Perwal tentang protokol kesehatan selama PPKM	Pelanggar	-	-	-	112	-
Penyegelan (tutup sementara) tempat usaha (kegiatan jan-maret) pelanggaran protokol kesehatan	Lokasi	-	-	-	-	43
Kegiatan Pengamanan Kegiatan Wali Kota Medan dan Acara Pemko Medan	Kegiatan	-	-	-	-	396
Operasi Kasih Sayang terhadap anak sekolah di Warnet dan tempat hiburan lainnya	Siswa	-	-	-	-	36
Antisipasi dan Cegah Dini /Pembinaan / Penyuluhan di Wilayah Kota Medan (Patroli/ antisipasi tawuran antar warga, antisipasi banjir dan membantu masyarakat tertimpa bencana)	Kegiatan	-	-	-	-	33

Jenis Pelanggaran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Total	Kasus	4.942	6.034	18.864	36.441	21.125

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga dilakukannya penertiban ataupun razia protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020. Razia Protokol kesehatan pada tahun 2020 mencapai 13.822 pelanggaran atau 73,27% dari total pelanggaran tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran meningkat menjadi sebesar 36.441 pelanggaran. Hal ini didominasi oleh pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran protokol kesehatan di tempat keramaian restaurant, café, rumah minum/makan, swalayan dan pasar/ Perwal Kota Medan No. 27 Tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran mengalami penurunan sebesar 15.316 pelanggaran dibandingkan tahun 2021.

Keamanan dan ketertiban umum berperan pening dalam mendukung pertumbuhan perekonomian kota, sehingga Pemerintah Kota Medan berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga kota dimanapun dan kapanpun. Hal ini sebagai satu upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup bermasyarakat yang bebas dari segala gangguan yang berdampak negative bagi individu dan warga kota. Jumah kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan

Keterangan	Jumlah Kasus				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan	4.942	6.034	18.864	36.441	21.125

Sumber: Satpol PP Kota Medan, 2023

Dari tabel yang disajikan diatas menunjukkan adanya tren peningkatan gangguan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kota Medan secara signifikan dari tahun 2018 sebanyak 4.942 kasus, ke tahun 2022 sebanyak 21.125

kasus. Jumlah kasus tertinggi sejak 5 (lima) tahun terakhir berada di tahun 2021, yakni sebesar 36.441 kasus.

Tabel 2.43.
Jumlah Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	Kejadian	9	3	32	22	15
Kebakaran	Kejadian	151	131	219	108	212
Puting Beliung	Kejadian	26	23	29	22	33
Longsor	Kejadian	1	1	0	1	1
Total	**Kejadian**	**187**	**158**	**280**	**153**	**261**

Sumber: Bappeda Kota Medan, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana dan kebakaran di Kota Medan cenderung meningkat dari 187 kejadian menjadi 212 kejadian. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dengan perlunya perencanaan strategis khusunya dalam penanganan kasus kebakaran dikarenakan dari data tersebut kasus kebakaran memiliki persentase pertumbuhan kasus tertinggi dibanding dengan kejadian lainnya.

Perkembangan Kota Medan untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman juga menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya dari maraknya peredaran narkoba di Kota Medan. Peredaran narkoba di Kota Medan semakin mengkhawatirkan dan tidak pandang usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Status dan sebaran peredaran narkoba di Kota Medan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.44.Status dan Sebaran Peredaran Narkoba di Kota Medan

Unsur Kewilayahan	Status	
	Bahaya	Waspada
Kecamatan	9	12
Kelurahan	19	38

Sumber:

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa sampai tahun 2022 terdapat 19 kelurahan di Kota Medan dengan status bahaya narkoba dan 38 dengan status waspada yang berada di 9 kecamatan dengan status bahaya narkoba, sedangkan 12 kecamatan lainnya berada pada status waspada narkoba.

Tabel 2.45.
Jumlah Unjuk Rasa yang Terjadi di Kota Medan

Keterangan	Jumlah Kasus (Minus Unras)				
	2019	2020	2021	2022	2023*
Jumlah unjuk rasa di Kota Medan	641	409	223	1.119	1.290

Sumber: Kesbangpol, 2023

Dari tabel yang disajikan diatas, menunjukkan tren penurunan unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan. Penurunan yang terjadi secara berturut-turut dari tahun 2019 yang sebesar 641 menjadi 409 dan 223 pada tahun 2020 dan 2021, dan meningkat drastis pada taun 2022 dan tahun 2023. Dampak yang disebabkan dari unjuk rasa yang terjadi sangat beragam, seperti sumber terjadinya kecamatan dan tak jarang terjadi pengrusakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya unjuk rasa dan dampak ikutannya. Strategi dengan melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog warga kota sebagai sarana dalam penyaluran aspirasi guna menekan angka terjadinya unjuk rasa.

2.4.1.6. Urusan Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Medan yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai indikator kerja pada bidang Sosial di antaranya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).

Pada tahun 2018 tampak bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti yang rehabilitasi sebanyak 104 sarana, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 92 sarana. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 tetap sebesar 4,81 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan sejak tahun dari 35,19 persen menjadi 38,22 persen pada tahun 2019. Sedangkan besarnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen dan menurun pada tahun 2020 yang hanya mencapai 25,18 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan sosial Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Panti Asuhan = 189 Panti Narkoba = 15 Panti Lansia = 2 Yayasan = 47 Rumah Singgah = 1	Sarana	92	92	173	173	173
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tdk potensial yang telah menerima jamian sosial	Persen	4,81	4.81	96,77	46,39	86,38
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	35,19	38,22	87,60	65,57	68,70
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	74,38	100	25,18	100	100

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 tampak bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti yang rehabilitasi sebanyak 104 sarana, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 92 sarana. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah

menerima jaminan sosial sejak tahun 2018 hinnga tahun 2019 tetap sebesar 4,81 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan sejak tahun dari 35,19 persen menjadi 38,22 persen pada tahun 2019. Sedangkan besarnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen dan menurun pada tahun 2020 yang hanya mencapai 25,18 persen.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Berdasarkan data statistik Kota Medan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan cenderung meningkat dari tahun 2018-2022, yakni tahun 2018 sebesar 8,25 persen dan pada tahun meningkat pada tahun 2021 mencapai sebesar 10,81 persen. Namun, pada tahun 2022 menurun menjadi 8,89 persen. Untuk angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Medan cenderung mengalami penurunan dari 64,35 persen pada tahun 2018 menjadi 62,23 persen pada tahun 2022.

Pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan cenderung meningkat dari tahun 2018 sebesar 48,19 persen menjadi 64,71 persen pada tahun 2022. Selain itu, Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi cenderung meningkat dari 93 persen pada tahun 2018 menjadi 98,86 persen pada tahun 2022. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) meningkat dari 68,83 persen pada tahun 2021 menjadi 75,28 persen pada tahun 2022. Persentase

Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota cenderung mengalami peningkatan dari 48,19 persen pada tahun 2018 menjadi 64,71 persen pada tahun 2022. Selanutnya, Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial cenderung meningkat dari 80,89 persen tahun 2018 menjadi 93,96 persen pada tahun 2022. Sementara itu, Peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin menurun dari 77,74 persen pada tahun 2018 mnejadi 22,54 persen pada tahun 2022. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan tenaga kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,25	8,53	10,74	10,81	8,89
TPAK	Persen	64,35	65.99	64.89	62,16	62,23
Pencari kerja yang dilatih & ditempatkan	Persen	48,19	63.17	34.79	20,49	64,71
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	93	75	-	99,07	98,86
Pekerja Migran bermasalah yang ditangani	Orang	-	-	121	755	162
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	N/A	N/A	N/A	68,83	75,28
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Persen	48,19	63,17	34,78	20,49	64,71
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	80,89	95,85	100	100	93,96
Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	-	77,74	67,61	50,63	22,54

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut di antaranya, yaitu Persentase ARG pada belanja langsung APBD, Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota, dan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	-	89,73	60,00	86,94	87,98
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Persen	-	0,014	0,011	0,014	0,019
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	-	0,003	0,003	0,004	0,006
TPAK Wanita	Persen	7,77	8,00	12,34	12,36	8,37

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 89.73 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 60,00 persen pada tahun 2020, kemudian pada tahun selanjutnya meningkat hingga mencapai 87,98 persen pada tahun 2022. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota sebesar 0,001 persen pada tahun 2019 meningkat hingga tahun 2022

mencapai 0,019 persen, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 0.01 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,34 persen, persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita cenderung mengalmai peningkatan dari 7,77 persen pada tahun 2018 menjadi 8,37 persen pada tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran wanita dalam ketenagakerjaan semakin meningkat. Data kasus kekerasan pada tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.49.
Data Kasus Kekerasan Tahun 2017 – 2022

Tahun	Jumlah Kasus			
	Jenis Kelamin	Anak	Dewasa	Total
2017	Laki-laki	113	12	125
	Perempuan	156	65	221
	Total	269	77	346
2018	Laki-laki	79	2	81
	Perempuan	110	35	145
	Total	189	37	226
2019	Laki-laki	59	0	59
	Perempuan	98	33	131
	Total	157	33	190
2020	Laki-laki	48	2	50
	Perempuan	68	44	112
	Total	116	46	162
2021	Laki-laki	43	0	43
	Perempuan	60	34	94
	Total	103	34	137
2022	Laki-laki	61	1	62
	Perempuan	98	67	165
	Total	159	68	227

Sumber: SIMFONIPPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan

perlindungan khusus anak. Pemerintah Kota Medan telah mencapai status predikat "Madya" pada tahun 2021 dan menjadi fokus pemerintah untuk mencapai predikat yang terbaik.

Tabel 2.50.
Hasil Evaluasi Kota Layak Anak Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil Penilaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Tidak Mengikuti	Tidak Mengikuti	Tidak Mengikuti	Madya	Madya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

2.4.2.3. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kota Medan, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kota Medan juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di antaranya regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan di antaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 telah mengeluarkan peraturan Walikota di antaranya adalah Perwal No. 15 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Perwal No. 74 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Perda No.10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis, Perwal No.89 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 tahun 2017, Perwal No.21 tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal. Untuk ketersediaan pangan utama cenderung mengalami penurunan sejak

tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, ketersediaan pangan utama sebesar 146,42 persen menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 128,42 persen. Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan utama	Persen	146,42	154,87	130,81	132,33	128,42
Indeks ketahanan pangan	Persen	81,42	82,33	83,12	83,5	84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

2.4.2.4. Urusan Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kota. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan pertanahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Lahan Bersertifikat	Persen	64,08	64,08	65,09	67,82	70,31
Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	67,90	-	-	-
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	-	67,90	-	-	-

Sumber: Badan Pertanahan

Luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 65,09 persen.peningkatan lahan bersertifikat ini merupakan hasil dari kebijakan nasional terkait sertifikasi lahan seluruhan Indonesia.

2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ukuran kualitas lingkungan

hidup yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memberi gambaran tentang kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Adanya perubahan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan salah satu sebab ditambahkannya indikator ini di Tahun 2018. Meskipun belum dilakukan perhitungan secara khusus terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 telah melakuan perhitungan dengan mengambil sampel beberapa lokasi yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Medan, sehingga meskipun IKLH yang diperoleh bukan merupakan angka riil, namun bisa dijadikan sebagai *benchmarking* terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan.



Dalam kaitan pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai 1.271.475 unit pada tahun 2022, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik pembakaran secara terbuka maupun dengan menggunakan kompor atau alat masak. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan pengujian dan pemeriksaan

emisi kendaraan bermotor di Kota Medan, dan peralatan pendeteksi pencemaran udara.

Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) system door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui sarana container. Secara operasional pengelolaan pelayanan persampahan didukung oleh prasarana sarana persampahan antara lain Becak Sampah 385 unit, *Container* Sampah 90 unit, *Compactor Truck* 30 unit, *Armroll Truck* 14 unit, *Tipper Truck* 90 unit, *Truck* Tinja 7 unit, *Bulldozer* 5 unit, *Excavator* 1 unit, *Wheel Loader* 3 unit, *Pick-Up* 11 unit (DKP Kota Medan, 2019).

Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terbagi menjadi tiga jenis wilayah layanan pengumpulan sampah dan menerapkan strategi pengumpulan sampah yang berbeda. “Medan I” adalah area perkotaan dalam pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door dengan menggunakan truk dan mengangkut sampah langsung ke TPA Terjun. “Medan II” adalah area di sekeliling pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door dengan menggunakan gerobak dorong dan/atau becak motor dan sampahnya dibawa ke TPS, kemudian dibawa dengan truk ke TPA. “Medan III” adalah area pinggiran kota dimana sistem pengumpulan sampah komunal diterapkan. Masyarakat diminta untuk membawa sendiri sampah mereka ke titik pengumpulan sampah komunal dimana ada kontainer sampah yang disiapkan, dan kemudian kontainer dibawa ke TPA dengan menggunakan truk. Mengingat kapasitas dari kedua TPA tersebut semakin terbatas, sedang sistem pengolahan sampah sampai saat ini masih konvensional maka salah satu kebutuhan utama pengembangan aspek teknis operasional persampahan dalam jangka menengah dan panjang adalah penambahan ketersediaan TPA yang bersifat regional, di samping juga penataan dan penambahan tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah.

Sebagai tempat pengolahan akhir sampah, TPA Terjun saat ini merupakan satu satunya TPA yang masih beroperasi. Sebelumnya TPA Namo Bintang yang dibangun tahun 1987 sempat beroperasi, sebelum pada akhirnya ditutup pada

tahun 2013. Di TPA Namo Bintang sebenarnya masih ada lahan yang dapat menampung sampah namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Juli 2013 memerintahkan menutupnya sementara dan mengalihkannya ke TPA Terjun. TPA Terjun yang dibangun pada lahan seluas 13,7 ha dan mulai dioperasikan pada tahun 1993 sendiri, sudah hampir mencapai umur teknisnya dan kapasitas tampungan sampah yang semakin terbatas. Sebagai solusi sementara, direncanakan akan dibangun tambahan 3,5 Ha ha lokasi TPA di sebelah TPA Terjun. Lokasi ini dirancang sebagai sanitary landfill dengan lapisan bawah, fasilitas pengolahan lindi, pipa ventilasi gas, dan tutupan tanah secara teratur. Namun, diperkirakan bahwa usianya hanya 2-3 tahun. Solusi lain yang bisa diterapkan adalah mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangunan TPA Regional Mebidang yang lokasinya direncanakan berada di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian alternatif solusi lainnya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap TPA eksisting melalui teknologi tepat guna, untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali sebagai landfill.

Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada di tingkat provinsi, paling tidak satu tahun pada tingkat kabupaten/kota dan enam bulan pada tingkat provinsi setelah berlakunya peraturan presiden dimaksud. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kemudian, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi sampah ke dalam tiga tipe: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga (timbulan sampah dari area komersil, area industry, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya), dan c) sampah khusus (sampah berbahaya dan beracun, sampah bencana, sampah konstruksi dan penghancuran bangunan, dan sampah lainnya yang memerlukan pengolahan

khusus). Untuk menyusun rencana pengelolaan sampah yang baik, data komposisi sampah yang akurat adalah penting. Skenario masa mendatang dapat diperkirakan dari data komposisi sampah yang tersedia sangat bervariasi tergantung dimana dan dalam kondisi yang bagaimana contoh-contoh sampahnya dikumpulkan. Survei komposisi sampah yang komprehensif telah dilakukan sebagai bagian dari proyek percontohan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) tentang "Project for Capacity Development for Developing National Greenhouse Gas Inventories (Sub Project 3)" pada tahun 2011. Contoh sampah diambil secara acak fari 33 truk pengumpul sampah yang mengambil sampahnya dari 12 kecamatan di daerah selatan Medan (Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat) dengan total 1.000 L (559,73 kg) dari Oktober sampai Desember 2011. Contoh sampah tersebut diambil saat dibawa ke TPA Namo Bintang (sudah ditutup saat ini) ketika truk sampah sedang membuang sampah ke area TPA sebelum didatangi oleh para pemulung. Sampah basah yang baru datang langsung dipisah-pisahkan ke dalam 9 kategori (+ 4 sub kategori) dan ditimbang secara berurutan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar setengahnya (48%) adalah sampah makanan, sementara kertas (17%) dan plastik (14%) yang merupakan sampah daur ulang terbesar mengikuti sebagai sampah dengan proporsi terbesar selanjutnya.

Analisis komposisi sampah mengambil contoh sampah dekat dengan lokasi akhir (sebelum sampah dibuang ke TPA) mungkin tidak merefleksikan komposisi pada sumber secara akurat. Sering kali terjadi para pemulung atau pengumpul sampah mengambil sampah yang berharga (plastik, kertas, logam, kaca, dsb.) selama proses pengumpulan dan pengangkutan sampah. Hal yang lain adalah bahwa kertas akan menjadi lebih berat timbangannya karena kertas menyerap kadar air ketika dicampur dengan sampah basah. Plastik termasuk botol pet juga akan menjadi lebih berat karena cairan atau makanan sisa kadang-kadang masih tertinggal. Untuk memahami komposisi sampah di sumber yang sebenarnya, Tim IGGES melakukan studi skala kecil rumah tangga masyarakat. Hasil dari studi dimaksud menunjukkan bahwa sekitar setengah dari contoh sampah terdiri dari sampah organik (47,9%), kertas (13,3%), kaca (12,5%), dan plastik (11,2%).

Persentase kaca lebih besar dari hasil survey JICA yang mana hanya ada 1%. Akan tetapi komponen utama lainnya memiliki proporsi yang mirip. Rata-rata timbulan sampah 0,91 kg/orang lebih banyak dari pada jumlah standar timbulan sampah per kapita (0,7 kg/orang) yang mana sering digunakan dalam memperkirakan jumlah total timbulan sampah. Ukuran percontohan dari lima rumah tangga memang minim akan tetapi kesesuaian dengan hasil dari survey JICA menandakan bahwa hasil dari JICA tersebut dapat digunakan untuk mewakili data komposisi sampah di Kota Medan.

Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2017 sebanyak 738,279 Ton/Tahun pada tahun 2025 diperhitungkan meningkat menjadi 800,908 Ton/Tahun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Medan. Dengan diterbitkannya Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendauran Ulang, Pemanfaatan kembali dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

Pengelolaan Persampahan adalah belum terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UU 18/2008 merumuskan definisi pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 4 UU NO. 18 Tahun 2008 mengamanatkan tujuan pengelolaan sampah adalah: 1) meningkatkan kesehatan masyarakat; 2) meningkatkan kualitas lingkungan; dan 3) menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk itu diatur penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam dua aspek yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah diatur pada Pasal 20, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan sampah ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; 2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan 5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah diminta untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Demikian juga halnya, masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penanganan Sampah dilaksanakan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2008 meliputi:Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS belum memenuhi persyaratan, saat ini hanya ada 82 TPS yang aktif di Kota Medan sementara kebutuhan TPS di Kota Medan sebanyak 151 TPS.

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah,dan/atau sifat sampah. Pemilahan, belum terlaksana terkait dengan sistem pewadahan yang memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Hal ini dimulai belum adanya kesadaran Pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya inisiasi program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), walaupun wadah sampahnya telah dibuat terpisah serta belum adanya sistem pengumpulan sampah yang terpisah di Kota Medan. Peran Bank Sampah dan TPS3R dimasyarakat perlu dioptimalkan agar pemilahan sampah dari sumbernya dapat terlaksana dengan

baik.

2. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Jumlah armada truk angkutan sampah yang ada belum mampu mengakomodasi pengangkutan timbulan sampah yang ada di Kota Medan. Perlu perencanaan pengadaan truk yang dikombinasikan dengan kegiatan 3R untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Medan.
3. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam pengolahan sampah melalui kemitraan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum serta penerapan teknologi tepat guna penanganan sampah perlu segera dilaksanakan pemerintah Kota Medan
4. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahansebelumnya ke media lingkungan secara aman. Permasalahan pemrosesan akhir adalah kapasitas daya tampung Tempat Prosesan Akhir (TPA) yang ada saat ini. Perlu segera melaksanakan pengadaan lahan di sebelah TPA Terjun seluas 3,5 Ha untuk menangani kapasitas tampung sampah yang ada saat ini. Selain itu juga tetap mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun TPA regional Mebidang sebagai solusi terhadap penampungan sampah yang lebih permanen. Timbulan sampah di Kota Medan mengalami peningkatan dari 621,968,76 pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 645.012,56 ton pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 628.749,22 ton. Timbulan sampah di Kota Medan selama tahun 2018 hingga thaun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Timbulan Sampah Kota Medan Tahun 2018-2022

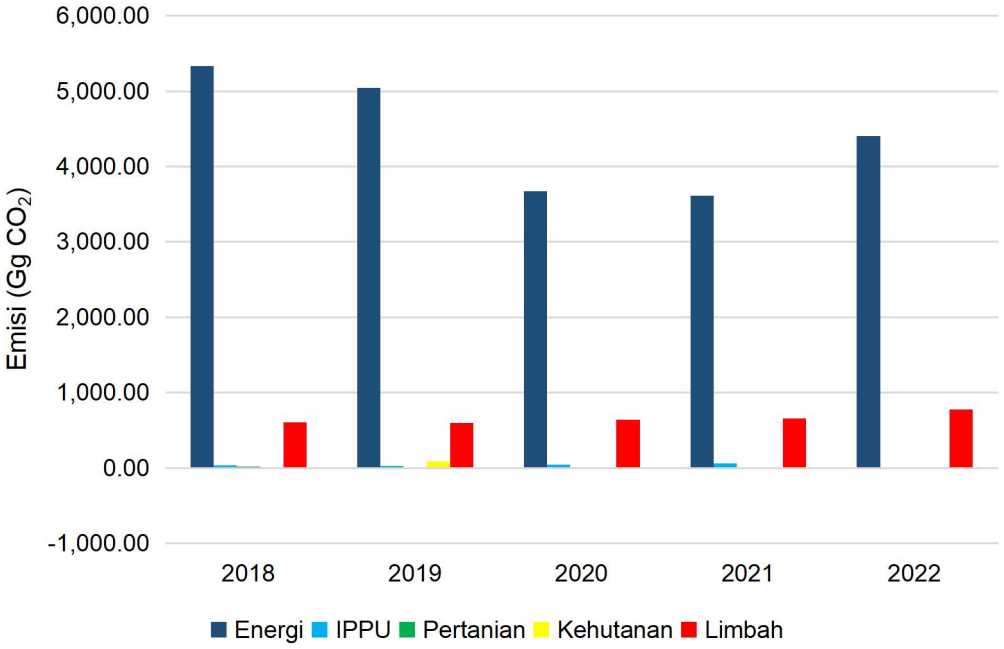
Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan Sampah	Ton	619.034,52	621.968,76	622.206,89	645.012,56	628.749,22

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama adalah emisi.

Emisi merujuk pada pelepasan atau pembuangan zat atau substansi tertentu ke dalam lingkungan, terutama ke atmosfer. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pelepasan gas, partikel, atau zat lain yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekosistem. Pengendalian emisi menjadi penting dalam upaya melindungi lingkungan, mencegah perubahan iklim yang merugikan, dan menjaga kualitas udara yang baik. Upaya untuk mengurangi emisi melibatkan penggunaan teknologi yang lebih bersih dan efisien, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang tepat, dan adopsi kebijakan dan regulasi lingkungan yang ketat. Emisi dari sektor energi menyumbang emisi terbesar dari seluruh sektor. Emisi dari sektor energi yang besar berarti jumlah pelepasan atau pembuangan gas rumah kaca (GRK) dan polutan lainnya yang dihasilkan oleh industri energi dalam skala besar. Sektor energi besar mencakup berbagai kegiatan seperti produksi energi listrik, produksi bahan bakar fosil, transportasi, dan industri energi lainnya. Emisi dari sektor energi besar terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Tingkat Emisi GRK Kota Medan mengalami penuruna ndari 5.989 $ggCo_2$ pada tahun 2018 menjadi 4.340 $ggCO_2$ pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5.188 $ggCO_2$. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Emisi GRK yang bersumber dari Sektor Energi. Gambar berikut menjelaskan tingkat emisi berbagai sektor di Kota Medan:



Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup

Gambar 2.37.
Emisi Kota Medan Tahun 2018-2021

2.4.2.6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis NIK Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 semakin baik. Pada tahun 2018 kepemilikan KTP sebesar 31,35% meningkat menjadi 99,21% pada tahun 2022. Persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk cenderung fluktuatif dan pada tahun 2022 telah mencapai 94,53 persen. Untuk indikator lainnya, persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran sebesar 86,44 persen pada tahun 2022. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kepemilikan KTP	Persen	31,35	97,00	96,34	98,68	99,21
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1.000	35,51	54,29	83,02	98,98	94,53
Persentase Penduduk usia 0-18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Persen	72,47	75,20	83,02	85,42	86,44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.4.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan penyelenggaraan tugas desentralisasi khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka melalui APBD Kota Medan 2018-2022 telah dilaksanakan program dan kegiatan pokok urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: program keluarga berencana dengan pelibatan PKK dan TNI, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri, program pengendalian penduduk, advokasi dan KIE penggerakan. Dengan begitu banyaknya program KB bahkan dengan pelibatan PKK dan TNI tentu menjadi persoalan kritis ketika angka prevalensi peserta KB aktif malah menurun sejak tahun 2017.

Ada beberapa tantangan mengapa angka prevalensi KB menurun di antaranya adalah tidak banyak terlaksananya program KB untuk pria, masih tidak terkoordinasinya lintas sektoral dalam menggerakkan KB berbasis wilayah. Bila situasi ini terus dibiarkan dan tidak ada kebijakan strategis oleh pimpinan Kota Medan untuk penggalakan KB, maka situasi kependudukan dapat tidak terkendali. Apalagi untuk Kota Medan belum terpetakannya strategi bonus demografi yang akan dihadapi kota setidaknya setelah tahun 2035.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan di antaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur di antaranya melalui indikator PKK aktif dan Posyandu. PKK aktif dan Posyandu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.55.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi peserta KB aktif	Persen	67,23	64,80	96,26	102,3	63,00
Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan.	Persen	110,22	114,39	100,00	100,00	100,00
Total Fertility Rate (TFR)	Rata-Rata Anak per Wanita	2,60	2,29	2,28	2,01	1,90

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jika dilihat dari tabel di atas, prevalensi peserta KB aktif di Kota Medan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebesar 67,23 % dan menurun menjadi 64,80% pada tahun 2019 dan meningkat kembali hingga tahun 2021 mencapai 102,30%, namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 63,00%. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pasangan usia subur di Kota Medan untuk berkontribusi dalam menekan jumlah populasi di Kota Medan. Jika pasangan tidak mengadopsi metode KB yang efektif, kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah kelahiran. Hal ini dapat memberikan tekanan pada sumber daya yang terbatas, seperti pangan, air, perumahan, dan layanan publik lainnya. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali juga akan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.

2.4.2.8. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kota Medan, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah angkutan darat bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun serta kelancaran masyarakat menjalankan aktivitasnya. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah orang/barang yang terangkut oleh angkutan darat

adalah sebesar 2.23 persen. Untuk kelancaran lalulintas kota sejak tahun 2019 di beberapa ruas jalan di Kota Medan di antaranya adalah Jl. Brigjen katamso sebesar 87 persen, Jl. Gatot Subroto sebesar 74 persen, Jl. Imam Bonjol sebesar 79 persen, Jl. Perintis Kemerdekaan sebesar 56 persen, Jl. Sisingamangaraja sebesar 84 persen.

Untuk kinerja lalu lintas kota dan jumlah perlengkapan jalan di Kota Medan yang dikendalikan dengan *traffic light, warning light dan traffic pedestarian*. Peran dari persimpangan, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), halte dan jembatan penyeberangan dalam jaringan jalan sangat penting, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki ruas-ruas jalan relatif pendek, karena kapasitas sistem jaringan jalan sangat ditentukan oleh kapasitas persimpangan yang ada. Kondisi eksisting Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kota Medan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 90.835 buah lampu penerangan jalan, sebanyak 14.022 buah unit penerangan jalan diantaranya telah menggunakan teknologi lampu LED dan 76.813 buah unit penerangan jalan lainnya non LED. Per tahun 2022 kebutuhan APJ sebanyak 124.028 APJ dan APJ yang telah terpasang sebanyak 90.835 APJ. Artinya, kebutuhan terhadap APJ telah terpenuhi sebesar 73,23 persen dari kebutuhan sehingga masih terdapat sebesar 26,77 persen yang belum dipasang APJ.

2.4.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebanyak 100 persen, namun menurun pada tahun 2020 menjadi 48,38 persen dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 100 persen. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) cenderung meningkat dari 1,43 (cukup) poin pada tahun 2019 menjadi 2,76 poin (baik) pada tahun 2022. Keterbukaan informasi publik pada tahun 2018 belum ada penilaian, kemudian tahun 2020 dan 2021 tidak ada penilaian karena Pandemi

Covid-19. Sementara itu, pada tahun 2019 dan tahun 2022 Keterbukaan Informasi Publik bernilai informatif.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.56.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	100	48,38	100	100
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	-	1,43	3,13	3,45	2,76
Keterbukaan informasi publik	Informatif/Tidak Informatif	-	Informatif	-	-	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.2.10. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota dan penyerapan tenaga kerja. Persentase Koperasi yang berkualitas mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 30,83 persen menjadi 22,82 persen pada tahun 2020 dan Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dari 92,86 persen pada tahun 2019 mencapai 107,84 persen pada tahun 2020

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan koperasi usaha kecil dan menengah pemerintah Kota Medan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun

		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi yang berkualitas/sehat	Persen	30,83	22,82	22,82	26	25
Persentase UMKM naik Kelas	Persen	N/A	N/A	N/A	14,5	15

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.4.2.11. Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kota Medan memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kota Medan dapat dilihat diantaranya melalui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA di Kota Medan.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan investasi Kota Medan	Persen	-63,47	228,6	-49,45	26,52	-30,64

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Persentase peningkatan investasi Kota Medan berfluktuasi dari -63,47 persen pada tahun 2018 meningkat pada tahun 2019 menjadi 228,6 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -49,45 persen. pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 26,62 persen dibanding tahun sebelumnya, namun kembali menurun pada tahun 2022 sebesar -30,64 persen.

2.4.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreativitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan.

Realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Orang	152	128	0	34	250
Gelanggang/balai remaja (Selain milik swasta)	Per 10.000 Penduduk	0,0004	0,0004	0,0034	0,00041	0,00040
Lapangan Olahraga	Per 10.000 Penduduk	0,4200	0,4200	0,2100	0,2483	0,2449

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Akumulasi Atlet yang dibina dan berprestasi	Persen	5,970	5,830	0	10,686	6,979
Jumlah pemuda pelopor wirausaha muda pemula, kepemimpinan, dan kader	Orang	40	40	40	286	760
Jumlah event olahraga	Kali	23	24	0	19	14
Persentase partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan	Persen	0,024	0,008	0,133	0,8	0,88
Persentase pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif	Persen	100	30,95	0	100	50
Persentase cakupan pembinaan atlit muda yang berprestasi	Persen	76,0	34,00	0	200	640
Persentase lapangan olahraga yang berkualitas	Persen	NA	NA	NA	50	80

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Jumlah atlet berprestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional mengalami peningkatan dari 152 pada tahun 2018 mencapai 250 pada tahun 2022. Gelanggang/balai remanja (selain milik swasta) tidak terjadi perubahan yang signifikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Lapangan olahraga mengalami penurunan dari 0,42 per 10.000 penduduk pada tahun 2018 menjadi 0,2449 per 10.000 penduduk pada tahun 2022 Akumulasi Atlet yang dibina dan berprestasi juga cenderung meningkat dari 5,97 persen menjadi 6,979 persen. Jumlah pemuda pelopor wirausaha muda pemula, kepemimpinan, dan kader meningkat pesat dari 40 orang pada tahun 2018 mencapai 760 orang pada tahun 2022. Jumlah event olahraga mengalami penurunan dari 23 kali pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menjadi 14 kali. Tidak adanya event olahraga pada tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga untuk pelaksanaan event olahraga tidak dapat dijalankan.

Persentase partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan mengalami peningkatan dari 0,024 persen pada tahun 2018 menjadi 0,88 pada tahun 2022. Persentase pramuka siaga, penggalan, penegak, pandega yang aktif mengalami penurunan dari 100% dari 2018 menjadi 50% pada tahun 2022. hal ini karena ada perubahan nomenklatur sub kegiatan sehingga penghitungan indikator berbeda dengan tahun 2021 (perubahan kepmendagri 90

tahun 2019 menjadi kepmendagri 050-5889 tahun 2021). Persentase cakupan pembinaan atlit muda yang berprestasi dari 76 persen pada tahun 2018 menjadi 640 persen pada tahun 2022. persentase lapangan olahraga yang berkualitas dari 50 persen pada tahun 2021 menjadi 80 persen pada tahun 2022. pada tahun 2018 sampai 2020 belum ada data terkait dengan realisasi untuk indikator ini.

2.4.2.13. Urusan Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2018-2022 antara lain tersedianya dokumen Buku Kota Medan dalam angka dan Buku PDRB Kota untuk penyusunan rencana pembangunan daerah serta sejak tahun 2018 persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Ada pun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Statistika Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.59.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Satistik Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Persen	-	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Med

2.4.2.14. Urusan Persandian

Urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di Tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam pengaturannya secara jelas diamanatkan bahwa instansi pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepada pemerintah provinsi, selanjutnya pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

kabupaten/kota di bawahnya. Selama ini di Tingkat pusat, Lembaga sandi negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas di bidang persandian, sudah secara aktif melakukan pembinaan persandian di lingkungan nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Fungsi persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi unutk mengamanan informasi berbasis IT. Adapun penjabaran fungsi persandian pada pemerintah Kota Medan di arahkan pada tata kelola penjaminan keamanan informasi berkelasifikasi; pengelolaan sumber daya persandian; dukungan layanan operasional persandian untuk keamanan informasi; dan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal.

Urusan pemerintahan wajib persandian merupakan urusan yang muncul tersendiri dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada regulasi sebelumnya urusan ini berada pada urusan wajib otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

2.4.2.15. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kota Medan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah.

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan selama tahun 2018-2022 antara lain melestarikan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	42	58	32,07	100	84,53

Sumber: Dinas Kebudayaan

Berdasarkan data tersebut, cagar budaya yang dilestarikan cenderung mengalami penurunan dari 42 persen pada tahun 2018 menjadi 32,07 persen pada tahun 2020, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 100 persen dan menurun pada tahun 2022 menjadi 84,53 persen.

2.4.2.16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun yang dijadikan indikator dalam penilaian kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan adalah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, pengunjung perpustakan, nilai budaya baca, penerapan pengelolaan arsip secara baku, dan jumlah pojok baca. Penerapan pengelolaan arsip secara baku merupakan proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Capaian kinerja koleksi buku yang tersedia di perpustakaan mengalami peningkatan dari 23,51 persen pada tahun 2018 menjadi 32,06 persen pada tahun 2022, pengunjung perpustakaan mengalami penurunan dari 3,26 persen pada tahun 2018 menjadi 0,79 persen pada tahun 2022, nilai budaya baca mengalami penurunan dari 3,26 persen pada tahun 2018 menjadi 0,79 persen pada tahun 2022, pengolahan arsip secara baku mengalami penurunan dari 35,18 persen pada tahun 2018 menjadi 32,33 persen pada tahun 2022. Jumlah pojok baca mengalami peningkatan pesat dari 20 unit pada tahun 2018 menjadi 1.456 unit pada tahun 2022. Capaian kinerja selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.61.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Persen	23,51	24,81	25,25	30,41	32,06
Pengunjung perpustakaan	Persen	3,26	2,78	0,75	0,627	0,79
Nilai Budaya Baca	Persen	3,26	2,78	0,75	0,627	0,79
Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	35,18	35,18	28,35	31,25	34,33
Naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Eks	500	500	501	505	506
Jumlah Pojok Baca	Unit	20	20	108	1.259	1.459
Rasio koleksi perpustakaan per satuan penduduk	Poin	1,30	1,28	1,27	1,26	1,25
Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	35,18	35,19	28,35	31,25	34,33
Rasio perpustakaan per seribu penduduk	Poin	0,30	0,38	0,42	0,50	0,57
Persentase dokumen/arsip yang dikelola dengan baik	Persen	75	83,75	96,05	24,60	34,21
Nilai Audit System Kearsipan Eksternal (ASKE)	Poin	76	62,32	71,22	71,61	71,72
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59U43/2009)	Poin	-	19,55	72,70	73,75	74,61
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	Poin	-	2,16	66,60	83,33	83,33
Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	-	6,32	12,08	9,87	76,54
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	-	-	-	59,51	66,39

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

Rasio koleksi perpustakaan per satuan penduduk mengalami penurunan dari 1,30 poin pada tahun 2018 menjadi 1,25 poin pada tahun 2022, rasio koleksi

perpustakaan per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 0,30 poin pada tahun 2018 menjadi 0,57 poin pada tahun 2022, persentase dokumen/arsip yang dikelola dengan baik mengalami penurunan dari 75 persen pada tahun 2018 menjadi 34,21 persen pada tahun 2022, nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) mengalami penurunan dari 76 poin tahun 2018 menjadi 71,72 poin pada tahun 2022.

2.4.3. Urusan Pilihan

2.4.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pariwisata. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	3,03	3,04	2,72	2,57	2,66
Jumlah Kunjungan	Jiwa	407.440	550.981	44.400	170.649	319.315

Sumber: Dinas Pariwisata

Indikator kinerja urusan Pariwisata selama tahun 2018 - 2022 antara lain kontribusi PDRB sektor Pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun dari 3,03% pada tahun 2018 menjadi 2,66% pada tahun 2022. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan (nusantara dan mancanegara) cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, dari sisi jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Medan cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan sebanyak 407.440 orang dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 550.981 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan menjadi 44.400 orang. Hal ini disebabkan oleh Covid-19 yang

menyebabkan berbagai negara memberlakukan lockdown sehingga menghambat aktivitas pariwisata. Namun pada tahun 2021, sektor pariwisata berhasil meningkat. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 170.649 orang dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 319.315 orang.

2.4.3.2. Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidayaan dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produksi perikanan, dan tingkat konsumsi ikan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2018 menjadi 0,96 persen pada tahun 2022, sementara itu produksi perikanan mengalami peningkatan dari 95.000 ton pada tahun 2018 mencapai 131.953,32 ton pada tahun 2020. Tingkat konsumsi ikan per kapita cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat konsumsi ikan sebesar 55,53 kg per kapita menurun hingga tahun 2021 menjadi 46,46 kg per kapita, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 53,08 kg per kapita. Realisasi capaian indikator kinerja urusan Pertanian Pemerintah Kota Medan tahun 2018-2022 dapat

dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Kota Medan
Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	1,22	1,11	1,11	0,98	0,96
Produksi perikanan	Ton	95.000	176.761,91	136.313,91	194.261,07	-
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	Kg/ Kapita	55,53	50,63	48,44	46,46	53,08

Sumber: BPS Kota Medan

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Medan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Produksi perikanan Kota Medan meningkat drastis dari sejumlah 95.000 ton di tahun 2018 menjadi sejumlah 194.261,07 ton di tahun 2021. Untuk tingkat konsumsi ikan per kapita di Kota Medan fluktuatif dari tahun ke tahun, namun cenderung menurun.

2.4.3.3. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Indikator yang menjadi ukuran kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kota Medan adalah Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	24,96	25,55	25,71	26,02	26,25

Sumber: Dinas Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam mendukung perekonomian Kota Medan terus mengalami peningkatan dari 24,96 persen pada tahun 2018 mencapai 26,25 persen pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 1,27 persen setiap tahunnya.

2.4.3.4. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kota Medan. Kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap perekonomian di Kota Medan mengalami penruunan, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kota Medan cenderung mengalami menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari 14,61 persen pada tahun 2018 menjadi 14,17 persen pada tahun 2022. Jumlah industri kecil dan menengah juga mengalami peningkatan dari 7,24 persen pada tahun 2018 menjadi 31,53 persen pada tahun 2019. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	14,61	14,25	14,12	14,22	14,17
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	25	25	3,60	3,73	4,73

Sumber : BPS Kota Medan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

2.4.4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, di antaranya yaitu pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kota Medan telah memiliki 8 sistem informasi manajemen Pemda yakni SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Pendukung Keputusan, SIMDA Kepegawaian, SIMDA Perizinan, SIMDA Pengelolaan Barang Daerah, SIMDA LPPD dan SIMDA Sistem Informasi Geografis dan juga sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu melakukan survey kepuasan layanan masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penunjang Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Nilai SAKIP	Kategori	CC	CC	CC	CC	B

Sumber : Sekretariat Daerah

Berdasdarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Nilai LPPD mengalami penurunan dari kategori Sangat Tinggi pada tahun 2018 menjadi Tinggi pada tahun 2022, sementara itu Nilai SAKIP mengalami peningkatan dari kategori CC pada tahun 2018 mencapai B pada tahun 2022.

2.4.4.2. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	-	Level 2	Level 2	-	-
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)	Persen	-	Level 2	Level 2	-	-

Sumber : Inspektorat

Dari tabel di atas pencapaian kinerja urusan pengawasan sampai tahun 2019 adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level 2 dan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level 2.

Penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah baik dari segi kebijakan, anggaran dan kinerja pemerintah daerah, dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah temuan BPK dan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.68.
Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Temuan	22	17	16	13	19
Jumlah Rekomendasi	163	112	82	50	81

Sumber: Bappeda Kota Medan, 2023

Dari tabel diatas, jumlah temuan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 cenderung menurun, namun kembali meningkat di tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah rekomendasi kecenderungan yang terlihat dari tahun 2018 ke tahun 2021 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2022. Secara keseluruhan dapat disampaikan ada perbaikan tetapi tentu hal ini harus diwaspadai untuk lebih

dapat dikendalikan pada masa yang akan datang.

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat *Leveling* atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 2.69.
Level Maturitas SPIP dan APIP Kota Medan

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber: Bappeda Kota Medan, 2023

Dari tabel diatas, tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari tahun 2018 ke tahun 2022 semakin meningkat, dari level 2 ke level 3. Untuk itu diperlukan upaya yang optimal dari Inspektorat Kota Medan untuk dapat meningkatkan ketercapaian hingga ke level 5.

2.4.4.3. Perencanaan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2018 - 2022 antara lain persentase capaian indikator sasaran RPJMD dan total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Perencanaan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase capaian indikator sasaran RPJMD	Persen	-	-	-	91,07	90,04
Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Poin	-	-	29,09	31,09	36,27

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan

Pada tahun 2021 tingkat capaian indikator sasaran RPJMD sebesar 91,07 persen menurun pada tahun 2022 menjadi 90,04 persen, sementara itu total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja mengalami peningkatan dari 29,09 pada tahun 2020 menjadi 36,27 pada tahun 2022.

2.4.4.4. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan di antaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Level	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Rasio PAD	Persen	38,47	33,15	37,85	37,96	40,93

Sumber: BKAD dan Bapenda

Dari tabel di atas pencapaiaan kinerja urusan keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 antara lain adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 masih tetap dengan wajar dengan pengecualian (WDP) dan pada tahun 2020 s/d 2022 meningkat pada Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan Rasio PAD terhadap pendapatan daerah cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2018 mencapai 38,47 persen kemudian turun sebesar 33,15 persen pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 cenderung mengalami peningkatan walau tidak ignifikan. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan Pemerintah Kota Medan

dalam membiayai kebutuhan daerah.

2.4.4.5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama tahun 2018 - 2022 antara lain,

Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pegawai fungsional terhadap seluruh pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	7,85	8,98	9,02	8,04	13,20
Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	4,74	5,5	9,92	100	53,10
Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	4,08	6,2	3,25	19,03	21,23
Penerapan sistem merit	Poin	N/A*	N/A*	143	238	258,50
Indeks Profesionalisme ASN	Poin	N/A**	N/A**	49	50,89	6,58

*Penerapan sistem merit pada tahun 2018 dan 2019 belum dilaksanakan karena juklak penilaian terkait sistem merit baru terbit setelah keluarnya peraturan komisioner ASN No. 9 tahun 2019
**indeks profesionalisme ASN pada tahun 2018 dan 2019 belum dilaksanakan karena juklak penilaian terkait Indeks profesionalisme ASN baru terbit setelah keluarnya peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019
Sumber : BKD dan PSDM

Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) meningkat dari 7,85 persen pada tahun 2018 menjadi 13,20 persen pada tahun 2022. persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) meningkat dari 4,74 persen menjadi 53,10 persen dalam kurun waktu 2018-2022. Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga meningkat dari 4,08 persen menjadi 21,23 persen. Penerapan sistem merit meningkat dari 143 poin pada tahun 2020 menjadi 258,50 poin pada tahun 2022. Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah Indeks Profesionalisme ASN yang mengalami penurunan dari 49 poin pada tahun 2020 menjadi 6,58 poin pada tahun 2022.

2.4.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk mendesain kebijakan, program dan kegiatan yang benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan kota. Temuan fakta sosiologis, hukum dan juga filosofis akan menjadi dasar pijak berbasiskan data. Demikian pula evaluasi program ataupun kebijakan yang dijalankan pemerintahan kota menjadi domain kerja dari penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.73.
Cakupan Penelitian Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan Tahun 2018-2022

Jenis Penelitian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	Persen	75	80	81	71,4	80
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	N/A	5	12	27,98	44,04

Sumber: Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan dan Penelitian selama ini adalah hasil penelitian belum banyak dipergunakan untuk menentukan kebijakan Pembangunan Kota Medan. Dengan demikian, maka penting bagi Pemerintah Kota Medan ke depan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kota. Sehingga hasil-hasil penelitian lebih bersifat terapan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Kota Medan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Pemerintah Kota Medan untuk lima tahun perencanaan ke depan memandang perlu untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan memberi kemudahan bagi masyarakat. Bersamaan dengan inovasi yang dilakukan akan menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif.

2.4.4.7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.74.
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	11	36	15	45	32

Sumber: Sekretariat DPRD

2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD Kota Medan 2016-2021 dilihat dari 121 indikator capaian kinerja. Pada tahun 2016, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan, pendidikan menengah, kelautan, pengelolaan Terminal tipe A, dan lainnya, sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih.

Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, sebanyak 21 indikator atau telah mencapai target 36.21 persen dan sebanyak 37 indikator atau 63.79 persen belum mencapai target.

1. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 1 yaitu Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 1 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 2 indikator yang mencapai target dan 9 indikator yang tidak mencapai target.
2. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 2 yaitu Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme. Berdasarkan data di bawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 2 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 1 indikator yang mencapai target dan 1 indikator yang tidak mencapai target.
3. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 3 yaitu Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan

kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 3 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 6 indikator yang mencapai target dan 8 indikator yang tidak mencapai target.

4. Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD dalam Misi 4 yaitu: Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 4 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 3 indikator yang mencapai target dan 9 indikator yang tidak mencapai target.
5. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 5 yaitu Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 5 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 9 indikator yang mencapai target dan 7 indikator yang tidak mencapai target.
6. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 6 yaitu Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinnekaan. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 1 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 2 indikator telah mencapai target.

Hasil pencapaian kinerja sasaran RPJMD 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.75.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Misi Kesatu: Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota														
	Tujuan 1: Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat														
	Sasaran 1: Meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif														
1	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan	Persen	96	97	98	99	99	100	–	–	102.04	–	96,91	-	-
	Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana														
2	Rata-rata waktu respon kejadian tanggap darurat	menit	14.5	14	13.5	13	11	10	–	–	1 Hari, 2 Jam 50 Menit	–	-	-	-
3	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (*response time rate*)	menit	17.5	17	16.5	16	15	15	–	–	15	15.4	15.4	-	11,48
	Tujuan 2: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan *stakeholder* dalam pembangunan kota di berbagai bidang														
	Sasaran 1: Meningkatnya Perencanaan Partisipatif														
4	Persentase program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	82	84	86	87	89	90	72.73	84	85,81	100	92.15	-	-
5	Persentase peningkatan PAD Kota Medan	persen	4	6	8	10	12	12	5.22	5.5	7.04	11.55	18,82	-	
6	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Tujuan 3:Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial perusahaan														
	Sasaran 1: Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota														
7	Persentase peningkatan penyaluran dana CSR ke	persen	26.7	33.3	49.3	56.0	61.3	66.7	–	–	0	–	–	–	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pemerintah Kota Medan														
	Tujuan 4: Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota														
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota														
8	Persentase Peningkatan Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	Persen	4.07	4.23	4.39	4.56	4.72	4.89	4.21	10.17	2.09	2.16	2.16	-	-
9	Persentase Peningkatan Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	88.22	88.81	89.13	89.74	89.99	89.99	90.74	90.74	53.94	57.46	57,46	49,70	46,27
	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan														
10	Persentase menurunnya konflik antar pelajar dan pemuda	Persen	3.81	3.20	3.04	2.66	2.39	2.08	–	–	20	–	-	-	
	Tujuan 5: Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi														
	Sasaran 1: Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan event-event olahraga Nasional dan Internasional														
11	Persentase meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	persen	23.10	32.20	41.40	50.80	60.00	61.40	41.5	0.99	2.55	2.20	0	3400	635
	Misi Kedua: Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme														
	Tujuan 1: Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai														
	Sasaran 1: Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai														
12	Persentase menurunnya konflik antar OKP	persen	4.81	4.20	3.94	3.66	3.09	2.88	–	–	0.1	–	-	-	-
	Tujuan 2:Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing														
	Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal														
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	3	3	4	4	4	5	4.49	13.22	3,03	3,04	2,72	2,57	2,66
	Misi Ketiga: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna														

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah														
	Tujuan 1: Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota														
	Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro														
14	Pertumbuhan ekonomi	Persen	7.09	7.34	7.54	7.75	7.90	9.02	5.89	7.34	6.05	5.93	-1,98	2,62	4,71
15	PDRB ADHB	Milyar Rp	179,699.52	201,263.46	225,415.07	252,415.07	282,123.52	282,123.52	184,515.57	198,059.01	222,058.07	241,482.35	242,198,24	254.721,96	280.159,02
16	PDRB ADHK	Milyar Rp	51,674.83	55,085.38	58,721.77	61,721.77	66,729.00	66,729.00	51,678.92	55,472.15	62,193.78	67,634.11	67.834	157.689,19	165.120,00
17	Laju Inflasi	Persen	3.81	3.36	5.04	5.80	5.01	5.01	6.60	3.18	1.00	2.43	1.76	0,44	6,10
	Sasaran 2: Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan														
18	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	12.00	12.14	12.28	12.43	12.57	12.57	15.1	6.59	14.15	14.61	14.12	14.22	14,17
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	26.95	26.95	26.98	26.99	27.00	27.00	26.66	24.77	25.11	24.99	25.55	26.02	26,25
	Sasaran 3: Meningkatnya Produktivitas pertanian dan perikanan														
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	0.64	0.38	0.23	0.14	0.08	0.08	1.06	0.81	1.26	1.24	0.61	0.98	0,96
	Sasaran 4: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah														
21	Dana Penyertaan Modal Pemko pada Perusahaan Daerah	Milyar Rp	3	4	4	5	5	6	5	5	5	20	10	-	-
	Tujuan 2: Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal														
	Sasaran 1: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan														
22	Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rp	4.257,75	5.237,67	6.203,55	7.243,77	8.203,45	9.253,55	2.044.09	3.663.25	1.837,32	7.106,00	4.127,64	5.121,02	3.540,373
23	Realisasi Investasi PMA	US$	650.929,	680.929,	726.456,67	765.75	780.32	780.32	1.433.2	-	74.395.200	147.15	40.258.5	57.196.3	41.136.0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			25	25		4,21	1,52	1,52	78.		,00	6.200,00	00,00	00,00	00,00
	Tujuan 3:Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja														
	Sasaran 1: Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan *skilled labor*														
24	Angka Partisipasi Kerja	Persen	71.82	73.61	74.40	77.29	80.00	80.00	60.05	67.12	48.70	65.99	65,99	62,16	78,81
	Tujuan 4: Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dan Koperasi dalam perekonomian kota														
	Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota														
25	Persentase meningkatnya usaha UMKM	Persen	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	96.67	43.04	96.46	96.46	-	-	-
26	Menurunnya angka pengangguran kota	persen	5.72	5.01	4.65	4.08	3.64	3.06	9.75	9.46	9.46	8.25	10,73	1,92	17,7
	Tujuan 5: Mewujudkan Medan Kota Kreatif dan Inovatif														
	Sasaran 1: Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mewujudkan Medan Kota Kreatif														
27	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	persen	4.82	5.01	5.32	5.46	5.63	5.88	–	–	–	–	-	-	-
	Misi 4: Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.														
	Tujuan 1:Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif														
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai														
28	Persentase pembangunan fisik bangunan yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Persen	26.60	27.80	29.10	30.50	34.10	36.98	–	–	–	–	-	-	-
	Sasaran 2: Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota														
29	Persentase bangunan yang	Persen	52.60	52.80	53.10	53.50	54.10	54.98	52.40	52.40	53.60	64.88	64,88	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	memiliki IMB di Kota Medan														
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat														
30	Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)	Ha	150	130.3	100.3	50.3	0	0	200	179.3	70.93	70.09	819,80	506,60	306,00
31	Persentase rasio rumah layak huni	Persen	98	98.5	99	100	100	100	97.29	99.79	83.13	93.75	94,49	88,14	88,75
	Tujuan 2: Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistim informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan														
	Sasaran 1: Meningkatnya akses pelayanan air limbah														
32	Persentase akses pelayanan air limbah	Persen	91	92	94	95	95	95	97.8	97.8	97.8	97.8	-	-	--
	Sasaran 2: Meningkatnya akses pelayanan air minum														
33	Persentase pelayanan air minum layak perkotaan	Persen	82	90	95	95	100	100	67.15	67.29	70.84	80.52	-	-	-
	Sasaran 3: Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik														
34	Persentase menurunnya lokasi rawan genangan/ banjir	Persen	36.27	31.37	27.45	25.49	21.56	19.61	–	–	4.83	4.83	-	-	76,04
	Tujuan 3: Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkar luar yang semakin terpadu, efisien, efektif dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik)														
	Sasaran 1: Terwujudnya infrastruktur jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman														
35	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	94.5	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	94.74	97.59	56,24	53,38	53,38	51,81	-
	Sasaran 2: Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan														
36	Persentase menurunnya titik kemacetan	Persen	32.27	30.26	28.44	26.29	25.42	19.81	–	–	2	–	-	-	-
37	Persentase menurunnya titik kecelakaan	Persen	26.28	24.35	22.40	20.48	18.55	17.66	–	–	4.83	–	-	-	16,07

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tujuan 4: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
	Sasaran 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
38	Persentase peningkatan luasan RTH dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	12.5	13	14	15	16	17	29.78	29.78	29.78	9.66	9,66	-	-
	Tujuan 5: Memastikan kelestarian lingkungan hidup														
	Sasaran 1:Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah														
39	Persentase peningkatan volume penanganan sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)	Persen	87	91	95	98	100	100	91.29	90.33	32.56	77.80	-	-	-
	Misi Kelima: Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan														
	Tujuan 1:Mewujudkan Medan sebagai Pusat Pendidikan Regional														
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan														
40	Persentase kondisi sekolah SD dalam keadaan baik	Persen	91	92	93	94	94	95	100	100	100	88.91	83.82	81,88	85,23
41	Persentase kondisi sekolah SMP dalam keadaan baik	Persen	91	92	93	94	94	95	100	100	100	92.63	88.71	82,63	95,14
	Sasaran 2: Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik														
42	Persentase guru tersertifikasi SD/MI	Persen	50	52	54	56	58	60	47.38	47.38	46,80	43,30	66,70	67,26	76,49
43	Persentase guru tersertifikasi SMP/MTs	Persen	51	53	56	58	62	65	53.71	53.71	53,30	50,20	53,35	53,50	66,33
	Sasaran 3: Meningkatnya minat baca masyarakat														
44	Pencanangan Medan kota literasi	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua														
	Sasaran 1: Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat														
45	Persentase menurunnya angka putus sekolah SD/MI/Paket A	Persen	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0,26	0,24	0,13	0,25	0,21
46	Persentase menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	0.09	0.09	0.07	0.06	0.106	0.06	0.11	0.089	0,68	0,35	0,09	0,13	0,21
47	Persentase angka melanjut sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	112.00	114.00	116.00	118.00	120.00	123.87	106.74	107.25	106,85	117,48	103,28	100,00	100,00
	Tujuan 3: Mewujudkan Medan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan regional														
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan														
48	Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72.00	76.00	81.00	85.00	89.00	92.00	70.03	72.45	31.01	92.00	87.65	-	-
49	Meningkatnya usia harapan hidup	Tahun	72.78	73.08	73.38	73.78	74.18	74.18	72.34	72.40	72.64	72.98	73.14	73,23	73,58
	Tujuan 4 : Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan balita														
	Sasaran 1: Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, balita dan anak														
50	Persentase menurunnya angka kematian ibu, anak dan balita	Persen	2.60	1.90	1.20	0.50	0.02	0.00	1.00	4.00	10.27	19.08	NA	-	-
	Tujuan 5: Memerangi HIV/AIDS, DBD.TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular														
	Sasaran 1: Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular														
51	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular	Persen	15	30	45	60	80	100	100	100	100	100	100	100	-
	Tujuan 6: Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)														
	Sasaran 1: Menurunnya tingkat kemiskinan														
52	Persentase menurunnya angka kemiskinan	Persen	1.64	1.82	2.03	2.12	2.23	2.32	1.44	1.67	9,44	2,06	0,87	-4,12	3,23

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2021						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sasaran 2: Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)														
53	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	65,57	68,70
	Sasaran 3: Meningkatnya jumlah sarana sosial														
54	Persentase penurunan jumlah PMKS	Persen	0.021	0.019	0.017	0.014	0.010	0.008	0.019	0.017	1.00	0.96	0.07	0.012	-
	Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan														
	Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan														
55	Rasio Kepemilikan e-KTP	Persen	86.65	88.73	97.47	99.35	100	100	84.94	87.57	85.48	92.69	96.34	98,48	-
56	Rasio Kepemilikan akta kelahiran	Persen	61.43	62.51	62.98	63.75	65.08	65.32	72.15	75.80	35.51	75.20	83.02	85,76	
	Misi Keenam: Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan														
	Tujuan 1: Mewujudkan Medan sebagai Kota Religius														
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama														
57	Rasio rumah ibadah	Persen	10.8	10.9	11.2	11.5	11.7	11.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10,7	-
	Tujuan 2: Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama														
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama														
58	Menurunnya konflik dan potensi SARA	Persen	4.82	4.01	3.62	2.24	1.86	0.84	–	–	0.7	0.1	-	-	-

2.6. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, Standar Hidup) yang diukur dengan *Human Development Index, maka United Nation (UN)* melalui *Sustainable Development Working Group* mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjaganya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran SDGs untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah Sustainable and Resilient Infrastructure Development. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, menyepakati Outcome Document SDGs yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015.

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke

generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses sumber energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kota Medan tahun 2021-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Pencapaian program SDGs Januari-Desember Tahun 2022

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun				
Target 1.1 : Pada Tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.				
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim			
	a. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional	Persen	2,61	1,23
	b. Persentase pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional	Persen	-	-
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persen	8,34	8,07
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional			
	1. Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan (tingkat morbilitas)	Persen	92	92,8
	2.a Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP	Persen	-	-
	2.b Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	Persen	-	-
	3.a Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	Persen	0,11	0,1
	3.b Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	Persen	13	4,83
	3.c Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak	Persen	6,57	6
	3.d Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2	Persen	4,74	3,79
	3.e Persentase rumah tangga dengan bahan bakar menggunakan elpiji 3 kg	Persen	89,73	91,03
	3.f Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif	Persen	-	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
	3,g Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Persen	15,56	10
	3.h Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	Persen	-	-
	3.i Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja	Persen	-	-
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut kenis kelamin untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	Persen	81,08	85
1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	37,9	33,22
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar			
	a. Indeks Pelayanan Dasar	Persen	-	-
	b. Akses pada layanan air minum (IPAM)	Persen	87	94,99
	c. Akses pada layanan sanitasi dasar (IPSD)	Persen	95.77	96,21
	d. Akses pada mobilitas dasar rural (IPMD rural)	Persen	-	-
	e. Akses pada mobilitas dasar (IPMD urban)	Persen	-	-
	f. Akses pada mobilitas dasar (IPMD)	Persen	-	-
	g. Indeks akses pada fasilitas penyehatan dasar (IFPD)	Persen	66,78	70
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.			
	a.Proporsi rumah tangga dengan rumah hak milik	Persen	52,24	58,47
	b. Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa	Persen	18,95	18,92
	c. Proporsi rumah tangga dengan rumah kontrak	Persen	21,7	21,87
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.				
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	a. korban meninggal	jiwa/100.000 orang	3	0,4
	b. korban hilang	jiwa/100.000 orang	0	0
	c. korban terluka	jiwa/100.000 orang	23	0,4
	d. korban mengungsi	jiwa/100.000 orang	12.885	412
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan resiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan resiko bancana nasional	Ada/Tidak	Ada	Ada
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
2.2.1*	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	0,51	0,31
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persen	0,8	0,46
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	89,8	92,9
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Persen	0,53	0,01
Target 2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan				
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Persen	N.A.	6
Target 2.a : Meningkatkan investasi termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang				
2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Persen	72	72
Target 2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim				
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	Persen	0,4	0,4
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000)	Jiwa	7	9
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya :			
	a. ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	94,7	97,58
	b. di fasilitas kesehatan	Persen	94,7	97,58
Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.				
3.2.1*	a. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	1,43	1,88
	b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	0,46	0,06
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	0,75	1,83
Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	per 1.000 penduduk	0,488	0,628
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	112,85	417,43
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	jiwa/1.000 org	0	0
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/Kota	-	-
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000penduduk	jiwa/100.000 org	-	-
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan :			
	a. Filariasis	Persen	0	0
	b. Kusta	Persen	100	100
Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan				
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	0,290	0,260
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen	51,46	1,97

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun	Persen	0,24	1,02
Target 3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.				
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Jiwa		
Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional				
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15049 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern			
	a. Komponen CPRi	Persen	69,68	61,93
	b. Komponen mCPRi	Persen	69,68	61,93
	c. Komponen Unmet Need KB	Persen	16,01	6,4
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	/1.000 kelahiran	2,01	1,9
Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Persen	65,92	NA
	a. kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir dan balita (RMNCH)	Persen	30,44	NA
	keluarga berencana : persentase perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang menggunankan alat kontrasepsi modern	persen	92,2	45,79
	Perawatan kehamilan : persentase perempuan usia 15-49 tahun yang memiliki anak lahir hidup dalam periode waktu tertentu dan memperoleh pelayanan antenatal 4 kali atau lebih	persen	89,6	91,3
	Imunisasi anak: persentase bayi yang memperoleh tiga dosis vaksin yang mengandung diphtheria-tetanus-pertussis	persen	86,6	94,7
	Perawatan balita: Persentase anak dibawah usia lima tahun yang diduga mengalami pneumonia (batuk dan sulit bernapas bukan karena permasalah pada hidung dan dada) dalam kurun waktu dua minggu sebelum survei dan dibawa ke tenaga atau fasilitas kesehatan	persen	1,2	NA
	b. penyakit menular (PM)	Persen	79,93	NA
	Tuberkulosis: Persentase insiden TB yang terdeteksi dan berhasil diobati	Persen	81,2	86
	HIV/AIDS: Persentase penduduk yang hidup dengan HIV dan saat ini mendapatkan terapi antiretroviral	Persen	94,44	89,52
	Malaria: persentase populasi di wilayah endemis malaria yang tidur menggunakan kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei;	Persen	0	0
	Air dan sanitasi: persentase Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi improved	Persen	66,6	79
	c. penyakit tidak menular (PTM)	Persen	89,60	NA
	Hipertensi: Age-standardized prevalensi tekanan darah tidak meningkat (tekanan darah sistolik <140 mmHg atau tekanan darah diastolik <90 mmHg) pada penduduk usia ≥18 tahun	Persen	51,46	7,31
	Merokok: Age-standardized prevalensi penduduk usia ≥15 tahun yang tidak merokok dalam kurun waktu 30 hari sebelum survei	Persen	-	-
	d. kapasitas dan akses pelayanan	Persen	86,60	NA
	Akses ke Rumah sakit: Tempat tidur rumah sakit per kapita, relatif terhadap ambang batas maksimum 18 per 10.000 penduduk		39,8	NA

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
	Kepadatan tenaga kesehatan: tenaga kesehatan per kapita (dokter, psikiater, dan ahli bedah), relatif terhadap ambang batas maksimum untuk setiap kader		0,79	1,80
	Keamanan kesehatan: indeks kapasitas utama regulasi kesehatan internasional (International Health Regulations/IHR) yang diperoleh dari 13 indikator kapasitas yang dicapai		84,62	NA
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Persen	-	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	81,08	97,35
Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat				
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun	Persen	0,290	0,25
Target 3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
3.c.1.*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	per 1.000 penduduk	7,86	7,37
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang :			
	a. SD/sederajat	Persen	100,00	100,00
	b. SMP/sederajat	Persen	100,00	100,00
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang :			
	a. PAUD/sederajat	Persen	2,76	2,33
	b. SD/sederajat	Persen	0,65	0,21
	c. SMP/sederajat	Persen	6,77	4,25
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.				
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Persen	N/A	61
Target 4.3 : Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan da pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas				
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Persen	N/A	67,7
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Persen	43,89	34,30
Target 4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan				
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)			
	1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persen	100	100
	2. Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persen	100	100
Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat dan perguruan tinggi untuk :			
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat			

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
	a. perempuan/laki-laki	Persen	99,49	95
	b. kuintil terbawah/teratas	Persen	-	-
	c. disabilitas/tanpa disabilitas	Persen	-	-
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat			
	a. perempuan/laki-laki	Persen	99.87%	93,5%
	b. kuintil terbawah/teratas	Persen	-	-
	c. disabilitas/tanpa disabilitas	Persen	-	-
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat			
	a. perempuan/laki-laki	Persen	99,10	101,16
	b. kuintil terbawah/teratas	Persen	-	-
	c. disabilitas/tanpa disabilitas	Persen	-	-
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi			
	a. perempuan/laki-laki	Persen	108,03	114,59
	b. kuintil terbawah/teratas	Persen	-	-
	c. disabilitas/tanpa disabilitas	Persen	-	-
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi				
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun	Persen	99,86	99,8
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua				
Target 6.1 : Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persen	90,25	94,99
Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan				
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun			
	a. akses terhadap fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Persen	-	-
	b. akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	Persen	95,77	94,53
	c. praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	Persen	4,23	3,31
	d. akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	Persen	5,3	3,45
	e. akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Persen	-	NA
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Persen	21,5	9
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku			
	PH	nilai	6 s/d 9	6 s/d 9
	BOD	mg/l	3	2,6
	COD	mg/l	25	22,82
	DO	mg/l	2	5,73
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	persen	NA	0
Target 6.4 : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan				

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air				
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persen	-	-
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediannya	Persen	-	-
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
Target 7.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern				
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	100
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	rumah tangga	-	-
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Persen	88,14	91,03
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Persen	1,20	4,78
8.1.1.(a)	PDRB perkapita	ribu Rupiah	64.079.000	113.846.081
Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya				
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	Persen	4,03	4,71
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Persen	91	94
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi			
	a. Angkutan Darat	Orang	3.028.231	4.587.052
Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara-negara berkembang.				
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Persen	0,22	0,29
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara				
Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
10.1.1.*	Rasio Gini	Rasio	0,4	0,399
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,34	8,07
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal	Daerah	-	-
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Persen	-	-
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Persen	-	-
Target 10.2 : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.				
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Persen	-	-
Target 10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut				
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Jumlah kebijakan	0	0
Target 10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.				

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	37,9	33,22
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh				
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	85,00	94,05
Target 11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak penyandang difabilitas dan orang tua.				
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen	100	85
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen	2,72	16,01
Target 11.3 : Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.				
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Rasio	-	-
Target 11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia				
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Rp	13.029.794.211	11.420.913.400
		Rasio	5.388	4.578
Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan				
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	a. korban meninggal	jiwa/100.000 orang	3	0,4
	b. korban hilang	jiwa/100.000 orang	0	0
	c. korban terluka	jiwa/100.000 orang	23	0,4
	d. korban mengungsi	jiwa/100.000 orang	12.885	412
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	Persen	0,01	0,01
Target 11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.				
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persen	74	80,88
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persen	5,01	8,07
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	Rasio	37,701	37,437
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Rasio	77,07	75,88
Target 11.a : Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah				
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Persen	85,00	94,05
Target 11.b : Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persen	Ada	Ada
Target 11.c : Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan lokal				

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
11.c.1.(a)	Persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan dan menggunakan Material Lokal	Persen	-	-
Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan				
Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen				
12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	Persen	6,29	6,3
Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Persen	-	-
12.4.2.(a)	Jumlah Timbulan Limbah B3	Juta Ton	-	-
12.4.2.(b)	Proporsi limbah B3 yang ditangani/dikelola	Persen	-	-
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial engurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali				
12.5.1.(a)	Jumlah Timbulan sampah yang didaur ulang	Juta Ton	3,31	5,5
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.				
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan	unit	-	-
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	unit	-	-
Target 12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam				
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	unit	-	-
Target 12.b : Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampa pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal				
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	unit	30	33
Tujuan SDGs 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.				
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	a. korban meninggal	jiwa/100.000 orang	3	0,4
	b. korban hilang	jiwa/100.000 orang	0	0
	c. korban terluka	jiwa/100.000 orang	23	0,4
	d. korban mengungsi	jiwa/100.000 orang	12.885	412
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Ada/Tidak	Ada	Ada
Target 13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional				
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun		0	0
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase	24,9	14,8
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase	0,1	0,1
Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan				

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	kasus	23	6
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	kasus/100.000 penduduk	0	0
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.				
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis ekploitasi	orang/100.000 penduduk	3	0,2
Target 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.				
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Persen	-	-
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi			
	1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi	Persen	-	-
	2. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum non]litigasi	Persen	-	-
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B	Skor	B	B
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B	Skor	CC	CC
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Skor	89,22 (Zona Hijau)	81,43 (Zona Hijau)
Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan				
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD			
	c. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	Persen	12	12
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	10,34	4,88
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran				
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Persen	94,81	97
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persen	84	90,36
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Jumlah	69 (cukup Informatif)	69 (cukup Informatif)
Target 16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan				
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum Ham Internasional	Kebijakan	0	0
Tujuan SDGs 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
17.1.1.*	Total Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya			
	b. Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB	Persen	0,75	0,81
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan pajak terhadap PDB			
	b. Rasio penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah	Persen	0,59	0,53

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian	
			2021	2022
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik			
	b. Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh pendapatan asli daerah	Persen	42,37	49,5
Target 17.17 : Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.				
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Dokumen	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Proyek	0	1
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi	milyar Rp	0	0
Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang				
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada/Tidak	Ada	Ada

2.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Medan sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target dan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77.
Target dan Realisasi Capaian SPM Kota Medan Tahun 2020

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
Urusan Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	25.886	25.878	99,97
2	Pendidikan Dasar	83.034	83.034	100,00
3	Pendidikan Kesetaraan	6.313	6.303	99,84
Urusan Kesehatan				
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.959	34.658	91,30
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.234	34.285	94,62
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34.508	34.285	99,35
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	166.943	140.935	84,42
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	354.866	168.653	47,53
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.817.252	69.387	3,82
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	203.974	160.345	78,61
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	93.283	26.049	27,92
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV	73.111	24.470	33,47
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	457.947	26.176	5,72
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.609	8.902	21,92

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	3.264	2.281	69,88
Urusan Pekerjaan Umum				
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.460.858	1.817.199	73,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	564,619	30,784	5,45
Urusan Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180	173	96,11
Urusan Sosial				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1,452	1,452	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	280	280	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1,258	1,258	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	234	234	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12,046	12,046	100
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	20	20	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	500	500	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	500	500	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	21	10,5	50
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	350	345	98,57

Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja Tahun terhadap pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diperoleh hasilnya adalah

1. Untuk urusan pendidikan dari 25 indikator sebanyak 6 indikator atau 24.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 6 indikator atau 24.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 8.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, dan 11 indikator telah mencapai target yang ditentukan.
2. Untuk urusan kesehatan dari 12 indikator sebanyak 4 indikator atau 33.33 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi,

sebanyak 1 indikator atau 8.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 1 indikator atau 8.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, sebanyak 3 indikator atau 25.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah, sebanyak 3 indikator atau 25.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sangat.

3. Untuk urusan pekerjaan umum dari 6 indikator sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 2 indikator atau 33.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah, dan sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah.
4. Untuk urusan perumahan rakyat dari 4 indikator sebanyak 3 indikator atau 75.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, dan 1 indikator telah mencapai target yang ditentukan.
5. Untuk urusan sosial dari 3 indikator sebanyak 3 indikator atau 100.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat rendah.

2.8. Arahan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025

2.8.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Jangka Panjang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok pembangunan kota jangka panjang daerah sebagaiman telah diuraikan sebelumnya maka pembangunan kota jangka panjang dengan jangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap dimana setiap tahap berjangka waktu 5 tahun. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan seluruhnya terdiri dari 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan masing-masing RPJMD memiliki fokus dan skala prioritas yang sifatnya simultan dan berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana digambarkan oleh visi dan misi yang telah ditetapkan dan disepakati.

1. RPJMD ke-4 (2021-2026)

   Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2025, maka secara makro, tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah keempat (2021-2026). Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai

keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan kepada **perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius**. Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang yang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJPD ke-1,2 dan 3.

Pada RPJMD ke-4 ini diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan kehidupan beragama di masyarakat dengan tetap saling menghargai di antara para penganutnya, terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat kota. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Tidak dapat dimungkiri, meningkatnya kriminalitas medan berbagai gangguan sosial lainnya yang telah demikian meresahkan masyarakat tidak terlepas dari factor pengangguran yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menganggur tetapi juga meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang merasakannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kota yang dilandasi oleh religiositas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkar luar, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga kota.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah keempat ditekankan kepada misi perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius,

namun pada hakikatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD keempat. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD keempat ini diarahkan kepada:

a. Misi pertama "mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis" akan dicapai melalui:
   1) Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2021-2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 9,88% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp 48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%.
   2) Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sektor jasa perdagangan, keuangan dan industry dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.
   3) Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
   4) Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
   5) Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja,dan pendapatan, pendidikan

yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.

6) Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata dibawah satu digit.

7) Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Lapangan Merdeka – Belawan- Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.

8) Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, disamping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.

9) Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.

10) Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan manca negara.

b. Misi kedua “mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri” akan dicapai melalui:

1) Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara

berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan rata-rata lama sekolah14,84.

2) Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 77,89.
3) Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan di dukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,60 juta jiwa pada tahun 2025.
4) Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.
5) Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.
6) Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.
7) Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.
8) Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 19,73 Triliun tahun 2025.
9) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.

c. Misi ketiga “mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan” akan dicapai melalui:

1) Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan, ditunjang oleh

penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas, namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.

2) Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya disektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.
3) Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun *Outer-Outer Ringroad*. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi *monorail, fly over* ataupun *subway*) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya. Terpenuhinya pasokan energi tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang

telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.

4) Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan database dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.
5) Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan,keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain didunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.
6) Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.
7) Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumber daya air dan sumber daya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.
8) Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah – DPRD – Masyarakat – PerguruanTinggi – Press – Dunia Usaha.

9) Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.
10) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota (*stakeholder*).

d. Misi ke empat "mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan", akan dicapai melalui:
1) Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.
2) Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.
3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.
4) Penurunan tingkat kemiskinan relative dan hapusnya kemiskinan absolut.Kemiskinan relative kurang dari 4,24%.
5) Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.
6) Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
7) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.
8) Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modren dan seimbang antara lingkar luar dan inti kota.
9) Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan

menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor moderen.

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini, merupakan tahapan ke-4 atau tahapan terakhir dari periode RPJPD Tahun 2006-2025. Dengan demikian visi, misi dan tujuan pembangunan kota yang tertuang dalam RPJPD tersebut diharapkan akan dapat dicapai pada periode RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, perlu memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD pada masing-masing misi. Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimulai dari periode 5 tahun pemerintahan yaitu RPJMD ke-1 hingga periode RPJMD ke-4 atau periode terakhir dari RPJPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan secara umum diukur dari sejauh mana capaian yang diperoleh atas berbagai indikator yang dianggap sesuai dan relevan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pada RPJPD Kota Medan tahun 2006-2025 jenis indikator yang akan dicapai pada setiap tahapan periode RPJMD meliputi Indikator Makro Kesejahteraan Sosial (17 indikator) dan Indikator Makro Ekonomi (9 indikator).

Untuk kepentingan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD ini yang perlu dan relevan untuk diketahui adalah sudah sampai sejauh mana capaian indikator tersebut hingga periode tahapan RPJMD ke-3 yang berakhir tahun 2020. Capaian indikator yang terdiri dari Indikator Makro Kesejahteraan Sosial dan Indikator Makro Ekonomi sampai akhir tahapan periode RPJMD ke-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78.
Capaian Indikator dalam RPJMD Sampai Periode RPJMD-3 (2016-2021)

No	Uraian	Satuan	Realisasi				Target
			2010	2015	2020	2022	2025
A	**Indikator Makro Kesejahteraan Sosial**						
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2.200	2.337,00	2.472,00	2.494.512	2.607,67
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1,29	1,11	1,03	3,48	0,94
3	Luas Wilayah	km^2	265,10	265,10	265,10	265,10	265.1
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km	8.306,00	8.816,00	9.326,00	9.413	9.836,56
5	APS						
	a.7-12	persen	98,83	99,19	99,55	101,5	99,91

No	Uraian	Satuan	Realisasi				Target
			2010	2015	2020	2022	2025
	b.13-15	persen	95,52	96,74	97,95	102,96	99,17
	c.16-18	persen	81,78	86,00	90,23	95,94	94,46
	d.19-24	persen	38,72	44,00	49,29	NA*	54,56
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72,92	74,58	76,28	73,58	77,89
7	Angka Kelahiran Kasar	rata rata kelahiran PUS	2,09	1,89	1,69		1,48
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 penduduk	2,17	1,62	1,06		0,51
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14,38	12,09	9,80		7,52
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103,10	94,38	85,67		76,95
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10,76	9,70	8,65		7,6
12	TPAK	persen	56,91	58,14	61,87	69,53	65,6
13	TPT	persen	9,80	8,80	7,80	8,89	6,8
14	IPM	poin	76,81	78,36	79,90	81,76	81,44
15	Penduduk Miskin	persen	6,49	5,74	4,99	8,07	4,24
16	Gini Ratio	poin	0,26	0,25	0,24	0,399	0,22
17	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	11,84	12,84	13,84	11,50	14,84
B	**Indikator Makro Ekonomi**						
1	PDRB ADHB (Lapangan Usaha)	Rp Triliun	64,01	84,58	106,16	280,16	127.74
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8,13	8,72	9,30	4,71	9.88
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	28,61	36,19	42,94	112,31	48.99
4	Inflasi	Persen	5,56	5,03	4,50	6,1	3,96
5	Ekspor	Nilai FOB 000 US$	4.723,15	6.248,70	7.774,25	13.115,26	9.299,80
6	Impor	Nilai CIF 000 US$	1.563,17	2.081,53	2.599,89	6.202,25	3.118,25
7	Perkiraan Investasi	Rp Triliun	9,35	12,81	16,27	3,2	19,73
8	APBD	Rp Milyar	2.152,64	2.752,39	3.352,13	6.370,00	3.951,87
9	PAD	Rp Milyar	477,99	663,71	849,42	2.500	1.035,13

Catatan:* data pada usia tersebut masuk pada usia mahasiswa

Tabel 2.79.
Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2018-2022

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	**Aspek Kesejahteraan Rakyat**											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	PDRB ADHB	milyar (RP)	179.699,52	201.263,46	225.415,07	252.464,87	282.754,66	184.809,03	203.035,74	222.483,23	241.482,34	242.198,24
2	PDRB ADHK	milyar (RP)	51.674,83	55.085,38	58,721,77	62,697,57	66.729,00	132.062,86	139.739,34	148.007,14	156.780,59	153.669,83
3	PDRB PERKAPITA (Harga Berlaku)	juta (Rp)	76,3	84,39	93,68	103,58	115,42	83,45	90,9	98,26	105,92	106,23
4	PDRB PERKAPITA (Harga Konstan)	juta (Rp)	22,83	23,95	25,12	26,35	27,64	59,24	62,17	65,37	68,76	67,4
5	Laju inflasi	%	3,8	4,4	4,3	4,04	4	6,6	3,18	1	2,43	1,76
6	Persentase penduduk miskin	%	9,64	12	7,76	6,96	6,24	9,3	9,11	8,25	8,08	8,01
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	7	7,34	5,6	6,5	6,7	7,16	5,81	5,92	5,93	-1,98
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	78,1	81,51	85,08	88,79	92,67	42,15	44,93	41,91	41,36	41,86
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,95	99,36	99,96	99,97	99,98	Na	48,01	73,41	76,74	99,97
3	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	6	15	22	26	30	104	3	2	2	0
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	10	15	22	26	30	29	29	29	63	NA
II	**Aspek Pelayanan Umum**											
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib											
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	104,75	104,74	102,03	100,06	89,6
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98	100	100	100	100	87,52	87,52	95,33	95,71	76,28

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/MA/Paket C	%	82	83,7	85,3	87	88,2			61,53	61,43	61,79
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	0,1	0,09	0,07	0,06			0,68	0,35	0,09
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,62	0,59	0,55	0,52	0,49			1,52	0,68	0,39
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89,60
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100					
9	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100					
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	109,7	113,09	116,57	120,17	123,87	106,74	106,74	106,85	117,48	103,28
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/Mts	%	118,91	125,46	132,36	139,66	147,34					
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,98	96,46	99	99,62	100	89	89	89	89,62	95,6
13	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	79,05	79,08	52,94	
14	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100	90,32	89,8	88,24	92,8	
15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC TCA	%	100	100	100	100	100	75,7	90,5	90,5	98,43	
18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	56,66	56,66	60,72	6,72	
20	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100	93,99	93,1	93,1	93,1	
21	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Angkutan Darat	%	2,19	2,15	2,11	2,08	2,04	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
23	Kepemilikan KTP	%	86,65	92,4	97,47	99,35	100	84,94	87,57	31,35	97	96,34
24	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	per seribu	614	619	626	637	650	85,89	34,05	35,51	54,29	83,02
25	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	4,07	4,23	4,39	4,56	4,72	66,21	66,21	2,09	2,16	2,16
26	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun Ke Atas	%	89,9	90,05	90,2	90,35	90,5	3,87	3,87	100	100	NA
27	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	88,22	88,39	89,13	89,74	89,99	90,74	90,74	53,94	57,46	57,46
28	Prevelensi Peserta KB Aktif	%	76,12	78	79,92	81,9	83,92	76,38	76,01	67,23	64,8	69,68
29	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di Setiap Desa/Kelurahan	%	103,2	101,57	99,97	98,39	96,84	104,86	104,86	110,22	114,39	100
30	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	21,94	21,82	21,7	21,5	21,45	1.51	1.56	1.50	1.16	1.08
31	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	120	140	160	180	200	104	104	92	92	NA
32	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4,95	5,09	5,23	5,38	5,53					
33	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	35,19	38,22	NA
34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,82	73,51	74,4	77,29	80	60,28	60,05	64,35	65,99	64,89
35	Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	30,03	33,14	38,91	42,1	45	59,24	59,34	48,19	63,17	34,79

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
36	Koperasi Aktif	%	30,79	33,82	37,14	40,8	44,81	28,73	62,18	30,83	22,82	22,82
37	Usaha Mikro dan Kecil	%	86	83,59	81,25	78,97	76,75	99,67	43,04	96,46	96,64	96,64
38	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Di Lestarikan	%	75,41	77,49	81,49	83,75	86,61	42	42	42	58	32,07
39	Kunjungan Wisata	orang	258.813	274.929	292.049	310.235	329.235	136681	610749	186255	173718	
40	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	% per jumlah penduduk	5,74	6,11	6,59	7,16	7,8	3,09	3,07	3,03	3,04	2,72
41	Gelanggang /Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	% per jumlah penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0034
42	Lapangan Olahraga	Per 10.000 penduduk	127	129	131	133	135	5,84	0,1	0,42	0,42	0,21
43	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	8	8	8	8	8	10	10	11	11	7
44	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	5	5	5	5	5	7	7	0	1	1
45	Sistem Informasi	SIM	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
46	Ketersediaan Pangan Utama	kg	110.374,11	110.749,06	111.125,29	111.502,79	111.881,58		103,94	146,42	154,87	130,81
47	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100					
48	Posyandu	%	100	100	100	100	100					
49	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	97	100,92	104,99	109,23	113,64	100	16,42	35,18	35,18	28,35
50	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	%	9,77	23,85	58,23	142,17	347,18	11	18	5	3	1
51	Luas Lahan Bersertifikat	%	37,72	35,57	33,55	31,63	29,83	64,08	64,08	64,08	64,08	64,08
52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	85,04	88,19	91,45	94,84	98,35	82	0	0	0	0
53	Penyelesaian Ijin Lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	Koleksi Buku yang Tersedia di	%	32,71	32,11	31,51	30,98	30,35	34,22	34,41	23,54	24,81	25,25

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Perpustakaan Daerah											
55	Pengunjung Perpustakaan	%	3,08	2,54	2,09	1,72	1,41	3,75	2,72	3,26	2,78	0,75
56	Produksi Perikanan	%	88,73	89,76	90,81	91,88	92,88	146,24	146,24	82,95	131,47	132,558
	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan											
1	Konsumsi Ikan	%	76,51	78,22	79,97	81,76	83,59	114,68	100	100	100,23	NA
2	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	3,4	2,74	2,2	1,77	1,43	4,26	4,4	4,6	5,09	6,22
3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	0,64	0,38	0,23	0,14	0,08	1,06	0,81	1,26	1,24	NA
4	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12	12,14	12,28	12,43	12,57	27719,51	30133,93	32497,42	34414,46	34186,37
5	Pertumbuhan Industri	%	12,21	14,91	18,22	22,26	27,2	15,34	29,06	7,24	31,53	
6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	26,95	26,97	26,98	26,99	27	24,77	24,77	25,11	24,96	27
7	Ekspor Bersih Perdagangan (milyar US$)	milyar US$	4.081,32	4.131,24	4.181,78	4.232,93	4.284,70	2,93	3,84	4,59	12,69	3,15
III	**Aspek Daya Saing**											
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	Konsumsi Per Kapita	kg	655,67	658,06	661,35	664,65	667,98					
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL		100	100	100	100	100					
2	Penegakkan Hukum Lingkungan		100	100	100	100	100	100	6,89	6,89	100	36
3	Penanganan Sampah		100	100	100	100	100	91,29	90,33	32,56	77,8	85
4	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk		2,51	2,59	2,68	2,77	2,86	2,43	2,43	0,025	0,05	0,39
5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi		97,34	100	100	100	100	93,5	97,59	98	99	98

No	IKK	Satuan	Target					Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Baik											
6	Pemeliharaan Jalan Kota				100	100	100					
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		66,23	64,94	63,68	62,44	61,22	67,55	70,29	83,82	NA	87
8	Lingkungan Permukiman Kumuh		0,61	0,5	0,41	0,34	0,28					
9	Rumah Layak Huni		100	100	100	100	100	97,29	99,79	83,13	93,75	93,75
10	Persentase Rumah Bersanitasi		84,4	86,04	87,71	89,4	91,14	82		89	89,86	90,72
11	Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah BerHPL/HGB		30	30	30	30	30	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78
	Fokus Iklim Investasi											
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah	milyar rupiah	82,03	82,54	83,68	84,52	85,11	4305,58	3351,05	636,71	536,67	3874,96
	Fokus Sumber Daya Manusia											
1	IPM		79,88	80,31	80,74	81,17	81,6	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98

Tabel 2.80.
Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 Periode Pelaksanaan Tahun 2021-2022

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
I	**Misi Kesatu : Medan Berkah**										
1.1	**Meningkatkan Pemerataan Ekonomi dalam Menjalankan Kehidupan Ekonomi yang Berkah**		Gini Rasio (Indeks)	0.350	0.308	0.326	0.322	0.402	0.399	Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
1.1.1	Meningkatkan Pendapatan		Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	67.40	71.50	68.20	68.50	64.07	66.19	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	0	100	0	0	0	0	-	-
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan (%)	48	60	48	50	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Lembaga Hubungan Industrial di Perusahaan (%)	10	10	10	10	7.6	7.6	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
			Persentase Perselisihan/ Konflik yang Diselesaikan (%)	88	95	88	90	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi KSP/USP yang Terfasilitasi Kepemilikan Ijin Usaha (koperasi)	0	260	0	52	36	36	-	Sedang/ Belum Tercapai
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang Bersertifikasi-IKK (orang)	0	1720	140	316	395	395	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
1.1.2	Menurunnya Penduduk Miskin		Angka Kemiskinan (%)	8.01	7.34	7.98	7.82	8.34	8.07	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial (%)	0	100	0	100	100	100	-	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perlindungan	Persentase Perlindungan dan	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/	Sangat Tinggi/

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		dan Jaminan Sosial	Jaminan Sosial (%)							Tercapai	Tercapai
		Program Penanganan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana (%)	0	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
II	**Misi Kedua : Medan Maju**										
2.1	**Meningkatkan Kualitas Masyarakat Kota Medan**		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	80.98	83.75	81.61	82.04	81.21	81.76	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan (Indeks)	11.39	11.44	11.40	11.41	11.42	11.50	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Ketersediaan Pengelolaan PAUD (%)	79.57	86.89	80.65	82.68	52	52	Rendah/ Belum Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
			Persentase Ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan (%)	0	88.56	84.56	85.38	30	30	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
			Persentase Ketersediaan Pengelolaan SD dan SMP (%)	0.09	0.04	0.08	0.08	45	45	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Ketersediaan Sekolah Kondisi Baik (%)	0	87.13	84.52	85.55	80.6	80.6	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum (%)	0	79.56	0	75.94	0	0	-	-
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Ketersediaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (%)	0	85.87	78.56	79.56	81,88	79,98	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan (%)	0.88	29.38	10.81	16.79	71.25	71.25	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	18.802	22.447	19.366	19.946	20.790	20.790	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Koleksi Perpustakaan (exemplar)	91.702	103.673	93.673	95.673	72.364	72.364	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
			Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis & Penilai yang Memiliki Sertifikat (orang)	4	10	8	8	5	5	Rendah Tinggi/ Belum Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan	Persentase Pelestraian Koleksi Nasional & Naskah Kuno (%)	0.20	1.40	0.40	0.60	1.09	1.09	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Naskah Kuno									
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan (Indeks)	73.14	75.70	74.00	74.10	73.23	73.58	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Terlaksananya Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (%)	72	85	72	75	0	0	-	-
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar (%)	96	100	96	97	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (%)	96	100	96	100	98.4	98.4	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	4.34	26.09	8.69	13.04	17.4	17.4	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor)	92	90.5	88	89	87	87	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
			Indeks Ketahanan Pangan (skor)	83.12	86	83.50	84	64	64	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani (%)	4.76	24	9.5	14	19.5	19.5	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keama nan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji (%)	92	98	93	94	65	94	Tinggi/ Bleum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk (%)	2.7	33.3	8.3	11.1	11.8	11.8	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan	Persentase Pembinaan Keluarga	69.68	72.68	70.18	70.68	98.76	98.76	Sangat Tinggi/	Sangat Tinggi/

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Keluarga Berencana (KB)	Berencana /KB (%)							Tercapai	Tercapai
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/KS (%)	4.75	100	4.75	4.75	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
2.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	14,89	15,627	15.035	15.181	14.999	15,503	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (%)	100	100	100	100	93.07	93.07	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Inflasi Kota Medan (%)	3.34	3.1	3.34	3.25	1.70	6.10	Sangat Tinggi/ Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
III	**Misi Ketiga : Medan Bersih**										
3.1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Smart, Bersih dan Akuntabel**		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	BB	CC	B	CC	CC	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
3.1.1	Meningkatnya Layanan Publik yang Lebih Berkualitas dan Terintegrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	N.A	A	B	B	CC	B	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Indeks Transformasi Digital (Indeks)	N.A	0.95	0.91	0.92	0.80	0.83	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1	5	1	2	2	2	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Prasarana & Sarana Kantor yang Tersedia & Berfungsi (%)	0	96	91	92	92	92	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Cakupan Peningkatan	100	100	100	100	75	75	Tinggi/ Belum	Tinggi/ Belum

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
			Penyelenggaraan Pemerintah & Pelayanan Publik (%)							Tercapai	Tercapai
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan & Penanggulangan Bahaya Kebakaran (orang)	0	420	0	420	420	420	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Meningkatnya Waktu Tanggap Kebakaran (menit)	15	15	15	15	15	15	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (skor)	63.89	64.13	63.93	63.97	0	0	-	-
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pengembangan Kegiatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100	100	100	100	81.56	81.56	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah (%)	100	100	100	100	81.61	81.61	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Capaian Indikator Pemenuhan Hak Anak (%)	100	100	100	100	86.64	86.64	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pendaftaran Penduduk : KTP, KK, KIA (%)	100	100	100	100	98	98	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil : Akte Kelahiran, Akte Perkawinan (%)	76.25	90	76.25	78.25	78.25	78.25	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengeloaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD (%)	77.96	82.15	79.83	82.15	16.29	16.29	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang Dimanfaatkan Pegawai ASN Instansi (Aplikasi)	4	4	4	4	4	4	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Pelayanan Kepegawaian yang Dilaksanakan sesuai SOP (buah)	0	12	10	12	22	22	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Pegawai ASN Instansi yang Ditingkatkan Kompetensinya (orang)	0	615	621	588	1.144	1.144	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai ASN Instansi yang Ditingkatkan Kompetensinya (orang)	0	980	703	828	2.106	2.106	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Cakupan Penye lenggaraan Peme rintahan & Pelaya nan Publik (%)	0	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pember dayaan Masyara kat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pember dayaan Masyara kat Kelurahan (%)	0	100	75	80	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tersedia Secara Lengkap & Memadai (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
3. 1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah		Opini BPK (Kategori)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD dan P- APBD yang Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah tehadap PAD (%)	0	100	100	100	0	46.7	-	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Perentase Pelak sanaan Penyeleng garaan Pengawa san Internal (%)	-	100	100	100	90	90	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
			Perentase Pening katan	-	100	100	100	80	80	Tinggi/ Belum	Tinggi/ Belum

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
			Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Tujuan Tertentu (%)							Tercapai	Tercapai
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi (%)	-	100	100	100	88	88	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
			Nilai SAKIP (Kategori)	CC	A	B	BB	CC	B	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Arsip	Persentae Pengelolaan Arsip (%)	3.89	25.94	9.40	12.97	76.39	76.39	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Dokumen/Arsip yang Dikelola	36.548	270.523	154.494	160.673	242.686	242.686	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	6.7	35	10	15	36.09	36.09	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Ketersediaan Perijinan Penggunaan Arsip (%)	0	50	0	10	73.53	73.53	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Administrasi Umum	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	CC	BB	CC	B	CC	CC	Sangat Tinggi/ Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Pemerintah, Kewilayahan & Otonomi Daerah (%)	0	0	100	0	0	0	-	-
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan yang Dilaksanakan (%)	0	100	17	5 0	50	50	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab./Kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60	81	62	66	66	66	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan & Anggota DPRD Kota Medan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2.668 (C)	3.07 (B)	2.70 (C)	2.74 (C)	2.74	2.74	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perencanaan,	Nilai SAKIP Komponen	19.09	27	22	23	20.47	20.47	Sangat Tinggi/	Sangat Tinggi/

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Kinerja							Belum Tercapai	Belum Tercapai
IV	**Misi Keempat : Medan Membangun**										
4.1	**Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota yang Layak Huni**		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)	96.9	99.4	96.9	97.9	98.09	98.41	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
4.1.1	Meningkatknya Luas Kawasan Permukiman Layak Huni		Luas Kawasan Permukiman Layak Huni (Ha)	25,690.20	26,349.08	25,690.20	25,857.56	26,003.40	27.751,97	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan (%)	50	75	50	55	55	55	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Sistem Jaringan Drainase yang Terkelola dengan Baik (%)	90	100	92	95	69.11	69.11	Rendah/ BelumTercapai	Rendah/ Belum Tercapai
		Program Penyelengaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota (%)	89	100	91	95	51.21	51.21	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
			Persentase Pengembangan Kapasitas Jalan (%)	0	10.04	0.02	5.25	0	5.25	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penangulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	0	100	100	100	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang Terselenggara Secara Efektif (%)	50	100	50	60	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	24.8	25.4	24.9	25	25	25	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28.26	31.61	28.26	28.93	0	0	Sangat	Sangat Rendah/

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Keanekaragaman Hayati (Kehati)								Rendah/ Belum Tercapi	Belum Tercapai
		Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap Ketentuan yang Ditetapkan dalam Perizinan Berusa ha/Persetu juan Pemerintah Terkait Persetuju an Lingkungan, PUU & PPLH (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	50	100	50	60	60	60	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Terkelola (%)	80	70	76	75	70	75	Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Kebijakan/Regula si/ Strategi Pengelolaan Persampahan yang Tersedia (%)	0	100	0	80	80	80	-	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Lokasi Ruas Jalan yang Sudah Terpasang JPU dalam Kondisi Baik (%)	75	80	0	76	76	76	-	Sangat Tinggi/ Tercapai
4.2	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57.60	58.50	57.60	57.82	56.03	61.98	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
4.2.1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH (%)	10	14.5	12	12.5	6.73	6.73	Rendah/ Belum Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan Baik (%)	70	87	70	75	75	75	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan (%)	85	100	85	90	90	90	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
V	**Misi Kelima : Medan Kondusif**										
5.1	**Meningkatkan Rasa Nyaman dan Kondusif**		Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum (%)	NA	80	70	70	-20	41.91	Sangat Tinggi/ Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
5.1.1	Meningkatnya Kenyamanan dan Ketertiban Kota Medan yang Kondusif Berlandaskan Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Gangguan Ketertiban Umum (Kasus)	29,146	16	26	23	35.000	20.330	Rendah/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penegakan Perda & Perkada Kota Medan (%)	95	100	100	100	91.71	91.71	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
			Capaian Target Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	95	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	100	100	100	100	50.35	50.35	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	100	100	100	100	49.12	49.12	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (%)	75	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Target Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	75	100	75	80	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Meningkatnya Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Masyarakat yang Sadar & Paham Pancasila dalam Mewujudkan Medan Bersih Narkoba (Kel.)	20	17	20	20	20	20	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian Tingkat Kesadaran & Partisipasi Masyarakat Kota Medan Sebagai Warga Negara (%)	50	80	50	55	72.3	72.3	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Masyarakat & Organisasi Kemasyarakatan dalam Sinergitas Medan Bersih Narkoba (Kelurahan)	20	17	20	20	16	16	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Masyarakat yang Sadar & Peduli Organisasi Medan Bersih Narkoba (Kelurahan)	20	17	20	20	20	20	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik di Kota Medan yang Ditindaklanjuti (%)	70	90	70	75	72.35	72.35	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
VI	**Misi Keenam : Medan Inovatif**										
6.1	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Dukungan Inovasi**		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	NA	-1.98	3.50	6.00	2.62	4.71	Sangat Tinggi/ Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
6.1.1	Meningkatnya		Nilai Investasi PMDN (Juta Rp)	4.127.638.60	5.268.029.04	4.334.0	4.550.0	5.121	3.540	Sangat Tinggi/	Tinggi/ Belum

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Realisasi Investasi					20.53	21.56	.015.3	.373	Tercapai	Tercapai
		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih (%)	14	20	14	15	13.2	13.2	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif (%)	5	30	5	10	20	20	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat (%)	0	12	2	4	8	8	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mandiri (koperasi)	0	1	0	1	0	1	-	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro (pelaku usaha)	0	1.385	575	1.385	240	420	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pengembangan UMKM	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Berkembang (pelaku usaha)	0	1.385	575	1.385	37	71	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi (%)	0	5	0	5	5	5	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi di Kota Medan (Rp juta)	4.334.020,53	5.531.430,49	4.334.020,53	4.550.721,56	5.121.015	3.540.323	Sangat Tinggi/ Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
			Nilai Investasi Asing di Kota Medan (US $)	42,271.43	53,950.24	42,271.43	44,385.00	41,136	41.136	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masuyarakat (IKM)	82	87	82	83	83	83	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	92.68	92.68	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi (Aplikasi)	1	1	1	1	1	1	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)	0	15	10	8	12	12	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	0	40	12	10	5.97	5.97	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan Produksi Perika nan Tangkap (%)	2	2	2	2	0.86	0.86	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2	2	2	2	0.93	0.93	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	1	1.2	1	1.2	0.71	1.12	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	1	2	1	2	1	1.86	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	80.5	80.5	80.5	80.5	48.81	67.35	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Perijinan Usaha Pertanian	Persentase Pertumbuhan Izin Usaha Tani (%)	2	2	2	2	0.03	0.98	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)	2	2	2	2	0.72	1.55	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Palaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat Perbelanjaan dan (IUMT/IUTJ/SIUP)	70	90	70	75	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ BelumTercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
			TokoSwalayan (%)								
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (buah)	60	80	60	65	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ BelumTercapai
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Medan (US$)	3,153,000	4,589,000	3,153,000	3,468,300	0	0	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ BelumTercapai
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan (%)	24	26	24	24.5	26.02	26.25	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil & Menegah (%)	3.73	5.61	4.50	3.73	5.75	5.75	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi terhadap Regulasi (%)	30	81	70	72	62.59	62.59	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang Terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional (%)	12.32	23	0	15	15	15	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Nilai Investasi PMA (US$)	40,258.50	51,381.18	42,271.43	44,385.00	57,196.30	41.136,00	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
6.1.2	Meningkatnya Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Poin)	57.14	-	57.14	62.5	27.98	44.04	Rendah/ Belum Tercapai	Sedang/ Belum Tercapai
		Program Penelitian & Pengembangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	83	0	77	77	77	-	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang Dilakukan (%)	1	1	1	1	1	1	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
VII	**Misi Ketujuh : Medan Beridentitas**										
7.1	**Menciptakan Kota Medan Sebagai Kota Pariwisata yang Beridentitas dan Berbudaya**		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	2.72	3.23	2.86	3.00	2.57	2.66	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai
7.1.1	Meningkatnya Pariwisata yang		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi oleh Perda/ Perwal	NA	16.000	122	132	93	93	Tinggi/ Belum Tercapai	Tinggi/ Belum Tercapai

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Kategori Tercapai/ Tidak Tercapai	
						2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Berbasis Budaya Kota Medan		(unit)								
		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pengembangan Kebudayaan	0	15	5	10	11	10	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisonal yang Terjamah (%)	0	15	5	10	11	10	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah (%)	0	15	3	5	6	5	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola & Dilestarikan (%)	0	33.97	32.07	32.54	33.49	33.49	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Permuseuman yang Dikelola (%)	0	15	3	5	5	5	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai
			Jumlah Kawasan Cagar Budaya yg Direvitalisasi (kawasan)	NA	8	3	4	3	2	Sangat Tinggi/ Tercapai	Rendah/ Belum Tercapai
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif (kegiatan)	0	4	4	4	1	1	Sangat Rendah/ Belum Tercapai	Sangat Rendah/ Belum Tercapai
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB (%)	2.73	2.80	2.74	2.75	2.57	2.66	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai	Sangat Tinggi/ Belum Tercapai
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wiisatawan (orang)	236.025	304.361	243.106	250.399	256.834	263.435	Sangat Tinggi/ Tercapai	Sangat Tinggi/ Tercapai

2.8.2. Evaluasi RPJMD Kota Medan Sampai Tahun 2022

Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 juga dilakukan berkaitan dengan substansi yang dirumuskan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan tujuan memberikan masukan atau rekomendasi dalam rangka perbaikan atau revisi terhadap RPJMD Tahun 2021-2026. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 342 menyebutkan bahwa secara substansi perubahan atau revisi atas RPJMD Tahun 2021-2026, dapat dilakukan apabila telah terjadi perubahan yang mendasar dan sangat berpengaruh terhadap substansi yang dirumuskan dalam RPJMD dimaksud, berupa faktor-faktor eksternal maupun internal dalam skala nasional maupun lokal. Perubahan yang mendasar tersebut mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Mengacu kepada konteks dimaksud maka perubahan atau revisi terhadap RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional maupun krisis ekonomi yaitu meliputi:

- Kemunculan Pandemi Covid-19; Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 dari Wuhan Tiongkok dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia menyebabkan negara-negara di dunia melakukan berbagai perubahan kebijakan secara nasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut terdampak telah menempuh dan menerapkan beberapa kebijakan skala nasional antara lain:
  - Menetapkan Wabah Covid-19 sebagai Pandemi Nasional
  - Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
  - Memberlakukan Work from Home (WFH)
  - Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

  Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan, termasuk Kota Medan. Kondisi ini berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi daerah Kota Medan berkaitan dengan prediksi dan penetapan atas indikator ekonomi makro maupun indikator kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan Kota Medan, seperti dilakukannya refocusing anggaran dalam rangka

penanggulangan pandemic covid-19 dan menetapkan pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai salah satu program prioritas.

- Terjadinya Resesi atau Perlambatan Ekonomi Dunia

  Sejak kemunculan pandemi covid-19, secara umum dapat dinyatakan bahwa kondisi ekonomi dunia juga sangat terguncang. Kemudian terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina memunculkan persoalan baru berupa krisis energi dan pangan. Akumulasi dan saling keterkaitan antara persoalan dimaksud pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia bahkan dapat menyebabkan resesi. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berusaha merespon kondisi ini dengan menerapkan berbagai kebijakan yang terutama diarahkan untuk meredam laju perlambatan ekonomi. Berberapa kebijakan yang diambil antara lain berusaha mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dengan memberikan berbagai bantuan berupa jenis-jenis subsidi sesuai sasaran yang ditetapkan, bantuan permodalan bagi UMKM dan keringanan atau pengurangan pajak bagi UMKM dan pengusaha menengah untuk jenis usaha/kegiatan yang sangat terdampak.

- Meningkatnya Kemiskinan Ekstrim

  Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, Kota Medan. Dikhawatirkan bahkan keadaan ini akan mendorong munculnya penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat terjadi PHK secara masif. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Medan menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kondisi yang terjadi dengan melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sejak tahun 2021 yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

- Perubahan Kebijakan Nasional pada Bidang Tertentu

  Perubahan kebijakan dalam hal ini yaitu munculnya berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan di tingkat nasional berkaitan dengan aspek

perencanaan pembangunan dan keuangan yang turut berpengaruh terhadap kondisi daerah Setelah RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Medan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021, muncul beberapa kebijakan nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kebijakan nasional tersebut, di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang: Peraturan ini berimplikasi pada upaya penciptaan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Berkaitan dengan hal ini sebaiknya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terakomodir adanya indikator atau indeks seperti indeks kemudahan berbisnis (E*asy of Doing Business Index*).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penyelenggaraan KLA lebih lanjut dan rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan Kebijakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Perda dimaksud harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional KLA yang merupakan penjabaran dari Kebijakan KLA Nasional. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024. Secara spesifik dalam RPJMD Tahun 2021-2026 belum mengemukakan tentang Penyelenggaraan KLA

berupa Rencana Aksi Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan diatur melalui Perda. Diharapkan hal ini dapat diakomodir dalam revisi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini berimplikasi pada penetapan kebijakan dan langkah serta implementasi kegiatan sesuai komitmen Pemerintah berupa Pengurangan Emisi GRK 29% (dua puluh sembilan persen) sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) pada tahun 2O3O dibandingkan dengan *Baseline* Emisi GRK. Hal ini belum terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebaiknya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah terakomodir adanya indikator tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* /SDGs). Peraturan ini telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:
  - Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
  - Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
  - Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
  - Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

  Berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran TPB Nasional Tahun 2024 sesuai dengan Pasal 8 Perpres 111/2022, pemerintah membentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah Nasional, Tim

Pelaksana Nasional, Kelompok Kerja Nasional, dan Tim Pakar. Diharapkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Nasional tersebut maka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Secara umum sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024 telah terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain berkaitan dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan dan ketimpangan pendapatan.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk: (a) menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun; (b) menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (c) mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi

kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Hal ini telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan adanya indikator tentang angka kemiskinan dan program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun demikian tidak menyebut secara spesifik tentang kemiskinan ekstrim yang dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, ditetapkan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini belum secara eksplisit terakomodir dalam RPJMD Tahun 2021-2026, namun demikian secara khusus disusun Laporan Laporan Pelaksanaan Penerapan SPM setiap tahun sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun Peraturan Daerah Kota Medan yang berpengaruh terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 di antaranya:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Peraturan ini berimplikasi pada penataan ruang dimana penataan ruang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja dan ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Hal ini telah dikemukakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan adanya indicator terkait proporsi ruang terbuka hijau (RTH) terhadap luas wilayah.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan ini berimplikasi pada perubahan struktur pemerintahan Kota Medan yakni dari semula 25 dinas dan 5 badan menjadi 19 dinas dan 7 badan. Berkaitan dengan hal ini maka dalam RPJMD Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian

nomenklatur Perangkat Daerah termasuk perubahan tupoksi masingmasing sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kapasitasnya akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dikuasai daerah yang dapat diukur dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Uraian tentang pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah atau kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam APBD, analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan umum daerah. Untuk itu diperlukan capaian kinerja keuangan daerah minimal 5 (lima) tahun sebelumnya.

Untuk memahami kemampuan keuangan daerah, perlu melihat gambaran keseluruhan keuangan daerah melalui keadaan kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalunya maupun kebijakannya sebagai dasar pengelolaan daerah tersebut. Berdasarkan kondisi kinerja keuangan tersebut, dimungkinkan untuk memprediksi besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kerangka keuangan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada periode yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu tersebut akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu merupakan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas target dan realisasi pendapatan daerah, target dan realisasi belanja daerah serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan

APBD masa lalu Pemerintah Kota Medan sehingga dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta yang akan tertuang dalam RPJMD Kota Medan untuk periode 5 tahun ke depan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun. Tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan.

Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah Kota Medan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.

3.1.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang

merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Medan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan

Tahun	Target Pendapatan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	5.239	-	4.254	-	81,19
2019	6.257	19,43	5.519	29,74	88,20
2020	4.758	-23,96	4.122	-25,32	86,63
2021	5.654	18,84	5.023	21,87	88,84
2022	6.996	23,74	5.449	8,48	77,89
Rata-Rata		**7,50**	**-**	**6,39**	**84,55**

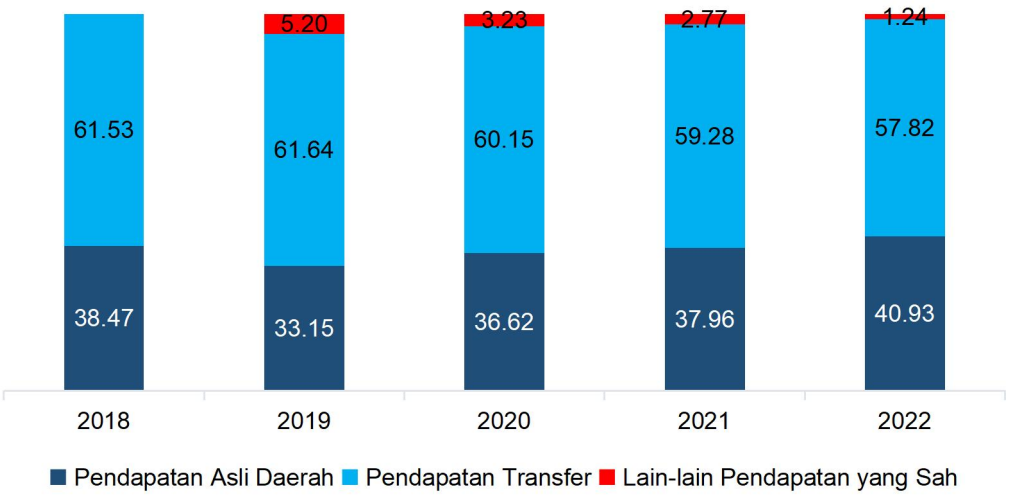
Sumber: BPKAD Kota Medan

Berdasarkan Tabel 3.1, kinerja pendapatan Kota Medan secara umum mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Realisasi pendapatan daerah Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan Kota Medan tercatat sebesar Rp. 4.254 milyar dan meningkat menjadi Rp. 5.449 milyar pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 6,39% selama periode 2018-2022. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat pendapatan daerah di Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 23,96% dari tahun sebelumnya dengan pencapaian pendapatan yang menurun menjadi Rp 4.122 milyar pada tahun 2020. Meskipun demikian kondisi ini sudah mencapai revitalisasi dan kembali menembus angka Rp 5.449 milyar pada tahun 2022. Titik puncak tertinggi realisasi pendapatan daerah Kota Medan adalah tahun 2019 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 5.519 milyar.

Sebagai catatan pada kinerja pendapatan daerah, tingkat realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah yang baik masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, dimana tingkat pencapaian realisasi pendapatan daerah selama tahun periode 2018-2022 jika dibandingkan dengan target pendapatan yang telah direncanakan secara rata-rata hanya mencapai 84,55%. Tingkat realisasi pendapatan daerah Kota Medan dibandingkan dengan targetnya

yang tertinggi adalah pada tahun 2021 dengan pencapaian 88,84%. Sayangnya tingkat realisasi pendapatan daerah ini menurun menjadi 78,89% pada tahun 2022.

Peninjauan realisasi pendapatan daerah Kota Medan dilakukan dengan mengevaluasi struktur pendapatan Kota Medan. Selama periode 2018-2022, pendapatan Kota Medan masih didominasi oleh sumber dana pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 60,08%. Sedangkan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Medan memiliki sebaran antara 33,15 - 40,93% dengan rata-rata sebesar 37,43%. Di sisi lain proporsi dari lain-lain pendapatan yang sah tidak ditemukan pada tahun 2018 namun saat ini tumbuh mencapai proporsi 1,24% dengan rata-rata proporsi selama lima tahun sebesar 2,49%. Kondisi yang ada ini menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan Kota Medan dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan daerah sudah cukup baik namun masih memiliki ketergantungan dari pendapatan di luar Kota Medan. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dapat diturunkan menuju Kota Medan yang lebih mandiri. Gambar 3.1 memberikan rincian proposi pendapatan daerah Kota Medan selama periode 2018-2022.

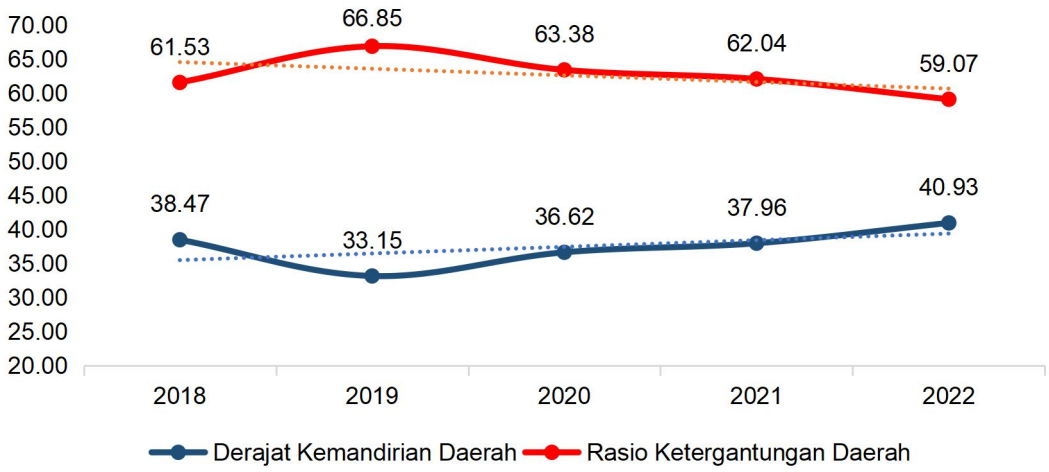


Gambar 3.1.
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2018-2022

Dalam evaluasi lain, untuk melihat kemampuan otonomi suatu daerah

dalam menyelenggarakan pemerintahan, perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan daerah. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain melalui rasio ketergantungan daerah. Analisis derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah merupakan dua rasio yang memiliki makna saling berkebalikan. Derajat kemandirian daerah berpedoman kepada kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dari keseluruhan pendapatan daerah, dalam hal ini Kota Medan. Sebaliknya, rasio ketergantungan daerah berdasarkan kepada nilai pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan yang mampu dihasilkan Kota Medan dalam kurun waktu satu tahun. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah rendah.



Gambar 3.2.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022

Tingkat derajat kemandirian Kota Medan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berada pada rentang 33,15 sampai dengan 40,85% dengan nilai rata-rata derajat kemandirian sebesar 38,52%. Tingkat derajat kemandirian ini menunjukkan kemampuan yang baik bagi Kota Medan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan Kota Medan. Tingkat 38,52% secara rata-rata menunjukkan bahwa secara umum belanja pembangunan Kota Medan bersumber dari 38,52% pendapatan asli daerah seperti retribusi dan pajak terhadap aset dan usaha yang ada di Kota Medan. Evaluasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Medan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan. Pada awal periode tahun 2018 tingkat kemandirian Kota Medan adalah 38,47% yang sempat turun menjadi 33,15% namun kembali meningkat hingga saat ini pada tahun 2022 mencapai 40,85%. Meskipun terdapat volatilitas yang cukup tinggi, namun secara umum terdapat kecenderungan peningkatan kemandirian Kota Medan dalam melakukan belanja dan pembiayaan pembangunan Kota Medan.

Gambar tersebut juga memberikan informasi terkait besarnya rasio ketergantungan Kota Medan. Sebelumnya dijelaskan bahwa rasio ini selalu berlawanan dengan pergerakan derajat kemandirian Kota Medan. Terlihat bahwa selama periode 2018-2022 terdapat kecenderungan penurunan tingkat ketergantungan Kota Medan dengan rentang nilai rasio ketergantungan antara 59,15% sampai dengan 66,85% dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 61,75%. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan Kota Medan sebesar 61,53% dan mengalami peningkatan menjadi 66,85% pada tahun 2019 dan merupakan rasio ketergantungan tertinggi selama periode 2018-2022. Pada akhir periode evaluasi, tahun 2022 rasio ketergantungan mengalami penurunan ke tingkat 59,15%. Kecenderungan garis tren menurun mengindikasikan bahwa selama periode tersebut tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kota Medan terhadap bantuan dari luar Kota Medan semakin menurun. Meskipun secara umum tingkat ketergantungan Kota

Medan masih di atas 50%, tetapi hasil evaluasi kondisi keuangan Kota Medan tahun 2018-2022 menunjukkan tingkat kemandirian yang cukup baik. Pembangunan di Kota Medan sampai pada tingkatan tertentu tidak bergantung kepada pihak eksternal melainkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daera (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2022 (Rp milyar)

Tahun	Target PAD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi PAD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	2.113	-	1.636	-	86,60
2019	2.313	9,47	1.830	11,82	79,11
2020	1.814	-21,57	1.509	-17,50	83,22
2021	2.139	17,94	1.907	26,30	89,12
2022	3.051	42,60	2.231	17,00	73,12
Rata-Rata		**9,62**	**-**	**8,05**	**82,23**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1.636 Milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 2.231 Milyar pada tahun 2022. Secara rata-rata terdapat pertumbuhan PAD 8,05% setiap tahunnya. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Kota

Medan mengakibatkan realiasi PAD di Kota Medan mengalami penurunan sampai 17,50% pada tahun 2020 menjadi Rp 1.509. Angka ini merupakan realiasasi perolehan PAD yang paling rendah selama kurun waktu 5 tahun tersebut. Meskipun demikian, PAD kota Medan berhasil pulih dan mengalami peningkatan sehingga berada di atas nilai realisasi PAD pada awal periode 2018.

Hasil evaluasi antara target dan realisasi PAD di Kota Medan periode 2018-2022 menunjukkan bahwa seluruh realisasi PAD yang terjadi berada di bawah target yang sebelumnya telah ditetapkan. Tingkat pencapaian realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan berkisar antara 73,12% sampai dengan 89,2% dengan nilai rata-rata pencapaian selama lima tahun sebesar 82,23%. Pencapaian kinerja PAD yang paling rendah terjadi pada tahun 2022 dengan kinerja sebesar 73,12% dari target PAD yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari pertumbuhan target PAD tahun 2022 yang mencapai 42,60%, pencapaian kinerja realisasi PAD menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya meskipun dari segi nilai rupiah PAD tersebut mengalami peningkatan sampai degnan 17% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan antara pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan PAD di Kota Medan dengan tingkat rata-rata sebesar 8,05% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6,44%. Kondisi ini menjadikan sumber pendapatan PAD ini memiliki posisi yang signifikan bagi struktur pendapatan daerah di Kota Medan, terlebih pertumbuhan PAD di Kota Medan tahun 2022 mencapai 17,00% yang berada di atas pertumbuhan pendapatan tahun tersebut sebesar 8,17%. Tingginya laju pertumbuhan PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa untuk tahun-tahun mendatang, peranan PAD dalam membentuk struktur pendapatan daerah di Kota Medan akan menjadi semakin signifikan. Hal ini merupakan sebuah awal yang baik mengingat kuatnya komposisi PAD menandakan bahwa sebuah daerah telah semakin mandiri secara keuangan atau pun tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat semakin kecil. Terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), berikut

ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan berdasarkan persentase kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Kontribusi Komponen PAD Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Komponen PAD	Kontribusi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
Pajak Daerah	80,19	80,47	79,22	78,45	87,96	81,26
Retribusi Daerah	5,21	4,94	5,94	6,49	5,07	5,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,73	0,80	1,18	0,85	0,79	0,87
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,88	13,78	13,65	14,21	6,18	12,34
Pendapatan Asli daerah (PAD)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa besaran kontribusi dari masing-masing komponen PAD terpusat kepada dua sumber utama, yaitu pajak daerah yang memiliki rata-rata kontribusi sebesar 81,2% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,34%. Sisanya, sebanyak 5,53% dari pendapatan asli daerah Kota Medan bersumber dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,87%.

Secara umum, kontribusi untuk komponen PAD mengalami perkembangan yang baik dengan disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Kontribusi sumber-sumber PAD relatif sama dengan komposisi besar PAD dihasilkan dari pendapatan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Medan, diharapkan kontribusi komponen PAD terus meningkat secara signifikan, sehingga struktur PAD pada pendapatan daerah Kota Medan dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah, sebagai komponen PAD yang memiliki kontribusi paling dominan di Kota Medan. Satu catatan pergerakan komponen PAD di Kota Medan yang terjadi

pada periode 2018-2022 adalah penurunan kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang turun dari tingkat 14,21% menjadi 6,18%. Penurunan kontribusi ini beralih ke penguatan struktur PAD dari sisi pajak daerah yang mengalami peningkatan dari kontribusi 78,45% menjadi 87,96% pada tahun 2022 tersebut.

Dalam upaya memperoleh gambaran penerimaan pajak daerah Kota Medan sebagai salah satu kontribusi utama pendapatan asli daerah Kota Medan, capaian kinerja penerimaan dari pajak daerah perlu diperhatikan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak daerah Kota Medan selama periode 2018-2022.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

Tahun	Target Pajak Daerah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	1.511	-	1.312	-	97,45
2019	1.732	14,63	1.472	12,22	85,01
2020	1.360	-21,51	1.196	-18,78	87,96
2021	1.694	24,60	1.496	25,08	88,30
2022	2.588	52,77	1.962	31,17	75,82
Rata-Rata		**14,40**	**-**	**10,58**	**86,91**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.4 memberikan informasi bahwa secara rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Medan mencapai 10,58% per tahun, meskipun secara spesifik pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Selama pandemi COVID-19, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya mengalami penurunan hingga 18,78% di tahun 2020. Meskipun demikian, tingkat penerimaan pajak daerah yang mengalami penurunan tersebut berhasil mencapai tingkat pertumbuhan tinggi selama dua tahun setelahnya, yaitu 25,08% di tahun 2021 kemudian meningkat 31,17% di tahun 2022. Secara nominal, tingkat penerimaan pajak daerah Kota Medan mengalami pertumbuhan pesat dari sebelumnya Rp 1.312 Milyar di tahun 2018 menjadi Rp 1.962 Milyar di tahun 2022. Dari sisi

penetapan target penerimaan pajak daerah, tingkat pertumbuhan target pajak selama periode 2018-2022 mencapai 14,40% per tahun dengan pertumbuhan target terbesar pada tahun 2022 yang mencapai tingkat pertumbuhan 52,77%. Dari sisi pencapaian target yang telah ditetapkan, realisasi terhadap target terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai kinerja 97,45%. Sayangnya, dengan pertumbuhan target yang cukup besar, kemampuan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Medan mengalami penurunan dengan rata-rata periode selama lima tahun tersebut berada pada tingkat 86,91%. Tingkat realisasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 75,82% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi realisasi terlihat bahwa pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi mencapai 31,17% namun pertumbuhan target pada masa tersebut juga menapai angka 52,77% sehingga kontribusi realisasi target penerimaan pajak daerah di Kota Medan pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Medan adalah retribusi daerah yang memiliki tingkat rata-rata kontribusi sebesar 5,53%. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kota Medan selama kurun waktu tahun 2018-2022.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

Tahun	Target Retribusi Daerah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Retribusi Daerah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	250,84	-	85,20	-	36,05
2019	177,22	-29,35	90,43	6,13	51,03
2020	94,87	-46,47	89,72	-0,79	94,58
2021	118,23	24,63	123,66	37,83	104,60
2022	237,90	101,22	113,13	-8,52	47,55
Rata-Rata		**-1,32**	**-**	**7,34**	**66,76**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.5 memberikan gambaran umum tentang target dan realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Secara umum

penyusunan target retribusi daerah pada periode 2018-2022 mengalami penurunan 1,32% per tahun dimulai dari awal tahun 2018 yang menargetkan penerimaan sebesar Rp 250,84 Milyar turun menjadi Rp 237,90 Milyar pada tahun 2022. Dari sisi realisasi retribusi daerah Kota Medan, terdapat peningkatan penerimaan retribusi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 7,34% per tahun. Meskipun demikian perlu menjadi perhatian bahwa peningkatan realisasi penerimaan retribusi terjadi secara signifikan di tahun 2021 yang mencapai 37,83%. Pencapaian tinggi tersebut membuat target PAD dari retribusi daerah meningkat hingga 101,22% dari tahun 2021. Dari sisi kinerja realisasi retribusi daerah dengan target penerimaan, tingkat pencapaian rata-rata selama periode 2018-2022 mencapai 66,76%. Secara umum tingkat realisasi retribusi daerah masih tergolong rendah pada kisaran angka 30-50% dari target yang telah dipersiapkan. Namun, peningkatan kinerja di tahun 2020 dan 2021 perlu menjadi perhatian utama dengan tingkat kinerja pencapaian mencapai angka 94,58% di tahun 2020 dan 104,60% di tahun 2021.

Sumber pendapatan asli daerah Kota Medan selanjutnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,87% setiap tahun selama periode 2018-2022. Rincian perkembangan target dan realisasi selama kurun waktu tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

Tahun	Target HPKD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi HPKD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	12,30	-	11,90	-	119,01
2019	13,14	6,87	14,64	22,99	111,37
2020	15,78	20,09	17,83	21,81	112,96
2021	19,80	25,44	16,20	-9,12	81,84
2022	23,94	20,91	17,68	9,09	73,84
Rata-Rata		**18,12**	**-**	**10,40**	**99,80**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Medan. Oleh karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi daerah, maka wajar apabila perkembangan sumber pendapatan ini relatif lambat jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki persentase kontribusi paling rendah dibandingkan dengan komponen PAD lainnya dengan nilai kontribusi kurang dari 1%.

Di balik kontribusinya yang relatif kecil, pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari HPKD ini cukup besar dengan pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan sebesar 10,40% per tahun. Pencapaian kinerja realisasi dengan target juga mencapai 99,80% dari rata-rata pendapatan lima tahun. Selama periode 2018-2022 terjadi peningkatan dari sebelumnya Rp 11,90 Milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 17,68 Milyar pada tahun 2022.

Sumber PAD terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Medan adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,34% per tahun selama periode 2018-2022. Rincian target dan realisasi selama kurun waktu 2018-2022 dari komponen PAD tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

Tahun	Target Lain-Lain PAD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Lain-Lain PAD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	338,52	-	227,03	-	74,49
2019	390,30	15,30	252,18	11,08	52,80
2020	343,75	-11,93	206,08	-18,28	59,95
2021	307,27	-10,61	270,89	31,45	88,16
2022	200,98	-34,59	137,82	-49,12	68,58
Rata-Rata		**-12,22**	**-**	**-11,73**	**68,80**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pertumbuhan sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kota Medan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan realisasi sebesar 11,73% per tahun selama periode 2018-2022. Penurunan tingkat realisasi ini juga membuat target pendapatan

dari sumber lain-lain mengalami penurunan dengan penurunan sebesar 12,22% per tahun. Fluktuasi yang tinggi terjadi dari sumber lain-lain yang nilainya sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan besar dari sumber pendapatan ini hingga mencapai 31,45% namun mengalami penurunan hingga 49,12% di tahun 2022.

1. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan transfer Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Medan Tahun 2018 – 2022
(Rp Milyar)

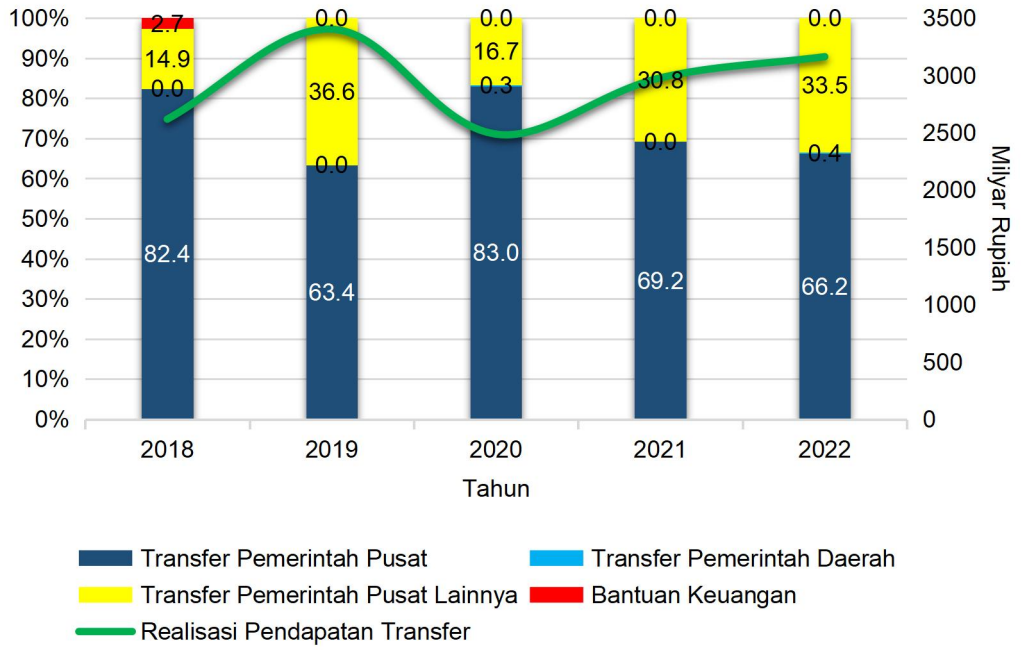
Tahun	Target Pendapatan Transfer	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pendapatan Transfer	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	3.126,74	-	2.617,41	-	108,80
2019	3.636,64	16,31	3.401,88	29,97	56,54
2020	2.767,36	-23,90	2.056,22	-39,56	74,30
2021	3.069,72	10,93	2.977,57	44,81	97,00
2022	3.483,03	13,46	3.162,39	6,21	90,79
Rata-Rata		**2,73**	**-**	**4,84**	**85,49**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa terdapat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan transfer di Kota Medan sebesar 4,84% per tahun selama periode 2018-2022. Meskipun secara rata-rata terjadi pertumbuhan, realisasi setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang sangat besar. Pandemi COVID-19 yang terjadi mengakibatkan penurunan signifikan dari realisasi pendapatan yang mencapai penurunan sebesar 39,56% dari tahun sebelumnya namun berhasil kembali mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Nilai realisasi

pendapatan transfer terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai transfer mencapai Rp 3.401,88 Milyar.

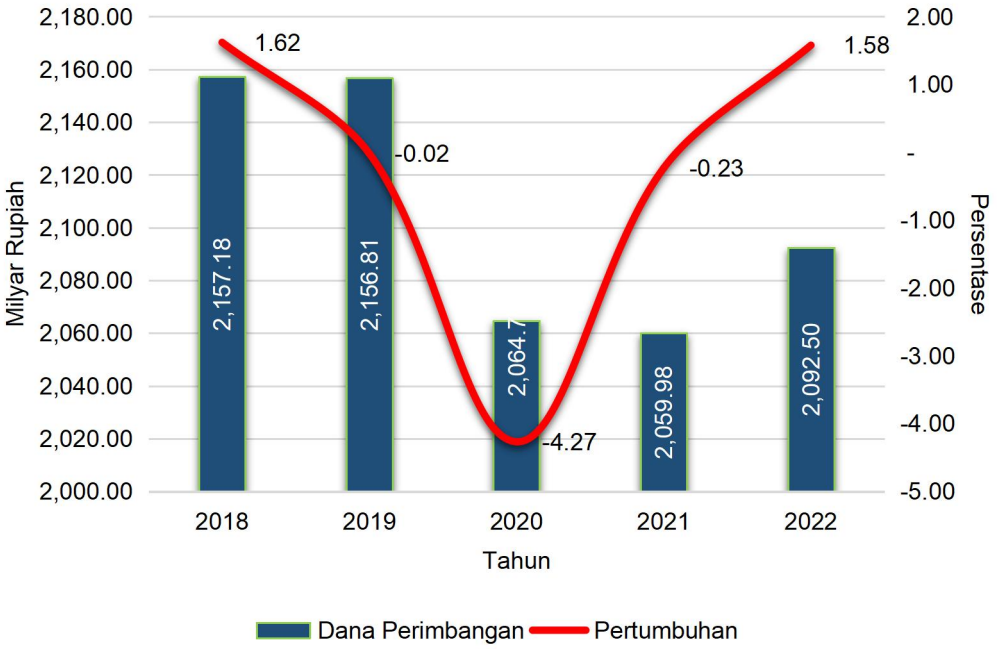
Struktur pendapatan transfer Pemerintah Kota Medan pada periode 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki sumber utama dari transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah pusat lainnya. Transfer dari pemerintah daerah lainnya selama kurun waktu tersebut hanya pernah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,3% dari seluruh pendapatan transfer yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.



Gambar 3.3.
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Medan 2018 – 2022

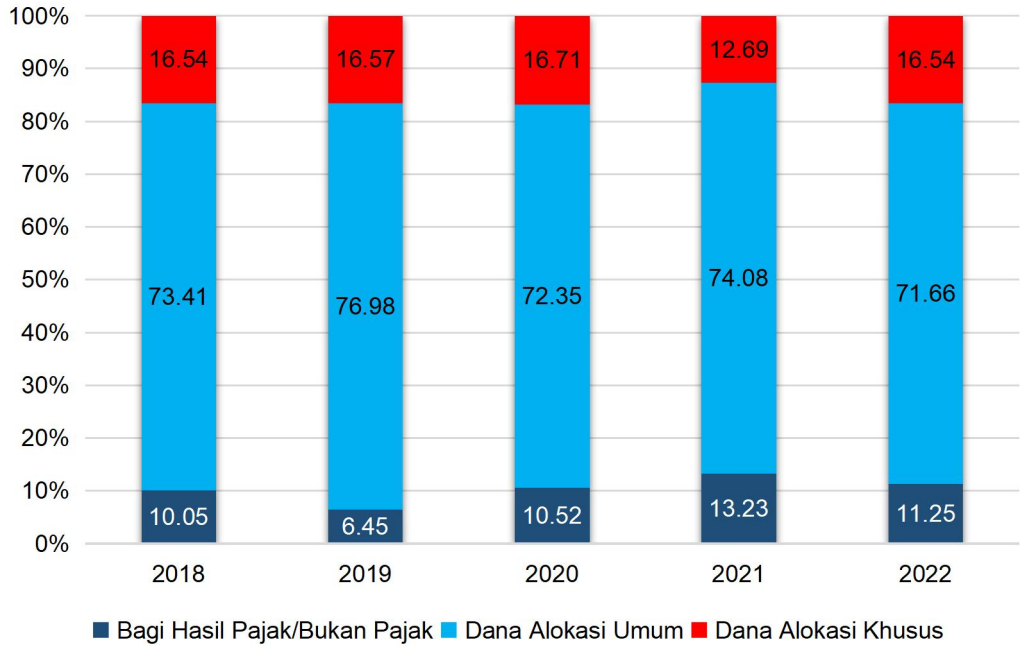
Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Medan berbentuk dana perimbangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen

transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022.



Gambar 3.4.
Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan 2018-2022

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang memegang peranan penting dalam struktur pendapatan daerah di Kota Medan. Perolehan dana perimbangan Kota Medan tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Penurunan perolehan realisasi dana perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2020 bertepatan dengan awal mula pandemi COVID-19 terjadi di Kota Medan dan seluruh Indonesia. Sejak saat itu fokus pemerintah pusat terletak pada penanganan COVID-19 yang mengakibatkan banyak penyesuaian terhadap dana transfer untuk pelaksanaan otonomi daerah. Tahun 2021 dana perimbangan kembali mengalami penurunan. Di tahun 2022 COVID-19 sudah dirasakan mulai menurun. Dana perimbangan untuk pendapatan Kota Medan mulai kembali meningkat 2,14% dari tahun 2021 ke titik Rp 2,1 Triliun.



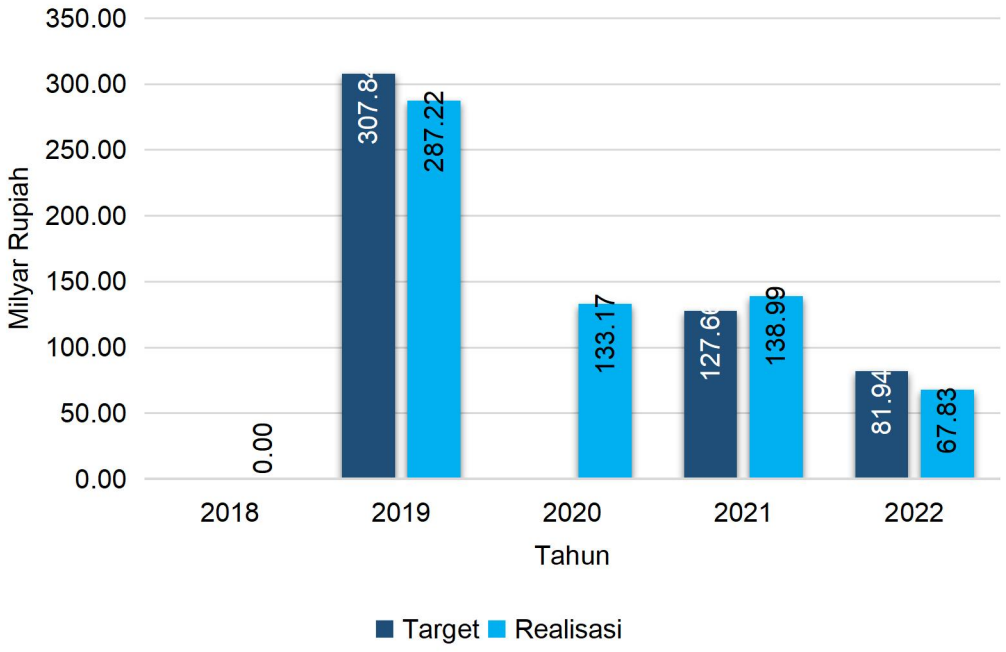
Gambar 3.5.
Distribusi Komposisi Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2018-2022

Dana perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Medan terdiri dari (1) dana bagi hasil, (2) dana alokasi umum dan (3) dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Komposisi dari dana perimbangan di Kota Medan mayoritas merupakan Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan pada pelaksanaan desentralisasi dengan tingkat rata-rata 73,70% dari seluruh

dana perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Untuk Pemerintah Kota Medan, perkembangan target dan realisasi sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 2018-2022 dirangkum sebagai berikut.



Gambar 3.6.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Kota Medan yang Sah Periode 2018-2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Medan belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi Penerimaan PAD lain-lain yang mengalami garis tren negatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 pemerintah tidak menargetkan PAD dari pendapatan sah lainnya karena pandemi COVID-19 namun tetap menghasilkan PAD, meskipun nilainya menurun dari tahun 2019. Sayangnya penerimaan dari PAD lain-lain terus mengalami penurunan dan menurun kembali di tahun 2022. Sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan lain yang diatur dalam peraturan perundangan. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Belanja Daerah

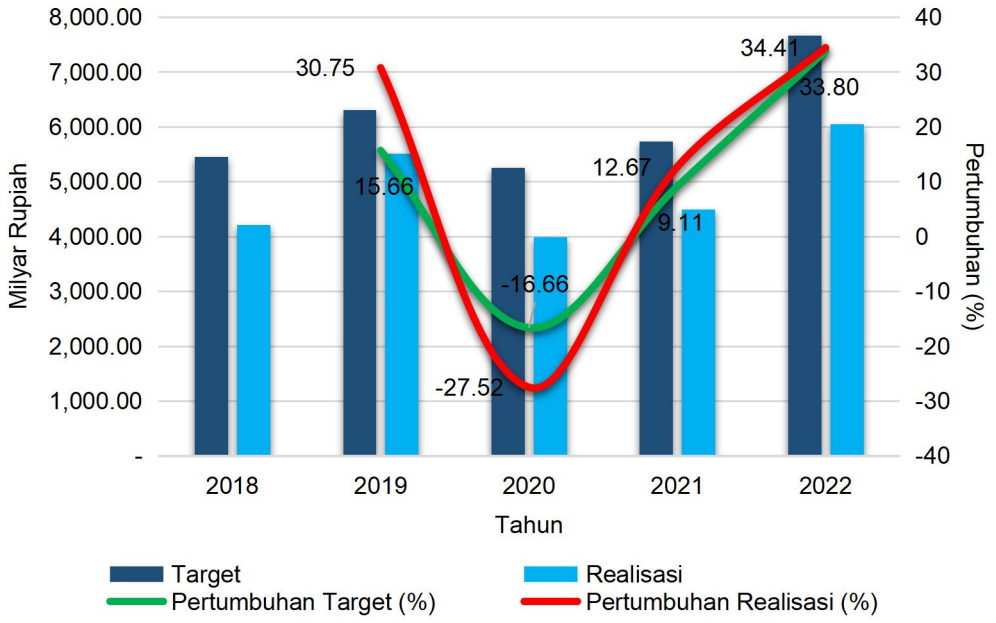
Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan kota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Medan tahun 2018-2022. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Sementara itu, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2015-2019 yang digunakan

sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi untuk belanja daerah Kota Medan selama kurun waktu 2018-2024.



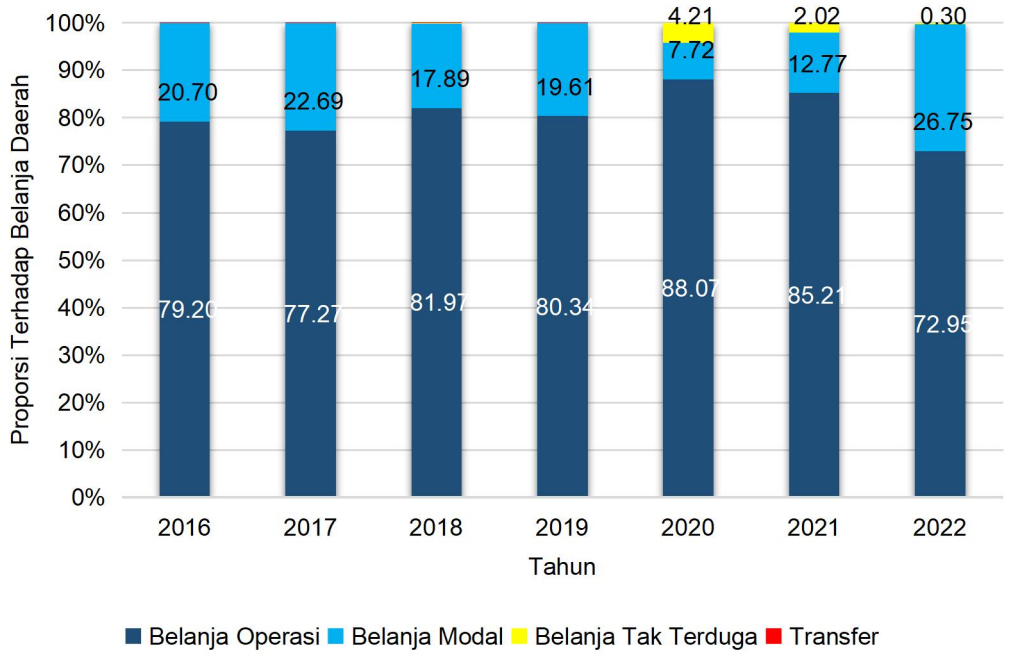
Gambar 3.7.
Pergerakan Target dan Realisasi Belanja Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Hasil evaluasi terkait target dan realisasi belanja Kota Medan tahun 2018-2020 perlu diperhatikan sebagai dua periode yang berbedam yaitu sebelum COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019; serta masa COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada periodisasi target dan belanja tahun 2018-2019 terjadi pertumbuhan positif terhadap pengeluaran belanja pemerintah Kota Medan dari sebelumnya Rp 4,2 Triliun menjadi Rp 5,5 Triliun di tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan pemerintah mengambil langkah *refocusing* sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan yang signifikan dari penargetan dan realisasi yang terjadi pada tahun 2020. Pergerakan realisasi belanja mencapai penurunan sebesar 27,52% dari tahun 2019. Fase kedua dari target da realisasi belanja Kota Medan menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pertumbuhan belanja pemerintah Kota Medan terbesar terjadi pada tahun 2022 yang mencapai angka 34,41% dari tahun 2021 dengan tingkat realisasi belanja mencapai Rp 6,0 Triliun. Angka ini sudah

melebihi kondisi sebelum COVID-19 pada tahu 2019 lalu.

Evaluasi berdasarkan ketercapaian kinerja belanja pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja belanja pemerintah belum pernah memenuhi target yang direncanakan sebelumnya. Secara rata-rata capaian kinerja belanja Kota Medan berada pada tingkat 79,62%. Deviasi yang terjadi mengindikasikan permasalahan penganggaran yang terjadi. Dalam penganggaran belanja pemerintah, Kota Medan perlu mempertimbangkan perencanaan untuk pembangunan Kota Medan yang lebih baik, misalnya dengan memerhatikan capaian sebelumnya dan kebutuhan pencapaian tahun yang akan datang. Meskipun terjadi fluktuasi capaian realisasi belanja dari target yang telah disiapkan, perlu diperhatikan bahwa target dan realisasi tetap tumbuh dalam membangun Kota Medan yang lebih baik.

Komponen belanja daerah di Kota Medan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara umum komposisi proporsi terbesar yang digunakan sebagai belanja daerah adalah belanja operasi untuk memenuhi kegiatan operasional Pemerintah Kota Medan. Proporsi jenis belanja daerah di Kota Medan tahun 2018-2022 dirangkum sebagai berikut.

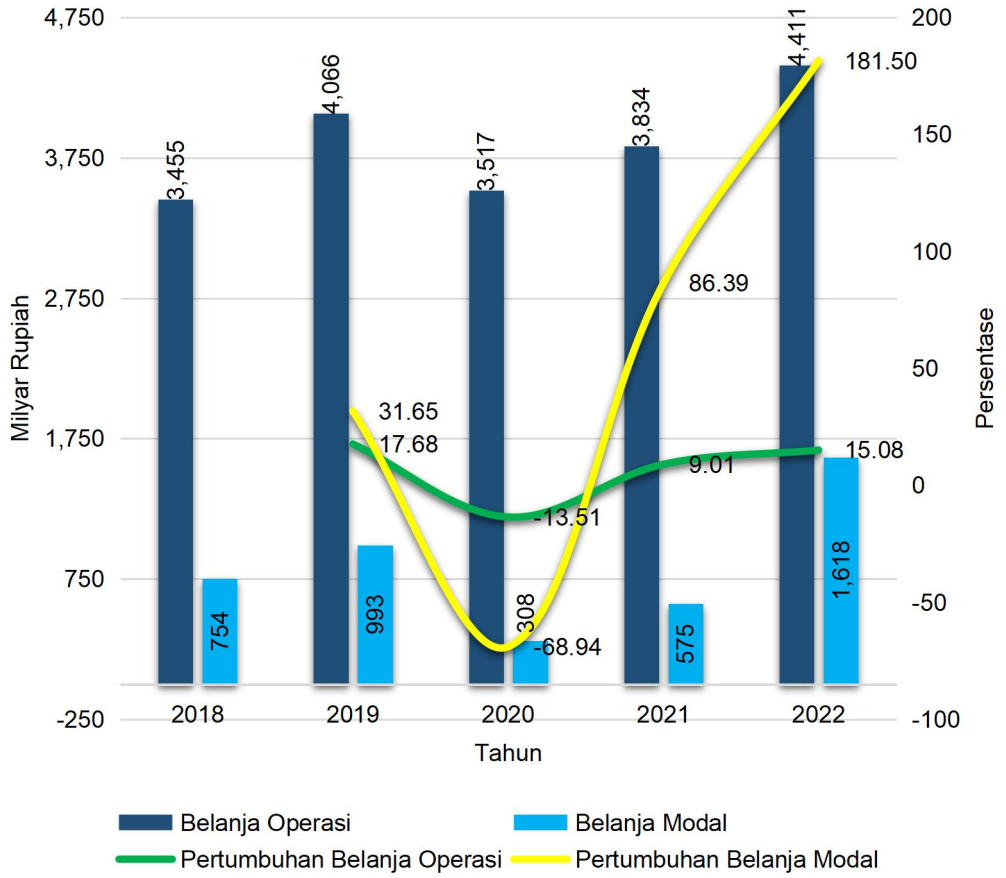


Gambar 3.8.
Struktur Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Rata-rata proporsi belanja daerah Kota Medan tahun 2018 sampai dengan

tahun 2022 berada pada tingkat 81,71% dengan penggunaan belanja operasi terbesar terjadi pada tahun 2020 dan 2021 selama masa fokus penanganan COVID-19 di Kota Medan. Proporsi penggunaan belanja modal untuk pembangunan Kota Medan berada pada tingkat rata-rata sebesar 16,95% selama periode tersebut. Selama masa refocusing tahun 2020 dan 2021 terhadap penanganan COVID-19 terjadi pengurangan belanja modal di Kota Medan. Penurunan proporsi belanja modal dan operasi tahun 2020 dan 2021 dialihkan ke belanja tidak terduga untuk penanganan COVID-19 tersebut menjadi 4,21% di tahun 2020 dan 2,02% pada tahun 2021. Sejak tahun 2020 pemerintah Kota Medan tidak lagi melakukan belanja transfer ke daerah-daerah.

Struktur pengalokasian belanja daerah di Kota Medan sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur, khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS yang merupakan bagian dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal yang memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah hanya memiliki proporsi rata-rata sebesar 16,95% dan mengalami penurunan besar selama penanganan COVID-19. Besarnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah menjadi indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan merealisasikan belanja modal yang mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 12,77% menjadi 26,75%. Pergerakan ini mengindikasikan kebijakan belanja yang mengarah kepada pembangunan inklusif di Kota Medan. Pemerintah mulai mengurangi proporsi belanja operasi dari 85,21% pada tahun 2021 menjadi 72,95% pada tahun 2022. Secara proporsi angka ini menunjukkan pemerintah Kota Medan mengalihkan proporsi belanja operasi untuk membangun Kota Medan melalui belanja modal. Pertumbuhan dari belanja modal dan belanja operasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 pemerintah Kota Medan dirangkum sebagai berikut.

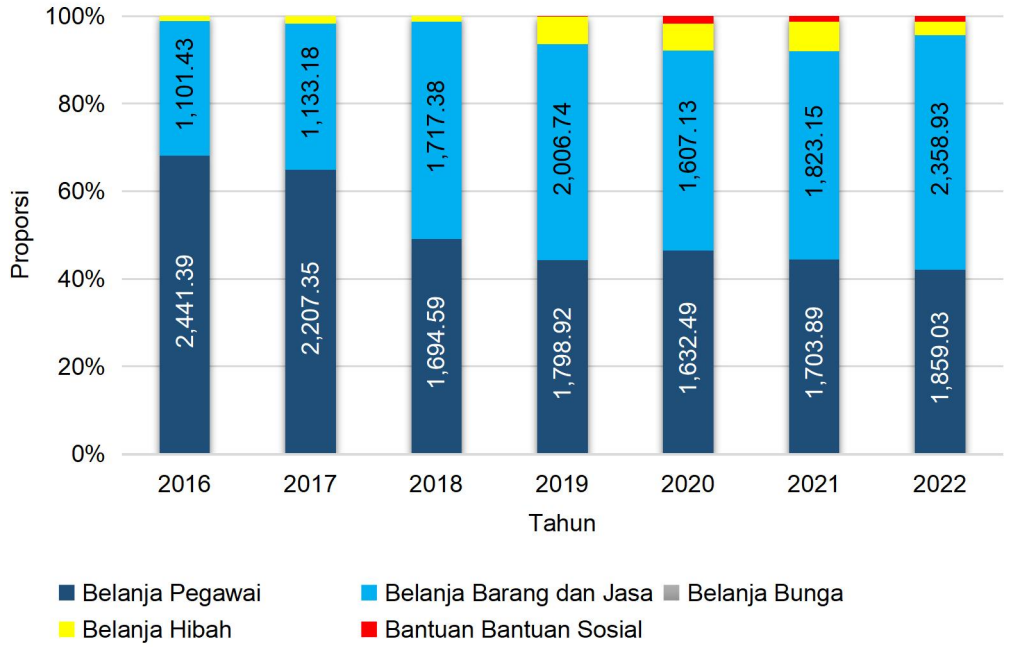


Gambar 3.9.
Tren Pergerakan Realisasi Belanja Operasi dan Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Realisasi belanja di Kota Medan secara umum masih berpusat pada belanja operasi dengan proporsi terbesar dari total belanja Kota Medan. Dari sisi pertumbuhan belanja operasi relatif stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,06% per tahun. Dari sisi pertumbuhan belanja modal terjadi pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 57,65%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan belanja modal mencapai 181,50%. Tren pertumbuhan belanja tersebut terbentuk dengan pola positif yang mengindikasikan peralihan belanja ke arah belanja modal dengan *multiplier* tinggi bagi pembangunan Kota Medan.

Klasifikasi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 menyatakan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci dalam enam kategori meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Tren pergerakan proporsi belanja operasi Kota Medan tahun 2018-2022 dirangkum sebagai berikut.



Gambar 3.10.
Struktur Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Struktur belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun 2018 realisasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa relatif berimbang dengan struktur 49,05% belanja pegawai dan 49,71% belanja barang dan jasa. Tren pergerakan belanja pegawai tumbuh secara perlahan dengan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 2,34% selama kurun 2018 sampai dengan 2022. Dari sisi belanja barang dan jasa terdapat pertumbuhan yang lebih besar daripada belanja pegawai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,26% selama periode evaluasi dilakukan. Pada tahun 2022 proporsi belanja operasi lebih banyak terjadi atas belanja barang dan jasa dengan proposi 53,47% dan belanja pegawai sebesar 42,14%. Selama periode 2018-2022 pemerintah Kota Medan tidak melakukan aktivitas belanja bunga. Dari sisi belanja hibah, secara rata-rata dalam struktur biaya operasi mencapai tingkat 4,69% dan sisanya belanja bantuan sosial mencapai rata-rata 0,89% dari total biaya operasi yang dilakukan pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan tidak secara eksplisit

menganggarkan biaya subsidi dalam keuangan daerahnya.

Selanjutnya, dilihat dari komponen pertumbuhan belanja operasi, realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan yang relatif tinggi selama kurun waktu 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 11,30%. Sedangkan realisasi belanja pegawai juga mengalami peningkatan tetapi rata-rata pertumbuhannya relatif kecil, yakni sebesar 0,50%. Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan mencapai -82,79% untuk belanja bantuan sosial dan sebesar -20,84% untuk belanja hibah.

Komponen utama belanja daerah Kota Medan lainnya adalah belanja modal. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Adapun komponen belanja modal meliputi (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja bangunan dan gedung, (4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan (5) belanja modal aset tetap lainnya. Berikut ini adalah pertumbuhan dan proporsi jenis belanja modal Pemerintah Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022.

Tabel 3.9.
Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis Belanja Modal Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

No	Jenis Belanja Modal	Tahun					Rerata	Rerata
		2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan	Proporsi (%)
1	Belanja Modal Tanah	53,2	24,7	20,7	26,4	193,0	38,0	6,6
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173,6	229,0	140,4	228,5	413,3	24,2	31,4
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106,8	240,8	64,2	139,5	325,9	32,2	20,7
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	411,1	467,2	81,8	176,9	670,3	13,0	40,1
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,2	30,8	1,2	3,4	14,9	12,9	1,2
Belanja Modal		**754,0**	**992,7**	**308,3**	**574,6**	**1.617,5**	**21,0**	**100,0**

Sumber: BPKAD Kota Medan

Selama kurun waktu 2018 – 2022, pertumbuhan belanja modal mencapai tingkat rata-rata 21% per tahun, dari sebelumnya Rp 754 Milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 1.617,5 Milyar pada tahun 2022. Aktivitas belanja modal sempat mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi COVID-19 yang turun hingga Rp 308,3 Milyar pada tahu 2020 namun saat ini sudah kembali meningkat secara signifikan. Dari sisi proporsi komponen belanja modal, proporsi terbesar merupakan aktivitas belanja untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata proporsi belanja sebesar 40,01%. Komponen utama selanjutnya adalah belanja modal peralatan dan mesin dengan rata-rata sebesar 31,4%.

Selain proporsi belanja modal, perlu diperhatikan pula pertumbuhan belanja yang terjadi pada setiap bagian belanja modal. Pertumbuhan terbesar dari belanja modal Pemerintah Kota Medan terletak pada belanja modal tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,0% per tahun dan belanja modal gedung dan bangunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 32,2% per tahun. Belanja modal peralatan dan mesin tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 24,2% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan belanja modal, pemerintah Kota Medan semakin fokus meningkatkan pembangunan dari sisi pembangunan fisik. Selain itu pemerintah juga fokus dalam bidang infrastruktur dan perawatan gedung terutama untuk keperluan kemantapan jalan serta jaringan yang memiliki proporsi terbesar, khususnya pada tahun 2022 yang mencapai 41,44% dari belanja modal keseluruhan tahun berjalan.

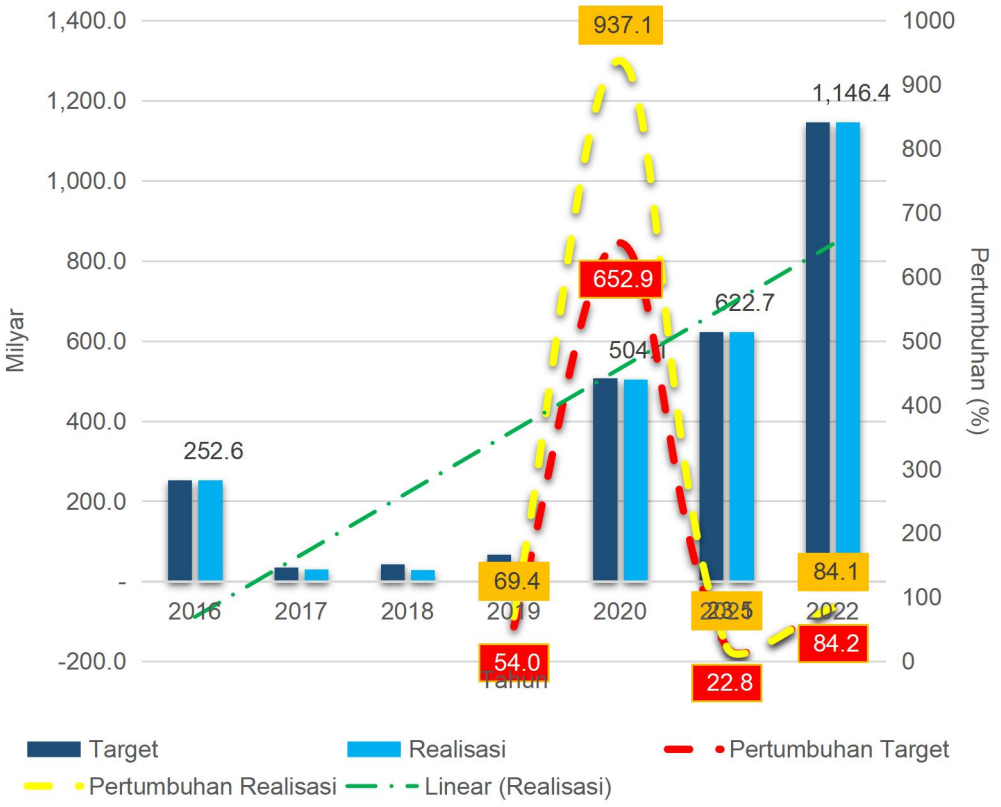
3.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

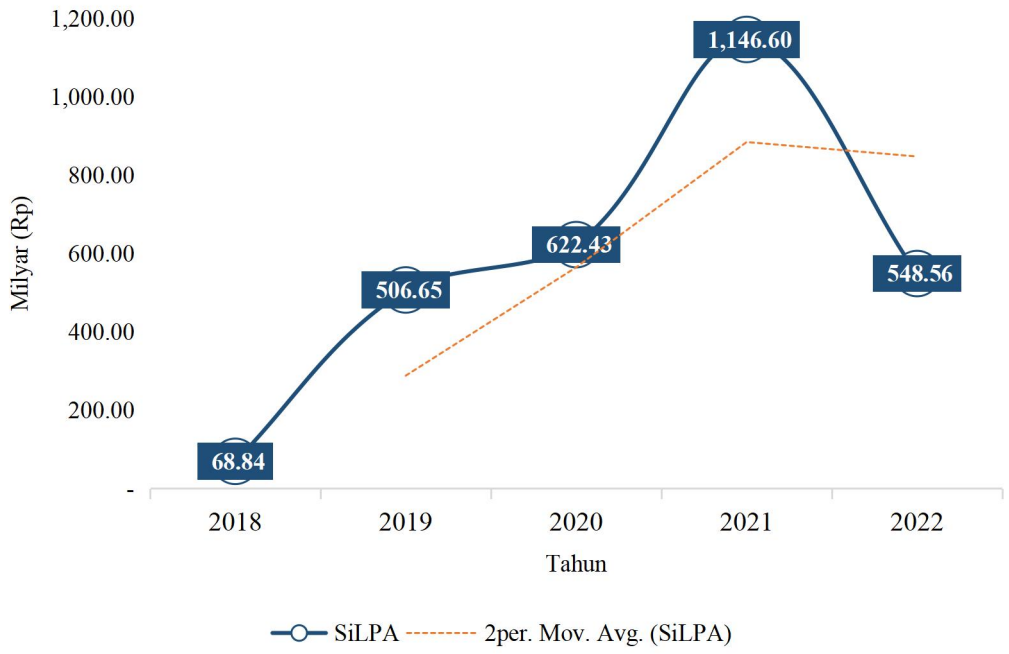
Dalam upaya mengevaluasi kinerja keuangan dari aspek pembiayaan, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Medan tahun 2018-2022 yang bersumber dari berbagai penerimaan pembiayaan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan membandingkan antara target, realisasi dan pertumbuhan penerimaan pembiayaan Kota Medan. Hasil kinerja penerimaan pembiayaan tersebut dirangkum sebagai berikut.



Gambar 3.11.
Pergerakan Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Medan tahun 2018-2022

Penerimaan pembiayaan Kota Medan memiliki sumber utama sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi realisasi penerimaan pembiayaan nilainya berada kurang dari Rp 50 Milyar,

namun terjadi peningkatan yang signifikan baik dari target maupun realisasi penerimaan pembiayaan Kota Medan pada tahun 2020 yang mencapai tingkat 937% dari realisasi penerimaan pembiayaan dan 652% dari sisi target penerimaan pembiayaan. Setelah periode tersebut terdapat tren positif dari target dan realisasi penerimaan pembiayaan tersebut. Secara rata-rata terdapat pertumbuhan sebesar 126,3% setiap tahun dari realisasi penerimaan pembiayaan Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2022. Nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 28,7 Milyar tumbuh menjadi Rp 1.146 Milyar pada tahun 2022. Pertumbuhan nilai realisasi SiLPA yang semakin besar mengindikasikan kurang cermatnya perhitungan perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Diharapkan pada masa yang akan datang, SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja daerah.

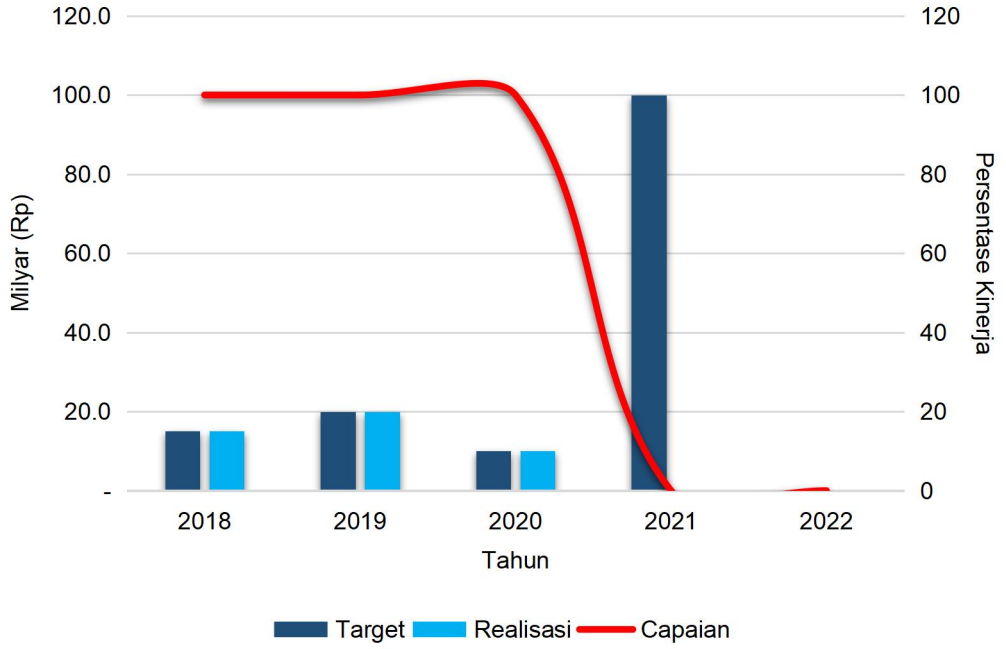


Gambar 3.12.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Medan 2018-2022

Secara umum pergerakan SiLPA Kota Medan selama periode 2018-2022 menunjukkan arah pergerakan positif dimana setiap tahunnya SiLPA Kota Medan mengalami peningkatan yang menunjukkan inefisiensi penganggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan. Pergerakan pada tahun 2022 menunjukkan Kota Medan mulai kembali dapat menekan SiLPA yang terjadi sehingga anggaran

berlebih berhasi menurun dari sebelumnya Rp 1.146 Milyar di tahun 2021 menjadi Rp 548 Milyar di tahun 2022. Pemerintah dalam penganggarannnya telah menargetkan SiLPA nol pada tahun 2022 namun secara realisasi masih bertahap mengalami penurunan SiLPA. Diharapkan kinerja keuangan dari sisi pendapatan dan belanja Kota Medan dapat lebih meningkat ke depannya.

Elemen lain dalam pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan mengacu kepada pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Medan selama kurun waktu 2018-2022.



Gambar 3.13.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Medan 2018-2022

Pemerintah Kota Medan secara efektif melakukan perencanaan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan Kota Medan selama tahun 2018 sampai dengan

tahun 2022 dengan pencapaian kinerja 100% pada periode tersebut. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan perencanaan pengeluaran pembiayaan namun tidak terealisasi.

1. Analisis Pembiayaan

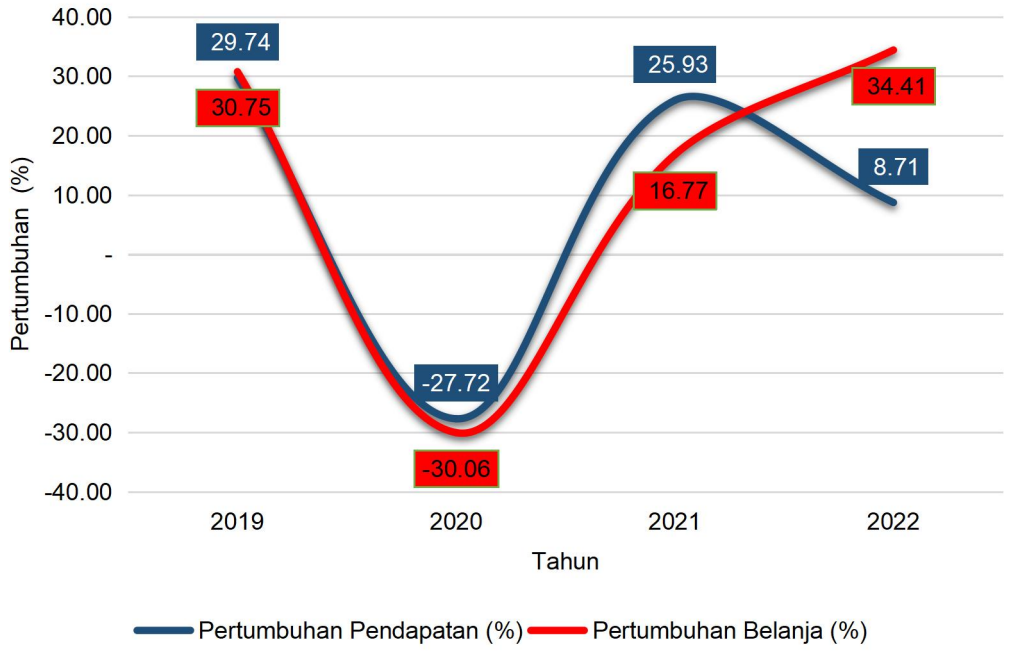
   Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2018 sampai 2022.

Tabel 3.10.
Surplus (Defisit) Riil Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rp. Milyar)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Pendapatan Daerah	4.253,62	5.518,77	3.988,76	5.023,08	5.449,34
Dikurangi Dengan					
Realisasi Belanja Daerah	4.213,48	5.509,29	3.852,96	4.499,15	6.047,21
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15,00	20,00	10,00	-	-
Surplus (Defisit) Riil	**25,14**	**(10,52)**	**125,80**	**523,94**	**(597,87)**

Aktivitas kinerja pembiayaan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami pergerakan dinamis yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 tercatat surplus anggaran dengan tingkat pendapatan lebih besar dari belanja yang mencapai Rp 25,14 Milyar. Pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran dengan adanya pengeluaran pembiayaan daerah sehingga tercipta defisit Rp 10,52 Milyar. Pada tahun 2020 perencanaan penganggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Medan belum terealisasi karena peralihan penganggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga terjadi

surplus anggaran sampai dengan Rp 125,8 Milyar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan surplus anggaran yang signifikan hingga mencapai Rp 523,94 Milyar. Tahun 2022 Kota Medan mengoptimalkan belanja daerah sehingga tercapai defisit anggaran sebesar Rp 586,38 Milyar yang dipenuhi melalui SiLPA yang dimiliki Kota Medan sampai dengan tahun tersebut. Pergerakan pertumbuhan pendapatan dan belanja Kota Medan dirangkum sebagai berikut.



Gambar 3.14.
Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan 2018-2022

Hasil evaluasi pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Kota Medan menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan realisasi pendapatan selalu lebih besar daripada pertumbuhan belanja pemerintah Kota Medan sampai dengan tahun 2021. Selisih pertumbuhan ini mengakibatkan setiap tahunnya sisa anggaran pemerintah Kota Medan semakin membesar. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat belanja pemerintah Kota Medan membuat sisa anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk memenuhi defisit anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022.

2. Neraca Keuangan Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu bentuk laporan

keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi dengan menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pemerintah daerah pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri atas aset lancer dan aset tetap. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Evaluasi terhadap neraca daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dirangkum sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Medan Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

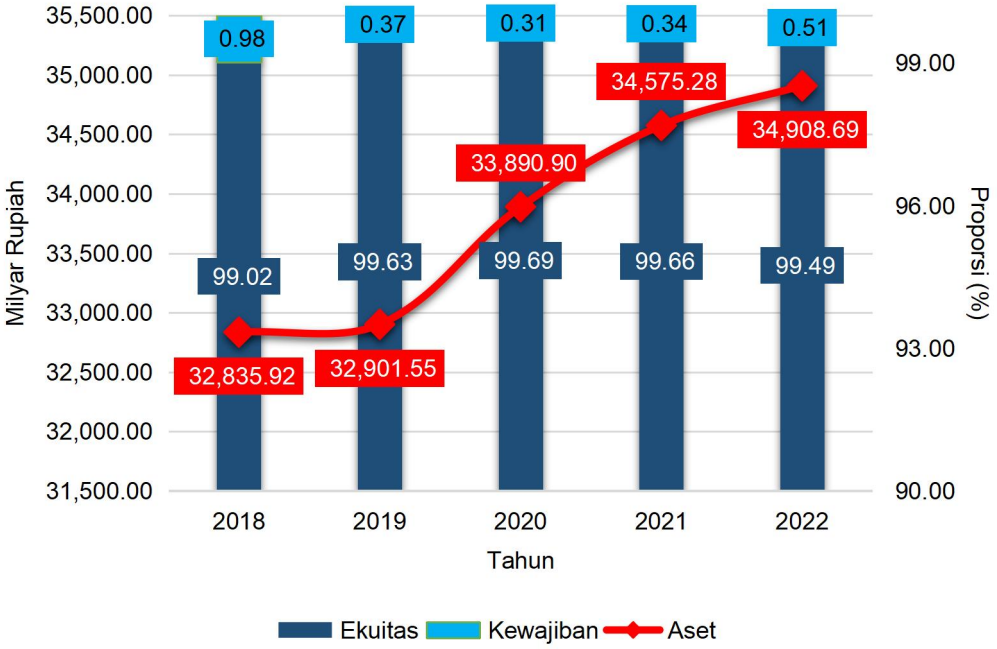
No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	**ASET**						
01.01	**ASET LANCAR**						
01.01.01	Kas di Kas Daerah	67.030.194.067	499.727.369.205	620.252.762.131	1.106.128.878.683	540.060.678.340	68,48
01.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	48.138.000	135.718.500	54.539.000	-	-	6,44
01.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.254.440	259.707.300	124.355.336	-	-	895,65
01.01.04	Kas di BLUD	286.715.875	514.576.222	1.258.682.711	26.304.649.518	3.855.409.985	91,49
01.01.06	Kas di BOS	1.291.930.298	6.187.209.390	864.903.315	439.029.183	113.543.537	- 45,55
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP				13.720.515.190	4.529.025.769	- 66,99
01.01.05	Kas Lainnya	00,00,00	00,00,00	-	3.348.140	-	
01.01.07	Piutang Pendapatan	1.811.018.724.417	1.393.778.338.670	1.982.626.322.399	1.950.281.965.396	1.862.106.291.371	0,70
01.01.08	Piutang Lainnya	9.313.568.735	6.363.555.451	6.496.452.175	15.541.307.393	13.999.005.533	10,72
01.01.09	Penyisihan Piutang	- 463.353.571.433	- 777.392.944.529	-1.036.403.552.820	-800.113.388.155	-896.643.112.557	17,94
01.01.10	Beban Dibayar Dimuka	1.177.175.000	1.113.639.667	1.048.245.333	844.083.333	730.916.667	- 11,23
01.01.11	Persediaan	83.702.843.516	138.273.109.275	183.725.365.932	209.381.893.893	227.863.975.262	28,45
	Jumlah Aset Lancar	**1.510.516.972.915**	**1.268.960.279.149**	**1.760.048.075.513**	**2.522.532.282.575**	**1.756.615.733.908**	**3,85**
01.02	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
01.02.01	Investasi Jangka Panjang Permanen						
01.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	348.389.095.999	364.779.713.932	367.667.767.143	362.652.058.204	357.547.549.125	0,65
01.02.03	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**348.389.095.999**	**364.779.713.932**	**367.667.767.143**	**362.652.058.204**	**357.547.549.125**	**0,65**
01.03	**ASET TETAP**						
01.03.01	Tanah	27.019.586.805.072	27.122.939.869.272	27.139.943.961.878	27.099.199.781.878	27.375.429.814.363	0,33
01.03.02	Peralatan dan Mesin	1.439.760.705.510	1.622.381.932.471	1.699.723.742.418	1.926.932.533.085	2.260.020.905.290	11,93
01.03.03	Gedung dan Bangunan	1.395.132.472.241	1.583.642.221.873	1.702.630.732.739	1.768.797.652.548	2.092.439.919.195	10,66
01.03.04	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.263.371.320.143	5.668.140.168.969	5.799.952.310.418	6.019.848.185.936	6.765.586.417.115	6,48
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	51.598.534.391	54.836.729.356	58.400.330.494	64.511.789.179	80.231.332.942	11,67
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	38.776.922.137	114.166.275.037	115.815.882.626	183.405.668.406	248.355.639.545	59,08
	Akumulasi Penyusutan	-5.003.843.601.129	-5.640.731.917.156	-5.430.430.893.922	- 6.030.171.056.312	- 6.702.297.811.398	7,58
	JUMLAH ASET TETAP	30.204.383.158.364	30.525.375.279.821	31.086.036.066.650	31.032.524.554.721	32.119.766.217.052	1,55
01.04	ASET LAINNYA						
01.04.04	Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	16.817.588.996	14.726.086.209	13.503.469.707	12.205.022.682	11.802.744.504	- 8,47
01.04.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	338.550.426.660	338.550.426.660	338.550.426.660	338.550.426.660	338.550.426.660	-
01.04.02	Aset Tidak Berwujud	9.555.582.370	8.733.685.600	7.890.673.582	14.908.952.666	14.572.653.666	11,13
01.04.03	Aset Lain- lain	407.704.685.385	380.420.367.296	317.216.217.633	291.906.383.675	309.829.698.503	- 6,63

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Jumlah Aset Lainnya	**772.628.283.410**	**742.430.565.765**	**677.160.787.581**	**657.570.785.683**	**674.755.523.333**	**- 3,33**
	Jumlah Aset	**32.835.917.510.688**	**32.901.545.838.667**	**33.890.912.696.887**	**34.575.279.681.182**	**34.908.685.023.417**	**1,54**
02	**Kewajiban**						
02.01	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.254.440	37.601.751	124.355.378	122.464.554	122.464.512	214,33
02.01.02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	00,00,00	00,00,00	-	-	-	
02.01.03	Pendapatan Diterima di Muka	5.247.362.924	10.895.505.117	12.311.907.874	21.729.150.514	37.847.250.641	63,88
02.01.04	Hutang Beban	174.402.608.872	108.767.372.421	91.841.304.225	92.593.817.200	78.556.635.510	- 18,08
02.01.05	Utang Jangka Pendek Lainnya	140.983.969.653	1.621.020.885	1.385.646.003	4.569.996.300	61.218.795.089	- 18,82
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	320.635.195.889	121.321.500.174	105.663.213.480	119.015.428.568	177.745.145.751	- 13,71
02.02	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
02.02.01	Utang Dalam Negeri	00,00,00	00,00,00	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**00,00,00**	**00,00,00**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Kewajiban	**320.635.195.889**	**121.321.500.174**	**105.663.213.480**	**119.015.428.568**	**177.745.145.751**	**- 13,71**
02.03	**EKUITAS**						
02.03.01	Ekuitas	32.515.282.314.789	32.780.224.338.493	33.785.239.483.406	34.456.264.252.615	34.730.939.877.666	1,66
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**32.835.917.510.688**	**32.901.545.838.667**	**33.890.902.696.887**	**34.575.279.681.182**	**34.908.685.023.417**	**1,54**

Selama periode 2018 – 2022 aset Kota Medan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,54%, dari sebelumnya Rp 32,8 Triliun di tahun 2018 menjadi 34,9 Triliun di tahun 2022. Dari sisi aset lancar, pertumbuhan aset tersebut mencapai 3,85% pe tahun. Pertumbuhan terbesar secara konsisten terjadi pada posisi Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 91,49%. Nilai kas tersebut tumbuh dari Rp 286 Juta menjadi Rp 3,8 Milyar di tahun 2022. Kas di kas daerah juga tumbuh mencapai tingkat 68,48% dari sebelumnya Rp 67 Milyar menjadi Rp 540 Milyar. Meskipun demikian, penurunan kas secara signifikan terjadi di tahun 2022 dari sebelumnya Rp 1,1 triliun menjadi Rp 540 Milyar.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Selama kurun waktu 2018 – 2022, terdapat penurunan kewajiban jangka pendek pemerintah Kota Medan dengan penurunan mencapai 13,71% per tahun. Pemerintah Kota Medan selama periode tersebut tidak memperoleh kewajiban jangka panjang. Nilai dari hutang beban yang dimiliki Kota Medan secara stabil mengalami penurunan dengan tingkat penurunan sebesar 18,08% per tahun pada periode tersebut. Meskipun secara rata-rata terjadi penurunan hutang secara signifikan, perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2022 pemerintah Kota Medan menambah hutang jangka pendek sebesar 49,35% untuk memenuhi kegiatan pembangunan di Kota Medan. Peningkatan kewajiban jangka pendek terbesar terjadi sejak masa COVID-19 pada tahun 2020 dimana terjadi peningkatan utang perhitungan pihak ketiga dari sebelumnya pada tingkat Rp 37 Juta menjadi Rp 124 Juta. Sejalan dengan hal tersebut pembangunan dalam bentuk konstruksi dalam pengerjaan (KDP) meningkat.



Gambar 3.15.
Proporsi Kewajiban dan Ekuitas dalam Pembiayaan Aset Kota Medan Tahun 2018 - 2022

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Medan terkategori baik dimana pembiayaan atau pengadaan aset bersumber dari ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Pertumbuhan aset yang dimiliki Kota Medan dipenuhi secara garis besar melalui ekuitas yang dimiliki. Proporsi beban hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang kurang dari satu persen dari total aset pemerintah Kota Medan. Meskipun secara umum di tahun 2022 terjadi peningkatan hutang, nilai proporsi hutang atau kewajiban pemerintah Kota Medan hanya berada pada tingkat 0,51%.

Tabel 3.12.
Rasio Keuangan Daerah Kota Medan 2018 - 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio lancar (*current ratio*)	Kali	4,71	10,46	16,66	21,2	9,88
2	Rasio quick (*quick* ratio)	Kali	4,45	9,32	14,92	19,44	8,60
3	Rasio total hutang terhadap total aset	Persen	0,98	0,37	0,31	0,34	0,51
4	Rasio hutang terhadap Modal	Persen	0,99	0,37	0,31	0,35	0,51

Hasil evaluasi neraca daerah berdasarkan rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa secara umum Neraca Kota Medan berada pada posisi yang

baik. Evaluasi *current ratio* menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kemampuan aset lancar Kota Medan mampu menutupi sampai dengan 9,88 kali dari posisi hutang lancar yang dimiliki Kota Medan. Pemerintah Kota Medan masih sangat mampu membiayai kewajiban jangka pendek dengan sangat baik. Analisis *Quick Ratio* dengan mengabaikan *inventory* atau persediaan dari aktiva cepat juga menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi, yaitu mencapai 8,60 kali dari kewajiban jangka pendek tersebut. Meskipun pergerakan rasio lancar dan rasio cepat ini mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021, tetapi kemampuan keuangan Kota Medan masih mampu dengan baik memenuhi kewajibannya sehingga tidak ada indikasi permasalahan keuangan. Hasil evaluasi *debt to aset ratio* atau total hutang terhadap aset menunjukkan bahwa komposisi hutang dalam pembiayaan aset hanya 0,51% di tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan pembiayaan aset secara mandiri melalui ekuitas yang tersedia. Evaluasi *debt to equity* sebagai bentuk *leverage* keuangan juga menunjukkan bahwa tidak terjadi permasalahan keuangan dimana rasio hutang terhadap modal yang dimiliki Kota Medan sangat kecil.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tecermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2018-2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2018-2022, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
7. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
8. mengembangkan Alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.
9. melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya

peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan kota.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
c. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
e. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Medan adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan atas data 5 (lima) tahun sebelumnya (2018-2022) terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pendapatan transfer ke

depan masih cukup tinggi dengan rata-rata sumber pendapatan daerah melalui pendapatan transfer sebesar 60,12% dengan proporsi 57,91% pada tahun 2022. Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan sampai dengan tahun 2026 pemerintah perlu mengupayakan agar meningkatnya fungsi Kota Medan sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Penggunaan belanja operasi tersebut tercermin dalam RAPBD Pemerintah Kota Medan tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang untuk menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah pada tahun 2023-2026 diarahkan kepada program kebutuhan infrastruktur dasar, sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang Dan Karo, bahwa Kota Medan diperuntukkan sebagai Kawasan Perkotaan inti yang terdiri dari pusat-pusat kegiatan utama dan sebagai pendorong pengembangan kawasan perkotaan sekitar. Sedangkan belanja operasi penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social, sedangkan belanja modal diarahkan untuk belanja tanah, belanja perlatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan

dan belanja aset tetap lainnya, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Tahun 2023-2026 sebagai perubahan terhadap pengelolaan keuangan tahun 2021 - 2026 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja belanja operasi, belanja barang jasa, belanja transfer dan belanja hibah.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2023-2026 adalah: Belanja operasi mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk beberapa tahun ke depan. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan operasi lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja modal mulai tahun anggaran 2023 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2023 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah tahun 2023-2026 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi kota. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang

dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat sejak tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

Selanjutnya sejak awal tahun 2020 penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan dalam memproyeksi penerimaan tahun 2023-2026 juga harus melakukan penyesuaian akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data realisasi pendapatan daerah sebelumnya dan mengaitkan dengan data indikator makro sebagai informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran 2023-2026, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

   Laju pertumbuhan pendapatan Kota Medan selama periode 2018 sampai dengan periode 2022 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 7,50% setiap tahunnya. Pendapatan Kota Medan tahun 2018 berada pada tingkat Rp 4.253,62 Trilyun dan tumbuh menjadi Rp 5.460,78 Trilyun pada tahun 2022. Laju pendapatan ini didukung kemampuan Kota Medan menghasilkan pertumbuhan PAD yang mencapai 9,62% secara rata-rata setiap tahunnya. Keberhasilan peningkatan PAD ini juga didukung dengan pengoptimalan pendapatan melalui pajak daerah. Sementara itu retribusi daerah selama lima tahun terakhir masih belum optimal.

2. Asumsi indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi serta penyerapan tenaga kerja di Kota Medan

   Kota Medan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai salah satu dampak COVID-19 yang mencapai kontraksi sebesar 1,98%. Kota Medan

bangkot dari kontraksi ini dan membawa pertumbuhan positif selama tahun 2021 dan tahun 2022 pada tingkat 2,62% dan 4,71% secara berurutan. Tren pertumbuhan ini mendukung optimisasi perekonomian di Kota Medan. Kondisi ini akan mendukung peningkatan PAD dalam bentuk pajak dan retribusi atas berbagai aktivitas dan pelayanan yang diberikan Kota Medan. Kondisi inflasi yang relatif terkendali dengan target inflasi yang kecil membuat daya tarik pertumbuhan ekonomi semakin memungkinkan peningkatan pendapatan daerah nantinya. Selain itu penyerapan tenaga kerja dengan tren penurunan pada tingkat pengangguran terbuka memberikan potensi peningkatan aktivitas perekonomian yang turut akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

   Kota Medan berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan titik parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir di Kota Medan. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata di Kota Medan. Dalam hal intensifikasi pendapatan daerah, Kota Medan berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal atau tarif optimal yang dapat mendukung penerimaan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan fungsi-fungsi penerimaan pendapatan retribusi daerah seperti penertiban parkir.

4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

   Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah.

Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2023 -2026 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2023 – 2026 (Rp. Milyar)

No	URAIAN	Tren Pertumbuhan	2022	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**7,50%**	**5.449.340.586.723**	**7.294.976.452.009**	**7.576.220.158.468**	**7.979.465.103.912**	**8.225.055.413.336**
01.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**9,62%**	**2.230.554.495.747**	**3.753.978.656.388**	**3.770.971.775.437**	**4.255.448.739.916**	**4.671.831.474.775**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	14,40%	1.961.927.116.116	3.101.456.231.350	3.217.779.709.433	3.646.937.467.312	4.002.469.074.910
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	-1,32%	113.129.542.274	332.266.850.967	330.360.436.004	363.396.479.604	399.736.127.565
01.01.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	18,12%	17.677.645.360	23.906.630.000	26.456.630.000	29.102.293.000	32.012.522.300
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-12,22%	137.820.191.997	296.348.944.071	196.375.000.000	216.012.500.000	237.613.750.000
01.02	**Pendapatan Transfer**	**4,84%**	**3.150.952.726.119**	**3.435.145.619.543**	**3.699.396.206.953**	3.618.164.187.918	3.447.371.762.483
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-0,76%	2.092.558.622.879	2.504.234.375.590	2.717.484.963.000	2.624.593.547.929	2.415.737.300.159
01.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16,06%	1.058.394.103.240	930.911.243.953	981.911.243.953	993.570.639.989	1.031.634.462.324
01.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-
01.02.04	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
01.03	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**-28,63%**	**67.833.364.857**	**105.852.176.078**	**105.852.176.078**	**105.852.176.078**	**105.852.176.078**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2023-2026 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2023-2026 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase berfluktuasi dengan memperhatikan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Medan.

Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan diproyeksikan mencapai sebesar Rp 3,76 Trilyun dan tahun 2026 ditargetkan mencapai PAD sebesar Rp 4,11 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 5,68% per tahun. Porsi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Medan setiap tahunnya meningkat hingga pada tahun 2026 mencapai proyeksi 51,57% dari total pendapatan Kota Medan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Sementara itu, ditinjau dari proporsi sumber PAD, Pajak Daerah tetap menjadi andalan utama Pemerintah Kota Medan dalam penerimaan PAD tahun 2023-2026. Proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD rata-rata per tahun sebesar 84,22% sedangkan yang paling rendah berasal dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata sebesar 0,66% dari PAD proyeksi Kota Medan. Masih rendahnya sumber PAD dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan karena investasi Pemerintah Kota Medan masih terbatas pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Medan. Oleh karena itu, diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kota Medan yang mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Medan.

3.3.2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Nilai pendapatan transfer Kota Medan diproyeksikan pada tahun 2026 akan mencapai Rp 3,76 triliun.

3.3.3. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD di antaranya melalui :

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketetapan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
5. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
7. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal

dalam satu tahun anggaran.

8. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
9. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD penghasil.
10. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
11. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.
12. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
13. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
2. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain

pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.3.4. Proyeksi Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam memproyeksikan belanja daerah harus memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Adapun analisis proyeksi belanja daerah Kota Medan disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.14.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2022 – 2026 (Rp)

No	Uraian	Baseline (2022)	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
2	**Belanja**	**6.047.157.448.152,00**	**7.843.535.109.640,00**	**8.026.297.907.872,00**	**8.335.552.128.231,06**	**8.433.167.067.336,00**
02.01	Belanja Operasi	4.411.403.212.140,00	5.354.067.070.201	5.655.335.238.257	5.921.135.994.455,08	6.009.823.006.808,81
02.02	Belanja Modal	1.617.535.812.652,00	2.416.144.593.467	2.300.962.669.615	2.346.002.537.790,11	2.356.480.916.016,94
02.03	Belanja Tak Terduga	18.218.423.360,00	73.323.445.972	70.000.000.000	68.413.595.985,87	66.863.144.510,25
02.04	Transfer	-	-	-	-	-

3.3.5. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.3.6. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Proyeksi pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Medan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Tabel 3.15.
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Medan Tahun 2022 – 2026 (Rp)

No	Uraian	2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	5.449.280.586.723,00	7.294.976.452.009,00	7.576.220.158.468,00	7.979.465.103.912,00	8.225.055.413.336,00
2	Belanja	6.047.157.448.152,00	7.843.535.109.640,00	8.026.297.907.872,00	8.335.552.128.231,06	8.433.167.067.336,00
	Surplus (Defisit)	-597.876.861.429,00	-548.558.657.631,00	-450.077.749.404,00	-356.087.024.319,06	-208.111.654.000,00
3	Pembiayaan					
03.01	Penerimaan Pembiayaan	1.146.435.519.060,23	548.558.657.631,00	450.077.749.404,00	356.087.024.319,06	208.111.654.000,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0				
	SiLPA	**560.059.320.631**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3.7. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana

cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diarahkan pada:

a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kajian isu strategis dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan kota Medan. Permasalahan pembangunan kota menggambarkan kinerja pemerintah kota atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Medan pada masa lima tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diatasi. Tujuan dan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan ini diselaraskan dengan agenda pembangunan yang merupakan visi, misi dan arahan presiden pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan pembangunan di Kota Medan meliputi:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi.

   Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kota Medan mencapai tingkat pertumbuhan 5,93% yang melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi

Sumatera Utara dan Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 membuat perekonomian di Kota Medan berkontraksi sebesar 1,98%. Pencapaian pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi telah pulih namun melambat pada tingkat 4,71%. Angka ini masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara regional maupun nasional. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi nasional antara 5,3 - 5,7% per tahun masih belum dicapai oleh Kota Medan. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Medan cenderung menempati peringkat terakhir bila dibandingkan dengan kota lain yang setingkat dengan Kota Medan, seperti Kota Surabaya, Makasar, dan Palembang. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara kota tersebut adalah Kota Surabaya sebesar 6,51%, sementara Kota Medan sebesar 4,71%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor primer, industri pengolahan, konstruksi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Fokus yang menjadi perhatian dalam permasalahan ini adalah perlambatan pada industri pengolahan di Kota Medan.

2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka.

   Indonesia menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat menurun ke tingkat 5,0 - 5,7%. Pada tahun 2022 TPT Indonesia menurun ke tingkat 5,86% dan 6,16% pada Provinsi Sumatera Utara. Hasil capaian TPT Kota Medan pada tahun 2022 berada pada tingkat 8,89%. Meskipun angka ini berhasil menurun dari tahun 2021 yang berada pada tingkat 10,81%. Pada tahun 2022, Kota Medan menduduki peringkat kedua Tingkat Pengangguran tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa kota lain setingkat, yaitu Bandung, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Angka ini belum optimal mengingat target dan capaian Nasional serta Provinsi Sumatera Utara sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengakibatkan melambatnya penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu peralihan sektor padat karya menjadi padat modal membuat kesempatan kerja tidak tercipta secara optimal. Kota Medan perlu mengambil langkah dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja ke depannya.

3. Belum tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat.

   Pembangunan Indonesia menargetkan perbaikan nilai Rasio Gini menjadi 0,374 - 0,377 sehingga ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat menurun. Data pada Maret 2022 menunjukkan bahwa nilai Gini Indonesia berada pada angka 0,384 dan Sumatera Utara pada angka 0,312. Pada Maret 2022 pencapaian nilai Rasio Gini Kota Medan berada pada angka 0,399. Secara umum pencapaian Kota Medan berada di bawah provinsi dan nasional. Sementara, jika dibandingkan dengan kota lain yang setingkat, meliputi Kota Bandung, Makassar, Palembang, dan Surabaya, Kota Medan memiliki gini rasio yang tertinggi dan yang terendah adalah Kota Palembang sebesar 0,347. Penyelesaian ketimpangan pendapatan di Kota Medan masih belum optimal dilaksanakan. Nilai Gini Kota Medan pada tahun 2020 pernah mencapai angka 0,320 namun kembali meningkat pada tahun 2021. Ketimpangan pendapatan di Kota Medan mengalami peningkatan. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan.

4. Perlambatan penurunan emisi gas rumah kaca

   Sesuai dengan amanat pembangunan nasional, diharapkan terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%. Pada tahun 2022 Kota Medan mengalami perlambatan penurunan gas emisi tersebut menjadi 0,283% yang menurun dari 4.021 gg CO_2 menjadi 4.009 gg CO_2. Jika dibandingkan dengan beberapa kota setingkat, seperti Kota Bandung, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya, Kota Medan memiliki emisi terendah, Pemerintah Kota Medan telah menyusun program pengendalian pencemaran dengan indikator capaian penurunan emisi gas rumah kaca. Sayangnya program ini tidak termasuk sebagai prioritas sehingga terdapat keterbatasan dalam upaya pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Kota Medan setiap tahunnya menargetkan penurunan sekitar 25% emisi. Pada tahun 2020 pemerintah Kota Medan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25,79% namun sulit menjaga konsistensi penurunan dengan tingkat tersebut.

5. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.

   Kemiskinan menjadi permasalahan pada tingkat nasional yang harus diselesaikan menuju *zero poverty* pada program SDGs. Secara nasional

Indonesia menargetkan tingkat kemiskinan pada angka 6,5-7,5%. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,54% dan Sumatera Utara pada angka 8,42%. Dalam hal ini Kota Medan berhasil menekan angka penduduk miskin pada angka 8,07%. Pencapaian Kota Medan sudah lebih baik daripada nasional maupun provinsi. Namun, apabila dibandingkan dengan beberapa kota lain yang setingkat, meliput Kota Bandung, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya, Kota Medan menempati posisi kedua kemiskinan tertinggi. Pencapaian tersebut masih belum sesuai dengan target nasional pada tingkat 6,5 - 7,5%. Permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan dengan skala nasional yang harus ditangani bersama. Selain permasalahan ini Kota Medan juga fokus dalam mengendalikan kemiskinan ekstrim.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib

4.1.1.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan pendidikan di Kota Medan meliputi:

1. Belum meratanya pendidikan pada tingkat PAUD. APK PAUD tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan target pembangunan SDGs yang menargetkan 100% APK pada tahun 2030. APK PAUD usia 3-6 tahun berdasarkan neraca pendidikan daerah pada tahun 2018 sebesar 29,04 persen mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 24,51 persen. Namun, pada tahun berikutnya APK PAUD mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 29,30 persen.
2. Menurunnya partisipasi masyarakat memperoleh pendidikan jenjang SMP. Tingkat APM SMP/MTS belum mencapai 100% sesuai amanat SDGs dengan APM 90,11% pada tahun 2022. Tren pertumbuhan yang ada menunjukkan tren menurun. Selain itu tingkat APM dari SD/MI ke SMP/MTS mengalami penurunan yang besar.
3. Belum meratanya kualitas tenaga pendidik khususnya pada jenjang PAUD. Kualifikasi jenjang pendidikan guru secara umum belum sepenuhnya memiliki pendidikan >= D4/S1. Pada tingkat pendidikan PAUD kualifikasi

guru dengan tingkat pendidikan D-IV atau S-1 mengalami peningkatan dari 57,40 persen pada tahun 2018 menjadi 64,10 persen pada tahun 2022. Pada jenjang pendidikan SD, guru dengan kualifikasi D-IV atau S-1 sebanyak 89,45 persen pada tahun 2018 meningkat pada tahun 2020 menjadi 96,51 persen. Pada jenjang pendidikan SMP, guru dengan kualifikasi D-IV atau S-1 mengalami peningkatan dari 95,58 persen pada tahun 2018 menjadi 97,72 persen pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan, namun masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi D-IV atau S-1, khususnya yang paling banyak pada jenjang pendidikan PAUD.

4. Belum meratanya sertifikasi tenaga pendidik di tingkat PAUD, SD dan SMP. Tingkat guru tersertifikasi di Kota Medan cukup rendah. Pada jenjang pendidikan PAUD, guru PAUD besertifikasi sebanyak 32,40 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 41,67 persen. Pada jenjang pendidikan SD, guru besertifikasi mengalami peningkatan dari 46,80 persen pada tahun 2018 menjadi 76,49 persen pada tahun 2022. Sementara, pada jenjang pendidikan SMP, guru besertifikasi pada tahun 2018 sebanyak 53,30 persen meningkat menjadi 66,33 persen pada tahun 2022.

4.1.1.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan pendidikan di Kota Medan meliputi:

1. Tingkat ketersediaan tempat tidur di Kota Medan untuk pelayanan kesehatan hanya terletak pada angka 3,75 per 1.000 penduduk. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, diperlukan setidaknya 5 tempat tidur per 1.000 penduduk.
2. Kasus penyakit di Kota Medan meningkat menjadi 45.248 kasus pada tahun 2022. Penyebab utama peningkatan kasus kesehatan tersebut disebabkan oleh penyakit diare yang mencapai 40.126 kasus.
3. Belum menyeluruhnya pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir dan balita. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan mengalami peningkatan dari 94,50 persen pada tahun 2018 mencapai 99,40 persen pada tahun 2022, sedangkan pada Balita juga cenderung meningkat dari 81,50 persen pada tahun 2018 menjadi 84,00 persen pada tahun 2022. Angka ini

belum optimal untuk memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh.

4. Masih terdapat kasus kematian ibu, bayi dan balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
5. Masih belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
6. Cakupan STOP BABS/ODF masih rendah.
7. Masih diperlukannya peningkatan pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain HIV AIDS, Tuberkulosis dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, ODGJ dan lainnya.
8. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.
9. Belum meratanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
10. Masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi.
11. Kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan asupan gizi berkualitas kepada anak

4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Medan meliputi:

1. Kualitas Jalan Kota belum sepenuhnya baik. Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap mengalami peningkatan dari 86,60 persen pada tahun 2018 menjadi 89,45 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 10,55 persen jalan kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat di Kota Medan.
2. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan, hal ini bisa mencerminkan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, dan mungkin belum diimbangi dengan pembangunan jalan yang memadai.
3. Tidak seimbangnya pertumbuhan wilayah antara pusat kota dan kawasan utara memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan pelayanan. Ketidakseimbangan ini tercermin dari ketimpangan fasilitas pelayanan dan distribusi pendapatan. Ini menunjukkan perlunya fokus pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Perbaikan

distribusi pendapatan antarwilayah merupakan aspek penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Medan.

4. Kejadian genangan/banjir masih menjadi salah satu permasalahan utama Kota Medan. Berdasarkan revisi masterplan jaringan drainase yang dilakukan oleh dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi Kota Medan, diketahui bahwa jumlah titik genangan/banjir adalah 2.575 titik yang tersebar di 940 ruas jalan. Sejumlah upaya berbentuk penanganan drainase telah dilakukan dimana pada tahun 2022 sisa titik genangan/banjir yang belum terselesaikan masih ada sebanyak 617 titik yang tersebar di seluruh Kota Medan.

4.1.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Medan meliputi:

1. Kecamatan Medan Barat, Medan Timur, Medan Kota, Medan Polonia, dan Medan Selayang mengalami keterbatasan lahan untuk pengembangan Pusat Kegiatan Pemukiman (PKP). Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan perumahan di kawasan tersebut.
2. Kota Medan masih memiliki permukinan kumuh yang belum tertangani. Pada tahun 2020 luas permukiman kumuh sebesar 819,80 hektar mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 306 hektar termasuk sebagai kawasan kumuh. Luas ini setara dengan 1,79% luas administrasi Kota Medan.
3. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh akses air bersih. Rumah Tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 83,82 persen pada tahun 2018 menjadi 72,58 persen pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa capaian yang diperoleh sejak tahun 2018 hingga 2022 menyisakan 27,42 persen rumah tangga yang masih belum memperoleh akses air bersih secara langsung.
4. Berkurangnya keberadaan kawasan layak huni di Kota Medan menjadi 96,9% dari luas wilayah mengindikasikan adanya tekanan terhadap ruang yang dapat dihuni dengan nyaman.

4.1.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Ketentraman

dan Ketertiban Umum di Kota Medan meliputi:

1. Banyak terjadi pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Medan. Pada tahun 2018 jumlah kasus pelanggaran sebanyak 4.942 kasus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 21.125 kasus. Kota Medan mengalami peningkatan pada pelanggaran ketertiban umum dan kesejahteraan sosial. Kasus pengemis, manusia silver, manusia boneka dan anak jalanan. Pelanggaran terhadap penggunaan trotoar dan umbul-umbul tanpa izin juga terjadi.
2. Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Masih tingginya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta unjuk rasa yang hal ini menunjukkan masih rendahnya dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.
4. Masih tingginya angka unjuk rasa yang terjadi dan cenderung terus meningkat dan berdampak negative ke sektor-sektor layanan lainnya.
5. Masih ditemukan konflik antar pemuda/ OKP/ Ormas sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan.
6. Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan.

4.1.1.6. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Sosial di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menangani permasalahan sosial. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi adalah sebesar 25,18%.
2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial secara target capaian indikator tidak stabil serta mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, dimana memiliki capaian sebesar 4,81% pada tahun 2018, 4.81% pada tahun 2019, 96,77% pada tahun 2020, 46,39% pada tahun 2021, dan 86,38% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental yang tidak

potensial.

3. Belum tersalurkannya bantuan sosial bagi PMKS di Kota Medan. Pada tahun 2018 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 35,19 persen meningkat pada tahun 2019 menjadi 38,22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak PMKS yang belum memperoleh bantuan sosial, yakni sebesar 61,78 persen.
4. Kurangnya sarana-prasarana sosial yang optimal seperti panti asuhan, panti jompo, serta panti narkoba.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan tenaga kerja di Kota Medan meliputi:

1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, perubahan teknologi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya investasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan penduduk. Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan cenderung meningkat dari 8,25 persen pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai angka 8,89%. Meskipun demikian, angka ini sudah menurun dari tahun 2021 yang mencapai 10,81% namun masih tergolong tinggi. TPT di Sumatera Utara tahun 2022 berada pada tingkat 3,16% yang artinya Kota Medan jauh lebih tinggi TPT-nya daripada Sumatera Utara secara umum.
2. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan yang layak, seperti PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga banyak hak-hak pekerja yang belum terpenuhi.
3. Menurunnya partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Medan pada tahun 2018 mencapai 64,35 persen dan menurun menjadi 62,23 persen pada tahun 2022.
4. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Tingkat penyerapan pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 sebesar 48,19 persen meningkat pada

tahun 2022 mencapai 64,71 persen. Tenaga kerja Kota Medan mayoritas memiliki jenjang pendidikan tertinggi SMA dimana saat ini tuntutan dunia kerja memerlukan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi. Kurangnya kepemilikan sertifikasi kompetensi juga mengarah kepada sulitnya penyerapan tenaga kerja.

4.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pengarusetaraan gender di Kota Medan. Secara umum Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Medan sudah berada di atas IPG Sumatera Utara (91,06) dan Indonesia (91,63) dengan nilai IPG 93,85. Meskipun demikian pengoptimalan IPG masih dapat ditingkatkan. Belum optimalnya pendataan organisasi perempuan serta program ke tingkat kecamatan dapat menjadi sumber permasalahan belum optimalnya indeks ini.
2. Masih sulitnya menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil di temukan telah mencapai 100%, namun diyakini masih banyak korban kekerasan yang belum ditemukan. Hal ini dikarenakan masih cukup banyak korban yang enggan melapor, serta tidak terdeteksi karena kurangnya kepedulian antar warga. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih massif serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lintas sektoral untuk meningkatkan jumlah penemuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan.
3. Meskipun terjadi peningkatan, TPAK wanita yang hanya mencapai 8,37% pada tahun 2022 dari sebesar 7,77% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam dunia kerja.

4.1.2.3. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pangan di Kota Medan meliputi:

1. Produktivitas pertanian pangan di Kota Medan mengalami penurunan menjadi 1.005,86 hektar. Konversi lahan pertanian membuat produksi pangan dari sumber pertanian Kota Medan mengalami penurunan.
2. Belum optimalnya keamanan pangan di Kota Medan. Hasil uji sampel yang dilakukan menunjukkan 97,6% pangan di Kota Medan tergolong aman. Meskipun demikian hasil ini juga memberikan gambaran bahwa pangan di Kota Medan belum sepenuhnya aman untuk dikonsumsi atau mengandung bahan tambahan berbahaya.
3. Pola pangan harapan yang belum optimal karena pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, simbang dan aman belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Skor PPH Masyarakat Kota Medan mencapai 92,29%.
4. Masih rendahnya penanganan rumah tangga rawan pangan yang hanya mencapai 0,68% dari jumlah penduduk rawan pangan. Belum optimalnya program penanganan rumah tangga rawan pangan menjadi permasalahan.
5. Belum tercapainya stabilitas harga pangan di seluruh Kota Medan. Koefisien keragaman harga di pasar-pasar Kota Medan selama satu tahun mencapai 2,68 yang mengindikasikan masih terjadi fluktuasi harga berdasarkan daerah dan periode harga pangan.
6. Perubahan iklim akibat pemanasan global sangat berdampak terhadap keberhasilan produksi pertanian dan siklus produksi, sebagai akibat jumlah produksi menjadi fluktuatif dan rentan mengakibatkan kerawanan pangan.
7. Pola konsumsi yang bergantung pada pangan pokok tertentu meningkatkan resiko kerawanan pangan pada saat jumlah produksi tidak dapat menyokong stok pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah.

4.1.2.4. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pertanahan di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pendataan lahan bersertifikat. Luas lahan bersertifikat di Kota Medan berada pada tingkat 64,08%.
2. Belum optimalnya penyediaan lahan untuk pembangunan dalam rangka penyediaan lahan untuk penanaman modal. Saat ini hanya tersedia 67,90% lahan untuk penanaman modal dari yang direncanakan.

3. Belum optimalnya pelaksanaan perizinan pemanfaatan lahan di Kota Medan. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebesar 67,90% yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal.

4.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Medan meliputi:

1. Kegiatan industri pengolahan dan tingginya jumlah kendaraan bermotor berpotensi menciptakan beban pencemaran udara yang signifikan.
2. Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan. Jumlah TPS yang aktif belum memenuhi persyaratan, perlu adanya penambahan TPS dan pengoptimalan TPS3R. Capaian pengangkutan sampah hingga ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) hanya 77,8%.
3. Belum optimalnya pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Meskipun secara umum IKLH di Kota Medan terus mengalami peningkatan hingga 69,74% di tahun 2022, laju pertumbuhan IKLH masih relatif lambat.
4. Pengolahan sampah di Kota Medan berada pada tingkat 85% yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum optimal. Target secara nasional mengupayakan sampah dapat diolah sampai dengan tingkat 100%. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengolahan limbah dan sampah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dirasakan masih belum optimal.
5. Pengoptimalan RTH belum sesuai dengan RTRW yang menargetkan 30% dari Kota Medan adalah ruang terbuka hijau. Saat ini RTH di Kota Medan baru mencapai angka 16%.

4.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pemberian layanan dan pendataan penduduk. Persentase

Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP di Kota Medan meningkat dari 31,35 persen pada tahun 2018 mencapai 99,21% pada tahun 2022. Penduduk Kota Medan belum sepenuhnya memiliki KTP

2. Belum semua penduduk memiliki akte kelahiran. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang Mempunyai Akte meningkat dari 75,20 persen pada tahun 2019 menjadi 83,02 persen pada tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pendaftaran kelahiran atau kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan.

4.1.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pengendalian jumlah penduduk di Kota Medan. Prevalensi peserta KB aktif menurun dari 67,23 persen pada tahun 2018 menjadi 63,00 persen pada tahun 2022. Terjadi penurunan signifikan dalam prevalensi peserta KB aktif di Kota Medan dari tahun 2018 hingga 2022. Penurunan ini mencerminkan kurangnya partisipasi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti kurangnya kesadaran, aksesibilitas, atau pengetahuan terkait.
2. Adanya tantangan dalam implementasi program keluarga berencana untuk pria. Keterlibatan pria dalam program KB penting untuk mencapai kesuksesan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Perlu adanya strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program ini.
3. Masih terdapat ketidakpastian terkait strategi bonus demografi yang belum terpetakan di Kota Medan, yang dapat menjadi tantangan dalam menghadapi perkembangan demografis setelah tahun 2035.
4. Laju pertumbuhan penduduk masih sulit ditekan. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Medan tahun 2022 mencapai 1,37%. Pertumbuhan penduduk dapat berasal dari aktivitas transmigrasi termasuk urbanisasi masyarakat menuju Kota Medan. Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat

memberikan tekanan pada sumber daya yang terbatas dan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, seperti pangan, air, perumahan, dan layanan publik lainnya.

5. Tidak optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam menggerakkan KB berbasis wilayah. Koordinasi yang baik antar sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, sangat penting untuk menyusun strategi yang komprehensif dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4.1.2.8. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Perhubungan di Kota Medan meliputi:

1. Belum terlaksananya pembangunan sarana transportasi BRT, LRT dan Kereta Api sesuai dengan RTRW. Perencanaan pembangunan transportasi untuk mendukung aksesibilitas yang lebih baik masih belum tuntas terlaksana.
2. Belum optimalnya pembuatan PJU di Kota Medan. Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik belum mencapai 100%.
3. Belum optimalnya pengelolaan parkir kendaraan umum. Kota Medan belum mendata seluruh potensi parkir dan memberikan pelayanan parkir yang baik untuk mendukung aktivitas masyarakat.
4. Belum optimalnya Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kota Medan. Pada tahun 2022, kebutuhan APJ sudah terpenuhi sebanyak 73,23 persen, yakni sebanyak 90.835 APJ.

4.1.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Medan. Pada tahun 2019 nilai SPBE Kota Medan sebesar 1,43 (cukup) mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 3,45 (baik) , namun pada tahun 2022 dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,76 (Baik). Terjadi penurunan dari beberapa aspek yang menjadi penilaian indeks SPBE.
2. Tidak adanya penilaian keterbukaan informasi publik selama pandemi COVID-19 (2020-2021) bisa mencerminkan kesulitan atau perubahan fokus

prioritas di tengah situasi darurat. Perlu ditetapkan strategi dan upaya yang dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi publik di kondisi tersebut.

3. Penurunan dan peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator dapat menunjukkan adanya potensi tantangan teknis atau manajerial dalam implementasi sistem informasi dan teknologi di Kota Medan. Diperlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala tersebut.

4.1.2.10. Urusan Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan persandian di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya anusia dalam bidang persandian untuk mengamankan informasi berbasis IT.
2. Belum optimalnya layanan persandian dalam meningkatkan layanan kemananan informasi internal di dalam tata kelola pemerintahan.

4.1.2.11. Urusan Koperasi dan UKM

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Koperasi dan UKM di Kota Medan meliputi:

1. Kualitas dan produktivitas Lembaga koperasi di Kota Medan masih rendah seperti dari sisi pengelolaan manajemen, modal dan pendanaan serta masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah koperasi sehat di Kota Medan yang mengalami penurunan dari 26 persen ditahun 2021 menjadi 25 persen ditahun 2022.
2. Kualitas dan produktivitas pelaku usaha yang masih rendah, seperti kurangnya pemahaman kapasitas daya saing dan inovasi teknologi, akses pasar dan informasi, akses permodalan, manajemen yang cenderung masih bersifat sederhana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam Urusan Penanaman Modal di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya peluang promosi peluang investasi di Kota Medan. Permasalahan muncul karena banyak dari peluang investasi yang ada belum dilengkapi dengan studi kelayakan untuk menarik perhatian investor.

2. Iklim penanaman modal belum didukung infrastruktur pelayanan yang optimal. Infrastruktur pelayanan yang terbatas membuat interaksi dengan investor terhambat.
3. Menurunnya persentase peningkatan investasi di Kota Medan. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 persentase peningkatan investasi di Kota Medan fluktuatif setiap tahunnya dari -63,47 persen pada tahun 2018 menjadi -30,64 persen pada tahun 2022. Iklim investasi di Kota Medan dirasakan belum kondusif pasca *recovery* COVID-19.

4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pemuda dan Olahraga di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan Kota Medan. Salah satu pemicu rendahnya paritisipasi pemuda adalah rendahnya fasiltias yang diberikan untuk kegiatan kepemudaan. Banyak organisasi kepemudaan yang tidak terakomodir dan belum dibina. Keterbatasan anggaran dan SDM untuk organisasi kepemudaan menjadi catatan.
2. Menurunnya jumlah atlet yang berprestasi dari seluruh atlet yang dibina. Pada tahun 2018 akumulasi atlet yang dibinda dan berprestasi sebesar 5,970 persen cenderung meningkat hingga tahun 2021 menjadi 10,686 persen. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, yakni sebesar 6,979% atlet yang dibina dan berprestasi.
3. Belum meratanya sarana dan prasarana olahraga. Banyak sarana belum operasional karena pembangunan dan rehabilitasi. Konflik pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian.
4. Belum optimalnya kapasitas organisasi kepramukaan.

4.1.2.14. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Statistik di Kota Medan meliputi:

1. Penerapan *single data* melalui akses *medansatudata* untuk penyajian data lintas sektoral bagi seluruh data Kota Medan masih belum optimal pemanfaatannya. Ketersediaan data belum memberikan keterbukaan data

secara menyeluruh.

2. Standar kualitas data dan penyajian data yang diberikan masih belum optimal. Belum adanya standarisasi penyajian dan pelaporan data membuat kualitas data belum optimal. Diperlukan pedoman yang mengatur secara jelas standar penyajian data untuk bidang statistik. Keterkaitan data antar bidang yang belum optimal membuat analisis sektoral sulit tercapai.

4.1.2.15. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Kebudayaan di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya di Kota Medan. Cagar Budaya yang Dilestarikan mengalami penurunan dari 42 persen pada tahun 2018 menjadi mencapai 32,07 persen dari target yang diharapkan 86,61 persen pada tahun 2020 Banyaknya situs dan cagar yang masih milik pribadi sehingga menyulitkan intervensi dari pemerintah.
2. Pelestarian budaya di Kota Medan cenderung mengalami penurunan. Tingkat pelaksanaan festival seni dan budaya di Kota Medan sangat rendah, berdasarkan data hanya terlaksana 0-2 kegiatan setiap tahunnya.
3. Belum terintegrasinya kebudayaan dengan pariwisata di Kota Medan. Promosi kebudayaan belum secara optimal tercermin dalam aktivitas pariwisata. Kota Medan belum memiliki paket wisata terpadu yang dikelola pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan kebudayaan dalam konteks pariwisata.

4.1.2.16. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Perpustakaan di Kota Medan meliputi:

1. Rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan di Kota Medan. Pada tahun 2020 ditargetkan tingkat kunjungan sebesar 1,41% namun hanya terealisasi 0,75% yang menurun dari tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penurunan kunjungan perpustakaan. Akses virtual perpustakaan Kota Medan belum tersedia.
2. Rendahnya nilai budaya baca. Nilai budaya baca Kota Medan pada tahun

2019 sebesar 2,78 persen.

3. Koleksi buku di perpustakaan daerah belum optimal. Tercatat hanya tersedia 25,25% koleksi buku tersedia di Perpustakaan daerah. Digitalisasi Perpustakaan belum optimal dilakukan untuk meningkatkan koleksi buku.

4.1.2.17. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Kearsipan di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat daerah. Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku hanya mencapai 28,35%. Pengelolaan arsip belum terlalu diperhatikan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah.

4.1.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pilihan dalam bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Medan meliputi:

1. Produktivitas budidaya pertanian belum optimal. Kota Medan masih memiliki lahan pertanian non-produktif dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang belum terdata secara optimal. Pemanfaatan lahan belum menerapkan teknologi sehingga kurang optimal dalam pemanfaatan lahannya. Kurangnya modal usaha serta benih berkualitas dan pengetahuan terkait produk pertanian menjadi akar permasalahan dari produktivitas pertanian.
2. Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Medan. Peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan, perindustrian dan infrastruktur lain membuat peralihan lahan pertanian. Selain itu kesalahan budidaya membuat kualitas lahan menurun.
3. Jumlah petani semakin berkurang. Pendapatan dari sektor non-pertanian lebih diminati masyarakat.
4. Rendahnya sarana dan prasarana produksi pertanian. Harga yang tinggi menjadi sumber permasalahan. Pengolahan ikan memerlukan modal yang besar sehingga hasil laut lebih banyak dijual dalam bentuk mentah.

5. Kegiatan pertanian dan perikanan masih ada di Kota Medan dan par apelaku usahanya membutuhkan dukungan secara berkelanjutan guna memelihara kegiatan pertanian dan perikanan.

4.1.3.2. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pilihan dalam bidang Perdagangan di Kota Medan meliputi:

1. Peluang ekspor masih belum dapat dimaksimalkan untuk komoditas UMKM Kota Medan. Banyak pelaku usaha yang belum mumpuni secara teknis terkait mencari pasar dan melakukan perdagangan dalam dan luar negeri.
2. Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting. Kota medan belum memiliki pemantauan dan pengawasan harga serta stok barang yang optimal dan efisien.

4.1.3.3. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pilihan dalam bidang Pariwisata di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya daya tarik wisata karena kurangnya aksesibilitas, sarana dan prasarana yang belum optimal dalam memberikan layanan, kurangnya SDM lokal dengan keahlian wisata, regulasi terkait pengelolaan tempat wisata serta kurangnya investasi pada sektor pariwisata.
2. Belum optimalnya kegiatan Ekonomi kreatif di kota Medan dikarenakan kurangnya fasilitas infrastruktur pendukung, perlindungan hak kekayaan intelektual, pembinaan dan akses pembiayaan.

4.1.3.4. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pilihan dalam bidang Perindustrian di Kota Medan meliputi:

1. Standar kualitas produk IKM masih harus ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha industri dalam menerapkan standar industri membuat kualitas produk IKM tidak memenuhi standar.
2. Masih kurangnya produk IKM berpotensi ekspor. Pemahaman pelaku usaha dalam menganggapi pasar ekspor masih relatif rendah. Pendataan dan pembinaan IKM berpotensi ekspor masih belum optimal diterapkan.

4.1.4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Penunjang

4.1.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan adalah:

1. Masih perlunya peningkatan sinergi antara lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *new normal*.
2. Masih diperlukanya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.

4.1.4.2. Urusan Perencanaan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah:

1. Koordinasi yang belum optimal dengan perangkat daerah sehingga penyusunan dokumen perencanaan kurang maksimal.
2. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Penurunan tingkat capaian indikator sasaran RPJMD dari tahun 2021 ke tahun 2022 dapat menandakan adanya kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan perencanaan pembangunan. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan tersebut.
3. Terbatasnya SDM Fungsional Perencana.

4.1.4.3. Urusan Keuangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah:

1. Belum optimalnya pencapaian target PAD dari beberapa sektor pendapatan daerah
2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendapatan objek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan
3. Pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah belum optimal
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah sehingga menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

4.1.4.4. Urusan Kepengawasan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengawasan adalah:

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa perangkat daerah.
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dalam penyelenggaraan program kegiatan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan IT dalam system pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.
4. Perlunya peningkatan kompetensi auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Medan.

4.1.4.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah adanya perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan pembangunan perkotaan yang secara terus menerus dan mengikuti perkembangan, sehingga dibutuhkan penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan.

4.1.4.6. Urusan Kepegawaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian adalah:

1. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai.
2. Serta Penempatan PNS yang belum sesuai dengan agenda reformasi birokrasi.
3. Manajemen SDM yang belum optimal.
4. Penempatan PNS yang belum sesuai dengan agenda reformasi birokrasi.

4.2. Isu Strategis

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, diperlukan telaah serta keterkaitan antara rencana pembangunan dalam menjawab isu-isu strategis dalam ruang lingkup Internasional, Regional, Nasional dan isu strategis daerah. Isu-isu strategis tersebut menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan untuk menentukan program prioritas dalam menyelesaikan isu-isu yang muncul bagi pembangunan daerah.

4.2.1. Isu Strategis Pertumbuhan Berkelanjutan

Pemerintah dunia mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) sebagai tindak lanjut dari pembangunan *millenium development goals* yang belum sepenuhnya tercapai. Pencanangan program SDGs tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda Sustainable Development Goal's (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB. Sebagai komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, SDGs memiliki 17 tujuan yang hendak dicapai yang disusun dalam 169 target serta 240 indikator. Tujuh belas tujuan dalam SDGs dirangkum dalam Gambar berikut:



Gambar 4.1.
Tujuan Sustainable Development Growths

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang menyejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan. Indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif

dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
18. Dari 17 tujuan SDGs tersebut dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan tata pemerintahan yang baik. Fokus pencapaian yang diharapkan dalam memenuhi isu strategis SDGs meliputi:
19. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;
20. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;
21. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana; dan
22. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang.

4.2.2. Isu Strategis Perekonomian Global

Isu strategis internasional dalam ruang lingkup global dipengaruhi oleh

perkembangan dunia saat ini. Isu-isu yang perlu menjadi perhatian meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingkat inflasi yang tinggi, pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat, serta harga komoditas dunia yang mengalami ketidakpastian tinggi.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian dunia sudah mulai mengalami *recovery* selama tiga tahun pandemi COVID-19 menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Sebelumnya pada tahun 2020 ekonomi dunia sempat mengalami kontraksi hingga tingkat 3,12%. Pada tahun 2021 perekonomian mulai pulih dan meningkat sebanyak 5,87%. Perkembangan isu dunia seperti perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok membuat aktivitas perekonomian kembali mengalami perlambatan pertumbuhan perekonomian. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh berbagai faktor yang sulit ditentukan membuat pengambilan keputusan serta kondisi keuangan di berbagai belahan dunia mengalami *financial turmoil*.

Laporan World Economic Outlook Update yang terbit pada April 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 melemah ke tingkat 3,4% dari sebelumnya tumbuh mencapai 5,87%. Proyeksi ekonomi dunia yang dilakukan oleh IMF tersebut juga menunjukkan bahwa tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi akan terus melambat meskipun tidak mencapai pertumbuhan yang negatif. Kondisi yang sama juga terjadi pada kelompok ASEAN-5 yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Isu yang perlu diperhatikan selain perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah tingkat inflasi yang terjadi di dunia. Pada tahun 2022 tercatat inflasi mencapai 8,7% yang melebihi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 5,87% pada tahun 2022 tersebut. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi secara riil tidak terjadi pada tahun 2022. Tingkat inflasi diprediksi akan tetap tinggi mencapai 7% pada tahun 2023 namun perlahan akan terkendali. Pemerintah mengambil berbagai kebijakan, salah satunya melalui peningkatan tingkat suku bunga untuk mengurangi tingkat inflasi yang terjadi. Langkah kebijakan ini juga menjadi perhatian dalam arah pengembangan perekonomian ke depannya. Peningkatan tingkat suku bunga sebagai salah satu kebijakan *tight money policy* untuk mengurangi uang beredar

dapat menurunkan insentif terhadap perekonomian sekaligus menjadi pemicu perlambatan pertumbuhan perekonomian.

Isu terakhir yang harus menjadi perhatian adalah ketidakpastian harga komoditas akibat banyak faktor yang terjadi. Perang antara Rusia dan Ukraina membuat aliran barang dan jasa menjadi sulit untuk diprediksi. Sulitnya estimasi penawaran serta ketersediaan barang dan jasa mengakibatkan harga komoditas yang ada menjadi berfluktuasi dengan sangat tinggi. Pergerakan harga minyak dunia pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga 39,2% akibat ketidakpastian dan perang yang terjadi. Meskipun demikian IMF memproyeksikan bahwa nilai ini akan mengalami penurunan signifikan hingga pada tingkat -24,1% pada tahun 2023 mendatang. Harga komoditas lainnya tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,4% dan diprediksi akan turun hingga -2,8% pada tahun 2023.

4.2.3. Isu Strategis ASEAN

Sejak tahun 2016, Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menyepakati untuk membentuk dan memberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal juga dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberlakuan tersebut menjadi langkah awal bagi seluruh negara ASEAN untuk mengembangkan potensi perekonomian di kawasan ASEAN. MEA menjadi pisau bermata ganda bagi Indonesia yang memberikan peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Di satu sisi MEA menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain secara inklusif. Di sisi lain hal ini juga menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

Perwujudan dari MEA dalam aktivitas perdagangan di dalam lingkungan ASEAN menjadi tidak lagi dibatasi oleh peraturan-peraturan antar negara. Negara-negara ASEAN membentuk kesepakatan dengan menyepakati ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) atau kesepakatan area perdagangan bebas ASEAN. AFTA menjadi implementasi bagi negara-negara ASEAN yang terbentuk dalam MEA untuk melakukan perdagangan secara bebas. Konteks bebas dalam hal ini adalah tidak adanya barrier dalam perdagangan antar negara-negara yang

tergabung dalam MEA tersebut. Indonesia dapat menjual produk ke Malaysia tanpa ada tarif ekspor ke negara tujuan tersebut dan berlaku sebaliknya. Dengan kata lain implementasi AFTA melalui MEA membuat perdagangan di kawasan ASEAN menjadi semakin luas dan bebas. Harapan yang hendak dicapai melalui MEA dan AFTA ini adalah peningkatan kapabilitas ekspor dan mendukung perdagangan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dalam pasar ASEAN. Sayangnya, kesepakatan ini tetap menjadi peluang dan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi Indonesia dapat menjual dengan mudah ke negara ASEAN tetapi di sisi lain negara-negara ASEAN juga dapat memasarkan produknya dengan lebih mudah di Indonesia, terkhusus produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dari Indonesia.

Dari sisi Pasar Tenaga Kerja juga dimungkinkan hal yang sama. Tenaga kerja Indonesia secara bebas bersaing dalam bursa tenaga kerja dalam ruang lingkup ASEAN. Dengan kata lain, SDM yang dimiliki suatu negara harus dipersiapkan sebaik mungkin agar dapat bersaing dalam persaingan tingkat regional ASEAN. Tenaga kerja Indonesia berkesempatan untuk bersaing dan memperoleh pekerjaan di negara-negara ASEAN. Konsekuensinya adalah persaingan itu sendiri menjadi semakin luas. Hal ini membangun isu bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota Medan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dalam persaingan regional tersebut.

Dalam menghadapi isu MEA dan AFTA, Pemerintah Kota Medan harus mengupayakan pembangunan masyarakat Kota Medan yang siap dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemerintah perlu mengupayakan peningkatan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing secara kompetitif di pasar ASEAN. Selain itu pemerintah perlu membina pelaku usaha untuk mencari pasar dan melakukan penetrasi pasar di lingkungan ASEAN. Selain memastikan produk berkualitas dan berdaya saing, pelaku usaha juga harus dibekali kemampuan untuk memasuki pasar tersebut. Pemerintah Kota Medan juga perlu melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kota Medan siap bersaing dalam pasar yang lebih luas.

4.2.4. Isu Strategis Perkembangan Teknologi

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Saat ini teknologi telah berkembang pesat dan siap menggantikan berbagai sektor tenaga kerja. Perkembangan artificial intelligence serta automatization dan internet of things dalam revolusi industri 4.0 memungkinkan remote access bagi berbagai pekerjaan. Tenaga kerja tidan terampil mulai tergantikan oleh mesin di lingkungan kerja.

Hadirnya revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini. Pemerintah Kota Medan harus mampu menjawab perkembangan teknologi yang pesat dengan kesiapan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi tersebut untuk membangun kesempatan kerja serta produktivitas yang lebih baik lagi.

4.2.5. Isu Nasional Pemerintahan

4.2.5.1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-3)

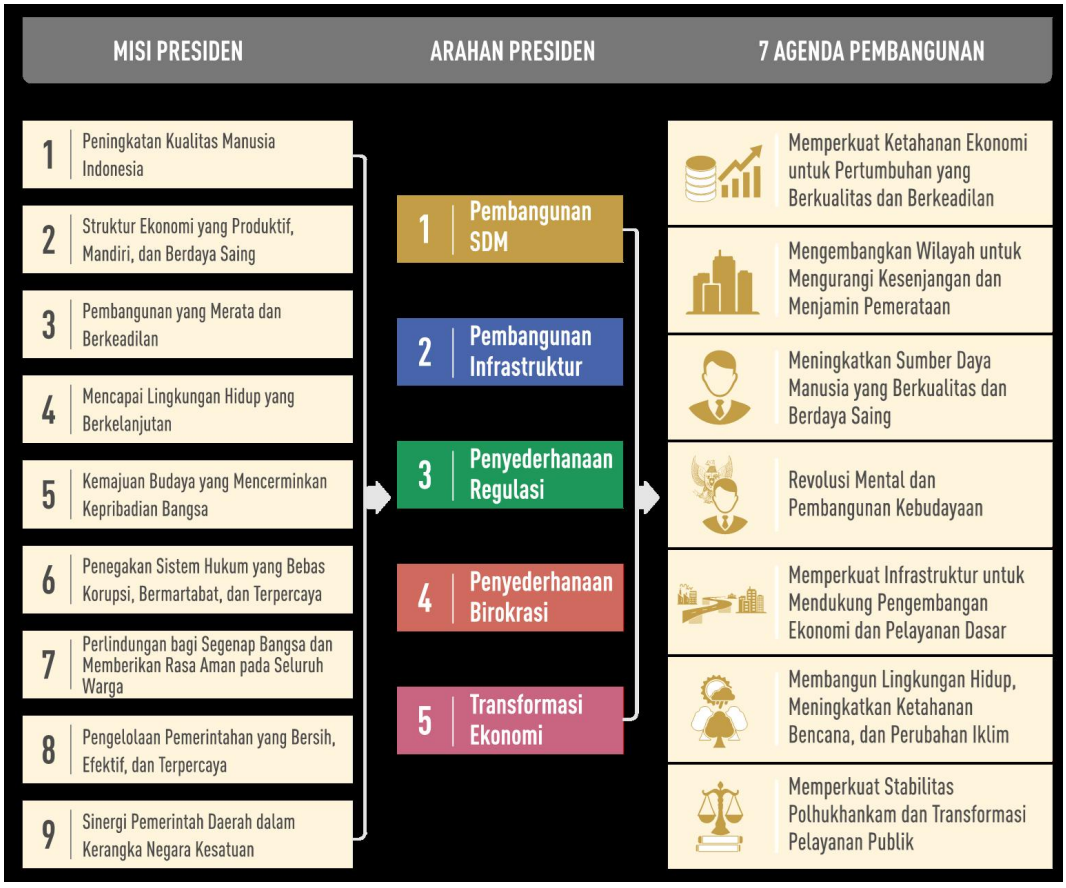
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDA, SDM dan kemampuan IPTEK yang

tinggi.

4.2.5.2. RPJMN 2020-2024

Substansi dari Visi, Misi, Arahan Presiden dan Tujuh Agenda Pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang memiliki keterkaitan kuat dengan Perubahan RPJMD Kota medan tahun 2019-2024. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Kota Medan, sebagai berikut:

1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 4.2.

Agenda Pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

4.2.5.3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Dalam perubahan tersebut pemerintah mengembangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dari sebelumnya lima prioritas menjadi delapan prioritas. Delapan prioritas pembangunan Sumatera Utara tersebut meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan, perlu dilakukan pembahasan isu strategis terkait perubahan prioritas pembangunan terebut.

4.2.5.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Kota Medan memberikan tantangan bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan yang didukung pengelolaan organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, bersih dan melayani dan pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4.2.5.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa harapan perubahan sistematis dalam pengelolaan pemerintah dalam rangka percepatan investasi dan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian baik administratif maupun teknis agar harapan percepatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja terwujud, khususnya di Kota Medan Timur. Implementasi Undang-Undang yang dikenal sebagai UU Ciptaker ini beraplikasi cukup luas yaitu pada aspek kelembagaan dan aspek pembangunan sektor hulu hingga hilir antara lain terkait pertanian, pangan, perkebunan, minyak dan gas, kehutanan, Perindustrian, penataan ruang, hingga perizinan, ketenagakerjaan, Perbankan, dan Perkoperasian.

4.2.5.6. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia

   Sumber Daya Manusia merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan Golden Generation menuju 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

   Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022). Sumatera Utara menjadi Provinsi

dengan jumlah penduduk keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Sumatera Utara sebagai penyumbang Sumber Daya Manusia yang produktif dan melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 170,9 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 187,6 juta jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif.

Dengan kuantitas penduduk yang lebih dari cukup, pembangunan yang membentuk *human capital* (modal manusia) seharusnya berjalan dengan optimal. Faktanya, kuantitas penduduk dengan peringkat keempat terbesar di Indonesia tidak menjadikan Sumatera Utara berada di jajaran provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Meskipun kuantitas penduduk Sumatera Utara berada di posisi keempat tertinggi, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara hanya menempati urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, tahun 2022, Sumatera Utara berada pada urutan ke-15.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk komponen pengetahuan yang direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Provinsi Sumatera Utara memiliki capaian indikator RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional, yaitu sebesar 9,71 tahun pada tahun 2022, dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,54 tahun. Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara juga lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu sebesar 13,27 tahun pada tahun 2022 dengan capaian Nasional sebesar 13.08 tahun. Pencapaian dua komponen IPM ini memang lebih baik pada skala nasional , namun apabila dikomparasi secara relative regional, maka Provinsi Sumatera Utara masih merupakan peringkat ke -2 (dua) untuk Wilayah Sumatera, dibawah capaian Kepulauan Riau.

Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan masih

perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator RLS dan HLS, yang direpresentasikan secara akumulatif pada indikator Indeks Pendidikan, melalui issue strategis antara lain pada pemerataan akses Pendidikan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi sekolah dan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan daerah); peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM Guru Produktif di bidang keahliannya serta sejalan dengan kebijakan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan dan peningkatan mutu dilaksanakan melalui upaya revitalisasi SMK, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum vokasi (link and match) dengan DUDI, serta peningkatan jumlah lulusan vokasi yang diserap oleh Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara juga masih belum optimal, Derajat Kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Kapasitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak serta pelayanan reproduksi belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian Nasional, UHH Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 69.61 th kondisi ini meningkat dibanding tahun 2021 (69.23 th), walaupun terjadi peningkatan UHH di Provinsi Sumatera Utara namun capaiannya masih lebih rendah di banding capaian nasional yaitu sebesar 71.57 pada tahun 2021 dan 71.85 pada tahun 2022.

Kesetaraan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender dimana kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relative tinggi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dimana IPM Perempuan pada tahun 2021 sebesar 69.08 dan Laki-laki sebesar 76.14. Selama periode 2011-2021, capaian IPM perempuan berhasil meningkat sebesar 5,21 poin, sedangkan IPM laki-laki

meningkat sebesar 4,73 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Namun demikian, hingga 2021, posisi capaian IPM perempuan masih berada dibawah IPM laki-laki.

2. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penurunan kemiskinan adalah komponen penting dari ekonomi inklusif. Ini melibatkan pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan peluang ekonomi lainnya. Penurunan kemiskinan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial.

Arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 (satu) pada pencapaian target global Sustainable Development Goals (SDGs).

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten agar dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari.

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 1,41 persen atau sekitar 212. 810 jiwa, meningkat 0.02 point dibandingkan pada tahun 2021, sebesar 1,39 persen atau sekitar 208.060 jiwa. Peningkatan ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum mutakhirnya basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berimplikasi pada program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran; masih dibutuhkan penguatan konvergensi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari seluruh Perangkat Daerah, sektor non Pemerintah serta stakeholders terkait; serta penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi focus wilayah prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 baik dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Perekonomian Indonesia yang sudah mulai menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian (*scaring effect*) yang mengena pada sisi produksi yang mempengaruhi penurunan produktivitas tenaga kerja. untuk itu, perlu upaya yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,67 juta orang (69,75 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 159 ribu orang. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak dua ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang.

Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui

Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani melalui produksi dan produktivitas pertanian

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pariwisata memiliki multiplier efek ke berbagai sektor serta berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara terhadap PDRB Sumatera Utara tercatat sebesar 6,57% pada Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru badi Sumatera Utara. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merilis Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), dimana Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-14 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan poin sebesar 3,548. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara mengupayakan untuk pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor

strategis Provinsi Sumut seperti sektor pariwisata maupun sektor lainnya (ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dll).

3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah

   Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya penanganan risiko bencana juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif baik dari kesadaran masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi,

terpadu, terarah dan menyeluruh. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah Sumatera Utara memberikan fasilitasi dan kemudahan sesuai dengan kewenangannya kepada penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Infrastruktur dimaksud tidak terbatas pada gorong-gorong (ducting), tiang telekomunikasi (tower), tiang (pole) dan lubang kabel (manhole) untuk adapt digunakan secara bersama dengan biaya terjangkau. Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

   Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

   Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025 ditetapkan melalui program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh nilai 61,05 dengan kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 62,07 dengan Kategori B. Indeks reformasi birokrasi Provinsi mengalami kenaikan1,02 poin, namun belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh Perangkat Daerah, khususnya dalam pembangunan budaya kerja.

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik dan dipercaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Perencanaan dan Pertanggungjawaban melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh Nilai 62,79 dengan Predikat B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 63,89 dengan Predikat B. Hasil ini masih belum optimal yang disebabkan kualitas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang mampu menyusun laporan kinerja perangkat daerah sehingga laporan yang disusun belum dapat menyajikan laporan kinerja yang memuat informasi atas evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan Publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik harus terus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sampai saat ini telah banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memperoleh nilai 3,68 dengan Kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 3,80 dengan Kategori B.

Tata kelola pemerintahan yang inovatif merupakan upaya untuk menuju keadaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 39,41 dengan kategori inovatif, dan pada tahun 2022 memperoleh skor 54,36 dengan kategori inovatif. Sedangkan persentase pemanfaatan hasil riset terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar

75%. Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan menyebabkan tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Inovasi merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi dilakukan sebagai upaya pembaruan terhadap prosedur dan birokrasi, serta kebijakan strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, dan implementatif. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif ditinjau dari sudut pandang riset dan inovasi adalah dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi melalui pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah (RPJMD), serta pelaksanaan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2.5.7. Isu Strategis Kota Medan

Isu-isu strategis pembangunan Kota Medan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan berdasarkan hasil tinjauan terhadap dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di daerah. Isu Strategis merupakan jangkar (anchor) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang dapat menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Medan untuk pencapaian visi pembangunan ke depan. Penentuan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan Arah Kebijakan RPJMD Kota Medan. Adapun isu strategis Kota Medan dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

   Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak dan kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan krusial di Kota Medan

mengingat terdapat 8,07% penduduk Kota Medan terkategorikan miskin pada tahun 2022 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah.

Selain masalah kemiskinan yang ada di Kota Medan, masalah pengangguran masih menjadi permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Medan. Menurut BPS tahun 2022, angka pengangguran terbuka di Kota Medan sebanyak 100.705 orang dan cenderung meningkat dari sebelum kasus pandemik Covid-19 sebanyak 94.165 orang pada tahun 2019. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 mencapai 8,89% dan mengalami peningkatan dari sebelum kasus pandemik Covid-19 sebesar 8,53% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID 19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Di samping itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor pemicu angka pengangguran di Kota Medan masih tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

   Peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diwujudkan dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola yang meliputi antar lain peningkatan kualitas sarana/prasaran kesehatan, kuantitas dan kualitas tenaga medis dan para medis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Medan termasuk masyarakat miskin dan kelompok berkebutuhan khusus, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan dengan mengedepankan perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan perbaikan pada manajemen pendidikan. Dalam upaya perwujudan peningkatan layanan kesehatan, maka Pemerintah Kota Medan akan meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan ibu dan anak, menurunkan prevalensi penyakit

penduduk.

3. Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Jalan, Drainase, Sampah, Air Minum, dan Lampu Penerangan Jalan Umum)

   Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perkotaan, seperti air minum dan pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) menjadi hal yang sangat penting karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Persoalan kebutuhan air minum yang layak adalah masalah kualitas dan kuantitas air minum tersebut, seperti air yang kurang jernih (kurang layak digunakan) dan debit air yang kurang. Adapun upaya dalam peningkatan akses air minum yang layak adalah dengan peningkatan kapasitas produksi air minum dan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan. Untuk capaian rumah tangga pengguna air bersih baru di Kota Medan mencapai 88,52% pada tahun 2022.

   Dalam hal permasalahan sampah ini, permasalahannya adalah masih minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang menerapkan prinsip 3R tersebut. Untuk drainase yang ada di Kota Medan pada umumnya sudah baik, hanya saja belum berfungsi secara optimal dari sisi konektivitas. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan menyebabkan masalah serius pada saat musim hujan sehingga aliran air tidak mengalir lancar ke drainase serta daya tampung drainase yang terbatas menyebabkan munculnya genangan air di jalan. Hal ini tentunya membawa dampak buruk bagi kondisi jalan di Kota Medan, sehingga menyebabkan banyak jalan yang rusak dan berlubang. Selanjutnya upaya dalam peningkatan akses air limbah layak di antaranya ialah dengan pembangunan/perbaikan tangki septik terstandar di perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan layanan SPALD-T. Selain itu, masih banyak penduduk Kota Medan yang belum memiliki akses air bersih. Pada akhir tahun 2022, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 72,58 persen. Hal ini berarti masih terdapat 27,42 persen rumah

tangga yang belum memiliki akses air bersih. Sebagai upaya pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan 100 persen masyarakat menerima akses air bersih, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya air dan mendistribusikannya secara merata kepada masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa air yang disediakan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk konsumsi sehingga diperlukan suatu instansi yang dapat mengelola dengan baik sumber daya air dan memelihara saluran perpipaan, serta menjamin air tersebut aman dan layak didistribusikan kepada masyarakat, salah satunya melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara itu, masih banyak jalan yang belum difasilitasi Alat Penerangan Jalan (APJ). Pada tahun 2022 kebutuhan APJ sebanyak 124.028 dan APJ yang telah terpasang sebanyak 90.835 APJ. Hal tersebut berarti, kebutuhan terhadap APJ telah terpenuhi sebesar 73,23 persen dari kebutuhan sehingga masih terdapat sebesar 26,77 persen yang belum dipasang APJ. Wilayah yang belum diberi APJ tentunya dapat memberikan dampak negatif bagi pengguna jalan di Kota Medan jika melewatinya pada malam hari.

4. Penanganan Kawasan Kumuh

   Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat merupakan karakteristik kawasan kumuh. Upaya penggusuran terkadang hanya akan memindahkan kawasan kumuh ke tempat yang baru. Permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang harus dicapai oleh pemerintah Kota Medan. Adapun langkah ke depannya berupa peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

5. Stabilitas Ketahanan Pangan

   Masalah ketahanan pangan dapat terjadi apabila salah satu unsur ketahanan pangan tersebut terganggu. Namun dalam realitanya, pemahaman terhadap

ketahanan sering direduksi hanya ditekankan pada unsur penyediaan dan harga saja, atau bahkan ada yang hanya menekankan pada aspek yang lebih sempit yang menyamakan pengertian ketahanan pangan dengan pengertian swasembada. Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat terwujud secara bersama-sama dan seimbang.

Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik berada di dekat konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya (memperolehnya). Sedangkan pilar stabilitas dapat dilihat dari kontinuitas pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan rumah tangga setiap saat dan di setiap tempat. Kondisi Kota Medan yang bukan penghasil utama pertanian, tetap harus menjaga stabilitasi ketahanan pangan mengingat pertumbuhan penduduk yang kian tinggi ke depannya.

6. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

   Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (human capital), maupun modal sosial (*social capital*). Modal tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, namun membutuhkan dukungan dari pihak swasta dalam bentuk investasi. Keterbatasan pembiayaan pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Medan tentunya mendorong pemerintah untuk giat melakukan promosi agar investasi dapat masuk ke Kota Medan.

   Investasi yang diharapkan tidak hanya berbentuk fisik, namun dapat berbentuk kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM, industri rumah tangga dan IKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, melalui penerapan kemudahan pemberian izin investasi dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku, serta didukung kota yang kondusif, maka akan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM, Industri Rumah Tangga dan IKM sebagai penggerak sektor tersier (jasa/service) yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian Kota Medan.

7. Pengembangan Destinasi Wisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi keinginan wisatawan diperlukan peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas SDM. Kenyamanan seorang wisatawan akan berdampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata tersebut, dimana pariwisata juga bagian kehidupan manusia menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Secara historis, Kota Medan adalah kota peninggalan Belanda dan masih terdapat bangunan-bangunan peninggalan Belanda seperti Kantor Pos, bangunan gedung di kawasan Kesawan dan juga Mesjid Raya. Banyaknya situs heritage ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang selalu dikunjungi oleh wisatawan. Kota Medan juga memiliki situs-situs budaya yang belum di tata secara optimal untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan berimbas pada peningkatan kapasitas fiskal Kota Medan.

8. Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Umum

   Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan di tengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Di samping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat. Dalam menjaga kenyamanan bertempat tinggal di Kota Medan, pemerintah akan memitigasi risiko bencana alam dan kebakaran dengan memfasilitasi sistem peringatan dini potensi bencana alam dan peralatan pemadam kebakaran, serta penempatan pos pemadam kebakaran di beberapa lokasi.

9. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM

   Pengembangan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah aspek penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mengingat

semakin cepatnya perkembangan teknologi yang dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan manusia. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Medan agar mendorong para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dalam meningkatkan daya saingnya di dunia internasional. Dalam upaya mewujudkan pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM, pemerintah Kota Medan akan memfasilitasi UMKM serta memberlakukan kebijakan khusus untuk meningkatkan Ekonomi Kreatif dan UMKM baik dari aspek permodalan, ketenagakerjaan, serta sarana dan prasarana UMKM.

10. Kesetaraan Gender

    Kesetaraan gender akan memperkuat pembangunan suatu wilayah. Diskriminasi yang terjadi hingga saat ini menjadi permasalahan di berbagai wilayah. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tujuan ke-5. Kesetaraan gender masih menjadi permasalahan di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan dari keterlibatan dalam pembangunan daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Medan semakin menurun hingga tahun 2022 menjadi 46,27 persen. Meskipun dari segi pendidikan setiap gender memeroleh hak yang sama, namun dari sisi ketenagakerjaan masih terjadi ketimpangan gender. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi diskriminasi gender sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender.

11. Reformasi Birokrasi Pemerintah dan Penguatan SDM Aparatur

    Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Hal ini tentunya harus didukung dengan penguatan SDM aparatur baik finansial maupun mental.

    Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Medan masih terjadi

permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Di samping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan memedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif"

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Medan menjadi Kota yang Berkah**

   Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. **Medan akan menjadi Kota yang Maju**

   Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan

prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. **Medan menjadi Kota yang Kondusif**

   Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif.

Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

5.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inkusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam

menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJPD dan misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Tabel 5.1.
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Misi RPJPD 2005-2025	No	Misi RPJMD 2021-2026
1	Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
2	Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
3	Mewujudkan prasarana dan sarana kota modern, handal, dan berwawasan lingkungan	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM

Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Tabel 5.2.
Keselarasan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023	No	Misi RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga - harga yang terjangkau.	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.	5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.	6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

Untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Medan didukung oleh modal dasar pembangunan yaitu :

1. Posisi Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara menjadikan Kota Medan memiliki nilai yang tinggi untuk pengembangan jasa khususnya di bidang perdagangan, industri dan jasa-jasa lainnya.
2. Karakteristik masyarakat Kota Medan yang keras tetapi lebih menghargai kerukunan di tengah ragam adat budaya yang berbeda. Mengedepankan sikap bermusyawarah, bergotong royong dan memiliki nilai sosial yang tinggi serta empati dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Keanekaragaman budaya dan nilai sejarah Kota Medan yang merupakan Kota warisan Kolonial merupakan aspek yang harus tetap dijaga dan dilestarikan untuk memberikan kemakmuran bagi Masyarakat Kota Medan.
4. Sumber daya manusia produktif sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 7 misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kota Medan:

Tabel 5.3.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal					Target Capaian			
					2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026
					Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1. Medan Berkah													
Sebelum Perubahan													
	1.1.	Meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah		Gini Rasio (Indeks)	0,314	0,326	0,402	0,322	0,399	0,319	0,315	0,312	0,308
		1.1.1.	Meningkatkan Pendapatan	Pendapatan per kapita (Rupiah)	67.400.000	68.200.000	64.078.945,84	68.500.000	66.193.310,89	68.900.000	70.500.000	71.500.000	71.700.000
		1.1.2.	Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)	8,01	7,98	8,34	7,82	8,07	7,65	7,50	7,34	7,19
Setelah Perubahan													
	1.1.	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Gini Rasio	0,314	0,326	0,402	0,322	0,399	0,379	0,369	0,36	0,35
				TPT	10,74	9,02	10,81	8,95	8,89	8,40 - 8,80	8,20 - 8,70	8,00 - 8,50	7,80 - 8,30
		1.1.1.	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita	67.400.000	68.200.000	64.078.945,84	68.500.000	66.193.310,89	67.677.802,28	69.195.585,77	70.747.408,00	72.334.032,34
		1.1.2.	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase kemiskinan	8,01	7,98	8,34	7,82	8,07	7.55 - 8,00	7,40 - 7,95	7,25 - 7,90	7,05 - 7,85
2. Medan Maju													
Sebelum Perubahan													
	2.1.	Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	81,00	81.61	81,21	82,04	81,76	82,46	82,89	83,32	83,75

Misi	Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja	Kondisi Awal					Target Capaian			
		2.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	11.39	11.4	11,42	11,41	11,50	11,42	11,42	11,43	11,44
		2.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	73.14	74,00	73,23	74,10	73,58	74.25	74.30	74.50	75.7
		2.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14.890.000	15.035.000	14.999.000	15.181.000	15.503.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000
Setelah Perubahan													
	2.1.	Peningkatan kualitas SDM		IPM	81,00	81.61	81,21	82,04	81,76	81,90	82,10	82,33	82,49
		2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,789	N/A	0,792	N/A	0,794	0,795	0,796	0,798	0,799
		2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,818	N/A	0,819	N/A	0,824	0,828	0,832	0,835	0,839
3. Medan Bersih													
Sebelum Perubahan													
	3.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	CC	CC	B	CC	B	BB	BB	A
		3.1.1.	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	N/A	B	CC	B	B	B	A	A	A
				Indeks Transformasi Data Digital (Indeks)	N/A	0,91	0,8	0,92	0,83	0,93	0,93	0,94	0,95
		3.1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggar	Opini BPK (-)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi		Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal					Target Capaian			
			Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip (-)	Cc	B	B	BB	B	BB	BB	A	A
Setelah Perubahan													
	3.1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51)	CC (54)	CC (55)	B (61)	CC (57)	CC (60)	B (65)	B (70)	BB (73)
		3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	CC (60)	B (65)	B (65)	BB (72)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	N/A	N/A	2,76	N/A	N/A	2,85	2,9	2,95	3
				Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	A-(4,15)	N/A	A-(4,21)	A- (4.30)	A- (4,41)	A (4,51)	A (4,58)
		3.1.3.											
4. Medan Membangun													
Sebelum Perubahan													
	4.1.	Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni		Persentase kawasan permukiman layak huni, (%)	96,90	96,90	98,90	97,90	98,41	98,40	98,90	99,40	100,00
		4.1.1.	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman layak huni (Ha)	25.690,20	25.690,20	26.021,50	25.857,56	27.751,97	26.021,52	26.185,48	26.349,08	26.510,00
	4.2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,60	57,60	63,80	57,82	63,52	58,05	58,27	58,50	58,72
		4.2.1.	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	Persentase luas RTH (%)	10,00	12,00	6,73	12,50	6,74	13,00	13,50	14,00	14,50
Setelah Perubahan													

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal					Target Capaian			
	4.1	Peningkatan kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	89,43	90,37	92,66	93,83	95,01
			Emisi Gas Rumah Kaca	4.364,34	N/A	4.340,25	N/A	5.188,13	5.021,51	4.854,89	4.688,27	4.521,65
		4.1.1 Menurunnya luas kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh (ha)	819,8	N/A	506,60	N/A	306,00	200,04	105,96	50	30
		4.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	57,6	61	57,82	61,89	61,89	61,93	62	62,63
		4.1.3 Menurunnya titik banjir/genangan	Jumlah titik banjir/genangan	2.341	N/A	1.910	N/A	617	410	305	100	30
5. Medan Kondusif												
Sebelum Perubahan												
	5.1.	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum (%)	N/A	70	70	70	41,91	75	75	80	85
		5.1.1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum (Kasus)	29.146	26.000	18.838	23.000	20.330	20.000	18.000	16.000	14.000
Setelah Perubahan												
	5.1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan trantibum (%)	N/A	70	35,37	70	7,92	10	10	10	10

Misi		Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal					Target Capaian			
		5.1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum (Kasus)	29.146	26.000	18.838	23.000	20.330	18.297	16.467	14.821	13.339
6. Medan Inovatif													
Sebelum Perubahan													
	6.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,98	3,50	2,62	6,00	4,71	6,07	6,10	6,12	6,15
		6.1.1.	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi PMDN-(Rupiah)	4.127.638,60	4.334.020,53	5.121.020,16	4.550.021,56	2.853.685,00	4.778.257,63	5.268.029,04	5.268.029,04	5.531.430,49
				Nilai investasi PMA, (US $)	40.258,50	42.271,43	57.196,30	44.385,00	41.136,50	46.604,25	48.934,46	51.381,18	53.950,24
		6.1.2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	57,14	57,14	29,71	62,50	44,04	75,00	77,70	88,00	94,17
Setelah Perubahan													
	6.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan ekonomi	-1,98	3,50	2,62	6,00	4,71	5,50 - 6,10	5,60 - 6,35	5,70 - 6,50	5,90 - 6,60
				Inflasi	1,76	2	1,7	1,98	6,1	3,00 - 4,50	2,25 - 3,75	2,00 - 3,40	1,80 - 3,10
		6.1.1.	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	Pertumbuhan investasi	-3.728.176,10	N/A	5.939.665.941.900	N/A	4.153.965.803.200	5.475.389.633.838	5.749.158.937.048	6.036.616.990.089	6.338.447.852.552
		6.1.2.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase UMKM Naik Kelas	N/A	N/A	N/A	N/A	15,1	20,54	25	25	25
		6.1.3.	Meningkatnya PAD	Rasio PAD	37,85	41,21	37,96	50,46	40,93	51,46	49,77	53,33	56,80

Misi		Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal					Target Capaian			
		6.1.4.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	57,14	57,14	29,71	62,5	44,04	63,00	64,00	65,00	66,00
7. Medan Beridentitas													
Sebelum Perubahan													
	7.1.	Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,72	2,86	2,57	3	2,66	3,07	3,15	3,23	3,31
		7.1.1.	Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal (unit)	N/A	122	93	132	93	145	155	165	175
				Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi (Kawasan)	N/A	3	3	4	2	5	8	8	12
Setelah Perubahan													
	7.1	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,72	2,86	2,57	3,00	2,66	3,07	3,15	3,23	3,31
		7.1.1	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	N/A	N/A	170.649	N/A	319.315	328.895	338.762	348.925	359.392
				Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	N/A	3	93	4	93	126	126	130	130

Substansi Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

Perubahan target ini dipicu oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi arah pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh negara. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dinamika ekonomi global, nasional, dan lokal. Selama beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran dalam ekonomi global yang berdampak pada situasi ekonomi Indonesia. Fluktuasi nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan gejolak pasar finansial menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada sektor perekonomian. Sebagai respons, pemerintah daerah harus menyesuaikan target IKU agar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terkini. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah nasional, provinsi, dan daerah, serta dinamika kondisi daerah juga menjadi konsiderasi untuk mengubah target capaian RPJMD. Tidak tercapainya target atau realisasi yang tidak sesuai harapan menjadi pertimbangan untuk mengubah proyeksi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penentuan tujuan, sasaran, dan indikator juga perlu dilakukan perubahan agar lebih menggambarkan misi Pemerintah Kota Medan. Ketegasan dalam perencanaan dan implementasi juga menjadi elemen penting dalam menghadapi perubahan target IKU. Pemerintah Kota Medan harus memiliki strategi yang matang, mengalokasikan anggaran dengan efisien, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian IKU.

Pada misi “Medan Berkah”, tujuan yang ingin dicapai melalui misi ini mengalami perubahan. Tujuan sebelumnya dari “Medan Berkah” adalah meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah. Tujuan ini disesuaikan menjadi “Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat” dengan pertimbangan dari definisi “Medan Berkah” sebagai Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Oleh karena itu penyelarasan yang dilakukan dari tujuan misi ini adalah pemerataan kesejahteraan yang ditunjukkan melalui Gini Rasio (indeks) dan peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang diukur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Target Gini Rasio perlu disesuaikan kembali mengingat capaian pada kondisi saat ini mencapai

0,399 poin dengan target awal tahun 2022 adalah 0,322. Selain itu terdapat pula kecenderungan peningkatan gini ratio Kota Medan selama periode 2018-2022. Target sebelumnya pada tahun 2023 diharapkan gini rasio mencapai 0,290. Angka ini sangat sulit untuk dicapai mengingat realisasi tahun 2022 berada pada tingkat 0,399 sehingga perlu disesuaikan. Pendekatan perubahan target dilakukan dengan metode *exponential smooting* sehingga target pada tahun 2023 disesuaikan menjadi 0,350 - 0,357 dan secara eksponensial diharapkan dapat mencapai 0,285 – 0,300 pada tahun 2026 mengingat efek pengganda yang dapat mempengaruhi Gini Rasio di Kota Medan seperti membaiknya iklim investasi di Kota Medan serta membaiknya lapangan usaha. Konsiderasi penambahan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai indikator adalah dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat, yakni dengan meningkatnya penduduk bekerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka akan mampu memberikan cerminan bahwa masyarakat semakin banyak yang bekerja dan semakin dekat dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam menurunkan gini rasio, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekonomi lokal, yaitu mengembangkan UMKM yang terdapat di Kota Medan. UMKM merupakan pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Pengembangan UMKM akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya menekan angka kemiskinan, upaya yang dilakukan adalah dengan menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Apabila pendapatan masyarakat sudah meningkat dan angka kemiskinan menurun, maka ketimpangan juga akan menurun. Pemerataan pendapatan masyarakat dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan akan menurunkan rasio gini.

Nilai distribusi rasio gini diperoleh berdasarkan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Distribusi pendapatan di Kota Medan menjadi acuan dalam perolehan nilai rasio gini. Semakin rendah nilai rasio gini, semakin merata pendapatan di Kota Medan. Dalam upaya menurunkan rasio gini, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat

yang saat ini memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Intervensi dengan menggunakan upah minimum tidak efektif karena akan membangun penolakan dari pihak pemberi kerja. Dalam hal ini pemerintah perlu mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga distribusi pendapatan masyarakat semakin meningkat dan rasio gini semakin menurun.

Pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata pendapatan penduduk per tahun. Dalam hal ini, tingkat pendapatan per kapita sensitif terhadap tingkat pendapatan. Oleh karena itu indikator ini disesuaikan dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita mengacu kepada produktivitas masyarakat secara umum dalam menghasilkan output suatu daerah. Dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan peningkatan lapangan pekerjaan, produktivitas penduduk serta daya saing tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut persentase kemiskinan juga akan menurun. persentase kemiskinan merupakan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mengacu kepada pendapatan yang diperlukan bagi setiap penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan mengoptimalkan pendapatan dan produktivitas dari masyarakat, persentase kemiskinan diharapkan akan semakin menurun.

Pada misi “Medan Maju”, terdapat perubahan tujuan misi yang sebelumnya dinyatakan sebagai meningkatkan kualitas masyarakat Kota medan menjadi “Peningkatan kualitas SDM”. Tidak terjadi perubahan indikator capaian tujuan yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator capaiannya. Indikator sasaran disesuaikan menjadi hanya dua bagian, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Fokus yang diangkat pada “Medan Maju” adalah meningkatknya kualitas sumber daya manusia Kota Medan sehingga hanya relevan untuk tingkat pendidikan dan kesehatan. Dari sisi indikator sasaran kualitas pendidikan dan kesehatan, indikator yang digunakan tetap menggunakan indeks pendidikan dan indeks kesehatan namun perhitungan dan capaiannya disesuaikan kembali. Indikator Pendidikan dan Kesehatan pada dokumen RPJMD sebelum perubahan mengacu pada Rata-Rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup saja bukan melalui perhitungan indeks sehingga perlu dilakukan perubahan dan perhitungan kembali dan

melakukan penyesuaian target hingga akhir periode dengan memperhitungkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Metode baru yang digunakan dalam perhitungan indeks dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan adanya perhitungan yang baru ini membuat keseluruhan indeks. Target untuk 2023-2026 disesuaikan dengan menggunakan proyeksi melalui rata-rata geometri dari pencapaian selama periode 2018-2022.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, maka perlu meningkatkan indeks pendidikan dan indeks kesehatan terlebih dahulu. Indeks pendidikan dan indeks kesehatan merupakan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan indeks pendidikan, upaya awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pemerataan akses pendidikan terlebih dahulu. Dengan pemerataan akses pendidikan, maka setiap masyarakat akan memperoleh pengetahuan yang setara sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan lainnya. Kualitas pengajaran juga perlu ditingkatkan, yakni dengan meningkatkan kompetensi guru sekolah. Kompetensi guru memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi siswa sebagai bekal untuk menjadi SDM yang berkualitas. Adanya akses pendidikan yang mudah diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerataan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat merupakan tindakan awal untuk meningkatkan indeks kesehatan. Akses kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Adanya akses yang mudah, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatannya yang ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup masyarakat.

Nilai distribusi rasio gini diperoleh berdasarkan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Distribusi pendapatan di Kota Medan menjadi acuan dalam perolehan nilai rasio gini. Semakin rendah nilai rasio gini, semakin merata pendapatan di Kota Medan. Dalam upaya menurunkan rasio gini, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Intervensi dengan

menggunakan upah minimum tidak efektif karena akan membangun penolakan dari pihak pemberi kerja. Dalam hal ini pemerintah perlu mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga distribusi pendapatan masyarakat semakin meningkat dan rasio gini semakin menurun.

Pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata pendapatan penduduk per tahun. Dalam hal ini, tingkat pendapatan per kapita sensitif terhadap tingkat pendapatan. Oleh karena itu indikator ini disesuaikan dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita mengacu kepada produktivitas masyarakat secara umum dalam menghasilkan output suatu daerah. Dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan peningkatan lapangan pekerjaan, produktivitas penduduk serta daya saing tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut persentase kemiskinan juga akan menurun. persentase kemiskinan merupakan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mengacu kepada pendapatan yang diperlukan bagi setiap penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan mengoptimalkan pendapatan dan produktivitas dari masyarakat, persentase kemiskinan diharapkan akan semakin menurun.

Pada misi ketiga, “Medan Bersih” dilakukan perubahan tujuan dan sasaran, serta indikator yang dijadikan acuan. Redaksi tujuan misi ketiga ini mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat diukur dengan jelas, yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Indikator tujuan yang digunakan tetap menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi namun mengalami perubahan target mulai tahun 2023, dari sebelumnya “B” menjadi “CC” untuk tahun 2023 dan capaian pada akhir periode dari “A” menjadi “BB”. Penyesuaian ini dilakukan dengan berpedoman pada realisasi Kota Medan terkait Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai saat ini adalah CC. Dengan memperhatikan kondisi eksisting sebagaimana implementasi reformasi birokrasi dirasakan masih belum optimal, maka penyesuaian perlu dilakukan terhadap keseluruhan target indeks reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diangkat sebagai indikator sasaran mengingat tata kelola pemerintahan saat ini sudah menekankan kepada pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mencapai tujuan misi ketiga, yaitu Peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan, maka perlu dilakukan beberapa upaya oleh Pemerintah Kota Medan. Dari segi pelayanan, Pemerintah Kota Medan perlu membenahi sistem dan prosedur pelayanan administrasi pemerintahan kepada publik. Perbaikan terhadap rantai birokrasi yang berbelit akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi di ruang lingkup pemerintahan. Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala terhadap situs dan aplikasi pemerintah agar memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat yang menggunakannya. Kemudian, pemerintah dapat memberlakukan program pelatihan dan pendidikan terhadap ASN agar lebih kompeten dalam mengerjakan tugasnya dan melayani masyarakat.

Dalam hal peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, diperlukan pelaksanaan pemerintahaan yang lebih baik, berkomitmen dan transparan. Pemerintah harus memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Dalam upaya peningktan transparansi, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dioptimalkan. Penyelenggaraan pemerintahan perlu dilaksanakan melalui sistem terintegrasi. Keterlibatan seluruh unsur pegawai pemerintahan dalam menyusun rencana dan tata kelola diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan lebih baik.

Pada misi keempat “Medan Membangun” dengan definisi Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM dilakukan penyesuaian agar lebih mengarah kepada definisi misi tersebut. Sebelumnya tujuan dari misi “Medan Membangun” dijelaskan melalui dua hal yaitu Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perumusan tujuan ini dinilai kurang relevan untuk mencapai apa yang diharapkan dari Misi Kota Medan tersebut. Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) juga membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu tujuan dari misi keempat disesuaikan menjadi Peningkatan Kualitas Infrastruktur, yang berhubungan langsung dengan peningkatan sarana dan prasarana Kota Medan bagi seluruh masyarakat Kota

Medan. Pengukuran tujuan ini dirumuskan melalui dua hal, yaitu indeks infrastruktur dan emisi gas rumah kaca. Indeks infrastruktur digunakan sebagai gambaran secara menyeluruh terkait pelayanan infrastruktur di Kota Medan. Emisi gas rumah kaca digunakan sebagai komitmen Kota Medan dalam menyelesaikan isu secara nasional. Perhitungan indeks infrastruktur baru digunakan pada perubahan yang akan dilakukan sehingga hanya tersedia target untuk 2023-2026 saja. Perhitungan proyeksi indeks infrastruktur dilakukan dengan menggunakan data capaian sebelumnya terkait indeks infrastruktur kemudian diproyeksikan berdasarkan keinginan Kota Medan dalam mengoptimalkan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun perhitungan indeks infrastruktur menggunakan 4 dimensi, yakni 1) Persentase Ketersediaan Air Minum Rumah Tangga; 2) Persentase Sanitasi Rumah Tangga; 3) Persentase Listrik Rumah Tangga; dan 4) Persentase Jalan Kota. Penentuan bobot komponen indeks infrastruktur permukiman pada masing-masing indikator didasarkan pada Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu masing-masing dengan target 100%, sehingga proporsi masing-masing bobot indikator adalah target SPM pada masing-masing indikator dibagi dengan jumlah keseluruhan target indeks. Maka, untuk perhitungan indeks dari masing-masing dimensi dengan mengalikan 25% dengan capaian masing-masing indeks.

Rumus perhitungan indeks infrastruktur sebagai berikut:

$$Indeks\ Infrastruktur = X_1(1) + X_2(2) + X_3(3) + X_4(4)$$

Di mana:

X(1) : Indeks Ketersediaan Air Minum Rumah Tangga

X(2) : Indeks Sanitasi Rumah Tangga

X(3) : Indeks Listrik Rumah Tangga

X(4) : Indeks Capaian jalan kota

Penyusunan target emisi gas rumah kaca (GRK) didasarkan kepada kondisi eksisting emisi GRK yang dihasilkan Kota Medan beserta target penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 29% hingga tahun 2030 sebagai tahap pertama pelaksanaan UU No 16 Tahun 2016. Pada perubahan ini juga ditambahkan indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai indikator sasaran misi. Realisasi pada tahun 2021 adalah 2,76. Pada tahun

2022 tidak ada nilai SPBE untuk Kota Medan karena Pemerintah Kota Medan tidak ikut serta dalam pemantauan SPBE pada tahun tersebut sesuai dengan pemilihan oleh PAN-RB untuk mengikuti atau tidak mengikuti pemantauan SPBE. Tahun 2023 Kota Medan kembali mengikuti pemantauan tersebut sehingga target ditetapkan 2023 sampai 2026 dengan asumsi semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam mencapai tujuan misi keempat, terdapat sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan misi tersebut. Sasaran pertama adalah menurunkan luas kawasan kumuh. Kawasan kumuh merupakan suatu tantangan dalam menciptakan lingkungan yang layak huni bagi penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, maka langkah awal yang dilakukan adalah merehabilitasi kawasan kumuh tersebut, yakni dengan melaksanakan program bedah rumah, memperbaiki infrastruktur jalan permukiman, memperbaiki saluran air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, maka pemerintah harus meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan memfasilitasi program pengumpulan sampah terpisah di tingkat rumah tangga. Masyarakat juga perlu diberi edukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat dan industri untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan diharapkan akan mengurangi gas emisi CO_2. Permasalahan banjir juga menjadi isu utama Kota Medan dan menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan perlu melakukan normalisasi sungai dan meningkatkan saluran drainase terkhusus di kawasan rawan banjir.

Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan indeks infrastruktur, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana layanan infrastruktur dasar, meliputi ketersediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat, sanitasi yang baik, listrik bagi seluruh rumah tangga serta jalan kota yang baik dan mantap. Pemerintah perlu memaksimalkan pembanguna infrastruktur yang memberikan pelayanan serta akses air minum bersih dan sehat kepada seluruh rumah tangga. Ketersediaan sanitasi dan listrik di seluruh rumah tangga harus diperhatikan. Selain itu aksesibilitas melalui kemantapan jalan kota perlu dimaksimalkan.

Dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, diperlukan kerjasama lintas sektoral yang memperhatikan emisi gas rumah kaca di Kota Medan. Emisi gas rumah kaca bersumber dari sektor energi, industri, pertanian, kehutanan dan sektor limbah. Dalam upaya mengurangi emisi khususnya dari pembakaran energi kendaraan transportasi sebagai penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Kota Medan. Pemerintah perlu mengoptimalkan transportasi massal untuk mengurangi volume kendaraan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dari sisi lingkungan, pemerintah memperhatikan indeks kualitas lingkungan hidup yang disusun berdasarkan kualitas air, udara dan lahan tertutup. Pengendalian limbah harus diperhatikan untuk menjaga kualitas air. Pengendalian pembakaran dan lingkunga hijau akan membantu kualitas lingkungan hidup secara umum.

Dalam upaya menjaga tata kota yang lebih baik, perlu dilakuka pengendalian luas kawasan kumuh. Kawasan kumuh juga mengacu terhadap pembanguna perumahan yang terlalu padat dan tidak sesuai dengan RTRW di Kota Medan. Oleh karena itu, pembangunan dan tata kota perlu mengacu kepada RTRW. Perbaika infrastruktur dan penerangan jalan juga membantu penataan kota melalui LPJU. Selain itu perlu dioptimalkan penanganan persampahan untuk mengendalikan permukiman kumuh di Kota Medan. Selain itu perlu diidentifikasi titik banjir dan diupayakan penanganan banjir di kota medan sehingga tercapai Medan tanpa banjir.

Pada misi “Medan Kondusif” secara umum tidak terjadi perubahan. Penjelasan misi “Medan Kondusif” secara jelas menargetkan rasa nyaman dan kondusif di Kota Medan yang diukur melalui persentase penurunan gangguan ketertiban umum. Target capaian persentase penurunan gangguan ketertiban umum disesuaikan, dari sebelumnya 75% per tahun menjadi 10% per tahun. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan data eksisting dan upaya maksimal dari penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum, termasuk fasilitas yang mendukung pelaksanaan ketertiban yang dimaksud.

Dalam upaya mencapai misi kelima, maka perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan kota. Pemerintah Kota Medan perlu melakukan pemasangan CCTV aktif di seluruh jalan Kota Medan dan memasang dan memelihara lampu

penerangan jalan. Daerah yang tidak termonitor dan gelap merupakan daerah yang rawan terhadap tindak kejahatan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar melaksanakan patroli setiap saat untuk mencegah tindak kejahatan. Adanya upaya tersebut diharapkan akan mencegah tindak kejahatan.

Permasalahan kondusifitas di Kota Medan berkaitan dengan penurunan gangguan tantribum di Kota Medan. Pemerintah berupaya untuk melaksanakan tindakan preemtif dan preventif agar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat menurun. Pemerintah perlu memberikan transparansi dan sosialisasi terkait peraturan daerah yang berlaku sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran peraturan daerah. Upaya preventif dilakukan dengan meminimalisir pelanggaran ataupun gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Pemerataan pembangunan diharapkan mampu menurunkan permasalahan sosial yang muncul. Kecemburuan sosial harus diturunkan dan PMKS dapat ditangani serta diberdayakan.

Pada misi "Medan Inovatif" dilakukan perubahan tujuan, sasaran, dan indikator. Tujuan misi diubah menjadi "Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif" dengan dua indikator tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebelumnya indikator yang digunakan hanya laju pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang nyata harus tetap mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi sehingga ada penambahan indikator tujuan berupa laju inflasi. Selain itu, dalam upaya mewujudkan penuntasan kemiskinan ekstrim yang terjadi, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif sehingga perlu dilakukan langkah perubahan dan penyesuaian dalam indikator tujuan dari misi ini. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tinggi dengan tingkat inflasi yang terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi juga membawa kemakmuran bagi berbagai pihak dan dirasakan secara inklusif kepada seluruh pemangku kepentingan. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi secara global sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Medan melambat jika dibandingkan dengan target awal yang ditentukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator pertumbuhan ekonomi. Proyeksi untuk tahun 2023-2026 dilakukan dengan

menggunakan *exponential smoothing* dalam memprediksi berdasarkan data 2018-2022. Selain itu proyeksi ini juga mempertimbangkan pembangunan Kota Medan yang semakin mendukung perekonomian lebih baik. Metode ini digunakan mengingat efek dari COVID-19 yang sempat mengakibatkan kontraksi ekonomi sehingga proyeksi linear berdasarkan data 2018-2022 tidak dapat dilakukan. Penetapan target inflasi dilakukan berdasarkan rerata inflasi di Kota Medan selama 2018-2022 yang disertai dengan realisasi inflasi Kota Medan yang terkendali sejak Januari hingga Juli 2023. Selain itu, indikator investasi yang dipisahkan berdasarkan PMA dan PMDN kini disatukan sebagai Nilai Investasi (Rupiah) mengingat intervensi Kota Medan untuk PMA relatif kecil. Kota Medan juga melakukan penyesuaian dengan menargetkan pertumbuhan persentase UMKM Naik Kelas sebagai perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan UMKM di Kota Medan. Selain itu pemerintah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan kesejahteraan dan kemandirian daerah melalui rasio PAD.

Untuk mencapai tujuan medan inovatif, langkah awal yang dilakukan adalah meningkatkan investasi di Kota Medan. Meningkatkan investasi di Kota Medan dapat memberikan berbagai dampak positif, yaitu meningkatkan peluang kerja baru bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya investasi akan menyebabkan lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan dan memiliki sumber pendapatan yang stabil. Hal ini akan meningkatkan kondisi perekonomian daerah. Peningkatan investasi dapat merangsang kegiatan ekonomi lainnya, seperti pembangunan pabrik manufaktur baru dapat meningkatkan permintaan bahan baku dan layanan logistik. Investasi masuk juga dapat menstimulus UMKM untuk perluasan dan pengembangan usahanya, selain itu UMKM dapat mengadopsi teknologi baru, mengotomatiskan proses-produksi, atau mengembangkan produk dan layanan inovatif. Peningkatan investasi juga akan membantu pemerintah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana hal ini menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak, izin, dan penerimaan fiskal lainnya.

Pemerintah Kota Medan berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus menjaga inflasi berada pada

tingkat yang terkendali. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah berupaya membangun kemandirain daerah, meningkatkan investasi, membangun UMKM serta meningkatkan inovasi daerah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi diperlukan upaya untuk membangun kemudahan dan insentif berinvestasi di Kota Medan. Pemerintah menyiapkan profil dan studi kelayakan investasi untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam upaya peningkatan status UMKM, diperlukan identifikasi secara jelas terkait pemetaan UMKM di Kota Medan, permasalahan, serta pemberdayaan UMKM yang tepat guna dan berorientasi ekspor. Pemerintah berupaya untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian daerah. Selain itu dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, diperlukan upaya untuk menjaga penawaran dan permintaan produk dalam negeri dalam hal memastikan ketersediaan barang-barang pokok tetap terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada misi "Medan Beridentitas" tujuan misi diubah menjadi "Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya" dengan indikator Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan pada target untuk tahun berikutnya. Penentuan target dilakukan dengan melihat kemampuan daerah pasca Covid-19 dalam menghasilkan PDRB Sektor Pariwisata. Berdasarkan proyeksi baru ini diharapkan kontribusi PDRB Sektor Pariwisata akan mencapai 2,80 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, sasaran tujuan tersebut diubah menjadi "Meningkatnya kunjungan wisata" dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Penentuan target jumlah wisatawan berdasarkan kondisi yang terjadi pasca Covid-19, pada tahun 2022 jumlah wisatawan Kota Medan mencapai 319.315 jiwa meningkat 1,87 kali dibanding tahun 2021, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan meningkat 3,87 kali dibandingkan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan jumlah wisatawan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan proyeksi capaian pada tahun berikutnya sehingga dalam penentuan target pada tahun berikutnya tidak mengharap terlalu tinggi. Pada akhir periode diharapkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 359.392 jiwa. Jumlah

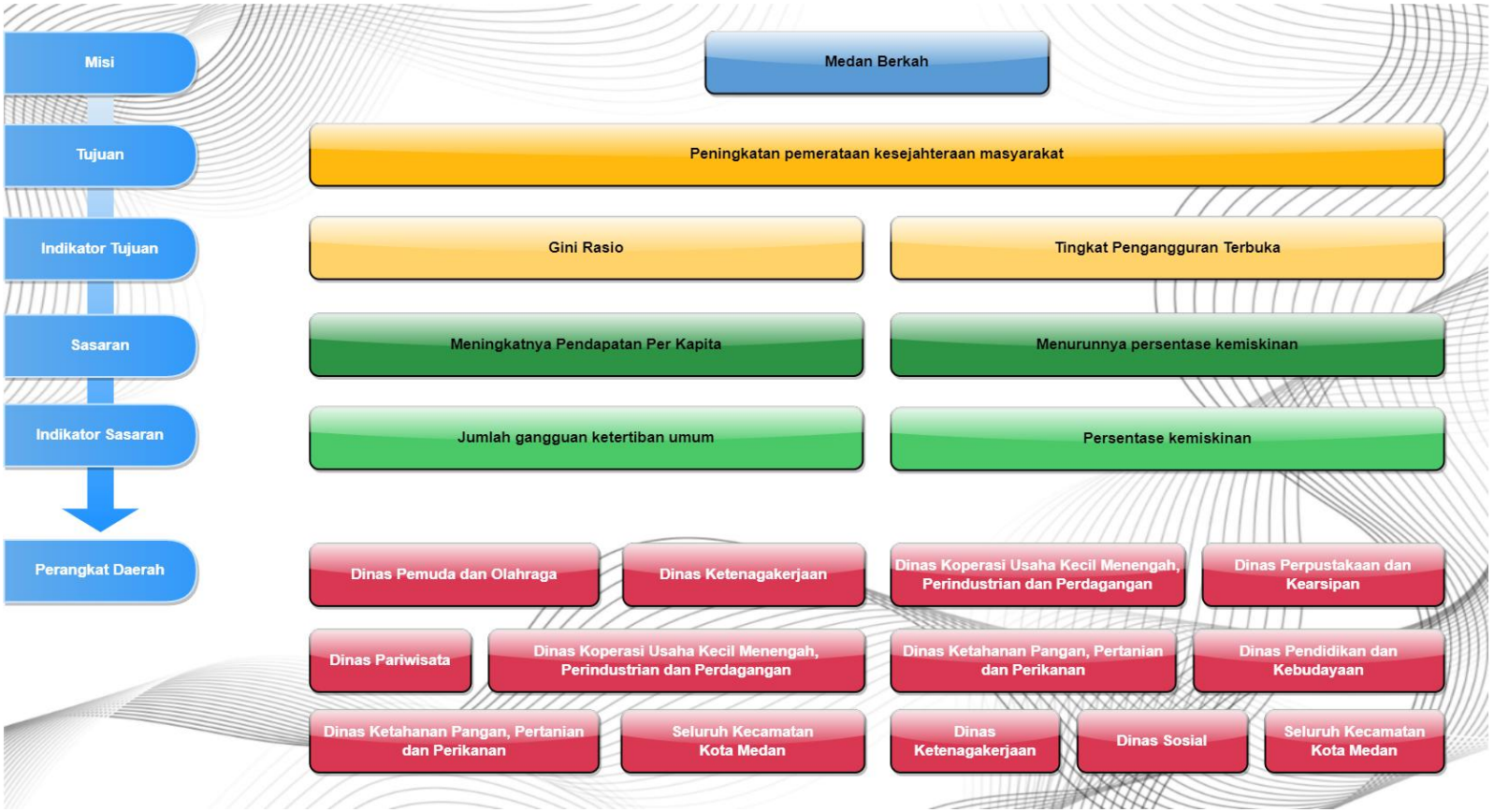
cagar budaya yang dilestarikan menjadi indikator karena cagar budaya merupakan daya tarik wisata. Pelestarian cagar budaya menjadi penting karena berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, maka pemerintah perlu meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Medan. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah kunjungan tersebut, pemerintah perlu mengidentifikasi dan inventarisasi cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Budaya daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kunjungan wisata. Warisan budaya suatu daerah, seperti tradisi, seni, makanan, musik, dan arsitektur, dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mengalami dan memahami kebudayaan lokal. Selanjutnya, perlu dilakukan promosi destinasi wisata yang terdapat di Kota Medan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan minat turis untuk berkunjung ke Kota Medan sehingga dengan semakin banyaknya kunjungan wisata akan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.

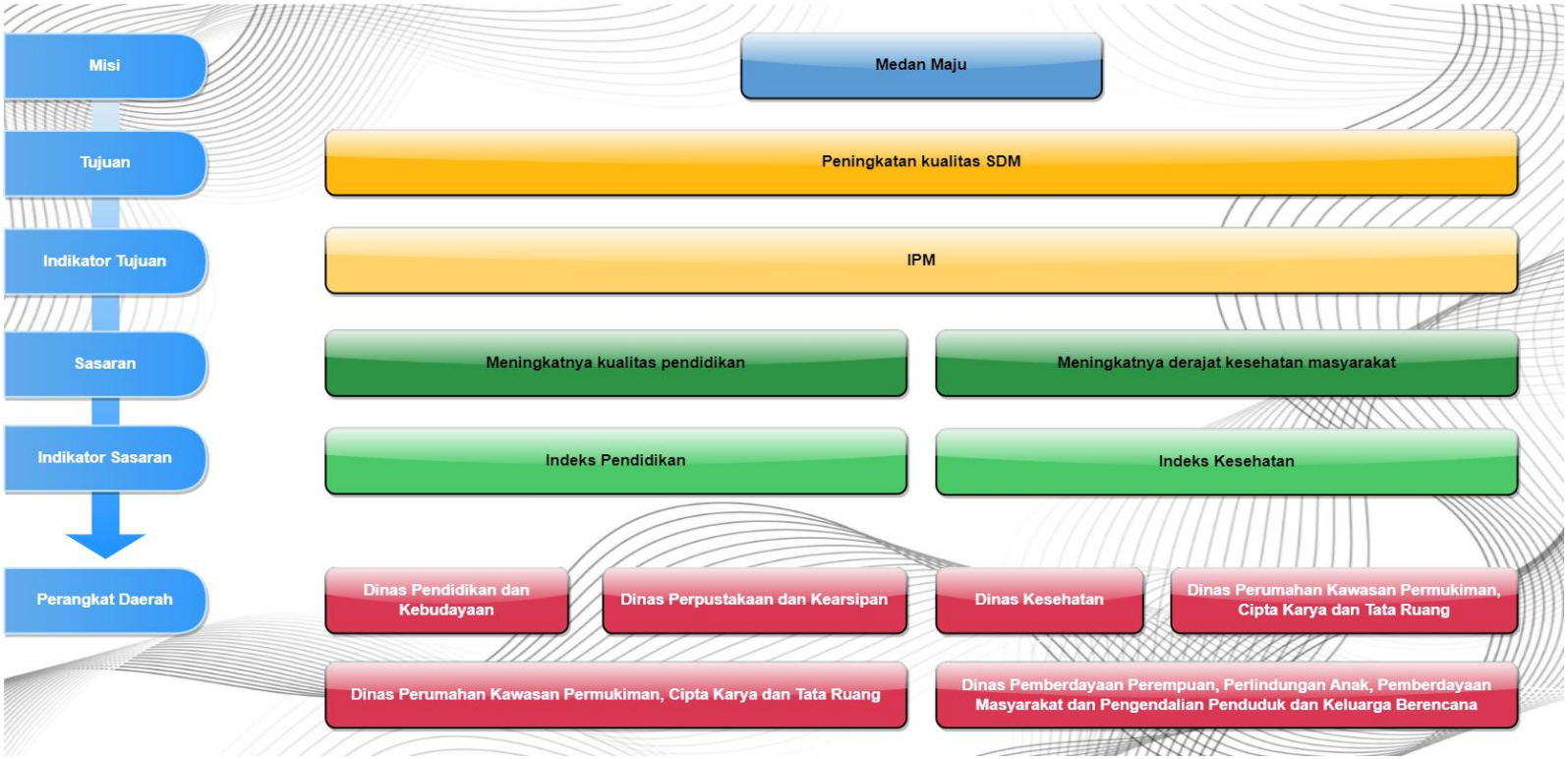
Pemerintah Kota Medan berupaya membangun identitas Kota Medan salah satunya melalui pembangunan kepariwisataan di Kota Medan. Kota Medan berpotensi menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Pemerintah perlu membangun daya tarik pariwisata dengan membangun promosi pariwisata serta membangun aksesibilitas, amenitas, atraksi, ancillary serta keamanan dan kenyamanan pariwisata. Oleh karena itu pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata menjadi salah satu kunci meningkatkan kunjungan wisata. Dalam menjaga daya tarik pariwisata, pelestarian cagar budaya perlu ditegakkan dan ditegaskan

5.4. Cascading Kinerja

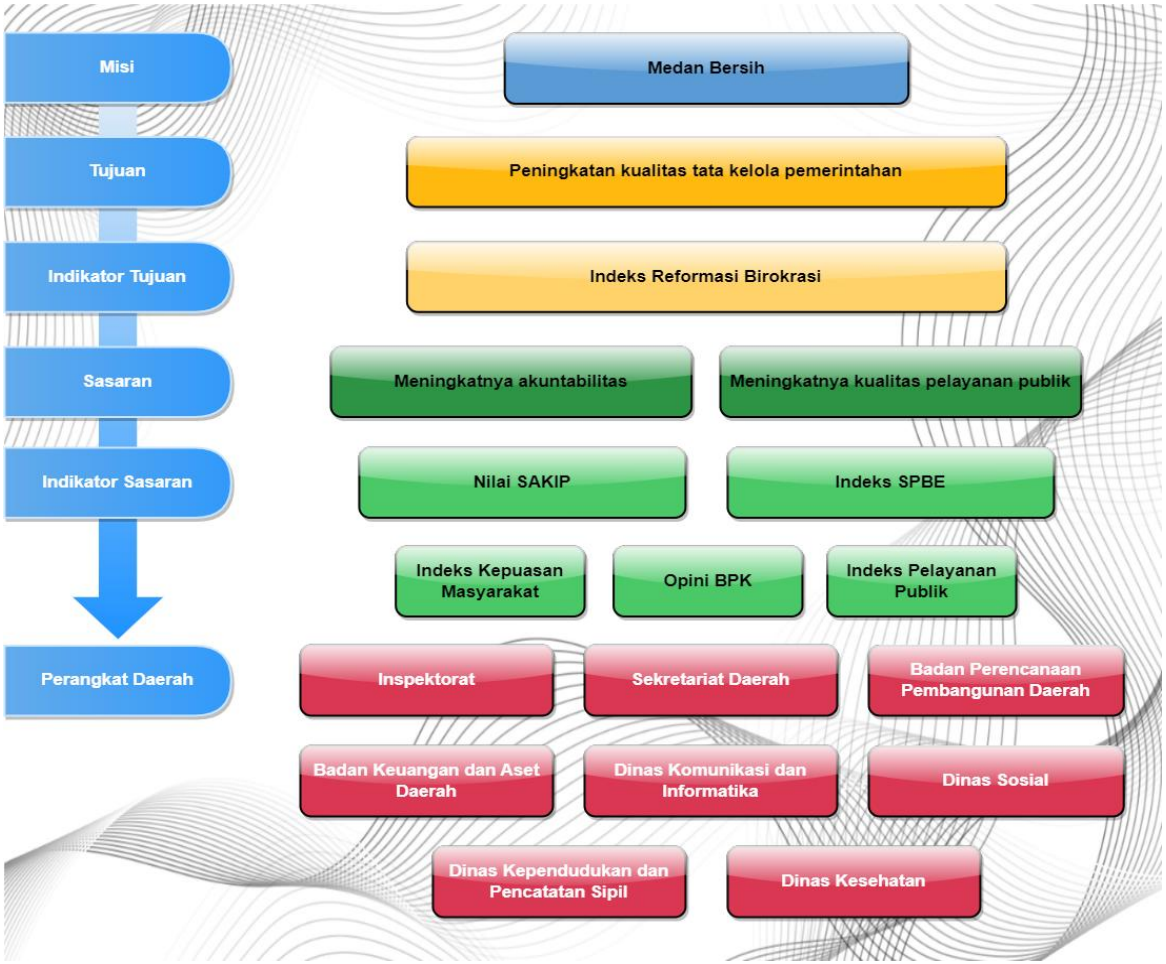
Cascading merupakan suatu proses penjabaran dan penyelarasan kinerjas erta target kinerja secara vertikal. Cascading dilakukan mulai dari level unit / pegawai yang lebih tinggi hingga ke level unit / pegawai yang lebih rendah posisi jabatan atau penugasannya. Cascading pohon kinerja menjadi penjabaran kinerja dan indikator inerja yang lebih terperinci dengan acuan kerangka logis. Cascading pencapaian visi-misi Kota Medan dirangkum sebagai berikut:



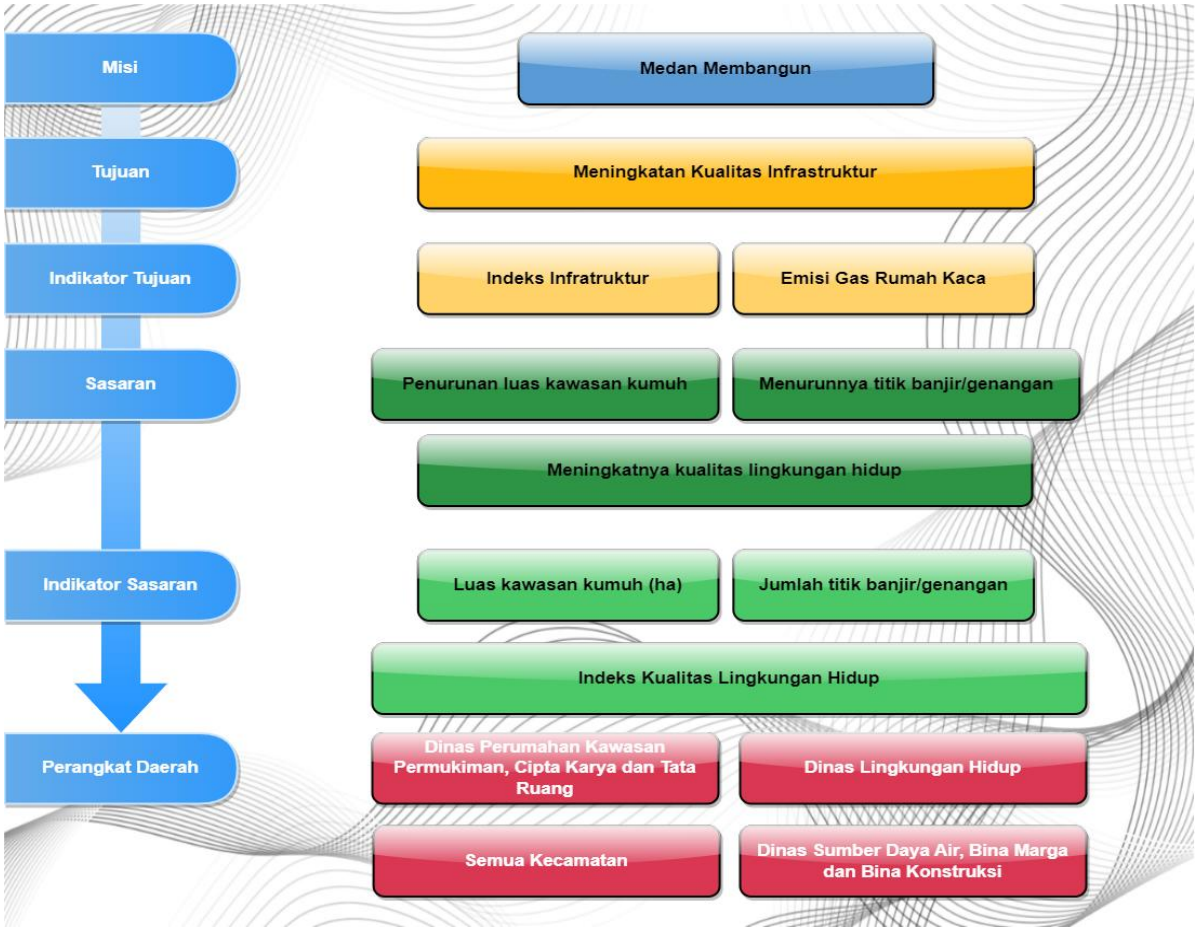
Gambar 4.3.
Cascading Misi 1 – Medan Berkah



Gambar 4.4.
Cascading Misi 2 – Medan Maju



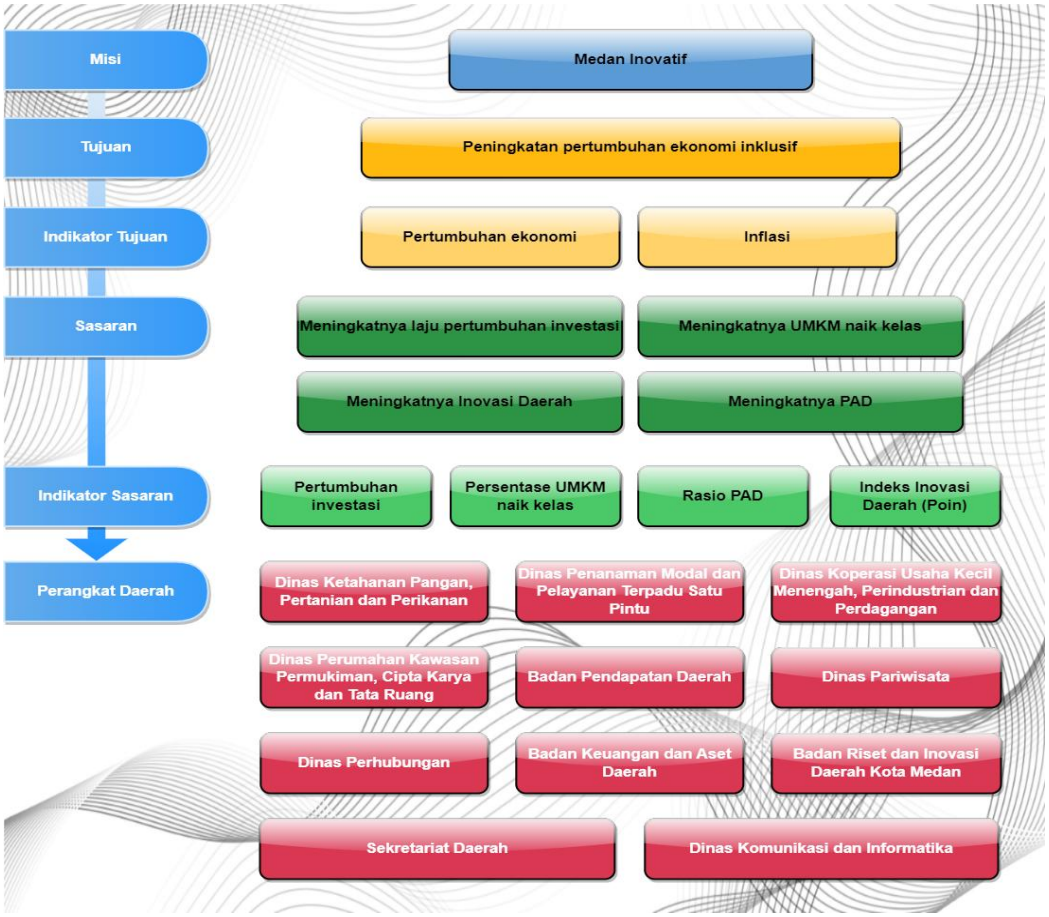
Gambar 4.5.
Cascading Misi 3 – Medan Bersih



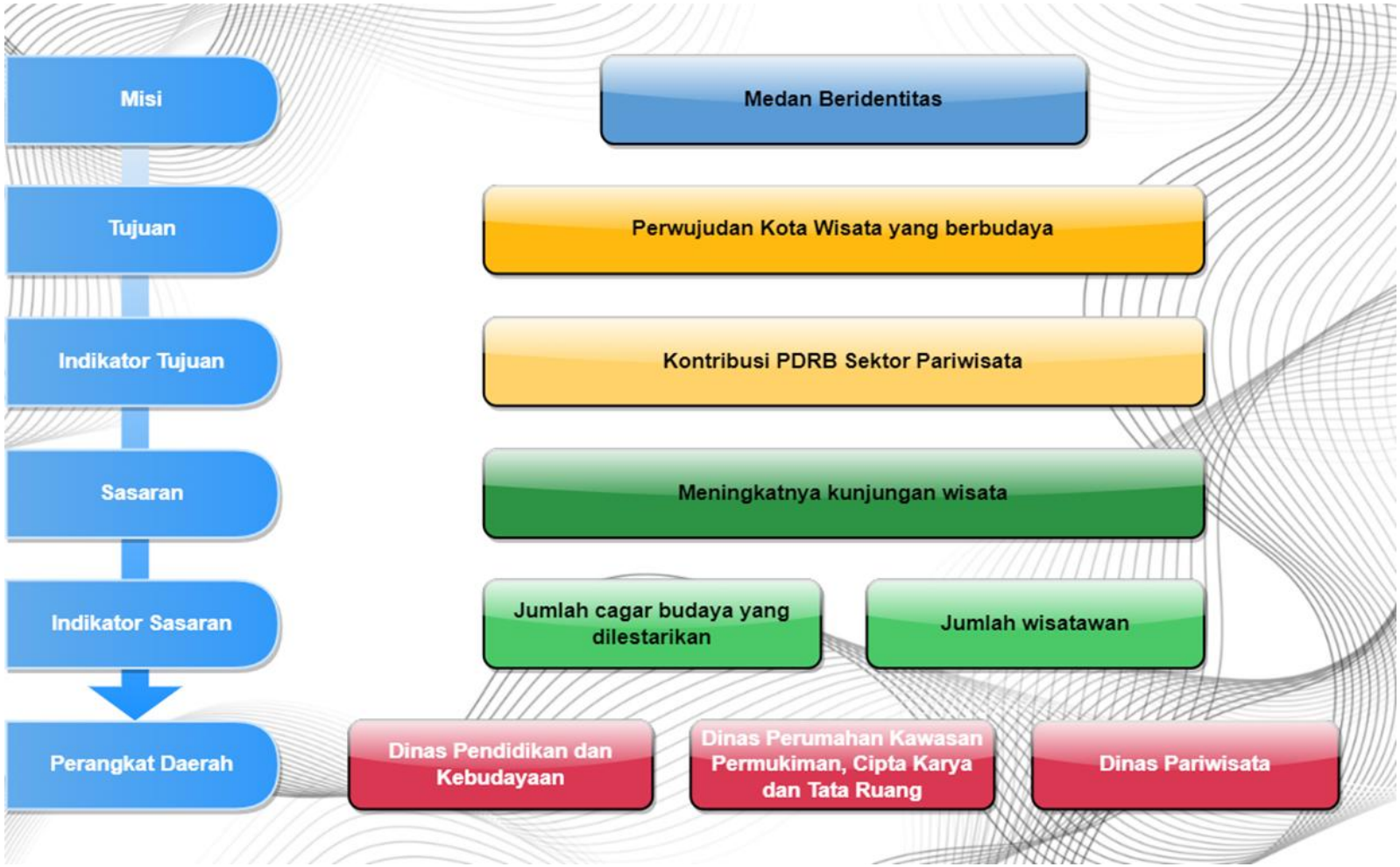
Gambar 4.6.
Misi 4 – Medan Membangun



Gambar 4.7.
Misi 5 – Medan Kondusif



Gambar 4.8.
Misi 6 – Medan Inovatif



Gambar 4.9.
Misi 7 – Medan Beridentitaasdasd

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi, Misi Kota Medan Tahun 2021-2026 serta menciptakan pembangunan Kota Medan selama lima tahun ke depan yang terarah dalam mencapai tujuan pembangunan, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Strategi dan Kebijakan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan strategi dan kebijakan melalui integrasi dalam perencanaan kewilayahan. Dengan metode ini, berbagai potensi dan permasalahan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal diidentifikasi sebagai basis dalam penentuan strategi. Melalui penggunaan metode ini, diharapkan dapat diperoleh strategi dan kebijakan yang bersifat menyeluruh serta mampu menjawab tantangan pembangunan serta isu-isu strategis yang dihadapi pemerintah Kota Medan.

Pembangunan Kota Medan tahun 2021-2026 disusun berdasarkan dua bentuk utama, yaitu tema pembangunan dan perumusan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran. Tema pembangunan merujuk kepada pernyataan yang menjelaskan bagaimana visi dan misi pembangunan serta target capaian setiap tahunnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitas akan terwujud jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu kepada misi pembangunan kota tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Medan. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Medan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Arah kebijakan pembangunan dirumuskan sebagai langkah-langkah strategis guna mewujudkan strategi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Penyelenggaraan arah kebijakan setiap tahunnya akan membentuk fokus atau tema pembangunan. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif							
Misi 1 : Medan Berkah							
1	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan Pendapatan Per Kapita	1	Perluasan informasi tenaga kerja dan peningkatan keterampilan Tenaga Kerja	1	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
						2	Penyebarluasan informasi pasar kerja
						3	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
				2	Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku usaha melalui pemberdayaan UMKM dan pembentukan Koperasi	1	Peningkatan kualitas database koperasi dan UMKM Kota Medan
						2	Peningkatan kualitas akses dan informasi koperasi dan UMKM kepada masyarakat
						3	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan koperasi (termasuk koperasi rumah ibadah) dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM
						4	Fasilitasi pembinaan pelaku usaha dan pemberian bantuan peralatan UMKM
				3	Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	1	Sosialisasi kebiijakan tata kelola perusahaan yang layak
						2	Monitoring penerapan kebijakan tata kelola perusahaan yang layak
						3	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							hubungan industrial
				4	Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	1	Pengembangan *urban farming*
				5	Meningkatkan kelembagaan petani dan pembudidayaan ikan	1	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
		2	Menurunkan persentase kemiskinan	1	Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	1	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu
						2	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
						3	Pembangunan sistem pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu
						4	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
						5	Peningkatan produktivitas PMKS melalui pemberdayaan sosial
						6	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS
				2	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	1	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
						2	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana
						3	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan
						4	Penguatan lintas sektor dalam penanganan bencana dan perlindungan sosial

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						5	Membangun budaya sadar bencana dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
						6	Optimalisasi masyarakat sadar bencana
				3	Menurunkan Angka Kemiskinan	1	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat kelurahan
						2	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah
						3	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan
						4	Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin
						5	Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui perlindungan dan jaminan sosial
						6	Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pemberdayaan di kelurahan
				4	Pemberdayaan masyarakat rentan rawan pangan untuk melakukan *urban farming* guna meningkatkan kemapuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga	1	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan
				5	Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumber daya lokal	1	Pembangunan jejaring ketahanan pangan
				6	Melaksanakan edukasi masyarakat secara berkelanjutan guna	1	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					menumbuhkan pola konsumsi pangan beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan pokok tertentu		
				7	Pembentukan jejaring kerjasama dengan wilayah sentra produksi sekitar guna memenuhi stok dan cadangan pangan serta kesetabilan harga	1	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
Misi 2 : Medan Maju							
1	Peningkatan kualitas SDM	1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik	1	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan
						2	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah
						3	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern
						4	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern, dan berkualitas melalui peningkatan tenaga pendidik PAUD
						5	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan minat baca dini
						6	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata melalui sertifikasi tenaga pendidik

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				2	Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	1	Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas
						2	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah
						3	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern
						4	Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan PAUD di kelurahan
						5	Meningkatkan budaya membaca melalui peningkatan fasilitas pojok baca dan perpustakaan keliling
						6	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui akreditasi sekolah
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan status gizi masyarakat	1	Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat kelurahan
						2	Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita
						3	Penguatan sistem surveilans gizi
						4	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.
				2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1	Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2	Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jejaring puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh steakholder, dan penguatan konsep wilayah kerja
						3	Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*).
						4	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan
						5	Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
						6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
				3	Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	1	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang
						2	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat
						3	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat
						4	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) dan gizi masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						5	Penguatan lintas sektor dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
						6	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat
				4	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit
						2	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/ wabah dan pandemi
						3	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi masyarakat
						4	Mendorong penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular
						5	Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk membangun budaya GERMAS dalam rangka mencegah penyakit menular
						6	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
				5	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	1	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat
						2	Pengintegrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor
						3	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
						4	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							dan swasta
						5	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)
						6	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/universal health coverage
				6	Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	1	Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
						2	Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi
						3	Meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana
						4	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk
						5	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah
						6	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
				7	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1	Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan
						2	Peningkatan advokasi dan komunikasi
						3	Penguatan reporting dan *real time surveillance* penyakit menular dan tidak menular
						4	Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat
				8	Peningkatan kesehatan lingkungan	1	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higenis
Misi 3 : Medan Bersih							
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	1	Meningkatnya Akuntabilitas	1	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	1	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
						2	Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
						3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
						4	Peningkatan Kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntanbilitas kinerja pemerintah kota
						5	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang
						6	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
				2	Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah
						2	Mendorong peningkatan kapasitas APIP
						3	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM
						4	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan
						5	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
						6	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
				3	Mewujudkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban keuangan/ barang yang produktif, transparan, serta akuntabel	1	Optimalisasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau Kerjasama dengan sektor swasta
						2	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
						3	Peningkatan kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kota
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	1	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan Dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi
						2	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan
						3	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan
						4	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan
						5	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal
						6	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
				2	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi	1	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					dan Penyederhanaan Proses Perizinan.		Penyederhanaan Proses Perizina
						2	Mengembangkan aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
						3	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri
						4	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri
						5	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima
						6	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu
				3	Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	1	Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing- masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan ditransformasi menjadi data digital
						2	Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing- masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan
						3	Penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)
						4	Menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
						5	Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						6	Pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan
		3	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, SDM Badan Riset dan Inovasi serta dukungan sarana dan prasarana	1	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional
						2	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
						3	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Badan Riset dan Inovasi Daerah berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
						4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
						5	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Badan Riset dan Inovasi Daerah berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
						6	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Badan Riset dan Inovasi

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							Daerah berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
Misi 4 : Medan Membangun							
1	Peningkatan kualitas infrastruktur	1	Penurunan luas kawasan kumuh	1	Kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	1	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan
						2	Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan
						3	Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
						4	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
						5	Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di Kota Medan
						6	Penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
		2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan kualitas air dan udara melalui pengawasan terhadap potensi pencemaran serta	1	Melengkapi spesikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan PBG dan pembebasan tanah masyarakat untuk

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					mengembangkan kualitas RTH privat dengan penerapan SOP implementasi peraturan PBG dan pembebasan lahan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas RTH publik		dikonversi menjadi RTH
						2	Meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan PBG, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat
						3	Menyusun regulasi dan standar yang ketat untuk industri, transportasi, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap polusi
						4	Memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan
						5	Mendorong penggunaan teknologi bersih, seperti energi terbarukan dan sistem transportasi berkelanjutan
						6	Mendorong penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengolahan limbah dan Mengatur kebijakan tentang pembuangan limbah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan
		3	Menurunkan titik banjir/genangan	1	Mengimplementasikan sistem pengelolaan air terpadu yang melibatkan retensi air dan peningkatan drainase untuk mengurangi risiko banjir di Kota Medan	1	Mengindentifikasi wilayah rawan banjir di seluruh Kota Medan (pembuatan/revisi masterplan drainase per 5 tahun sekali)
						2	Normalisasi Sungai secara rutin dan berkelanjutan, bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II)
						3	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						4	Penerapan system pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk penguranagn, daur ulang, dan penanganan limbah yang tepat, termasuk penegakan hukum peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan
						5	Pembangunan dan pemeliharaan polder/ kolam retensi
Misi 5 : Medan Kondusif							
1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	1	Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	1	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman
						2	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis
						3	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah
						4	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
						5	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
				2	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba
						2	Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba
						3	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba
						4	Meningkatkan kerjasama kelompok

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba
						5	Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif
						6	Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
				3	Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas
						2	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan
						3	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah
						4	Peningkatan komunikasi koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya
						5	Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas
Misi 6 : Medan Inovatif							
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	1	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pennyederhanaan prosedur perizinan dan investasi	1	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata
						2	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
						3	Mengembangkan produk ekonomi kreatif

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							berbasis kekayaan intelektual (HAKI)
						4	Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan
						5	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan
						6	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan
						7	Pengembangan Infrastruktur pelayanan perizinan yang terintegrasi/terpadu
						8	Penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi
				2	Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	1	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media
						2	Penyusunan profil investasi dalam bentuk IPRO (*Investment Project Ready to Offer*)
						3	Kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan unsur terkait dalam membangun iklim investasi yang kondusif termasuk ketersediaan tenaga kerja di Kota Medan
						4	Mengoptimalkan fungsi database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian, dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan
						5	Meningkatkan penanaman modal dibidang

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							usaha yang menyerap tenaga kerja
						6	Menggiatkan aktivitas promosi potensi investasi
						7	Meningkatkan daya saing, daya tarik, dan akses pasar serta optimisasi profil peluang investasi
		2	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	1	Meningkatkan kualitas UMKM	1	Fasilitas perluasan akses pembiayaan UMKM
						2	Meningkatkan kualitas tenaga kerja UMKM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan
						3	Fasilitasi perluasan akses pasar UMKM melalui pasar ekspor
						4	Digitalisasi UMKM
						5	Meningkatkan kapasitas dan kapabalitas UMKM
						6	Reformasi perizinan, pemotongan biaya administrasi, dan pengurangan hambatan yang menghambat pertumbuhan UMKM
						7	Mendorong terjadinya kemitraan dan kolaborasi antara UMKM dengan sektor swasta, Lembaga Pendidikan, dan organisasi pengembangan usaha
						8	Penetapan produk unggulan daerah
						9	Penetapan/pengembangan sentra Industri Kecil Menengah
				2	Memperkuat pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan dan pengawasan harga serta stok barang yang optimal dan efisien	1	Pelaksanaan pasar murah khususnya dalam rangka pengendalian inflasi dan peringatan hari-hari besar
						2	Penguatan akses informasi harga pasar,

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							terutama barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dengan system informasi perdagangan
						3	Penguatan perlindungan konsumen melalui sosialisasi, operasi pasar dan optimalisasi pendataan UTTP
				3	Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian sektor UMKM	1	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan
						2	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan
						3	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan
						4	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan sektor UMKM
						5	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							penelitian dan pengembangan sektor UMKM
						6	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan sektor UMKM
		3	Meningkatnya PAD	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan PAD
						2	Pengoptimalan pengelolaan pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah
						3	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD
						4	Pengoptimalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta sektor pariwisata untuk mendorong pendapatan daerah
						5	Optimasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau kerjasama dengan sektor swasta.
						6	Mendorong peningkatan investasi melalui aktivitas promosi, pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peluang kerja bagi masyarakat.
						7	Pengembangan potensi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi bagi perekonomian
		4	Meningkatnya Inovasi Daerah	1	Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, SDM litbang dan dukungan sarana dan	1	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
					prasarana		
						2	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
						3	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
						4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
						5	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
						6	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
Misi 7 : Medan Beridentitas							
1	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	1	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
						2	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok- kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
						3	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan tempat / wadah kesenian
						4	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional
						5	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya
						6	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Warisan Cagar Budaya
				2	Menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	1	Mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya
						2	Melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						3	Melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya
						4	Melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya
						5	Mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya
						6	Tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.
				3	Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	1	Menyusun delineasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (*buffer zones*)
						2	Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing- masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (Perwal)
						3	Sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan pada Perwal RTB:
						4	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						5	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (*city branding*, *calendar event*, dll)
						6	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan
				4	Meningkatkan penataan Kawasan objek wisata	1	Peningkatan kualitas database objek wisata
						2	Menyusun kebijakan pariwisata berbasis penelitian sesuai kebutuhan dan pembangunan pariwisata dan ekonomi di Kota Medan
						3	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
				5	Peningkatan promosi dan pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan	1	Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
						2	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
				6	Optimalisasi kegiatan ekonomi kreatif	1	Peningkatan kualitas database pelaku ekonomi kreatif
						2	Meningkatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pelaku ekonomi kreatif
						3	Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui *Creative Hub* di Kota Medan
						4	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi

6.2. Tema Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, yaitu pada tahun 2022 - 2026. Berikut adalah rangkuman tema pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan.



Gambar 6.1.
Tema Pembangunan Kota Medan

Tema pembangunan pada periode awal RPJMD Kota Medan, pada tahun 2022 difokuskan kepada akselerasi pemulihan ekonomi kota. Pengembangan tema ini dipersiapkan berdasarkan kondisi faktual dimana ekonomi Indonesia khususnya di Kota Medan masih difokuskan pada pemulihan dari pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 lalu. Kota Medan telah melalui berbagai gejolak yang diakibatkan oleh pandemi serta mengalami kontraksi perekonomian hingga 1,98% pada tahun 2020. Perekonomian di Kota Medan kembali meningkat

di tahun 2021 mengingat berbagai aktivitas mulai pulih dalam fase *new norma* pandemi COVID-19. Dalam upaya optimisasi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 fokus melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Upaya yang dilakukan pada perencanaan tahun 2022 berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah berupaya mengoptimalkan perekonomian kota sekaligus membangun kembali pelayanan dasar dan infrastruktur untuk mencapai Medan Berkah, Maju dan Kondusif.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mempersiapkan agenda pembangunan untuk mencapai peningkatan pelayanan dasar dan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pemulihan ekonomi kota pada tahun sebelumnya harus didukung dengan pemberian pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu pembangunan infrastruktur harus tetap dioptimalkan untuk menggapai kesempatan sekaligus memberikan fasilitas peningkatan pelayanan melalui infrastruktur yang lebih baik.

Peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tahun sebelumnya menjadi modal dasar dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Medan akan membangun sinergi dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah juga akan lebih fokus kepada reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk mewujudkan Medan Berkah, Maju dan Kondusif.

Tema pembangunan pada tahun 2025 difokuskan kepada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perekonomian untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan urusan pemerintahan menyangkut pelayanan publik khususnya dalam bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan dalam upaya membangun indeks pembangunan manusia di Kota Medan menuju Medan Berkah yang maju dan kondusif.

Pada tahap akhir perencanaan pembangunan tahun 2026, Kota Medan memiliki fokus untuk mewujudkan visi Medan Berkah yang Maju dan Kondusif. Tema pembangunan sebelumnya telah mengupayakan pemulihan ekonomi,

peningkatan serta pemantapan infrastruktur dan pelayanan publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian sebelumnya diharapkan mampu mengoptimalkan upaya mencapai visi Kota Medan. Pada tahun terakhir ini diharapkan Kota Medant elah memiliki stabilitas kemandirian wilayah yang mendukung Kota Medan untuk mencapai Medan Berkah yang Maju dan Kondusif.

Penyusunan sinergi keterkaitan arah kebijakan dan tema pembangunan tahunan, serta keterkaitan antara tujuan sampai arah kebijakan pembangunan Kota Medan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Medan Per Tahun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif								
Misi 1 : Medan Berkah								
1.1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan per kapita	1.1.1.1. Perluasan informasi tenaga kerja dan peningkatan keterampilan Tenaga Kerja	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan	Penyebarluasan informasi pasar kerja	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Fasilitas pelatihan keterampilan ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
		1.1.1.2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi	Peninngkatan kualitas database koperasi dan UMKM Kota Medan	Peningkatan kualitas akses dan informasi koperasi dan UMKM kepada masyarakat	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan koperasi (termasuk koperasi rumah ibadah) dan UMKM melalui pelatihan, pendampongan dan fasilitas dalam pengembangan koperasi dan UMKM	Fasilitas pembinaan pelaku usaha dan pemberian bantuan peralatan UMKM	Fasilitas pembinaan pelaku usaha dan pemberian bantuan peralatan UMKM	Fasilitas pembinaan pelaku usaha dan pemberian bantuan peralatan UMKM
		1.1.1.3. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	Sosialisasi kebijakann tata kelola perusahaan yang layak	Monitoring penerapan kebijakan tata kelola perusahaan yang layak	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial	Fasilitas pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial
		1.1.1.4 menumbuhkan kreatifitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan	Pengembangan urban farming	Pengembangan urban farming	Pengembangan urban farming	Pengembangan urban farming	Pengembangan urban farming	Pengembangan urban farming
		1.1.1.5 meningkatkan	Penumbuhan	Penumbuhan	Penumbuhan	Penumbuhan	Penumbuhan	Penumbuhan kreativitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kelembagaan petani dan pembudidayaan ikan	kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	kreativitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
	1.1.2. Menurunnya Persentase kemiskinan	1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Pembangunan sistem pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu	Peningkatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Peningkatan produktivitas PMKS melalui pemberdayaan sosial	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS
		1.1.2.2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan	Penguatan lintas sektor dalam penanganan bencana dan perlindungan sosial	Membangun budaya sadar bencana dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Optimalisasi masyarakat sadar bencana
		1.1.2.3. Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat kelurahan	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin	Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pemberdayaan di kelurahan
		1.1.2.4 Pemberdayaan masyarakat rentan rawan pangan untuk melakukan urban farming guna meningkatkan kemapuan memenuhi kebutuhan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan	Menjaga kesetabilan harga dan stok bahan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		keluarga						
		1.1.2.5 Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumber daya lokal	Pembangunan jejaring ketahanan pangan	Pembangunan jejaring ketahanan pangan	Pembangunan jejaring ketahanan pangan	Pembangunan jejaring ketahanan pangan	Pembangunan jejaring ketahanan pangan	Pembangunan jejaring ketahanan pangan
		1.1.2.6 Melaksanakan edukasi masyarakat secara berkelanjutan guna menumbuhkan pola konsumsi pangan beragam dan mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi pangan pokok tertentu	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam produksi pertanian dan perikanan
		1.1.2.7 Pembentukan jejaring kerjasama dengan wilayah sentra produksi sekitar guna memenuhi stok dan cadangan pangan serta kesetabilan harga	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan	Penumbuhan kreatifitas dan inovasi dalam produksi dalam pertanian dan perikanan
Misi 2: Medan Maju								
2.1. Peningkatan kualitas SDM	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern, dan berkualitas melalui peningkatan tenaga pendidik PAUD	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui optimalisasi kualitas tenaga pendidik dan minat baca dini	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata melalui sertifikasi tenaga pendidik
		2.1.1.2. Meningkatkan	Mewujudkan	Mewujudkan	Mewujudkan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas	infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah	sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan PAUD di kelurahan	budaya membaca melalui peningkatan fasilitas pojok baca dan perpustakaan keliling	pelayanan pendidikan melalui akreditasi sekolah
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Peningkatan status gizi masyarakat	Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat kelurahan	Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita	Penguatan sistem surveilans gizi	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.	Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting.
		2.1.2.2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan dan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jejaring puskesmas, penguatan promotive, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik	Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care)	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan	Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Terjadinya pembiayaan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
				pratama, penguatan aksi multisectoral melalui pelibatan seluruh steakholder, dan penguatan konsep wilayah kerja				
		2.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PBHS) dan gizi masyarakat	Penguatan lintas sektor dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat
		2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/ wabah dan pandemi	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi masyarakat	Mendorong penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk membangun budaya GERMAS dalam rangka mencegah penyakit menular	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat	Pengintegrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC)	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/universal health coverage
		2.1.2.6. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana	Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan	Memperkuat sistem informasi keluarga yang	Meningkatkan advokasi dan penggerakan	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(KB) dan keluarga berkualitas	pengendalian penduduk	terintegrasi	program Bangga Kencana	komitmen lintas sektor pengendalian penduduk	Berencana (KB) di setiap wilayah	dan kesejahteraan keluarga
		2.1.2.7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan	Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan advokasi dan komunikasi	Penguatan reporting dan real time surveillance penyakit menular dan tidak menular	Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat	Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat
		2.1.2.8. Peningkatan kesehatan lingkungan	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higenis	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higenis	Peningkatan akses air bersih dan perilaku higenis
Misi 3 : Medan Bersih								
3.1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas	3.1.1.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntanbilitas kinerja pemerintah kota	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
		3.1.1.2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Mendorong peningkatan kapasitas APIP	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
		3.1.1.3. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban keuangan/ barang yang produktif, transparan, serta akuntabel	Optimalisasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau Kerjasama dengan sektor swasta	Optimalisasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau Kerjasama dengan sektor	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kota	Peningkatan kompetensi ASN untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
				swasta				
	3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.2.1. Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan Dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
		3.1.2.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	Mengembangkan aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu
		3.1.2.3. Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	Identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan ditransformasi menjadi data digital	Menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan	Penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)	Menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak	Penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan	Pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan
	3.1.3. Meningkatnya Inovasi Daerah	3.1.3.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		pengembangan daerah, SDM badan riset dan inovasi serta dukungan sarana dan prasarana	profesional	database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
Misi 4 : Medan Membangun								
4.1. Peningkatan kualitas infrastruktur	4.1.1. Penurunan luas kawasan kumuh	4.1.1.1. Kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan	Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan	Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di Kota Medan	Penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
	4.1.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.1.2.1. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui pengawasan terhadap potensi pencemaran serta mengembangkan kualitas RTH privat dengan penerapan SOP implementasi peraturan PBG dan pembebasan lahan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas RTH publik	Melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan PBG dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	Meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan PBG, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat	Menyusun regulasi dan standar yang ketat untuk industri, transportasi, dan sektor lain yang berkontribusi terhadap polusi	Memberikan insentif untuk investasi dalam infrastruktur energi terbarukan	Mendorong penggunaan teknologi bersih, seperti energi terbarukan dan sistem transportasi berkelanjutan	Mendorong penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengolahan limbah dan mengatur kebijakan tentang pembuangan limbah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.1.3. Menurunkan titik banjir/penanganan	4.1.3.1. Mengimplementasikan sistem pengelolaan air terpadu yang melibatkan retensi air dan peningkatan drainase untuk mengurangi risiko banjir di Kota Medan	Mengindentifikasi wilayah rawan banjir di seluruh Kota Medan (pembuatan/revisi masterplan drainase per 5 tahun sekali)	Normalisasi Sungai secara rutin dan berkelanjutan, bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II)	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	Penerapan system pengelolaan sampah yang terpadu, termasuk penguranagn, daur ulang, dan penanganan limbah yang tepat, termasuk penegakan hukum peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan	Pembangunan dan pemeliharaan polder/kolam retensi	Pembangunan dan pemeliharaan polder/kolam retensi
Misi 5 : Medan Kondusif								
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba	Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba	Meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba	Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif	Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
		5.1.1.3. Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah	Peningkatan komunikasi koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-	Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
							langkah pencegahan dan penanggulangannya	
Misi 6 : Medan Inovatif								
6.1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	6.1.1. Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	6.1.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pennyederhanaan prosedur perizinan dan investasi	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan	1. Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI) 2. Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan	1. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataan 2. Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan	Pengembangan Infrastruktur pelayanan perizinan yang terintegrasi/terpadu	Penyusunan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi
		6.1.1.2. Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media	Penyusunan profil investasi dalam bentuk IPRO (Investment Project Ready to Offer)	1. Kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan unsur terkait dalam membangun iklim investasi yang kondusif termasuk ketersediaan tenaga kerja di Kota Medan 2. Mengoptimalkan fungsi database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan,	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja	Menggiatkan aktivitas promosi potensi investasi	Meningkatkan daya saing, daya tarik, dan akses pasar serta optimisasi profil peluang investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
					pelayanan, pengendalian, dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan			
	6.1.2. Meningkatnya UMKM Naik Kelas	6.1.2.1. Meningkatkan kualitas UMKM	1. Fasilitas perluasan akses pembiayaan UMKM 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja UMKM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan 3. Fasilitasi perluasan akses pasar UMKM melalui pasar ekspor	1. Fasilitas perluasan akses pembiayaan UMKM 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja UMKM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan 3. Fasilitasi perluasan akses pasar UMKM melalui pasar ekspor	1. Digitalisasi UMKM 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabalitas UMKM	Reformasi perizinan, pemotongan biaya administrasi, dan pengurangan hambatan yang menghambat pertumbuhan UMKM	Mendorong terjadinya kemitraan dan kolaborasi antara UMKM dengan sektor swasta, Lembaga Pendidikan, dan organisasi pengembangan usaha	1. Penetapan produk unggulan daerah 2. Penetapan/pengembangan sentra Industri Kecil Menengah
		6.1.2.2. Memperkuat pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan dan pengawasan harga serta stok barang yang optimal dan efisien	Pelaksanaan pasar murah khususnya dalam rangka pengendalian inflasi dan peringatan hari-hari besar	Pelaksanaan pasar murah khususnya dalam rangka pengendalian inflasi dan peringatan hari-hari besar	Penguatan akses informasi harga pasar, terutama barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dengan system informasi perdagangan	Penguatan akses informasi harga pasar, terutama barang kebutuhan pokok yang terintegrasi dengan system informasi perdagangan	Penguatan perlindungan konsumen melalui sosialisasi, operasi pasar dan optimalisasi pendataan UTTP	Penguatan perlindungan konsumen melalui sosialisasi, operasi pasar dan optimalisasi pendataan UTTP
		6.1.2.3. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan sektor UMKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian sektor UMKM	penelitian dan pengembangan	pengembangan	meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	pengembangan sektor UMKM	mutu penelitian dan pengembangan sektor UMKM	
	6.1.3. Meningkatnya PAD	6.1.3.1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan PAD 2. Pengoptimalan pengelolaan pajak dan retribusi untuk mendorong pendapatan daerah	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD	Pengoptimalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta sektor pariwisata untuk mendorong pendapatan daerah	Optimasi pengelolaan aset dan pemanfaatan yang efisien melalui penyewaan, penjualan, atau kerjasama dengan sektor swasta.	Mendorong peningkatan investasi melalui aktivitas promosi, pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peluang kerja bagi masyarakat.	Pengembangan potensi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi bagi perekonomian
	6.1.4. Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.4.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, SDM litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
Misi 7 : Medan Beridentitas								
7.1. Perwujudan Kota Wisata yang	7.1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	7.1.1.1. Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
berbudaya		dan dibina	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	tempat / wadah kesenian	penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional	Cagar Budaya	Benda dan Warisan Cagar Budaya
		7.1.1.2. Menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	Mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya	Melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya	Melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya	Melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya	Mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya	Tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.
		7.1.1.3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya	Menyusun delineasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau	Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing-masing kawasan cagar budaya yang berpayung	Sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, calendar event, dll)	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		masyarakat	(buffer zones)	hukum (Perwal)	pada Perwal RTB:			
		7.1.1.4 meningkatkan penataan Kawasan objek wisata	Peningkatan kualitas database objek wisata	Menyususn kebijakan pariwisata berbasis penelitian sesuai kebutuhan dan pembangunan pariwisata dan ekonomi di Kota Medan	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
		7.1.1.5 peningkatan promosi dan pembinaan Sumber Daya Manusia kepariwisataan	Melakukan pennguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		7.1.1.6 Optimalisasi kegiatan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas database pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Cretive Hub di Kota Medan	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi	Perluasan pangsa pasar produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi

6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan terkait rencana struktur ruang Kota Medan disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Rencana struktur ruang Kota Medan harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada di dalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan.

Tujuan dari Penataan Ruang Wilayah Kota Medan yang tertuang dalam RTRW Tahun 2022-2042 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya strategi dan kebijakan pembangunan kota selama 20 tahun mendatang yang mencerminkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar kecamatan dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang Kota Medan tidak terlepas dari peran, fungsi dan kedudukannya dalam wilayah yang lebih luas.

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Medan sesuai dengan Pasal 4 RTRW Kota Medan 2022-2042 bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan kedua, memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya tujuan penataan ruang Kota Medan tersebut, diharapkan RTRW Kota Medan dapat menjadi acuan sebagai pusat kegiatan wilayah yang mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Medan meliputi peningkatan pada sistem pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air serta infrastruktur perkotaan. Dengan mengacu kepada dokumen RTRW Kota Medan Tahun 2022-2042, terdapat beberapa kawasan yang menjadi fokus utama dalam pengembangan penataan ruang, meliputi:

1. Kawasan Strategis Kota

   Kawasan Strategis Kota pada RTRW dikembangkan dengan mengacu kepada

dua fokus wilayah, yaitu Kawasan Strategis Kota Pusat Kegiatan Primer, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional. Kawasan Strategis Kota Pusat Kegiatan Primer difokuskan pada perwujudan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah di sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. Kawasan ini terletak di tujuh kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, dan Kecamatan Medan Kota. Selain Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis lainnya yang ditetapkan di Kota Medan adalah Kawasan Strategis Kota dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi yang ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan.

2. Kawasan Peruntukan Industri

   Kawasan peruntukan industri dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas industri yang mengembangkan perekonomian melalui lapangan usaha pengolahan industri berskala besar. Kawasan peruntukan industri ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Sunggal.

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

   Kawasan ini diperuntukkan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi dalam menciptakan kegiatan usaha melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional serta pusat-pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan ini tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kota Medan. Revitalisasi Pasar lnduk Sambu menjadi pasar skala kota dan pemindahan ke Pasar Induk di Medan Tuntungan, dan revitalisasi kawasan pasar yang saat ini kondisinya sudah buruk.

4. Kawasan Transportasi

   Kawasan ini dipersiapkan untuk mendukung pembangunan jaringan transportasi Kota Medan serta akses ke luar dan dalam Kota Medan. Kawasan transportasi terletak di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan

Sunggal, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan. Perwujudan kawasan transportasi meliputi pembangunan jalan lingkar serta peningkatan akses ruas jalan dan jalan penghubung. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan terminal terpadu serta terminal barang untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian. Lajur kereta api dalam kota telah dirumuskan dalam RTRW

5. Kawasan Perkantoran

   Kawasan perkantoran diperuntukkan sebagai kawasan pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Johar, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Timur, dan Kecamatan Medan Tuntungan.

6. Kawasan Permukiman

   Kawasan permukiman tersebar di seluruh Kecamatan Kota Medan. Peruntukannya adalah permukiman masyarakat yang dikelompokkan menjadi kawasan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. perwujudan kawasan perumahan.

Selain itu, RTRW Kota Medan juga mengatur kawasan lindung sebagai acuan dalam memanfaatkan pola ruang untuk perlindungan, meliputi kawasan perlindungan setempat seluas 515 hektar pada sempadan sungai dan pinggiran danau. Kawasan rawan bencana sebagaimana menjadi kawasan perlindungan juga telah diatur sebagai kawasan yang sering terjadi atau berpotensi mengalami bencana.

Sebagai bagian dari kawasan yang diperuntukkan untuk budidaya, Kota Medan mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan seluas 121 hektar di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Tuntungan. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Kota Medan juga berupaya mewujudkan kawasan pariwisata yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan pariwisata. Dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata, kegiatan yang diprioritaskan meliputi pariwisata budaya,

alam dan buatan.

6.4. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan

Arah kebijakan pengembangan berbasis kewilayahan mengacu kepada pengembangan dalam RTRW meliputi fokus pengembangan Kawasan Strategis Kota, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi dan Kawasan Perkantoran serta Permukiman.

6.4.1. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kawasan Strategis Kota pada RTRW dikembangkan dengan mengacu kepada dua fokus wilayah, meliputi:

1. Kawasan Strategis Kota Pusat Kegiatan Primer, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional. Kawasan Strategis Kota Pusat Kegiatan Primer difokuskan pada perwujudan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah di sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. Kawasan ini terletak di tujuh kecamatan, meliputi Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, dan Kecamatan Medan Kota. Arahan penanganan KSK Pusat Kegiatan Primer tersebut difokuskan melalui:
    a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan yang diintegrasikan dengan penanganan kawasan cagar budaya;
    b. penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara jalan dan rel kereta api melalui pembangunan jalan layang, underpass, sky cross dan jalur kereta api layang;
    c. penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana pelayanan air minum, drainase, air limbah, dan peningkatan jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana pada wilayah

yang lebih luas; dan

d. pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman.

2. Kawasan Strategis Kota Kawasan Utara yang memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis industri berteknologi tinggi. Kawasan ini terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan. Kawasan ini dimaksudkan untuk pemusatan kegiatan industri berwawasan lingkungan, pembangunan pusat pengolahan limbah medis dan B3 serta pengembangan kawasan campuran dengan konsep waterfront city sebagai penyediaan permukiman untuk mendukung pengembangan kegiatan industri.

Perwujudan kawasan ini sebagai kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi dan teknologi tinggi maka hal yang perlu dilakukan adanya suatu kerjasama pemerintah dan swasta terutama dalam hal pengelolaan dan pengendalian kawasan tersebut. Skema kerja sama ini memiliki berbagai manfaat, di antaranya efisiensi anggaran pendapatan daerah, meningkatkan mutu pelayanan serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Namun, kerjasama pemerintah dan swasta juga dapat memiliki tantangan dan risiko. Beberapa risiko yang mungkin timbul meliputi masalah regulasi, perbedaan kepentingan dan potensi pengabaian tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh sektor swasta. Oleh karena itu, penting untuk merancang kerangka kerja yang jelas, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan kawasan strategis ini.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis kota:

1. Pengembangan kawasan metropolitan khususnya pada kawasan pusat kota di Lapangan Merdeka dan Labuhan, Kawasan peruntukan industri di bagian utara, kawasan tertinggal (kumuh), serta kawasan perdagangan dan pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo);
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah utara Kota Medan, strategi yang dilakukan adalah:
   a. mengarahkan pembangunan industri wilayah utara Kota Medan dengan

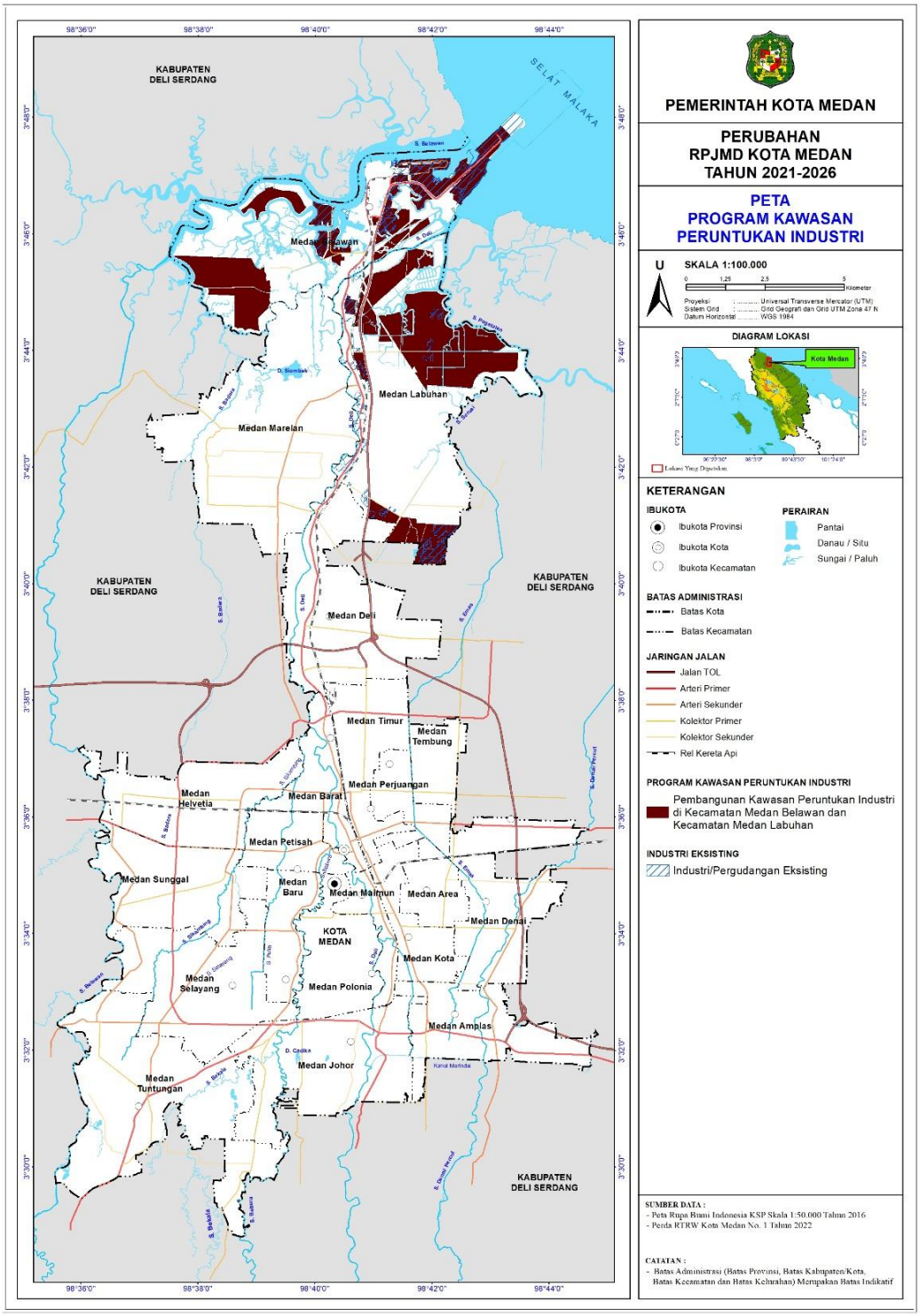
konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;

b. menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungi sebagai green belt;
c. mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
d. mengembangkan kegiatan industri kreatif

3. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia; dan perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem;
4. Perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, dilakukan melalui:
   a. melakukan konservasi terhadap kawasan rimba kota;
   b. mendorong pembangunan kawasan eko-wisata; dan
   c. mendorong pembangunan rencana pengembangan sistem polder.

6.4.2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas industri yang mengembangkan perekonomian melalui lapangan usaha pengolahan industri berskala besar. Kawasan peruntukan industri dialokasikan kurang lebih 2.944 hektar dan ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Sunggal. Pemerintah mengarahkan pembangunan kawasan industri dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan, menyediakan kebutuhan RTH yang berfungsi sebagai greenbelt, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan industri serta mengembangkan kegiatan industri kreatif.



Gambar 6.2.
Peta Kawasan Peruntukan Industri

Fokus pengembangan pada kawasan ini meliputi:

1. pembangunan instalasi pengolahan limbah industri;
2. penyusunan Master Plan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Medan

Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan;
3. penyusunan Master Plan Pergudangan di Kecamatan Medan Belawan;
4. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan;
5. pengembangan Kawasan Minapolitan;
6. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
7. pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri kreatif;
8. pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri manufaktur;
9. pengembangan dan peningkatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dan
10. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri perikanan.

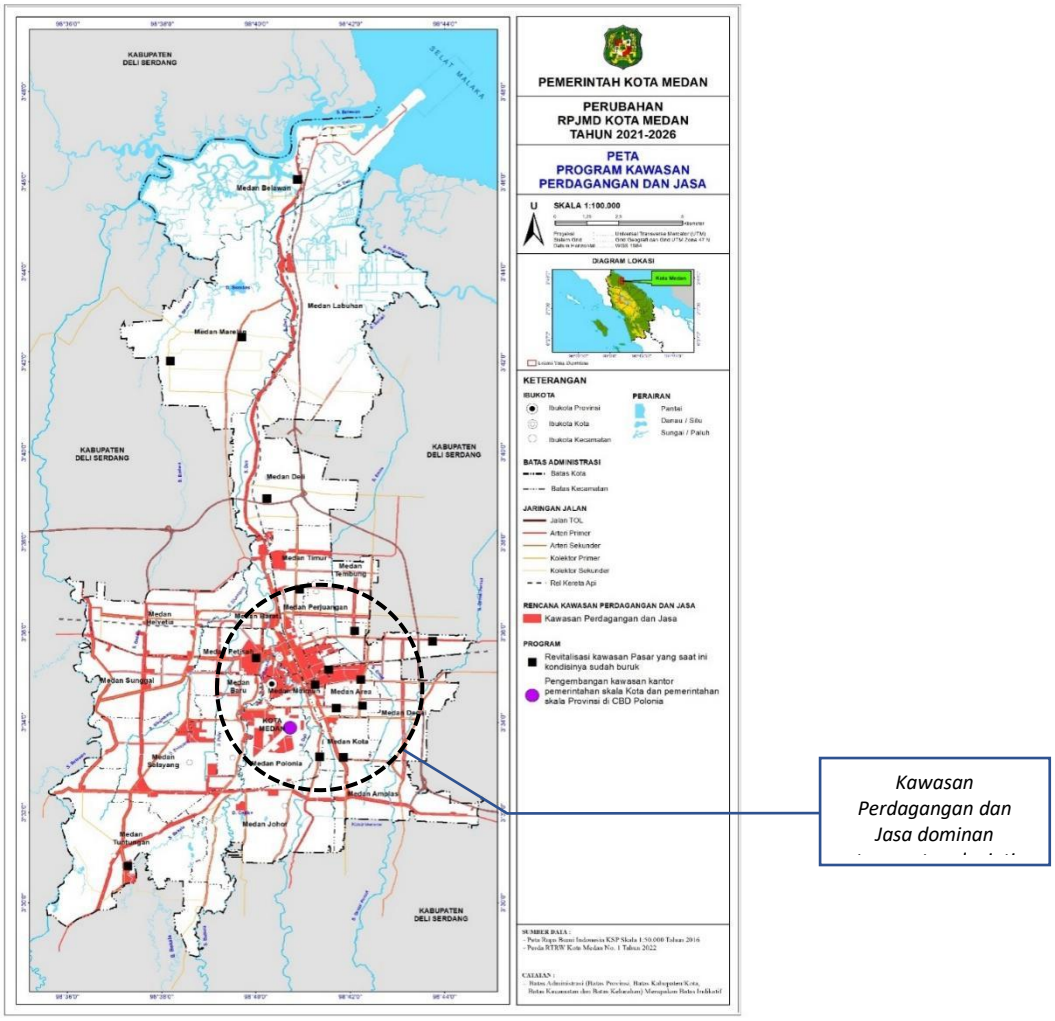
6.4.3. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan ini diperuntukkan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi dalam menciptakan kegiatan usaha melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional serta pusat-pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan ini ditetapkan seluas kurang lebih 2.892 hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kota Medan. Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, adalah sebagai berikut:

1. Mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa;
2. Mengendalikan dan menertibkan kawasan perdagangan dan jasa, mengatur dan menata pasar-pasar yang semrawut dan tumpah kejalan yang mengganggu baik dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;
3. Membatasi pengembangan kegiatan perdagangan secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah;
4. Mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi, seperti pendekatan super blok atau mix-used di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan tersebut;
5. Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau

menurun kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas/skala pelayanan yang telah ditetapkan;

6. Mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal dan kaki lima;
7. Mengkonsentrasikan kegiatan jasa pada lokasi yang sudah berkembang; dan
8. Membatasi pengembangan kegiatan jasa secara linier pada ruas jalan dengan tingkat pelayanan rendah.
9. Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, serta pembangunan pusat-pusat perdagangan skala regional.

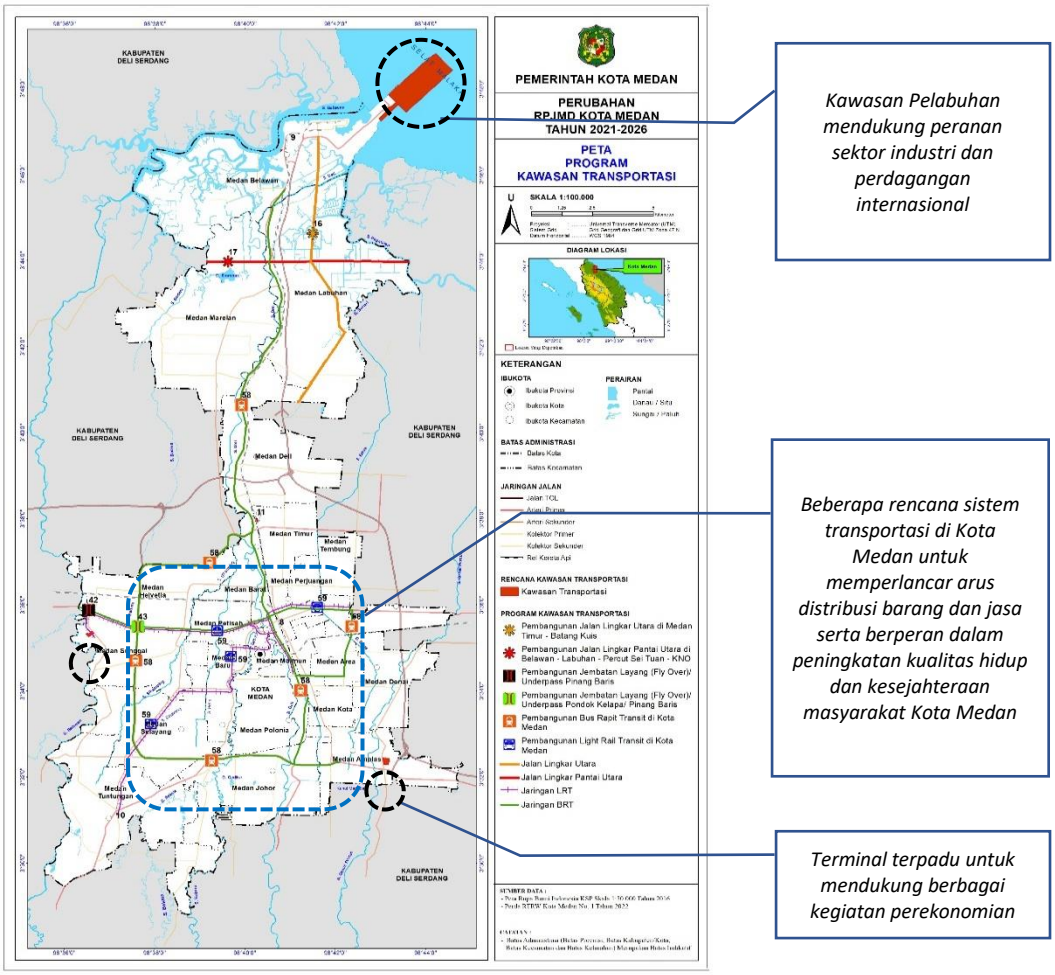


Gambar 6.3.
Peta Kawasan Perdagangan dan Jasa

6.4.4. Kawasan Transportasi

Kawasan ini dipersiapkan untuk mendukung pembangunan jaringan

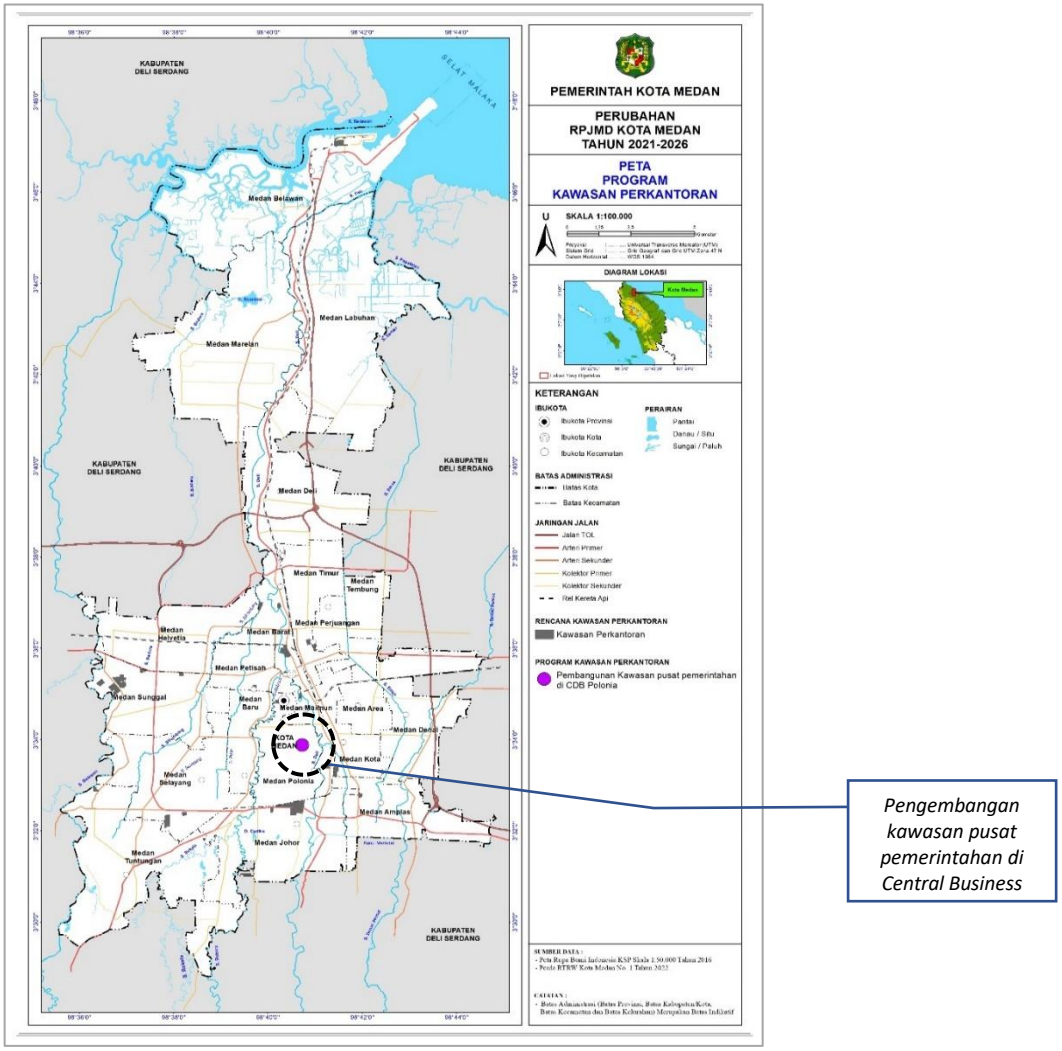
transportasi Kota Medan serta akses ke luar dan dalam Kota Medan. Kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 301 hektar dan terdapat di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan. Perwujudan kawasan transportasi meliputi pembangunan jalan lingkar serta peningkatan akses ruas jalan dan jalan penghubung. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan terminal terpadu serta terminal barang untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian. Lajur kereta api dalam kota telah dirumuskan dalam RTRW. Pemerintah juga mempersiapkan pelabuhan untuk hubungan internasional untuk meningkatkan peranan sektor industri dan perdagangan internasional. Kawasan transportasi akan diintegrasikan dengan berbagai area pasar dan pusat industri.



Gambar 6.4.
Peta Kawasan Transportasi

6.4.5. Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran diperuntukkan sebagai kawasan pemerintahan seluas kurang lebih 137 hektar yang terdapat di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Johar, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Timur, dan Kecamatan Medan Tuntungan. Salah satu fokus kawasan perkantoran adalah pengembangan kawasan pusat pemerintahan di *Central Business District* (*CBD*) Polonia.



Gambar 6.5.
Peta Kawasan Perkantoran

6.4.6. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman dipersiapkan untuk mendukung Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan

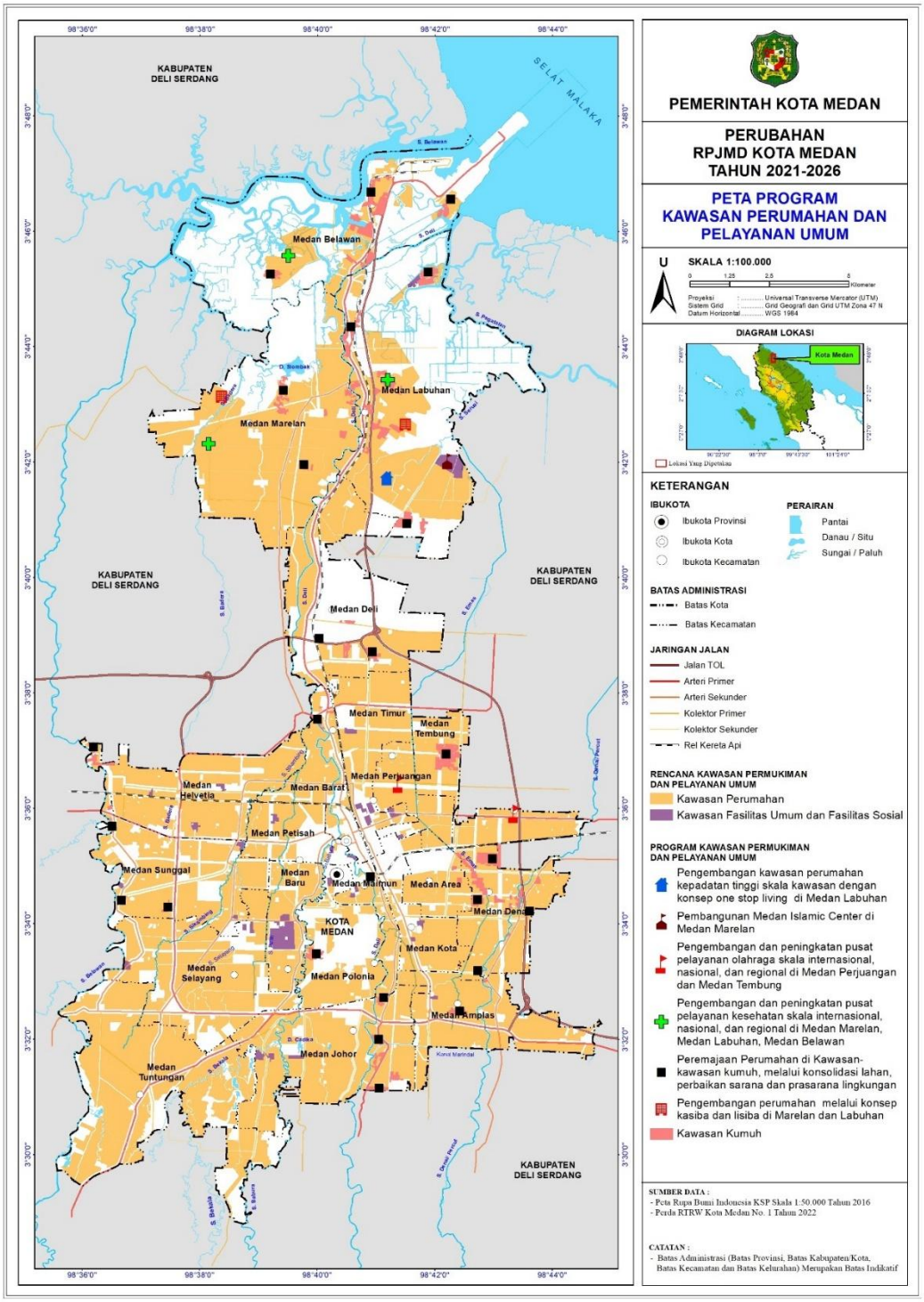
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Kawasan permukiman tersebar di seluruh Kecamatan Kota Medan. Peruntukannya adalah permukiman masyarakat dengan luas kurang lebih 15.646 hektar. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi kawasan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Perwujudan kawasan perumahan, meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Medan;
2. pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba;
3. penetapan kawasan prioritas sebagai upaya penataan dan peningkatan kualitas pemukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Medan Belawan;
4. pengembangan pemukiman dengan memanfaatkan sistem Bank Tanah (Land Banking) untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat miskin; dan
5. pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi skala kawasan dengan konsep one stop living.

Sedangkan perwujudan kawasan fasilitas umum dan sosial, meliputi:

1. peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan di Kota Medan;
2. peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan;
3. peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan;
4. Pembangunan Medan Islamic Center; dan
5. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional.



Gambar 6.6.
Peta Kawasan Perumahan dan Fasilitas Umum

6.5. Penyelarasan RPJMD dengan RTRW Kota Medan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, terdapat dua acuan yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan syarat selaras. Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi dan investasi di daerah.

Sebagai peraturan daerah, RTRW juga memiliki kepastian hukum. Sedangkan RPJPD dan RPJMD, memberi payung konseptual bagi pembangunan secara aspasial. RPJPD dan RPJMD berbicara boleh tidaknya pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada RTRW. Penerjemahan RTRW dalam Rencana Pembangunan tercantum dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Kedua dokumen tersebut saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program utama, pembiayaan dan lokasi program.

Peraturan yang digunakan sebagai dasar utama dalam penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD dan RPJMD, yaitu:

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263, bahwa RPJPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka secara otomatis visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD juga harus mengacu pada RTRW;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 menyatakan bahwa selain untuk merencanakan pembangunan spasial,

RTRW juga merupakan pedoman bagi dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah;

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 160 bahwa penelaahan dokumen perencanaan pembangunan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani RTRW, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dalam RPJPD dan RPJMD dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW. Dasar pemikirannya adalah RPJMD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW agar kesesuaian pola ruang dan struktur ruang di setiap wilayah dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan daerah.

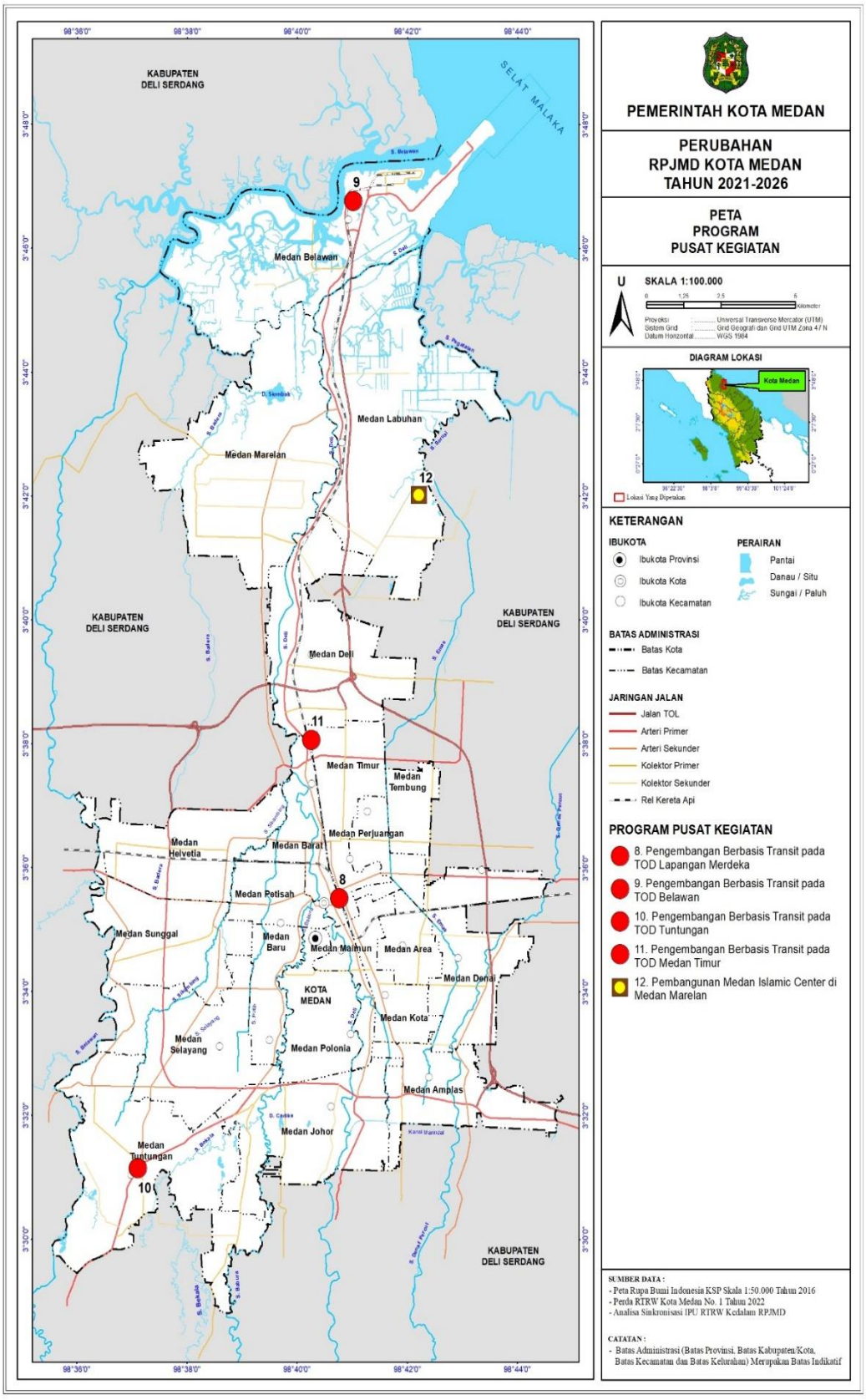
RTRW dan RPJPD memiliki dimensi waktu yang sama yaitu 20 tahun dan kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Untuk itu, sinergi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi/penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD maupun RPJMD mutlak dibutuhkan sebagai acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan

Untuk itu dalam kegiatan perubahan RPJMD tahun 2021 – 2026, perlu mempertimbangkan terutama program – program jangka menengah tahap I yang terdapat pada RTRW Kota Medan Tahun 2022 – 2042. Berikut ini beberapa program PJM-I RTRW Kota Medan tahap I (satu) tahun 2022 - 2027:

1. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah, terdiri dari
    a. Perwujudan Pusat Pelayanan melalui program diantaranya
        - Penyusunan dan Penetapan Peraturan Zonasi (No Point 1)
        - Penetapan Perda RTRW & RDTR Kota (No Point 2)
        - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (No Point 3)
        - Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang (No Point 5)
        - Monitoring dan Pengendalaian Pemanfaatan Ruang (No Point 6)
        - Pembuatan Foto dan Peta Garis Kota Medan (No Point 7)
        - Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Lapangan Merdeka (No Point 8)
        - Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Belawan (No Point 9)

- Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Tuntungan (No Point 10)
- Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Medan Timur (No Point 11)
- Pengembangan Medan Islamic Center (MIC) (No Point 12)

Perwujudan pusat pelayanan yang dimaksud diatas adalah perwujudan pusat pelayanan kota, sub pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan. Berikut ini beberapa program perwujudan pusat pelayanan yang dapat digambarkan secara spasial (gambar 6.7)



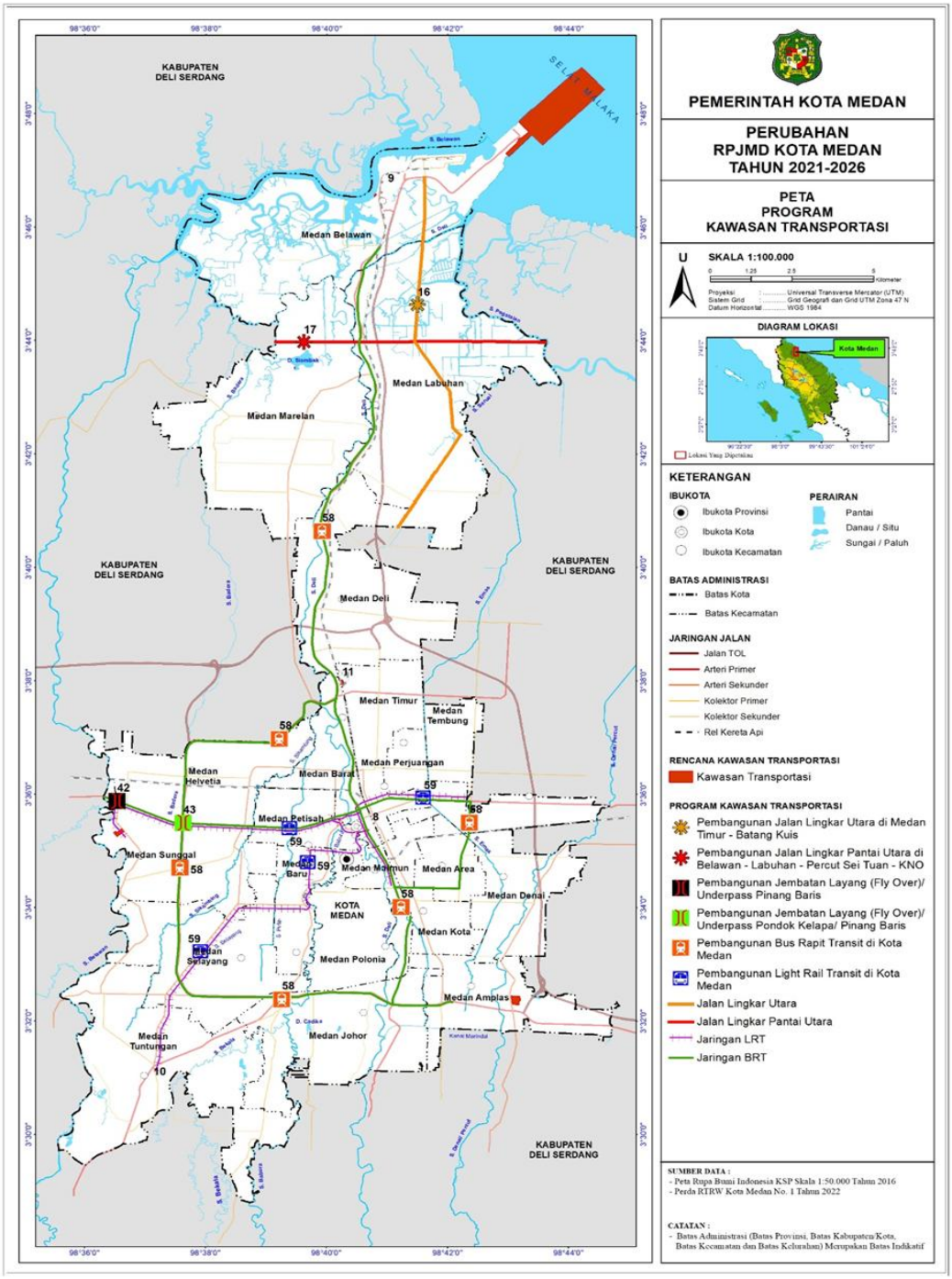
Gambar 6.7.
Peta Program Perwujudan Pusat Pelayanan

b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi (gambar 6.8), terdiri atas
   - Pembangunan Jalan Lingkar Utara (No Point 16)
   - Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara (No Point 17)
   - Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over/ Underpass) Pinang Baris (No 42)
   - Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over)/ Underpass Pondok Kelapa/ Pinang Baris (No Point 43)
   - Studi Sistem Angkutan Umum Massal (No Point 56)
   - Studi Sistem Monorail (No Point 57)
   - Pembangunan Bus Rapit Transit (No Point 58)
   - Pembangunan Light Rail Transit (No Point 59)
   - Studi Kebutuhan Kawasan Parkir Terpadu (No Point 60)

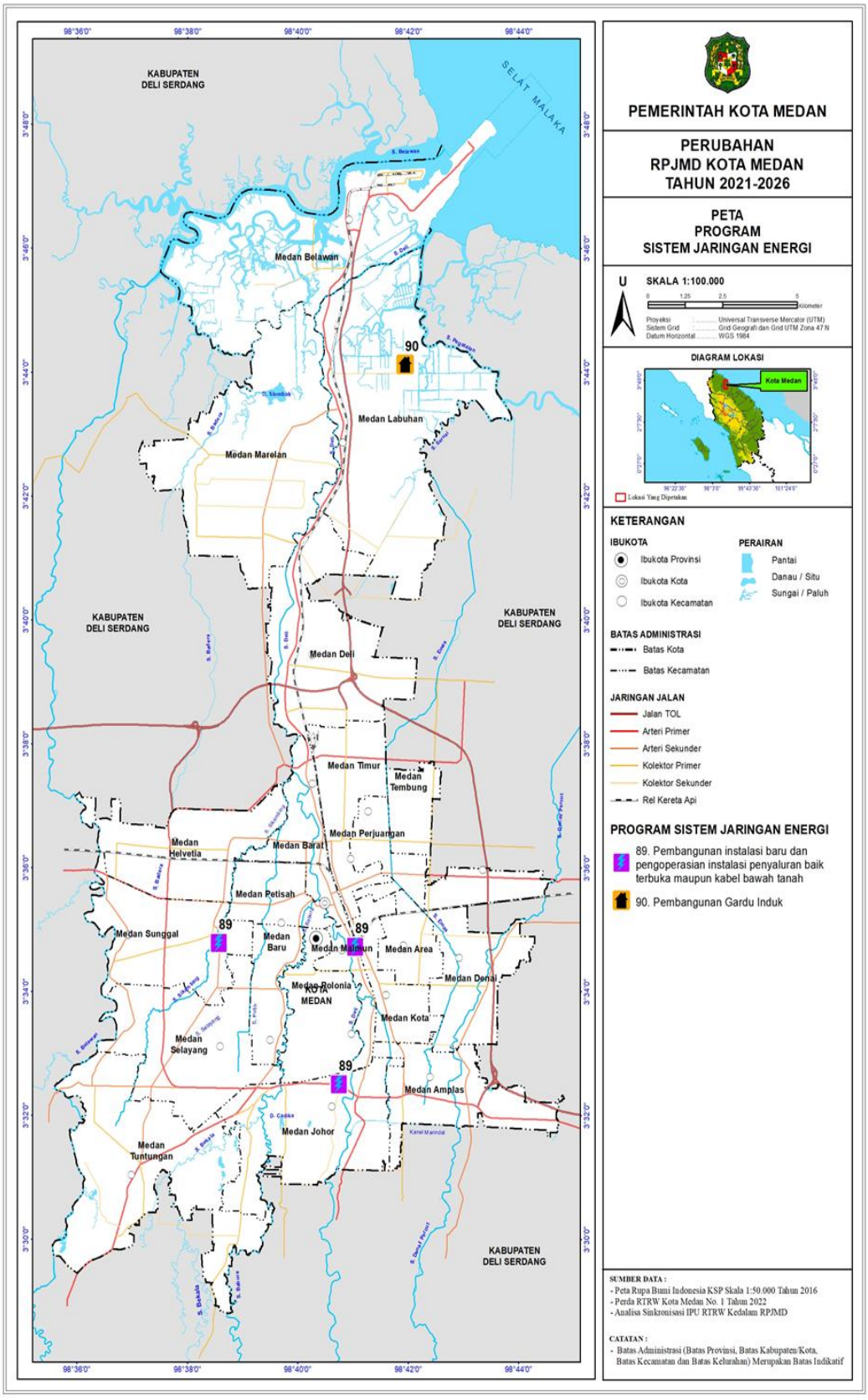
c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi (gambar 6.9), terdiri atas:
   - Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik (No Point 87)
   - Pengembangan Jaringan Listrik (No Point 88)
   - Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah (No Point 89)
   - Pembangunan Gardu Induk (No Point 90)
   - Pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi (No Point 91)
   - Perluasan Jaringan Transmisi (No Point 92)

d. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (gambar 6.10), terdiri atas:
   - Penurunan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih (No Point 95)
   - Pelestarian sumber daya air pemukaan dan air tanah yang ada si Kota Medan dengan menjaga kulitas dan kuantitasnya (No Point 96)
   - Pembangunan prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara (No Point 97)
   - Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah oleh industri (No Point 98)

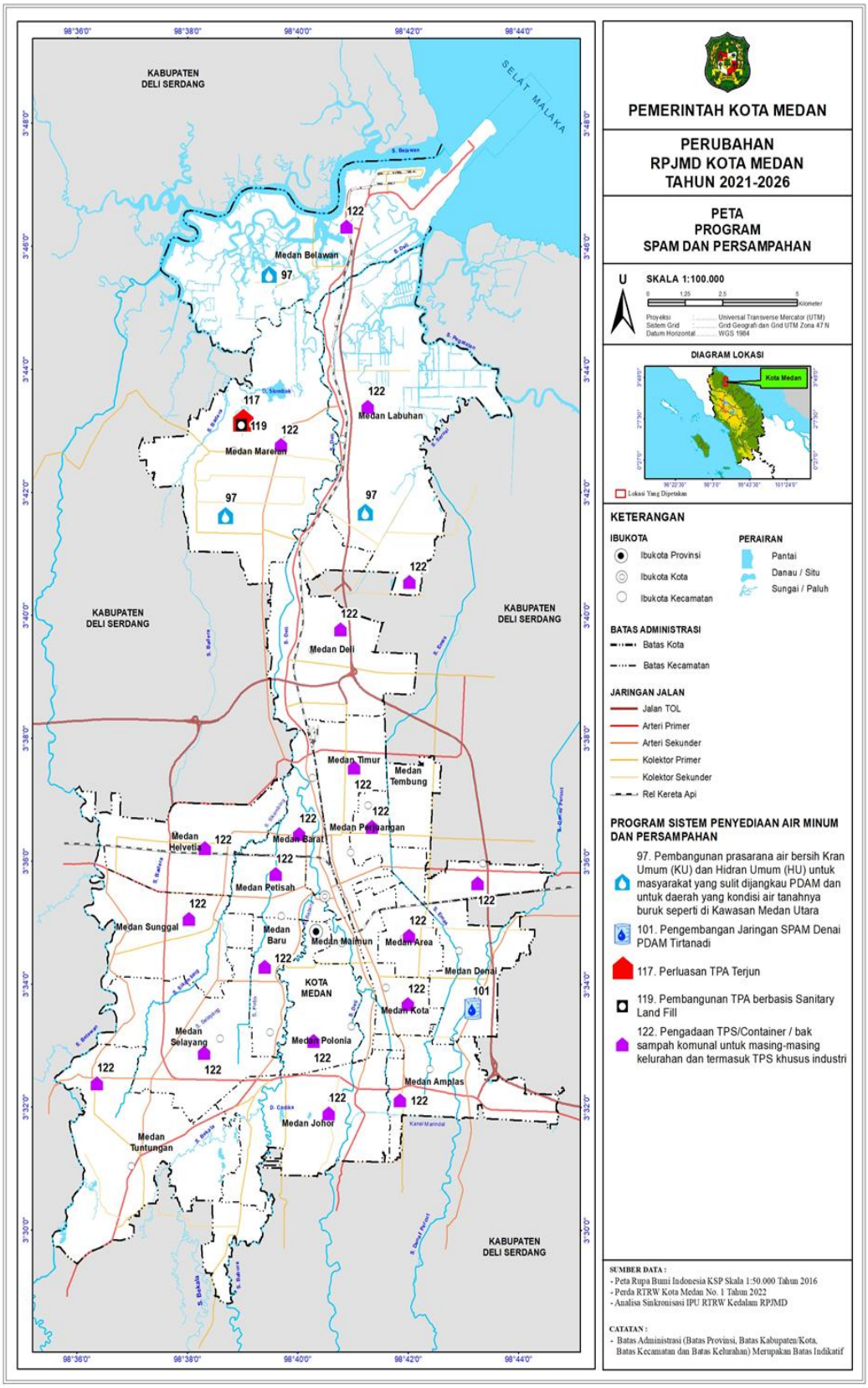
- Pembangunan SPAM Regional Mebidang (No Point 99)
- Pengembangan Jaringan TLM PDAM Tirtanadi (No Point 100)
- Pengembangan Jaringan SPAM Denai PDAM Tirtanadi (No Point 101)
- Pembangunan SPAM Regional intake Lau Simeme (No Point 102)



Gambar 6.8.
Peta Program Perwujudan Sistem Transportasi



Gambar 6.9.
Peta Program Perwujudan Jaringan Energi



Gambar 6.10.
Peta Program Perwujudan Sistem SPAM dan Persampahan

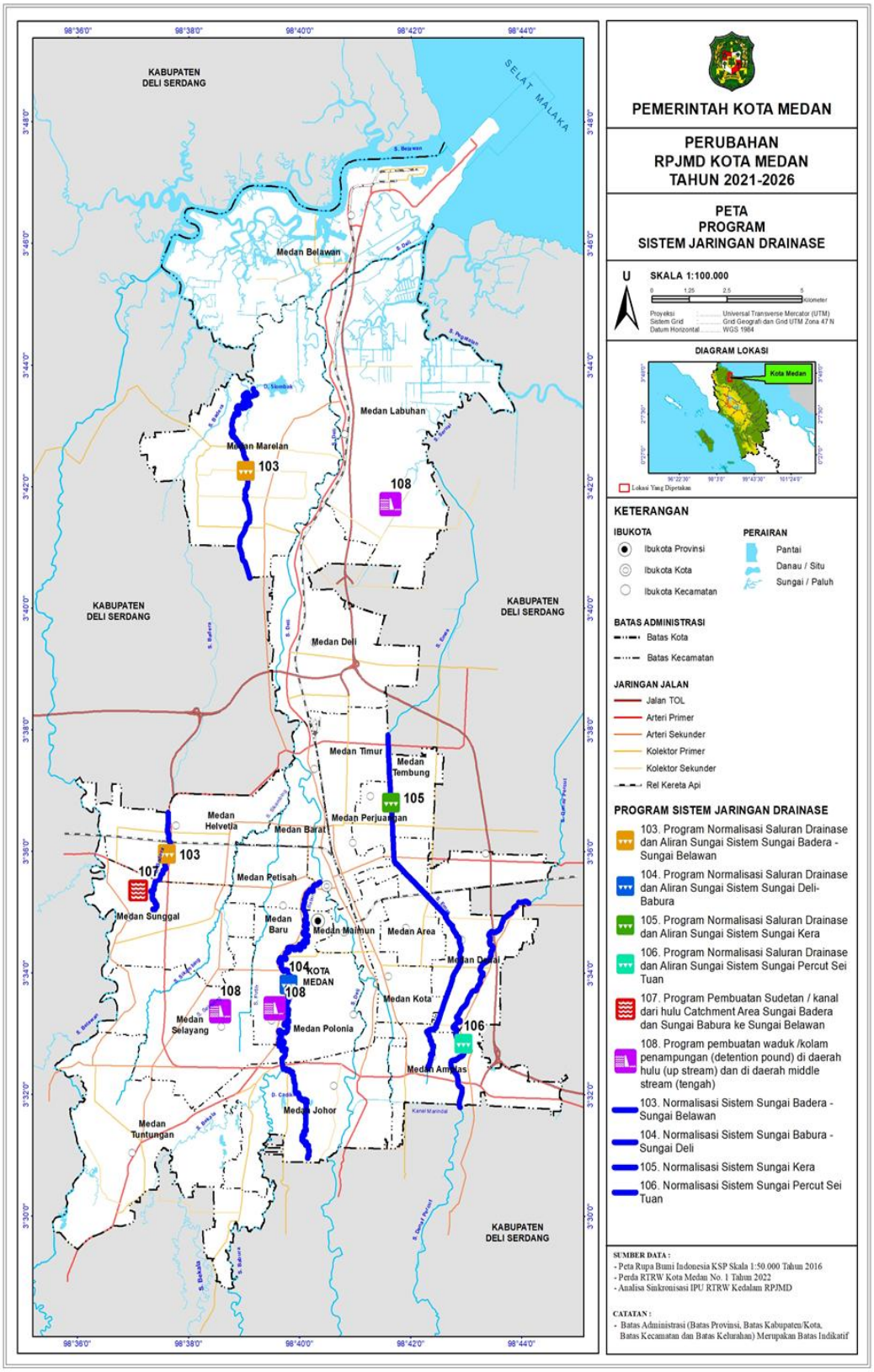
e. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan (gambar 6.10), terdiri dari:
   - Perluasan TPA Terjun (No Point 117)
   - Penutupan TPA Tajun dari sistem Open Dumping (No Point 118)
   - Pembangunan TPA berbasis Sanitary Land Fill (No Point 119)
   - Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/ composting (lingkungan RT atau RW) (No Point 120)
   - Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di Kota Medan (No Point 121)
   - Pengadaan TPS/Container / bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri (No Point 122)

f. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase (gambar 6.11), terdiri atas:
   - Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan (No Point 103)
   - Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Deli- Babura (No Point 104)
   - Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Kera (No Point 105)
   - Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Percut Sei Tuan (No Point 106)
   - Program Pembuatan Sudetan / kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan (No Point 107)
   - Program pembuatan waduk /kolam penampungan (detention pound) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah) (No Point 108)

g. Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah, terdiri atas:
   - Optimalisasi dan Perluasan Pengelola Air Limbah Domestik Terpusat (Medan Kota, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Maimun, dan Medan Barat),
   - Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/ tinja dengan menggunakan tingkat septic tank kedap skala komunal (Program Senimas) dan individu.

   Untuk perwujudan sistem air limbah tidak dapat digambarkan karena

program/kegiatan di atas tidak bersifat spasial.



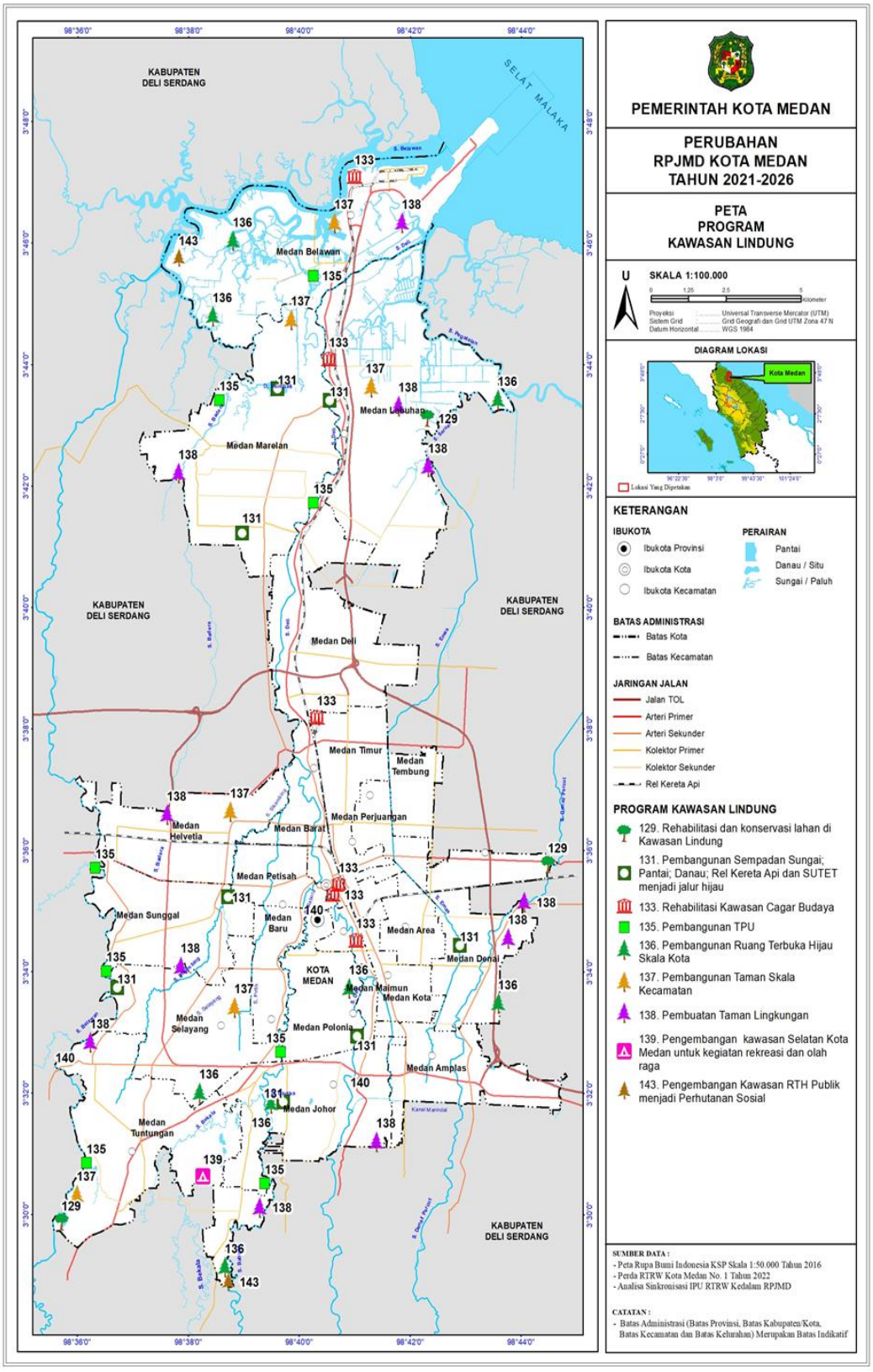
Gambar 6.11.
Peta Program Perwujudan Sistem Drainase

2. Perwujudan Pola Ruang Wilayah

a. Perwujudan Kawasan Lindung (gambar 6.12), terdiri atas:

- Pemetaan Kawasan Lindung di selirih Kota Medan
- Penetapan kawasan Lindung (hutan mangrove, Sempadan Sungai dan anak sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli, Babura, Sungai Percut, Sungai Kera) (No Point 126)
- Penguasaan Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan (No Point 127)
- Penataan Batas Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan (No Point 128)
- Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung (No Point 129)
- Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung (No Point 130)
- Pembangunan Sempadan Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan SUTET menjadi jalur hijau (No Point 131)
- Penetapan Kawasan Cagar Budaya (No Point 132)
- Rehabilitasi Kawasan Cagar Budaya (No Point 133)
- Pengamanan dan pengendalian Kawasan Cagar Budaya (No Point 134)
- Pembangunan TPU (No Point 135)
- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Skala Kota (No Point 136)
- Pembangunan Taman Skala Kecamatan (No Point 137)
- Pembuatan Taman Lingkungan (No Point 138)
- Pengembangan kawasan Selatan Kota Medan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga (No Point 139)
- Pengembangan Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Belawan sebagai wisata air (No Point 140)
- Penyelenggaraan pengadaan taman bangunan pada lokasi-lokasi kawasan terbangun baru baik di atas lahan, di dinding bangunan, hingga di atap bangunan (No Point 141)
- Serah terima lahan PSU perumahan untuk kemudian dikembangkan menjadi RTH Publik (No Point 142)
- Pengembangan Kawasan RTH Publik menjadi Perhutanan Sosial

(No Point 143)



Gambar 6.12.
Peta Program Perwujudan Kawasan Lindung

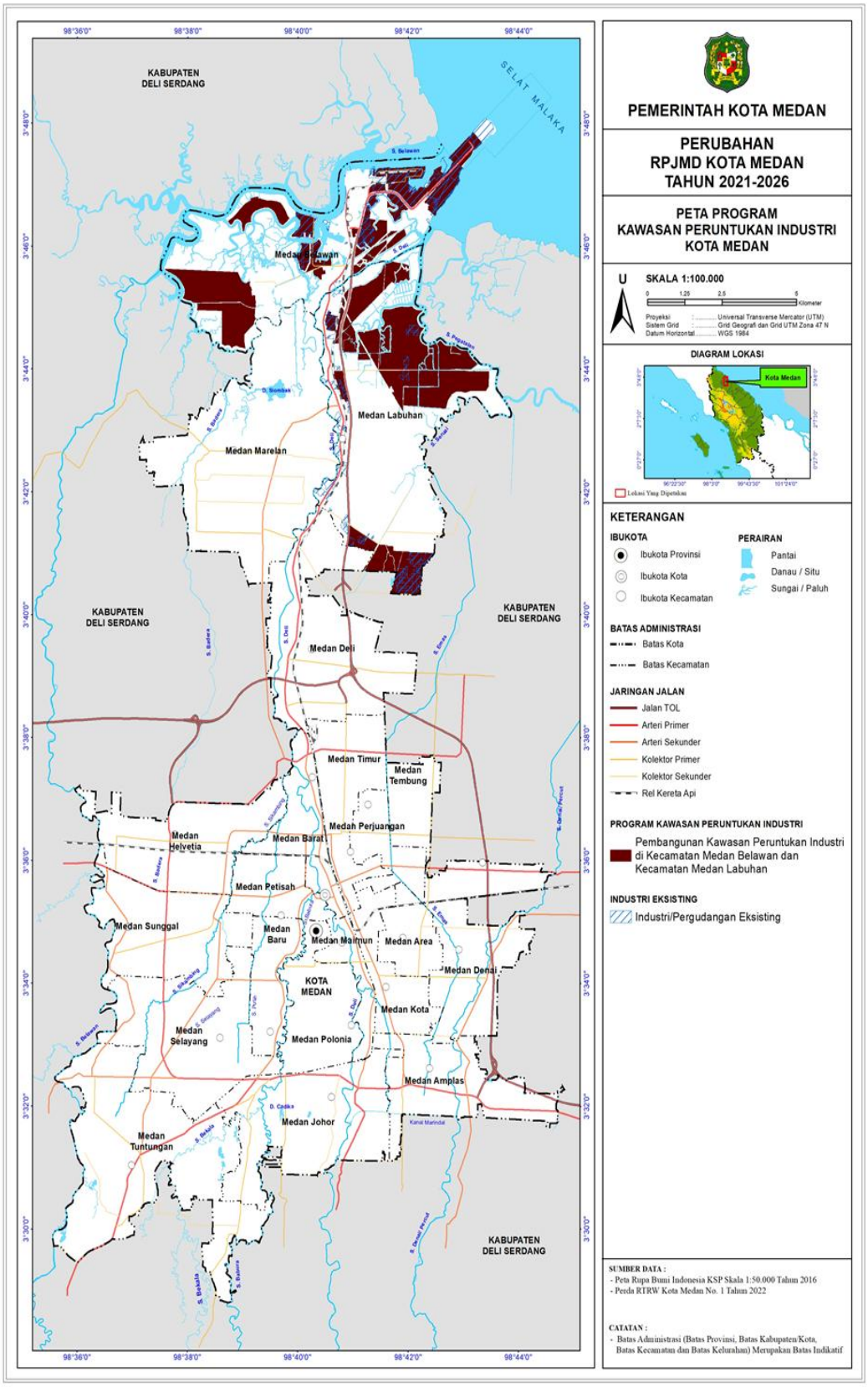
b. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, berupa program Penyusunan Master Plan Pergudangan di Kecamatan Medan Belawan. (gambar 6.13)

c. Perwujudan Kawasan Permukirnan dan Fasilitas Umum (gambar 6.14), terdiri atas:

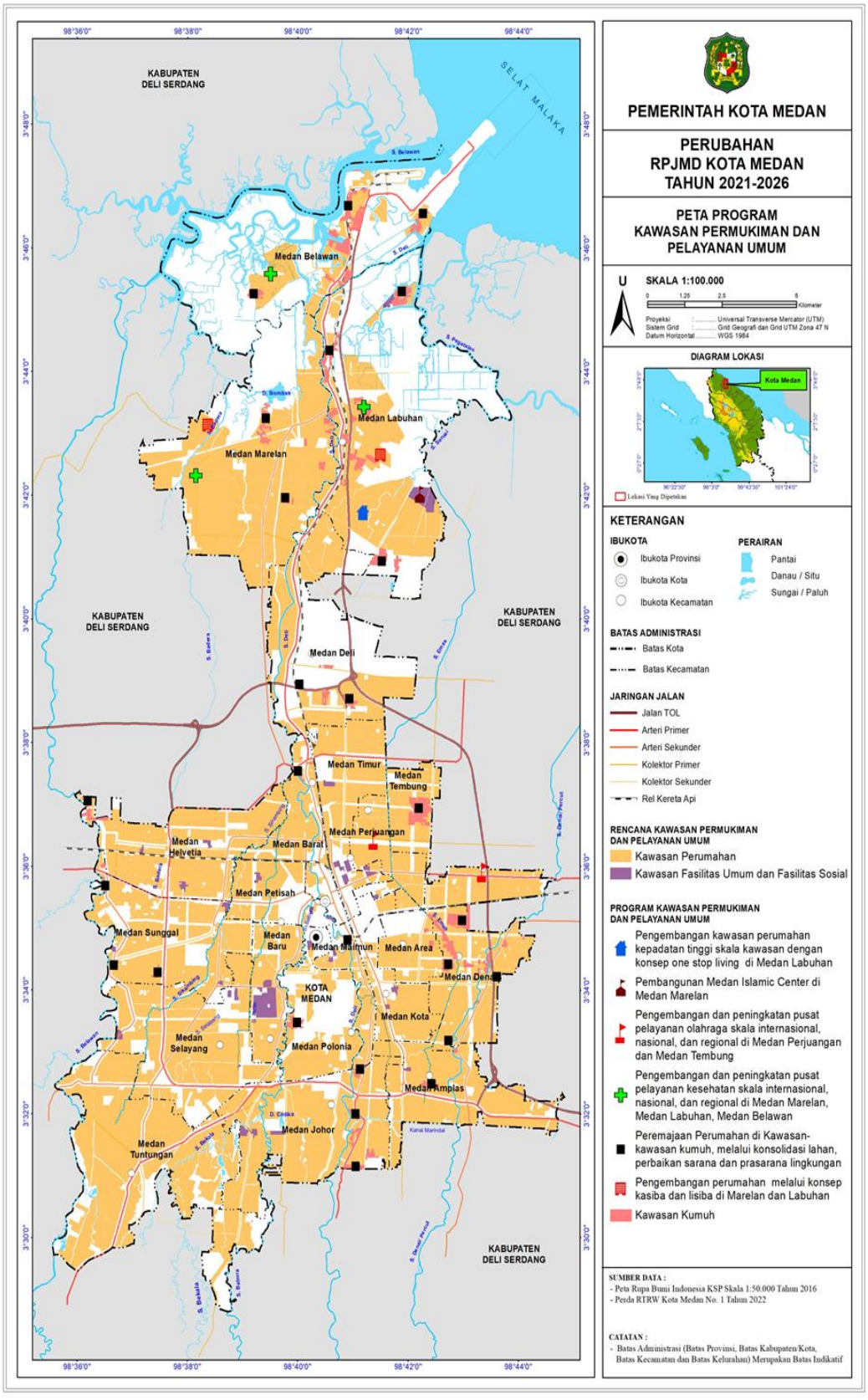
- Pembuatan dan Update Data Base Perumahan Permukiman Kota Medan (151 Kelurahan) (No Point 144)
- Peremajaan Perumahan di Kawasan- kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan (No Point 145)
- Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Medan (No Point 146)
- Pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba (No Point 147)
- Penetapan kawasan prioritas sebagai upaya penataan dan peningkatan kualitas permukiman berkepadatan tinggi di Kec. Medan Belawan (No Point 148)
- Pengembangan permukiman dengan sistem Bank Tanah (Land Banking) untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat miskin (No Point 149)
- Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi skala kawasan dengan konsep one stop living (No Point 150)
- Peningkatan sarpras pendukung fasilitas pendidikan (No Point 173)
- Peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan belawan (No Point 174)
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marela, Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawan (No Point 175)
- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah (No Point 176)
- Pengembangan Peningkatan pusat pelayanan pendidikan tinggi (No Point 178)
- Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan olahraga skala

internasional, nasional, dan regional (No Point 179)

- Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional (No Point 180)
- Pembuatan Buffer Zona antara kawasan khusus dengan Kawasan Perumahan (No Point 181)
- Pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use (No 183)
- Penyusunan Masterplan Water Front City di Kec.Medan Belawan (No Point 189)

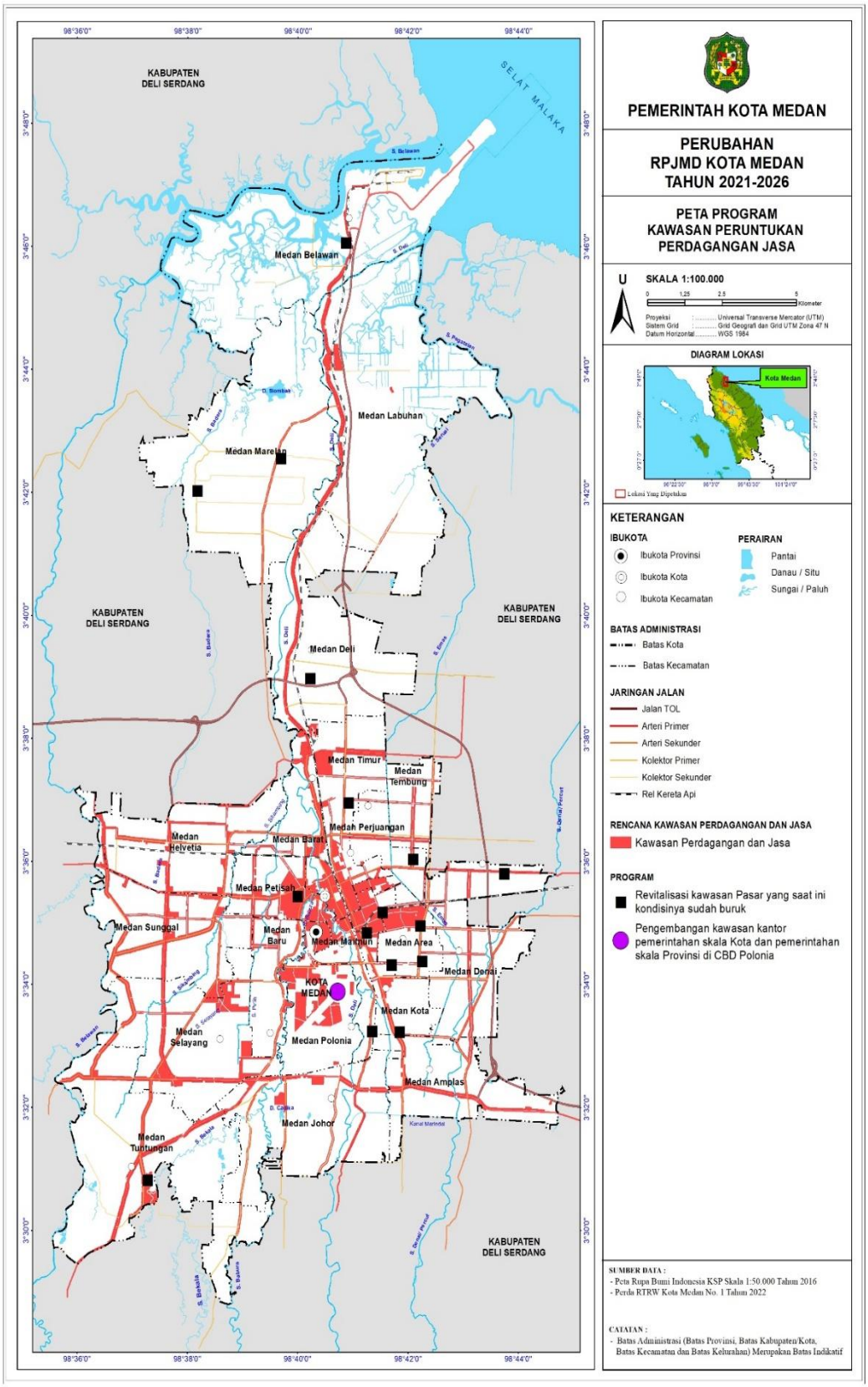


Gambar 6.13.
Peta Program Perwujudan Kawasan Industri



Gambar 6.14.
Peta Program Perwujudan Kawasan Permukiman dan SPU

d. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa (gambar 6.15), terdiri atas:
   - Revitalisasi kawasan Pasar yang saat ini kondisinya sudah buruk (No Point 152)
   - Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya (No Point 156)
   - Pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah pusat Kota Medan (No Point 157)
   - Pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder (No Point 158)
   - Penataan dan penertiban sektor informal (No Point 159)
   - Pengembangan fasilitas perdagangan di Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan (No Point 160)
e. Perwujudan Kawasan Perkantoran, berupa pengembangan kawasan pusat pemerintahan di CBD Polonia



Gambar 6.15.
Peta Program Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Nomenklatur kegiatan/sub-kegiatan yang mendukung indikasi program utama dalam RTRW terutama pada priode PJM I (2022-2027) yang telah dijabarkan diatas perlu dipertimbangkan sebagai bagian dalam program pembangunan daerah dalam RPJMD. Namun beberapa nemeklatur kegiatan dalam RTRW masih belum sesuai nomenklatur kegiatan yang berlaku. Oleh karena itu setiap program dalam RTRW perlu diselaraskan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021). Berikut ini beberapa penyelarasan indikasi program dalam RTRW terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Dalam hal nomenklatur kegiatan/sub-kegiatan belum termuat dalam Kepmendagri, maka kegiatan/sub-kegiatan dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah

Tabel 6.3.
Indikasi Program Utama (IPU) RTRW Kota Medan Tahap I (2022-2027)

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
Perwujudan Struktur Ruang				
Perwujudan Pusat Kegiatan				
1.03.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Zonasi	Pusat Primer dan Sekunder	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
2	Penetapan Perda RTRW & RDTR Kota	Pusat Primer dan Sekunder	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
3	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Pusat Primer dan Sekunder	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
5	Pengembangan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
1.03.12.202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
6	Monitoring dan Pengendalaian Pemanfaatan Ruang	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
7	Pembuatan Foto dan Peta Garis Kota Medan	Kota Medan	Dinas PKPCKTR; Bappeda	Medan Membangun
***	***			
8	Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Lapangan Merdeka	TOD Lapangan Merdeka	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
10	Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Tuntungan	TOD Tuntungan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
11	Pengembangan Berbasis Transit pada TOD Medan Timur	TOD Medan Timur	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
***	***			
12	Pengembangan Medan Islamic Center (MIC)	Medan Marelan	Dinas PKPCKTR	Medan Maju
Sistem Jaringan Transportasi				
1.03.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1.03.10.201 .05	Pembangunan Jalan			
16	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Medan Timur - Batang Kuis	Kementerian PUPR; Dinas SDABMBK	Medan Membangun
17	Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Utara	Belawan - Labuhan - Percut Sei Tuan - KNO	Kementerian PUPR; Dinas SDABMBK	Medan Membangun
1.03.10.201 .13	Pembangunan Flyover			
1.03.10.201 .14	Pembangunan Underpass			
42	Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over)/ Underpass Pinang Baris	Pinang Baris	Kementerian PUPR; Dinas SDABMBK	Medan Membangun
43	Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over)/ Underpass Pondok Kelapa/ Pinang Baris	Pondok Kelapa/ Pinang Baris	Kementerian PUPR; Dinas SDABMBK	Medan Membangun
2.15.02.210	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.210 .01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
56	Studi Sistem Angkutan Umum Massal	Kota Medan	Kementerian Bappenas; Kementerian Keuangan;	Medan Membangun
57	Studi Sistem Monorail	Kota Medan	Bappeda	Medan Membangun
2.15.02.209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
58	Pembangunan Bus Rapit Transit	Kota Medan	Kementerian Perhubungan	Medan Membangun
59	Pembangunan Light Rail Transit	Kota Medan	Dinas Perhubungan Provinsi; Dinas Perhubungan Kota Medan	Medan Membangun
2.15.02.204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
2.15.02.204 .01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
60	Studi Kebutuhan Kawasan Parkir Terpadu	Kota Medan	Bappeda	Medan Membangun
Jaringan Energi				

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
1.04.05.201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1.04.05.301 .06	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat			
87	Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik	Seluruh Kota	PLN	Medan Membangun
88	Pengembangan Jaringan Listrik	Seluruh Kota	PLN	Medan Membangun
***	***			
89	Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Seluruh Kota	PT. Telkom	Medan Membangun
90	Pembangunan Gardu Induk	Paya Pasir, KIM Lamhotma	PLN	Medan Membangun
91	Pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi	Paya Pasir	PLN	Medan Membangun
92	Perluasan Jaringan Transmisi	Seluruh Kota	PLN	Medan Membangun
Jaringan Gas				
***	***			
93	Peningkatan Pelayanan Gas pada Masyarakat	Seluruh Kota	PGN	Medan Membangun
94	Peningkatan dan Penambahan Jaringan Gas	Seluruh Kota	PGN	Medan Membangun
Jaringan Air Bersih				
1.03.03.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.03.201 .15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			
95	Penurunan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih	Seluruh Kota	PDAM	Medan Membangun
1.03.02.201	Pengelolaan Sumber Daya Air			
1.03.02.201 .50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
96	Pelestarian sumber daya air pemukaan dan air tanah yang ada si Kota Medan dengan menjaga kulitas dan kuantitasnya	Seluruh Kota	PDAM	Medan Membangun
98	Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri	Seluruh Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
1.03.03.201 .17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			
97	Pembangunan prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara	Belawan dan Medan Labuhan	PDAM; Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
1.03.03.1.0 1.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota			
99	Pembangunan SPAM Regional Mebidang	Kota Medan	Kementerian Pekerjaan Umum; Dinas SDACK Provsu/ Dinas SDABMBK	Medan Membangun
102	Pembangunan SPAM Regional intake Lau Simeme	Deli Serdang - Kota Medan	Kementerian Pekerjaan Umum; Dinas SDACK	Medan Membangun

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
			Provsu/Dinas SDABMBK	
1.03.03.201 .07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
100	Pengembangan Jaringan TLM PDAM Tirtanadi	Kota Medan	PDAM	Medan Membangun
101	Pengembangan Jaringan SPAM Denai PDAM Tirtanadi	Kota Medan	PDAM	Medan Membangun
Jaringan Drainase				
1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.201 .46	Normalisasi/Restorasi Sungai			
103	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan	Kota Medan	Kementerian Pekerjaan	Medan Membangun
104	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Deli-Babura	Kota Medan	Umum;	Medan Membangun
105	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Kera	Kota Medan	Dinas SDACK Provsu/ Dinas SDABMBK Kota Medan	Medan Membangun
106	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Percut Sei Tuan	Kota Medan		Medan Membangun
1.03.06.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.06.201 .07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			
103	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan	Kota Medan	Kementerian Pekerjaan	Medan Membangun
104	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Deli-Babura	Kota Medan	Umum;	Medan Membangun
105	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Kera	Kota Medan	Dinas SDACK Provsu/ Dinas	Medan Membangun
106	Program Normalisasi Saluran Drainase dan Aliran Sungai Sistem Sungai Percut Sei Tuan	Kota Medan		Medan Membangun
1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.201 .12	Pembangunan Kanal Banjir			
107	Program Pembuatan Sudetan / kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan	Kota Medan	Kementerian Pekerjaan Umum	Medan Membangun
1.03.02.201 .14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi			
108	Program pembuatan waduk /kolam penampungan (detention pound) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah)	Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Polonia, Medan Sunggal	Kementerian Pekerjaan Umum	Medan Membangun

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
Jaringan Air Limbah				
1.03.05.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.201 .04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
110	Optimalisasi dan Perluasan Pengelola Air Limbah Domestik Terpusat	Medan Kota, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Maimun, dan Medan Barat	Kementerian Pekerjaan Umum	Medan Membangun
1.03.05.201 .15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			
114	Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/ tinja dengan menggunakan tingkat septic tank kedap skala komunal (Program Senimas) dan individu	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
Sistem Persampahan				
2.11.11.201	Pengelolaan Sampah			
2.11.11.201 .07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA			
117	Perluasan TPA Terjun	Medan Marelan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
2.11.11.201 .01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			
118	Penutupan TPA Tajun dari sistem Open Dumping	Medan Marelan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
119	Pembangunan TPA berbasis Sanitary Land Fill	Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
2.11.11.201 .03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
120	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/ composting (lingkungan RT atau RW)	Kota Medan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
2.11.11.201 .05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			
121	Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di Kota Medan	Kota Medan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
122	Pengadaan TPS/Container / bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri	Kota Medan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
Perwujudan Pola Ruang				
Perwujudan Kawasan Lindung				
2.11.04.201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2.11.04.201 .04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
125	Pemetaan Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan	Seluruh Kota	Dinas Lingkungan	Medan Membangun

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
			Hidup	
135	Pembangunan TPU	Seluruh Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
136	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Skala Kota	Seluruh Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
137	Pembangunan Taman Skala Kecamatan	Seluruh Kota	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
138	Pembuatan Taman Lingkungan	Seluruh Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
141	Penyelenggaraan pengadaan taman bangunan pada lokasi-lokasi kawasan terbangun baru baik di atas lahan, di dinding bangunan, hingga di atap bangunan	Kota Medan	Pemko Medan/ Masyarakat	Medan Membangun
142	Serah terima lahan PSU perumahan untuk kemudian dikembangkan menjadi RTH Publik	Kota Medan	Pemko Medan/ Masyarakat	Medan Membangun
143	Pengembangan Kawasan RTH Publik menjadi Perhutanan Sosial	RTH Rimba Kota	Pemko Medan/ Masyarakat	Medan Membangun
2.11.04.201 .01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
126	Penetapan kawasan Lindung (hutan mangrove, Sempadan Sungai dan anak sungai Badera, Sungai Belawan, Sungai Deli, Babura, Sungai Percut, Sungai Kera)	Belawan, dan Seluruh Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
127	Penguasaan Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan	Seluruh Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Kota
128	Penataan Batas Kawasan Lindung di seluruh Kota Medan	Seluruh Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Kota
2.11.04.201 .02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
129	Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung	Belawan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
130	Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung	Belawan	Dinas Lingkungan Hidup	Medan Membangun
131	Pembangunan Sempadan Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan SUTET menjadi jalur hijau	Seluruh Kota	Wilayah Sungai; Dinas PKPCKTR;; KAI	Medan Membangun
2.22.05.201	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
132	Penetapan Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas PKPCKTR	Medan Beridentitas
2.22.05.202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
133	Rehabilitasi Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Beridentitas
134	Pengamanan dan pengendalian Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Beridentitas
2.19.03.205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
2.19.03.205 .03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			
139	Pengembangan kawasan Selatan Kota Medan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga	Medan Tuntungan	Dinas Pariwisata	Medan Membangun

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
3.26.02.201.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
140	Pengembangan Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Belawan sebagai wisata air	Medan	Dinas Pariwisata	Medan Membangun
Perwujudan Kawasan Budi Daya				
Perumahan				
1.04.02.206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
1.04.02.206.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
144	Pembuatan dan Update Data Base Perumahan Permukiman Kota Medan (151 Kelurahan)	Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
146	Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Medan	Pusat Primer dan Sekunder	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
1.04.04.201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1.04.04.201.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
145	Peremajaan Perumahan di Kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan	Seluruh Kota	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
5.05.02.203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5.05.02.203.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
147	Pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba	Marelan dan Labuhan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
149	Pengembangan permukiman dengan memanfaatkan sistem Bank Tanah (Land Banking) untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat miskin	Medan Labuhan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
1.04.02.206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
1.04.02.206.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
148	Penetapan kawasan prioritas sebagai upaya penataan dan peningkatan kualitas permukiman berkepadatan tinggi di Kec. Medan Belawan	Medan Belawan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
150	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi skala kawasan dengan konsep one stop living	Medan Labuhan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
Kawasan Komersial				
3.30.03.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
			Perindustrian dan Perdagangan	
1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
1.03.08.201.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
156	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya	Kota Medan	Dinas Pariwisata	Medan Membangun
3.30.02.201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
157	Pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah pusat Kota Medan	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
158	Pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
159	Penataan dan penertiban sektor informal	Kota Medan	Dinas PKPCKTR; Satpol PP; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Medan Membangun
3.30.03.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3.30.03.201.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
160	Pengembangan fasilitas perdagangan	Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Medan Membangun
Kawasan Industri				
3.31.02.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3.31.02.201.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
165	Penyusunan Master Plan Pergudangan di Kecamatan Medan Belawan	Medan Belawan	Bappeda	Medan Belawan
Fasilitas Pelayanan				
1.01.02.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
173	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan di Kota Medan	Kota Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Maju
174	Peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan belawan	Medan Marelan, Medan Labuhan, Belawan	Dinas Pendidikan	Medan Maju
1.02.02.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
175	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marela, Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Belawan	Medan Marelan, Medan Labuhan, Belawan	Dinas Kesehatan	Medan Maju

Indikasi Program Utama		Lokasi	OPD Pelaksana	Misi
***	***			
176	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah	Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
178	Pengembangan dan Peningkatan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Medan Baru dan Medan Timur	Kementerian Pendidikan	Medan Maju
179	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	Medan Perjuangan dan Medan Tembung	Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian PU; Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Medan Membangun
180	Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional	Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan	Kementerian Kesehatan; Dinas Kesehatan	Medan Maju
Kawasan Khusus				
***	***			
181	Pembuatan Buffer Zona antara kawasan khusus dengan Kawasan Perumahan	Medan	Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
182	Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus/ campuran, standar dan pola pengembangannya	Medan	Bappeda; Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
183	Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use	Medan	Bappeda; Dinas PKPCKTR	Medan Membangun
188	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pariwisata	Kota medan	Dinas Pariwisata	Medan Membangun
189	Penyusunan Master Plan Water Front City di Kecamatan Medan Belawan	Medan Belawan	Dinas Pariwisata	Medan Membangun

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Medan 2022-2042 meliputi:

1. kawasan Polonia di Kecamatan Medan Polonia;
2. kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan, Rumah-rumah Toko Pekong, rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan) di Kecamatan Medan Labuhan;
3. kawasan lama Belawan (bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan) di Kecamatan Medan Bela wan; 4. kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) di Kecamatan Medan Barat;
4. kawasan Maimun (Istana Maimun, Taman Sri Deli dan Mesjid Raya) di Kecamatan Medan Maimun;
5. kawasan Avros di Kecamatan Medan Maimun;

6. kawasan Kampung Madras di Kecamatan Medan Polonia; dan
7. kawasan Kesawan dan sekitarnya serta Lapangan Merdeka di Kecamatan Medan Barat.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan di Kota Medan harus memerhatikan kawasan-kawasan cagar budaya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan dalam Perda dan diatur dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal normalisasi Daerah Aliran Sungai, kegiatan diarahkan pada aliran sungai dan saluran-saluran drainase yang terhubung, terutama pada daerah yang termasuk dalam daerah rawan banjir. Normalisasi aliran sungai dilakukan pada:

1. Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan;
2. Sistem Sungai Deli - Babura;
3. Sistem Sungai Kera; dan
4. Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan;

6.6. Kegiatan Strategis

Kota Medan menyusun kegiatan-kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Kegiatan strategis yang disusun mengacu kepada masing-masing misi.

Dalam upaya mendukung misi Medan Berkah, Pemerintah Kota Medan mengutamakan kegiatan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kesenjangan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan penurunan persentase kemiskinan. Kegiatan strategis ini meliputi:

- ❖ Pemberian pelatihan dan peningkatan kesempatan tenaga kerja bagi calon tenaga kerja, dengan target jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan pada tahun 2021, 12 kegiatan pada tahun 2022, 22 kegiatan pada tahun 2023, 17 kegiatan pada tahun 2024, 18 kegiatan pada tahun 2025, dan 18 kegiatan pada tahun 2026
- ❖ Pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan
- ❖ Pemberian bantuan peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan dana sebesar Rp 636.514.304 pada tahun 2021, Rp 1.531.809.000 pada tahun 2022, Rp 3.762.788.596 pada tahun 2023, Rp 5.002.500.000 pada tahun 2024, Rp

6.002.500.000 pada tahun 2025, dan Rp 7.002.500.000 pada tahun 2026

- Pelatihan kepada pelaku usaha, dengan terget jumlah pelaku usaha penerima pelatihan sebanyak 330 orang pada tahun 2021, 1.748 orang pada tahun 2022, 1.295 orang pada tahun 2023, 1.280 orang pada tahun 2024, 1.300 orang pada tahun 2025, dan 1.350 orang pada tahun 2026
- Pembentukan koperasi rumah ibadah, dengan target jumlah koperasi rumah ibadah sebanyak 36 koperasi pada tahun 2021, 50 koperasi pada tahun 2022, 66 koperasi pada tahun 2023, 66 koperasi pada tahun 2024, 66 koperasi pada tahun 2025, dan 66 koperasi pada tahun 2026
- Bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin
- Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian dan perikanan
- Optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan dalam mendukung penanganan stunting dan wilayah kumuh, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* masing-masing 1 dokumen di setiap tahunnya
- Penyediaan asupan pangan bagi keluarga rawan pangan, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* masing-masing 1 dokumen di setiap tahunnya
- Pemberian bantuan alat produksi kepada pelaku ekonomi kreatif
- Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga
- Pemberian makanan tambahan padat gizi, dengan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan *output* masing-masing 1 dokumen di setiap tahunnya
- Gerakan pangan murah, dengan target sebanyak 2 kegiatan pada tahun 2021, 2 kegiatan pada tahun 2022, serta masing-masing 5 kegiatan pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan, dengan target capaian sebesar 0,8 persen pada tahun 2021, 0,88 persen pada tahun 2022, 0,88 persen pada tahun 2023, 0,89 persen pada tahun 2024, 0,90 persen pada tahun 2025, dan 0,91 persen pada tahun 2026
- Bantuan sosial keluarga miskin, yatim piatu, disabilitas dan lansia

Misi Medan Maju menargetkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kota Medan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Medan menyusun kegiatan strategis yang meliputi:

- Peningkatan kesejahteraan guru, dengan target sebanyak 18.737 orang pada tahun 2021, sebanyak 21.050 orang pada tahun 2022, sebanyak 18.281 orang pada tahun 2023, sebanyak 18.470 orang pada tahun 2024, 17.862 orang pada tahun 2025, dan sebanyak 17.725 orang pada tahun 2026
- Peningkatan kompetensi guru, dengan target sebanyak 4.300 orang pada tahun 2021, sebanyak 6.272 orang pada tahun 2022, serta sebanyak 7238 orang masing-masing pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, dengan target sebanyak 65 sekolah negeri pada tahun 2021, sebanyak 245 sekolah negeri pada tahun 2022, sebanyak 252 sekolah negeri pada tahun 2023, sebanyak 152 sekolah negeri pada tahun 2024, sebanyak 149 sekolah negeri pada tahun 2025, dan sebanyak 146 sekolah negeri pada tahun 2026
- Pemberian beasiswa dan bantuan peralatan sekolah bagi siswa miskin pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan target sebanyak 8.921 siswa pada tahun 2021, sebanyak 83.842 siswa pada tahun 2022, serta sebanyak 32.500 orang pada masing-masing tahun 2023, 2024, dan 2026
- Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi, dengan target sebanyak 50 mahasiswa pada tahun 2022, serta sebanyak masing-masing 200 mahasiswa pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Penyediaan bus sekolah gratis, dengan target sebanyak 1 unit bus pada tahun 2022 dan 2 unit bus pada tahun 2023
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas serta ketersediaan alat Kesehatan menuju *Medan Medical Tourism* (MMT)
- *Universal Health Coverage* bagi seluruh masyarakat Kota Medan, dengan target capaian sebesar 76,13 persen pada tahun 2021, 96,13 persen pada tahun 2022, 97 persen pada tahun 2023, 98 persen pada tahun 2024, 98,5 persen pada tahun 2025, dan 99 persen pada tahun 2026
- Pembangunan RSUD Bachtiar Djafar di Medan Labuhan, sebanyak 1 unit

pada tahun 2021 dan tahun 2022

- Revitalisasi sarana kesehatan dasar (puskesmas)
- Pengembangan rumah sakit swasta baru
- Percepatan penurunan stunting, dengan capaian sebesar 0,38 peren pada tahun 2021, sebesar 0,31 persen pada tahun 2022, sebesar 0,28 persen pada tahun 2023, sebesar 0,17 persen pada tahun 2024, sebesar 0,15 persen pada tahun 2025, dan sebesar 0,10 persen pada tahun 2026

Pemerintah Kota Medan menyiapkan misi Medan Bersih untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dengan implementasi pelayanan publik yang baik didukung implementasi teknologi informasi dalam rangka akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah menyusun kegiatan strategis meliputi:

- Peningkatan kemudahan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan Kecamatan dan Kelurahan, dengan target capaian sebesar 12,21 persen pada tahun 2021, sebesar 40,12 persen pada tahun 2022, sebesar 63,37 persen pada tahun 2023, sebesar 65,12 persen pada tahun 2024, sebesar 66,86 persen pada tahun 2025, dan sebesar 68,60 persen pada tahun 2026
- Penyusunan proses bisnis pelayanan publik yang terintegrasi
- Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui standarisasi pelayanan berbasis ISO
- Integrasi database dan system informasi pemerintahan, khususnya yang berbasis pelayanan publik
- Operasionalisasi mobil pelayanan publik, dengan target sebanyak masing-masing 4 unit pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh Perangkat Daerah, sebanyak 24,21 persen pada tahun 2021, sebanyak 34,21 persen pada tahun 2022, sebanyak 44,21 persen pada tahun 2023, sebanyak 44,74 persen pada tahun 2024, sebanyak 48,14 persen pada tahun 2025, dan sebanyak 51,42 persen pada tahun 2026
- Penerapan pengelolaan arsip secara baku sesuai tata kelola arsip yang baik, dengan target sebesar 71,61 poin pada tahun 2021, sebanyak 71,72 poin pada tahun 2022, sebanyak 71,77 poin pada tahun 2023, sebanyak 71,80 poin pada

tahun 2024, sebanyak 71,83 poin pada tahun 2025, dan sebanyak 71,88 poin pada tahun 2026

Untuk menyukseskan misi Medan Membangun, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase, persampahan, perkotaan, dan permukiman) yang merata, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Adapun kegiatan strategis yang disusun Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan, yang terdiri atas.
  - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan target sebanyak 17 SDP pada tahun 2021, 11 SDP pada tahun 2022, serta 2 SDP masing-masing pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
  - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, dengan target sebanyak 16 SDP pada tahun 2022, 10 SDP pada tahun 2023, serta masing-masing 8 SDP pada tahun 2024, 2025, dan 2026
  - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, dengan target sepanjang 2,182,5 meter pada tahun 2022, sepanjang 7.884 meter pada tahun 2023, sepanjang 4.650 meter pada tahun 2024, sepanjang 4.600 meter pada tahun 2025, dan sepanjang 4.600 meter pada tahun 2026
  - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan, dengan target sebanyak 10 SDL pada tahun 2022, serta masing-masing sebanyak 8 SDL pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Perkotaan dan Lingkungan, dengan target sepanjang 2.944 kilometer pada tahun 2021, sepanjang 3.082,73 kilometer pada tahun 2022, sepanjang 3.279,50 kilometer pada tahun 2023, sepanjang 3.279,50 kilometer pada tahun 2024, sepanjang 3.279,50 kilometer pada tahun 2025, dan sepanjang 3.279,50 kilometer pada tahun 2026
- Pembangunan Underpass dan Over pass di 3 Lokasi titik kemacetan, dengan rincian sebanyak 4 kegiatan pada tahun 2024 dan 2 kegiatan pada tahun 2026
- Pembangunan Polder/kolam retensi di Kompleks USU, Martubung, Kecamatan Medan Selayang, dan Tanggul Danau Siombak, dengan rincian kegiatan sebanyak 2 kegiatan pada tahun 2023 untuk lokasi Martubung dan Kompleks USU, 1 kegiatan pada tahun 2024 untuk lokasi Selayang, 1

kegiatan pada tahun 2025 untuk lokasi Danau Siombak, dan 1 kegiatan pada tahun 2026

- Revitalisasi Lapangan Merdeka, sebanyak masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Revitalisasi Stadion Kebun Bunga, sebanyak masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman, dengan target penanganan seluas 506,60 hektar pada tahun 2021, seluas 306,00 hektar pada tahun 2022, seluas 200,04 hektar pada tahun 2023, dan seluas 105,96 hektar pada tahun 2024
- Pembangunan Tanggul Rob Belawan 3 Blok, dengan rincian masing-masing 1 blok pada tahun 2022, 2023, dan 2024
- Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata), dengan target sepanjang 1,5 kilometer pada tahun 2022, 6 kilometer pada tahun 2023, 35 kilometer pada tahun 2024, dan 40 kilometer pada tahun 2025
- Lampu Jalan Medan Terang untuk Ketertiban Umum dengan Skema KPBU
- Medan ramah difabel, anak, dan lansia (termasuk warga berkebutuhan khusus) pada infrastruktur perkotaan.
- Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Dan Lapangan Olah Raga (di 7 lokasi dengan bantuan CSR)
- Peningkatan layanan persampahan di TPA dengan sistem operasi *sanitary landfill* dan *waste to energy* melalui kerjasama dengan perusahaan Belanda, dengan target sebanyak masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2025 dan 2026

Untuk menyukseskan misi Medan Kondusif, Pemerintah Kota Medan mengutamakan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Medan. Adapun kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Kolaborasi dengan TNI / Polri terkait penanganan gangguan Trantibum
- Pemuda bela negara
- Pemberdayaan masyarakat terkait bahaya narkoba di seluruh Kecamatan dan Kelurahan
- Medan bersih dari Narkoba (BERSINAR), dengan target kelurahan bersih tanpa narkoba sebanyak 131 kelurahan pada tahun 2021, 132 kelurahan pada

tahun 2022, 134 kelurahan pada tahun 2023, 136 kelurahan pada tahun 2024, 138 kelurahan pada tahun 2025, dan 138 kelurahan pada tahun 2026

- Jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, dan penderita gangguan jiwa
- Pembangunan *Islamic Center*, yang dilakukan masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Penegakan Perda, dengan target capaian sebesar 68,95 persen pada tahun 2021, 73,48 persen pada tahun 2022, 90 persen pada tahun 2023, 90 persen pada tahun 2024, 99 persen pada tahun 2025, dan 99 persen pada tahun 2026
- Peningkatan kualitas kelompok-kelompok pemuda kreatif melalui pembangunan *creative hub* di kecamatan
- Medan 20.000 CCTV
- Sosialisasi tertib lalu lintas melalui peningkatan sarana prasarana lalu lintas, dengan target kegiatan masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2024, 2025, dan 2026
- Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, dengan target capaian sebesar 100 persen pada tahun 2021, sebesar 50 persen pada tahun 2022, serta masing-masing sebesar 100 persen pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Peningkatan partisipasi dalam *event* olahraga, dengan target 19 kegiatan pada tahun 2021 dan 14 kegiatan pada tahun 2022
- Revitalisasi Lapangan Olahraga yang dikelola, dengan target 35 kegiatan pada tahun 2021, 8 kegiatan pada tahun 2022, serta masing-masing 10 kegiatan pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026
- Pengembangan transportasi massal berbasis BRT, dengan target sebanyak 4 koridor pada tahun 2024, 4 koridor pada tahun 2025, dan 9 koridor pada tahun 2026

Dalam mengupayakan Misi Medan Inovatif, Pemerintah Kota Medan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi untuk mendorong peningkatan investasi di Kota Medan. Adapun kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, meliputi:

- Pembangunan Mall Pelayanan Publik, dengan target sebanyak 1 unit masing-masing pada tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026
- Promosi investasi, dengan target kegiatan masing-masing 1 kegiatan di setiap

tahunnya

- Pembangunan UMKM Square, dengan target masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Kemudahan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan terintegrasi, dengan target pembuatan aplikasi sebanyak masing-masing 1 aplikasi di setiap tahunnya
- Medan satu data
- Pembinaan UMKM naik kelas, dengan target jumlah UMKM naik kelas sebanyak 287 UMKM pada tahun 2021, 270 UMKM pada tahun 2022, 380 UMKM pada tahun 2023, 390 UMKM pada tahun 2024, 400 UMKM pada tahun 2025, dan 410 UMKM pada tahun 2026
- Penetapan produk unggulan daerah, dengan target sebanyak masing-masing 1 produk pada tahun 2025 dan 2026
- Penetapan/pemngembangan sentra industri kecil menengah, dengan target pembangunan Sentra IKM sebanyak 1 sentra pada tahun 2025 dan 1 sentra tahun 2026
- Pelaksanaan pasar murah, dengan target sebanyak 2 kegiatan pada tahun 2021, 5 kegiatan pada tahun 2022, 4 kegiatan pada tahun 2023, 4 kegiatan pada tahun 2024, 5 kegiatan pada tahun 2025, dan 5 kegiatan pada tahun 2026
- Penguatan akses informasi harga pasar, perlindungan konsumen melalui sosialisasi, operasi pasar dan optimisassi pendataan UTTP, dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan pada tahun 2021, 6 kegiatan pada tahun 2022, 5 kegiatan pada tahun 2023, 5 kegiatan pada tahun 2024, 6 kegiatan pada tahun 2025, dan 6 kegiatan pada tahun 2026
- Pemberian bantuan peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan dana sebesar Rp 636.514.304 pada tahun 2021, Rp 1.531.809.000 pada tahun 2022, Rp 3.762.788.596 pada tahun 2023, Rp 5.002.500.000 pada tahun 2024, Rp 6.002.500.000 pada tahun 2025, dan Rp 7.002.500.000 pada tahun 2026
- Pelatihan kepada pelaku usaha, dengan terget jumlah pelaku usaha penerima pelatihan sebanyak 330 orang pada tahun 2021, 1.748 orang pada tahun 2022, 1.295 orang pada tahun 2023, 1.280 orang pada tahun 2024, 1.300 orang pada tahun 2025, dan 1.350 orang pada tahun 2026

- Pembentukan koperasi rumah ibadah, dengan target jumlah koperasi rumah ibadah sebanyak 36 koperasi pada tahun 2021, 50 koperasi pada tahun 2022, 66 koperasi pada tahun 2023, 66 koperasi pada tahun 2024, 66 koperasi pada tahun 2025, dan 66 koperasi pada tahun 2026
- Penerapan system E-Parking

Dalam rangka membangun identitas Kota Medan sebagai salah satu tujuan wisata pemerintah berupaya membangun kota yang ramah wisata baik secara infrastruktur maupun pemasaran pariwisatanya. Pemerintah Kota Medan berupaya mewujudkan Kota Wisata yang berbudaya melalui upaya-upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menyiapkan kegiatan strategis yang difokuskan kepariwisataan. Kegiatan strategis mendukung Medan Beridentitas meliputi:

- Revitalisasi Kota Lama Kesawan, dengan target masing-masing sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2022 dan 2023
- Revitalisasi lapangan merdeka, dengan target masing-masing sebanyak 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Revitalisasi Gedung Wahrenhuis
- Beranda kreatif setiap minggu
- Revitalisasi kantor pos lama menjadi pusat kuliner (Pos Bloc)
- Penataan Kawasan Belawan Bahari di Kecamatan Medan Belawan, dengan target masing-masing 1 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024
- Penataan objek wisata, dengan target sebanyak masing-masing 14 objek wisata pada tahun 2021, 2022, dan 2023
- Pelaksanaan *event* pariwisata, dengan target capaian sebanyak 6 kegiatan pada tahun 2021, 7 kegiatan pada tahun 2023, dan 34 kegiatan pada tahun 2024
- Peningkatan kualitas promosi pariwisata (*Medan The Kitchen Of Asia*)
- Perlindungan terhadap bangunan bersejarah (penetapan perwal cagar budaya)

6.7. Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya.

Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun yang menjadi program prioritas pembangunan daerah 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis:

1. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
4. Peningkatan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
7. Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah untuk menjawab visi dan misi walikota Medan dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 6.4.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Medan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
Medan Berkah	1.1	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Gini Rasio	0,402		0,399		0,379		0,369		0,360		0,350		
				TPT	10,81		8,89		8,40-8,80		8,20-8,70		8,00-8,50		7,80-8,30		
		1.1.1	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita	64.078.945,84		66.193.310,89		67.677.802,28		69.195.585,77		70.747.408,00		72.334.032,34		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya (%)	0,046	825.300.000	0,115	1.983.285.000	0,192	3.005.077.608	0,198	2.629.952.503	0,204	2.653.622.076	0,208	2.664.236.564	Dinas Pemuda dan Olahraga
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	92	0	92,9	0	93	3.829.010.930	94	3.421.143.190	95	3.431.406.620	96	3.451.995.059	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	1	-	2	-	2	411.792.530	2	771.876.680	2	778.051.693	2	781.163.900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	74	184.910.000	74	2.533.701.851	85	3.623.602.400	90	2.140.475.680	95	2.149.037.583	100	2.161.931.808	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten (%)	100	1.099.372.865	98,8	1.886.801.827	92	2.368.296.929	93	2.122.628.150	94	2.139.609.175	95	2.146.028.003	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan (%)	64,5	719.333.400	84,12	668.510.263	52	578.239.590	55	740.684.213	58	748.831.739	60	763.059.542	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.230.116.027	80	8.899.609.475	85	6.124.422.213	90	6.359.049.941	95	6.392.009.530	22	6.420.939.778	Kecamatan Medan Belawan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.588.554.881	76	5.971.950.440	82	2.715.498.577	88	3.797.483.579	95	4.408.471.457	100	4.444.490.305	Kecamatan Medan Labuhan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	11.765.568.656	80	7.888.007.773	85	3.971.084.392	90	6.089.343.141	95	6.156.260.432	100	6.218.366.818	Kecamatan Medan Timur
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.279.682.609	84,52	6.515.405.028	85	2.593.888.034	90	3.857.997.073	95	3.900.517.977	100	3.933.940.495	Kecamatan Medan Helvetia

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.554.448.645	89	4.239.164.830	93,75	2.261.661.475	100	3.223.389.000	100	3.266.350.328	100	3.300.541.916	Kecamatan Medan Marelan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	1.599.274.069	80	6.776.712.702	90	2.628.314.835	100	3.708.166.015	100	3.742.026.279	27	3.790.398.574	Kecamatan Medan Denai
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	4.071.006.547	97	2.496.635.022	100	2.060.636.306	100	3.178.478.203	100	3.207.284.717	100	3.245.395.102	Kecamatan Medan Baru
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	2.259.251.206	100	3.433.251.474	100	1.756.424.031	100	2.900.453.977	100	2.942.009.754	100	2.978.438.598	Kecamatan Medan Polonia
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	97	10.308.828.583	98	5.013.335.484	99	3.387.037.072	100	4.859.383.293	100	4.902.038.833	100	4.979.395.953	Kecamatan Medan Perjuangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	2.233.900.350	80	4.661.850.860	85	2.402.727.411	97	3.328.800.890	100	3.366.011.981	100	3.415.845.401	Kecamatan Medan Barat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	71	9.259.082.297	91,5	6.594.696.346	95	3.308.931.118	97	4.852.307.851	98	4.911.145.860	100	4.965.008.686	Kecamatan Medan Tuntungan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	85	5.015.473.733	85	6.783.639.339	85	2.272.399.948	90	3.023.974.615	95	3.064.206.076	100	3.092.451.309	Kecamatan Medan Selayang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	4.055.422.992	80	4.147.593.419	85	2.447.190.098	100	3.733.737.966	100	3.789.891.646	100	3.828.288.077	Kecamatan Medan Petisah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	5.414.112.920	80	5.263.615.101	85	2.141.971.181	90	3.193.431.000	95	3.226.375.683	100	3.258.657.278	Kecamatan Medan Johor
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.678.180.047	100	5.481.136.843	100	2.178.360.000	100	3.419.400.000	100	4.106.406.492	100	4.133.245.634	Kecamatan Medan Maimun
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	0	5.165.309.280	100	8.513.457.308	100	2.628.953.109	100	3.740.807.500	100	3.772.000.139	100	3.802.540.219	Kecamatan Medan Deli
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	0	5.284.920.971	100	6.110.973.863	100	2.578.376.468	100	3.844.604.851	100	3.892.438.469	100	3.933.150.548	Kecamatan Medan Amplas
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	6	2.946.595.284	6	4.836.371.051	6	2.233.930.956	80	2.817.275.015	80	2.854.988.959	39	2.890.233.459	Kecamatan Medan Sunggal

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	6.036.666.965	80	6.791.686.703	85	2.462.880.443	90	3.853.052.816	95	3.906.075.091	100	3.944.048.148	Kecamatan Medan Tembung
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	15	3.082.715.135	81	8.197.168.842	100	4.522.366.351	100	6.523.966.636	100	6.608.829.893	100	6.667.295.496	Kecamatan Medan Area
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	9.376.706.096	80	8.109.788.628	85	4.310.120.000	90	6.532.385.036	95	6.614.773.382	100	6.687.952.553	Kecamatan Medan Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang (%)	14,5	-	15	-	20,54	15.676.831.439	21	11.646.355.181	21,5	11.762.818.733	22	11.856.921.283	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi (%)	4	-	5,5	-	6,5	4.324.861.676	8,5	527.009.816	10,5	530.171.875	12,5	538.124.453	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan (%)	24	-	24,5	-	25	1.296.514.820	25,5	2.739.683.000	26	2.756.121.098	45	2.783.682.309	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	4,5	-	4,73	-	5,34	3.795.228.804	5,50	3.312.724.913	5,57	3.322.663.088	5,61	3.339.276.403	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		1.1.2	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase kemiskinan	8,34		8,07		7.55 - 8,00		7,40 - 7,95		7,25 - 7,90		7,05 - 7,85		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota (%)	65,57	54.856.993.180	68,7	60.741.140.202	70	81.836.799.239	70	92.177.779.784	70	92.730.846.463	70	93.009.039.002	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	997.500.326	100	3.273.539.694	100	8.231.019.891	100	13.590.004.946	100	13.617.184.956	100	13.644.419.326	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	5.064.725.530	100	4.502.848.716	100	3.056.600.040	100	8.237.190.160	100	8.303.087.681	50	8.377.815.470	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	522.844.400	100	2.072.066.580	100	3.154.552.233	100	2.428.539.211	100	2.435.824.829	100	2.443.132.303	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik (%)	84.52	-	85.55	-	85.87	384.096.574.615	86.01	555.953.198.798	86.48	558.732.964.792	87.13	564.320.294.440	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP (%)	82.5		85.3		88.56		90.15		92.5		95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD (%)	80.25		83.65		87.5		88.75		92.1		95.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan	84.56		85.38		86.39		87.59		88.03		88.56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				Kesetaraan (%)													
				Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD (%)	79.57		82.68		83.45		84.87		85.9		86.89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	85.24		87.1		88.56		90.15		93.56		98.75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD (%)	80.25	-	83.65	-	87.5	789.600.735	88.75	316.368.670	92.1	321.114.200	95.5	327.215.370	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentasi Kelurahan Rawan Pangan Yang Tertangani (%)	9,5	-	14	-	14	2.774.980.624	19	2.887.763.450	19	2.905.090.031	24	2.913.805.301	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum (%)	75,97	-	70,05	-	76,34	618.771.496	77,9	592.847.120	78,32	604.704.062	56	611.960.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan (%)	10.81	1.391.873.650	16.79	1.640.602.282	21.19	2.101.956.394	24.56	2.551.858.555	27.23	2.556.962.272	29.38	2.577.417.970	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah Koleksi Yang dimiliki	97131		101864		104264		106664		109064		111464		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				Perpustakaan (Eksemplar)													
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten (%)	100	1.099.372.865	98,8	1.886.801.827	92	2.368.296.929	93	2.122.628.150	94	2.139.609.175	95	2.146.028.003	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan (%)	64,5	719.333.400	84,12	668.510.263	52	578.239.590	55	740.684.213	58	748.831.739	60	763.059.542	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.230.116.027	80	8.899.609.475	85	6.124.422.213	90	6.359.049.941	95	6.392.009.530	64	6.420.939.778	Kecamatan Medan Belawan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.588.554.881	76	5.971.950.440	82	2.715.498.577	88	3.797.483.579	95	4.408.471.457	100	4.444.490.305	Kecamatan Medan Labuhan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	11.765.568.656	80	7.888.007.773	85	3.971.084.392	90	6.089.343.141	95	6.156.260.432	100	6.218.366.818	Kecamatan Medan Timur
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.279.682.609	84,52	6.515.405.028	85	2.593.888.034	90	3.857.997.073	95	3.900.517.977	100	3.933.940.495	Kecamatan Medan Helvetia

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.554.448.645	89	4.239.164.830	93,75	2.261.661.475	100	3.223.389.000	100	3.266.350.328	100	3.300.541.916	Kecamatan Medan Marelan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	1.599.274.069	80	6.776.712.702	90	2.628.314.835	100	3.708.166.015	100	3.742.026.279	69	3.790.398.574	Kecamatan Medan Denai
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	4.071.006.547	97	2.496.635.022	100	2.060.636.306	100	3.178.478.203	100	3.207.284.717	100	3.245.395.102	Kecamatan Medan Baru
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	2.259.251.206	100	3.433.251.474	100	1.756.424.031	100	2.900.453.977	100	2.942.009.754	100	2.978.438.598	Kecamatan Medan Polonia
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	10.308.828.583	100	5.013.335.484	100	3.387.037.072	100	4.859.383.293	100	4.902.038.833	100	4.979.395.953	Kecamatan Medan Perjuangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	2.233.900.350	80	4.661.850.860	85	2.402.727.411	97	3.328.800.890	100	3.366.011.981	100	3.415.845.401	Kecamatan Medan Barat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	71	9.259.082.297	91,5	6.594.696.346	95	3.308.931.118	97	4.852.307.851	98	4.911.145.860	100	4.965.008.686	Kecamatan Medan Tuntungan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	85	5.015.473.733	85	6.783.639.339	85	2.272.399.948	90	3.023.974.615	95	3.064.206.076	100	3.092.451.309	Kecamatan Medan Selayang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	4.055.422.992	91,13	4.147.593.419	100	2.447.190.098	100	3.733.737.966	100	3.789.891.646	100	3.828.288.077	Kecamatan Medan Petisah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	5.414.112.920	80	5.263.615.101	85	2.141.971.181	90	3.193.431.000	95	3.226.375.683	100	3.258.657.278	Kecamatan Medan Johor
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.678.180.047	100	5.481.136.843	100	2.178.360.000	100	3.419.400.000	100	4.106.406.492	100	4.133.245.634	Kecamatan Medan Maimun
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	5.165.309.280	100	8.513.457.308	100	2.628.953.109	100	3.740.807.500	100	3.772.000.139	100	3.802.540.219	Kecamatan Medan Deli
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	5.284.920.971	100	6.110.973.863	100	2.578.376.468	100	3.844.604.851	100	3.892.438.469	100	3.933.150.548	Kecamatan Medan Amplas
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	2.946.595.284	100	4.836.371.051	100	2.233.930.956	100	2.817.275.015	100	2.854.988.959	100	2.890.233.459	Kecamatan Medan Sunggal

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	6.036.666.965	80	6.791.686.703	85	2.462.880.443	90	3.853.052.816	95	3.906.075.091	82	3.944.048.148	Kecamatan Medan Tembung
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	3.082.715.135	80	8.197.168.842	85	4.522.366.351	90	6.523.966.636	95	6.608.829.893	83	6.667.295.496	Kecamatan Medan Area
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	9.376.706.096	80	8.109.788.628	85	4.310.120.000	90	6.532.385.036	95	6.614.773.382	100	6.687.952.553	Kecamatan Medan Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang (%)	14,4	-	15	-	20,54	15.676.831.439	21	11.646.355.181	21,5	11.762.818.733	22	11.856.921.283	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi (%)	4	-	5.5	-	6.5	4.324.861.676	8.5	527.009.816	10.5	530.171.875	12.5	538.124.453	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha (Koperasi)	36	-	50	-	66	361.160.000	66	461.272.400	66	470.497.848	66	471.909.342	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Medan Maju	2,1	Peningkatan kualitas SDM		IPM	81,21		81,76		81,90		82,10		82,33		82,49		
		2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,792		0,794		0,795		0,796		0,798		0,799		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik (%)	84.52	-	85.55	-	85.87	384.096.574.615	86.01	555.953.198.798	86.48	558.732.964.792	87.13	564.320.294.440	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP (%)	82.5		85.3		88.56		90.15		92.5		95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD (%)	80.25		83.65		87.5		88.75		92.1		95.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan (%)	84.56		85.38		86.39		87.59		88.03		88.56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD (%)	79.57		82.68		83.45		84.87		85.9		86.89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	85.24		87.1		88.56		90.15		93.56		98.75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD (%)	80.25	-	83.65	-	87.5	789.600.735	88.75	316.368.670	92.1	321.114.200	95.5	327.215.370	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum (%)	0	-	75,94	-	76,34	618.771.496	77,9	592.847.120	78,32	604.704.062	96	611.960.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha (%)	55.32	-	55.35	-	55.35	558.283.680.043	55.37	789.446.118.923	55.37	795.761.687.874	55.38	798.944.734.626	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan (%)	10.81	1.391.873.650	16.79	1.640.602.282	21.19	2.101.956.394	24.56	2.551.858.555	27.23	2.556.962.272	29.38	2.577.417.970	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan (Exemplar)	97131		101864		104264		106664		109064		111464		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)	0,4	80.888.400	0,6	82.954.000	0,8	155.607.345	1	100.215.900	1,2	121.261.239	1,4	140.663.037	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,819		0,824		0,828		0,832		0,835		0,839		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Survey Kepuasan Internal (Nilai (Predikat))	85	381.500.917.708	85	421.165.763.453	85	433.905.381.996	85	450.794.095.540	88	454.400.448.304	90	456.672.450.546	Dinas Kesehatan
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik (Persen)	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu (%)	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	75	322.155.298.002	100	279.092.631.294	100	293.656.273.597	100	292.148.843.180	100	293.317.438.553	100	294.784.025.745	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP (%)	75	184.760.000	75	302.667.280	78	2.736.645.099	80	-	82	-	85	-	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (%)	92	437.605.800	100	1.508.689.250	100	7.429.558.050	100	6.514.300.000	100	6.566.414.400	100	6.586.113.643	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (%)	75,22	-	61.93	-	50.31	7.834.368.426	53.35	8.358.324.949	55.5	8.408.474.899	56.5	8.425.291.848	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman yang Memenuhi	72	102.519.000	75	148.618.000	78	581.577.550	79	-	80	-	85	-	Dinas Kesehatan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				Standar (%)													
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni (%)	55.32	-	55.35	-	55.35	558.283.680.043	55.37	789.446.118.923	55.37	795.761.687.874	55.38	798.944.734.626	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Medan Bersih	3.1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Cc (55)		Cc (57)		CC (60)		B (65)		B (70)		BB (73)		
		3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	B (65)		B (68)		B (70)		BB (75)		BB (80)		A (81)		
				Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan (%)	67,41	5.653.423.200	87,5	5.351.848.750	90	2.366.234.424	90	3.556.438.756	90	3.581.333.827	90	3.599.240.496	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi (%)	38,20	853.507.800	89,5	1.083.488.050	90	1.106.725.908	90	1.423.596.768	90	1.432.138.349	90	1.440.731.179	Inspektorat

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja (Poin)	B (65)	64.444.644	B (68)	235.218.777	B (70)	366.048.740	BB (75)	262.357.505	BB (75)	264.366.508	A (81)	267.239.625	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja (Poin)	15	2.853.300.000	16	3.961.552.000	17	4.718.717.050	18	5.785.570.800	19	5.808.713.083	20	5.843.565.362	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja (Poin)	22		23		24		25		26		27		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	90	4.007.974.350	92	7.418.369.060	92	6.519.276.101	96	2.953.694.228	98	2.971.416.393	100	2.983.302.059	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	80		81		81		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90		92		94		96		98		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi APBD (%)	79	-	80,65	-	95	78.220.229.807	95	75.291.531.537	95	75.969.155.321	95	76.576.908.563	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu (tepat waktu)	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan (tepat waktu)	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah (Sertifikat)	52	-	215	-	277	8.152.688.650	500	9.214.373.650	200	9.297.303.013	376	9.380.978.740	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks SPBE	2,76		N/A		2,85		2,9		2,95		3		
				Indeks Pelayanan Publik	A-(4,15)		A-(4,21)		A- (4,41)		A- (4,41)		A (4,51)		A (4,58)		

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi (%)	17,39	13.668.524.988	30,4	11.228.419.000	50,4	27.081.973.317	69,57	29.582.290.433	82,6	37.486.200.839	95,6	35.487.008.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan (%)	100	12.003.349.188	100	14.394.427.289	100	14.682.488.602	100	16.078.806.870	100	18.102.403.628	100	17.158.732.597	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral (%)	100	126.000.000	100	336.600.000	100	927.707.500	100	519.679.000	100	713.875.790	100	680.124..547	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	N/A	515.505.000	N/A	463.439.262	N/A	530.844.662	33	957.272.600	66	1.076.211.006	100	1.088.473.116	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja (Poin)	B (65)	64.444.644	B (68)	235.218.777	B (70)	366.048.740	BB (75)	262.357.505	BB (75)	264.366.508	A (81)	267.239.625	Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	65,57	54.856.993.180	68,7	60.741.140.202	70	81.836.799.239	70	92.177.779.784	70	92.730.846.463	70	93.009.039.002	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	997.500.326	100	3.273.539.694	100	8.231.019.891	100	13.590.004.946	100	13.617.184.956	100	13.644.419.326	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	5.064.725.530	100	4.502.848.716	100	3.056.600.040	100	8.237.190.160	100	8.303.087.681	50	8.377.815.470	Dinas Sosial
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan (%)	100	746.125.880	100	2.097.208.550	100	5.257.612.826	100	7.932.049.995	100	6.581.500.000	100	6.581.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	100	1.372.673.500	100	693.206.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT (%)	100	1.876.591.400	100	96.890.634.465	100	515.876.230	100	503.370.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	75	322.155.298.002	100	279.092.631.294	100	293.656.273.597	100	292.148.843.180	100	293.317.438.553	100	294.784.025.745	Dinas Kesehatan
Medan Membangun	4.1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur		Indeks Infrastruktur	N/A		89,43		90,37		92,66		93,83		95,01		
				Emisi Gas Rumah Kaca	4.340,25		5.188,13		5.021,51		4.854,89		4.688,27		4.521,65		
		4.1.1	Penurunan luas kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh (ha)	506,60		306,00		200,04		105,96		50,00		30,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolaha	44,18	-	71,19	-	78,88	12.157.432.100	85,96	19.400.000.000	93,05	19.535.800.000	100	19.633.479.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
				n Air Limbah Domestik (%)													
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota (%)	38,2	-	11,8	-	25	15.464.458.000	33,3	19.380.000.000	50	19.438.140.000	100	19.535.330.700	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	38.20	-	11.80	-	25.00	28.089.465.000	33.30	14.700.000.000	50.00	14.758.800.000	100.00	14.817.835.200	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.230.116.027	80	8.899.609.475	85	6.124.422.213	90	6.359.049.941	95	6.392.009.530	100	6.420.939.778	Kecamatan Medan Belawan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.588.554.881	76	5.971.950.440	82	2.715.498.577	88	3.797.483.579	95	4.408.471.457	100	4.444.490.305	Kecamatan Medan Labuhan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	11.765.568.656	80	7.888.007.773	85	3.971.084.392	90	6.089.343.141	95	6.156.260.432	100	6.218.366.818	Kecamatan Medan Timur
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	6.279.682.609	84,52	6.515.405.028	85	2.593.888.034	90	3.857.997.073	95	3.900.517.977	100	3.933.940.495	Kecamatan Medan Helvetia
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.554.448.645	89	4.239.164.830	93,75	2.261.661.475	100	3.223.389.000	100	3.266.350.328	100	3.300.541.916	Kecamatan Medan Marelan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	1.599.274.069	80	6.776.712.702	90	2.628.314.835	100	3.708.166.015	100	3.742.026.279	100	3.790.398.574	Kecamatan Medan Denai
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	4.071.006.547	97	2.496.635.022	100	2.060.636.306	100	3.178.478.203	100	3.207.284.717	100	3.245.395.102	Kecamatan Medan Baru
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	2.259.251.206	100	3.433.251.474	100	1.756.424.031	100	2.900.453.977	100	2.942.009.754	100	2.978.438.598	Kecamatan Medan Polonia

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	10.308.828.583	100	5.013.335.484	100	3.387.037.072	100	4.859.383.293	100	4.902.038.833	100	4.979.395.953	Kecamatan Medan Perjuangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	70	2.233.900.350	80	4.661.850.860	85	2.402.727.411	97	3.328.800.890	100	3.366.011.981	100	3.415.845.401	Kecamatan Medan Barat
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	71	9.259.082.297	91,5	6.594.696.346	95	3.308.931.118	97	4.852.307.851	98	4.911.145.860	100	4.965.008.686	Kecamatan Medan Tuntungan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	85	5.015.473.733	85	6.783.639.339	85	2.272.399.948	90	3.023.974.615	95	3.064.206.076	100	3.092.451.309	Kecamatan Medan Selayang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	4.055.422.992	91,13	4.147.593.419	100	2.447.190.098	100	3.733.737.966	100	3.789.891.646	100	3.828.288.077	Kecamatan Medan Petisah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	5.414.112.920	80	5.263.615.101	85	2.141.971.181	90	3.193.431.000	95	3.226.375.683	100	3.258.657.278	Kecamatan Medan Johor
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	3.678.180.047	100	5.481.136.843	100	2.178.360.000	100	3.419.400.000	100	4.106.406.492	100	4.133.245.634	Kecamatan Medan Maimun

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	5.165.309.280	100	8.513.457.308	100	2.628.953.109	100	3.740.807.500	100	3.772.000.139	100	3.802.540.219	Kecamatan Medan Deli
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	100	5.284.920.971	100	6.110.973.863	100	2.578.376.468	100	3.844.604.851	100	3.892.438.469	100	3.933.150.548	Kecamatan Medan Amplas
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	2.946.595.284	80	4.836.371.051	80	2.233.930.956	80	2.817.275.015	80	2.854.988.959	100	2.890.233.459	Kecamatan Medan Sunggal
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	6.036.666.965	80	6.791.686.703	85	2.462.880.443	90	3.853.052.816	95	3.906.075.091	100	3.944.048.148	Kecamatan Medan Tembung
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	75	3.082.715.135	80	8.197.168.842	85	4.522.366.351	90	6.523.966.636	95	6.608.829.893	100	6.667.295.496	Kecamatan Medan Area
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Persen)	80	9.376.706.096	80	8.109.788.628	85	4.310.120.000	90	6.532.385.036	95	6.614.773.382	100	6.687.952.553	Kecamatan Medan Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	75	-	76	-	84	651.546.488.324	88	468.156.785.934	90	469.093.099.506	92	471.438.565.003	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	100	-	100	-	100	567.320.213.135	100	572.532.142.622	100	573.677.206.907	100	574.824.561.321	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah (%)	51,81		51,65		51,83		60		65		70		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		4.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,00		61,89		61,89		61,93		62,00		62,63		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Persen)	24,9	1.152.548.100	25	5.813.454.600	100	3.388.584.521	100	5.328.133.320	100	5.360.102.120	100	5.386.902.631	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif (Persen)	50	92.880.000	60	1.223.190.975	100	986.461.160	100	956.006.200	100	965.566.262	100	983.912.021	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (Persen)	85	125.740.000	90	103.274.000	90	1.892.867.635	95	1.069.527.139	95	1.080.222.410	100	1.088.864.190	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani (ton)	645.012,56	-	628.749,22	-	458.986,77	3.975.166.984	465.340,32	4.226.335.000	449.867	4.234.787.670	453.32	4.277.135.547	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yg terkelola (Persen)	70	-	71	474.438.000	72	12.089.251.004	72	11.114.574.540	73	11.225.720.285	74	11.304.300.327	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik (%)	12	-	12	-	12	45.215.584.956	15	36.460.922.172	15	36.716.148.627	18	36.899.729.370	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		4.1.3	Menurunnya titik banjir/genangan	Jumlah titik banjir/genangan	1.910		617		410		305		100		30		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	75	-	76	-	84	651.546.488.324	88	468.156.785.934	90	469.093.099.506	92	471.438.565.003	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
Medan Kondusif	5.1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan trantibum	35,37		7,92		10		10		10		10		
		5.1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Jumlah gangguan ketertiban umum	18.838		20.330,00		18.297		16.467		14.821		13.339		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Target Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	90,66	30.844.319.179	96,53	33.043.445.190	97	36.559.220.504	98	38.046.153.177	98	38.160.291.637	99	38.389.253.386	Satuan Polisi Pamong Praja
				Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan (%)	68,95		73,48		80		85		85		99		Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan (Persen)	100	326.719.800	100	1.037.777.970	100	1.917.083.063	100	4.408.384.383	100	4.452.468.227	100	4.465.825.632	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku (Persen)	100	12.000.000	100	252.149.000	100	486.129.165	100	530.540.696	100	540.090.429	100	547.111.604	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba) (Kelurahan)	131	48.773.500	132	559.630.800	134	1.311.488.308	136	2.118.034.698	148	2.124.388.802	140	2.141.383.913	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah (Persen)	95	83.249.400	100	329.809.500	100	6.740.699.479	100	1.265.647.630	100	1.268.178.925	100	1.278.324.357	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu (Persen)	90	739.525.700	100	1.169.451.000	100	2.503.866.268	100	2.640.406.530	100	2.661.529.782	100	2.672.175.901	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas (%)	96,75	67.007.281.008	93,07	44.240.961.670	100	120.518.189.707	100	117.736.918.792	100	121.307.325.292	100	121.757.325.292	Dinas Perhubungan
Medan Inovatif	6.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan ekonomi	2,62		4,71		5,50 - 6,10		5,60-6,35		5,70-6,50		5,90-6,60		
				Inflasi	1,70		6,10		3,00-4,50		2,25-3,75		2,00-3,40		1,80-3,10		
		6.1.1	Meningkatnya laju pertumbuhan investasi	Pertumbuhan investasi	5.939.665.941.900		4.153.965.803.200		5.475.389.633.838		5.749.158.937.048		6.036.616.990.089		6.338.447.852.552		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	92.00	-	92.90	-	93.00	3.829.010.930	94.00	3.421.143.190	95.00	3.431.406.620	96.00	3.451.995.059	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	1	-	2	-	2	411.792.530	2	771.876.680	2	778.051.693	2	781.163.900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PERTANIAN	(%)													
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal (promosi)	3	292.778.959	6	1.247.179.476	5	1.373.287.133	5	1.921.310.050	5	1.936.680.530	5	1.942.490.572	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	83,23	338.267.232	88,22	5.660.000	89	119.112.750	89	210.592.000	89	212.697.920	89	213.336.014	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi (%)	100	302.324.100	100	280.072.418	100	347.236.924	100	783.769.000	100	791.606.690	100	797.147.937	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi (Aplikasi)	1	452.520.000	1	775.485.000	1	1.208.580.400	1	1.257.680.000	1	1.266.483.760	1	1.274.082.663	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		6.1.2	Meningkatnya UMKM naik kelas	Persentase UMKM naik kelas	N/A		15,10		20,54		25,00		25,00		25,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang (%)	14,5	-	15	-	20,54	15.676.831.439	21	11.646.355.181	21,5	11.762.818.733	22	11.856.921.283	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi (%)	4	-	5.5	-	6.5	4.324.861.676	8.5	527.009.816	10.5	530.171.875	12.5	538.124.453	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha (%)	55.32	-	55.35	-	55.35	558.283.680.043	55.37	789.446.118.923	55.37	795.761.687.874	55.38	798.944.734.626	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		6.1.3	Meningkatnya PAD	Rasio PAD	37,96		40,93		51,46		49,77		53,33		56,80		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)	100	-	100	-	100	198.342.420.273	100	224.644.390.019	100	225.093.678.799	198	225.543.866.157	Badan Pendapatan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah wajib pajak yang bertambah (orang)	516.460	-	522.257	-	528.230	10.844.082.852	533.512	13.421.989.561	538.847	13.556.209.457	544.235	13.664.659.132	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah objek pajak yang bertambah (Objek Pajak)	15087		20213		23175		24333		25549		26826		Badan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	3	925.475.175	3	8.233.820.708	3	12.270.300.000	3	11.523.300.000	3	11.627.009.700	3	11.743.279.797	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	74	184.910.000	74	2.533.701.851	85	3.623.602.400	90	2.140.475.680	95	2.149.037.583	100	2.161.931.808	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas (%)	96,75	72.415.192.782	93,07	86.747.511.401	100	125.097.074.758	100	120.528.469.162	100	121.372.168.446	100	122.464.517.962	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi APBD (%)	79	-	80,65	-	95	78.220.229.807	95	75.291.531.537	95	75.969.155.321	95	76.576.908.563	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu (tepat waktu)	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan (tepat waktu)	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah regulasi terkait penanaman modal (regulasi)	3	-	1	1.221.729.570	2	676.669.240	2	892.556.700	2	910.407.834	2	915.870.281	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal (promosi)	3	292.778.959	6	1.247.179.476	5	1.373.287.133	5	1.921.310.050	5	1.936.680.530	5	1.942.490.572	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi (%)	100	302.324.100	100	280.072.418	100	347.236.924	100	783.769.000	100	791.606.690	100	797.147.937	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		6.1.4	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	29,71		44,04		63,00		64,00		65,00		66,00		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD (Rekomendasi)	5	-	8	-	8	3.593.063.500	6	2.595.095.100	11	2.600.285.290	12	2.610.686.431	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
				Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah (Inovasi)	21		13		21		45		60		70		Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	B (65)	64.444.644	B (68)	235.218.777	B (70)	366.048.740	BB (75)	262.357.505	BB (75)	264.366.508	A (81)	267.239.625	Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
			2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
		(Poin)													
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Daerah (%)	8,69	-	13,04	-	13,04	496.320.120	17,39	-	21,75	-	26.09	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	92.00	-	92.90	-	89,5	3.829.010.930	94.00	3.421.143.190	95.00	3.431.406.620	96.00	3.451.995.059	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi (%)	17,39	13.668.524.988	30,4	11.228.419.000	50,4	27.081.973.317	69,57	29..582.290.433	82,6	37.486.200.839	95,6	35.487.008.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang Terpublikasikan (%)	100	12.003.349.188	100	14.394.427.289	100	14.682.488.602	100	16.078.806.870	100	18.102.403.628	100	17.158.732.597	Dinas Komunikasi dan Informatika
Medan Beridentitas	7.1 Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,57		2,66		3,07		3,15		3,23		3,31		
	Meningkatnya kunjungan	Jumlah wisatawan	170.649		319.315		328.895		338.762		348.925		359.392		

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			wisata	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	93		93		126		126		130		130		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan (%)	76,15	-	80	-	83,25	10.562.865.978	86,75	15.829.995.000	89,5	15.893.314.980	92,75	16.004.568.185	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah (%)	80	-	85,25	-	87,65	3.499.031.679	89	7.802.124.960	92,3	7.817.729.210	96	7.872.453.314	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah (%)	75,5	-	78	-	80,1	426.510.000	82,5	400.000.000	85,35	407.600.000	90	412.491.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan (%)	78,25	-	80	-	83,45	2.217.556.323	85,24	3.016.500.000	88,03	3.037.615.500	92,75	3.067.991.655	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase permuseuman yang dikelola (%)	78	-	80,12	-	83,25	290.097.030	85,24	1.000.000.000	87,2	1.017.000.000	88,56	1.027.170.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni (%)	55.32	-	55.35	-	55.35	558.283.680.043	55.37	789.446.118.923	55.37	795.761.687.874	55.38	798.944.734.626	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Misi	Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Realisasi				Target								Perangkat Daerah
					2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Kegiatan)	3	883.961.805	3	552.835.000	3	335.316.200	4	662.775.308	4	676.030.814	4	689.551.430	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	3	925.475.175	3	8.233.820.708	3	12.270.300.000	3	11.523.300.000	3	11.627.009.700	3	11.743.279.797	Dinas Pariwisata

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN

Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan pembangunan akan memedomani prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta situasi dan kondisi pada periode masa jabatan kepala daerah. Program-program yang akan diselenggarakan didukung dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya.

7.1. Kerangka Pendanaan Daerah

Dalam upaya mendukung rumusan program perangkat daerah, diperlukan perencanaan terhadap kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan tersebut mengarah kepada Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka proyeksi terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada Tabel 7.1 menunjukkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah Kota Medan tahun 2022 mencapai Rp 560,06 Milyar. Kapasitas riil keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi oleh pengeluaran daerah yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil keuangan daerah.

Tabel 7.1.
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 (Milyar Rupiah)

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan	Proyeksi			
	2021	2022	2018-2022 (%)	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	5.023,10	5.460,78	6,4	7.294,98	7.576,22	7.979,47	8.225,06
SiLPA	622,40	1.146,44	124,1	548.56	450,08	356,09	208,11
Dikurangi							
Realisasi Belanja Daerah	4.499,10	6.047,16	9,5	7.843,54	8.026,30	8.335,56	8.433,17
Pengeluaran Pembiayaan Daerah			-18,4				
Kapasitas Riil	1.146,44	560,06	67,8	0	0	0	0

7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
2. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
5. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Medan.

Program perangkat daerah Kota Medan merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib non-pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan serta unsur penunjang dan unsur kewilayahan.

Program Perangkat daerah merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keselarasan dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan misi untuk mencapai visi pembangunan Indonesia tahun 2045, presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi atau pedoman prioritas pembangunan, meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan fokus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan fokus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya menjawab arahan presiden tersebut, Pemerintah Sumatera Utara dalam menjawab isu strategis yang ada menerapkan tema Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 2024 -2026 dengan fokus tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengambil empat sasaran strategis pembangunan daerah Sumatera Utara, meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan program pembangunan harus memperhatikan dan memedomani arahan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk menangani permasalahan dan isu strategis yang sama. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama khususnya dalam menangani permasalahan dan isu-isu strategis

Dalam upaya membangun keselarasan dengan perubahan program prioritas di tingkat provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan penyesuaian program prioritas sebagai bentuk prioritas utama dalam kerangka pendanaan yang akan dilakukan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan program prioritas Kota Medan yang selaras dengan program prioritas Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Medan dengan Provinsi Sumatera Utara

No	Peningkatan Pembangunan Sumatera Utara	No	Prioritas Pembangunan Kota Medan
PSU1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	PK2	Peningkatan kualitas SDM
PSU2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	PK1	Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat
		PK6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif
		PK7	Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya
PSU3	Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	PK5	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
		PK4	Peningkatan kualitas infrastruktur
PSU4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	PK3	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

7.3. Kerangka Pendanaan Lainnya

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah guna membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kota Medan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan memiliki beberapa program pembangunan di antaranya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, Program penanganan banjir (normalisasi Daerah Aliran Sungai), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah berbasis *Sanitary Landfill*. Oleh Karena besarnya kebutuhan fiskal dalam perencanaan pembangunan Kota Medan, maka Kota Medan harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai dari pemerintah pusat dan CSR sebagai rekan pembangunan.

Kondisi ini terjadi dalam konteks pembiayaan yang diharapkan dapat dijalankan pemerintah daerah, Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan. Berikut adalah kerangka pendanaan kegiatan perangkat daerah.

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	1		**Pendidikan**																
			Dinas Pendidikan					689,710,049,619		852,781,560,279		27,278,809,257		-		-		-	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	646,421,859,519	100	601,491,370,324	100	27,278,809,257		-		-		-	100
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79.57	80.65	43,288,190,100	82.68	192,348,993,055	83.45	-		-		-		-	86.89
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	0.00	84.56		85.38		86.39								88.56
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	%	0.09	0.08		0.08		0.07								0.04
1	1	2		Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	0.00	84.52		85.55		85.87								87.13
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum	%	0.00	0	-	75.94	-	76.34	-		-		-		-	79.56
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	%	0.00	78.56	-	79.56	58,941,196,900	80.05	-		-		-		-	85.87
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					-		-		1,130,827,755,395		1,326,865,396,705		1,331,201,771,135		1,338,345,544,378	

1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	-	100	-	100	745,322,808,549	10	770,002,982,117	100	771,542,988,081	100	773,086,074,057	100
1	1	1		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	82.50	84.52	-	85.55	-	85.87	384,096,574,615	86.01	555,953,198,798	86.5	558,732,964,792	87.13	564,320,294,440	87.13
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	%	78.65	83		85		89		90		93		95		95
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	%	78.20	80.25		83.65		87.50		88.75		92.10		95.50		95.50
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	84.25	84.56		85.38		86.39		87.59		88.03		88.56		88.56
1	1	2		Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79.57	79.57		82.68		83.45		84.87		85.90		86.89		86.89
1	1	2		Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	85.24	85.24		87.10		88.56		90.15		93.56		98.75		98.75
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum	%	0.00	0	-	75.94	-	76.34	618,771,496	77.9	592,847,120	78.32	604,704,062	79.56	611,960,511	79.56
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	%	78.20	80.25	-	83.65	-	87.50	789,600,735	88.75	316,368,670	92.10	321,114,200	95.50	327,215,370	95.50
1	2		**Kesehatan**																
			Bagian Sosial, Pendidikan (SOTK LAMA)					44,150,000		-		-		-		-		-	
1	2	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	50.00	50	44,150,000	60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100
			Dinas Kesehatan					704,381,100,510		702,218,369,277		738,309,436,292		749,457,238,720		754,284,301,257		758,042,589,934	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	85.00	85	381,500,917,708	85	421,165,763,453	85	433,905,381,996	85	450,794,095,540	88	454,400,448,304	90	456,672,450,546	90

1	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	2	1		Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	75.00	75	322,155,298,002	75	279,092,631,294	100	293,656,273,597	100	292,148,843,180	100	293,317,438,553	100	294,784,025,745	100
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	%	75.00	75.00	184,760,000	75.00	302,667,280	78.00	2,736,645,099	66.67	-	66.67	-	66.67	-	66.67
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72.00	72		75		78		80		82		85		85
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Standar	%	72.00	72.00	102,519,000	75.00	148,618,000	75.00	581,577,550	79.00	-	80.00	-	85.00	-	85.00
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	%	92.00	92.00	437,605,800	100.00	1,508,689,250	100.00	7,429,558,050	100.00	6,514,300,000	100.00	6,566,414,400	100.00	6,586,113,643	100.00
			UPT. Puskesmas Amplas					-		-		5,087,295,144		4,699,116,754		4,708,514,988		4,741,474,592	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	5,087,295,144	100	4,699,116,754	100	4,708,514,988	100	4,741,474,592	100
			UPT. Puskesmas Belawan					-		-		4,205,729,351		3,872,646,240		3,892,009,471		3,915,361,528	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	4,194,029,351	100	3,872,646,240	100	3,892,009,471	100	3,915,361,528	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	11,700,000	100	-	100	-	100	-	100

			UPT. Puskesmas Bestari					-		-		1,999,209,133		1,681,014,483		1,697,824,628		1,702,918,102	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,995,609,133	100	1,681,014,483	100	1,697,824,628	100	1,702,918,102	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	3,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Bromo					-		-		1,645,217,292		1,340,768,053		1,351,494,197		1,356,900,174	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,645,217,292	100	1,340,768,053	100	1,351,494,197	100	1,356,900,174	100
			UPT. Puskesmas Darussalam					-		-		2,403,774,753		2,121,961,768		2,132,571,577		2,136,836,720	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,401,374,753	100	2,121,961,768	100	2,132,571,577	100	2,136,836,720	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	2,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Desa Binjai					-		-		1,933,496,445		1,653,614,973		1,670,151,123		1,676,831,727	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,920,896,445	100	1,653,614,973	100	1,670,151,123	100	1,676,831,727	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	12,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Desa Lalang					-		-		2,162,838,860		1,871,060,549		1,874,802,670		1,893,550,697	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,157,338,860	100	1,871,060,549	100	1,874,802,670	100	1,893,550,697	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	5,500,000	100	-	100	-	100	-	100

			KESEHATAN																
			UPT. Puskesmas Glugur Darat					-		-		5,079,272,138		4,642,077,258		4,679,213,876		4,702,609,945	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	5,073,222,138	100	4,642,077,258	100	4,679,213,876	100	4,702,609,945	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	6,050,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Glugur Kota					-		-		1,458,069,650		1,172,555,239		1,176,072,905		1,181,953,269	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,457,069,650	100	1,172,555,239	100	1,176,072,905	100	1,181,953,269	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	1,000,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Helvetia					-		-		7,118,360,300		6,645,669,840		6,698,835,199		6,732,329,375	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	7,088,960,300	100	6,645,669,840	100	6,698,835,199	100	6,732,329,375	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	29,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Kedai Durian					-		-		1,517,083,807		1,237,581,807		1,242,532,134		1,248,744,795	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,512,083,807	100	1,237,581,807	100	1,242,532,134	100	1,248,744,795	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	5,000,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Kota Matsum					-		-		2,317,297,692		1,981,853,646		1,999,690,329		2,009,688,780	

1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,298,897,692	100	1,981,853,646	100	1,999,690,329	100	2,009,688,780	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	18,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Kampung Baru					-		-		2,285,285,446		1,901,125,213		1,906,828,589		1,920,176,389	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,285,285,446	100	1,901,125,213	100	1,906,828,589	100	1,920,176,389	100
			UPT. Puskesmas Medan Area Selatan					-		-		1,589,462,229		1,233,885,972		1,236,353,744		1,248,717,281	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,577,862,229	100	1,233,885,972	100	1,236,353,744	100	1,248,717,281	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	11,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Mandala					-		-		3,410,811,603		3,105,747,603		3,118,170,593		3,146,234,129	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,404,211,603	100	3,105,747,603	100	3,118,170,593	100	3,146,234,129	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	6,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Martubung					-		-		3,215,242,129		2,903,834,514		2,912,546,018		2,935,846,386	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,195,442,129	100	2,903,834,514	100	2,912,546,018	100	2,935,846,386	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	19,800,000	100	-	100	-	100	-	100

			UPT. Puskesmas Medan Denai					-		-		2,393,272,384		2,091,758,383		2,112,675,967		2,121,126,671	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,387,772,384	100	2,091,758,383	100	2,112,675,967	100	2,121,126,671	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	5,500,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Medan Johor					-		-		5,482,708,207		5,144,728,114		5,175,596,483		5,227,352,448	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	5,475,508,207	100	5,144,728,114	100	5,175,596,483	100	5,227,352,448	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	7,200,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Medan Labuhan					-		-		2,167,646,773		1,880,123,946		1,889,524,566		1,893,303,615	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,165,346,773	100	1,880,123,946	100	1,889,524,566	100	1,893,303,615	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	2,300,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Polonia					-		-		3,028,117,755		2,646,235,803		2,662,113,218		2,678,085,897	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,028,117,755	100	2,646,235,803	100	2,662,113,218	100	2,678,085,897	100
			UPT. Puskesmas Medan Sunggal					-		-		4,331,343,397		4,003,650,520		4,011,657,821		4,023,692,795	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	4,330,243,397	100	4,003,650,520	100	4,011,657,821	100	4,023,692,795	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	1,100,000	100	-	100	-	100	-	100

			KESEHATAN																
			UPT. Puskesmas Padang Bulan					-		-		2,384,965,159		1,992,119,171		1,998,095,529		2,014,080,293	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,352,565,159	100	1,992,119,171	100	1,998,095,529	100	2,014,080,293	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	32,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Pasar Merah					-		-		2,100,242,423		1,742,233,274		1,745,717,741		1,763,174,918	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,099,042,423	100	1,742,233,274	100	1,745,717,741	100	1,763,174,918	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	1,200,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas PB Selayang II					-		-		4,470,586,137		4,093,439,285		4,109,813,042		4,146,801,360	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	4,450,886,137	100	4,093,439,285	100	4,109,813,042	100	4,146,801,360	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	19,700,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Pekan Labuhan					-		-		1,914,213,493		1,640,782,163		1,647,345,292		1,652,287,328	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,914,213,493	100	1,640,782,163	100	1,647,345,292	100	1,652,287,328	100
			UPT. Puskesmas Pulo Brayan					-		-		1,653,194,047		1,366,477,826		1,377,409,649		1,385,674,106	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,650,794,047	100	1,366,477,826	100	1,377,409,649	100	1,385,674,106	100

1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	2,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Rantang					-		-		1,297,666,167		1,011,853,842		1,019,948,673		1,021,988,570	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,288,066,167	100	1,011,853,842	100	1,019,948,673	100	1,021,988,570	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	9,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Sei Agul					-		-		2,644,269,678		2,317,869,765		2,334,094,853		2,355,101,707	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,639,469,678	100	2,317,869,765	100	2,334,094,853	100	2,355,101,707	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	4,800,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Sentosa Baru					-		-		4,290,501,408		3,859,160,780		3,882,315,745		3,921,138,902	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	4,290,501,408	100	3,859,160,780	100	3,882,315,745	100	3,921,138,902	100
			UPT. Puskesmas Sering					-		-		2,844,540,455		2,541,327,681		2,561,658,302		2,569,343,277	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,841,240,455	100	2,541,327,681	100	2,561,658,302	100	2,569,343,277	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	3,300,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Simalingkar					-		-		2,261,481,621		1,935,351,221		1,946,963,328		1,954,751,182	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,257,281,621	100	1,935,351,221	100	1,946,963,328	100	1,954,751,182	100

			MASYARAKAT																
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	4,200,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Simpang Limun					-		-		1,953,687,696		1,599,530,050		1,615,525,350		1,628,449,553	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,950,087,696	100	1,599,530,050	100	1,615,525,350	100	1,628,449,553	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	3,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Sukaramai					-		-		1,940,389,638		1,576,793,817		1,592,561,755		1,608,487,373	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	1,934,789,638	100	1,576,793,817	100	1,592,561,755	100	1,608,487,373	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	5,600,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Sicanang					-		-		2,628,244,042		2,323,301,184		2,334,917,690		2,339,587,525	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,621,044,042	100	2,323,301,184	100	2,334,917,690	100	2,339,587,525	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	7,200,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Rengas Pulau					-		-		3,474,604,582		3,072,721,936		3,103,449,155		3,115,862,952	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,470,804,582	100	3,072,721,936	100	3,103,449,155	100	3,115,862,952	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	3,800,000	100	-	100	-	100	-	100

			KESEHATAN																
			UPT. Puskesmas Tegal Sari					-		-		2,738,870,815		2,406,181,103		2,423,024,371		2,447,254,614	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,728,770,815	100	2,406,181,103	100	2,423,024,371	100	2,447,254,614	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	10,100,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Teladan					-		-		2,971,089,158		2,618,452,670		2,623,689,575		2,631,560,644	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,959,689,158	100	2,618,452,670	100	2,623,689,575	100	2,631,560,644	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	11,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Terjun					-		-		3,841,474,154		3,523,017,028		3,551,201,164		3,576,059,572	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,827,474,154	100	3,523,017,028	100	3,551,201,164	100	3,576,059,572	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	14,000,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Titi Papan					-		-		3,682,183,426		3,242,832,805		3,249,318,471		3,262,315,744	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,679,183,426	100	3,242,832,805	100	3,249,318,471	100	3,262,315,744	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	3,000,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskesmas Tuntungan					-		-		2,241,603,253		1,856,141,215		1,874,702,627		1,891,574,951	

1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	2,236,203,253	100	1,856,141,215	100	1,874,702,627	100	1,891,574,951	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	5,400,000	100	-	100	-	100	-	100
			UPT. Puskemas Medan Deli					-		-		3,612,817,074		3,301,578,584		3,334,594,370		3,347,932,747	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	-	100	3,602,767,074	100	3,301,578,584	100	3,334,594,370	100	3,347,932,747	100
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96.00	96	-	100	-	100	10,050,000	100	-	100	-	100	-	100
			RSUD Dr. Pirngadi Medan					-		30,827,321,547		199,052,998,979		189,632,398,894		191,342,744,483		192,159,200,494	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100.00	100	-	100	9,447,326,818	100	175,572,491,235	100	165,939,807,520	100	167,599,205,595	100	168,269,602,418	100
1	2	1		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100.00	100	-	100	21,202,023,899	100	23,257,665,844	100	23,247,300,000	100	23,293,794,600	100	23,433,557,368	100
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72.00	72	-	75	177,970,830	78	222,841,900	80	445,291,374	82	449,744,288	85	456,040,708	85
			RSUD H. Bachtiar Djafar					-		-		30,018,674,795		25,830,671,337		26,063,147,379		26,245,589,411	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100.00	100	-	100	-	100	341,416,622	100	-	100	-	100	-	100
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	%	100.00	100	-	100	-	100	29,677,258,173	100	25,830,671,337	100	26,063,147,379	100	26,245,589,411	100

			KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan															
1	3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																
			Dinas Pekerjaan Umum					285,630,347,314		869,705,607,700		640,003,311		-		-		-	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	54,309,543,589	100	120,868,245,453	100	640,003,311		-		-		-	100
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase perwujudan SPAM	%	87.00	90.25	-	93.5	940,286,600	96.75	-		-		-		-	100
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4.85	5.3	-	5.8	-	6.71	-		-		-		-	10.03
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90.00	92	81,166,662,995	95	412,000,302,840	98	-		-		-		-	100
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	89.00	91	149,179,093,730	95	334,171,759,857	98	-		-		-		-	100
1	3	10		Persentase pengembangan kapasitas jalan	%	0.00	0.02		5.25		7.43								10.04
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi	%	65.00	68	975,047,000	71	1,725,012,950	74	-		-		-		-	83
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					160,755,874,579		395,659,329,318		-		-		-		-	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	87.00	90.25	-	93.5	15,980,870,000	96.75	-		-		-		-	100
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/	%	0.00	0	-	20	3,424,818,400	20	-		-		-		-	100

			PERSAMPAHAN REGIONAL	direhabilitasi/ ditingkatkan														
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	4.85	5.3	-	5.8	10,290,386,400	6.71	-		-		-		-	10.03
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase rumah yang sudah memiliki air bersih dan sanitasi yang baik	persen	100.00	100	1,608,857,000		-		-		-		-		-	
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65.00	65	58,318,087,290	70	243,389,668,372	75	-		-		-		-	90
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	0.00	10	100,023,785,289	20	113,108,284,022	40	-		-		-		-	100
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65.00	65	805,145,000	70	9,465,302,124	70	-		-		-		-	70
			Dinas Kebersihan dan Pertamanan					45,304,819,348		10,868,531,750		-		-		-		-	
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	50.00	50	3,929,449,893	55	10,868,531,750	60	-		-		-		-	75
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75.00	75	36,548,573,022	0	-	0	-		-		-		-	75
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase unit gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	85.00	90	4,826,796,433	0	-	0	-		-		-		-	90
			Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi					-		-		1,365,410,415,042		1,155,708,425,529		1,158,709,959,362		1,163,210,255,486	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	-	B	-	A	140,139,423,608	A	106,095,721,443	A	106,944,487,215	A	107,906,987,599	A
1	3	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	3	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100

1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4.85	5.3	-	5.8	-	6.71	-	8.11	-	10.03	-	10.03	-	10.03
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	74.00	75.00	-	76.00	-	84.00	651,546,488,324	88.00	468,156,785,934	90.00	469,093,099,506	92.00	471,438,565,003	92.00
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	94.00	100	-	100	-	100	567,320,213,135	100	572,532,142,622	100	573,677,206,907	100	574,824,561,321	100
1	3	10		Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	%	53,38	51,81		51,65		51,83		60.0		65.00		70.00		70.00
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	55.00	55.00	-	55.00	-	56.00	6,404,289,975	57.00	8,923,775,530	58.00	8,995,165,734	59.00	9,040,141,563	59.00
			UPT. Wilayah Utara					-		-		6,153,425,241		8,598,700,771		8,652,513,261		8,702,146,113	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	155,397,762	100	915,288,846	100	929,933,468	100	943,882,470	100
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90.00	92	-	95	-	98	5,998,027,479	100	4,760,208,925	100	4,793,530,387	100	4,817,498,039	100
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	89.00	91	-	95	-	98	-	100	2,923,203,000	100	2,929,049,406	100	2,940,765,604	100
			UPT. Wilayah Barat					-		-		5,928,808,770		9,325,884,412		9,385,965,277		9,473,595,005	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	224,196,807	100	863,686,171	100	878,368,836	100	884,517,418	100
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	76.00	0	-	0	-	84	5,704,611,963	88	4,902,972,881	90	4,912,778,827	92	4,961,906,615	92
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	94.00	0	-	0	-	100	-	100	3,559,225,360	100	3,594,817,614	100	3,627,170,972	100
			UPT. Wilayah Timur					-		-		6,028,808,770		8,166,996,457		8,198,086,471		8,249,202,715	

1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	324,196,807	100	868,001,271	100	884,493,295	100	901,298,668	100
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	N/A	N/A	-	N/A	-	84	5,704,611,963	88	4,775,792,186	90	4,785,343,770	92	4,804,485,145	92
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	N/A	N/A	-	N/A	-	100	-	100	2,523,203,000	100	2,528,249,406	100	2,543,418,902	100
			UPT. Wilayah Kota					-		-		6,028,808,770		8,274,182,532		8,340,233,490		8,384,957,832	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	324,196,807	100	873,789,971	100	886,023,031	100	888,681,100	100
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	N/A	N/A	-	N/A	-	84	5,704,611,963	88	4,877,139,061	90	4,925,910,452	92	4,960,391,825	92
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100	2,523,253,500	100	2,528,300,007	100	2,535,884,907	100
			UPT. Wilayah Selatan					-		-		5,968,267,471		8,436,859,943		8,471,030,263		8,543,476,007	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	278,754,392	100	1,056,081,093	100	1,065,585,823	100	1,074,110,509	100
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	N/A	N/A	-	N/A	-	84	5,689,513,079	88	4,857,525,350	90	4,872,097,926	92	4,920,818,905	92
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100	2,523,253,500	100	2,533,346,514	100	2,548,546,593	100
			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang					-		-		828,393,371,162		1,154,413,968,522		1,163,209,192,420		1,168,562,196,459	

1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	%	38.20	38.20	-	11.80	-	25.00	15,464,458,000	33.30	19,380,000,000	50.00	19,438,140,000	100.00	19,535,330,700	100.00
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur TPA yang tertangani	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	13,699,273,600	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	44.18	44.18	-	71.19	-	78.88	12,157,432,100	85.96	19,400,000,000	93.05	19,535,800,000	100.00	19,633,479,000	100.00
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	%	55.32	55.32	-	55.35	-	55.35	558,283,680,043	55.37	789,446,118,923	55.37	795,761,687,874	55.38	798,944,734,626	55.38
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	228,288,527,419	100.00	325,587,849,599	100.00	327,866,964,546	100.00	329,834,166,333	100.00
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5.00	5.00	-	10.00	-	16.00	500,000,000	22.00	600,000,000	28.00	606,600,000	35.00	614,485,800	35.00
			Dinas Lingkungan Hidup					-		-		3,975,166,984		4,226,335,000		4,234,787,670		4,277,135,547	
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume sampah yang ditangani	ton	645.012,56	645.012,56	-	628.749,22	-	458.986,77	3,975,166,984	465.340,32	4,226,335,000	449.87	4,234,787,670	453.32	4,277,135,547	2.651.858,737
1	4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					58,341,850,290		45,293,004,720		385,711,360		-		-		-	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan	%	70.00	70	28,773,252,748	75	29,176,808,400	80	385,711,360		-		-		-	100

			TA	urusan pemerintahan daerah yang tersedia														
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	65.00	65	3,938,718,542	75	7,201,940,120	80	-		-		-		-	100
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96.90	96.9	10,462,702,800	97.9	6,868,915,000	98.4	-		-		-		-	100
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	97.40	97.4	-	97.9	1,229,942,000	98.4	-		-		-		-	100
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	0.00	0	15,167,176,200	100	815,399,200	0	-		-		-		-	100
			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang					-		-		84,648,496,782		64,938,495,493		65,284,614,466		65,555,189,148	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	48,626,930,782	100.00	45,534,495,493	100.00	45,807,702,466	100.00	45,990,933,276	100.00
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	55.32	55.32	-	55.35	-	55.37	7,557,564,000	55.38	4,704,000,000	55.40	4,718,112,000	55.43	4,746,420,672	55.43
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	38.20	38.20	-	11.80	-	25.00	28,089,465,000	33.30	14,700,000,000	50.00	14,758,800,000	100.00	14,817,835,200	100.00
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	N/A	0	-	0	-	0	374,537,000	N/A	-	0	-	0	-	N/A
1	5		**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**																
			Satuan Polisi Pamong Praja					44,114,276,705		47,466,988,359		57,014,702,041		60,220,900,337		60,490,262,027		60,920,193,510	

1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	80.00	84,37	13,269,957,526	94.00	14,423,543,169	100.00	20,455,481,537	100.00	22,174,747,160	100.00	22,329,970,390	100.00	22,530,940,124	100.00
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	65.00	68,95	30,844,319,179	73,48	33,043,445,190	80	36,559,220,504	85	38,046,153,177	90	38,160,291,637	99	38,389,253,386	99
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90.00	90,66		96,53		97		98		99		99		99
			Bagian Pemerintahan (SOTK LAMA)					813,780,000		-		-		-		-		-	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					813,780,000		-		-		-		-		-	
			Bagian Tata Pemerintahan					1,941,795,000		-		-							
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100.00	100	1,941,795,000		-		-		-		-		-	100
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					15,251,717,674		21,132,749,484		21,818,641,730		19,277,839,009		19,410,001,926		19,515,387,920	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	57.60	58	7,489,790,138	63,15	11,213,031,149	63,25	13,362,327,671	63,35	13,762,890,249	63,45	13,872,993,371	63,55	13,956,231,331	64
1	5	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	5	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%	100.00	100.00	7,761,927,536	100.00	9,919,718,335	100.00	8,456,314,059	100.00	5,514,948,760	100.00	5,537,008,555	100.00	5,559,156,589	100.00
			Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran					28,303,065,498		47,669,686,083		687,743,195		-		-		-	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang	%	75.00	75	20,575,050,778	75	35,862,006,709	75	687,743,195		-		-		-	80

				tersedia														
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran	%	0.00	25	7,728,014,720	30	11,807,679,374	35	-		-		-		-	25
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pengawasan peralatan pemadam pada bangunan	titik	0.00	0		12		12								60
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	orang	0.00	0		420		420								2100
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap kebakaran	Menit	15.00	15		15		15								15
			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					-		-		50,703,678,827		47,884,621,891		48,293,659,252		48,653,697,350	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75.00	75.00	-	75.00	-	75.00	35,697,282,627	80.00	30,432,407,391	80.00	30,736,731,465	80.00	31,044,098,780	80.00
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Dokumen	12.00	12	-	12	-	12	15,006,396,200	12	17,452,214,500	12	17,556,927,787	12	17,609,598,570	12
1	5	4		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	Persen	4.00	4		4		6		8		10		12		12

				bahaya kebakaran															
1	6		**Sosial**																
			Dinas Sosial					73,696,834,695		83,352,818,499		110,544,777,785		131,842,337,354		132,588,220,122		133,053,188,674	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	12,254,771,259	100.00	12,763,223,307	100.00	14,265,806,382	100.00	15,408,823,253	100.00	15,501,276,193	100.00	15,578,782,573	100.00
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	65,57	65,57	54,856,993,180	68,70	60,741,140,202	70.00	81,836,799,239	70.00	92,177,779,784	70.00	92,730,846,463	70.00	93,009,039,002	70.00
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100.00	100	997,500,326	100	3,273,539,694	100	8,231,019,891	100	13,590,004,946	100	13,617,184,956	100	13,644,419,326	100
1	6	4		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100.00	100	5,064,725,530	100	4,502,848,716	100	3,056,600,040	100	8,237,190,160	100	8,303,087,681	100	8,377,815,470	100
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100.00	100.00	522,844,400	100.00	2,072,066,580	100.00	3,154,552,233	100.00	2,428,539,211	100.00	2,435,824,829	100.00	2,443,132,303	100.00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	7		**Tenaga Kerja**																
			Dinas Ketenagakerjaan					13,821,909,936		17,339,095,583		18,622,954,424		20,638,645,003		20,764,308,697		20,930,378,734	
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang	Persen	100.00	100.00	10,473,486,896	100.00	13,213,359,443	100.00	13,531,581,536	100.00	15,575,788,437	100.00	15,653,667,379	100.00	15,794,550,386	100.00

			KABUPATEN/KOTA	Disusun Tepat Waktu															
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	94,394,116	100.00	95,998,816	100.00	96,286,812	100.00
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	%	100.00	100.00	1,099,372,865	98.80	1,886,801,827	92.00	2,368,296,929	93.00	2,122,628,150	94.00	2,139,609,175	95.00	2,146,028,003	95.00
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	%	64.50	64.50	719,333,400	84.12	668,510,263	52.00	578,239,590	55.00	740,684,213	58.00	748,831,739	60.00	763,059,542	60.00
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	90.60	90.60	1,529,716,775	93.90	1,570,424,050	92.00	2,144,836,369	93.00	2,105,150,087	94.00	2,126,201,588	95.00	2,130,453,991	95.00
2	8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					10,695,398,966		12,629,240,568		272,376,970		-		-		-	
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	9,437,387,274	100	11,330,141,153	100	272,376,970		-		-		-	100
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	63.89	63.93	52,590,000	63.97	207,681,778	64.01	-		-		-		-	64.13
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100.00	100	129,922,632	100	86,144,100	100	-		-		-		-	100
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	%	100.00	100	220,002,100	100	52,593,500	100	-		-		-		-	100
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100.00	100	157,282,250	100	146,126,000	100	-		-		-		-	100

			ANAK																
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian indikator pemenuhan hak anak	%	100.00	100	373,711,700	100	467,595,200	100	-		-		-		-	100
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus anak	%	100.00	100	324,503,010	100	338,958,837	100	-		-		-		-	100
2	8	7		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100.00	100		100		100								100
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					-		-		21,748,951,162		30,984,048,750		31,280,339,994		31,495,182,965	
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	-	A	-	A	19,711,426,099	A	26,748,324,050	A	27,017,597,126	A	27,205,630,296	A
2	8	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	8	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	63.89	63.93	-	63.97	-	64.01	417,685,155	64.05	1,043,799,615	64.09	1,047,974,813	64.13	1,050,070,763	64.13
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Skor	6.20	6.29	-	6.18	-	6.16	197,493,210	6.14	697,820,985	6.12	700,612,269	6.10	707,618,392	6.10
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Keluarga	100.00	100.00	-	70.00	-	50.00	83,587,000	120.00	139,680,710	120.00	140,937,836	120.00	143,756,593	120.00
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	101,968,810	100.00	196,240,710	100.00	199,773,043	100.00	200,771,908	100.00

2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	611,535,934	100.00	1,001,617,147	100.00	1,007,626,850	100.00	1,015,687,865	100.00
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	625,254,954	0.02	1,156,565,533	0.01	1,165,818,057	0.01	1,171,647,148	0.01
2	9		**Pangan**																
			Dinas Ketahanan Pangan					19,235,973,790		22,640,749,043		215,011,441		-		-		-	
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.00	100	8,850,829,677	100	9,365,439,583	100	215,011,441		-		-		-	100
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase daerah rentan Rawan Pangan	%	4.34	8.69	599,110,500	13.04	1,666,808,394	13.04	-		-		-		-	100
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92.00	88	1,464,709,538	89	4,420,694,580	89.5	-		-		-		-	90.5
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83.12	83.5		84		84.5								86
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	4.76	9.5	3,371,021,403	14	3,278,310,462	14	-		-		-		-	99.5
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92.00	93	4,950,302,672	94	3,909,496,024	95	-		-		-		-	92
			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					-		-		37,779,809,017		40,893,443,569		40,994,806,228		41,195,090,490	
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100	-	100	-	100	28,901,605,168	100	32,282,749,829	100	32,347,315,329	100	32,509,051,905	100

2	9	1		Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Daerah	%	4.34	8.69	-	13.04	-	13.04	496,320,120	17.39	-	21.75	-	26.09	-	26.09
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92.00	92.00	-	92.90	-	93.00	3,829,010,930	94.00	3,421,143,190	95.00	3,431,406,620	96.00	3,451,995,059	96.00
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentasi Kelurahan Rawan Pangan Yang Tertangani	%	4.76	9.50	-	14.00	-	14.00	2,774,980,624	19.00	2,887,763,450	19.00	2,905,090,031	24.00	2,913,805,301	24.00
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan	%	90.00	91.00	-	92.00	-	93.00	1,777,892,175	94.00	2,301,787,100	95.00	2,310,994,248	96.00	2,320,238,225	96.00
2	10		**Pertanahan**																
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					26,985,431,825		194,519,339,537		-		-		-		-	
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100.00	70	26,985,431,825	70	194,519,339,537	70	-		-		-		-	70
			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang					-		-		316,448,791,315		53,751,642,748		54,151,310,260		54,259,612,881	
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11.76	11.76	-	17.82	-	47.06	305,197,095,980	64.71	38,578,828,058	82.35	38,887,458,682	100.00	38,965,233,600	100.00
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi RTH publik yang terkelola dengan baik	%	0.00	0.00	-	0.00	-	79.79	11,251,695,335	80.85	15,172,814,690	82.31	15,263,851,578	84.92	15,294,379,281	84.92
2	11		**Lingkungan Hidup**																
			Dinas Sumber Daya Air, Bina					-		-		45,215,584,956		36,460,922,172		36,716,148,627		36,899,729,370	

			Marga dan Bina Konstruksi															
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik	%	12.00	12.00	-	12.00	-	12.00	45,215,584,956	15.00	36,460,922,172	18.00	36,716,148,627	20.00	36,899,729,370	20.00
			Dinas Lingkungan Hidup					13,483,565,193		20,718,281,346		105,347,938,053		101,558,797,964		102,466,240,553		103,026,602,712	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	C	B	11,719,384,093	B	12,569,343,271	B	85,905,055,888	B	80,723,496,365	A	81,450,007,832	A	81,857,257,871	A
2	11	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80.00	80		80		82		84		86		90		90
2	11	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		80		82		84		86		90		90
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	Persen	50.00	50.00	92,880,000	60.00	1,223,190,975	100.00	986,461,160	100.00	956,006,200	100.00	965,566,262	100.00	983,912,021	100.00
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Persen	24,9	24,9	1,152,548,100	25.00	5,813,454,600	100.00	3,388,584,521	100.00	5,328,133,320	100.00	5,360,102,120	100.00	5,386,902,631	100.00
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	28,26	28,26	100,503,000	28,93	3,200,000	29,60	345,848,560	30,27	1,110,153,560	30,94	1,119,034,788	31,61	1,123,510,928	31,61
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	50.00	50.00	-	60.00	116,284,000	70.00	214,457,360	100.00	257,700,000	100.00	258,730,800	100.00	260,024,454	100.00
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Persen	50.00	50.00	114,600,000	60.00	153,110,000	70.00	107,109,175	80.00	560,177,760	90.00	565,779,538	100.00	572,568,892	100.00

2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	85.00	85.00	125,740,000	90.00	103,274,000	90.00	1,892,867,635	95.00	1,069,527,139	95.00	1,080,222,410	100.00	1,088,864,190	100.00
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	Persen	50.00	50.00	165,910,000	60.00	243,086,500	70.00	417,694,860	80.00	341,921,960	90.00	343,289,648	100.00	349,812,151	100.00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	12,000,000	100.00	18,900,000	100.00	608	100.00	97,107,120	100.00	97,786,870	100.00	99,449,247	100.00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yg terkelola	Persen	70.00	70.00	-	71.00	474,438,000	72.00	12,089,251,004	72.00	11,114,574,540	73.00	11,225,720,285	74.00	11,304,300,327	74.00
			Dinas Kebersihan dan Pertamanan					547,259,710,979		501,242,730,408		1,331,443,095		-		-		-	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	75.00	75	397,958,732,693	80	398,787,033,614	82	1,331,443,095		-		-		-	90
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi RTH publik yang terkelola dengan baik	%	70.00	70	37,671,243,915	75	82,432,295,270	80	-		-		-		-	87
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	%	80.00	76	111,629,734,371	75	20,023,401,524	74	-		-		-		-	70
2	12		**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					37,335,674,510		39,537,614,832		38,383,876,592		45,367,780,952		45,828,017,587		46,053,865,377	
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	33,109,384,350	A	35,817,197,417	A	31,892,507,536	A	36,610,370,457	A	36,976,474,162	A	37,161,356,532	A
2	12	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
2	12	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100

2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	%	100.00	100.00	746,125,880	100.00	1,789,395,550	100.00	5,257,612,826	100.00	7,421,267,995	100.00	7,495,480,675	100.00	7,517,967,117	100.00
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	%	86,48	86,48	230,889,380	100.00	450,087,400	100.00	364,780,000	100.00	382,862,500	100.00	384,393,950	100.00	390,928,647	100.00
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	%	100.00	100.00	3,249,274,900	100.00	1,480,934,465	100.00	844,976,230	100.00	896,880,000	100.00	914,817,600	100.00	925,795,411	100.00
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	%	80.00	80.00	-	80.00	-	100.00	24,000,000	100.00	56,400,000	100.00	56,851,200	100.00	57,817,670	100.00
2	13		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					6,078,696,845		7,889,531,936		-		-		-		-	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100.00	100	6,078,696,845	100	7,889,531,936	100	-		-		-		-	100
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					-		-		8,929,515,720		7,720,048,495		7,750,928,689		7,828,437,976	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah	4.00	4.00	-	4.00	-	4.00	8,929,515,720	4.00	7,720,048,495	4.00	7,750,928,689	4.00	7,828,437,976	4.00
2	14		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					14,557,313,790		21,663,152,691		273,229,857		-		-		-	
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	0.00	100	9,407,319,602	100	11,363,623,281	100	273,229,857		-		-		-	100

			KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah														
2	14	1		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	79.05	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0.00	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	57.99	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	52.06	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	73.86	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	83.15	100		100		100							100
2	14	1		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	0.00	0		0		100							100
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk	%	2.70	8.3	163,878,415	0	318,624,200	16.6	-		-		-	-	33.3
2	14	2		Persentase pengendalian penduduk	%	2.70	8.3		11.1		16.6							33.3
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	100.00	100	4,020,710,263	100	5,368,546,770	100	-		-		-	-	100
2	14	3		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.68	70.18		70.68		71.18							72.68
2	14	3		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.98	70.18		70.68		71.18							72.68
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	100.00	100	965,405,510	100	4,612,358,440	100	-		-		-	-	100
2	14	4		Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga	%	4.75	4.75		4.75		9.52							100

				Sejahtera (KS)															
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					-		-		16,307,506,126		17,963,515,548		18,108,764,496		18,194,444,956	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	50,01	51,5	-	57.10	-	62.80	953,898,161	68.50	952,908,040	74.20	961,484,212	80.00	969,176,086	80.00
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	75,22	75,22	-	61.93	-	50.31	7,834,368,426	53.35	8,358,324,949	55.50	8,408,474,899	56.50	8,425,291,848	56.50
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	%	18.05	18.05	-	18.05	-	85.00	7,519,239,539	90.00	8,652,282,559	90.00	8,738,805,385	90.00	8,799,977,022	90.00
2	15		**Perhubungan**																
			Dinas Kebersihan dan Pertamanan					-		51,930,333,199		-		-		-		-	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75.00	0	-	76	51,930,333,199	77	-		-		-		-	80
			Dinas Perhubungan					113,416,000,735		132,267,631,129		493,892,598,176		441,218,760,234		444,307,291,556		446,045,511,318	
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	66,50	65,30	41,000,807,953	63,70	45,520,119,728	65,00	368,795,523,418	70,00	320,690,291,072	80,00	322,935,123,110	80,00	323,580,993,356	80,00
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	%	97,80	96,75	72,415,192,782	93,07	86,747,511,401	100.00	125,097,074,758	100.00	120,528,469,162	100.00	121,372,168,446	100.00	122,464,517,962	100.00
2	16		**Komunikasi dan Informatika**																
			Dinas Komunikasi dan Informatika					34,914,290,890		40,866,891,374		58,021,048,441		62,755,327,287		63,082,492,326		63,555,745,388	
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (Baik)	B (Baik)	9,242,416,714	B (Baik)	15,244,045,085	B (Baik)	16,256,586,522	B (Baik)	17,710,803,484	B (Baik)	17,855,922,352	A (Sangat Baik)	18,032,255,794	A (Sangat Baik)
2	16	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100

2	16	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	%	100.00	100.00	12,003,349,188	100.00	14,394,427,289	100.00	14,682,488,602	100.00	15,637,533,370	100.00	15,731,358,570	100.00	15,762,821,287	100.00
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang Memenuhi Standar Teknis Pembangunan Aplikasi	%	17,39	17,39	13,668,524,988	30,4	11,228,419,000	50,4	27,081,973,317	69,57	29,406,990,433	82,6	29,495,211,404	95,6	29,760,668,307	95,6
2	17		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**																
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					12,374,951,239		30,970,412,332		160,851,167		-		-		-	
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	8,109,152,983	100	10,054,870,176	100	160,851,167		-		-		-	100
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha	Koperasi	0.00	0	203,400,000	52	744,098,401	52	-		-		-		-	260
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	5.00	5	289,550,424	10	321,372,600	15	-		-		-		-	30
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	%	0.00	2	374,656,800	4	323,315,800	6	-		-		-		-	12
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	0.00	140	367,206,000	316	1,147,559,800	316	-		-		-		-	1720
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mandiri	Koperasi	0.00	0	236,190,800	1	287,901,000	1	-		-		-		-	5
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro	Pelaku usaha	0.00	575	1,209,883,616	1385	5,823,863,000	1385	-		-		-		-	7500
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Pelaku usaha	0.00	575	1,584,910,616	1385	12,267,431,555	1385	-		-		-		-	7500
			Dinas Koperasi Usaha Kecil					-		-		44,502,042,765		41,214,909,046		41,524,022,464		41,843,125,697	

			Menengah, Perindustrian dan Perdagangan															
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90.00	95.00	-	95.00	-	100.00	22,761,591,414	100.00	25,533,736,967	100.00	25,686,939,389	100.00	25,866,747,965	100.00
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	Koperasi	36.00	36.00	-	50.00	-	66.00	361,160,000	66.00	461,272,400	66.00	470,497,848	66.00	471,909,342	350.00
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	5.00	5	-	10	-	15	-	20	677,754,700	25	690,632,039	30	699,610,256	30
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%	20.00	26.00	-	22.00	-	60.00	544,524,964	60.00	510,248,000	60.00	515,350,480	60.00	524,111,438	60.00
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	47.00	48.00	-	30.00	-	50.00	410,170,000	50.00	1,645,990,438	50.00	1,654,220,390	50.00	1,669,108,374	228.00
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	%	5.00	5.00	-	10.00	-	15.00	422,903,272	20.00	212,541,544	25.00	213,391,710	30.00	216,592,586	30.00
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	%	1.00	4.00	-	5,5	-	6,5	4,324,861,676	8,5	527,009,816	10,5	530,171,875	12,5	538,124,453	12,5
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	%	14.00	14,5	-	15.00	-	20,54	15,676,831,439	21.00	11,646,355,181	21,5	11,762,818,733	22.00	11,856,921,283	22.00
2	18		**Penanaman Modal**																
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					22,269,083,918		30,677,566,763		34,979,437,516		37,259,023,123		37,504,150,799		37,788,291,725	
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	84,47	20,883,193,627	89,79	27,147,440,299	100	31,254,551,069	100	32,193,115,373	100	32,386,274,065	100	32,645,364,258	100
2	18	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	84,47		89,79		100		100		100		100		100
2	18	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	84,47		89,79		100		100		100		100		100
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	regulasi	3.00	3.00	-	1.00	1,221,729,570	2.00	676,669,240	2.00	892,556,700	2.00	910,407,834	2.00	915,870,281	12.00

2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi penanaman modal	promosi	3.00	3.00	292,778,959	6.00	1,247,179,476	5.00	1,373,287,133	5.00	1,921,310,050	5.00	1,936,680,530	5.00	1,942,490,572	29.00
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00	83,23	338,267,232	88,22	5,660,000	89.00	119,112,750	89.00	210,592,000	89.00	212,697,920	89.00	213,336,014	89,00
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	%	100.00	0%, karena COVID 19 Kota Medan berada di zona merah Covid 19	302,324,100	100.00	280,072,418	100.00	347,236,924	100.00	783,769,000	100.00	791,606,690	100.00	797,147,937	100.00
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1.00	1.00	452,520,000	1.00	775,485,000	1.00	1,208,580,400	1.00	1,257,680,000	1.00	1,266,483,760	1.00	1,274,082,663	1.00
2	19		**Kepemudaan dan Olahraga**																
			Bagian Kesejahteraan Rakyat					14,530,800											
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	0	0	14,530,800	0		0		B (87)		A (89)		A (92)		A (92)
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					114,285,400		-		-		-		-		-	
			Dinas Pemuda dan Olahraga					29,575,657,626		47,737,546,460		61,080,030,398		61,406,885,231		61,765,831,188		62,291,019,273	
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	20,626,330,326	B	27,989,028,610	B	35,636,813,915	B	38,743,202,172	B	38,898,174,981	B	39,209,360,381	B
2	19	1		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	19	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	%	0.05	0.05	825,300,000	0.12	1,983,285,000	0.19	3,005,077,608	0.20	2,629,952,503	0.20	2,653,622,076	0.21	2,664,236,564	0.96
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	%	60	350	7,876,957,300	80	17,529,217,850	100	22,075,374,045	100	19,724,549,374	100	19,902,070,318	100	20,101,091,022	100

2	19	3	KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	%	72.41	72.41		72.41		72.41		75.86		79.31		82.75		82.75
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	%	100.00	100.00	247,070,000	50.00	236,015,000	100.00	362,764,830	100.00	309,181,182	100.00	311,963,813	100.00	316,331,306	100.00
2	20		**Statistik**																
			Dinas Komunikasi dan Informatika					126,000,000		336,600,000		927,707,500		519,679,000		526,434,827		535,910,654	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	%	100.00	100.00	126,000,000	100.00	336,600,000	100.00	927,707,500	100.00	519,679,000	100.00	526,434,827	100.00	535,910,654	100.00
2	21		**Persandian**																
			Dinas Komunikasi dan Informatika					515,505,000		463,439,262		530,844,662		957,272,600		965,888,053		975,546,934	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	33.00	33.00	515,505,000	33.00	463,439,262	33.00	530,844,662	33.00	957,272,600	66.00	965,888,053	100.00	975,546,934	100.00
2	22		**Kebudayaan**																
			Dinas Kebudayaan					15,902,443,196		25,549,503,621		152,306,463		-		-		-	
2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen	100.00	100	11,683,750,196	100	14,128,590,221	100	152,306,463		-		-		-	100
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah	0.00	5	515,500,000	10	3,121,423,400	12	-		-		-		-	20
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	0.00	5	770,956,000	10	3,865,348,300	12	-		-		-		-	20
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	%	0.00	3	592,365,000	5	1,115,763,200	10	-		-		-		-	15
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	0.00	32.07	2,042,872,000	32.54	3,258,428,500	33.02	-		-		-		-	33.97
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase permuseuman yang dikelola	%	0.00	3	297,000,000	5	59,950,000	10	-		-		-		-	15
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					-		-		16,996,061,010		28,373,674,960		28,501,240,185		28,716,590,615	

2	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen	100.00	100	-	100	-	100	-	100	325,055,000	100	327,980,495	100	331,916,261	100
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%	76.15	76.15	-	80.00	-	83.25	10,562,865,978	86.75	15,829,995,000	89.50	15,893,314,980	92.75	16,004,568,185	92.75
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	80.00	80.00	-	85.25	-	87.65	3,499,031,679	89.00	7,802,124,960	92.30	7,817,729,210	96.00	7,872,453,314	96.00
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	%	75.50	75.50	-	78.00	-	80.10	426,510,000	82.50	400,000,000	85.35	407,600,000	90.00	412,491,200	90.00
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	78.25	78.25	-	80.00	-	83.45	2,217,556,323	85.24	3,016,500,000	88.03	3,037,615,500	92.75	3,067,991,655	92.75
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Permuseuman yang dikelola	%	78.00	78.00	-	80.12	-	83.25	290,097,030	85.24	1,000,000,000	87.20	1,017,000,000	88.56	1,027,170,000	88.56
2	23		**Perpustakaan**																
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					12,766,044,820		15,031,753,573		17,346,023,247		19,033,140,373		19,089,391,606		19,193,736,093	
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	11,293,282,770	A	13,308,197,291	A	15,130,390,553	A	16,381,065,918	A	16,430,209,116	A	16,512,360,161	100
2	23	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
2	23	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Persen	0.88	10.81	1,391,873,650	16.79	1,640,602,282	21.19	2,101,956,394	24.56	2,551,858,555	27.23	2,556,962,272	29.38	2,577,417,970	29.38
2	23	2		Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Eksemplar	91702	97131		101864		104264		106664		109064		111464		111464
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persen	0.20	0.40	80,888,400	0.60	82,954,000	0.80	113,676,300	1.00	100,215,900	1.20	102,220,218	1.40	103,957,962	1.40
2	24		**Kearsipan**																
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					350,100,600		662,894,928		186,218,068		509,221,456		513,730,278		518,733,723	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip	Persen	3.89	9.4	320,400,600	12.97	510,566,249	16.21	125,041,338	19.46	278,690,620	22.7	282,034,907	25.94	284,855,257	25.94
2	24	2		Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Arsip	36548.00	154,494		159,390		154,390		149,390		144,390		139,390		139,390

2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	6.70	10.00	29,700,000	15.00	65,966,300	20.00	41,931,045	25.00	48,482,200	30.00	48,918,540	35.00	49,456,644	35.00
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah layanan perizinan penggunaan arsip	Layanan	1.00	1.00	-	1.00	86,362,379	1.00	19,245,685	1.00	182,048,636	1.00	182,776,831	1.00	184,421,822	5.00
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	25		**Kelautan dan Perikanan**																
			Dinas Pertanian dan Perikanan					23,094,966,987		31,492,385,468		609,117,428		-		-		-	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1.00	1	19,391,563,302	1	21,871,096,453		609,117,428		-		-		-	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2.00	2	1,237,674,728	2	5,009,082,790	2	-		-		-		-	10
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2.00	2	2,161,583,456	2	3,855,044,975	2	-		-		-		-	10
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	2.00	2	22,150,000	2	-	2	-		-		-		-	10
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	%	2.00	2	281,995,501	2	757,161,250	2	-		-		-		-	10
			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					-		-		4,957,766,650		7,043,174,647		7,089,521,567		7,115,370,954	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	1,608,994,076	2.00	1,816,535,084	2.00	1,831,067,365	2.00	1,838,391,634	2.00
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	3,299,588,604	2.00	4,789,605,635	2.00	4,813,553,663	2.00	4,823,180,771	2.00
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	2.00	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil	%	2.00	2	-	2	-	2	49,183,970	2	437,033,928	2	444,900,539	2	453,798,549	10

				Perikanan															
3	26		**Pariwisata**																
			Dinas Pariwisata				16,909,667,895		26,836,681,621		33,933,537,522		32,316,073,723		32,586,444,049		32,767,305,456	
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	100	14,915,320,915	100	15,365,508,262	100	17,522,953,522	100	17,857,594,055	100	18,000,590,270	100	18,038,231,637	100
3	26	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
3	26	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	3.00	3.00	883,961,805	3.00	552,835,000	3.00	335,316,200	4.00	662,775,308	4.00	676,030,814	4.00	689,551,430	4.00
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3.00	3.00	925,475,175	3.00	8,233,820,708	3.00	12,270,300,000	3.00	11,523,300,000	3.00	11,627,009,700	3.00	11,743,279,797	18.00
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	1.17	1.17	-	1.17	150,815,800	1.45	181,365,400	1.46	131,928,680	1.47	133,775,682	1.48	134,310,784	1.48
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	73.00	74.00	184,910,000	74.00	2,533,701,851	85.00	3,623,602,400	90.00	2,140,475,680	95.00	2,149,037,583	100.00	2,161,931,808	100.00
3	27		**Pertanian**																
			Dinas Pertanian dan Perikanan					5,197,698,092		6,047,604,752		-		-		-		-	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100	1,870,000	100	-	100	-		-		-		-	100
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1.00	1	2,609,255,701	1.2	3,232,133,960	1.2	-		-		-		-	6
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1.00	1	66,792,200	2	1,076,434,500	2	-		-		-		-	10

			PERTANIAN															
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.50	80.5	1,549,707,232	80.5	1,268,528,969	80.5	-		-		-		-	80.5
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani	%	2.00	2	-	2	62,869,580	2	-		-		-		-	10
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2.00	2	970,072,959	2	407,637,743	2	-		-		-		-	10
			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan					-		-		5,277,300,487		7,706,780,213		7,755,783,314		7,823,339,776	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1.00	1.00	-	1.20	-	1.20	2,946,172,681	1.20	5,101,585,111	1.20	5,127,093,037	1.20	5,173,236,874	1.20
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1.00	1	-	2	-	2	411,792,530	2	771,876,680	2	778,051,693	2	781,163,900	10
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.00	80.00	-	80.50	-	80.50	1,397,810,661	80.50	897,386,647	80.50	908,155,287	80.50	922,685,771	80.50
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani	%	2.00	2	-	2	-	2	55,605,872	2	-	2	-	2	-	10
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	465,918,743	2.00	935,931,775	2.00	942,483,297	2.00	946,253,231	2.00
3	30		**Perdagangan**																
			Dinas Perdagangan					24,697,205,587		27,552,792,886		343,643,478		-		-		-	
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	75.00	75	10,947,305,289	80	13,495,248,889	85	343,643,478		-		-		-	95
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTJ/SIUP Toko	%	70.00	70	661,581,108	75	138,750,000	80	-		-		-		-	90

				Swalayan														
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	buah	0.60	60 %	348,879,079	65 %	100,740,988	70 %	-		-		-		-	80 %
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Kota Medan	%	3.34	3.34	8,524,508,502	3.25	9,085,403,468	3.2	-		-		-		-	3.34
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Kota Medan	US $	3153000.00	3,153,000	1,761,863,100	3,468,300	2,697,454,241	3,815,130	-		-		-		-	4,589,000
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	80.00	80	1,651,781,509	885	919,269,500	90	-		-		-		-	95
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan	%	24.00	24	801,287,000	24.5	1,115,925,800	25	-		-		-		-	26
			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					-		-		14,697,720,363		23,163,232,890		23,265,216,078		23,481,895,371	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	%	70.00	70.00	-	75.00	-	80.00	124,964,108	85.00	768,492,960	90.00	772,335,425	90.00	782,375,785	90.00
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	%	60.00	60.00	-	65.00	-	70.00	318,180,000	75.00	640,248,280	80.00	644,730,018	80.00	648,598,398	80.00
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat inflasi	%	2.00	2.00	-	6.00	-	3,00 - 4,50	9,814,095,404	2,25 - 3,40	8,018,842,650	2,00 - 3,40	8,050,918,021	1,80 - 3,10	8,131,427,201	1,80 - 3,10
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Kota Medan	US $	3153000.00	3,153,000	-	3,468,300	-	3,815,130	2,350,643,900	4,196,645	9,834,314,000	4,589,000	9,873,651,256	4,589,000	9,962,514,117	4,589,000
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	%	60.00	85.00	-	100.00	-	90.00	793,322,131	100.00	1,161,652,000	100.00	1,167,460,260	100.00	1,173,297,561	100.00
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan	%	24.00	24	-	24.5	-	25	1,296,514,820	25.5	2,739,683,000	26	2,756,121,098	26	2,783,682,309	26

3	31		**Perindustrian**																
			Dinas Perindustrian					12,894,878,615		14,485,017,436		256,734,018		-		-		-	
3	31	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70.00	72	9,844,384,715	75	10,812,650,101	77	256,734,018		-		-		-	85
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3.73	4.50	2,894,703,900	4.73	3,479,249,085	5.34	-		-		-		-	5.61
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	%	30.00	70	155,790,000	72	115,160,000	75	-		-		-		-	81
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	12.32	0	-	15	77,958,250	17	-		-		-		-	23
			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					-		-		3,966,660,479		3,598,777,043		3,613,006,000		3,631,651,715	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,5	-	4,73	-	5,34	3,795,228,804	5,50	3,312,724,913	5,57	3,322,663,088	5,61	3,339,276,403	5,61
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Kepatuhan Industri yang diawasi terhadap Regulasi	%	30.00	70.00	-	72.00	-	75.00	-	77.00	-	79.00	-	81.00	-	81.00
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	%	12,32	12,32	-	15.00	-	17.00	171,431,675	19.00	286,052,130	21.00	290,342,912	23.00	292,375,312	23.00
4			**UNSUR PENDUKUNG**																
4	1		**Sekretariat Daerah**																
			Bagian Pembangunan (SOTK LAMA)					377,250,000		-		-		-		-		-	
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	%	0.00	17	377,250,000	0	-	0	-		-		-		-	17
			Bagian Perekonomian					517,380,302		781,027,700		755,622,370		743,490,312		755,098,130		759,140,728	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	0	0	117,980,302	0	164,182,800	0	175,604,330	B (87)	144,013,172	A (89)	146,029,356	A (92)	147,635,679	A (92)

			TA																
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100	100	399,400,000	100	616,844,900	100	580,018,040	100	599,477,140	100	609,068,774	100	611,505,049	1oo
			Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah dan Lembaga (SOTK LAMA)					29,808,000		-		-		-		-		-	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	61.48	100	29,808,000	100	-	100	-		-		-		-	100
			Bagian Keagamaan (SOTK LAMA)					1,686,542,610		-		-		-		-		-	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100	7,884,250	0	-	0	-		-		-		-	100
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya kegiatan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100.00	100	1,678,658,360	0	-	0	-		-		-		-	100
			Bagian Pemerintahan (SOTK LAMA)					380,741,600		-		-		-		-		-	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintah,kewilayahan dan otonomi daerah	%	0.00	100	380,741,600	0	-	0	-		-		-		-	100
			Bagian Umum					77,498,913,400		91,155,653,956		115,692,420,800		109,523,857,492		110,526,892,743		111,539,128,517	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	100.00	100	77,498,913,400	100	91,155,653,956	100	115,692,420,800	100	109,523,857,492	100	110,526,892,743	100	111,539,128,517	100
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	100.00	100		100		100		100		100		100		100
			Bagian Hubungan Masyarakat (SOTK LAMA)					513,912,180		-		-		-		-		-	

4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1.00	1	513,912,180	1	-	1	-		-		-		-	1
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.00	0		100		100								100
			Bagian Hukum					1,829,915,894		2,345,976,377		2,730,436,865		3,158,324,605		3,177,709,411		3,203,889,271	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	53.00	53	64,444,644	55	235,218,777	57	366,048,740	59	262,357,505	61	264,366,508	63	267,239,625	63
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1,765,471,250	100	2,110,757,600	100	2,364,388,125	100	2,895,967,100	100	2,913,342,903	100	2,936,649,646	100
			Bagian Organisasi dan Tatalaksana (SOTK LAMA)					138,820,150		-		-		-		-		-	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	%	0.00	100	138,820,150	0	-	0	-		-		-		-	100
			Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan (SOTK LAMA)					3,119,469,937		-		-		-		-		-	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100.00	100	3,119,469,937	0	-	0	-		-		-		-	100
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100		0		0								100
			Bagian Sosial, Pendidikan (SOTK LAMA)					80,291,200		-		-		-		-		-	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	100.00	100	80,291,200	100	-	100	-		-		-		-	100

4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	50.00	50	-	60	-	70	-		-		-		-	100
			Bagian Kesejahteraan Rakyat					1,925,303,782		3,679,664,325		6,818,032,169		7,729,815,437		7,758,276,673		7,837,095,471	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	a	a	179,141,122	a	267,623,450	a	404,000,966	a	405,522,267	a	412,010,623	a	417,366,761	a
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	1,746,162,660	100	3,412,040,875	100	6,414,031,203	100	7,324,293,170	100	7,346,266,050	100	7,419,728,710	100
			Bagian Administrasi Pembangunan					1,146,977,550		2,057,447,100		1,701,978,562		1,907,489,123		1,919,212,673		1,936,403,105	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	0	0	373,917,550	0	995,889,100	0	936,457,640	B (87)	707,272,655	A (89)	709,394,473	A (92)	719,325,996	A (92)
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	0.00	0	-	100	115,663,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100.00	100	773,060,000	0	945,895,000	0	765,520,922	0	1,200,216,468	0	1,209,818,200	0	1,217,077,109	100
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat inflasi	%	0.00	100		100		100		100		100		100		100
			Bagian Kerja Sama					1,270,336,532		2,534,805,259		2,289,538,527		2,522,730,646		2,546,183,699		2,559,869,945	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	0	0	357,038,900	0	755,997,159	0	888,104,902	B (87)	748,477,104	A (89)	755,961,875	A (92)	764,277,456	A (92)
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	0	913,297,632	0	1,778,808,100	100	1,401,433,625	100	1,774,253,542	100	1,790,221,824	100	1,795,592,489	100
			Bagian Tata Pemerintahan					2,294,380,400		5,381,205,473		9,130,326,648		9,997,750,004		10,051,051,284		10,135,392,751	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG	Nilai LAKIP Sekretariat	Nilai	100.00	100	1,095,968,050	100	218,767,000	100	1,720,941,648	100	1,218,654,852	100	1,236,839,751	100	1,259,481,738	100

			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Daerah															
4	1	1		Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	53.00	55		57		59		61		63		65		65
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	1,198,412,350	68 (B)	5,162,438,473	70 (B)	7,409,385,000	75 (BB)	8,779,095,152	80 (A)	8,814,211,533	81 (A)	8,875,911,013	81 (A)
			Bagian Organisasi					1,144,018,050		1,966,898,757		2,536,780,836		2,066,384,829		2,072,583,983		2,076,729,151	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	Cc	Cc	1,144,018,050	B	1,966,898,757	Bb	2,536,780,836	Bb	2,066,384,829	Bb	2,072,583,983	A	2,076,729,151	Bb
			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					4,085,421,720		5,594,626,380		4,867,992,596		5,222,302,530		5,260,637,483		5,300,922,630	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	1.00	1	2,966,466,720	1	3,571,989,590	1	2,160,472,596	1	1,147,822,530	1	1,153,561,643	1	1,165,097,259	6
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100.00	100	-	100	153,955,000	100	-	100	-	100	-	100	-	600
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Poin	100	29	1,118,955,000	74	1,868,681,790	100	2,707,520,000	100	4,074,480,000	100	4,107,075,840	100	4,135,825,371	100
			Bagian Sumber Daya Alam					274,599,322		982,913,612		1,220,537,407		1,052,188,301		1,063,521,589		1,069,604,448	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	100.00	100	222,249,322	100	761,333,612	100	718,948,263	100	358,582,765	100	365,754,420	100	369,046,210	100
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	%	100	100	52,350,000	100	221,580,000	100	501,589,144	100	693,605,536	100	697,767,169	100	700,558,238	100
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					1,781,343,532		6,180,642,410		8,505,457,195		8,013,500,714		8,037,541,216		8,109,879,087	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	1.00	1	1,781,343,532	1	6,180,642,410	1	8,505,457,195	1	8,013,500,714	1	8,037,541,216	1	8,109,879,087	1
4	1	1		Persentase informasi tentang kegiatan KDH yang dipublikasikan	%	100.00	100		100		100		100		100		100		100
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kerja sama dalam/ luar negeri	%	1.00	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1

			Bagian Perencanaan dan Keuangan					21,398,435,985		40,185,514,929		46,907,809,924		49,919,597,902		50,052,257,240		50,248,683,847	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	21,398,435,985	100	40,185,514,929	100	46,907,809,924	100	49,919,597,902	100	50,052,257,240	100	50,248,683,847	100
4	2		**Sekretariat DPRD**																
			Sekretariat DPRD					158,771,832,514		218,096,633,019		261,054,928,515		261,360,927,658		263,411,676,664		264,992,146,725	
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62.00	68.00	98,990,861,832	70.45	96,960,058,005	72.00	107,267,425,568	74.00	110,611,256,321	77.00	111,606,757,628	81.00	112,276,398,174	81.00
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	2,7	2.80	59,780,970,682	3.01	121,136,575,014	3.03	153,787,502,947	3.05	150,749,671,337	3.07	151,804,919,036	3.10	152,715,748,551	3.10
5			**UNSUR PENUNJANG**																
5	1		**Perencanaan**																
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					16,386,573,629		25,010,610,858		27,851,048,309		27,139,209,453		27,253,673,679		27,466,673,522	
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	9,525,299,279	B	13,630,689,798	B	16,613,055,158	B	18,399,944,425	B	18,473,544,203	B	18,639,806,101	B
5	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75		75		78		78		80		82		82
5	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	22.00	22	2,853,300,000	23	3,961,552,000	24	4,718,717,050	25	5,785,570,800	26	5,808,713,083	27	5,843,565,362	27
5	1	2		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	15.00	15		16		17		18		19		20		20
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	90.00	90	4,007,974,350	92	7,418,369,060	92	6,519,276,101	96	2,953,694,228	98	2,971,416,393	100	2,983,302,059	100
5	1	3		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80.00	80		81		81		83		84		85		85

5	1	3		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90.00	90		92		94		96		98		100		100
5	2		**Keuangan**																
			Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan (SOTK LAMA)					24,450,000											
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100.00	100	24,450,000											
5	2	1		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia															
			Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah					119,946,263,514		165,129,294,429		1,206,034,384		-		-		-	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	95,872,704,358	100	157,240,069,979	100	1,206,034,384		-		-		-	100
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	%	77.96	79.83	24,073,559,156	82.15	7,889,224,450	82.15	-		-		-		-	82.15
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					116,434,732,699		58,682,940,519		268,678,381		-		-		-	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	1.00	100%	12,949,721,810	100%	22,248,621,270	100%	268,678,381		-		-		-	100%
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	TEPAT WAKTU	EPAT WAKT	101,584,404,907	EPAT WAKT	30,090,658,032	EPAT WAKT	-		-		-		-	TEPAT WAKTU
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD	%	0.00	100	1,900,605,982	100	6,343,661,217	100	-		-		-		-	100
			Badan Pendapatan Daerah					-		-		209,186,503,125		238,066,379,580		238,649,888,256		239,208,525,289	

5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100.00	100	-	100	-	100	198,342,420,273	100	224,644,390,019	100	225,093,678,799	100	225,543,866,157	100
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah wajib pajak yang bertambah	orang	516.46	516.46	-	522.257	-	528.23	10,844,082,852	533.512	13,421,989,561	538847	13,556,209,457	544235	13,664,659,132	544235
5	2	4		Jumlah objek pajak yang bertambah	Objek Pajak	15087	15087		20213		23175		24333		25549		26826		26826
			Badan Keuangan dan Aset Daerah					-		-		115,075,036,596		111,537,293,769		112,433,003,859		113,178,765,919	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	-	B	-	B	28,702,118,139	B	27,031,388,582	B	27,166,545,525	A	27,220,878,616	A
5	2	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75		85		90		95		100		100		100
5	2	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90	85		90		90		95		95		100		100
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi APBD	%	80,65	79	-	80,65	-	95	78,220,229,807	95	75,291,531,537	95	75,969,155,321	95	76,576,908,563	95
5	2	2		Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu
5	2	2		Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Sertifikat	903.00	52.00	-	215.00	-	277.00	8,152,688,650	500.00	9,214,373,650	200.00	9,297,303,013	376.00	9,380,978,740	1779.00
5	3		**Kepegawaian**																
			Bagian Administrasi Pembangunan					102,970,000											
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program kepegawaian daerah yang menunjang kompetensi ASN	%	100.00	100	102,970,000											100
			Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					21,148,140,436		22,929,254,886		308,415,136		-		-		-	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang tersusun	Dokumen	0.00	4	15,749,915,300	3	15,578,173,786	3	308,415,136		-		-		-	20

			TA															
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase prasarana dan sarana kantor yang tersedia dan berfungsi	%	0.00	91		92		93							96
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Aplikasi	4.00	4	5,398,225,136	4	7,351,081,100	4	-		-		-		-	4
5	3	2		Jumlah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur	buah	0.00	10		12		12								70
5	3	2		Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0.00	621		588		597								3633
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					-		-		24,906,484,125		27,520,806,946		27,634,519,212		27,866,421,385	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100	-	100	-	100	17,591,516,529	100	20,186,975,414	100	20,227,349,365	100	20,429,622,858	100
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	7,314,967,596	100.00	7,333,831,532	100.00	7,407,169,847	100.00	7,436,798,527	100.00
5	4		**Pendidikan dan Pelatihan**																
			Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					1,514,870,841		4,557,559,898		-		-		-		-	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0.00	703	1,514,870,841	828	4,557,559,898	870	-		-		-		-	5241
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					-		-		4,165,002,960		3,140,471,200		3,171,875,912		3,184,563,416	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	4,165,002,960	100.00	3,140,471,200	100.00	3,171,875,912	100.00	3,184,563,416	100.00

5	5		**Penelitian dan Pengembangan**																
			Badan Penelitian dan Pengembangan					6,912,836,065		9,179,100,436		128,711,613		-		-		-	
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100	5,115,665,565	100	6,047,940,143	100	128,711,613		-		-		-	100
5	5	1		Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0.00	0		0		30								120
5	5	1		Persentase Pegawai yang disiplin Dalam Berpakaian	%	100.00	100		100		100								100
5	5	1		Persentase pelaksanaan Fungsi- fungsi Penatausahaan Kantor	%	100.00	100		100		100								100
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0.00	0	1,797,170,500	77	3,131,160,293	79	-		-		-		-	85
5	5	2		Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	1.00	1		1		1								5
5	5	2		Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	3.00	3		3		3								15
			Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan					-		-		11,309,434,483		12,808,036,760		12,843,865,775		12,925,971,979	
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	77 (B)	77 (B)	-	77 (B)	-	77 (B)	7,716,370,983	80 (B)	10,212,941,660	85 (B)	10,243,580,485	89 (A)	10,315,285,548	89 (A)
5	5	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
5	5	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah	Inovasi	21.00	21	-	13	-	21	3,593,063,500	45	2,595,095,100	60	2,600,285,290	70	2,610,686,431	70
5	5	2		Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Rekomendasi	5.00	5		8		8		6		11		12		12
6			**UNSUR PENGAWASAN**																
6	1		**Inspektorat**																
			Inspektorat					22,299,734,456		26,416,286,692		29,324,370,950		32,741,899,697		32,886,383,806		32,968,629,128	

6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	70.00	71,86	15,792,803,456	90,7	19,980,949,892	92.00	25,851,410,618	92.00	27,761,864,173	92.00	27,872,911,630	92.00	27,928,657,453	92.00
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Persen	60.00	67,41	5,653,423,200	87,5	5,351,848,750	90.00	2,366,234,424	90.00	3,556,438,756	90.00	3,581,333,827	90.00	3,599,240,496	90.00
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Persen	35.00	38,20	853,507,800	89,5	1,083,488,050	90.00	1,106,725,908	90.00	1,423,596,768	90.00	1,432,138,349	90.00	1,440,731,179	90.00
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	1		**Kecamatan**																
			Kecamatan Medan Belawan					15,582,100,931		21,541,010,659		23,327,319,841		25,279,069,453		25,461,723,894		25,660,137,783	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	7,665,994,635	80	9,181,827,284	85	11,699,456,894	90	11,433,420,523	95	11,502,021,046	100	11,617,041,257	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	N/A	70	7,497,418,996	80	9,687,834,935	85	10,118,028,180	90	12,114,341,610	95	12,211,256,343	100	12,284,523,881	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	6.00	6	85,944,300	6	46,252,200	6	58,928,168	6	241,730,621	6	246,565,233	6	247,798,060	6
7	1	3		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70		80		85		90		95		100		100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	N/A	70	145,879,000	80	2,341,841,240	85	1,219,599,679	90	1,214,172,469	95	1,225,100,021	100	1,231,225,521	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	N/A	70	186,864,000	80	283,255,000	85	231,306,920	90	275,404,230	95	276,781,251	100	279,549,064	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan Konflik di Kota Medan yang ditindaklanjuti	%	0.00	0	-	0	-	0	-	95	-	95	-	95	-	95
			Kelurahan Bagan Deli					510,591,769		1,672,271,801		1,135,441,827		1,173,186,318		1,182,272,150		1,188,283,896	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	110,332,658	90	99,886,318	95	100,385,750	100	100,988,064	100

			TA																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	510,591,769	80	1,672,271,801	85	1,025,109,169	90	1,073,300,000	95	1,081,886,400	100	1,087,295,832	100
			Kelurahan Belawan - I					1,302,156,371		842,610,284		1,151,416,227		1,150,179,459		1,157,678,613		1,161,958,653	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	103,427,122	90	99,679,459	95	100,875,613	100	101,985,244	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	1,302,156,371	80	842,610,284	85	1,047,989,105	90	1,050,500,000	95	1,056,803,000	100	1,059,973,409	100
			Kelurahan Belawan - II					939,376,929		1,691,790,173		1,161,981,519		1,137,829,521		1,142,286,666		1,145,392,713	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	117,082,508	90	115,961,821	95	117,353,363	100	118,409,543	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	939,376,929	80	1,691,790,173	85	1,044,899,011	90	1,021,867,700	95	1,024,933,303	100	1,026,983,170	100
			Kelurahan Belawan Bahagia					1,175,085,525		1,151,804,237		975,827,991		1,175,943,525		1,182,024,266		1,189,318,842	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	99,885,584	90	100,511,525	95	101,215,106	100	102,024,827	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	1,175,085,525	80	1,151,804,237	85	875,942,407	90	1,075,432,000	95	1,080,809,160	100	1,087,294,015	100
			Kelurahan Belawan Bahari					921,788,603		1,293,064,423		1,166,783,618		1,171,279,718		1,175,073,160		1,182,001,451	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	116,078,620	90	103,634,418	95	105,292,569	100	106,871,957	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	921,788,603	80	1,293,064,423	85	1,050,704,998	90	1,067,645,300	95	1,069,780,591	100	1,075,129,494	100
			Kelurahan Belawan Sicanang					1,381,116,830		2,248,068,557		1,183,574,497		1,171,824,938		1,181,325,423		1,189,788,023	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	-	80	-	85	103,796,974	90	101,519,997	95	103,528,347	100	105,524,165	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	1,381,116,830	80	2,248,068,557	85	1,079,777,523	90	1,070,304,941	95	1,077,797,076	100	1,084,263,858	100
			Kecamatan Medan Labuhan					14,777,527,528		18,599,378,116		20,779,776,774		22,486,764,048		22,644,225,806		22,868,828,635	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	8,885,590,939	B (79,30)	10,296,455,146	B	12,103,817,052	B	11,549,633,480	B	11,595,832,014	B	11,700,194,502	B
7	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	72	73		74		75		78		80		85		85
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70.00	70.00	5,549,537,589	76.00	7,737,977,970	82.00	7,938,201,172	88.00	9,852,824,122	95.00	9,951,352,363	100.00	10,050,865,887	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70.00	40,800,000	76.00	28,950,000	82.00	46,340,400	88.00	207,615,200	95.00	209,276,122	100.00	213,461,644	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70.00	70.00	104,874,000	76.00	376,945,000	82.00	542,340,678	88.00	599,807,862	95.00	607,005,556	100.00	617,931,656	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	70	196,725,000	76	159,050,000	82	149,077,472	88	-	94	-	100	-	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	88.00	88.00	-	88.00	-	88.00	-	88.00	276,883,384	95.00	280,759,751	100.00	286,374,946	100.00
			Kelurahan Besar					1,203,398,810		1,090,159,174		465,799,571		649,599,994		660,542,394		664,290,064	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	0	99,999,847	0	99,999,994	0	100,499,994	0	102,007,494	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1,203,398,810	76	1,090,159,174	82	365,799,724	88	549,600,000	95	560,042,400	100	562,282,570	100

			KELURAHAN																
			Kelurahan Martubung					1,319,986,340		1,031,499,302		567,507,784		749,546,743		756,842,218		767,538,805	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	-	NA	-	75	99,998,169	78	99,995,896	80	100,795,863	85	102,307,801	85
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1,319,986,340	76	1,031,499,302	82	467,509,615	88	649,550,847	95	656,046,355	100	665,231,004	100
			Kelurahan Nelayan Indah					1,125,193,528		993,178,160		573,389,633		749,556,326		753,204,990		763,791,167	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	-	NA	-	75	99,999,032	78	99,999,642	80	101,699,636	85	102,513,233	85
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1,125,193,528	76	993,178,160	82	473,390,601	88	649,556,684	95	651,505,354	100	661,277,934	100
			Kelurahan Pekan Labuhan					1,014,782,903		909,933,306		565,798,027		749,599,128		754,296,721		759,879,197	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	NA	NA	-	NA	-	100	99,998,557	100	99,999,424	100	100,799,419	100	101,807,414	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1,014,782,903	76	909,933,306	82	465,799,470	88	649,599,704	95	653,497,302	100	658,071,783	100
			Kelurahan Sei Mati					655,286,453		966,569,654		573,397,933		749,573,230		1,437,078,503		1,443,622,059	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	NA	NA	-	NA	-	100	99,998,766	100	99,996,830	100	201,896,801	100	203,410,976	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	655,286,453	76	966,569,654	82	473,399,167	88	649,576,400	95	1,235,181,702	100	1,240,211,083	100
			Kelurahan Tangkahan					1,269,906,847		980,610,844		569,599,678		749,598,624		754,196,998		760,842,566	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	NA	NA	-	NA	-	75	99,999,678	78	99,998,680	80	101,998,654	85	103,426,635	85

7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	1,269,906,847	76	980,610,844	82	469,600,000	88	649,599,944	95	652,198,344	100	657,415,931	100
			Kecamatan Medan Kota					24,878,790,678		38,070,490,530		43,135,934,276		45,432,661,817		45,815,125,303		46,163,452,522	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	79.00	79.00	15,493,976,880	79.00	19,881,186,830	79.00	24,454,577,596	82.00	22,222,087,845	85.00	22,437,754,685	88.00	22,576,333,299	88.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75.00	75.00	8,907,165,247	80.00	17,510,876,300	85.00	17,559,942,680	90.00	22,101,699,972	95.00	22,256,411,872	100.00	22,456,719,579	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	80.00	80.00	-	80.00	-	85.00	100,344,000	90.00	178,704,000	95.00	181,563,264	100.00	182,834,207	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	186,848,551	100.00	426,827,400	100.00	744,043,000	100.00	678,573,000	100.00	686,037,303	100.00	690,153,527	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	65.00	65	290,800,000	70	251,600,000	75	277,027,000	80	-	85	-	90	-	70
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	251,597,000	100.00	253,358,179	100.00	257,411,910	100.00
			Kelurahan Kotamatsum – III					906,702,614		606,708,293		455,200,000		639,520,000		645,854,720		648,695,884	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	79	100,000,000	82	100,000,000	85	100,400,000	88	101,604,800	88
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	906,702,614	0	606,708,293	100	355,200,000	100	539,520,000	100	545,454,720	100	547,091,084	100
			Kelurahan Mesjid					450,739,571		545,469,041		455,200,000		639,520,000		645,975,680		658,350,818	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,600,000	0	103,632,000	88
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	450,739,571	0	545,469,041	100	355,200,000	100	539,520,000	100	544,375,680	100	554,718,818	100

			DESA DAN KELURAHAN																
			Kelurahan Pandau Hulu – I					1,090,385,738		568,763,840		455,200,000		639,520,000		644,436,160		655,492,175	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,600,000	0	102,410,800	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,090,385,738	0	568,763,840	100	355,200,000	100	539,520,000	100	543,836,160	100	553,081,375	100
			Kelurahan Pasar Baru					634,319,901		604,575,366		468,340,000		646,390,000		653,053,900		657,726,477	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,200,000	0	102,009,600	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	634,319,901	0	604,575,366	100	368,340,000	100	546,390,000	100	551,853,900	100	555,716,877	100
			Kelurahan Pasar Merah Barat					379,871,966		507,166,853		463,420,000		644,100,000		654,261,500		658,204,546	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	102,000,000	0	103,734,000	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	379,871,966	0	507,166,853	100	363,420,000	100	544,100,000	100	552,261,500	100	554,470,546	100
			Kelurahan Pusat Pasar					502,403,446		659,247,548		455,200,000		641,810,000		647,544,480		653,130,436	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,400,000	0	102,616,800	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	502,403,446	0	659,247,548	100	355,200,000	100	541,810,000	100	546,144,480	100	550,513,636	100
			Kelurahan Sei Rengas – I					962,412,085		753,380,696		455,200,000		653,275,036		664,380,712		670,102,557	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,700,000	0	102,920,400	0

7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	962,412,085	0	753,380,696	100	355,200,000	100	553,275,036	100	562,680,712	100	567,182,157	100
			Kelurahan Sitirejo - I					1,124,349,306		583,113,436		458,020,000		647,320,000		659,419,080		665,557,252	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,700,000	0	102,818,700	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,124,349,306	0	583,113,436	100	358,020,000	0100	547,320,000	100	557,719,080	100	562,738,552	100
			Kelurahan Sudirejo – I					529,583,206		570,600,162		455,200,000		639,520,000		642,038,560		652,613,877	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,900,000	0	102,817,100	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	529,583,206	0	570,600,162	100	355,200,000	100	539,520,000	100	541,138,560	100	549,796,777	100
			Kelurahan Sudirejo – II					844,553,566		598,363,172		468,420,000		649,600,000		661,842,400		671,871,836	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,800,000	0	103,428,800	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	844,553,566	0	598,363,172	100	368,420,000	100	549,600,000	100	560,042,400	100	568,443,036	100
			Kelurahan Teladan Barat					1,123,652,496		598,176,267		465,520,000		652,290,000		661,974,350		667,884,294	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	101,400,000	0	101,704,200	0
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0		0		0		0		0		0		0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,123,652,496	0	598,176,267	100	365,520,000	100	552,290,000	100	560,574,350	100	566,180,094	100

			Kelurahan Teladan Timur					827,732,201		1,514,223,954		455,200,000		639,520,000		649,591,840		660,937,601	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	0	0	-	0	-	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,900,000	0	102,918,000	0
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	827,732,201	0	1,514,223,954	100	355,200,000	100	539,520,000	100	548,691,840	100	558,019,601	100
			Kecamatan Medan Timur					21,164,397,602		34,329,156,903		38,864,959,302		40,269,573,672		40,497,636,942		40,635,254,769	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	13,177,525,043	80	15,672,169,695	85	19,069,901,203	90	19,050,497,023	95	19,183,850,502	100	19,241,402,054	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70.00	75.00	7,580,353,059	80.00	17,956,445,908	85.00	18,246,164,800	90.00	19,785,358,689	95.00	19,864,500,124	100.00	19,924,093,624	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	75.00	11,132,000	80.00	26,815,800	85.00	47,015,411	90.00	245,855,528	95.00	247,576,517	100.00	249,309,552	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	75.00	-	80.00	-	85.00	63,656,000	90.00	350,733,815	95.00	357,047,024	100.00	363,116,823	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70.00	75.00	173,010,500	80.00	414,891,500	85.00	1,052,066,567	90.00	837,128,617	95.00	844,662,775	100.00	857,332,716	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75	222,377,000	80	258,834,000	85	386,155,321	90	-	95	-	100	-	100
			Kelurahan Gang Buntu					1,353,076,226		423,288,900		461,132,500		656,855,180		660,582,585		663,630,910	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	99,998,628	95	101,498,607	100	102,310,596	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,353,076,226	80	423,288,900	85	361,132,500	90	556,856,552	95	559,083,978	100	561,320,314	100
			Kelurahan Sidodadi					1,051,638,016		660,258,025		461,208,000		637,035,849		648,337,464		653,279,559	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	80,206,607	95	80,928,466	100	82,466,107	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,051,638,016	80	660,258,025	85	361,208,000	90	556,829,242	95	567,408,998	100	570,813,452	100
			Kelurahan Durian					854,633,060		1,124,678,440		461,005,957		656,155,917		667,888,868		673,662,918	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,952,585	90	99,297,670	95	99,893,456	100	101,691,538	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	854,633,060	80	1,124,678,440	85	361,053,372	90	556,858,247	95	567,995,412	100	571,971,380	100
			Kelurahan Gaharu					1,021,072,117		400,046,175		461,210,157		656,972,812		660,614,649		670,122,669	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,300,000	100	101,403,300	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,021,072,117	80	400,046,175	85	361,210,157	90	556,972,812	95	560,314,649	100	568,719,369	100
			Kelurahan Glugur Darat - I					1,381,360,746		423,844,755		452,946,840		636,808,364		649,356,009		658,351,035	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	91,738,840	90	94,261,100	95	95,957,800	100	97,205,251	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,381,360,746	80	423,844,755	85	361,208,000	90	542,547,264	95	553,398,209	100	561,145,784	100
			Kelurahan Glugur Darat - II					1,078,221,493		387,953,059		456,893,503		656,968,000		660,338,904		664,860,999	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,810	90	100,000,000	95	101,700,000	100	103,428,900	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,078,221,493	80	387,953,059	85	356,893,693	90	556,968,000	95	558,638,904	100	561,432,099	100

			Kelurahan Pulo Brayan Darat - I					653,185,912		1,312,893,644		459,680,000		639,257,111		643,644,328		648,592,354	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	91,360,000	90	91,311,730	95	91,768,289	100	92,318,898	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	653,185,912	80	1,312,893,644	85	359,680,000	90	539,305,381	95	543,080,519	100	547,425,163	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75.00	75	-	80	-	85	8,640,000	90	8,640,000	95	8,795,520	100	8,848,293	100
			Kelurahan Pulo Brayan Darat - II					1,512,777,481		1,222,982,233		461,149,900		640,683,218		648,105,564		656,978,012	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,942,900	90	88,617,665	95	89,415,224	100	91,024,698	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,512,777,481	80	1,222,982,233	85	361,207,000	90	552,065,553	95	558,690,340	100	565,953,314	100
			Kelurahan P.Brayan Bengkel					1,172,059,865		501,592,342		461,183,698		655,615,752		658,795,209		665,086,110	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,989,130	90	98,622,173	95	99,016,662	100	99,709,778	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	1,172,059,865	80	501,592,342	85	361,194,568	90	556,993,579	95	559,778,547	100	565,376,332	100
			Kelurahan P.Brayan Bengkel Baru					928,550,976		840,070,010		465,134,667		656,960,445		663,130,073		675,185,546	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,047,565	90	99,994,100	95	100,594,065	100	101,398,817	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	928,550,976	80	840,070,010	85	365,087,102	90	556,966,345	95	562,536,008	100	573,786,729	100
			Kelurahan Perintis					758,992,764		590,400,190		461,210,000		656,980,166		666,634,868		672,735,882	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	101,300,000	100	102,313,000	100

			KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah															
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	758,992,764	80	590,400,190	85	361,210,000	90	556,980,166	95	565,334,868	100	570,422,882	100
			Kecamatan Medan Helvetia					17,194,188,452		26,489,586,340		31,495,023,660		33,678,353,679		33,917,703,065		34,135,918,862	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	11,535,673,031	B (79,30)	14,730,366,010	77 (B)	18,484,728,400	80 (B)	16,964,573,446	83 (B)	17,100,290,034	87 (B)	17,202,891,774	87 (B)
7	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85		85		85		90		95		100		100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70.00	70.00	5,327,178,421	75.00	11,166,912,830	80.00	11,571,261,020	85.00	15,183,596,893	90.00	15,274,698,474	100.00	15,381,621,364	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70.00	37,800,000	84,52	59,990,000	85.00	83,557,460	90.00	121,777,460	95.00	123,238,790	100.00	125,457,088	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	60.00	37,5	106,270,000	70.00	373,917,500	80.00	1,182,996,780	90.00	1,211,045,880	95.00	1,220,734,247	100.00	1,225,617,184	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	70	187,267,000	80	158,400,000	85	172,480,000	90	-	95	-	100	-	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	90.00	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	197,360,000	95.00	198,741,520	100.00	200,331,452	100.00
			Kelurahan Cinta Damai					900,148,591		1,296,566,885		473,119,779		647,679,683		657,194,879		659,924,958	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,988	90	99,999,899	95	101,299,898	100	101,806,397	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	900,148,591	80	1,296,566,885	85	373,119,791	90	547,679,784	95	555,894,981	100	558,118,561	100
			Kelurahan Dwikora					692,138,019		1,108,346,547		473,119,097		646,031,157		651,699,405		660,721,896	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,787	90	99,999,589	95	101,299,584	100	102,616,478	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	692,138,019	80	1,108,346,547	85	373,119,310	90	546,031,568	95	550,399,821	100	558,105,418	100
			Kelurahan Helvetia					1,067,725,611		560,097,168		473,118,987		647,679,461		654,256,229		663,814,664	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,217	90	99,974,316	95	101,074,033	100	101,781,552	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	1,067,725,611	80	560,097,168	85	373,119,770	90	547,705,145	95	553,182,196	100	562,033,112	100
			Kelurahan Helvetia Timur					1,000,024,038		579,368,883		472,928,109		660,543,841		671,573,138		678,250,126	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,813,012	90	99,974,138	95	101,473,750	100	101,879,645	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	1,000,024,038	80	579,368,883	85	373,115,097	90	560,569,703	95	570,099,388	100	576,370,481	100
			Kelurahan Helvetia Tengah					901,119,938		1,299,432,466		455,176,195		647,566,829		652,004,662		655,222,880	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,995	90	99,999,893	95	101,699,891	100	102,716,890	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	901,119,938	80	1,299,432,466	85	355,176,200	90	547,566,936	95	550,304,771	100	552,505,990	100
			Kelurahan Sei Sikambing – C II					933,058,732		581,523,477		472,983,367		647,543,129		654,765,963		659,353,542	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,864,811	90	99,859,312	95	101,057,624	100	102,876,661	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	933,058,732	80	581,523,477	85	373,118,556	90	547,683,817	95	553,708,339	100	556,476,881	100

			Kelurahan Tanjung Gusta					785,467,680		1,090,069,602		473,119,218		660,759,994		668,228,353		673,655,922	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,908	90	99,999,874	95	101,299,872	100	103,325,870	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70	785,467,680	80	1,090,069,602	85	373,119,310	90	560,760,120	95	566,928,481	100	570,330,052	100
			Kecamatan Medan Marelan					12,595,100,536		16,931,424,230		19,953,322,414		20,731,721,360		20,924,704,652		21,088,829,256	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	7,444,973,817	B (79,30)	8,686,292,235	B (79,30)	10,020,255,757	B (82)	10,595,252,010	B (85)	10,680,742,486	B (88)	10,734,703,470	B (88)
7	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85		85		85		90		95		100		100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	4,737,174,774	100.00	7,771,862,555	79,30	8,596,094,738	100.00	9,045,736,547	100.00	9,136,193,912	100.00	9,227,555,852	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	128,026,145	89.00	134,170,440	93,75	203,041,350	100.00	218,291,110	100.00	220,255,730	100.00	223,779,822	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	30,10	144,625,300	100.00	194,597,400	100.00	988,551,361	100.00	752,780,693	100.00	765,577,965	100.00	780,123,946	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0.00	75	140,300,500	80	144,501,600	85	145,379,208	90	-	95	-	100	-	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	119,661,000	100.00	121,934,559	100.00	122,666,166	100.00
			Kelurahan Labuhan Deli					1,076,810,780		564,558,858		459,859,943		646,239,956		651,862,106		657,094,839	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0	0	-	0	-	85	100,137,966	90	99,860,956	95	101,658,453	100	103,589,964	100

7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	1,076,810,780	89	564,558,858	93,75	359,721,977	100	546,379,000	100	550,203,653	100	553,504,875	100
			Kelurahan Paya Pasir					451,696,539		956,842,167		690,873,767		889,496,303		903,028,291		909,248,595	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0	0	-	0	-	85	99,997,847	90	99,993,303	95	100,893,243	100	101,498,602	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	0	451,696,539	0	956,842,167	0	590,875,920	0	789,503,000	0	802,135,048	0	807,749,993	0
			Kelurahan Rengas Pulau					485,369,894		1,171,030,027		693,599,415		889,515,973		905,542,097		921,570,390	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0	0	-	0	-	85	100,004,827	90	99,999,973	95	101,025,293	100	101,767,767	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	0	485,369,894	0	1,171,030,027	0	593,594,588	0	789,516,000	0	804,516,804	0	819,802,623	0
			Kelurahan Tanah Enam Ratus					820,641,290		550,282,184		460,548,980		651,759,055		656,505,967		665,653,661	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,890	90	99,976,555	95	101,412,772	100	102,234,068	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	0	820,641,290	0	550,282,184	0	360,549,090	0	551,782,500	0	555,093,195	0	563,419,593	0
			Kelurahan Terjun					719,930,142		996,451,594		456,812,156		646,175,965		655,779,759		658,540,767	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	0	0	-	0	-	85	99,892,256	90	99,967,465	95	101,378,131	100	102,475,935	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	719,930,142	89	996,451,594	93,75	356,919,900	100	546,208,500	100	554,401,628	100	556,064,832	100
			Kecamatan Medan Denai					17,991,915,357		24,379,016,514		27,499,011,626		29,522,983,872		29,700,512,647		29,776,170,822	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan	%	0.00	80	12,065,921,426	90	14,285,049,394	90	14,057,734,311	100	14,731,635,026	100	14,849,488,106	100	14,879,187,082	100

			KABUPATEN/KOTA	perangkat daerah															
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	5,107,989,931	100	9,361,963,120	100	11,985,280,330	100	13,556,225,791	100	13,596,894,468	100	13,624,088,257	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	89,385,000	80	124,200,000	90	124,333,062	90	141,383,535	100	141,807,686	100	144,360,224	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0.00	80	-	80	-	90	-	90	149,424,830	100	150,919,078	100	153,786,541	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	0.00	15	391,885,000	15	445,324,000	15	1,053,642,623	15	887,424,020	15	904,285,076	15	916,945,067	90
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0.00	80		80		90		90		100		100		100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	NA	80	336,734,000	0	162,480,000	0	278,021,300	0	56,890,670	0	57,118,233	0	57,803,651	80
			Kelurahan Binjai					273,745,942		1,303,636,268		466,160,001		661,196,294		666,824,528		673,289,401	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	77,678,659	100	99,985,912	100	101,685,673	100	102,499,158	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	22,320,000	100	-	100	-	100	-	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	273,745,942	80	1,303,636,268	90	366,161,342	90	561,210,382	100	565,138,855	100	570,790,243	100
			Kelurahan Denai					264,282,903		1,150,719,255		477,125,559		650,799,558		656,672,967		667,115,026	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	91,769,253	100	99,998,411	100	101,465,411	100	102,468,941	100

7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	10,746,000	100	-	100	-	100	-	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	264,282,903	80	1,150,719,255	90	374,610,306	90	550,801,147	100	555,207,556	100	564,646,085	100
			Kelurahan Medan Tenggara					284,583,384		1,133,876,751		477,008,100		650,799,909		656,257,109		662,772,437	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	94,849,518	100	99,999,949	100	100,499,949	100	100,901,949	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	5,150,000	100	-	100	-	100	-	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	284,583,384	80	1,133,876,751	90	377,008,582	90	550,799,960	100	555,757,160	100	561,870,488	100
			Kelurahan Tegal Sari Mandala – I					255,615,475		1,195,511,672		624,619,611		800,799,653		807,705,247		813,767,182	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	95,007,855	100	99,999,727	100	101,999,722	100	103,121,718	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	4,992,000	100	-	100	-	100	-	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	255,615,475	80	1,195,511,672	90	524,619,756	90	700,799,926	100	705,705,525	100	710,645,464	100
			Kelurahan Tegal Sari Mandala – II					230,833,450		770,189,442		512,747,971		693,597,012		703,200,980		712,846,085	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	94,624,570	100	99,998,327	100	100,698,315	100	102,510,885	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	1,968,000	100	-	100	-	100	-	100

7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	230,833,450	80	770,189,442	90	416,155,401	90	593,598,685	100	602,502,665	100	610,335,200	100
			Kelurahan Tegal Sari Mandala –III					290,212,915		1,222,779,314		669,759,204		850,799,719		858,257,229		874,262,488	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0.00	80	-	90	-	90	94,323,756	100	99,843,804	100	100,542,711	100	102,151,394	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	100	-	100	-	100	5,676,000	100	-	100	-	100	-	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0.00	80	290,212,915	80	1,222,779,314	90	569,759,448	90	750,955,915	100	757,714,518	100	772,111,094	100
			Kecamatan Medan Area					24,471,235,492		35,213,838,966		41,322,561,623		39,956,473,412		40,136,174,071		40,346,960,160	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	14,032,282,224	80	17,834,335,558	85	23,139,576,421	90	21,124,511,172	95	21,187,884,706	100	21,336,199,898	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	9,918,585,268	100.00	16,775,415,408	100.00	16,816,453,040	100.00	17,672,101,140	100.00	17,778,133,747	100.00	17,831,468,148	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	15.00	-	81.00	-	100.00	359,112,324	100.00	310,784,390	100.00	315,135,371	100.00	318,286,725	600.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	31540 0000.0 0	153,605,000	233888 000.00	370,200,000	3383100 00.00	669,109,838	33831000 0.00	536,526,000	33831000 0.00	540,281,682	33831000 0.00	544,063,654	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75	366,763,000	80	233,888,000	85	338,310,000	90	-	95	-	100	-	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta penegakan Perda Perkada Kota Medan	Persen	100.00	99.00	-	98.00	-	100.00	-	100.00	312,550,710	100.00	314,738,565	100.00	316,941,735	600.00
			Kelurahan Kotamatsum – I					228,105,070		468,863,499		477,198,832		634,899,290		639,600,793		646,600,460	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,972	90	99,123,007	95	100,609,852	100	102,219,610	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	228,105,070	80	468,863,499	85	377,198,860	90	535,776,283	95	538,990,941	100	544,380,850	100
			Kelurahan Kotamatsum – II					546,654,780		609,078,508		477,179,078		639,025,260		649,121,411		657,269,671	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,818	90	95,909,709	95	96,772,896	100	97,740,625	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	546,654,780	80	609,078,508	85	377,179,260	90	543,115,551	95	552,348,515	100	559,529,046	100
			Kelurahan Kotamatsum – IV					132,579,050		367,063,138		473,656,709		648,413,098		657,209,516		660,324,358	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,457	90	103,308,724	95	103,928,576	100	105,383,576	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	132,579,050	80	367,063,138	85	373,657,252	90	545,104,374	95	553,280,940	100	554,940,782	100
			Kelurahan Pandau Hulu – II					260,081,450		543,320,445		477,199,634		647,488,641		658,490,946		660,868,812	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,932	90	99,998,437	95	100,598,428	100	101,302,617	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	260,081,450	80	543,320,445	85	377,199,702	90	547,490,204	95	557,892,518	100	559,566,195	100
			Kelurahan Pasar Merah Timur					431,272,680		1,088,172,518		477,194,248		699,486,520		711,378,394		718,083,616	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,731	90	99,840,520	95	100,938,766	100	102,150,031	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	431,272,680	80	1,088,172,518	85	377,194,517	90	599,646,000	95	610,439,628	100	615,933,585	100

			Kelurahan Sei Rengas Permata					235,579,965		602,342,738		477,185,801		647,603,134		651,936,377		655,497,528	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,806	90	99,989,459	95	100,489,406	100	101,293,322	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	235,579,965	80	602,342,738	85	377,185,995	90	547,613,675	95	551,446,971	100	554,204,206	100
			Kelurahan Sei Rengas – II					99,309,700		559,091,600		477,008,191		646,136,633		649,466,369		656,857,853	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,994,622	90	99,052,439	95	99,646,754	100	101,540,042	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	99,309,700	80	559,091,600	85	377,013,569	90	547,084,194	95	549,819,615	100	555,317,811	100
			Kelurahan Sukaramai – I					220,382,750		449,762,818		477,015,481		647,629,152		652,267,290		658,382,365	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,996,979	90	99,999,427	95	101,899,416	100	102,510,813	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	220,382,750	80	449,762,818	85	377,018,502	90	547,629,725	95	550,367,874	100	555,871,552	100
			Kelurahan Sukaramai – II					175,895,950		579,726,581		476,819,087		640,666,280		648,753,955		656,719,806	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,827	90	99,919,884	95	101,518,602	100	101,823,158	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	175,895,950	80	579,726,581	85	376,819,260	90	540,746,396	95	547,235,353	100	554,896,648	100
			Kelurahan Tegal Sari - I					179,275,050		982,066,895		476,475,512		642,017,016		652,742,692		656,098,646	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,279,823	90	92,292,264	95	93,122,894	100	94,240,369	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	179,275,050	80	982,066,895	85	377,195,689	90	549,724,752	95	559,619,798	100	561,858,277	100

			DESA DAN KELURAHAN																
			Kelurahan Tegal Sari – II					203,681,140		996,547,768		477,583,067		610,644,469		620,214,078		624,650,660	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,930	90	94,799,434	95	95,083,832	100	95,844,503	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	203,681,140	80	996,547,768	85	377,583,137	90	515,845,035	95	525,130,246	100	528,806,157	100
			Kelurahan Tegal Sari - III					369,897,550		951,132,334		477,119,622		604,123,188		614,188,890		625,144,960	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,014	90	99,932,741	95	101,931,396	100	103,154,573	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	369,897,550	80	951,132,334	85	377,120,608	90	504,190,447	95	512,257,494	100	521,990,387	100
			Kecamatan Medan Baru					14,144,209,314		21,232,563,492		26,591,294,832		25,554,371,864		25,726,466,073		25,883,911,698	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100.00	9,633,740,993	100.00	11,809,466,132	100.00	14,111,474,824	100.00	14,973,618,555	100.00	15,050,862,884	100.00	15,156,657,881	100.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	4,197,526,621	97.00	8,908,779,260	90.00	8,846,802,440	100.00	9,467,183,299	100.00	9,552,387,949	100.00	9,590,597,500	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	42,470,000	97.00	70,417,200	100.00	57,110,200	100.00	148,440,000	100.00	150,518,160	100.00	151,421,269	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	120,685,700	100.00	281,209,900	100.00	3,355,789,998	95.00	752,390,010	85.00	756,151,960	100.00	765,225,784	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat kecamatan	%	0.00	0	149,786,000	0	162,691,000	0	220,117,370	0	21,540,000	0	21,712,320	0	21,864,306	0
7	1	6		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di	Persen	100.00	100		100		100		100		100		100		100

				kecamatan															
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	90.00	-	100.00	-	100.00	191,200,000	100.00	194,832,800	100.00	198,144,958	100.00
			Kelurahan Babura					933,677,807		650,770,840		478,218,037		663,073,545		670,053,933		681,560,254	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	99,998,218	100	100,000,001	100	100,786,580	100	102,615,356	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	933,677,807	100	650,770,840	100	378,219,819	100	563,073,544	100	569,267,353	100	578,944,898	100
			Kelurahan Darat					511,345,434		379,250,803		478,194,556		663,094,264		673,729,965		680,437,496	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	100	99,975,170	100	99,999,734	100	100,499,733	100	100,901,732	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	511,345,434	100	379,250,803	100	378,219,386	100	563,094,530	100	573,230,232	100	579,535,764	100
			Kelurahan Merdeka					936,241,620		522,623,719		477,020,407		663,084,448		666,073,699		671,604,889	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	100	99,265,897	100	99,999,768	100	101,299,765	100	102,312,763	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	936,241,620	100	522,623,719	100	377,754,510	100	563,084,680	100	564,773,934	100	569,292,126	100
			Kelurahan Padang Bulan					585,658,774		285,464,215		374,139,546		563,098,826		568,329,815		577,855,553	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	100	99,999,900	100	99,999,792	100	100,599,791	100	101,706,388	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	585,658,774	100	285,464,215	100	274,139,646	100	463,099,034	100	467,730,024	100	476,149,165	100
			Kelurahan Petisah Hulu					454,053,967		372,574,925		478,163,198		663,049,878		667,628,177		673,576,402	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	100	99,999,855	100	99,999,938	100	101,199,937	100	102,616,736	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	454,053,967	100	372,574,925	100	378,163,343	100	563,049,940	100	566,428,240	100	570,959,666	100
			Kelurahan Titi Rante					650,028,945		285,950,520		374,135,934		563,076,185		566,854,641		573,331,185	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	100	99,996,332	100	99,999,710	100	100,999,707	100	102,817,702	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	650,028,945	100	285,950,520	100	274,139,602	100	463,076,475	100	465,854,934	100	470,513,483	100
			Kecamatan Medan Polonia					11,630,908,350		15,781,172,537		18,600,464,320		19,742,801,951		19,926,499,499		20,063,218,983	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100.00	100.00	8,008,924,027	100.00	8,649,179,102	100.00	10,995,315,113	100.00	10,597,728,993	100.00	10,693,108,554	100.00	10,778,653,422	100.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	12,700,000	100.00	3,411,604,080	100.00	6,933,395,855	100.00	8,428,592,988	100.00	8,504,450,325	100.00	8,546,972,577	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	67,461,700	100.00	61,115,600	100.00	112,496,784	100.00	51,397,120	100.00	52,425,062	100.00	53,054,163	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100.00	100.00	3,230,461,123	100.00	3,236,268,555	100.00	-	100.00	126,300,000	100.00	128,573,400	100.00	129,473,414	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	47.00	47.00	148,199,300	100.00	270,500,000	100.00	432,952,623	100.00	538,782,850	100.00	547,942,158	100.00	555,065,407	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	163,162,200	100.00	152,505,200	100.00	126,303,945	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
			Kelurahan Anggrung					357,349,078		495,924,911		475,494,248		699,972,110		708,171,798		718,895,364	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	100	-	100	99,975,571	100	99,988,758	100	100,988,646	100	102,604,464	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	357,349,078	100	495,924,911	100	375,518,677	100	599,983,352	100	607,183,152	100	616,290,900	100
			Kelurahan Madras Hulu					227,231,719		535,999,563		475,461,165		699,851,432		713,148,467		719,360,150	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	100	-	100	99,998,699	100	99,999,152	100	101,299,141	100	102,616,030	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	227,231,719	100	535,999,563	100	375,462,466	100	599,852,280	100	611,849,326	100	616,744,120	100
			Kelurahan Polonia					643,115,944		828,598,436		455,463,793		699,838,586		710,636,117		716,217,597	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	100	-	100	99,998,245	100	99,971,586	100	101,171,245	100	102,486,471	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	643,115,944	100	828,598,436	100	355,465,548	100	599,867,000	100	609,464,872	100	613,731,126	100
			Kelurahan Sari Rejo					699,652,460		1,135,365,304		374,516,155		599,685,285		609,597,619		619,653,209	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	100	-	100	99,999,967	100	94,105,285	100	95,422,759	100	95,709,027	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	699,652,460	100	1,135,365,304	100	274,516,188	100	505,580,000	100	514,174,860	100	523,944,182	100

			KELURAHAN																
			Kelurahan Sukadamai					331,902,005		437,363,260		475,407,008		695,171,213		700,737,410		710,851,934	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	100	-	100	99,945,856	100	99,999,868	100	101,399,866	100	103,123,664	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	331,902,005	100	437,363,260	100	375,461,152	100	595,171,345	100	599,337,544	100	607,728,270	100
			Kecamatan Medan Tembung					17,739,904,167		25,579,373,176		28,857,911,788		31,013,443,979		31,315,602,039		31,496,763,917	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	13,752,546,846	80	15,534,919,740	85	16,415,391,528	90	17,684,193,201	95	17,861,035,133	100	18,003,923,414	80
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75.00	75	3,719,167,321	80	9,536,773,936	85	11,401,424,190	90	12,339,436,650	95	12,450,491,580	100	12,475,392,563	80
7	1	2		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0.00	0		0		85		90		95		100		100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	80
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75.00	75	100,390,000	80	337,780,500	85	830,711,300	90	855,214,128	95	867,187,126	100	879,327,746	80
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75	167,800,000	80	169,899,000	85	210,384,770	90	-	95	-	100	-	80
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0.00	0	-	0	-	0	-	90	134,600,000	90	136,888,200	90	138,120,194	90
			Kelurahan Bandar Selamat					871,522,581		1,783,778,285		453,016,242		653,389,950		662,690,800		671,980,853	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,412,406	90	99,999,950	95	100,999,950	100	101,302,949	80

			TA																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	871,522,581	80	1,783,778,285	85	352,603,836	90	553,390,000	95	561,690,850	100	570,677,904	80
			Kelurahan Bantan					958,217,184		562,777,701		454,701,231		631,904,446		635,262,364		639,409,524	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	98,826,463	90	99,198,190	95	99,892,577	100	100,292,148	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	958,217,184	80	562,777,701	85	355,874,768	90	532,706,256	95	535,369,787	100	539,117,376	80
			Kelurahan Bantan Timur					866,288,130		515,070,219		453,089,226		653,388,297		660,122,180		668,347,246	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,806	90	99,999,947	95	101,199,946	100	102,717,946	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	866,288,130	80	515,070,219	85	353,089,420	90	553,388,350	95	558,922,234	100	565,629,300	80
			Kelurahan Indra Kasih					877,528,263		595,875,350		432,498,590		653,398,731		663,499,711		672,125,208	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	98,474,715	90	99,999,731	95	101,799,726	100	103,123,123	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	877,528,263	80	595,875,350	85	334,023,875	90	553,399,000	95	561,699,985	100	569,002,085	80
			Kelurahan Sidorejo					832,717,927		1,538,782,339		450,516,102		653,372,574		660,059,675		667,678,593	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,987,006	90	99,999,364	95	100,599,360	100	101,504,754	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	832,717,927	80	1,538,782,339	85	350,529,096	90	553,373,210	95	559,460,315	100	566,173,839	80
			Kelurahan Sidorejo Hilir					834,809,666		1,225,167,768		461,158,746		653,394,256		666,162,146		669,594,656	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,998,746	90	99,998,256	95	101,698,226	100	102,308,416	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	834,809,666	80	1,225,167,768	85	361,160,000	90	553,396,000	95	564,463,920	100	567,286,240	80
			Kelurahan Tembung					795,583,214		570,235,041		455,599,214		653,399,364		665,767,356		669,385,447	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,766	90	99,999,364	95	101,299,356	100	103,224,043	80
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	795,583,214	80	570,235,041	85	355,599,448	90	553,400,000	95	564,468,000	100	566,161,404	80
			Kecamatan Medan Perjuangan					19,018,028,022		28,550,069,617		33,320,580,152		35,134,979,556		35,308,654,115		35,494,345,979	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100.00	100.00	11,566,558,253	100.00	14,800,510,382	100.00	18,708,914,823	100.00	17,865,124,624	100.00	17,972,315,372	100.00	18,008,260,002	100.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	7,106,916,419	100.00	13,081,902,765	100.00	13,643,513,637	100.00	16,041,429,542	100.00	16,089,553,831	100.00	16,218,270,261	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	97.00	14,975,850	98.00	14,804,220	99.00	29,236,920	100.00	141,487,100	100.00	143,750,894	100.00	146,194,659	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	208,345,600	100.00	211,262,438	100.00	213,797,588	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	10.00	100.00	135,192,500	100.00	437,686,250	100.00	674,031,882	100.00	878,592,690	100.00	891,771,580	100.00	907,823,469	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75	194,385,000	80	215,166,000	0	264,882,890	0	-	0	-	0	-	80
			Kelurahan Pahlawan					1,176,167,697		320,844,730		476,792,577		639,933,342		643,093,068		655,752,931	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	96,619,568	100	99,998,772	100	100,998,760	100	102,816,737	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,176,167,697	0	320,844,730	0	380,173,009	100	539,934,570	100	542,094,308	100	552,936,194	100
			Kelurahan Pandau Hilir					996,986,628		566,147,170		472,693,375		639,602,688		642,320,641		652,634,140	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,992,290	100	99,893,188	100	100,992,013	100	102,102,925	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	996,986,628	0	566,147,170	0	372,701,085	100	539,709,500	100	541,328,628	100	550,531,215	100
			Kelurahan Sei Kera Hilir - I					1,236,857,475		568,329,061		475,032,914		640,100,633		645,921,433		653,266,493	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,997,395	100	99,999,183	100	101,499,171	100	102,311,164	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,236,857,475	0	568,329,061	0	375,035,519	100	540,101,450	100	544,422,262	100	550,955,329	100
			Kelurahan Sei Kera Hilir - II					1,220,749,477		727,123,025		471,755,458		639,701,964		649,778,156		659,414,005	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,700,483	100	99,842,755	100	100,741,340	100	101,043,564	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,220,749,477	0	727,123,025	0	372,054,975	100	539,859,209	100	549,036,816	100	558,370,441	100
			Kelurahan Sei Kera Hulu					1,198,736,479		622,379,445		477,123,867		639,437,721		647,367,770		658,512,524	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	100,622,535	100	99,581,621	100	101,573,253	100	102,893,706	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,198,736,479	0	622,379,445	0	376,501,332	100	539,856,100	100	545,794,517	100	555,618,818	100

			Kelurahan Sidorame Barat - I					1,018,042,587		537,144,234		486,039,379		632,220,593		637,818,236		647,092,522	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	95,759,244	100	92,341,888	100	93,080,623	100	93,639,107	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,018,042,587	0	537,144,234	0	390,280,135	100	539,878,705	100	544,737,613	100	553,453,415	100
			Kelurahan Sidorame Barat - II					1,304,178,433		561,244,855		473,560,499		640,476,423		645,425,878		650,321,531	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,998,126	100	100,599,631	100	102,309,825	100	103,946,782	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,304,178,433	0	561,244,855	0	373,562,373	100	539,876,792	100	543,116,053	100	546,374,749	100
			Kelurahan Sidorame Timur					1,197,266,080		656,063,113		472,335,443		640,010,967		647,051,088		658,698,007	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,997,011	100	100,011,417	100	101,111,543	100	102,931,550	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	1,197,266,080	0	656,063,113	0	372,338,432	100	539,999,550	100	545,939,545	100	555,766,457	100
			Kelurahan Tegal Rejo					959,843,727		454,059,851		474,390,074		640,160,429		646,162,061		657,792,979	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	0	-	0	-	0	99,999,862	100	99,993,012	100	100,592,970	100	102,403,644	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	0	959,843,727	0	454,059,851	0	374,390,212	100	540,167,417	100	545,569,091	100	555,389,335	100
			Kecamatan Medan Barat					16,022,996,705		25,099,657,217		29,027,581,907		31,170,482,911		31,279,331,916		31,374,941,169	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	9,603,832,514	B (79,30)	12,431,543,157	B	15,942,505,863	B	13,664,843,607	B	13,719,502,981	B	13,760,661,490	B
7	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	82	83		84		85		100		100		100		100

7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	85	85		85		85		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70.00	70.00	5,811,574,011	80.00	12,018,640,460	85.00	12,055,351,235	90.00	16,090,673,144	95.00	16,138,945,163	100.00	16,187,361,999	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70.00	70.00	28,580,880	80.00	31,820,400	85.00	45,621,300	97.00	159,895,500	100.00	161,014,768	100.00	162,302,887	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70.00	70.00	352,824,000	80.00	438,838,300	85.00	818,073,509	99.00	1,033,131,410	100.00	1,037,263,936	100.00	1,039,338,464	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	N/A	70	226,185,300	80	178,814,900	85	166,030,000	0	-	0	-	0	-	85
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	99.00	99.00	-	99.00	-	99.00	-	99.00	221,939,250	100.00	222,605,068	100.00	225,276,329	100.00
			Kelurahan Glugur Kota					543,491,759		878,452,367		466,648,782		656,899,797		663,411,920		672,652,569	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	N/A	N/A	-	N/AB	-	B	105,438,982	B	100,004,107	B	101,504,169	B	102,316,202	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	543,491,759	80	878,452,367	85	361,209,800	97	556,895,690	100	561,907,751	100	570,336,367	100
			Kelurahan Karang Berombak					301,293,381		954,256,065		466,557,827		651,400,907		655,953,273		667,402,018	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	N/A	N/A	-	N/A	-	B	99,999,871	B	99,643,207	B	101,436,785	B	102,349,716	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	301,293,381	80	954,256,065	85	366,557,956	97	551,757,700	100	554,516,488	100	565,052,302	100
			Kelurahan Kesawan					250,578,115		367,986,786		466,646,859		652,198,282		657,015,869		669,197,972	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	85	99,997,588	100	99,999,782	100	100,399,781	100	102,006,178	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	250,578,115	80	367,986,786	85	366,649,271	97	552,198,500	100	556,616,088	100	567,191,794	100
			Kelurahan Pulo Brayan Kota					466,967,594		1,330,859,191		466,061,355		656,883,717		668,621,395		677,816,472	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	85	99,870,560	100	99,999,717	100	100,599,715	100	102,410,510	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	466,967,594	80	1,330,859,191	85	366,190,795	97	556,884,000	100	568,021,680	100	575,405,962	100
			Kelurahan Sei Agul					405,354,319		596,345,630		471,836,625		658,738,330		666,343,588		671,310,291	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	85	99,996,286	100	99,867,330	100	100,766,136	100	101,773,797	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	405,354,319	80	596,345,630	85	371,840,339	97	558,871,000	100	565,577,452	100	569,536,494	100
			Kelurahan Silalas					266,215,182		533,950,821		670,277,409		652,193,950		660,272,472		670,130,531	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	-	N/A	-	85	99,998,159	100	99,999,950	100	100,899,950	100	101,808,049	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	266,215,182	80	533,950,821	85	570,279,250	97	552,194,000	100	559,372,522	100	568,322,482	100
			Kecamatan Medan Tuntungan					20,141,276,169		26,253,146,267		31,079,028,419		35,983,770,988		36,240,905,858		36,412,637,831	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	86.00	86.00	14,428,856,579	97.00	16,445,212,957	97,5	19,978,524,858	98.00	18,900,540,462	99.00	19,032,844,245	100.00	19,108,975,622	100.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	97.70	97.70	5,284,185,136	98.00	9,216,644,010	98.00	9,736,987,297	98.00	12,362,877,895	98.00	12,474,143,796	100.00	12,548,988,659	100.00

			PELAYANAN PUBLIK															
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71.00	71.00	51,662,400	91,5	49,412,400	95.00	105,680,020	97.00	265,614,530	98.00	269,598,748	100.00	271,485,939	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80.00	80.00	126,973,854	85.00	324,666,700	90.00	995,642,376	90.00	4,118,992,436	95.00	4,127,230,421	100.00	4,143,739,343	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75	249,598,200	80	217,210,200	85	262,193,868	85	-	85	-	85	-	85
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	75.00	-	85.00	-	90.00	-	95.00	335,745,665	97.00	337,088,648	100.00	339,448,268	100.00
			Kelurahan Kemenangan Tani					674,583,497		570,084,583		467,172,928		642,059,837		650,749,405		654,416,167	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,994,336	90	99,756,377	95	100,853,697	100	102,870,771	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	674,583,497	91,5	570,084,583	95	367,178,592	97	542,303,460	98	549,895,708	100	551,545,396	100
			Kelurahan Ladang Bambu					1,275,696,374		898,571,422		484,852,918		644,030,533		656,810,580		667,729,449	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,451	90	100,564,346	95	102,475,069	100	104,524,570	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	1,275,696,374	91,5	898,571,422	95	384,853,467	97	543,466,187	98	554,335,511	100	563,204,879	100
			Kelurahan Lau Cih					929,364,546		568,483,080		467,859,053		640,709,108		651,574,717		657,989,255	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,089	90	100,604,947	95	101,208,577	100	102,119,454	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	72	72	929,364,546	91,5	568,483,080	95	367,859,964	97	540,104,161	98	550,366,140	100	555,869,801	100

			Kelurahan Mangga					828,027,118		850,720,296		473,037,273		639,213,720		647,036,421		653,422,293	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	111,369,782	90	98,918,859	95	100,798,317	100	102,814,284	100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0		0		85		90		95		100		100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	828,027,118	91,5	850,720,296	95	361,667,491	97	540,294,861	98	546,238,104	100	550,608,009	100
			Kelurahan Namo Gajah					846,374,959		1,167,711,616		467,522,152		618,918,845		626,226,722		635,857,044	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,925,438	90	99,953,845	95	101,553,107	100	102,263,978	100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0		0		85		90		95		100		100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	846,374,959	91,5	1,167,711,616	95	367,596,714	97	518,965,000	98	524,673,615	100	533,593,066	100
			Kelurahan Sidomulyo					1,034,136,713		602,927,254		468,433,324		640,129,895		645,990,946		649,240,364	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,734	90	99,881,568	95	100,880,384	100	102,494,470	100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0		0		85		90		95		100		100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	1,034,136,713	91,5	602,927,254	95	368,433,590	96	540,248,327	98	545,110,562	100	546,745,894	100
			Kelurahan Simalingkar – B					1,170,930,124		591,666,641		466,941,877		626,096,718		631,269,999		640,337,817	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang	Persen	0	0	-	0	-	85	99,997,727	90	98,825,543	95	100,307,926	100	101,411,313	100

			KABUPATEN/KOTA	Disusun Tepat Waktu															
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	1,170,930,124	91,5	591,666,641	95	366,944,150	97	527,271,175	98	530,962,073	100	538,926,504	100
			Kelurahan Simpang Selayang					1,427,624,029		545,009,053		467,657,586		648,084,999		651,473,460		662,145,671	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,893	90	99,515,159	95	100,709,341	100	102,018,562	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	1,427,624,029	91,5	545,009,053	95	367,657,693	97	548,569,840	98	550,764,119	100	560,127,109	100
			Kelurahan Tanjung Selamat					1,072,344,937		799,522,401		456,739,444		648,146,783		657,803,210		664,876,258	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	0	0	-	0	-	85	99,999,987	90	97,061,943	95	99,003,182	100	100,488,230	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	1,072,344,937	91,5	799,522,401	95	356,739,457	97	551,084,840	98	558,800,028	100	564,388,028	100
			Kecamatan Medan Selayang					15,770,696,906		22,503,771,122		24,431,676,980		26,430,582,220		26,515,157,853		26,713,348,259	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75.00	85.00	11,274,442,229	85.00	12,860,701,124	85.00	13,670,331,732	90.00	14,615,844,646	95.00	14,646,395,836	100.00	14,752,456,868	100.00
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75.00	85.00	4,154,852,477	85.00	8,944,848,998	85.00	9,812,747,793	90.00	10,477,048,714	95.00	10,518,956,909	100.00	10,592,589,607	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	80.00	24,877,600	80.00	32,760,000	85.00	49,474,750	90.00	352,241,600	95.00	355,059,533	100.00	360,385,426	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75.00	85.00	-	85.00	-	85.00	259,220,000	90.00	235,789,432	95.00	239,090,484	100.00	242,437,751	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persen	75.00	85.00	106,806,500	85.00	428,059,000	85.00	639,902,705	90.00	749,657,828	95.00	755,655,091	100.00	765,478,607	100.00

			N UMUM	umum															
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0.00	75	209,718,100	80	237,402,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100
			Kelurahan Asam Kumbang					1,049,734,538		1,848,598,946		480,709,917		608,569,483		618,035,362		625,533,324	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	99,999,849	90	94,681,403	95	96,438,961	100	97,677,766	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	1,049,734,538	0	1,848,598,946	85	380,710,068	90	513,888,080	95	521,596,401	100	527,855,558	100
			Kelurahan Beringin					591,186,924		604,675,194		460,922,187		641,908,198		654,064,358		663,483,606	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	99,999,736	90	97,423,758	95	98,690,229	100	99,778,865	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	591,186,924	0	604,675,194	85	360,922,451	90	544,484,440	95	555,374,129	100	563,704,741	100
			Kelurahan Pb. Selayang – I					555,437,501		736,337,488		479,982,902		419,177,424		423,883,319		426,949,632	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	94,149,903	90	99,902,424	95	101,096,294	100	102,225,885	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	555,437,501	0	736,337,488	85	385,832,999	90	319,275,000	95	322,787,025	100	324,723,747	100
			Kelurahan Pb. Selayang – II					887,795,291		1,525,182,936		470,716,603		656,140,591		662,551,643		668,390,571	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	86,456,007	90	95,857,726	95	97,226,232	100	98,542,557	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	887,795,291	0	1,525,182,936	85	384,260,596	90	560,282,865	95	565,325,411	100	569,848,014	100
			Kelurahan Sempakata					953,294,701		524,409,738		479,941,389		647,655,660		658,229,180		665,700,791	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	99,986,700	90	99,998,660	95	101,262,011	100	103,163,950	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	953,294,701	0	524,409,738	85	379,954,689	90	547,657,000	95	556,967,169	100	562,536,841	100
			Kelurahan Tanjung Sari					978,024,778		1,544,435,037		480,709,226		632,859,710		637,152,383		639,328,046	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	0	-	0	-	85	99,990,081	90	94,472,480	95	94,996,442	100	95,545,638	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	0	978,024,778	0	1,544,435,037	85	380,719,145	90	538,387,230	95	542,155,941	100	543,782,408	100
			Kecamatan Medan Petisah					15,724,628,856		25,550,708,089		29,350,365,943		30,556,416,691		30,757,570,094		30,880,037,049	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasaan Internal	%	100	100	10,493,575,667	100	13,521,006,679	100	16,750,544,175	100	15,406,094,940	100	15,513,937,605	100	15,544,965,480	100
7	1	1		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	1		1		100		100		100		100		100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75.00	75.00	4,706,723,189	80.00	11,191,191,410	85.00	11,392,621,703	100.00	13,927,322,247	100.00	14,010,886,180	100.00	14,094,951,498	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75.00	17,290,000	80.00	34,772,000	85.00	85,738,415	100.00	153,504,580	100.00	155,807,149	100.00	156,274,570	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80.00	85.00	-	85.00	-	85.00	293,004,720	100.00	232,973,412	100.00	236,235,040	100.00	239,778,565	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75.00	75.00	313,225,000	80.00	598,918,000	85.00	828,456,930	100.00	836,521,512	100.00	840,704,120	100.00	844,066,936	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	75	193,815,000	80	204,820,000	0	-	0	-	0	-	0	-	80

			N DESA																
			Kelurahan Petisah Tengah					579,048,196		522,088,890		465,799,499		647,679,570		659,933,163		667,342,893	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,800	100	99,999,782	100	101,299,779	100	103,123,175	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	579,048,196	80	522,088,890	85	365,799,699	100	547,679,788	100	558,633,384	100	564,219,718	100
			Kelurahan Sei Putih Barat					930,384,684		592,395,063		465,799,663		647,665,147		659,523,119		670,633,013	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,827	100	99,999,971	100	101,999,970	100	103,631,970	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	930,384,684	80	592,395,063	85	365,799,836	100	547,665,176	100	557,523,149	100	567,001,043	100
			Kelurahan Sei Putih Tengah					532,028,723		521,400,239		467,146,822		647,679,324		657,489,874		659,663,344	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	101,347,015	100	99,999,870	100	100,499,869	100	101,002,369	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	532,028,723	80	521,400,239	85	365,799,807	100	547,679,454	100	556,990,005	100	558,660,975	100
			Kelurahan Sei Putih Timur – I					186,314,360		819,702,190		457,339,773		647,679,937		652,761,377		660,094,591	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,958	100	100,000,112	100	100,700,113	100	102,512,715	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	186,314,360	80	819,702,190	85	357,339,815	100	547,679,825	100	552,061,264	100	557,581,876	100
			Kelurahan Sei Putih Timur – II					476,833,365		395,164,888		361,999,988		547,673,661		556,679,464		565,083,837	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,316	100	99,999,748	100	100,499,747	100	101,605,244	100

7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	476,833,365	80	395,164,888	85	261,999,672	100	447,673,913	100	456,179,717	100	463,478,593	100
			Kelurahan Sei Sikambing - D					506,598,613		739,407,101		465,799,460		647,679,816		659,038,053		662,587,704	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	99,999,666	100	99,999,906	100	101,499,905	100	102,819,403	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	506,598,613	80	739,407,101	85	365,799,794	100	547,679,910	100	557,538,148	100	559,768,301	100
			Kelurahan Sekip					844,215,051		557,435,048		464,651,526		647,679,860		652,665,938		659,786,030	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,051	100	99,999,960	100	101,699,959	100	102,208,459	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75	844,215,051	80	557,435,048	85	364,651,475	100	547,679,900	100	550,965,979	100	557,577,571	100
			Kecamatan Medan Johor					17,831,159,773		22,571,629,363		26,237,916,614		28,148,957,022		28,326,751,185		28,569,906,403	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	10,692,256,271	94,51	13,143,648,963	100	15,838,580,288	100	15,594,135,896	100	15,672,106,575	100	15,828,827,641	100
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	90		90		90		90		95		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75.00	75.00	4,791,671,002	80.00	8,979,049,900	85.00	9,155,907,591	90.00	11,190,960,001	95.00	11,280,487,681	100.00	11,359,451,095	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75.00	75.00	13,953,000	80.00	22,380,000	85.00	53,050,795	90.00	193,986,468	95.00	196,120,319	100.00	196,708,680	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di	Persen	75.00	75.00	-	80.00	-	85.00	-	90.00	163,243,560	95.00	165,365,726	100.00	167,184,749	100.00

			KETERTIBAN UMUM	kecamatan														
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	90.00	90.00	2,173,905,500	94.00	278,588,000	95.00	1,033,879,380	95.00	1,006,631,097	100.00	1,012,670,884	100.00	1,017,734,238	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	70	159,374,000	80	147,962,500	80	156,498,560	90	-	90	-	100	-	100
			Kelurahan Gedung Johor					875,622,398		772,848,868		456,439,841		630,160,000		633,840,960		639,847,029	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	99,999,995	90	100,000,000	95	100,500,000	100	101,706,000	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	875,622,398	80	772,848,868	85	356,439,846	90	530,160,000	95	533,340,960	100	538,141,029	100
			Kelurahan Kedai Durian					1,031,516,455		938,348,249		456,440,000		630,160,000		636,691,760		641,382,494	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	100,000,000	90	100,000,000	95	100,700,000	100	101,102,800	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	1,031,516,455	80	938,348,249	85	356,440,000	90	530,160,000	95	535,991,760	100	540,279,694	100
			Kelurahan Kwala Bekala					1,087,585,893		1,017,349,584		459,781,200		642,640,000		646,695,840		654,615,894	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	100,000,000	90	100,000,000	95	100,800,000	100	102,715,200	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	1,087,585,893	80	1,017,349,584	85	359,781,200	90	542,640,000	95	545,895,840	100	551,900,694	100

			Kelurahan Pangkalan Masyur					897,028,817		612,427,932		456,440,000		630,160,000		638,982,240		647,998,809	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	100,000,000	90	100,000,000	95	101,400,000	100	103,428,000	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	897,028,817	80	612,427,932	85	356,440,000	90	530,160,000	95	537,582,240	100	544,570,809	100
			Kelurahan Suka Maju					772,587,907		950,258,389		456,430,133		630,150,733		638,842,691		647,221,402	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	99,999,905	90	99,999,733	95	101,799,728	100	103,733,923	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	772,587,907	80	950,258,389	85	356,430,228	90	530,151,000	95	537,042,963	100	543,487,479	100
			Kelurahan Titi Kuning					749,771,450		972,382,079		456,439,907		630,160,000		638,321,920		643,197,373	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	0	-	0	-	90	100,000,000	90	100,000,000	95	101,800,000	100	102,919,800	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	749,771,450	80	972,382,079	85	356,439,907	90	530,160,000	95	536,521,920	100	540,277,573	100
			Kecamatan Medan Maimun					13,140,228,375		19,199,012,586		22,287,829,259		23,462,080,360		23,625,559,272		23,849,081,263	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	8,685,280,822	80	9,982,403,076	85	12,463,056,083	90	11,808,485,769	95	11,891,145,169	100	11,998,165,476	100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	97.00	4,173,922,553	98.00	8,688,682,010	99.00	8,874,476,680	100.00	10,872,369,460	100.00	10,948,476,046	100.00	11,057,960,807	100.00

			PUBLIK																
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	21,721,000	100.00	39,241,600	100.00	38,004,100	100.00	106,928,400	100.00	107,463,042	100.00	108,645,135	100.00
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	5,200,000	100.00	16,200,000	100.00	201,700,000	100.00	203,515,300	100.00	205,550,453	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	107,145,000	100.00	333,085,500	100.00	726,767,436	100.00	472,596,731	100.00	474,959,715	100.00	478,759,392	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	75.00	75	152,159,000	80	150,400,400	85	169,324,960	90	-	95	-	100	-	100
			Kelurahan Aur					774,310,022		1,100,867,596		462,920,000		672,460,000		679,251,880		685,977,632	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,494,820	100	101,433,001	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	774,310,022	100	1,100,867,596	100	362,920,000	100	572,460,000	100	578,757,060	100	584,544,631	100
			Kelurahan Hamdan					608,196,900		1,341,078,350		461,720,000		666,400,000		671,498,400		677,541,886	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	101,700,000	100	102,615,300	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	608,196,900	100	1,341,078,350	100	361,720,000	100	566,400,000	100	569,798,400	100	574,926,586	100
			Kelurahan Jati					699,457,068		611,222,616		462,920,000		672,460,000		676,294,760		680,653,729	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,400,000	100	101,303,600	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	699,457,068	100	611,222,616	100	362,920,000	100	572,460,000	100	575,894,760	100	579,350,129	100

			Kelurahan Kampung Baru					582,079,655		595,834,008		462,920,000		672,460,000		677,367,220		680,480,289	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	100,900,000	100	101,707,200	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	582,079,655	100	595,834,008	100	362,920,000	100	572,460,000	100	576,467,220	100	578,773,089	100
			Kelurahan Sei Mati					670,046,472		596,139,022		463,600,000		668,150,000		1,437,078,503		1,443,622,059	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	NA	NA	-	NA	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	201,896,801	100	203,410,976	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	670,046,472	76	596,139,022	82	363,600,000	88	568,150,000	95	1,235,181,702	100	1,240,211,083	100
			Kelurahan Sukaraja					344,089,930		1,235,995,251		464,280,000		667,470,000		671,607,350		677,854,416	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75.00	75	-	80	-	85	100,000,000	90	100,000,000	95	101,300,000	100	102,414,300	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	344,089,930	100	1,235,995,251	100	364,280,000	100	567,470,000	100	570,307,350	100	575,440,116	100
			Kecamatan Medan Deli					15,003,437,800		21,667,136,512		24,474,504,471		26,116,975,470		26,284,683,157		26,485,909,147	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	9,013,872,641	B (79,30)	11,499,900,842	B	13,964,887,376	B	12,599,670,366	B	12,713,067,399	B	12,840,198,073	B
7	1	1		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70.00	100.00	5,696,887,959	100.00	9,711,147,670	100.00	9,810,491,498	100.00	12,439,512,103	100.00	12,476,830,639	100.00	12,539,214,793	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	107,790,000	100.00	31,200,000	100.00	67,388,490	100.00	244,993,735	100.00	248,668,641	100.00	251,652,665	100.00

			KELURAHAN																
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	280,125,250	100.00	284,047,004	100.00	285,467,239	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80.00	100.00	69,726,200	100.00	299,310,000	100.00	444,317,821	100.00	552,674,016	100.00	562,069,474	100.00	569,376,377	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80.00	100	115,161,000	100	125,578,000	100	187,419,286	100	-	100	-	100	-	100
			Kelurahan Kota Bangun					546,210,174		1,096,180,012		460,650,470		638,404,276		645,665,154		651,334,441	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	93,486,080	B	99,993,276	B	100,793,222	B	102,103,534	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	546,210,174	100	1,096,180,012	100	367,164,390	100	538,411,000	100	544,871,932	100	549,230,907	100
			Kelurahan Mabar					772,151,777		1,498,184,013		636,976,376		845,832,455		850,214,899		858,858,092	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	97,314,380	B	99,911,455	B	101,310,215	B	101,715,456	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	772,151,777	100	1,498,184,013	100	539,661,996	100	745,921,000	100	748,904,684	100	757,142,636	100
			Kelurahan Mabar Hilir					603,702,990		1,480,672,394		431,735,862		639,544,929		646,979,923		649,466,343	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	97,890,179	B	99,999,929	B	101,499,928	B	101,804,428	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	603,702,990	100	1,480,672,394	100	333,845,683	100	539,545,000	100	545,479,995	100	547,661,915	100
			Kelurahan Tanjung Mulia					780,541,092		1,658,885,384		470,564,999		636,983,103		644,285,297		651,517,528	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	99,164,999	B	98,460,103	B	99,838,544	B	100,537,414	B

			KABUPATEN/KOTA															
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	780,541,092	100	1,658,885,384	100	371,400,000	100	538,523,000	100	544,446,753	100	550,980,114	100
			Kelurahan Tanjung Mulia Hilir					1,237,958,749		1,693,001,111		753,369,841		938,797,500		945,030,285		954,446,358	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	99,913,739	B	100,000,000	B	101,200,000	B	103,021,600	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	1,237,958,749	100	1,693,001,111	100	653,456,102	100	838,797,500	100	843,830,285	100	851,424,758	100
			Kelurahan Titi Papan					1,224,744,498		1,086,534,394		463,424,839		639,629,850		645,586,558		647,927,798	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	NA	NA	-	NA	-	B	99,999,901	B	100,019,850	B	101,120,068	B	101,827,909	B
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	100	1,224,744,498	100	1,086,534,394	100	363,424,938	100	539,610,000	100	544,466,490	100	546,099,889	100
			Kecamatan Medan Amplas					18,474,426,499		25,330,465,800		27,651,694,255		29,779,472,296		29,898,832,244		30,137,594,914	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	CC	CC	12,910,584,615	CC	15,613,859,800	B	17,759,222,777	BB	16,668,686,918	B	16,735,361,666	A	16,835,773,836	A
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	100.00	5,102,962,884	100.00	9,026,823,500	100.00	8,994,023,244	100.00	11,696,065,071	100.00	11,731,153,266	100.00	11,848,464,799	100.00
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100.00	100.00	52,304,000	100.00	56,700,000	100.00	76,778,952	100.00	207,565,964	100.00	209,434,058	100.00	212,366,134	100.00
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100.00	100.00	234,315,000	100.00	446,265,000	100.00	606,701,010	100.00	972,904,343	100.00	986,525,004	100.00	1,001,322,879	100.00
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70.00	75	174,260,000	80	186,817,500	85	214,968,272	90	-	95	-	100	-	100

			N DESA																
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	234,250,000	100.00	236,358,250	100.00	239,667,266	100.00
			Kelurahan Amplas					886,057,827		575,912,408		471,538,832		656,580,000		666,487,972		675,215,522	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	95,646,741	100	99,551,386	100	100,546,900	100	101,351,275	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	886,057,827	100	575,912,408	100	375,892,091	100	557,028,614	100	565,941,072	100	573,864,247	100
			Kelurahan Bangun Mulia					825,815,459		579,094,113		467,491,387		640,480,000		644,082,400		647,504,612	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	100,000,001	100	100,000,000	100	100,900,000	100	101,606,300	200
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	825,815,459	100	579,094,113	100	367,491,386	100	540,480,000	100	543,182,400	100	545,898,312	100
			Kelurahan Harjosari – I					584,568,038		1,100,547,303		464,975,688		644,244,344		653,629,388		660,338,120	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	107,056,178	100	102,540,564	100	103,258,348	100	105,013,740	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	584,568,038	100	1,100,547,303	100	357,919,510	100	541,703,780	100	550,371,040	100	555,324,380	100
			Kelurahan Harjosari – II					713,620,894		1,475,099,455		461,179,313		652,370,006		656,384,226		663,350,868	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	98,918,963	100	99,999,900	100	100,699,899	100	102,109,698	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	713,620,894	100	1,475,099,455	100	362,260,350	100	552,370,106	100	555,684,327	100	561,241,170	100
			Kelurahan Sitirejo – II					1,006,843,677		582,266,950		467,096,035		651,510,000		657,936,388		665,169,068	

7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	99,995,005	100	98,220,680	100	99,114,175	100	99,640,988	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	1,006,843,677	100	582,266,950	100	367,101,030	100	553,289,320	100	558,822,213	100	565,528,080	100
			Kelurahan Sitirejo – III					749,564,039		608,546,178		459,140,628		645,360,000		654,986,068		663,249,323	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	92,184,600	100	99,955,969	100	100,855,573	100	102,469,262	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	749,564,039	100	608,546,178	100	366,956,028	100	545,404,031	100	554,130,495	100	560,780,061	100
			Kelurahan Timbang Deli					518,451,037		1,189,507,456		468,764,297		659,800,000		670,516,219		677,679,479	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	-	100	-	100	88,008,224	100	105,471,000	100	106,209,297	100	107,165,181	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	100	518,451,037	100	1,189,507,456	100	380,756,073	100	554,329,000	100	564,306,922	100	570,514,298	100
			Kecamatan Medan Sunggal					18,489,088,989		27,030,616,168		30,245,925,500		33,548,537,974		33,812,289,143		34,093,386,184	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1.00	1	12,966,259,637	2	14,989,580,430	3	18,504,277,168	4	20,843,731,822	5	20,989,637,945	5	21,199,534,324	5
7	1	1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	50.00	50		60		70		80		90		100		100
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	50.00	50	5,115,876,952	60	11,498,204,338	70	10,698,180,686	80	11,081,011,420	90	11,180,740,523	100	11,236,644,225	100
7	1	2		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0.00	75		80		85		90		95		100		100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	25,850,000	6	28,248,000	6	60,036,000	6	111,499,878	6	112,837,877	6	114,191,931	6

7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	30.00	30	208,980,400	60	359,637,600	90	710,293,960	120	863,028,030	150	873,384,366	195	882,118,210	195
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100.00	100	172,122,000	100	154,945,800	100	273,137,686	100	492,871,824	100	496,321,927	100	499,299,858	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum	%	0.00	0	-	0	-	0	-	80	156,395,000	80	159,366,505	80	161,597,636	0
			Kelurahan Babura Sunggal					570,076,038		489,583,560		398,223,075		422,582,909		430,611,984		434,918,104	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	570,076,038	6	489,583,560	6	398,223,075	6	422,582,909	6	430,611,984	6	434,918,104	6
			Kelurahan Lalang					205,088,995		1,106,155,509		347,657,804		425,501,970		430,182,492		436,205,047	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	205,088,995	6	1,106,155,509	6	347,657,804	6	425,501,970	6	430,182,492	6	436,205,047	6
			Kelurahan Sei Sikambing – B					615,721,979		1,038,675,386		360,936,004		522,078,239		527,821,100		534,154,953	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	615,721,979	6	1,038,675,386	6	360,936,004	6	522,078,239	6	527,821,100	6	534,154,953	6
			Kelurahan Simpang Tanjung					348,312,388		293,581,519		343,581,745		378,688,797		382,096,996		388,592,645	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	348,312,388	6	293,581,519	6	343,581,745	6	378,688,797	6	382,096,996	6	388,592,645	6
			Kelurahan Sunggal					602,324,722		1,383,401,996		391,535,748		646,132,000		657,762,376		663,024,475	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	602,324,722	6	1,383,401,996	6	391,535,748	6	646,132,000	6	657,762,376	6	663,024,475	6
			Kelurahan Tanjung Rejo					605,071,162		524,973,081		391,996,580		422,291,100		426,514,011		433,338,235	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6.00	6	605,071,162	6	524,973,081	6	391,996,580	6	422,291,100	6	426,514,011	6	433,338,235	6
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
8	1		**Kesatuan Bangsa dan Politik**																

			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					22,142,073,589		34,661,176,962		88,595,217,477		145,531,642,730		146,960,856,527		147,290,907,988	
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	20,931,805,189	B	31,312,358,692	B	75,635,951,194	B	134,568,628,793	BB	135,914,200,362	BB	136,186,086,581	BB
8	1	1		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75		80		85		90		95		99		99
8	1	1		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Persen	100.00	100.00	326,719,800	100.00	1,037,777,970	100.00	1,917,083,063	100.00	4,408,384,383	100.00	4,452,468,227	100.00	4,465,825,632	100.00
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Persen	95.00	95.00	83,249,400	100.00	329,809,500	100.00	6,740,699,479	100.00	1,265,647,630	100.00	1,268,178,925	100.00	1,278,324,357	100.00
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	100.00	100.00	12,000,000	100.00	252,149,000	100.00	486,129,165	100.00	530,540,696	100.00	540,090,429	100.00	547,111,604	100.00
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Kelurahan	131.00	131.00	48,773,500	132.00	559,630,800	134.00	1,311,488,308	136.00	2,118,034,698	148.00	2,124,388,802	140.00	2,141,383,913	140.00
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Persen	90.00	90.00	739,525,700	100.00	1,169,451,000	100.00	2,503,866,268	100.00	2,640,406,530	100.00	2,661,529,782	100.00	2,672,175,901	100.00

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Sementara Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode masa jabatan. Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kota Medan menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Ratio.

Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 8.1

Tabel 8.1.
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kota Medan Tahun 2021-2026

Indikator Makro	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan RPJMD				Target Setelah Perubahan RPJMD			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
LPE	-1,98	2,62	4,71	6,07	6,10	6,12	6,15	5,50 - 6,10	5,60-6,35	5,70-6,50	5,90-6,60
Gini Rasio	0,350	0,402	0,399	0,319	0,315	0,312	0,308	0,379	0,369	0,360	0,350
TPT	10,74	10,81	8,89	8,55	8,40	8,25	8,10	8,40-8,80	8,20-8,70	8,00-8,50	7,80-8,30
Persentase Kemiskinan	8,01	8,34	8,07	7,65	7,50	7,34	7,19	7.55-8,00	7,40-7,95	7,25-7,90	7,05-7,85
IPM	80,98	81,21	81,76	82,46	82,89	83,32	83,75	81,9	82,1	82,33	82,49
Inflasi	1,76	1,70	6,1	3,00	2,50	2,00	2,00	3,00-4,50	2,25-3,75	2,00-3,40	1,80-3,10
Emisi Gas Rumah Kaca	4.364,34	4.340,25	5.188,13	-	-	-	-	5.021,51	4.854,89	4.688,27	4.521,65

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Medan mulai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi	Indikator	Satuan	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Medan Berkah	**Sebelum Perubahan**								
	Gini Ratio	Indeks	0,314	0,402	0,399	0,319	0,315	0,312	0,308
	Pendapatan per kapita	Rupiah	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	68.900.000,00	70.500.000,00	71.500.000,00	71.700.000,00
	Angka Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7,65	7,50	7,34	7,19
	Setelah Perubahan								
	PDRB per Kapita	Rp	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	67.677.802,28	69.195.585,77	70.747.408,00	72.334.032,34
	Persentase Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7.55 - 8,00	7,40 - 7,95	7,25 - 7,90	7,05 - 7,85
Medan Maju	**Sebelum Perubahan**								
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,00	81,21	81,76	82,46	82,89	83,32	83,75
	Indeks Pendidikan	Indeks	11.39	11,42	11,50	11,42	11,42	11,43	11,44
	Indeks Kesehatan	Indeks	73.14	73,23	73,58	74.25	74.30	74.50	75.7
	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.890.000	14.999.000	15.503.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000
	Setelah Perubahan								
	Indeks Pendidikan	Poin	0,789	0,792	0,794	0,795	0,796	0,798	0,799
	Indeks Kesehatan	Poin	0,818	0,819	0,824	0,828	0,832	0,835	0,839
Medan Bersih	**Sebelum Perubahan**								
	Indeks Reformasi Birokrasi	Level	CC	CC	CC	B	BB	BB	A
	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	CC	B	B	A	A	A
	Indeks Transformasi Data Digital	Poin	N/A	0,8	0,83	0,93	0,93	0,94	0,95
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	Indikator	Satuan	Realisasi			Target			
Misi	Nilai Sakip	Level	Cc	B	B	BB	BB	A	A
	Setelah Perubahan								
	Nilai SAKIP	Level	CC (60)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)
	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	Level	N/A	2,76	N/A	2,85	2,9	2,95	3
	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	A-(4,15)	A-(4,21)	A- (4.30)	A- (4,41)	A (4,51)	A (4,58)
Medan Membangun	**Sebelum Perubahan**								
	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96,90	98,90	98,41	98,40	98,90	99,40	100,00
	Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	25.690,20	26.021,50	27.751,97	26.021,52	26.185,48	26.349,08	26.510,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,60	63,80	63,52	58,05	58,27	58,50	58,72
	Persentase luas RTH	%	10,00	6,73	6,74	13,00	13,50	14,00	14,50
	Setelah Perubahan								
	Luas kawasan kumuh	Ha	819,8	506,6	447	200,04	105,96	50,00	30,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61	61,89	61,89	61,93	62,00	62,63
	Jumlah titik banjir/genangan	Titik	2.341	1.910	617	410	305	100	30
Medan Kondusif	**Sebelum Perubahan**								
	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	N/A	70	41,91	75	75	80	85
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146,00	18.838,00	20.330,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
	Setelah Perubahan								
	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146	18.838	20.330	18.297	16.467	14.821	13.339
Medan	**Sebelum Perubahan**								

Misi	Indikator	Satuan	Realisasi			Target			
Inovatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	2,62	4,71	6,07	6,10	6,12	6,15
	Nilai investasi PMDN	Juta Rupiah	4.127.638,60	5.121.020,16	2.853.685,00	4.778.257,63	5.268.029,04	5.268.029,04	5.531.430,49
	Nilai investasi PMA	US $	40.258,50	57.196,30	41.136,50	46.604,25	48.934,46	51.381,18	53.950,24
	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Poin	57,14	29,71	44,04	75,00	77,70	88,00	94,17
	Setelah Perubahan								
	Pertumbuhan investasi	Rp	-3.728.176	5.939.665.941.900	4.153.965.803.200	5.475.389.633.838	5.749.158.937.048	6.036.616.990.089	6.338.447.852.552
	Persentase UMKM Naik Kelas	%	N/A	N/A	15,10	20,54	25,00	25,00	25,00
	Rasio PAD	%	37,85	37,96	40,93	51,46	49,77	53,33	56,80
	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	29,71	44,04	63,00	64,00	65,00	66,00
Medan Beridentitas	**Sebelum Perubahan**								
	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	2,72	2,57	2,66	3,07	3,15	3,23	3,31
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	unit	N/A	93	93	145	155	165	175
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	N/A	3	2	5	8	8	12
	Setelah Perubahan								
	Jumlah kunjungan wisatawan	Jiwa	N/A	170.649	319.315	328.895	338.762	348.925	359.392
	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	N/A	93	93	126	126	130	130

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kota Medan Tahun 2021 – 2026

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,98	81,21	81,76	81,90	82,10	82,33	82,49	82,49	Indikator Makro
2	Gini Rasio	Indeks	0,350	0,402	0,399	0,379	0,369	0,360	0,350	0,350	Indikator Makro
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	2,62	4,71	5,50 - 6,10	5,60 - 6,35	5,70 - 6,50	5,90 - 6,60	5,90 - 6,60	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,74	10,81	8,89	8,40 - 8,80	8,20 - 8,70	8,00 - 8,50	7,80 - 8,30	7,80 - 8,30	Indikator Makro
5	Inflasi	%	1,76	1,7	6,1	3,00 - 4,50	2,25 - 3,75	2,00 - 3,40	1,80 - 3,10	1,80 - 3,10	Indikator Makro
6	Persentase Kemiskinan	%	8,01	8,34	8,07	7.55 - 8,00	7,40 - 7,95	7,25 - 7,90	7,05 - 7,85	7,05 - 7,85	IKU Kepala Daerah
7	PDRB per Kapita	Rp	67.400.000,00	64.078.945,84	66.193.310,89	67.677.802,28	69.195.585,77	70.747.408,00	72.334.032,34	72.334.032,34	IKU Kepala Daerah
8	Luas kawasan kumuh	Ha	819,8	506,6	306	200,04	105,96	50	30	30	IKU Kepala Daerah
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61,00	61,89	61,89	61,93	62,00	62,63	62,63	IKU Kepala Daerah
10	Cakupan Sarana Prasarana Bangunan Milik Pemerintah yang baik	%	41,71	41,71	61,41	71,5	81,5	91,5	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
11	Persentase Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	82,35	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	90	95	95	100	100	100	100	100	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
13	Persentase penyelamatan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar										
14	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
15	Persentase Koperasi Sehat	%	20	26	22	60	60	60	60	60	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Indeks Standart Pelayanan Kesehatan (SPM)	Poin	50,30	50,30	63,78	71	75	78	80	80	IKU Dinas Kesehatan
17	Indeks Risiko Bencana	Indeks	na	92,84	91,92	91,01	90,01	89,2	88,31	88,31	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
19	Persentase Pencari Kerja Kompeten yang Bekerja	%	18,5	18,5	29,23	30	32	34	35	35	IKU Dinas Ketenagakerjaan
20	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	20,5	20,5	64,7	42	43	44	45	45	IKU Dinas Ketenagakerjaan
21	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tatakelola Kerja yang Layak	%	68,5	68,5	75,2	72	74	76	78	78	IKU Dinas Ketenagakerjaan
22	Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas	%	60	350	80	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda	%	200	200	640	54,33	72,11	80	86,4	86,4	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	yang berprestasi										
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2,7	2,8	3,013	3,03	3,05	3,07	3,1	3,1	IKU Sekretariat DPRD
25	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	70,79	70,79	75	77	79	82,5	84	84	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah dan berpatisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	78,86	80,03	81,65	82,98	83,05	83,9	84,79	84,79	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Persentase Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	%	65	65	70	75	80	85	90	90	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
28	Persentase Pengawasan Bangunan yang sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5	5	10	16	22	28	35	35	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
29	Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	90	129,59	166,6	94	95	96	98	98	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
30	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	%	2	2	3,56	2	2	2	2	2	IKU Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,789	0,792	0,794	0,795	0,796	0,798	0,799	0,799	IKU Kepala Daerah
2	Indeks Kesehatan	Poin	0,818	0,819	0,824	0,828	0,832	0,835	0,839	0,839	IKU Kepala Daerah
3	Nilai SAKIP	Level	CC (60)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)	A (81)	IKU Kepala Daerah
4	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Kepala Daerah
5	Indeks SPBE	Level	N/A	2,76	N/A	2,85	2,90	2,95	3,00	3,00	IKU Kepala Daerah
6	Indeks Pelayanan Publik	Level	N/A	A-(4,15)	A-(4,21)	A- (4.30)	A- (4,41)	A (4,51)	A (4,58)	A (4,58)	IKU Kepala Daerah
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	29,71	44,04	63	64	65	66	66	IKU Kepala Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8	Jumlah titik banjir/genangan	Titik	N/A	2575	617	410	305	100	30	30	IKU Kepala Daerah
9	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146,00	18838	20330	18297	16467	14821	13339	13339	IKU Kepala Daerah
10	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (65,70)	B (65,70)	B (70)	BB (70,10)	BB (72)	BB (75)	BB (78)	BB (78)	IKU Dinas Kesehatan
11	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	Na	57,6	63,15	63,25	63,35	63,45	63,55	63,55	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	200	200	200	200	200	200	100	IKU Dinas Sosial
13	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
14	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (61.35)	B (61.35)	B (65)	B (70)	BB (73)	BB (78)	BB (80)	BB (80)	IKU Dinas Ketenagakerjaan
15	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	B	B	B	B+	B+	A	A	IKU Dinas Lingkungan Hidup
16	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B	B	B	A	A	A	A	A	IKU Dinas Perhubungan
17	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (68,25)	B (68,25)	B (60,25)	B (65)	B (69)	B (69,25)	BB (71)	BB (71)	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (76,61)	B (76,61)	B (78,32)	B (80,30)	B (80,30)	B (80,30)	B (80,30)	B (80,30)	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	c	CC	B	B	B	BB	A	A	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	B	B	B	BB	BB	A	A	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C (41)	C (41)	CC (50)	CC (55)	CC (55)	B (65)	B (67)	B (67)	IKU Dinas Pariwisata
22	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	62	68	70,45	72	74	77	81	81	IKU Sekretariat DPRD
23	Persentase capaian kinerja Indikator	Persen	91,07	91,07	90,04	87	88	89	90	90	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Sasaran RPJMD										
24	Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	Poin	31,09	31,09	36,27	41	43	45	47	47	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Nilai Sakip BAPPEDA	Kategori/nilai	B	B	B	BB	BB	BB	A	A	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Predikat (Nilai)	4,73	4,73	15,55	17,00	17,50	18,00	18,50	18,50	IKU Inspektorat
27	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
28	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Amplas
29	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Amplas
31	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas
32	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Amplas
33	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area
34	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Area
35	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	pemerintahan umum										
36	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Area
37	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Barat
38	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	N/A	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	53,9 (CC)	53,9 (CC)	51,85 (CC)	63 (B)	71 (BB)	75 (BB)	80 (A)	80 (A)	IKU Sekretariat Daerah
40	Nilai SAKIP Kota Medan	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (A)	81 (A)	81 (A)	IKU Sekretariat Daerah
41	Nilai EKPPD	Poin	3,20 Poin	3,20 Poin	3,32 Poin	3,40 Poin	3,43 Poin	3,46 Poin	3,50 Poin	3,50 Poin	IKU Sekretariat Daerah
42	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,15	4,15	4,21	4,21	4,05	4,35	4,45	4,45	IKU Sekretariat Daerah
43	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC	B	B	B	BB	BB	A	A	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	C	CC	B	BB	A	A	A	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
45	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)	A (81)	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
46	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B	B	B	B	B	B	B	B	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C-	C-	C-	C+	B	B	B	B	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
48	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC (50.5)	CC (50.5)	B (60.9)	B (60.10)	B (60.15)	B (60.20)	B (60.25)	B (60.25	IKU Badan Pendapatan Daerah
49	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	BB	CC	BB	B	B	A	A	AA	IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah
50	Indeks pengelolaan	Poin	C	C	C	A	A	A	A	A	IKU Badan Keuangan dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	keuangan daerah										Aset Daerah
51	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (65)	B (65)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)	A (81)	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
52	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C	C	B (62,75)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (75)	BB (75)	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
53	Persentase masyarakat dan kelompok masyarakat/ lembaga yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
54	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
55	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
56	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
57	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
58	Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat (IPLM)	Poin	12,08	9,87	76,55	77	77,45	77,9	78,35	78,35	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
59	Tingkat ketersediaan arsip	Poin	72,7	73,75	74,01	74,27	74,53	74,79	75,05	75,05	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Rasio koleksi perpustakaan persatuan penduduk	Poin	1:27	1:27	1:26	1:25	1:24	1:23	1:22	1:22	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
61	Rasio Perpustakaan Per Seribu Penduduk	Poin	0,361	0,44	0,52	0,599	0,678	0,71	0,734	0,734	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
62	Persentase Masyarakat yang mendapatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	manfaat										
63	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Barat
64	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat
65	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Barat
66	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Baru
67	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
68	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
69	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Baru
70	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Baru
71	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan
72	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Belawan
73	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan
74	Persentase permasalahan/pengadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Belawan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	an konflik sosial yang ditangani										
75	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Deli
76	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli
77	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Deli
78	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli
79	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Deli
80	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Denai
81	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
82	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Denai
83	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
84	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Denai
85	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Helvetia
86	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia
87	Cakupan pengkoordinasian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum										
88	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba Tanpa Narkoba	Persen	N/A	86,75	87,42	88,74	90,07	91,39	92,72	92,72	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
89	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	70,25	70,25	79,56	83,5	85,48	86,9	89,65	89,65	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	Tingkat waktu tanggap (response time rate = 15 Menit) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	78,86	78,85	78,90	85	90	95	100	100	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
93	Persentase kejadian kebakaran yang ditanggulangi masyarakat	%	4	4,01	4,13	6	8	10	12	12	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
94	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
95	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	94	93,76	93,85	94	94,1	94,2	94,3	94,3	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
96	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
											Keluarga Berencana
97	Total Fertillity Rate (TFR)	Skor	2,01	2,01	1,9	2,13	2,12	2,11	2,1	2,1	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
98	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	63,91	63,91	64,31	64,4	64,45	64,55	64,65	64,65	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
99	Ratio Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	%	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
100	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	35,04	35,04	19,18	5,00	5,03	5,10	5,13	5,13	IKU Badan Pendapatan Daerah
101	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	27,22	27,22	31,17	15,51	5,00	5,00	5,00	5,00	IKU Badan Pendapatan Daerah
102	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	%	62,61	62,61	67,36	70,14	72,15	76,24	80,01	80,01	IKU Badan Pendapatan Daerah
103	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	80	82	83	84	85	85	IKU Dinas Kesehatan
104	Prevalensi Stunting	%	0,39	0,39	0,31	0,28	0,17	0,15	0,1	0,10	IKU Dinas Kesehatan
105	Persentase cakupanan layanan jaminan kesehatan semesta/UHC	Persentase	80	76	96	97	98	98	98	98	IKU Dinas Kesehatan
106	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	7	7	10	10	10	10	10	10	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
107	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	69	68,95	73,48	90	90	90	99	99	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
108	Persentase Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan	%	Na	34,87	45,94	60,94	86,34	90,9	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	dan Kesiapsiagaan yang Tesampaikan ke Masyarakat										
109	Persentase Penanganan PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
110	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
111	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
112	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
113	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El); Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) ; Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	99	99	99	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
114	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ; Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	90	73	43	60	75	78	80	96	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
115	V/C Ratio Lalu Lintas	Indeks	0,72	0,72	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	IKU Dinas Perhubungan
116	Persentase Kenaikan Jumlah Penumpang Pada Angkutan Umum	%	2	2	2	2	2	2	2	12	IKU Dinas Perhubungan
117	Persentase layanan publik atau pemerintahan Berbasis Elektronik	%	17,39	17,39	30,43	50,43	69,57	82,61	95,6	95,6	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
118	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	83,56	88,22	89	89	89	89	89	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
119	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan yang berkaitan dengan	%	0,8	0,8	0,88	0,88	0,89	0,9	0,91	0,91	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	bidang keolahragaan										
120	Persentase pramuka siaga , penggalang, penegak, pandega yang aktif	%	100	100	50	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
121	Persentase dokumen/arsip Yang Dikelola dengan baik	Persen	24,21	24,21	34,21	44,21	44,75	48,14	51,42	51,42	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
122	Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)	Poin	71,22	71,61	71,72	71,77	71,8	71,83	71,88	71,88	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
123	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	Cc	Cc	Cc	B	B	BB	BB	IKU Inspektorat
124	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	Persen	-433,333	-433,333	18,75	5	5	5	5	5	IKU Inspektorat
125	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	Persen	44	44,68	66	78	78	78	78	78	IKU Inspektorat
126	Level Maturitas SPIP	Skor	2	2	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
127	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Helvetia
128	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Helvetia
129	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor
130	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor
131	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Johor

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
132	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Johor
133	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Kota
134	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
135	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Kota
136	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
137	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Kota
138	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Labuhan
139	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan
140	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Labuhan
141	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan
142	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Labuhan
143	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
144	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Maimun

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
145	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
146	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Maimun
147	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Marelan
148	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
149	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Marelan
150	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
151	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Marelan
152	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
153	Capaian kinerja pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
154	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
155	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
156	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan
157	Persentase permasalahan/pengadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Perjuangan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	an konflik sosial yang ditangani										
158	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Petisah
159	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
160	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
161	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Petisah
162	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Petisah
163	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia
164	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Polonia
165	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia
166	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Polonia
167	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Selayang
168	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang
169	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	pemerintahan umum										
170	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Selayang
171	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Selayang
172	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Sunggal
173	Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tembung
174	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	%	75	75	80	85	90	95	100	100	IKU Kecamatan Medan Tembung
175	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	%	75	75	80	85	90	95	100	100	IKU Kecamatan Medan Tembung
176	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Timur
177	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Timur
178	Cakupan pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Timur
179	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	B (70)	B (70)	B (70)	B (70)	BB (75)	BB (77)	BB (80)	BB (80)	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
180	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
181	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (82.15)	B (85)	B (87)	A (90)	A (90)	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
182	Cakupan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	pengkoordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum										Tuntungan
183	Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Kecamatan Medan Tuntungan
184	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
185	Persentase Rekomendasi/Kebijakan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
186	Persentase partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	75	79,3	80,5	81,45	83,52	85,44	90	90	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
187	Rangking standart nasional pendidikan	-	65	10	10	10	5	5	2	2	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
188	Meningkatkan layanan manajemen Pendidikan	Nilai (Predikat)	70	70	75,5	82,25	87,5	94,5	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
189	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APK/APM SD/MI)	%	78,86	79,15	82,25	85,35	85,9	87,85	89,5	89,5	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
190	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah	%	74,55	74,55	78,23	80,1	83,05	85	87,6	87,6	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
191	Persentase Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Baik	%	78,25	78,25	80,1	87,35	91,2	94,5	97,2	97,2	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
192	Persentase Angka Lulusan (AL) SD/MI	%	99	99	99	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
193	Persentase Angka Lulusan (AL) SMP/MTs	%	99	99	99	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
194	Persentase Guru Layak Mengajar (GLM)	%	85,92	85,92	90,25	92,7	95,3	98,75	100	100	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
195	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak	%	78,25	78,25	80,25	87,32	91,35	95,23	97,5	97,5	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
196	Persentase Permukiman Layak Huni	%	97,09	97,09	98,2	98,60	99	99,40	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
197	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman	%	63,01	63,01	67,38	75,18	82,97	90,76	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
198	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Aman	%	44,18	44,18	71,79	78,88	85,96	93,05	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
199	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	78,85	78,85	78,90	85	90	95	100	100	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
200	Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	%	4,13	4,13	4,13	6	8	10	12	12	IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
201	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	6,9	0,97	1,37	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
202	Prevalensi Stunting	%	0,39	0,39	0,31	0,31	0,17	0,15	0,1	0,1	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Fasilitasi Akses Pemasaran	%	74,97	75	75,2	80,4	82,3	85,5	87,7	87,7	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
204	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	A	A	A	A	A	A	A	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
205	Nilai indeks profesionalitas pegawai ASN	Nilai	46	49	52	55	58	61	61	61	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
206	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	19,03	19,03	21,23	25	26	27	28	28	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
207	Nilai Indeks Sistem Merit	Nilai (Predikat)	238	238	258,5	308,5	350	375	400	400	IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
208	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	CC	CC	B	B	A	A	A	A	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
209	Persentase Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti.	%	71,4	71,4	80	42,1	55,5	63,6	66,6	66,6	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Emisi Gas Rumah Kaca	ggCo2	4.364,34	4.340,25	5.188,13	5.021,51	4.854,89	4.688,27	4.521,65	4.521,65	Indikator Makro
2	Persentase UMKM Naik Kelas	%	N/A	N/A	15,1	20,54	25	25	25	25	IKU Kepala Daerah
3	Rasio PAD	%	37,85	37,96	40,93	51,46	49,77	53,33	56,80	56,80	IKU Kepala Daerah
4	Pertumbuhan investasi	Rp	-3.728.176	5.939.665.941.900	4.153.965.803.200	5.475.389.633.838	5.749.158.937.048	6.036.616.990.089	6.338.447.852.552	6.338.447.852.552	IKU Kepala Daerah
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	N/A	170.649	319.315	328.895	338.762	348.925	359.392	359.392	IKU Kepala Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Kawasan	N/A	93	93	126	126	130	130	130	IKU Kepala Daerah
7	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0,83	0,83	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase Realisasi Investasi	%	100	100	100	80	80	80	80	80	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Persentase Kondisi Mantap Jalan Daerah	%	89,85	89,78	94,03	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
10	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,73	2,57	2,66	2,77	2,78	2,79	2,8	2,8	IKU Dinas Pariwisata
11	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU Dinas Pariwisata
12	Persentase peninggalan bersejarah yang dilestarikan menjadi cagar budaya	%	75,15	75,15	79,2	81,23	84,25	86,3	89,65	89,65	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	82,35	82,35	84,5	86,3	87,2	88,2	90,5	90,5	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik	%	10	11	11	12	15	18	20	20	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,62	2,62	4,71	5,50-6,10	5,60-6,35	5,70-6,50	5,90-6,60	5,90-6,60	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Persentase tingkat inflasi	Nilai	2	2	6	3,00 - 4,50	2,25 - 3,75	2,00 - 3,40	1,80 - 3,10	1,80 - 3,10	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	27,22	27,22	31,17	15,51	5	5	5	5	IKU Badan Pendapatan Daerah
18	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan	Inovasi	21	21	13	21	45	60	70	70	IKU Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
19	Persentase Fakir Miskin dan Orang	%	70	65	68,70	70	70	70	70	71	IKU Dinas Sosial

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial										
20	Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	Persen	61	61,07	82,43	88	90	95	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	61,00	61,89	61,89	61,93	62,00	62,63	62,63	IKU Dinas Lingkungan Hidup
22	Persentase penanganan sampah	Persen	72	72,88	72,81	73,00	73,00	74,00	74,00	74,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
23	Pesentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga	Persen	10,00	10,14	9,62	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
24	Jumlah Kerja Sama dan Pemanfaatan Data	Dokumen	12	12	13	16	18	19	20	20	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Persentase Ketersediaaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan	%	85	85	87	89	90	95	100	100	IKU Dinas Perhubungan
26	Nilai Investasi	Rupiah	5.956.081.280.000	5.956.081.280.000	4.130.674.600.000	5.468.000.530.000	5.741.400.528.000	6.028.470.504.000	10.769.894.042.000	10.769.894.042.000	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Jumlah medali yang di peroleh atlit berprestasi Kota Medan di tingkat provinsi, nasional dan Internasional	buah	62	62	250	226	300	360	432	432	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
28	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal	unit	93	93	92	126	126	130	130	130	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Persentase Luas Daerah Genangan	%	30	29	27	25	20	15	10	10	IKU Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
30	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	38,20	38,20	11,8	25	33,3	50	100	100	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
31	Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	%	0	0	0	79,79	80,85	82,31	84,92	84,92	IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
32	Persentase UMKM Naik Kelas	%	14	14,5	15	20,54	21	21,5	22	22	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
											Perdagangan
33	Persentase Pertumbuhan IKM	%	3,73	4,5	4,73	5,34	5,5	5,57	5,61	5,61	IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8.4.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat *Outcome* Kota Medan Tahun 2021 – 2026

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	**Pendidikan**										
1	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79,57	79,57	82,68	83,45	84,87	85,9	86,89	86,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase ketersediaan Pengelolaan SD	%	78,2	80,25	83,65	87,5	88,75	92,1	95,5	95,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**Kesehatan**										
1	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Standar	%	72	72	75	78	79	80	85	85	Dinas Kesehatan
2	Persentase Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UKM dan UKP	%	75	75	75	78	80	82	85	85	Dinas Kesehatan
3	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	75	75	75	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	%	92	92	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	5	5	10	16	22	28	35	35	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Tingkat kemantapan jalan kota	%	94	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
											Konstruksi
3	Persentase Infrastruktur TPA yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	55	55	55	56	57	58	59	59	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
5	Persentase Pembangunan Dan Operasi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	65	65	65	65	65	65	70	70	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	74	75	76	84	88	90	92	92	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	38,20	38,20	11,8	25	33,3	50	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persen	4	4	4	6	8	10	12	12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**Sosial**										
1	Persentase Penyandang Lansia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya										
2	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	%	65,57	65,57	68,70	70	70	70	70	70	Dinas Sosial
7	**Tenaga Kerja**										
1	Persentase Pemenuhan Lowongan Pekerjaan	%	64,5	64,5	84,12	52	55	58	60	60	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	90,6	90,6	93,9	92	93	94	95	95	Dinas Ketenagakerjaan
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
1	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Skor	6,20	6,29	6,18	6,16	6,14	6,12	6,1	6,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Cakupan keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Keluarga	100	100	70	50	120	120	120	120	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
											Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase OPD yang Berperan dalam Pembangunan Responsif Gender	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Persentase Cakupan lembaga Pemerintah dalam mendukung pemenuhan Hak Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	**Pertanahan**										
1	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	82,35	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10	**Lingkungan Hidup**										
1	Persentase penghargaan lingkungan hidup	Persen	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase volume sampah yg terkelola	Persen	70	70	71	72	72	73	74	74	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase RTH Publik Yang Terkelola Dengan Baik	%	12	12	12	12	15	18	20	20	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terkelola dengan baik	%	0	0	0	79,79	80,85	82,31	84,92	84,92	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	28,26	28,26	28,93	29,60	30,27	30,94	31,61	31,61	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota										
11	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1	Persentase Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berbasis IT	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	75,22	75,22	61,93	50,31	53,35	55,5	56,5	56,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Cakupan pendampingan keluarga resiko stunting	%	18,05	18,05	18,05	85	90	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	**Komunikasi dan Informatika**										
1	Persentase Informasi yang Terpublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Aplikasi yang Memenuhi	%	17,39	17,39	30,4	50,4	69,57	82,6	95,6	95,6	Dinas Komunikasi dan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Standar Teknis Pembangunan Aplikasi										Informatika
15	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
1	Persentase Koperasi yang Sehat	%	20	26	22	60	60	60	60	60	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase pelaku usaha mikro yang berkembang	%	14	14,5	15	20,54	21	21,5	22	22	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	47	48	30	50	50	50	50	228	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase usaha mikro yang terfasilitasi	%	1	4	5,5	6,5	8,5	10,5	12,5	12,5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase Koperasi yang terfasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan perlindungan	%	5	5	10	15	20	25	30	30	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	**Penanaman Modal**										
1	Jumlah promosi penanaman modal	promosi	3	3	6	5	5	5	5	29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Jumlah Perusahaan yang diawasi	%	100	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	regulasi	3	3	1	2	2	2	2	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	**Kepemudaan dan Olahraga**										

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	%	100	100	50	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepeminpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	%	0,046	0,046	0,115	0,192	0,198	0,204	0,208	0,962	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	%	60	350	80	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragaannya	%	72,41	72,41	72,41	72,41	75,86	79,31	82,75	82,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	**Persandian**										
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	33	33	33	33	33	66	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	**Kebudayaan**										
1	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	80	80	85,25	87,65	89	92,3	96	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase pengembangan kebudayaan	%	76,15	76,15	80	83,25	86,75	89,5	92,75	92,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Persentase Permuseuman yang dikelola	%	78	78	80,12	83,25	85,24	87,2	88,56	88,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase Pembinaan Sejarah	%	75,5	75,5	78	80,1	82,5	85,35	90	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	78,25	78,25	80	83,45	85,24	88,03	92,75	92,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	**Perpustakaan**										
1	Persentase Pembinaan Perpustakaan	Persen	0,88	10,81	16,79	21,19	24,56	27,23	29,38	29,38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Koleksi Yang dimiliki Perpustakaan	Eksemplar	91702	97131	101864	104264	106664	109064	111464	111464	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
21	**Kearsipan**										
1	Jumlah layanan perizinan penggunaan arsip	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Pengelolaan Arsip	Persen	3,89	9,4	12,97	16,21	19,46	22,7	25,94	25,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Arsip	36,548	154,494	159,39	154390	149390	144390	139390	139390	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	**Pariwisata**										
1	Jumlah kegiataan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	3	3	3	3	4	4	4	4	Dinas Pariwisata
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	73	74	74	85	90	95	100	100	Dinas Pariwisata
4	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	1,17	1,17	1,17	1,45	1,46	1,47	1,48	1,48	Dinas Pariwisata
5	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3	3	3	3	3	3	3	18	Dinas Pariwisata
23	**Perdagangan**										
1	Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	%	60	85	100	90	100	100	100	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Tingkat inflasi	%	2	2	6	3,00 - 4,50	2,25 - 3,40	2,00 - 3,40	1,80 - 3,10	1,80 - 3,10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang beroperasi	%	60	60	65	70	75	80	80	80	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24	**Perindustrian**										
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah	%	3,73	4,5	4,73	5,34	5,50	5,57	5,61	5,61	Dinas Koperasi Usaha

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Industri Kecil dan Menengah										Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Kepatuhan Industri yang diawasi terhadap Regulasi	%	30	70	72	75	77	79	81	81	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
25	**Sekretariat DPRD**										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	2,7	2,8	3,013	3,03	3,05	3,07	3,1	3,1	Sekretariat DPRD
26	**Keuangan**										
1	Jumlah wajib pajak yang bertambah	orang	516,46	516,46	522,257	528,23	533,512	538,847	544,235	522,257	Badan Pendapatan Daerah
2	Jumlah objek pajak yang bertambah	Objek Pajak	15087	15087	20213	23175	24333	25549	26826	26826	Badan Pendapatan Daerah
3	Sertifikasi Aset (BMD) Tanah	Sertifikat	903	52	215	277	500	200	376	1779	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	**Pendidikan dan Pelatihan**										
1	Persentase pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28	**Penelitian dan Pengembangan**										
1	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Perangkat Daerah	Inovasi	21	21	13	21	45	60	70	70	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
29	**Inspektorat**										
1	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Persen	60	67,41	87,5	90	90	90	90	90	Inspektorat
30	**Kecamatan**										
1	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	71	71	91,5	95	97	98	100	100	Kecamatan Medan Tuntungan
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Timur

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	80	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Selayang
4	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	80	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
6	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	97	98	99	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
7	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	89	93,75	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
8	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
9	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	76	82	88	95	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
10	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	80	80	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Kota
11	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Johor
12	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	84,52	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
13	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
14	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	97	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Baru
15	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	80	85	97	100	100	100	Kecamatan Medan Barat
16	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	15	81	100	100	100	100	600	Kecamatan Medan Area
17	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
31	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
1	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap politik, etika politik yang berbudaya demi terwujudnya kondusifitas daerah	Persen	95	95	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Terciptanya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dimasyarakat dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Jumlah Kelurahan BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba)	Kelurahan	131	131	132	134	136	148	140	140	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Tercapainya perumusan kebijakan teknis pemantapan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	**Pangan**										
1	Persentasi Kelurahan Rawan Pangan Yang Tertangani	%	4,76	9,5	14	14	19	19	24	24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Persentase Keamanan Pangan	%	90	91	92	93	94	95	96	96	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	**Pendidikan**										
1	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SMP	%	78,65	82,5	85,3	88,56	90,15	92,5	95	95	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD	%	78,2	80,25	83,65	87,5	88,75	92,1	95,5	95,5	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	84,25	84,56	85,38	86,39	87,59	88,03	88,56	88,56	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Volume sampah yang ditangani	ton	645.012,56	645.012,56	628.749,22	458.986,77	465.340,32	449,867	453,32	2.651.858,737	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota	%	38,2	38,2	11,8	25	33,3	50	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	44,18	44,18	71,19	78,88	85,96	93,05	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Persentase Bangunan Gedung yang Terselenggara secara Tertib, Andal, Berkualitas dan Layak Huni	%	55,32	55,32	55,35	55,35	55,37	55,37	55,38	55,38	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Persentase Kawasan dan Lingkungan Permukiman yang ditata	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
3	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	55,32	55,32	55,35	55,37	55,38	55,4	55,43	55,43	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										
1	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	90,66	96,53	97	98	99	99	99	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Capaian Target Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	65	68,95	73,48	80	85	90	99	99	Satuan Polisi Pamong Praja
5	**Sosial**										
1	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	**Perhubungan**										
1	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	%	97,80	96,75	93,07	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
7	**Tenaga Kerja**										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten	%	100	100	98,8	92	93	94	95	95	Dinas Ketenagakerjaan
8	**Lingkungan Hidup**										
1	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	Persen	50	50	60	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen	85	85	90	90	95	95	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Persen	24,9	24,9	25	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	50	50	60	70	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Penigkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	Persen	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	%	86,48	86,48	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**										
1	Jumlah Koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan izin usaha	Koperasi	36	36	50	66	66	66	66	350	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	**Penanaman Modal**										
1	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,00	83,23	88,22	89	89	89	89	89,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	**Perpustakaan**										
1	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	**Kearsipan**										
1	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	6,7	10	15	20	25	30	35	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14	**Sekretariat Daerah**										
1	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Pengelolaan Barang dan Jasa yang Ditindaklanjuti	Poin	100	29	74	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Protokol dan Kepemimpinan yang Ditindaklanjuti	%	82	82	82	82	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
6	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
7	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
8	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
9	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Hukum yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase Rekomendasi Perbaikan Hasil Evaluasi EKPPD yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
15	**Perdagangan**										
1	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam perizinan usaha	%	70	70	75	80	85	90	90	90	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	**Perindustrian**										
1	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	%	12,32	12,32	15	17	19	21	23	23	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	**Kepegawaian**										
1	Persentase sistem informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi										Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	**Penelitian dan Pengembangan**										
1	Jumlah Rekomendasi Penelitian yang Ditindaklanjuti OPD	Rekomendasi	5	5	8	8	6	11	12	12	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
19	**Inspektorat**										
1	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Persen	35	38,20	89,5	90	90	90	90	90	Inspektorat
20	**Kecamatan**										
1	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	97,7	97,7	98	98	98	98	100	100	Kecamatan Medan Tuntungan
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Timur
3	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Selayang
4	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
5	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	80	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
6	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
7	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	79,30	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
8	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	97	98	99	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
9	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	76	82	88	95	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
10	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Kota
11	Cakupan penyelenggaraan	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Johor

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	pemerintahan dan pelayanan publik										
12	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	75	80	85	90	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
13	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
14	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	97	90	100	100	100	100	Kecamatan Medan Baru
15	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Barat
16	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Area
17	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
18	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
19	Capaian target Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta penegakan Perda Perkada Kota Medan	Persen	100	99	98	100	100	100	100	600	Kecamatan Medan Area
20	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	85	90	95	97	100	100	Kecamatan Medan Tuntungan
21	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Timur
22	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Selayang
23	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	85	85	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
24	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
25	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
26	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
27	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	88	88	88	88	88	95	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
28	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Kota
29	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Johor
30	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	90	90	90	90	90	95	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
31	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
32	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	90	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Baru
33	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	99	99	99	99	99	100	100	100	Kecamatan Medan Barat
34	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
35	Capaian Target Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
21	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
1	Terkonsolidasinya Penanganan dan Pencegahan Potensi konflik di daerah tepat waktu	Persen	90	90	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	**Non Urusan Bidang**										
1	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Protokol dan Kepemimpinan yang Ditindaklanjuti	%	82	82	82	82	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Penataan Organisasi yang Ditindaklanjuti	%	70	70	70	70	70	72	75	75	Sekretariat Daerah
32	**Pangan**										
1	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi hasil Perikanan	%	2	5	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Daerah	%	4,34	8,69	13,04	13,04	17,39	21,75	26,09	26,09	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
7	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92	92	92,9	93	94	95	96	96	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80	80	80,5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	**Pendidikan**										
1	Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	82,5	84,52	85,55	85,87	86,01	86,48	87,13	87,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	85,24	85,24	87,1	88,56	90,15	93,56	98,75	98,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
1	Persentase Kondisi Baik Jalan Daerah	%	53,38	51,81	51,65	51,83	60	65	70	70	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
3	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1	Presentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	%	80	80	80	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	50,01	51,5	57,1	62,8	68,5	74,2	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	**Statistik**										
1	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	**Sekretariat Daerah**										
1	Nilai SAKIP Pemko Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (A)	81 (A)	81 (A)	Sekretariat Daerah
2	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	A (89)	A (90)	A (90)	Sekretariat Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
4	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang Ditindaklanjuti	%	80	80	80	80	80	85	90	90	Sekretariat Daerah
5	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
6	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
7	Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (A)	81 (A)	81 (A)	Sekretariat Daerah
7	**Sekretariat DPRD**										
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62	68	70,45	72	74	77	81	81	Sekretariat DPRD
8	**Perencanaan**										
1	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	22	22	23	24	25	26	27	27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	15	15	16	17	18	19	20	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	90	90	92	92	96	98	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	80	80	81	81	83	84	85	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	92	94	96	98	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	**Keuangan**										

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Realisasi APBD	%	80,65	79	80,65	95	95	95	95	95	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Laporan Keuangan Kota Medan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	**Kecamatan**										
1	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	80	85	90	90	95	100	100	Kecamatan Medan Tuntungan
2	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Timur
3	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Selayang
4	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	47	47	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia
5	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	80	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
6	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	10	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
7	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	30,10	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
8	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Maimun
9	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	76	82	88	95	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
10	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Kota
11	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	90	90	94	95	95	100	100	100	Kecamatan Medan Johor

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
12	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	60	37,5	70	80	90	95	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
13	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
14	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	95	85	100	100	Kecamatan Medan Baru
15	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	80	85	99	100	100	100	Kecamatan Medan Barat
16	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	315400000	233888000	338310000	338310000	338310000	338310000	100	Kecamatan Medan Area
17	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Amplas
11	**Non Urusan**										
1	Total Nilai SAKIP Pemko Komponen Pelaporan dan Pengukuran Kinerja	Poin	65 (B)	65 (B)	68 (B)	70 (B)	75 (BB)	80 (A)	81 (A)	81 (A)	Sekretariat Daerah
2	Survey Kepuasaan Internal	%	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	B (85)	A (89)	A (90)	A (90)	Sekretariat Daerah
3	Rata-rata Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Poin	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,6	3,6	Sekretariat Daerah
4	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	80	84,37	94	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	86	86	97	97,5	98	99	100	100	Kecamatan Medan Tuntungan
6	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	75	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Selayang
7	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Polonia

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Daerah Yang Tersedia										
8	Survey Kepuasaan Internal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
9	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	1	1	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
10	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Petisah
11	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Perjuangan
12	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B (82)	B (85)	b (88)	B (88)	Kecamatan Medan Marelan
13	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Marelan
14	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Marelan
15	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	B	B	B	Kecamatan Medan Labuhan
16	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	72	73	74	75	78	80	85	85	Kecamatan Medan Labuhan
17	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Labuhan
18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	79	79	79	79	82	85	88	88	Kecamatan Medan Kota
19	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	90	90	90	90	90	95	100	100	Kecamatan Medan Johor

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
20	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	94,51	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Johor
21	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	77 (B)	80 (B)	83V(B)	87 (B)	87 (B)	Kecamatan Medan Helvetia
22	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	85	85	85	85	90	95	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
23	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Helvetia
24	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	B	B	B	Kecamatan Medan Deli
25	Survey Kepuasaan Internal	%	B	B	B	B	B	B	B	B	Kecamatan Medan Deli
26	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
27	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Deli
28	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Medan Baru
29	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (79,30)	B (79,30)	B (79,30)	B	B	B	B	B	Kecamatan Medan Barat
30	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	82	83	84	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Barat
31	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	85	85	85	85	100	100	100	100	Kecamatan Medan Barat
32	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	CC	CC	CC	B	BB	B	A	A	Kecamatan Medan Amplas

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
33	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	70	71,86	90,7	92	92	92	92	92	Inspektorat
34	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	A	A	A	A	A	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
35	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
36	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
37	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
38	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
39	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	A	A	A	A	A	A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
40	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
42	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	66,50	65,30	63,70	65,00	70,00	80,00	80,00	80,00	Dinas Perhubungan
43	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	84,47	89,79	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
44	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam	Persen	100	84,47	89,79	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Kondisi Baik										Satu Pintu
45	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	84,47	89,79	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	B	B	B	Dinas Pemuda dan Olahraga
47	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
48	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
49	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	75	75	75	80	80	80	80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
53	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
54	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
55	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata
56	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	C	B	B	B	B	A	A	A	Dinas Lingkungan Hidup
57	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	85	90	95	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
58	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
59	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90	95	95	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
60	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	Dinas Komunikasi dan Informatika
61	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
62	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
63	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
64	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	85	85	85	85	85	88	90	90	Dinas Kesehatan
65	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
66	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	tepat waktu										
67	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
68	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	77 (B)	77 (B)	77 (B)	77 (B)	80 (B)	85 (B)	89 (A)	89 (A)	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
71	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
72	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
73	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	B	B	B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
74	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	75	78	78	80	82	82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
76	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	57,6	57,6	63,15	63,25	63,35	63,45	63,55	63,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
77	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
78	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
79	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	B	A	A	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
80	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	85	90	95	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
81	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	90	85	90	90	95	95	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
82	Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
83	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	80	85	90	95	99	99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
84	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
85	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
86	Persentase dokumen perencanaan keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB IX
PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, target yang telah ditetapkan. RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan wajib non Pelayanan Dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Medan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan , Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota Medan harus konsisten dan Sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di kota Medan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan, selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek,

karena setiap ketidak sesuaian baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.

4. Dalam Pelaksanaan program pembangunan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Medan, dapat pula menggunakan anggaran lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Rensponsibility* (CSR), hibah/ bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman Transisi

Masa jabatan Walikota / Wakil Walikota Kota Medan periode 2021-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sementara RPJMD tetap akan berlaku sesuai periode perencanaan dari tahun 2021-2026. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah tetap harus memedomani dokumen RPJMD. Oleh karena itu, bagi Pejabat Daerah yang ditunjuk menjadi Walikota Medan untuk periode selanjutnya harus tetap melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.